

SPINNING THE LIMIT TO WIN FROM PANDEMIC



2020

Laporan Tahunan
Annual Report

SPINNING THE LIMIT TO WIN FROM PANDEMIC



Penumpang/Passengers

425.428/hari
425.428/day

Peningkatan/Increase **2,8%**
Customer Satisfaction Index

2020

88,9%



2019

86,1%



WE WIN THE CHALLENGE

Rp77.685.981.998

Menghadapi tantangan dinamika bisnis yang extraordinary dari situasi pandemi, Kereta Commuter Indonesia senantiasa memberdayakan dan memperkuat sumber daya yang dimiliki. Seluruh elemen Perseroan mengerahkan upaya terbaiknya dalam mengakomodasi mobilitas masyarakat dengan layanan yang aman, berkualitas, dan dapat diandalkan, sehingga perekonomian Indonesia tetap berjalan.

Perseroan tetap beroperasi melayani tren penumpang harian yang meningkat dari tahun sebelumnya menjadi **425.428 penumpang per hari** atau **997 perjalanan KRL per hari**. Setiap perjalanan dilakukan dengan penerapan **Protokol Kesehatan** yang sangat ketat sehingga penumpang merasa aman saat melakukan perjalanan dengan transportasi publik.

Dari upaya yang dilakukan, Kereta Commuter Indonesia berhasil memenangkan kompetisi di tengah pandemi. Pada akhir tahun 2020, Perseroan mencatatkan laba sebesar **Rp77.685.981.998**, atau termasuk pencapaian tertinggi di industri transportasi di tengah situasi pandemi. Perseroan juga meraih peningkatan **Customer Satisfaction Index sebesar 2,8%** yang menegaskan kapasitas Kereta Commuter Indonesia sebagai entitas adaptif dan resilien di kondisi yang penuh tantangan.

Facing extraordinary business dynamics from the pandemic situation, Kereta Commuter Indonesia strives to optimize and strengthen its resources. All the Company's elements exert their best efforts to accommodate public's mobility with safe, quality, and reliable services. We are armed with the ultimate vision to empower the course of the Indonesian economy.

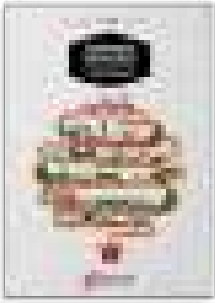
The Company continues its operation with the trend of daily passengers reaching 425,428 passengers per day or 997 KRL trips per day, higher than the previous year. Each trip is safeguarded with the implementation of very strict Health Protocols to provide a sense of safety for public transportation passengers.

As the result, Kereta Commuter Indonesia managed to win the pandemic. By the end of 2020, the Company recorded profit of Rp77,685,981,998, the highest achievement in the transportation industry amidst the pandemic situation. The Company also recorded a higher Customer Satisfaction Index of 2.8%, which confirms our capacity as an adaptive and resilient entity in challenging conditions.



KESINAMBUNGAN TEMA

Theme Sustainability

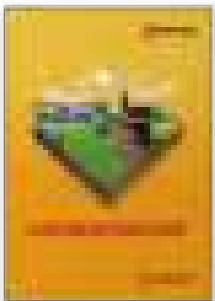


2016

Towards Excellent Public Services and Beyond

Sebagai penyedia layanan transportasi publik, PT Kereta Commuter Indonesia yang dahulu disebut PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) terus berbenah tidak hanya untuk memberikan pelayanan terbaik tetapi juga menumbuhkan budaya bertransportasi publik yang baik bagi seluruh pengguna KRL Commuter Line. Di tengah tingkat mobilitas masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya yang terus meningkat setiap tahunnya, KCJ membangun pilar-pilar budaya bertransportasi dengan sentuhan teknologi dan kontrol yang ketat. Tingginya laju penumpang harus diiringi oleh manajemen peron dan manajemen keselamatan yang baik guna memastikan perpindahan penumpang secara aman. Kebutuhan penumpang yang terus berubah mendorong kami untuk terus mencari, mengenali dan memenuhi kebutuhan penumpang untuk membawa KRL Commuter Line menuju standar pelayanan publik terdepan dan lebih baik lagi.

As a public transportation provider, PT Kereta Commuter Indonesia, formerly known as PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) is committed on continuous improvement not only to provide excellent public transportation services but also to grow positive transportation culture among all passengers of KRL Commuter Line. Amidst rapidly growing mobility of the society in DKI Jakarta and surrounding area every year, KCJ builds pillars of the transportation culture with touch of technology and tight control. High level of passengers stream shall be safeguarded by appropriate platform management and safety management to guarantee safety passengers mobilization. Changing needs of the customers has encouraged us to continuously seek, recognize and fulfill every need of the passenger, beyond primary transportation needs, to bring KRL Commuter Line towards excellent public services and beyond.



2017

A Transformation for Greater Service

Pada tahun 2017, Perseroan mencatat *milestone* baru melalui perubahan nama dari PT Kereta Commuter Jabodetabek (KCJ) menjadi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang menandai transformasi perluasan rentang jangkauan layanan. Seiring dengan perubahan nama tersebut, Perseroan hadir sebagai penyedia layanan komuter, tidak hanya di wilayah Jabodetabek tetapi memproyeksikan rentang jangkauan hingga seluruh wilayah Indonesia. Realisasi perluasan jangkauan pada tahun 2017 meliputi Stasiun Rangkasbitung dan Stasiun Cikarang yang diikuti oleh pembukaan stasiun di beberapa wilayah sekitar Jabodetabek antara lain Stasiun Citeras, Bekasi Timur, Tambun, Cibitung dan Angke. Untuk memastikan keandalan layanan komuter yang diberikan, Perseroan juga terus melakukan berbagai inovasi serta modernisasi layanan KRL Commuter Line, serta perbaikan pelayanan kepada pengguna pada tahun 2017, termasuk pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan *underpass*. Selain fokus pada perbaikan fasilitas, konektivitas antar moda angkutan dan keselamatan pengguna, Perseroan juga berhasil menurunkan tingkat gangguan dan kelambatan KRL. Langkah untuk terus memperbaiki fasilitas dan pelayanan merupakan komitmen nyata Perseroan dalam mendukung *Transport Oriented Development* (TOD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah menuju integrasi antar-moda transportasi di Indonesia.

The Company marked a new milestone in 2017 by transforming the name from PT Kereta Commuter Jabodetabek (KCJ) into PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) representing transformation of service coverage expansion. In line with the name changing, the Company is operated as a commuter service provider not only in Jabodetabek Area but projecting the service coverage across Indonesian region. Realization of the coverage expansion in 2017 has covered Rangkasbitung Station and Cikarang Station followed by opening stations in Jabodetabek area, such as Citeras, Bekasi Timur, Tambun, Cibitung and Angke Stations. To guarantee reliability of provider commuter services, the Company also continuously innovates and modernizes KRL Commuter Line services and improves services to the users throughout 2017, including building Passenger Walking Bridge (JPO) and underpass. Besides focusing on facilities improvement, connectivity among transportation modes and users' safety, the Company also successfully reduced level of KRL disruption and late schedule. The initiatives of continuous improvement on the facilities and services reflect the Company's concrete commitment in supporting Transport Oriented Development (TOD) initiated by the Government towards inter-modes transportation integration in Indonesia.



2018

Achieving Success
Beyond Boundaries

Setelah melakukan transformasi, Perseroan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh *stakeholders* dengan melakukan berbagai inovasi, meningkatkan fasilitas, serta melanjutkan integrasi moda transportasi. Segala tantangan, rintangan, dan batasan yang akan dihadapi merupakan motivasi bagi Perseroan dalam meraih keberhasilan dan kesuksesan di masa depan.

After the transformation, the Company continues to commit providing the best service to all stakeholders by conducting various innovations, improving facilities, and continuing the integration of transportation modes. All kind of challenges, obstacles, and limits that will be encountered are the motivations for the Company in achieving success and accomplishment in the future.



2019

Moving Forward:
for Swift Integrated
Mobility

Kereta *commuter* milik PT KCI kini menjadi sarana transportasi terbaik yang digunakan oleh para penumpang transportasi umum. Jalur kereta *commuter* yang terintegrasi mulai dari Cikarang, Rangkasbitung, Tanjung Priok, Jakarta Kota hingga Bogor memberikan kemudahan bagi penumpang untuk menunjang tingkat mobilitas dan produktivitas yang tinggi. Dengan demikian, PT KCI terus memberikan inovasi-inovasi di tiap titik pelayanan stasiun terintegrasi. Pembangunan ruang-ruang menyusui dan juga penghijauan di area stasiun merupakan beberapa poin dari keseluruhan inovasi yang dicanangkan PT KCI. Pencapaian ini membawa PT KCI menerima berbagai penghargaan atas kualitas layanan yang diberikan dan juga memberikan pencapaian yang melebihi target yang ditetapkan oleh Perseroan di awal tahun.

Penguatan dalam Proses penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) juga menjadi salah satu pengembangan layanan yang dilakukan oleh Perusahaan. PT KCI siap untuk menunjang mobilitas cepat dan juga siap untuk menjadi sarana transportasi darat terbaik pilihan penumpang Indonesia.

PT KCI commuter trains are now being the best transportation choice by the public transport passengers. Integrated commuter rail lines ranging from Cikarang, Rangkasbitung, Tanjung Priok, Jakarta Kota to Bogor provide convenience for passengers to support high levels of mobility and productivity. PT KCI continues to provide innovations at every point of the integrated station service. The development of nursing rooms and also reforestation in the station area were few points from the overall innovation proclaimed by PT KCI. This achievement brought PT KCI to receive various awards for the quality of the services provided and also provide an achievement that has been set by the company in the early years.

Strengthening in the implementation process of Good Corporate Governance (GCG) is also one of the service developments undertaken by the Company. PT KCI is ready to support fast mobility and also ready to be the best ground transportation option for Indonesian passengers.



DAFTAR ISI

Table of Content

01

Ikhtisar Kinerja 2020

2020 Performance Highlights

10	Kilas Kinerja Performance Highlights
12	Ikhtisar Keuangan Financial Highlights
12	Ikhtisar Posisi Keuangan Statement of Financial Position
14	Grafik Ikhtisar Keuangan Financial Highlights Graphic
16	Ikhtisar Operasional Operational Highlights
17	Ikhtisar Saham Share Highlights
17	Aksi Korporasi Corporate Action
19	Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham Temporary Stock Trading Suspension and/or Delisting
20	Peristiwa Penting 2020 2020 Significant Events

02

Laporan Manajemen

Management Report

33	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report
43	Laporan Direksi Board of Directors Report

03

Profil Perusahaan

Company Profile

54	Identitas Perusahaan Corporate Identity
56	Jejak Langkah Milestone
60	Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certification
64	Riwayat Singkat Perseroan Company's Brief History
66	Maksud dan Tujuan Purpose and Objective
67	Bidang Usaha Line of Business
70	Wilayah Operasional Operational Area

04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

72	Struktur Organisasi <i>Organizational Structure</i>
74	Visi dan Misi <i>Vision and Mission</i>
77	Logo dan Perubahannya <i>Logo and Transformations</i>
81	Profil Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Profile</i>
86	Profil Direksi <i>Board of Directors Profile</i>
91	Profil Pejabat Eksekutif <i>Executive Officers Profile</i>
100	Struktur dan Komposisi Pemegang Saham <i>Structure and Composition of Shareholders</i>
103	Struktur Grup dan Asosiasi Perseroan <i>Corporate Group and Association Structure</i>
113	Sumber Daya Manusia <i>Human Resources</i>
148	Teknologi Informasi <i>Information Technology</i>
167	Akses Informasi Daftar Pemegang Saham Bulanan, Triwulanan, dan Semester <i>Information Access on Monthly, Quarterly, and Semi-Annually Shareholders Register</i>
167	Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Ventura Bersama <i>List of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures</i>
168	Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal <i>Name and Address of Capital Market Supporting Institutions and Professionals</i>
169	Informasi pada Website Perseroan <i>Information on the Company's Website</i>
171	Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal <i>Education and/or Training for the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit</i>

174	Kondisi Makroekonomi Indonesia dan Tinjauan Industri di 2020 <i>Macroeconomic Condition of Indonesia and Industry Overview in 2020</i>
177	Permintaan Produk Secara Nasional <i>National Product Demand</i>
179	Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha <i>Operating Overview Per Business Segment</i>
181	Tinjauan Kinerja Keuangan <i>Financial Performance Review</i>
198	Kemampuan Membayar Utang <i>Solvency</i>
199	Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal <i>Capital Structure and Capital Structure Policy</i>
200	Investasi Barang Modal <i>Capital Investment</i>
202	Perbandingan antara Target pada Awal Tahun Buku Dengan Hasil yang Dicapai (Realisasi), dan Target atau Proyeksi yang Ingin Dicapai untuk Satu Tahun Mendatang <i>Comparison between Targets at Beginning of Fiscal Year with Achievement (Realization) and Target or Projection for Next Year</i>
202	Key Performance Indicator <i>Key Performance Indicator</i>
203	Tingkat Kesehatan Perusahaan <i>Company Soundness Level</i>
203	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan <i>Subsequent Material Information and Facts after Accountant Reporting Date</i>
203	Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar <i>Marketing Aspect and Market Share</i>



05

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

204	Rencana Realisasi Pengembangan Strategis Bisnis 2021 <i>Business Strategic Realization Plan in 2021</i>
205	Prospek Usaha <i>Business Prospect</i>
206	Prospek Industri Masa Depan <i>Future Industry Prospects</i>
208	Informasi Material Terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal <i>Material Information Related to the Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition or Restructuration of the Debt/Capital</i>
208	Kebijakan Dividen <i>Dividend Policy</i>
209	Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perseroan (ESOP/MSOP) <i>Employee and/or Management Stock Option Plan (ESOP/MSOP)</i>
209	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum <i>Realization of Public Offering Proceeds</i>
209	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi <i>Material Information with Conflict of Interest and/or Transaction with Affiliated Party</i>
212	Saldo dan Transaksi Signifikan dengan Pihak Berelasi <i>Significant Balance and Transaction with Related Parties</i>
213	Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan <i>Change in Regulation with Significant Impact to the Company</i>
214	Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perseroan pada Tahun Buku Terakhir <i>Changes in Accounting Policy Implemented in Current Fiscal Year</i>
216	Informasi Keberlangsungan Usaha <i>Information on Business Continuity</i>

220	Tata Kelola Perusahaan <i>Good Corporate Governance</i>
221	Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan <i>Objectives of Corporate Governance Implementation</i>
222	Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan <i>Commitment to Implementation of Corporate Governance</i>
223	Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan <i>Principles of Corporate Governance</i>
226	Jejak Langkah Unit GCG <i>The Step of The GCG Unit</i>
227	Kegiatan Implementasi Tata Kelola Perusahaan Tahun 2020 <i>Corporate Governance Implementation Activity 2020</i>
229	Kebijakan dan Struktur Tata Kelola Perusahaan <i>Corporate Governance Policy and Structure</i>
230	Penilaian Penerapan Good Corporate Governance <i>GCG Assessment</i>
258	Road Map GCG <i>GCG Road Map</i>
259	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) <i>General Meeting of Shareholders (GMS)</i>
269	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>
284	Direksi <i>Board of Directors</i>

06

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

306	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi <i>Frequency and Attendance Level of Board of Commissioners and Board of Directors Meetings</i>
328	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Directors</i>
330	Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris <i>Committees Under the Board of Commissioners</i>
341	Kebijakan Remunerasi <i>Remuneration Policy</i>
347	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>
358	Audit Internal <i>Internal Audit</i>
384	Akuntan Publik <i>Public Accountant</i>
389	Sistem Pengendalian Internal <i>Internal Control System</i>
391	Manajemen Risiko <i>Risk Management</i>
401	Perkara Penting yang Dihadapi Perseroan <i>Legal Disputes</i>
402	Publikasi 2020 <i>Publication in 2020</i>
403	Kode Etik Perusahaan <i>Company's Code of Conduct</i>
426	Sistem Pelaporan Pelanggaran <i>Whistleblowing System</i>
435	LHKPN <i>LHKPN</i>
438	Akses Informasi dan Data Perseroan <i>Access to Company Information and Data</i>

444	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan <i>Corporate Social Responsibilities</i>
447	Landasan Penerapan dan Lingkup CSR <i>Basis of Implementation and Scope of CSR</i>
448	Struktur Pengelola <i>Management Structure</i>
451	Metode dan Lingkup Due Diligent Terhadap Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan <i>Due Diligence Towards Social, Economic, and Environmental Impacts</i>
453	Strategi Penerapan CSR <i>CSR Implementation Strategies</i>
454	Isu-Isu Penting Sosial, Ekonomi dan Lingkungan <i>Important Issues concerning Social, Economy and Environment</i>
457	Kegiatan CSR dalam Bidang Lingkungan Hidup <i>CSR Activities Related to the Environment</i>
459	Kegiatan CSR Dalam Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan <i>CSR Activities Related to the Social and Community Development</i>
461	Kegiatan CSR Dalam Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja <i>CSR Activities Related to Occupational, Health, and Safety Employment</i>
464	Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia <i>The Company Responsibility Related to Human Rights</i>
468	Kegiatan CSR Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Kepada Konsumen <i>Corporate Social Responsibility Towards Customers</i>
473	Tanggung Jawab Sosial Terkait Core Subject Operasi yang Adil <i>Social Responsibility Towards Equitable Operational Core Subject</i>



SPINNING THE LIMIT
TO WIN FROM PANDEMIC



IKHTISAR KINERJA 2020

2020 Performance Highlight

-
- 10 **Kilas Kinerja**
Performance Highlights
 - 12 **Ikhtisar Keuangan**
Financial Highlights
 - 12 **Ikhtisar Posisi Keuangan**
Statement of Financial Position
 - 14 **Grafik Ikhtisar Keuangan**
Financial Highlights Graphic
 - 16 **Ikhtisar Operasional**
Operational Highlights
 - 17 **Ikhtisar Saham**
Share Highlights
 - 17 **Aksi Korporasi**
Corporate Action
 - 19 **Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham
dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham**
*Temporary Stock Trading Suspension and/or
Delisting*
 - 20 **Peristiwa Penting 2020**
2020 Significant Events



01





KILAS KINERJA

Performance Highlights



Total **Pendapatan** tahun **2020** sebesar **Rp1.883.227.008.779** dari sebelumnya tahun 2019 sebesar Rp2.741.595.108.079

Total revenue in 2020 **Rp1,883,227,008,779** from Rp2,741,595,108,079 in 2019



Laba/Rugi Tahun **2020** sebesar **Rp77.685.981.998** dari sebelumnya tahun 2019 sebesar Rp251.929.526.514

Profit/Loss in 2020 **Rp77,685,981,998** from Rp251,929,526,514 in the previous year

TOTAL ASSET | Total Asset

Rp1.835.205.686.700



Total Jumlah **Penumpang** Tahun **2020** sebanyak **155.378.627** penumpang

Total number of passengers in 2020
155,378,627 passengers

Jumlah **Penumpang** Rata-Rata Per Hari **424.532** penumpang/hari

Average number of passengers per day
424,532

Total **Perjalanan** KRL Tahun **2020** sebanyak **343.240** Perjalanan KRL

Total Trip in 2020
343,240



Jumlah **frekuensi perjalanan KRL** per hari **940** perjalanan
Total frequency of KRL Trip per day **940**



Jumlah **jangkauan rute** **13.034.326 km**
Total route range **13,034,326 km**



Jumlah **Kilometer KA Penumpang** **5.324.941.112 km**
Total kilometers of KA Passenger **5,324,941,112 km**

Jumlah
Stasiun 105
Total **stations** 105

Jumlah **Okupansi Dinamis**
Total **Dynamic Occupancy**
28,1%



Indeks **Kepuasan Pelanggan**
4,45 atau **88,9%**
Customer Satisfaction Index **4.45** or **88.9%**

Jumlah **Loop KRL 96** Trainset
Number of EMU Loop **96** Trainset



Jumlah **pegawai 2.566** orang
Total **employees 2,566**



KPI Tahun **2020** sebesar
97,78
KPI Year **2020** is **97,78**



Jumlah
Penghargaan
Tahun **2020**
sebanyak **13**
Penghargaan

Total awards in 2020
13 awards

Tingkat Kesehatan Perusahaan
berdasarkan perhitungan menurut
Kep.Meneg BUMN
No: KEP-100/MBU/2002, memiliki
realisasi **skor** sebesar 88,50
dari program 86,00 atau tingkat
kesehatan Perseroan dengan
predikat **SEHAT "AA"**

Company Soundness Level based on the calculations referring to Decree of Minister of State-Owned Enterprises No:KEP-100/MBU/2002 was realized at 88.50 from 86.00 target, or categorized as Healthy "AA".



Skor Assessment
GCG 85,785 dengan
Predikat **"BAIK"**

GCG Assessment Score **85,785** Predicated as
"GOOD"

TOTAL Dana CSR | Total CSR Fund

Rp5.260.000.000



IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2019	2018	2017	2016
Pendapatan Revenues	1.883.277	2.741.595	2.537.731	2.722.469	2.044.957
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(1.403.659)	(1.881.533)	(1.809.872)	(1.574.558)	(1.328.312)
Laba Kotor Gross Profit	479.618	860.062	727.859	1.147.911	716.645
Beban Administrasi dan Umum Administration and General Expenses	(351.354)	(539.068)	(618.451)	(438.563)	(320.423)
Laba Usaha Operating Profit	128.264	320.994	109.408	709.348	396.222
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income (expenses)	(13.469)	22.068	(525.502)	(45.429)	(5.520)
Pajak Penghasilan Income Tax	(37.109)	91.133	(106.782)	(168.610)	(102.311)
Laba Bersih Net Profit	77.686	251.930	(309.311)	495.310	288.392
Laba Bersih per Saham Dasar (Ribuan Rupiah) Net Earnings per Share (in Thousand Rupiah)	337	1.093	(1.342)	2.149	1.251
EBITDA	241.506	460.957	(344.446)	782.705	473.547

IKHTISAR POSISI KEUANGAN

Statement of Financial Position

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2019	2018	2017	2016
ASET ASSETS					
Aset Lancar Current Assets	936.606	932.093	752.646	1.322.137	876.987
Aset Tetap-Bersih Fixed Assets-Net	770.923	781.838	674.671	619.298	533.575
Aset Tidak Berwujud Intangible Assets	2.596	3.894	6.899	3.415	5.123

Keterangan Description	2020	2019	2018	2017	2016
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	125.080	100.518	135.605	48.387	68.718
Jumlah Aset Total Assets	1.835.205	1.818.342	1.569.821	1.993.238	1.484.403
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY					
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	483.102	640.297	653.020	546.757	358.596
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	322.651	184.394	174.968	146.425	176.448
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	805.752	824.690	827.988	693.181	535.044
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.029.453	993.652	741.833	1.300.056	949.359
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	1.835.206	1.818.342	1.569.821	1.993.238	1.484.403
INDIKATOR KEUANGAN FINANCIAL INDICATORS					
Return on Equity (ROE)	8,47%	37,17%	(31,09%)	67,91%	45,84%
Return on Investment (ROI)	13,42%	26,27%	(22,76%)	39,42%	32,60%
Marjin Laba Operasional Operating Profit Margin	4,89%	12,51%	4,31%	26,06%	19,37%
Marjin Laba Bersih Net Profit Margin	4,13%	9,19%	(12,19%)	18,19%	14,10%
Rasio Kas Cash Ratio	126,60%	72,01%	64,33%	116,93%	144,45%
Rasio Lancar Current Ratio	193,87%	145,57%	115,26%	241,81%	244,56%
Periode Penagihan (hari) Collection Period (days)	13,58	14,26	12,71	25,51	50,19
Perputaran Total Aset Total Assets Turnover	108,20%	159,38%	169,66%	138,48%	142,11%
Rasio Ekuitas terhadap Total Aset Ratio of Equity to Total Assets	56,09%	54,65%	47,26%	65,22%	63,96%



GRAFIK IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights Graphic

Pendapatan Revenues



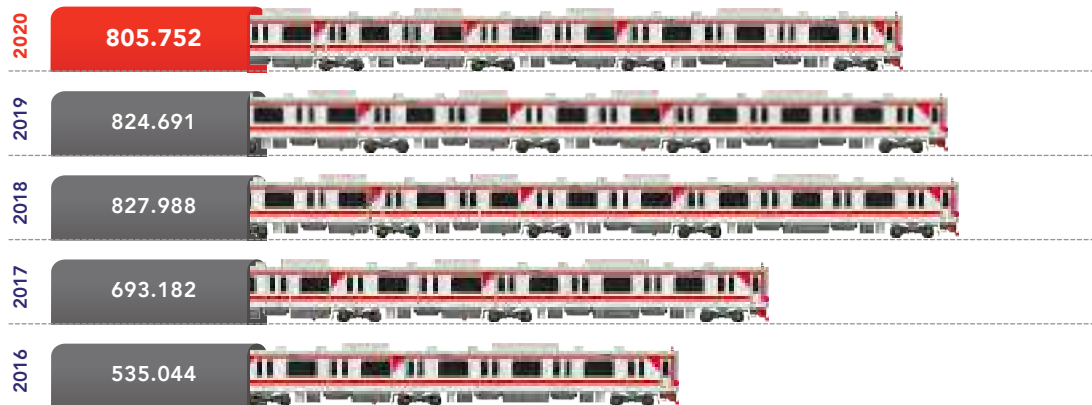
Laba Bersih Net Profit



Aset Assets



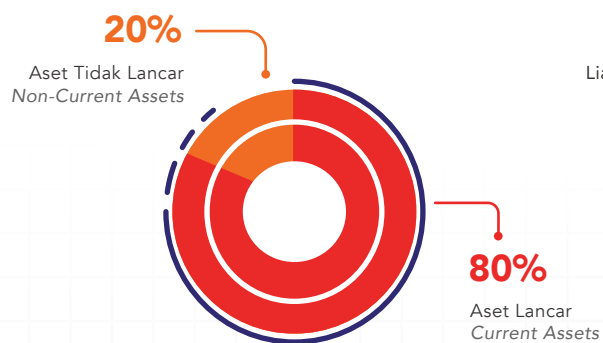
Liabilitas Liabilities



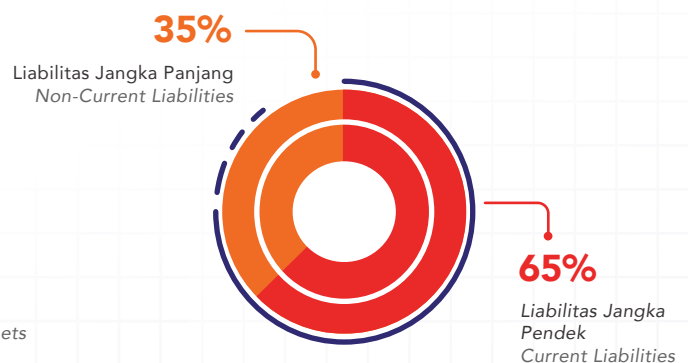
Ekuitas Equity



Komposisi Aset Tahun 2020 Assets Composition in 2020



Komposisi Liabilitas 2020 Liabilities Composition in 2020





IKHTISAR OPERASIONAL

Operational Highlights

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2020	2019	2018	2017	2016
Pendapatan Revenues					
Pendapatan Angkutan Penumpang Passenger Revenue	614.010	1.288.558	1.285.372	1.194.512	833.413
Pendapatan Pendukung KA Lainnya Other Train Supporting Revenue	178	507	1.089	40.764	32.733
Pendapatan Usaha Non-angkutan Non-passenger Revenue	81.800	168.728	117.550	92.416	99.462
Subsidi Pemerintah (PSO) Government Subsidy (PSO)	1.187.288	1.283.802	1.133.718	1.394.775	1.079.349
Jumlah Total	1.883.277	2.741.595	2.537.731	2.722.469	2.044.957
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues					
Perawatan Sarana Perkeretaapian Railways Rolling Stocks Maintenance	323.273	377.792	419.962	424.224	338.385
Pemakaian Bahan Bakar Fuel Used	180.625	177.213	181.832	171.638	162.989
Track Access Charge Track Access Charge	65.903	75.448	120.966	95.023	88.613
Pegawai Operasional Operational Officers	97.120	120.576	97.937	99.524	75.658
Penggunaan Prasarana (TAC) Infrastructure Used	-	-	-	-	-
Sewa Sarana dan Prasarana Stabling and Facilities Rental	7.218	2.836	2.893	2.818	4.241
Pemeliharaan Prasarana Pendukung Maintenance of Supporting Infrastructure	121.574	137.959	80.458	39.048	38.274
Penyusutan Sarana Gerak Rolling Stock Depreciation	46.244	38.853	34.354	32.160	33.279
Penyusutan dan Amortisasi Prasarana Pendukung Infrastructure Support Depreciation and Amortization	52.187	49.669	45.457	36.148	24.498
Cuci Sarana Railway Wash	33.661	29.512	29.504	22.967	20.179
Sub Jumlah Sub Total	927.804	1.099.860	883.720	923.551	786.116

Keterangan Description	2020	2019	2018	2017	2016
Beban Umum Stasiun Langsiran General Expenses of Backward Station					
Sewa Stasiun Station Rent	-	449.077	445.479	380.407	306.249
Beban K3 HSE Expenses	469.031	412.052	340.481	265.816	233.332
Pemeliharaan Maintenance	4.953	4.840	3.749	2.648	2.168
Pakaian Seragam Uniform	994	4.680	6.415	1.560	-
Lain-lain Others	877	1.024	381	576	446
Jumlah Total	1.403.659	1.881.533	1.809.872	1.574.558	1.328.311

IKHTISAR SAHAM

Share Highlights

Hingga 31 Desember 2020, Perseroan belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, sehingga informasi terkait harga saham baik dalam bentuk tabel dan grafik yang mencakup jumlah saham beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah, harga saham penutupan, dan volume perdagangan tidak dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2020, the Company has not listed its shares on Indonesia Stock Exchange, therefore information regarding share price both in the form of table and chart including total outstanding shares, market capitalization, highest share price, lowest share price, closing share price, and trading volume could not be presented in this Annual Report.

AKSI KORPORASI

Corporate Action

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan tidak melakukan aksi korporasi sehingga informasi terkait tanggal pelaksanaan aksi korporasi, rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, penurunan nilai nominal saham, jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi, dan harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi tidak dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2020, the Company has not carried out any corporate actions so that information related to the date of corporate action, stock split ratio, reverse stock, stock dividends, bonus shares, decrease in nominal value of shares, number of shares outstanding before and after corporate action, and stock prices before and after corporate action could not be presented in this Annual Report.





AKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM

Temporary Stock Trading Suspension and/or Delisting

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan belum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, sehingga informasi terkait penghentian sementara perdagangan saham dan/atau penghapusan pencatatan saham tidak tersedia di dalam Laporan Tahunan ini.

Until the end of 2020, the Company has not listed its shares on Indonesia Stock Exchange, thus information regarding temporary stock trading suspension and/or delisting is not available in this Annual Report.

Informasi Obligasi

Bonds Information

Perseroan belum menerbitkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi hingga akhir tahun 2020, sehingga informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalance, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk tidak dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

The Company has not issued bonds, sukuk or convertible bonds until the end of 2020, therefore information regarding total outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest/return rate, maturity date, and bonds/sukuk rating could not be presented in this Annual Report.



PERISTIWA PENTING 2020

2020 Significant Events



01 Januari 2020 | January 01, 2020

KAI Commuter Indonesia Menerapkan Go Green Office.

KAI Commuter Indonesia Implemented Go Green Office.



03 Januari 2020 | January 03, 2020

PT KAI dan KCI Mengadakan Layanan Kesehatan Gratis Untuk Korban Banjir di Lintas Duri-Tangerang.

PT KAI and KCI Hold Free Health Services for Flood Victims in Lintas Duri-Tangerang.



18 Januari 2020 | January 18, 2020

Menghargai Keberagaman C-Millennial, KCI Melakukan Aktivitas Sosial di Vihara Dhanagun Bogor.

Celebrating C-Millennial Diversity, KCI Conducted Social Activities at Vihara Dhanagun Bogor.



25 Januari 2020 | January 25, 2020

KCI Melakukan Sosialisasi Layanan Commuter Sekaligus Merayakan Imlek dengan Pengguna KRL di Stasiun Bogor.

KCI Socialized Commuter Services and Celebrated Chinese New Year with KRL Users at Bogor Station.



03 Februari 2020 | February 03, 2020

Konferensi Pers dan Sosialisasi & Layanan Kesehatan Bagi Pengguna KRL di Stasiun Tanah Abang Dalam Mencegah Penyebaran Virus COVID-19.

Press Conference, Socialization, and Health Services for KRL Passengers in Preventing the Spread of the COVID-19 Virus, at Tanah Abang Station.



07 Februari 2020 | February 07, 2020

KCI Meraih Penghargaan Gold Winner kategori The Best of Private Company InMA 2020 Majalah C-News edisi September 2019.

KCI Won the Gold Winner Award for The Best of Private Company InMA 2020, September 2019 edition of C-News Magazine.



17 Februari 2020 | February 17, 2020

Pengadaan Sarana KRL: Pengiriman Tahap 1 dari 5 tahap yang dijadwalkan di Tahun 2020, sebanyak 24 unit Kereta JR 205 dari Jepang.

Procurement of KRL Facilities: 24 units of JR 205 Trains from Japan, Phase 1 Delivery of 5 scheduled phases in 2020.



03 Maret 2020 | March 03, 2020

Sosialisasi dan Antisipasi COVID-19.

Socialization and Anticipation of COVID-19.



05 Maret 2020 | March 05, 2020

Konferensi Pers Capaian Kinerja KCI Tahun 2019.
Press Conference KCI Performance Achievement in 2019.



07 April 2020 | April 07, 2020

Pemberlakuan Jam Operasional KRL Mulai pukul 04.00-20.00 dengan 761 Perjalanan per Hari Menyesuaikan Penerapan PSBB di Wilayah DKI Jakarta.
Enforcement of KRL Operational Hours Starting from 04.00-20.00 with 761 Trips per Day to Adjust with the Implementation of PSBB in the DKI Jakarta Area.



10 April 2020 | April 10, 2020

Perubahan Jam Operasional KRL Mulai pukul 06.00-18.00 dengan 683 Perjalanan per Hari dan Pembatasan Kapasitas Angkut Pengguna KRL 60 orang per Kereta Selama Masa PSBB.
Changes in KRL Operational Hours Starting from 06.00-18.00 with 683 Trips per Day and the Limitation of Transport Capacity for KRL users to 60 people per train during the PSBB period.



31 Mei 2020 | May 31, 2020

Menyambut Hari Lahir Pancasila, KCI Melakukan Sosialisasi Penerapan Penggunaan Masker di Stasiun Tanah Abang Sekaligus Mengajak untuk Disiplin dan Gotong Royong Melawan COVID-19.
Welcoming the Commemoration of Pancasila Day, KCI Socialized the Implementation of Masks Use at Tanah Abang Station and Urged Discipline and Mutual Cooperation against COVID-19.



05 Juni 2020 | June 05, 2020

- Pembatasan Jam Operasional KRL Mulai pukul 04.00-20.00 dengan 892 perjalanan per Hari menyesuaikan PSBB di wilayah DKI Jakarta.
- Pembatasan Pengguna KRL 74 orang per Kereta.
- Larangan Balita Naik KRL.
- Pemberlakuan Lansia dan Pedagang dengan Barang Dagangannya Naik KRL pukul 10.00-14.00 WIB.
- Limitation of KRL Operational Hours from 04.00-20.00 with 892 trips per day according to PSBB in the DKI Jakarta area.
- Limitation of KRL users to 74 people per train.
- Prohibiting Toddlers on KRL.
- Enforcement of Elderly and Traders Bringing their Goods to Ride KRL at 10.00-14.00 WIB.



17 Juni 2020 | June 17, 2020

Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, dan Gubernur DKI Jakarta Meresmikan Stasiun Tanah Abang, Sudirman, Juanda, dan Pasar Senen Sebagai Stasiun Integrasi.

The Minister of SOEs, the Minister of Transportation, and the Governor of DKI Jakarta Inaugurate Tanah Abang, Sudirman, Juanda, and Pasar Senen Stations as Integration Stations.



06 Juli 2020 | July 06, 2020

Frontliner KCI, Egi dan Mujenih (Petugas Pengawal Kereta dan Kebersihan Kereta) Menemukan Uang Rp500 juta di Dalam KRL Kemudian Menyerahkan Kepada Petugas Stasiun.

KCI Frontliners, Egi and Mujenih (Security on Train and on Trip Cleaning) Found Rp500 million in the KRL Then handed it over to the Station Officer.



17 Juli 2020 | July 17, 2020

Perubahan Jajaran Direksi KCI, Muhammad Widodo diangkat sebagai Plt. Direktur Keuangan dan Administrasi, Roppiq Lutzfi Azhar diangkat sebagai Plt. Direktur Teknik, Wawan Ariyanto diangkat sebagai Plt. Direktur Operasi dan Pemasaran.

Changes in the Company's Board of Directors, Muhammad Widodo was appointed as Acting Director of Finance and Administration, Roppiq Lutzfi Azhar was appointed as Acting Director of Engineering, Wawan Ariyanto was appointed as Acting Director of Operations and Marketing.



17 Juli 2020 | July 17, 2020

Perubahan Jajaran Komisaris KCI, Maqin U. Norhadi diangkat sebagai Komisaris Utama, John Robertho, dan Danto Restyawan diangkat sebagai Komisaris.

Changes in the Company's Board of Commissioners, Maqin U. Norhadi was appointed as President Commissioner, John Robertho, and Danto Restyawan was appointed as Commissioner.



17 Agustus 2020 | August 17, 2020

Memperingati Hari Kemerdekaan RI Ke-75, C-Millennials Ajak Pengguna KRL di Stasiun Tanah Abang untuk Disiplin Menggunakan Masker.

Commemorating the 75th Indonesian Independence Day, C-Millennials Invited KRL Passengers at Tanah Abang Station to Use Masks.



18 Agustus 2020 | August 18, 2020

Bank Mandiri (BMRI) Persero, PT KAI (Persero), dan KCI Meluncurkan Uang Elektronik *Commuter Pay* Sebagai Alat Pembayaran Transportasi KRL.

Bank Mandiri (BMRI) Persero, PT KAI (Persero), and KCI Launched Commuter Pay Electronic Money as a Payment Tool for KRL Transportation.



25 Agustus 2020 | August 25, 2020

Pembentukan C-Rangers Sebagai Agen Perubahan KCI yang Bertugas Melakukan Sosialisasi & Edukasi Budaya Perusahaan dan Kebiasaan Baru.

Formation of C-Rangers as KCI Change Agents in charge of Disseminating & Educating Corporate Culture and New Habits.



04 September 2020 | September 04, 2020

Peluncuran PIN Low Vision sebagai fasilitas layanan untuk pengguna KRL khususnya Difabel.

Launching of Low Vision PIN as a service facility for KRL passengers, especially people with disabilities.



15 September 2020 | September 15, 2020

Perayaan HUT KCI Ke-12 "Great Collaboration" Disiarkan Virtual Live Streaming Melalui Youtube Commuter Channel.

Celebrating the 12th Anniversary of KCI, "Great Collaboration" was Broadcasted through Virtual Live Streaming in Youtube Commuter Channel.



18 September 2020 | September 18, 2020

Penghargaan The Winner untuk kategori The Best Content Marketing Implementation in Transportation Category (ICMA 2020) Kepada KCI.

The Winner Award for The Best Content Marketing Implementation in Transportation Category (ICMA 2020) Category to KCI.



19 September 2020 | September 19, 2020

- KCI Mendapatkan Penghargaan The International Business Awards; Silver Stevie Winner kategori Company of The Year-Transportation-Large.
- Silver Stevie Winner kategori Most Valuable Service.
- Bronze Stevie Winner kategori Company of The Year-Consumer Service-Large.
- Bronze Stevie Winner kategori Most Exemplary Employee.
- KCI Received The International Business Awards; Silver Stevie Winner for the Company of The Year-Transportation-Large Category.
- Silver Stevie Winner in the Most Valuable Service Category.
- Bronze Stevie Winner for the Company of The Year-Consumer Service-Large category.
- Bronze Stevie Winner for the Most Exemplary Employee category.



18 September 2020 | September 18, 2020

KCI Memenangkan Innovation and Improvement Award Kategori Penerapan Stasiun Ramah Lingkungan & Pembuatan Alat Uji Perangkat Motor Generator Untuk Mengetahui Kualitas serta Meningkatkan Efisiensi Waktu dan Biaya pada Unit Sarana.

KCI Won the Innovation and Improvement Award in the Implementation of Environmentally Friendly Stations & Manufacturing of Generator Motor Test Equipment to Determine Quality and to Improve Time and Cost Efficiency in Facility Units.



19 September 2020 | September 19, 2020

Pemberlakuan Jam Operasional KRL mulai pukul 04.00-20.00 dengan 892 perjalanan per hari menyesuaikan PSBB Transisi di Wilayah DKI Jakarta.

The implementation of KRL Operational Hours from 04.00-20.00 with 892 trips per day according to the Transitional PSBB in DKI Jakarta Region.



29 September 2020 | September 29, 2020

Perubahan Logo Baru PT KAI (Persero) dan Seluruh Anak Usahanya Melambangkan Semangat Baru dalam Mewujudkan Visi Menjadi Solusi Ekosistem Transportasi Terbaik Untuk Indonesia.

New Logo of PT KAI (Persero) and All of its Subsidiaries to Symbolize a New Spirit in Realizing the Vision of Being the Best Transportation Ecosystem Solution for Indonesia.



01 Oktober 2020 | October 01, 2020

Alih Kelola KA Lokal di wilayah Daop 1 Jakarta dan Alih Kelola Kereta Prambanan Ekspres (Prameks) Daop 6 Yogyakarta.

Management Transfer of Local Trains in Daop 1 Jakarta and Management Transfer of Prambanan Express Trains (Prameks) Daop 6 Yogyakarta.



27 Oktober 2020 | October 27, 2020

Menyambut Hari Sumpah Pemuda, KCI melakukan Virtual Conference C-Ranger bersama BOD & BOC Bertema Pemuda, Sehat, Bersatu, dan Bangkit Melawan COVID-19.

Welcoming Hari Sumpah Pemuda, KCI convened a C-Ranger Virtual Conference with BOD & BOC Raising Youth, Health, Unity, and Rise Against COVID-19 as the theme.



09 November 2020 | November 09, 2020

FGD Bersama Komunitas Pecinta Kereta Tentang Layanan KRL Yogya-Solo.

FGD About Yogya-Solo KRL Service with the Train Lovers Community.



18 November 2020 | November 18, 2020

Penghargaan Ajang TKMPN XXI: KCI Meraih Predikat Gold Penerapan Stasiun Ramah Lingkungan dan Predikat Platinum Pembuatan Alat Uji Perangkat Motor Generator untuk Mengetahui Kualitas serta Meningkatkan Efisiensi Waktu dan Biaya pada Unit Sarana.

TKMPN XXI Award: KCI Won Gold Predicate for Implementing Environmentally Friendly Stations and Platinum Predicate for Making Motor Generator Test Equipment to Determine Quality and Improve Time and Cost Efficiency in Facility Units.



20 November 2020 | November 20, 2020

Sertifikat Gold Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Healthy, Safety, and Environment Management System Gold Certificate from the Ministry of Manpower.



01 Desember 2020 | December 01, 2020

Predikat Silver di ajang DTKJ Awards 2020.
Silver predicate at the 2020 DTKJ Awards.



08 Desember 2020 | December 08, 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menganugerahkan Penghargaan Kepada Wahyu Listyantara Sebagai Apresiasi Atas Pelaporan Gratifikasi Tahun 2020.

The Corruption Eradication Commission (KPK) Awarded Wahyu Listyantara to Appreciate the 2020 Gratification Reporting.



16 Desember 2020 | December 16, 2020

Uji Coba Operasional Stasiun Jatinegara dengan Bangunan Baru Sebagai Bentuk Pelayanan Kepada Pengguna Kereta Api.

Operational Trial of Jatinegara Station with a New Building as a Form of Service to Train Users.



22 Desember 2020 | December 22, 2020

Peringatan Hari Ibu Dengan Membagikan Bunga dan *Heathy Kit* kepada Pengguna Kereta Api di Stasiun Jatinegara.

Mother's Day Commemoration by Giving Flowers and Healthy Kits to Train Passengers at Jatinegara Station.



SPINNING THE LIMIT
TO WIN FROM PANDEMIC



LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

-
- 33 **Laporan Dewan Komisaris**
Board of Commissioners Report
 - 43 **Laporan Direksi**
Board of Directors Report



02





“

Di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan adaptasi New Normal, Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi dalam menunjukkan resiliensi sehingga Perseroan tetap mampu mencatatkan pencapaian yang baik.

In the midst of COVID-19 pandemic and New Normal adaptation, the Board of Commissioners appreciate the Board of Directors' resilience in maintaining positive performance.

MAQIN U. NORHADI

Komisaris Utama
President Commissioner

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Report

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang. Semoga berkah dan rahmat-Nya selalu dilimpahkan untuk kita semua.

Dewan Komisaris mensyukuri bahwa PT Kereta Commuter Indonesia atau "Perseroan" berhasil melalui tahun 2020 dengan baik di tengah kondisi pandemi yang membuat kondisi ekonomi global dan nasional menjadi sangat menantang.

Merupakan kehormatan bagi saya, mewakili Dewan Komisaris PT Kereta Commuter Indonesia, untuk menyampaikan Laporan Tahunan 2020.

Perkembangan Ekonomi Global dan Indonesia

Pada 2020, seluruh dunia menghadapi tantangan dan krisis yang belum pernah dialami sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang bermula di Tiongkok menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menimbulkan tidak hanya masalah kesehatan dan kemanusiaan yang besar, tetapi juga kepanikan pasar keuangan global dan gelombang resesi ekonomi di banyak negara.

Krisis yang bermula dari krisis kesehatan akibat pandemi, dengan cepat berkembang menjadi krisis ekonomi akibat kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat di berbagai negara untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Ketidakpastian penanganan pandemi dan proyeksi pemburukan kinerja ekonomi menimbulkan tekanan pada stabilitas sistem keuangan global, dengan dampak rambatan yang sangat signifikan terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia.

Lemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat COVID-19 menyebabkan rendahnya kinerja korporasi yang bergerak di sektor transportasi. Merujuk data BPS, sektor transportasi dan pergudangan memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) 2020 yaitu sebesar 0,64%. Secara keseluruhan, sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan -15,04%. Di sisi lain, angkutan rel -45,5% pada kuartal IV, sedikit lebih baik dibandingkan kuartal III yang tercapai -51,1%. Hal tersebut dibuktikan dengan turunnya penumpang KRL dari rata-rata 1 juta penumpang per hari pada masa sebelum pandemi menjadi hanya sekitar 400 ribu penumpang per hari.

Dear shareholders and stakeholders,

Praise and gratitude to God the Almighty, the Most Gracious, and Most Merciful. May His blessings and mercy always bestowed upon us.

The Board of Commissioners is grateful to have passed through 2020, facing the challenging global and national economic conditions amidst pandemic.

It is my honor to convey the 2020 Annual Report of PT Kereta Commuter Indonesia on behalf of the Board of Commissioners.

Global and National Economic Development

In 2020, the whole world encountered unprecedented challenges and crises. COVID-19 pandemic began its spread in China and has rapidly infected many people across the globe, causing not only major health and humanitarian problems, but also global financial market panic and a wave of economic recession in many countries.

As a result, the health crisis uncontrollably developed into economic crisis due to social restriction policies in various countries to reduce the spread of COVID-19. The uncertain pandemic handling and worsening economic performance put pressure on the stability of the global financial system, significantly impacted on developing countries, including Indonesia.

Weak economic growth in Indonesia due to COVID-19 has caused the low performance of transportation sector. Referring to Statistics Indonesia (BPS) data, the transportation and warehousing sector contributed the most to the decline in Gross Domestic Product (GDP) 2020, which was 0.64%. Overall, the transportation and warehousing sector recorded a growth of -15.04%. On the other hand, rail transportation was -45.5% in the fourth quarter, slightly higher than -51.1% in the third quarter. This is evidenced by the lower number of KRL passengers from 1 million passengers per day in the pre-pandemic period to only around 400 thousand passengers per day.



Dengan semangat "*Spinning the Limit to Win from Pandemic*", Perseroan berhasil melewati krisis di tahun 2020 meski di tengah tuntutan untuk bekerja jauh lebih keras demi memastikan keselamatan serta kenyamanan penumpang.

With the spirit of "Spinning the Limit to Win from Pandemic", the Company managed to get through the crisis despite the demands to work much harder to ensure passengers' safety and comfort.

Di penghujung tahun 2020, merujuk pada data IMF, perekonomian Indonesia tercatat pada titik rendah yaitu sebesar -4,9%. Salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi rendahnya pertumbuhan ekonomi tersebut yaitu karena daya beli masyarakat yang tertekan meskipun sektor konsumsi Pemerintah telah menyumbang pertumbuhan ekonomi yang cukup baik.

Penilaian pada Kinerja Direksi

Di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan adaptasi New Normal, Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi dalam menunjukkan resiliensi sehingga Perseroan tetap mampu mencatatkan pencapaian yang baik. Dengan semangat "*Spinning the Limit to Win from Pandemic*", Perseroan berhasil melewati krisis di tahun 2020 meski di tengah tuntutan untuk bekerja jauh lebih keras demi memastikan keselamatan serta kenyamanan penumpang.

Seluruh insan KCI mulai dari Top Manajemen hingga pegawai operasional ikut turun langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen KCI dalam memberikan pelayanan terbaik pada saat pandemi COVID-19, membangkitkan semangat untuk berinovasi dalam melahirkan pelayanan berbasis digital "*Service on Your Hand*".

Komisaris sangat mengapresiasi kinerja Direksi KCI atas capaiannya dalam menghadapi kondisi gejolak ekonomi pada pandemi COVID-19. Strategi optimalisasi SDM untuk melakukan pelayanan dan efisiensi anggaran merupakan cara-cara yang dilakukan manajemen untuk bertahan dan berhasil melewati

By the end of 2020, referring to IMF data, the Indonesian economy was recorded at a low point of -4.9%. One of the biggest factors influencing the low economic growth is the suppressed purchasing power of the community, even though the Government's consumption sector has contributed to quite good economic growth.

Assessment on the Board of Directors' Performance

In the midst of unprecedented pandemic conditions packed with challenges and dynamics, the Board of Commissioners appreciate the Board of Directors' resilience in maintaining positive performance. With the spirit of "Spinning the Limit to Win from Pandemic", the Company managed to get through the crisis despite the demands to work much harder to ensure passengers' safety and comfort.

All KCI's employees, from top management to operational employees, are directly involved in providing services to the community. KCI's commitment to providing the best service during the COVID-19 pandemic has energized the enthusiasm to breed digital-based services innovations or "Service on Your Hand".

The Board of Commissioners highly appreciate the Board of Directors' performance for their achievements in dealing with the economic turmoil during the COVID-19 pandemic. The management optimized HR strategy to provide services and budget efficiency to survive and make it through 2020. Based

tahun 2020 dengan sangat baik. Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa selama tahun 2020, meskipun di tengah masa pandemi ini, Direksi beserta Manajemen PT KCI telah berusaha menjalankan fungsinya dengan baik sehingga mampu menjaga kelancaran operasi Perseroan agar tidak terganggu dan tetap menghasilkan keuntungan.

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi yang meliputi aspek keuangan dan pasar, produk dan proses, fokus pelanggan, fokus tenaga kerja, kepemimpinan, tata kelola, dan tanggung jawab sosial. Dari 5 (lima) aspek tersebut KCI berhasil mencapai 97,78% atas kinerja di tahun 2020. Pencapaian tersebut terefleksikan pada kinerja operasi dan layanan di sepanjang tahun 2020. Perseroan mencatatkan realisasi volume penumpang sebanyak 26.732.800 atau melebihi target RKAP mencapai 106%. KM penumpang pada tahun 2020 juga melebihi target RKAP sebesar 105% dan okupansi dinamis tercapai 103% dari target RKAP.

Dari segi pendapatan, pada tahun 2020, realisasi pendapatan non angkutan penumpang dan pendukung angkutan KA sebesar Rp81.978.471.905 atau sebesar 72% dari target RKAP. Pencapaian signifikan juga tercatat pada segmen lain-lain yang tercapai sebesar Rp65,521 miliar, meningkat 118% dibandingkan tahun 2019 atau terealisasi sebesar 788% dari target. Perseroan juga mencatatkan peningkatan pada jumlah aset sebesar 0,93% dari posisi tahun sebelumnya.

Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi dalam hal pencapaian target 2020 di tengah kondisi yang menuntut siaga tinggi. Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Bahkan, Dewan Komisaris juga menilai bahwa anggota Direksi memiliki sinergi yang sangat baik sehingga target Perseroan dapat dicapai dengan optimal. Meskipun seiring berjalannya waktu, tantangan yang muncul di sepanjang tahun senantiasa berubah dan tidak dapat diprediksi, hal ini mampu disikapi dengan baik oleh Direksi dengan merumuskan dan menerapkan strategi yang tepat sasaran.

Selain itu, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah membawa Perseroan menuju arah pertumbuhan yang tepat dalam menjalankan usahanya memenuhi kebutuhan masyarakat akan sistem kereta api perkotaan yang terintegrasi. Inovasi-inovasi yang diaktualisasikan sangat vital perannya dalam upaya untuk bertahan dan tetap memberikan kinerja terbaik.

on our supervision, the Board of Commissioners is of view that during 2020, even in the midst of this pandemic, the Board of Directors and the Management have exerted their best in carrying out each function so that they managed to maintain the smooth operation of the Company so as not to be disrupted and still generate profits.

The Board of Commissioners evaluates the Board of Directors' performance from financial and market aspects, products and processes, customer focus, employment focus, leadership, governance, and social responsibility. From these 5 (five) aspects, KCI managed to achieve 97.78% of its performance in 2020. This achievement was reflected in the operational and service performance throughout 2020. The Company recorded a passenger volume of 26,732,800 or exceeded the RKAP target by 106%. Passengers' KM in 2020 also exceeded the RKAP target by 105% and dynamic occupancy was achieved by 103% of the RKAP target.

In terms of income, in 2020, the non-passenger and rail transportation support revenues was Rp81,978,471,905 or 72% of the RKAP target. Significant achievements were also recorded in the other segment which reached Rp65.521 billion, an increase of 118% compared to 2019 or achieved 788% of the target. The Company also recorded an increase in total assets of 0.93% from the previous year's position.

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors' performance in achieving the 2020 target amidst conditions that require high alertness. In the view of the Board of Commissioners, the Board of Directors have carried out their duties properly in accordance with their respective duties. In fact, the Board of Commissioners also considers that the Board of Directors have excellent synergy in achieving the Company's targets optimally. Although over time, the challenges that emerged throughout the year were constantly changing and unpredictable, the Board of Directors managed to respond well by formulating and implementing strategies that were right on target.

In addition, the Board of Commissioners is of view that the Board of Directors has navigated the Company's business direction in the right path to meet the community's need for integrated commuter train. All invented innovations are significant to survive and maintain the best performance.



Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Direksi

Fungsi pengawasan dan pembinaan Dewan Komisaris senantiasa dilakukan dalam rangka menuntun arah Perseroan agar dapat berjalan dengan lebih baik. Dewan Komisaris juga berupaya menjaga komunikasi yang intensif dengan Direksi agar pengawasan terhadap kegiatan usaha Perseroan dapat berjalan lebih terfokus dan terencana. Salah satunya adalah dengan memantau langsung kinerja dari implementasi strategi Perseroan melalui rapat monitoring pada Direksi.

Dewan Komisaris telah berupaya sebaik-baiknya untuk memastikan pengawasan terhadap strategi di sepanjang tahun 2020 dengan perhatian penuh. Hal ini sejalan dengan peran Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa pelaksanaan strategi Perseroan berada di jalur yang tepat tanpa mengesampingkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kewenangan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kegiatan usaha Perseroan didasarkan pada regulasi, Anggaran Dasar, Code of Conduct GCG, serta pedoman kerja yang dimiliki Perseroan.

Secara berkala, Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan langsung serta menghadiri Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan agenda pemaparan informasi terkait isu-isu strategis dan kinerja Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga memenuhi Direksi untuk melakukan pertemuan dalam hal terdapat pembahasan yang bersifat penting dan darurat atau hal yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.

Rekomendasi/Saran yang diberikan kepada Direksi

Sepanjang tahun 2020, tugas pengawasan Dewan Komisaris menjadi semakin intensif seiring kondisi krisis yang membutuhkan perhatian besar. Untuk itu, Dewan Komisaris meningkatkan intensitas penyampaian nasihat dan rekomendasi kepada Direksi. Rekomendasi-rekomendasi tersebut disampaikan melalui dua jenis rapat wajib yang dilaksanakan setiap bulan. Rapat yang pertama adalah rapat internal Dewan Komisaris dan kedua adalah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Selain itu, Dewan Komisaris beserta Organ Pendukung Dewan Komisaris tetap menjaga koordinasi dengan Manajemen KCI melalui rapat yang diadakan dengan beberapa Vice President. Secara terstruktur, dalam memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris melaksanakannya berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT KCI Nomor: SK.008/KOM/KCI/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan, Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris PT Kereta Commuter Indonesia.

Supervision on the Implementation of the Board of Directors' Strategy

The supervisory and guidance function of the Board of Commissioners is always carried out in order to guide the direction of the Company so that it can run better. The Board of Commissioners also strives to maintain intensive communication with the Board of Directors so that supervision of the Company's business activities can be more focused and planned. One of which is through direct monitoring on the implementation of the Company's strategy through monitoring meeting.

The Board of Commissioners has done its best to ensure the utmost attention to supervise the strategy throughout 2020. This is in line with the role of the Board of Commissioners to ensure that the implementation of the Company's strategy is on the right track without compromising compliance with applicable regulations. The authority of the Board of Commissioners in supervising the Company's business activities is based on regulations, Articles of Association, GCG Code of Conduct and the Company's work guidelines.

Periodically, the Board of Commissioners carries out direct supervision and attends Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors which discusses information related to the Company's strategic issues and performance. In addition, the Board of Commissioners at the initiative of the Board of Directors also conducts meetings in case of important and emergency discussion or matters requiring the Board of Commissioners' approval.

Recommendations/Advices provided to the Board of Directors

Throughout 2020, the supervisory duties of the Board of Commissioners have intensified in line with crisis conditions that require great attention. To that end, the Board of Commissioners increases the intensity of submitting advice and recommendations to the Board of Directors. These recommendations are conveyed through two types of mandatory meetings which are held every month. The first meeting is an internal meeting of the Board of Commissioners and the second is a joint meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

In addition, the Board of Commissioners and the Supporting Organs of the Board of Commissioners maintain coordination with the Management through meetings with several Vice Presidents. The Board of Commissioners provides advice to the Board of Directors in a structured manner, based on the Board of Commissioners' Decision PT KCI Number: SK.008/KOM/KCI/X/2019 dated October 21, 2019 concerning the Mechanism of Decision Making, Supervision and Advice of the Board of Commissioners of PT Kereta Commuter Indonesia.

Rapat internal Dewan Komisaris dilakukan untuk merumuskan persetujuan-persetujuan atas permintaan rekomendasi yang diajukan oleh Direksi. Atas isu-isu yang bersifat *urgent* serta keputusan-keputusan yang harus diambil dalam waktu yang sangat singkat dan tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka terlebih dahulu, Dewan Komisaris memanfaatkan platform digital dan menyampaikan rekomendasi secara informal untuk kemudian ditetapkan pada saat dilaksanakannya rapat formal. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan diskusi dengan Direksi di mana Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan terkait segala isu yang memerlukan perhatian khusus.

Beberapa saran dan rekomendasi yang diberikan oleh dewan komisaris pada tahun 2020 antara lain:

- Perseroan harus meninjau *cash flow* terhadap *budgeting priority* yang fokus pada pelayanan penumpang;
- Perseroan harus menjaga kondisi kesehatan pegawai agar tetap prima dalam melaksanakan pelayanan;
- Perseroan harus mempersiapkan *long term strategy* untuk 3-4 tahun terkait investasi dan *business development*;
- Perseroan harus mempersiapkan *business recovery* di tahun 2021.

Prospek Bisnis

Kehadiran vaksin COVID-19 yang dianggap efektif di penghujung tahun 2020 memunculkan optimisme baru untuk bangkit di tahun 2021. Akhir dari pandemi belum dapat dipastikan dan gaya hidup *New Normal* yang mengadaptasi langkah-langkah pencegahan penularan virus diprediksi akan tetap dilakukan hingga tahun 2021.

Secara global, risiko dari faktor geopolitik dan volatilitas di pasar keuangan, serta fluktuasi harga komoditas tetap harus diwaspadai. Risiko ketidakpastian yang tinggi masih terlihat pada besarnya divergensi proyeksi ekonomi global di tahun 2020 dan 2021. Meskipun demikian, berbagai proyeksi menunjukkan adanya konsensus bahwa di tahun 2021 akan terjadi perbaikan ekonomi. Dukungan stimulus yang masif dikeluarkan di banyak negara di dunia menjadi salah satu faktor yang mendukung perbaikan ekonomi di tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan berada di kisaran 5,0% pada 2021, dan 3,8% pada 2022. Volume perdagangan dan harga komoditas global pada 2021 diperkirakan meningkat menjadi 4,4%, sejalan dengan kenaikan permintaan akibat pemulihan ekonomi dunia.

Dari sisi domestik, pemulihan ekonomi Indonesia yang mulai terlihat pada semester II 2020 diperkirakan berlanjut pada 2021. Kemajuan penanganan COVID-19 termasuk penggunaan vaksin,

Internal meetings of the Board of Commissioners are conducted to formulate approvals on requests for recommendations submitted by the Board of Directors. For urgent issues and decisions that must be decided in a very short time and it is not possible to have face-to-face meetings, the Board of Commissioners utilizes digital platforms and submits recommendations informally to be determined at the time of the formal meeting. In addition, the Board of Commissioners also conducted discussions with the Board of Directors in which the Board of Commissioners requested the Board of Directors to provide explanations regarding all issues that require special attention.

Several suggestions and recommendations provided by the Board of Commissioners in 2020 include:

- *The Company shall review cash flow for budgeting priorities that focus on passenger services;*
- *The Company shall maintain employees' health condition in order to remain prime in carrying out services;*
- *The Company shall prepare a long term strategy for three to four years ahead, particularly related to investment and business development;*
- *The Company shall prepare for business recovery in 2021.*

Business Prospects

The presence of COVID-19 vaccine, which is considered effective at the end of 2020, raises new optimism in 2021. The end of pandemic is not yet certain and the New Normal lifestyle that adapts measures to prevent transmission of the virus is predicted to continue until 2021.

Globally however, risks arising from geopolitical factors and volatility on financial markets, as well as fluctuations in commodity prices, must still be watched out for. The high risk of uncertainty is still visible in the large divergence of global economic projections in 2020 and 2021. Nevertheless, various projections indicate a consensus that in 2021 there will be economic improvement. Massive stimulus support issued in many countries around the world is one of the factors supporting economic recovery in 2021. Global economic growth is predicted to be in the range of 5.0% in 2021 and 3.8% in 2022. Trade volume and commodity prices global growth in 2021 is predicted to increase to 4.4% in line with rising demand due to the recovery in the world economy.

From domestic side, Indonesia's economic recovery, which began to appear in the second semester of 2020, is predicted to continue in 2021. Progress in handling COVID-19 includes



pemulihan ekonomi global, stimulus kebijakan makroekonomi, serta berbagai upaya penajaman strategi kebijakan mendukung optimisme penguatan ekonomi tersebut. Sinergi kebijakan antara Pemerintah, Bank Indonesia dan otoritas terkait yang terus diperkuat juga mendukung prospek pemulihan ekonomi nasional. Di jangka menengah, ekonomi Indonesia diprakirakan kembali dalam lintasan meningkat, didukung perbaikan ekonomi global dan peningkatan produktivitas domestik sebagai dampak reformasi struktural, termasuk percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta penguatan UMKM.

Dewan Komisaris mendukung penuh penugasan dari PT KAI kepada PT KCI untuk mengembangkan wilayah operasional. Di tahun mendatang, KCI akan terus meningkatkan integrasi antar stasiun yang mencakup stasiun Gondangdia, Manggarai, Tebet, Palmerah, dan Jakarta Kota. KCI juga tengah melakukan persiapan pelaksanaan program strategis penugasan PT KCI terkait KA Lokal Wilayah 2 Bandung, Wilayah 8 Surabaya, dan penugasan pengoperasian KRL relasi Bandara Soekarno-Hatta.

Terhadap proyeksi yang menjanjikan prospek yang lebih baik tersebut, Dewan Komisaris terus mendorong Direksi agar senantiasa adaptif terhadap perubahan dan peka terhadap peluang yang terbuka agar dapat memanfaatkan seluruh kesempatan dengan optimal. Aktivitas masyarakat terus berangsur-angsur kembali normal dengan mobilitas yang tinggi. Dewan Komisaris menyakini bahwa industri transportasi publik akan tetap bertumbuh dan kembali menggeliat selepas pandemi.

Dewan Komisaris telah mengevaluasi seluruh prospek bisnis Direksi yang dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2021 dan menganggap bahwa strategi-strategi tersebut telah sesuai untuk menghadapi tantangan serta menjawab kesempatan yang terbuka di tahun mendatang. Strategi-strategi yang tercakup di dalamnya telah mendapat persetujuan dari seluruh anggota Dewan Komisaris dan dinilai tepat untuk mengantisipasi semua tantangan di tahun depan serta membawa Perseroan ke arah pertumbuhan yang lebih baik.

Pandangan atas Penerapan GCG

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk membangun sistem korporasi yang sehat dan kuat sehingga mampu tumbuh berkesinambungan dengan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance atau disingkat "GCG") dalam pengelolaannya. Penerapan prinsip GCG yang kuat akan meningkatkan kepercayaan publik dan menjadi nilai tambah bagi pemangku kepentingan lain.

the use of vaccines, global economic recovery, macroeconomic policy stimulus, and various efforts to sharpen policy strategies to support optimism for economic strengthening. Strengthened policy synergy between the Government, Bank Indonesia and relevant authorities also supports the prospects for national economic recovery. In medium term, Indonesian economy is predicted to return to an upward trajectory, supported by improvements in the global economy and increased domestic productivity as a result of structural reforms, including accelerating economic and financial digitization and strengthening of MSMEs.

The Board of Commissioners fully supports the assignment to develop operational areas as mandated by PT KAI. In the coming year, KCI will continue to improve the integration between stations which include Gondangdia, Manggarai, Tebet, Palmerah and Jakarta Kota stations. KCI is also preparing for the implementation of a strategic program assignment related to the Local Train Region 2 Bandung, Region 8 Surabaya, and the assignment to operate the KRL to Soekarno-Hatta Airport.

Regarding the projection that promises better prospects, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to always be adaptive to changes and sensitive to potential opportunities so as to capitalize on them optimally. As the community's activities are gradually returning to normal with high mobility, the Board of Commissioners believes that the public transportation industry will continue to grow and recover its growth after the pandemic.

The Board of Commissioners has evaluated all the business prospects formulated by the Board of Directors as outlined in the Work Plan for 2021 and considers that these strategies are appropriate to face challenges and respond to opportunities in the coming year. The strategies have received approval from all members of the Board of Commissioners and are deemed appropriate to anticipate all challenges in the next year and lead the Company towards better growth.

Opinion on GCG Implementation

The Board of Commissioners and the Board of Directors are committed to build a sound and strong corporate system so that it is able to grow sustainably by applying the principles of Good Corporate Governance ("GCG") in its management. The implementation of strong GCG principles will increase public trust and become an added value for other stakeholders.

Dewan Komisaris tidak hanya bertanggung jawab pada hasil akhir tetapi juga senantiasa memantau proses untuk mencapai hasil yang diharapkan apakah telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Melalui penguatan penerapan prinsip GCG di lingkup Perseroan yang telah dilakukan di tahun 2020 dan akan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya, Dewan Komisaris sungguh berharap agar tata kelola organisasi yang kuat dapat memberikan wadah bagi perkembangan Perseroan hingga masa-masa yang akan datang.

Untuk tahun 2020, KCI kembali melaksanakan Assessment penerapan GCG, yaitu dari Unit GCG dengan pendampingan dari BPKP Perwakilan DKI Jakarta. Dari hasil tersebut, telah dicapai skor sebesar 85,78 dengan klasifikasi Sangat Baik atau meningkat sebesar 1,76 point dari hasil assessment tahun sebelumnya yang tercapai sebesar 80,58. Di sisi lain, hasil Self Assessment GCG terhadap Dewan Komisaris mencapai skor 89,37. Keberhasilan atas kinerja GCG juga dibuktikan dengan diraihnya penghargaan dari KPK dan anugerah dari Menteri BUMN atas apresiasi pegawai yang mengembalikan uang penumpang.

Penilaian Kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris

Secara fungsional, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mengawasi dan mengelola Perseroan ditunjang oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Dewan Komisaris dan Komite menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas temuan dan melakukan pengawasan di lapangan untuk memastikan bahwa jalannya operasi Perseroan telah patuh terhadap peraturan, kebijakan, dan prosedur yang ada.

Penilaian kinerja Komite dan organ pendukung dilakukan dengan pendekatan kualitatif, mencakup penyelesaian peran dan fungsi yang diberikan Dewan Komisaris kepada masing-masing Komite, keaktifan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, kehadiran dalam rapat, serta laporan-laporan baik laporan berkala maupun laporan yang dibutuhkan Dewan Komisaris untuk menjadi masukan bagi Dewan Komisaris dalam menyampaikan saran dan masukan kepada Direksi.

Di tahun 2020, Dewan Komisaris memandang bahwa Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan fungsi masing-masing dengan baik dan telah memberikan masukan dan arahan yang konstruktif kepada Dewan Komisaris. Komite-Komite telah menunjukkan performa optimal dalam melakukan tinjauan yang seksama terhadap aktivitas bisnis Perseroan di aspek operasional, keuangan, manajemen risiko dan

The Board of Commissioners is not only responsible for final results but also constantly monitors the process to achieve expected results whether it is in accordance with prevailing rules and procedures. Through the strengthening of the implementation of GCG principles in the scope of the Company that has been carried out in 2020 and will be continued in the following years, the Board of Commissioners sincerely hopes that the strong corporate organizational governance can provide a platform for the Company's development to the future.

In 2020, KCI carried out GCG Assessment, executed by the GCG Unit with assistance from the DKI Jakarta BPKP Representative. The Company achieved the score of 85.78 with the classification of Very Good or an increase of 1.76 points from the previous year's assessment result which was achieved at 80.58. On the other hand, the results of the Board of Commissioners' GCG Self Assessment reached a score of 89.37. The success of GCG performance is also evidenced by an award from the Corruption Eradication Commission (KPK) and an award from the Minister of SOEs appreciating our employee's candor to return passengers' money.

Assessment on the Performance of the Board of Commissioners' Committees

Functionally, the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in supervising and managing the Company is supported by the Audit Committee and Risk Management Committee. The Board of Commissioners and the Committee conducted regular meetings to discuss audit findings and carry out supervisory function to ensure that the Company's operations are in compliance with the prevailing regulations, policies and procedures.

Assessment on the performance of the Committee and its supporting organs is carried out using a qualitative approach, including the completion of the roles and functions assigned by the Board of Commissioners to each Committee and organs, activeness in completing assigned tasks, meeting attendance, periodic and requested reports for the Board of Commissioners' reference in submitting suggestions and input to the Board of Directors.

In 2020, the Board of Commissioners is of view that these Committees have carried out their respective functions well and have provided constructive input and direction to the Board of Commissioners. The Committees have shown optimal performance in conducting thorough reviews of the Company's business activities in the aspects of operations, finance, risk management, remuneration procedures, and overall GCG



implementasi GCG secara keseluruhan. Temuan-temuan yang diidentifikasi telah ditindaklanjuti dan menjadi rekomendasi dalam pengawasan aspek finansial di tahun mendatang.

Dengan profesionalisme Komite-Komite tersebut yang berjalan beriringan dengan komitmen Dewan Komisaris dalam menerapkan nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik, dapat dipastikan bahwa seluruh aktivitas Perseroan telah berjalan tanpa adanya potensi benturan kepentingan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemangku kepentingan.

Pandangan atas Penerapan Whistleblowing System

Sebagai salah satu poin pelaksanaan prinsip GCG, Perseroan senantiasa berupaya memastikan bahwa Whistleblowing System (WBS) di Perseroan dapat memberikan kemudahan akses pelaporan pelanggaran. Implementasi WBS yang menggunakan *web based* akan mendukung keterbukaan terkait pelaporan pegawai yang melakukan potensi tindak pidana korupsi. Mekanisme pelaporan penyimpangan atau pelanggaran dimulai dari proses pelaporan. Setiap laporan yang diterima dalam WBS akan diproses oleh tim WBS dengan keterlibatan Komisaris Utama dan Direktur Utama sebagai penentu keputusan atas hasil validasi laporan yang diterima.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris secara aktif terlibat dan mengawasi efektivitas pelaksanaan WBS di Perseroan. Dewan Komisaris memandang bahwa implementasi WBS masih menyediakan banyak ruang *improvement* untuk terus dikembangkan mengingat signifikansi laporan pelanggaran yang dapat menjadi masukan bagi KCI agar lebih jeli terhadap potensi penyimpangan yang dapat memberikan efek negatif bagi Perseroan.

Selama tahun 2020 tidak terdapat laporan pelanggaran yang disampaikan melalui WBS. Dewan Komisaris mendukung setiap upaya untuk menjadi entitas yang semakin berkomitmen pada praktik bisnis yang bersih dan berintegritas.

Perubahan pada Komposisi Dewan Komisaris

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris ingin menyampaikan bahwa telah terjadi perubahan pada komposisi Dewan Komisaris di tahun 2020. Perubahan dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KAI Nomor: KP.303/XII/14/KA-2020 Nomor Yayasan Pusaka Nomor 08/RIS-KCI/XII/2020 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2020.

implementation. The identified findings have been followed up and become recommendations for monitoring the financial aspects in the coming year.

With the professionalism of these Committees coupled with the commitment of the Board of Commissioners in implementing good corporate governance values, it can be ensured that all of the Company's activities are running without any potential conflicts of interest that could adversely cause losses to stakeholders.

Opinion on Whistleblowing System Implementation

As one of the points of implementing GCG principles, the Company always strives to ensure that the Whistleblowing System (WBS) in the Company is able to provide easy access to reporting violations. The implementation of a web based WBS is expected to support the transparency related to reporting employees who commit potential corruption acts. The mechanism for reporting irregularities or violations in the Company starts from the reporting process. Each report received in the WBS will be processed by WBS team with the involvement of President Commissioner and President Director as a decision maker on the report validation.

Throughout 2020, the Board of Commissioners was actively involved and supervised the effectiveness of WBS implementation in the Company. WBS still provides a lot of potential improvements to continue to be developed considering the significance of violation reports that can be used as input for the Company to be more observant about potential irregularities that could have a negative effect on the Company.

Throughout 2020, there were no violation reports submitted through the WBS. The Board of Commissioners supports every effort to become a company that is increasingly committed to clean business practices and integrity.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

On this occasion, the Board of Commissioners would like to convey that there has been a change in the composition of the Board of Commissioners in 2020. The changes were made based on the Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT KAI Number: KP.303/XII/14/KA-2020 Nomor Yayasan Pusaka Number 08 /RIS-KCI/XII/2020 which was held on December 28, 2020.

Per 31 Desember 2020, komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama: Maqin U. Norhadi
- Komisaris: Edy Widyaya
- Komisaris: John Roberto
- Komisaris: Danto Restyawan

Apresiasi Kami

Untuk menutup laporan ini, Dewan Komisaris ingin menyampaikan apresiasi terdalam kepada jajaran Direksi, manajemen, dan segenap karyawan atas komitmen serta kerja keras yang menjadi kunci pencapaian PT Kereta Commuter Indonesia untuk melalui masa pandemi ini. Selain itu, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengguna jasa angkutan komuter atas kepercayaan dan loyalitas yang diberikan. Semoga kami dapat terus memberikan layanan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Besar harapan kami agar pandemi ini segera berlalu dan kita dapat bersama-sama menyambut hari esok yang lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan karunia-Nya dan menguatkan langkah KCI menuju masa depan yang menjanjikan.

As of December 31, 2020, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

- President Commissioner: Maqin U. Norhadi
- Commissioner: Edy Widyaya
- Commissioner: John Roberto
- Commissioner: Danto Restyawan

Our Appreciations

To conclude, the Board of Commissioners would like to extend deepest appreciation to the Board of Directors, management, and all employees for their commitment and hard work that determine the Company's through these pandemic situations. Apart from that, we would also like to express our gratitude to our customers for their trust and loyalty. We wish to serve you better in the coming future.

We sincerely hope that this pandemic shall pass and we can together embrace a better tomorrow. May God the Almighty always bestows His blessings and strengthen our steps towards a promising future.

Jakarta, Maret 2021

Jakarta, March 2021

Atas Nama Dewan Komisaris,
On Behalf of the Board of Commissioners

Maqin U. Norhadi

Komisaris Utama
President Commissioner



“

Direksi mengawal kinerja tahun 2020 dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis yang berfokus untuk mempertahankan kinerja positif di tengah krisis yang terjadi.

The Board of Directors oversee the Company's performance in 2020 by implementing strategic policies that focus on maintaining positive performance amidst the current crisis.

WIWIK WIDAYANTI

*Direktur Utama
President Director*



LAPORAN DIREKSI

Board of Directors Report

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan lindungan-Nya, tahun 2020 kembali menjadi tahun pencapaian bagi PT Kereta Commuter Indonesia (Perseroan) meskipun tantangan terus datang seiring pandemi COVID-19 yang melanda dan berdampak pada berbagai aspek kesehatan, kemanusiaan, sosial, dan ekonomi.

Dalam kesempatan ini, izinkan saya atas nama Direksi menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja Perseroan tahun buku 2020.

Latar Belakang Ekonomi Global dan Indonesia

Ekonomi global tahun 2020 dihadapkan pada sejumlah tantangan yang berbeda dari krisis-krisis sebelumnya. Krisis yang bermula dari krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 dengan cepat berkembang menjadi krisis ekonomi akibat kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat di berbagai negara untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Pembatasan mobilitas masyarakat berdampak pada penurunan tajam aktivitas ekonomi global baik konsumsi, produksi, perdagangan barang dan jasa, maupun investasi.

Ketidakpastian penanganan pandemi dan proyeksi menurunnya kinerja ekonomi menimbulkan tekanan pada stabilitas sistem keuangan global. Investor menjadi lebih berhati-hati dan mengalihkan investasinya kepada aset-aset keuangan yang lebih aman, seperti surat utang pemerintah AS dan Jepang, serta komoditas emas. Ini mendorong terjadinya aliran modal keluar dari negara berkembang, dan menimbulkan gejolak nilai tukar serta tekanan pada cadangan devisa. COVID-19 juga menekan kinerja korporasi, khususnya UMKM dan rumah tangga, yang memperburuk gejolak di sistem keuangan.

Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia pada semester I 2020 tercatat sangat signifikan. Pandemi yang menyebar sangat cepat ke seluruh wilayah Indonesia sejak awal Maret 2020 mengakibatkan penerapan kebijakan pembatasan mobilitas, termasuk PSBB di beberapa daerah. Pembatasan mobilitas menyebabkan penurunan tajam aktivitas ekonomi masyarakat. Penurunan kinerja terjadi di seluruh komponen, baik konsumsi rumah tangga, maupun investasi pemerintah dan swasta.

Dalam hubungannya dengan kontraksi yang terjadi pada kinerja perekonomian, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan terkontraksi 15,04% (YoY). Sektor ini menjadi yang terkoreksi

Dear shareholders and stakeholders,

All praise to God the Almighty, with His grace and protection, 2020 was again become a year of achievement for PT Kereta Commuter Indonesia (the Company) despite the unprecedented challenges, this time in the form of COVID-19 pandemic that has hit and has impacted on various aspects of health, humanity, social, and economic.

On this occasion, allow me on behalf of the Board of Directors to convey an accountability report of the Company's performance for the 2020 fiscal year.

Global and Indonesia's Economic Background

Global economy in 2020 faced a number of different challenges than previous crises. It all began with a health issue due to the COVID-19 pandemic, which then rapidly developed into an economic crisis due to policies to limit the mobility of people in various countries to reduce the spread of COVID-19. Restrictions on people's mobility have resulted in a sharp decline in global economic activity, including consumption, production, trade in goods and services, and investment.

Uncertainty in pandemic handling and projected decline in economic performance put pressure on the global financial system stability. Investors increased their cautiousness thus diverted their investment to safe haven, such as US and Japanese government bonds, and gold commodities. Such decisions have driven capital outflows from developing countries, exchange rate fluctuations, and pressure on foreign exchange reserves. COVID-19 also put pressure on corporate performance, particularly on MSMEs and households, which exacerbated the turmoil in the financial system.

The impact of COVID-19 on the Indonesian economy in the first semester of 2020 was highly significant. The virus spread rapidly all accross the nation since early March 2020 and forced the government to issue restriction policies, including Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in several regions. Subsequently, people's economic activity in household consumptions including public and private investment declined sharply.

In relation to the contracted economic performance, the Central Statistics Agency (BPS) recorded growth in the transportation and warehousing business sector, which contracted by 15.04% (YoY). This sector is the one with the deepest correction



Di tengah kondisi pandemi yang penuh tantangan, KCI tetap berupaya mewujudkan kinerja positif melalui penerapan strategi usaha yang efektif serta efisiensi yang berkelanjutan.

Amidst pandemic situations that is full of challenges KCI strives to achieve positive performance through the implementation of effective business strategies and sustainable efficiency.

paling dalam dibandingkan lapangan usaha lain. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan menjadi penyumbang tertinggi terhadap penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) 2020, yakni -0,64%. Padahal, pada 2019 mampu menyumbang peningkatan PDB sebesar 0,27% dengan pertumbuhan 6,39% (YoY).

Subsektor angkutan udara paling anjlok sepanjang 2020 dengan terkontraksi 53,01% (YoY). Hal ini seiring dengan penurunan jumlah penumpang pesawat domestik dan internasional. Angkutan rel menjadi subsektor yang terkontraksi tertinggi kedua dengan 42,34% (YoY). Penumpang kereta api turun drastis menjadi 186,1 juta orang atau 56,40% (YoY) sepanjang 2020. Angkutan laut tercatat hanya terkontraksi 4,57% pada 2020. Meski demikian, jumlah penumpang angkutan laut turun mencapai 40,66% sepanjang tahun lalu menjadi 14,2 juta orang.

Anjloknya sektor transportasi pada 2020 terjadi seiring mobilitas masyarakat yang berkurang selama pandemi. Masyarakat menghindari aktivitas di luar rumah untuk menghindari penularan COVID-19 dan untuk mematuhi peraturan PSBB yang termasuk membatasi penggunaan moda transportasi umum. Penurunan tersebut tercermin pada data BPS yang menunjukkan bahwa 88,7% pekerja komuter lebih memilih mengendarai kendaraan pribadi ke kantor. Hanya 9,5% yang memilih transportasi umum.

Implementasi Strategi Usaha

Di tengah kondisi pandemi yang penuh tantangan tersebut, KCI tetap berupaya mewujudkan kinerja positif melalui penerapan strategi usaha yang efektif serta efisiensi yang berkelanjutan. Direksi mengawal kinerja tahun 2020 dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis yang berfokus untuk mempertahankan kinerja positif di tengah krisis yang terjadi. Dalam menjalankan usahanya, KCI menjalankan kebijakan strategis untuk tetap bertahan yaitu melakukan efisiensi dan fokus pada pelayanan pelanggan yang sesuai protokol

compared to other business fields. The transportation and warehousing business fields are the highest contributors to the decline in Gross Domestic Product (GDP) 2020, or recorded at -0.64%. In fact, in 2019 it was able to contribute to an increase in GDP of 0.27% with a growth of 6.39% (YoY).

The air transportation sub-sector was the worst in 2020 or contracted 53.01% (YoY). This is in line with the decline in the total passengers of domestic and international flights. Rail transportation became the sub-sector with the second highest contraction with 42.34% (YoY). Train passengers fell drastically to 186.1 million people or 56.40% (YoY) throughout 2020. Sea transportation was recorded to have contracted only 4.57% in 2020. Total sea transportation passengers fell by 40.66% during last year to 14.2 million people.

The decline in the transportation sector in 2020 occurred as people's mobility decreased during the pandemic. The public avoids activities outside the home to avoid the transmission of COVID-19 and to comply with PSBB regulations which include limiting the use of public transportation modes. This decline is reflected in BPS data, which shows that 88.7% of commuter workers prefer to drive private vehicles to the office. Only 9.5% choose public transportation.

Implementation of Strategic Policies

Amidst pandemic situations that is full of challenges KCI strives to achieve positive performance through the implementation of effective business strategies and sustainable efficiency. The Board of Directors oversee the Company's performance in 2020 by implementing strategic policies that focus on maintaining positive performance amid the current crisis. In running its business, KCI carries out a strategic policy to win the pandemic, namely to enhance efficiency and focus on customer service in accordance with health protocols as instructed through the

kesehatan sebagaimana diimbau melalui SE Kementerian Perhubungan 14 Tahun 2020 serta kebijakan pembatasan oleh pemerintah setempat.

Pada strategi efisiensi, Perseroan melakukan kalkulasi cermat atas penggunaan anggaran agar memenuhi Instruksi Direksi No. 012/DIR/INSTRUKSI/IV/2020 terkait Efisiensi Biaya-Skala Prioritas dan menyesuaikan dengan perubahan aturan agar dapat tetap beroperasi di kala pandemi. Strategi ini terbukti efektif sehingga Perseroan berhasil meningkatkan rasio kinerja tahun 2020. *Net Profit Margin* tercapai sebesar 4,13% dari RKAP sebesar 1,75%, *EBITDA Margin* sebesar 12,82% dari RKAP sebesar 8,83%, dan *Cost to Revenue Ratio* sebesar 95% dari RKAP sebesar 96%.

Dari segi operasional, Perseroan mengimplementasikan strategi optimalisasi protokol kesehatan dengan menambah perjalanan kereta pada *peak hour* dengan total 997 perjalanan yang kami sediakan untuk menghindari kepadatan penumpang. Perseroan juga menyediakan pelayanan ekstra yaitu dengan menurunkan pegawai Kantor Pusat ke lapangan untuk melakukan pelayanan dan fasilitas pencegahan COVID-19 seperti *hand sanitizer*, pembagian masker, penyemprotan disinfektan, *thermal scanner*, dan pos kesehatan. Pemenuhan dua kebijakan strategis prioritas tersebut adalah kunci keberhasilan KCI untuk bertahan menghadapi situasi pandemi.

Tantangan yang Dihadapi

Secara garis besar, tantangan yang dihadapi oleh Perseroan di tahun 2020 dapat dibagi ke dalam dua kategori. Pertama dari sisi eksternal dimana Perseroan dihadapkan pada tantangan yang muncul dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan diberlakukannya pembatasan sosial besar-besaran sehingga mendorong penurunan drastis pada *traffic* penumpang.

KCI menghadapi ini dengan menjadi adaptif dan lebih jeli melihat kesempatan. Adaptivitas ditunjukkan dengan kecepatan Perseroan dalam menyediakan layanan berbasis protokol kesehatan ketat. Upaya yang telah dilaksanakan Perseroan yakni melalui penerapan protokol keselamatan secara konsisten dan senantiasa melakukan pengkinian atas berbagai pembaharuan standar maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak otoritas baik pusat maupun daerah melalui pengkinian terhadap prosedur yang telah disusun sebelumnya.

Perseroan berupaya untuk memberikan jaminan keselamatan bagi para pelanggannya khususnya terkait dengan pemenuhan aturan *physical distancing* baik di stasiun maupun di atas kereta melalui pemasangan tanda/marka jarak. Perseroan juga menerapkan kebijakan pembayaran secara non-tunai guna mengurangi terjadinya kontak fisik antara karyawan dan pelanggan.

Decision Letter of the Ministry of Transportation 14 of 2020 and the restriction policy by the local government.

In terms of efficiency strategy, the Company performs meticulous calculations on the use of the budget in order to comply with the Board of Directors' Instruction No. 012/DIR/INSTRUKSI/IV/2020 regarding Cost Efficiency-Priority Scale and adapting to regulations amendment to continue the operation during the pandemic. This strategy has proven to be effective so that the Company succeeded in increasing its performance ratio in 2020. Net Profit Margin was achieved by 4.13% from 1.75% in the RKAP, EBITDA Margin by 12.82% from 8.83% in the RKAP, and Cost to Revenue Ratio by 95% from 96% in the RKAP.

In terms of operations, the Company implements a strategy to enforce health protocols by providing additional train trips at peak hour, totaling 997 trips to avoid passenger congestion. The Company also provides extra services, by deploying employees from the Head Office to the field to provide services and facilities to prevent COVID-19, such as hand sanitizers, distribution of masks, spraying disinfectants, thermal scanners, and health posts. The fulfillment of these two priority strategic policies is the key to KCI's success in surviving the pandemic situation.

Facing Challenges

Broadly speaking, the challenges faced by the Company in 2020 can be divided into two categories. First, from the external side, the Company was faced the COVID-19 pandemic which has resulted in the imposition of massive social restrictions which have led to a drastic reduction in customer traffic.

The Company has encountered this by being adaptive and more observant of opportunities. Adaptivity is demonstrated by the Company's speed in providing services based on strict health protocols. Efforts that have been carried out by the Company are through the consistent implementation of safety protocols and constantly updating various standard and regulatory updates issued by both central and regional authorities through updating of previously prepared procedures.

The Company strives to provide safety guarantees for its customers, especially related to the fulfillment of physical distancing enforcement both at stations and on trains through the installation of physical distancing signs. The Company also implements a non-cash payment policy to reduce physical contact between employees and customers.



Di sisi lain, Perseroan juga dihadapkan pada tantangan operasionalisasi harian dimana terdapat peraturan untuk membatasi konsentrasi karyawan. Salah satu upaya yang diambil oleh Manajemen dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap keselamatan karyawan adalah dengan menerbitkan sejumlah kebijakan internal seperti kebijakan bekerja dari rumah (*Work from Home*) melalui pembagian jadwal jam kerja, pembatasan jumlah karyawan di suatu ruang baik untuk keperluan bekerja, rapat maupun ibadah, pengecekan suhu tubuh dan penggunaan masker, penyediaan *hand sanitizer* dan wastafel cuci tangan, serta disinfeksi ruangan secara terjadwal.

Meskipun dihadapkan pada tantangan yang terbilang tidak mudah, pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama karyawan 7 sektor yang harus tetap beroperasi adalah komitmen layanan kami sebagai anak perusahaan BUMN. Turunnya penumpang rata-rata KCI dari 1,1 juta menjadi 400 ribu penumpang tidak membuat kami putus asa dan lelah dalam melayani masyarakat. Dengan semangat "*Spinning the Limit to Win from Pandemic*", KCI berupaya keras untuk terus melayani masyarakat dengan layanan yang dapat diandalkan. Selain menambah perjalanan untuk mengimbangi pembatasan pada setiap perjalanan, Perseroan mengembangkan aplikasi KRL Access untuk meminimalisir kontak fisik dan membentuk C-Ranger untuk mempercepat implementasi budaya baru naik KRL. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pelanggan dalam menggunakan KRL.

Dari upaya-upaya yang telah diaktualisasikan, Perseroan meraih 14 penghargaan, beberapa diantaranya yaitu: Gold Winner The Best of Private Company InMA 2020 yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers, Silver Winner Category Company of The Year Transport (Large), Silver Winner Category Covid Response Most Valuable Service, Juara 1 Karya Proyek Tim The Dauns (Pelayanan) Stasiun Ramah Lingkungan, Sertifikat Gold SMK3 dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan Apresiasi Atas Pelaporan Gratifikasi Tahun 2020. Berbagai rekognisi dari pihak eksternal tersebut mengkonfirmasi posisi KCI sebagai entitas yang unggul dalam segala aspek dan adaptif dalam menghadapi COVID-19.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Secara keseluruhan, pencapaian Perseroan terhadap Revisi RKAP 2020 mayoritas tercapai lebih dari 100%. Namun demikian, melalui implementasi strategi serta review kinerja yang dilakukan secara berkala, Kinerja Perseroan menunjukkan penurunan dari tahun 2019 dikarenakan adanya pandemi.

Manajemen berhasil memetakan masalah dan melakukan langkah cepat dalam penanganan COVID-19. Pada tahun

On the other hand, the Company is also faced with challenges in operating the Company where there are regulations to limit employee concentration. One of the efforts taken by the Company Management in order to anticipate threats to employee safety by issuing a number of internal policies such as the policy of working from home through the distribution of working hours, limiting the number of employees in a room for work, meetings or worship purposes, checking body temperature and using mask, providing hand sanitizer and hand wash basin as well as scheduled disinfection of the room.

Despite facing challenging situations, meeting the needs of the community, especially employees of the 7 sectors who must continue to operate, is our service commitment as a subsidiary of a State Owned Enterprise (SOE). The decline in KCI's average passenger from 1.1 million to 400 thousand passengers did not stop our unwavering spirit to serve the community. It is the spirit of "Spinning the Limit to Win from Pandemic", KCI strives to continue to serve the community with reliable services. In addition to adding more trips to balance the restrictions on each trip, the Company developed KRL Access application to minimize physical contact and formed a C-Ranger to accelerate the implementation of the new KRL culture. This effort is made to ensure the health and safety of customers in using KRL.

Such efforts has encouraged the Company to win 14 awards, some of which are: Gold Winner The Best of Private Company InMA 2020 organized by the Press Company Union, Silver Winner Category Company of The Year Transport (Large), Silver Winner Category Covid Response Most Valuable Service, 1st Place in The Dauns Team Project (Service) Environmentally Friendly Station, SMK3 Gold Certificate from the Ministry of Manpower, and Appreciation for Gratification Reporting in 2020. Various acknowledgments from external parties strengthened KCI's position as an entity that excels in all aspects and adaptive in the face of COVID-19.

Target and Actual Performance in 2020

Overall, the majority of the Company's achievements in the 2020 RKAP Revision are more than 100%. However, through the implementation of strategies and periodic performance reviews, the Company's performance has managed to exceed expectations despite being faced with the challenging pandemic situation.

Management managed to map the problem and take quick steps in handling COVID-19. In 2020, amidst of weak

2020, di tengah kondisi pertumbuhan industri transportasi yang lemah, kami menargetkan keuntungan bersih sebesar Rp40.305.583.681. Atas target tersebut, KCI berhasil mencatatkan pencapaian pendapatan bersih sebesar Rp77,686 miliar atau 193% dari yang ditargetkan. Adapun realisasi pendapatan non angkutan penumpang dan pendukung angkutan KA sebesar Rp81.978.471.905 atau sebesar 72% dari target RKAP. Pencapaian signifikan juga tercatat pada segmen lain-lain yang tercapai sebesar Rp65,521 miliar, meningkat 118% dibandingkan tahun 2019 atau terealisasi sebesar 788% dari target. Perseroan juga mencatatkan peningkatan pada jumlah aset sebesar 0,93% dari posisi tahun sebelumnya.

Selain itu, KCI juga berhasil mencapai penilaian KPI sebesar 97,78% dari target KPI RKAP sebesar 100%. Perseroan juga berhasil melakukan penyerapan anggaran investasi sebesar 82,94%. Atas pencapaian tersebut, KCI meraih predikat Sehat "AA" pada Tingkat Kesehatan Perusahaan Kep.Meneg BUMN No: KEP-100/MBU/2002.4. Penyerapan realisasi investasi tahun 2020 secara fisik sebesar 95% dan anggaran sebesar Rp89,08 miliar dari program pada tahun 2020 sebesar Rp107,41 miliar atau 83%.

Prospek Usaha

Tahun 2021 menjadi masa yang penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia berusaha sekuat tenaga dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 dan merespon dengan berbagai kebijakan penanganan. Optimisme terhadap riset vaksin yang diharapkan dapat segera membuahkan hasil, menjadi faktor penting dalam melihat prospek perekonomian dunia dan domestik di tahun 2021.

Optimisme perbaikan ekonomi global di semester II 2020 diperkirakan berlanjut pada 2021, didukung perkembangan positif vaksin dan penanganan pandemi, serta efektivitas kebijakan fiskal dan keuangan yang *extraordinary* dalam rangka mengatasi dampak pandemi di berbagai negara. Berbagai indikator awal terus menunjukkan perbaikan ekonomi di berbagai negara. Kenaikan *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur dan jasa berlanjut di AS dan Tiongkok. Keyakinan konsumen dan bisnis terus membaik dan tingkat pengangguran mulai turun secara bertahap di AS, Tiongkok dan kawasan Eropa. Perbaikan kinerja berbagai indikator tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada 2021. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan berada di kisaran 5,0% pada 2021, dan 3,8% pada 2022.

Sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi dunia, ketidakpastian pasar keuangan global diharapkan menurun, dan meningkatkan aliran modal ke negara berkembang.

transportation industry growth conditions, we are targeting a net profit of Rp40,305,583.681. With this target, KCI managed to record a net income of Rp77.686 billion or 193% of the target. Meanwhile, the realization of non-passenger and rail transport revenue was Rp81,978,471.905 or 72% of the RKAP target. Significant achievements were also recorded in the other segment which reached Rp65.521 billion, an increase of 118% compared to 2019 or realized 788% of the target. The Company also recorded an increase in total assets of 0.93% from the previous year's position.

In addition, KCI also managed to achieve a KPI assessment of 97.78% of the KPI RKAP target of 100%. The Company also managed to absorb investment budget of 82.94%. For this achievement, KCI Commuter received the "AA" Healthy title at the Health Level of the State Minister of State-Owned Enterprises Decree No: KEP-100/MBU/2002.4. Physical absorption of investment realization in 2020 is 95% and a budget of Rp89.08 billion from the program in 2020 of Rp107.41 billion or 83%.

Business Prospects

Year 2021 will be a momentous period that shapes global and national economic recovery from the impact of COVID-19. All countries in the world, including Indonesia, are doing their best to deal with the impact of this pandemic and responding with various handling policies. Optimism for vaccine research, which is expected to be produced in the near future, is an important factor for the world and domestic economy prospects in 2021.

Optimism for improvement in the global economy in the second semester of 2020 is predicted to continue in 2021, supported by positive developments in vaccines and the handling of the pandemic, as well as the effectiveness of extraordinary fiscal and financial policies in order to overcome the impact of the pandemic in various countries. Various early indicators continue to show economic improvement in various countries. The manufacturing and services Purchasing Managers' Index (PMI) continued to rise in the US and China. Consumer and business confidence continued to improve and the unemployment rate began to fall gradually in the US, China and the European region. Improvements in the performance of these indicators are predicted to continue to increase in 2021. Global economic growth is predicted to be in the range of 5.0% in 2021, and 3.8% in 2022.

Conforming with the prospects for world economic recovery, global financial market uncertainty is expected to decrease, and capital flows to developing countries are expected to increase.



Ketidakpastian global semakin turun pasca-pemilihan umum Presiden di AS pada November 2020. Indikator volatilitas (VIX) di pasar keuangan diperkirakan turun, sejalan dengan membaiknya prospek perekonomian, termasuk di negara berkembang. Penurunan ketidakpastian global ini diharapkan akan mendorong peningkatan aliran masuk modal asing kembali ke negara berkembang, dan membantu mengurangi tekanan lebih lanjut pada nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

Tren pemulihan ekonomi global dan perbaikan aktivitas ekonomi domestik didukung perkembangan positif vaksin, pemulihan ekonomi domestik diperkirakan berlanjut di tahun 2021. Optimisme ini didukung penguatan aktivitas ekonomi akibat peningkatan mobilitas masyarakat, walaupun PSBB masih diberlakukan di beberapa wilayah untuk mencegah kenaikan kembali kasus positif COVID-19. Pertumbuhan ekonomi global yang semakin baik akan menopang perbaikan ekspor Indonesia yang pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas produksi dan investasi. Perkembangan awal berbagai indikator hingga akhir Desember 2020 yang terus meningkat mengonfirmasi berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan meningkat pada kisaran 4,8-5,8% pada 2021.

Berdasarkan asumsi di atas, peluang bagi Perseroan untuk mencatatkan kinerja yang lebih baik di tahun mendatang tentunya masih sangat luas. Faktor pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah akan sangat mempengaruhi kinerja KCI karena keduanya menentukan *people power* untuk melakukan mobilitas yang sangat berpengaruh pada kinerja KCI.

Prospek perkeretaapian masih sangat menjanjikan melihat beberapa proyek kereta api masuk dalam PSN (Proyek Strategis Nasional). KCI juga akan menerima penugasan dari Kementerian Perhubungan dan KAI (*Holding*) untuk pengelolaan KA lokal Bandung dan Surabaya. KCI akan fokus pada investasi dan pengembangan pelayanan pelanggan dan berkomitmen ikut mensukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Komitmen Perseroan dibuktikan dengan melaksanakan pelayanan yang mematuhi ketentuan pemerintah dan upaya turut mensukseskan program vaksinasi BUMN sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan Perseroan.

Dengan dukungan dan arahan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham serta kerja keras seluruh elemen Perseroan, Direksi menyakini bahwa keseluruhan target yang ditetapkan untuk tahun 2021 bukanlah suatu target yang tidak realistis. Oleh

Global uncertainty has subsided further after the presidential election in the US in November 2020. The volatility indicator (VIX) on financial markets is predicted to decline, in line with improving economic prospects, including in developing countries. This reduction in global uncertainty is expected to encourage increased inflows of foreign capital back into developing countries, and help reduce further pressure on the exchange rates of developing countries, including Indonesia.

The trend of global economic recovery and improvement in domestic economic activity is supported by positive vaccine developments, domestic economic recovery is predicted to continue in 2021. This optimism is supported by strengthening economic activity due to increased community mobility, although PSBB is still being implemented in some areas to prevent a re-increase in positive cases of COVID-19. Improved global economic growth will support improvement in Indonesia's exports which in turn will increase production and investment activities. The initial development of various indicators until the end of December 2020 which continued to increase confirmed the continued improvement in the domestic economy. Indonesia's economic growth is predicted to increase in the range of 4.8-5.8% in 2021.

Based on the aforementioned assumptions, the opportunity for the Company to achieve a better performance in the coming year is wide open. Economic growth factors and government policies will greatly affect KCI's performance as they determine people's power to carry out mobility which greatly affects KCI's performance.

The prospect of the railway is still very promising considering that several railway projects are included in the PSN (National Strategic Project). KCI will also receive an assignment from the Ministry of Transportation and KAI (Holding) for the management of local trains in Bandung and Surabaya. KCI will focus on investment and customer service development and is committed to participating in the success of the National Economic Recovery (PEN) program. The Company's commitment is proven by providing services that comply with government regulations and efforts to contribute to the success of the BUMN vaccination program as a form of preventing the spread of COVID-19 within the Company.

With the support and direction from the Board of Commissioners, shareholders, and all Company's elements, we are confident to achieve the overall target set in 2021. Hence, we will always prioritize operational control to improve efficiency in the

karena itu, upaya pengendalian operasi guna meningkatkan efisiensi akan selalu dikedepankan oleh manajemen dalam menjalankan operasional. Perseroan optimis untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas bisnis yang dihasilkan dan tumbuh lebih baik di tahun mendatang.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

KCI senantiasa memprioritaskan praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG) untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang mendukung terciptanya keberhasilan usaha dan akuntabilitas. Untuk itu, Perseroan senantiasa meningkatkan implementasinya demi mencapai hasil yang optimal.

Di tahun 2020 Perseroan terus melaksanakan prinsip-prinsip fundamental terkait pelaksanaan prinsip GCG yang terdiri dari 5 (lima) prinsip, yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran. Bentuk komitmen peningkatan implementasi GCG juga dituangkan dalam upaya meningkatkan kualitas informasi dan tata kelola melalui penyusunan Laporan Tahunan. Perseroan meyakini bahwa informasi yang akurat di dalam Laporan Tahunan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaporan terhadap pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai perwujudan komitmen 'beyond governance'.

Inisiasi penguatan penerapan GCG juga ditandai dengan dilaksanakannya sistem manajemen risiko sebagai upaya untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam hal strategi serta operasional Perseroan. Unit pengelola manajemen risiko dibentuk atas dasar Surat Keputusan Direksi Nomor SK-002/KCJ/DIR-HRD/2/2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Perseroan. Saat ini pengelolaan risiko dalam berbagai kebijakan dan pengambilan keputusan bisnis di perusahaan masih fokus pada pengelolaan risiko investasi, termasuk di dalamnya mengenai assessment risiko hingga monitoring dan evaluasi.

Sepanjang tahun 2020, Unit Manajemen Risiko telah melakukan 12 assessment risiko dengan total 741 risiko. Pengendalian risiko dibangun secara komprehensif, terencana dan terstruktur. Untuk pengelolaan risiko, ke depannya Perseroan akan menerapkan Manajemen Risiko Korporasi/Enterprise Risk Management (ERM) berdasarkan ISO 31000:2018. Penerapan ERM telah mulai diimplementasikan secara bertahap pada tahun 2020 dan diharapkan dapat menjamin nilai tambah pemegang saham (shareholder value added).

Setiap tahunnya, Perseroan berupaya untuk mengimplementasikan tata kelola yang kian efektif dan optimal. Perseroan menerapkan budaya kerja dan standar berdasarkan

Company's operations. We are optimistic to improve the quality and quantity of the business to grow bigger in the coming years.

Implementation of Good Corporate Governance

The company always prioritizes good corporate governance (GCG) practices to create a management system that supports business success and accountability. For this reason, the Company continues to improve its implementation in order to achieve optimal results.

In 2020 the Company will continue to implement fundamental principles related to the implementation of GCG principles which consist of 5 (five) principles, namely Openness, Accountability, Accountability, Independence, and Fairness. The Company also provides a form of commitment to increase the implementation of GCG in an effort to improve the quality of information and governance through the preparation of an Annual Report. The Company believes that accurate information in the Annual Report is not only a form of accountability for the Company's reporting to stakeholders, but also as a manifestation of its commitment to 'beyond governance'.

The initiation of strengthening the implementation of GCG was also marked by the implementation of a risk control system as an effort to prevent unwanted things from occurring in terms of the Company's strategy and operations. The risk management unit was established based on the Decree of the Board of Directors Number SK-002/KCJ/DIR-HRD/2/2017 dated February 1, 2017 concerning the Establishment of Organizational Structure and Management within the Company. Currently, risk management in various policies and business decision making in the company is still focused on managing investment risk, including risk assessment to monitoring and evaluation.

Throughout 2020, the Risk Management Unit has conducted 12 risk assessments with a total of 741 risks. Risk control is built in a comprehensive, planned and structured manner. For risk management, the Company will implement Corporate Risk Management/Enterprise Risk Management (ERM) based on ISO 31000:2018. The implementation of ERM has been enacted gradually in 2020 and is expected to safeguard shareholder value added.

Every year, the achievement of the Company's GCG score illustrates that governance is increasingly effective and optimal. The Company implements a work culture and standards based



etika kerja serta budaya kerja sesuai dengan pedoman kerja serta perundang-undangan yang berlaku. Budaya kerja dan etika yang ditetapkan ini menjadi prinsip yang wajib ditaati oleh seluruh elemen di lingkungan KCI. Melalui seluruh perangkat GCG yang telah dimiliki saat ini, KCI optimis untuk merealisasikan implementasi GCG yang lebih baik.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perseroan berpandangan bahwa Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagaimana telah kita lalui bersama, sepanjang tahun 2020 merupakan masa pandemi yang harus dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali KCI. Pada masa ini, KCI dituntut untuk mengerahkan segala upaya dalam memastikan kesehatan serta keamanan pelanggan dalam menggunakan jasa Perseroan di tengah wabah COVID-19 yang memiliki transmisi tinggi.

Sebagai wujud kepedulian Perseroan terhadap pemangku kepentingan yang terdampak pandemi, Perseroan mengalihkan seluruh dana CSR yang sudah diprogramkan menjadi dana penanggulangan COVID-19. Secara umum, dana penanggulangan COVID-19 ini ditujukan kepada para pelanggan KCI sebagaimana disalurkan melalui penambahan layanan dan fasilitas terkait Protokol Kesehatan. Selain itu, sebagian dana juga ditujukan kepada seluruh karyawan Perseroan yang terpapar COVID-19.

Meskipun di tengah pandemi yang membatasi pergerakan, Perseroan tetap mendorong karyawannya untuk meningkatkan kompetensi. Adapun realisasi biaya pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp759,08 miliar atau mencatat pencapaian 85% dibandingkan target tahun 2020. Keterbatasan di masa pandemi tidak mengurangi komitmen Perseroan untuk dapat meningkatkan level kompetensi SDM dalam menunjang perkembangan operasi dan bisnis Perseroan, sekaligus meningkatkan level kompetensi pribadi masing-masing karyawan.

Selain terhadap masyarakat dan karyawan, pelanggan juga menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan KCI. Tanggung jawab terhadap layanan bagi pelanggan dan peran terhadap masyarakat diwujudkan melalui pengembangan layanan yang berkualitas serta dapat diandalkan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, Perseroan melakukan survei rutin untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Pada tahun 2020 nilai indeks kepuasan pelanggan secara keseluruhan mengalami peningkatan yaitu dari 86,1% di tahun 2019, menjadi 88,9% di tahun 2020.

on work ethics and work culture in accordance with work guidelines and applicable laws. All elements in the Company are obliged to adhere these work culture and ethics. Through all GCG elements, the Company is optimistic to achieve a better implementation.

The Social and Environmental Responsibilities

The Company views that Corporate Social Responsibility (CSR) is an effort by business owners to realize sustainable development. As we have been through together, throughout 2020 is a pandemic period that must be faced by all levels of society, KCI is no exception. At this time, KCI is required to exert all efforts to ensure the health and safety of customers in using the Company's services in the midst of the COVID-19 outbreak which has a high transmission rate.

As a form of the Company's concern for stakeholders affected by the pandemic, the Company has converted all CSR funds that have been programmed into funds for the COVID-19 response. In general, this COVID-19 response fund is aimed at KCI customers as channeled through additional services and facilities related to the Health Protocol. In addition, some of the funds were also directed to all the Company's employees who were exposed to COVID-19.

Even in the midst of pandemic that limits movement, the Company continues to encourage its employees to improve competence. The realization of employee competency development costs in 2020 was recorded at Rp759.08 billion, or achieved 85% of the target. This decrease occurred in line with limitations during the pandemic and does not reduce the Company's commitment to be able to increase the competency level of HR in supporting the development of the Company's operations and business, as well as increasing the level of personal competence of each employee.

In addition to the community and employees, customers are also a significant aspect in KCI's management. Responsibility for service to customers and the role of society is realized through the development of quality and reliable services. To improve service quality to customers, the Company conducts regular surveys to measure the level of customer satisfaction. In 2020, the overall customer satisfaction index value increased from 86.1% in 2019, to 88.9% in 2020.

Perubahan Komposisi Direksi

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa di tahun 2020 telah terjadi perubahan dalam komposisi anggota Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KAI Nomor: KP.303/XII/14/KA-2020 Nomor Yayasan Pusaka Nomor 08/RIS-KCI/XII/2020 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2020.

Per 31 Desember 2020, komposisi Direksi KCI adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama: Wiwik Widayanti
- Direktur Operasi dan Pemasaran: Wawan Ariyanto
- Direktur Teknik: Roppiq Lutzfi Azhar
- Direktur Keuangan dan Administrasi: Muhammad Widodo

Penutup

Mewakili Direksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PT KAI sebagai *Holding Company*, Dewan Komisaris, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan. Perseroan mendedikasikan seluruh pencapaian dan penghargaan yang diterima pada tahun 2020 kepada para pemangku kepentingan, energi yang menjadi kekuatan kami dalam mengembangkan dan memajukan diri menjadi lebih baik. Kami berterima kasih atas segala dukungan, kepercayaan, masukan dan kontribusi positif yang diberikan oleh masing-masing individu.

Apresiasi mendalam juga saya sampaikan kepada para karyawan yang telah mendedikasikan diri tanpa mengenal lelah. Seluruh kinerja Perseroan dibingkai oleh rekam jejak PT Kereta Commuter Indonesia dalam hal ketahanan, keselamatan, disiplin, kreativitas, dan ketangkasan. Seluruhnya adalah hasil kerja keras insan Perseroan, yang bahu membahu sebagai entitas yang resilien, dipersatukan oleh aspirasi bersama, dan didorong oleh keinginan besar untuk memberikan yang terbaik.

Changes in the Composition of the Board of Directors

On this occasion we would like to convey that in 2020 there has been a change in the composition of the members of the Company's Board of Directors based on the Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT KAI Number: KP.303/XII/14/KA-2020 Number of Pusaka Foundation Number 08/RIS-KCI /XII/2020 which was held on December 28, 2020.

As of December 31, 2020, the composition of the Board of Directors is as follows:

- President Director: Wiwik Widayanti
- Director of Operation and Marketing: Wawan Ariyanto
- Director of Technic: Roppiq Lutzfi Azhar
- Director of Finance and Administration: Muhammad Widodo

Closing Remarks

On behalf of the Board of Directors, I would like to express my gratitude and appreciation to the PT KAI as *Holding Company*, the Board of Commissioners, customers, and other stakeholders for their continued support and trust. The Company dedicates all the achievements and awards received in 2020 to stakeholders, energy which is our strength in developing and advancing ourselves to be better. We are grateful for all the support, trust, input and positive contributions given by each individual.

My deep appreciation also goes to the employees who have dedicated themselves tirelessly. All of the Company's performance is framed by the track record of PT Kereta Commuter Indonesia in terms of resilience, safety, discipline, creativity and agility. All of them are the result of the hard work of the Company's personnel, who work hand in hand as a resilient entity, united by common aspiration, and driven by a passionate desire to give their best.

Jakarta, Maret 2021
Jakarta, March 2021

Atas Nama Direksi,
On behalf of the Board of Directors,

Wiwik Widayanti
Direktur Utama
President Director



SPINNING THE LIMIT
TO WIN FROM PANDEMIC



PROFIL PERUSAHAAN

Company Profiles

54	Identitas Perseroan <i>Corporate Identity</i>
56	Jejak Langkah <i>Milestone</i>
60	Penghargaan dan Sertifikasi <i>Awards and Certification</i>
64	Riwayat Singkat Perseroan <i>Company's Brief History</i>
66	Maksud dan Tujuan <i>Purpose and Objective</i>
67	Bidang Usaha <i>Line of Business</i>
70	Wilayah Operasional <i>Operational Area</i>
72	Struktur Organisasi <i>Organizational Structure</i>
74	Visi dan Misi <i>Vision and Mission</i>
77	Logo dan Perubahannya <i>Logo and Transformations</i>
81	Profil Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Profile</i>
86	Profil Direksi <i>Board of Directors Profile</i>
91	Profil Pejabat Eksekutif <i>Executive Officers Profile</i>
100	Struktur dan Komposisi Pemegang Saham <i>Structure and Composition of Shareholders</i>
103	Struktur Grup dan Asosiasi Perseroan <i>Corporate Group and Association Structure</i>
113	Sumber Daya Manusia <i>Human Resources</i>
148	Teknologi Informasi <i>Information Technology</i>
167	Akses Informasi Daftar Pemegang Saham Bulanan, Triwulanan, dan Semester <i>Information Access on Monthly, Quarterly, and Semi-Annually Shareholders Register</i>
167	Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Ventura Bersama <i>List of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures</i>
168	Nama Dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal <i>Name and Address of Capital Market Supporting Institutions and Professionals</i>
169	Informasi pada Website Perseroan <i>Information on the Company's Website</i>
171	Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal <i>Education and/or Training for the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit</i>



03





IDENTITAS PERUSAHAAN

Corporate Identity

Nama Perusahaan Company Name

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)

Status Perusahaan Company Status

Swasta/Anak Perusahaan BUMN
Private/BUMN Subsidiaries

Tanggal Pendirian Date of Establishment

15 September 2008
September 15, 2008

Dasar Hukum Pendirian Deed of Establishment

Akta Pendirian No. 457 Tanggal 15 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H yang disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-74707.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 yang telah diubah terakhir dengan Akta No. 19 tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Mulyahati, S.H., M.Kn yang disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0352258 Tahun 2017 tanggal 29 Oktober 2019.

Deed of Establishment No. 457 Dated September 15, 2008 which was made before the Notary Ilmiawan Dekrit S, S.H which was ratified by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-74707.AH.01.01 Year 2008 dated October 16, 2008 as last amended by Deed No. 19 dated October 14, 2019 which was made before the Notary Tri Mulyahati, S.H., M. Kn which was approved by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0352258 Year 2017 dated October 29, 2019.

Bidang Usaha Business Line

Jasa Angkutan Kereta (Operator Kereta Komuter)
Train Transportation Services (Commuter Train Operators)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Tax Register Number

02.491.683.5-093.000

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Company Registration Certificate

09.05.1.46.60747

Nomor Induk Berusaha (NIB) Business Identification Number

8120002900087

Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Commuter Indonesia Railway Operational License of PT Kereta Commuter Indonesia

KP 1022 Tahun 2018
KP 1022 2018

Kepemilikan Saham Shareholders

- PT Kereta Api Indonesia (Persero) 99,78%
- Yayasan Pusaka 0,22%

Modal Dasar
Basic Capital

Rp542.000.000.000

Modal Ditempatkan
Capital Placement

Rp230.500.000.000



Jumlah Pegawai
Total Employee

2.566

Unit Operasional
Operational Unit

80

Unit Stasiun
Jabodetabek
Jabodetabek
Station Unit

11

Stasiun KRL
Yogyakarta
KRL Yogyakarta
Station

04

Stasiun KA Lokal
Prambanan Ekspres
Prambanan Ekspres
KA Lokal Station

10

Merak Jaya Local
Train Stations

03

Depot Units

02

Overhaul Units

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Stasiun Juanda/Juanda Station
Jl. Ir. Haji Juanda 1
Jakarta Pusat/Central Jakarta, Jakarta-
Indonesia 10120
+6221-3453535
kci@krl.co.id
www.krl.co.id

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Erni Sylviane Purba
Vice President Sekretaris Perusahaan
VP Corporate Secretary

E-mail :
sekper@krl.co.id

Telp /Phone :
021-345 35 35 ekstensi 12311

Alamat /Address :
Stasiun Juanda/Juanda Station Lt.1 Jl.
Ir. Haji Juanda 1 Jakarta Pusat/Central
Jakarta, Jakarta-Indonesia 10120

Media Sosial
Social Media

@commuterline
 @CommuterLine
 @Commuter Line
 COMMUTER CHANNEL





JEJAK LANGKAH

Milestone

2008

15 September | September 15

KCJ resmi menjadi Anak Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
KCJ officially became a subsidiary of PT Kereta Api Indonesia (Persero).

2010

19 Agustus | August 19

Peluncuran perdana pengoperasian kereta khusus wanita (berada pada kereta pertama dan terakhir pada setiap rangkaian) dihadiri oleh Menteri Perhubungan Freddy Numberi dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Linda Amalia Sari.

Premiere launching of special trains for women (located on the first and last trains on each train set), attended by Minister of Transportation Freddy Numberi and Minister of Women and Children Empowerment Linda Amalia Sari.



2009

23 Maret | March 23

Kedatangan 8 unit Kereta Seri 8500 Tokyu sebagai bagian program pengadaan KRL tahun 2009. Selanjutnya KRL ini dikenal dengan sebutan Jalita (Jalan-Jalan Lintas Jakarta).
Tokyu train series as part of procurement program in 2009. Subsequently, these EMUs is popularly known as Jalita (Jalan-Jalan Lintas Jakarta).

19 Mei | May 19

Peresmian KCJ yang dihadiri oleh Menteri BUMN Sofyan Djalil dan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djalal.
Inauguration of KCJ, attended by the Minister of State-owned Enterprises Sofyan Djalil and Minister of Transportation Jusman Syafii Djalal.

2011

2 Juli | July 2

Pengoperasian Pola Operasi *Single Operation*, pada pola operasi ini waktu tempuh KRL menjadi sama, tidak ada penyusulan & berhenti di setiap stasiun.

Commencement of Single Operation Pattern, in which the EMU travel time was similar, there is no catch-up and stop at every station.

25 Juli | July 25

Tweet perdana KCJ melalui akun Twitter @commuterline sekaligus terbentuknya Helpdesk KCJ.
KCJ's first tweet through @commuterline Twitter account and the establishment of KCJ Helpdesk.

2012

1 Februari | February 1

Abonemen atau Kartu Trayek Bulanan (KTB) dan Kartu Langganan Sekolah (KLS) digantikan dengan kartu elektronik Commet yang memiliki masa aktif satu bulan untuk satu kali pembayaran.

Subscription or Monthly Route Card (KTB) and School Subscription Card (KLS) were replaced with Commet electronic card which has an active period of one month for one payment.

1 Oktober | October 1

Kenaikan tarif Rp2.000 untuk semua relasi.
The increase in fare of Rp2,000 for all trips.

1 Desember | December 1

Penghapusan kartu Commet (abonemen). Tiket perjalanan KRL hanya tersedia untuk jenis tiket harian satu kali perjalanan.

Elimination of Commet card (subscription). EMU tickets are only available for one-day travel tickets.

2013

1 Juli | July 1

- Penerapan sistem e-ticketing, menggantikan tiket kertas.
Implementation of e-ticketing system, replacing paper tickets.
- Penerapan tarif progresif per stasiun (perhitungan tarif berdasarkan stasiun yang dilalui).
Implementation of progressive rates (calculation of rates based on stations passed).

25 Juli | July 25

Penghapusan KRL Ekonomi pada semua relasi, sehingga layanan KRL menjadi sistem tunggal (Single Class).
Elimination of EMU Economy class in all trips.

22 Agustus | August 22

Pemberlakuan tiket satu kali perjalanan dengan penerapan jaminan kartu sebesar Rp5.000. Selanjutnya tiket satu kali perjalanan yang sebelumnya dikenal dengan KST berubah menjadi THB (tiket harian berjaminan).
Implementation of one-way tickets with a card guarantee of Rp5,000. Subsequently, the onetime ticket previously known as KST changes to THB (daily secured ticket).

2014

15 Januari | January 15

Pengalihan pengelolaan awak KA KRL, pegawai dipo, dan PUK KRL ke KCJ.
Transfer management of EMU trains, dipo employees and EMU PUK to KCJ.

5 Maret | March 5

Pengoperasian KRL dengan rangkaian 10 kereta (SF 10) perdana di lintas Bogor.
Commencement of EMU with the first SF 10 set in Bogor Line.

16 Juni | June 16

KCJ dan tiga bank BUMN meluncurkan integrasi kartu prabayar dengan E-Ticketing Commuterline (Brizi, E-Money, dan Tap Cash).
KCJ and three state-owned banks launch the integration of prepaid card and E-Ticketing Commuterline (Brizi, E-Money, and Tap Cash).

2015

1 April | April 1

- Penerapan tarif progresif berdasarkan km yang dilalui menggantikan tarif per stasiun.
Implementation of progressive rates based on the distance traversed replacing tariffs per station.
- Pengalihan pengelolaan Balai Yasa Manggarai KRL untuk perawatan tahunan (overhaul) dari PT KAI ke KCJ.
Transfer of Balai Yasa Manggarai Management EMU for the annual maintenance (overhaul) from PT KAI (Persero) to KCJ

16 September | September 16

Pengoperasian KRL dengan Rangkaian SF 12 Perdana di Lintas Bogor.
Commencing operation of EMU trains set of 12 in Bogor Line.

21 Desember | December 21

Pengoperasian KRL pada Lintas Tanjung Priok-Jakarta Kota.
Commencing operation of the EMU for Tanjung Priok-Jakarta Kota Line.

27 Desember | December 27

Pengoperasian Vending Machine di Stasiun Jakarta Kota dan Sudirman.
Operation of Vending Machines at Jakarta Kota and Sudirman Stations.



2016

Januari | January

Integrasi antarmoda KRL dengan TransJakarta di Stasiun Tebet, Stasiun Manggarai dan Stasiun Palmerah.

Multimode integration between EMU and TransJakarta at Tebet Station, Manggarai Station and Palmerah Station.

Juli | July

Peluncuran layanan informasi berbasis aplikasi KRL Access.

Launching of application based information service, EMU Access.

2018

8 Januari | January 8

Pengoperasian perdana *Vending Machine Fare Adjustment* serta penerapan mekanisme penyesuaian kekurangan tarif untuk pengguna THB dan penurunan saldo minimum KMT menjadi Rp5.000.

The first operation of the Fare Adjustment Vending Machine as well as the implementation of tariff adjustment mechanism for THB users and decreases the minimum balance of the KMT to Rp5,000.

14 Mei | May 14

Launching Simulator KRL di Dipo Depok.

Launching of EMU Simulator in Dipo Depok.

2017

1 April | April 1

Pengoperasian KRL sampai dengan Rangkasbitung diikuti pembukaan Stasiun Citeras dan pembukaan kembali Stasiun Angke untuk layanan KRL.

The operation of EMU to Rangkasbitung and followed by the opening of Citeras Station and the reopening of Angke Station for EMU services.

19 September | September 19

PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) berganti nama menjadi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) changed its name into PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

19 September | September 19

- Pengoperasian *underpass* Stasiun Bojong Gede.
Operation of Bojong Gede Station underpass.
- Presiden Jokowi pertama kali naik KRL bertepatan dengan HUT KAI.
President Jokowi's first KRL ride in conjunction with KAI's anniversary.

8 Oktober | October 8

Pengoperasian KRL rute Jakarta Kota-Cikarang dan pembukaan layanan KRL di Stasiun Cikarang, Cibitung, Bekasi Timur dan Tambun.

Operation of Jakarta Kota-Cikarang route and the opening of EMU services at Cikarang, Cibitung, East Bekasi, and Tambun Stations.

2019

1 Februari | February 1

Pengoperasian bangunan baru Stasiun Cisauk.

Operation of the new building Cisauk Station.

3 Maret | March 3

Penggunaan aplikasi Link Aja! sebagai alat pembayaran KRL.

Implementation of the Link Aja! app as EMU's payment tool.

14 November | November 14

PT KCI mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk mengelola uang elektronik.

PT KCI obtained license from Bank Indonesia to manage electronic money.

31 Desember | December 31

KCI Go Green.

KCI Go Green.



2020

5 Juni | June 5

Pembatasan jam operasional KRL di masa PSBB, pembatasan pengguna KRL 74 orang per kereta, dan pemberlakuan tambahan yaitu balita dilarang naik KRL, dilarang bicara di kereta, dan pengaturan waktu lansia & pedagang di KRL.

The limitation of KRL operational hours according to PSBB regulations, including additional implementations which prohibit toddlers to ride the KRL, talking on the train, manage times for the elderly & traders on the KRL.

17 Juni | June 17

Menteri BUMN, Menteri Perhubungan dan Gubernur DKI Jakarta meresmikan Stasiun Tanah Abang, Sudirman, Juanda, dan Pasar Senen sebagai Stasiun Integrasi.

The Minister of SOEs, the Minister of Transportation and the Governor of DKI Jakarta inaugurated the Tanah Abang, Sudirman, Juanda, and Pasar Senen Stations as Integration Stations.

25 Agustus | August 25

Pembentukan C-Rangers sebagai Agen Perubahan PT KCI yang bertugas melakukan sosialisasi dan edukasi Budaya Perusahaan dan Kebiasaan Baru.

Formation of C-Rangers as Agents of Change for PT KCI in charge of socializing and educating Corporate Culture and New Normal.

29 September | September 29

Perubahan logo baru PT KAI (Persero) dan seluruh Entitas Anak melambangkan semangat baru dalam mewujudkan visi Menjadi Solusi Ekosistem Transportasi Terbaik untuk Indonesia.

The change in the new logo of PT KAI (Persero) and all of its Subsidiaries symbolizes a new spirit in realizing the vision of Being the Best Transportation Ecosystem Solution for Indonesia.

1 Oktober | October 1

Alih kelola KA Lokal di wilayah Daop 1 Jakarta dan alih kelola Kereta Prambanan Ekspres (Prameks) Daop 6 Yogyakarta.

Transfer of management of local trains in Daop 1 Jakarta area and transfer of management of Prambanan Express Train (Prameks) Daop 6 Yogyakarta.

20 November | November 20

KCI mendapat Sertifikat SMK3 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

KCI received SMK3 Certificate from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia.





PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certification

PENGHARGAAN

Awards



Kereta Commuter Indonesia meraih penghargaan Gold Winner kategori The Best of Private Company InMA 2020 majalah C-News edisi September 2019.

Kereta Commuter Indonesia won the Gold Winner award in the category of The Best of Private Company InMA 2020 for the September 2019 edition of C-News magazine.

7 Februari
February 7



Kereta Commuter Indonesia meraih penghargaan The Winner untuk kategori The Best Content Marketing Implementation in Transportation Category (ICMA 2020).

Kereta Commuter Indonesia won The Winner award for The Best Content Marketing Implementation in Transportation Category (ICMA 2020) category.

11 September
September 11



Innovation and Improvement Award 2020 PT Kereta Api Indonesia (Persero) Peringkat 3 Anak Perusahaan atas Overhaul Manggarai Kereta Commuter Indonesia.

Innovation and Improvement Award 2020 PT Kereta Api Indonesia (Persero) 3rd Winner of Subsidiary for Manggarai Overhaul Category.

18 September
September 18



Innovation and Improvement Award 2020 PT Kereta Api Indonesia (Persero) Peringkat 1 Anak Perusahaan atas Pelayanan Kereta Commuter Indonesia.

Innovation and Improvement Award 2020 PT Kereta Api Indonesia (Persero) First Winner of Subsidiary for Services Category.

18 September
September 18



Tim GGWP Juara III (Good Generator With Preventive) Pembuatan Alat Uji Perangkat Motor Generator Untuk Mengetahui Kualitas serta Meningkatkan Efisiensi Waktu dan Biaya pada Unit Sarana.

GGWP Team 3rd Place (Good Generator With Preventive) Making Motor Generator Test Equipment to Determine Quality and Improve Time and Cost Efficiency in Facility Units.

18 September
September 18



Silver Stevie Winner kategori Company of The Year-Transportation-Large.

Silver Stevie Winner for Corporate Category of The Year-Transportation-Large category.

18 September
September 18



Silver Stevie Winner kategori Most Valuable Service.

Silver Stevie Winner for the Most Valuable Service category.

18 September
September 18



Bronze Stevie Winner kategori Company of The Year-Consumer Service-Large.

Bronze Stevie Winner for Company of The Year-Consumer Service-Large category.

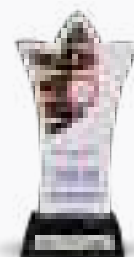
18 September
September 18



Bronze Stevie Winner kategori Most Exemplary Employee.

Bronze Stevie Winner for the Most Exemplary Employee category.

18 September
September 18



Tim Good Generator with Preventive (GGWP) Kereta Commuter Indonesia meraih penghargaan Platinum kategori Best Presentation yang diberikan pada Penghargaan Ajang TKMPN XXIV and International Quality & Productivity Convention (IQPC) 2020.

The Good Generator with Preventive (GGWP) team won a Platinum award for the Best Presentation given at the 2020 TKMPN Award and International Quality & Productivity Convention (IQPC) 2020.

18 November
November 18



Tim The Dauns KCI Go Green Kereta Commuter Indonesia meraih penghargaan Gold kategori Best Presentation yang diberikan pada Penghargaan Ajang TKMPN XXIV and International Quality & Productivity Convention (IQPC) 2020.

The Dauns KCI Go Green Team won Gold award for Best Presentation category at the TKMPN XXIV and International Quality & Productivity Convention (IQPC) 2020.

18 November
November 18



Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penghargaan kepada karyawan Kereta Commuter Indonesia, Wahyu Lisyantara, sebagai Apresiasi Atas Pelaporan Gratifikasi Tahun 2020.

The Corruption Eradication Commission awarded the Indonesian Commuter Train employee, Wahyu Lisyantara, as an appreciation for the 2020 Gratification Reporting.

8 Desember
December 8



Penghargaan Ajang TKMPN XXI
Kereta Commuter Indonesia Meraih Predikat Gold Penerapan Stasiun Ramah Lingkungan dan Predikat Platinum Pembuatan Alat Uji Perangkat Motor Generator Untuk Mengetahui Kualitas Serta Meningkatkan Efisiensi Waktu dan Biaya pada Unit Sarana.

TKMPN XXI Award, KAI Commuter Indonesia Wins Gold Predicate for the Implementation of Environmentally Friendly Stations and Platinum Predicate Manufacture of Generator Motor Test Equipment to Determine Quality and Improve Time and Cost Efficiency in Facility Units.

18 November
November 18



Kereta Commuter Indonesia meraih penghargaan dari Menteri Sosial Republik Indonesia atas Partisipasi dalam Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2020.

Kereta Commuter Indonesia received an award from the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia for Participation in the Implementation of the 2020 Heroes Day Commemoration.

26 November
November 26



KAI Commuter mendapat Predikat Silver di ajang DTKJ Awards 2020.

KAI Commuter earns a Silver Predicate at the DTKJ Awards 2020.

1 Desember
December 1





RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Company's Brief History



Hingga desember 2020, KCI telah memiliki 1.100 unit KRL, dan akan terus bertambah. Sepanjang tahun 2020, KCI telah melakukan penambahan armada sebanyak 168 unit. Hal ini untuk memenuhi permintaan penumpang yang terus bertambah dari waktu ke waktu.

As of december 2020, KCI has 1,100 units of EMU, and will continue to grow. Through 2020, KCI has made the addition of a fleet of 168 units. This is to meet the growing demands of passengers over time.

PT KAI Commuter Jabodetabek sejak tanggal 19 September 2017 telah berganti nama menjadi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Sebagai salah satu anak perusahaan di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero), KCI mengelola KA Commuter Jabodetabek dan sekitarnya. KCI dibentuk sesuai dengan Inpres No. 5 tahun 2008 dan Surat Menteri Negara BUMN No. S-653/MBU/2008 tanggal 12 Agustus 2008. Perubahan nama menjadi KCI tertuang dalam risalah Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 7 September 2017 yang juga telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dengan Nomor Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0019228.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 19 September 2017.

Pembentukan anak perusahaan ini berawal dari keinginan para stakeholder untuk lebih fokus dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan menjadi bagian dari solusi masalah transportasi perkotaan yang semakin kompleks. Perseroan ini resmi menjadi anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sejak tanggal 15 September 2008. Kehadiran KCI dalam industri jasa angkutan KA Commuter bukanlah kehadiran yang tiba-tiba, tetapi merupakan proses pemikiran dan persiapan yang cukup panjang. Dimulai dengan pembentukan Divisi Angkutan Perkotaan Jabodetabek oleh PT KAI (Persero), yang terpisah dari PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta.

PT KAI Commuter Jabodetabek since September 19, 2017 has changed its name to PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). As one of the subsidiaries within PT Kereta Api Indonesia (Persero), KCI manages the Jabodetabek Commuter Train and its surroundings. KCI was formed in accordance with Presidential Instruction No. 5 of 2008 and the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-653/MBU/2008 dated August 12, 2008. The change of name to KCI was stated in the minutes of the General Meeting of Shareholders on September 7, 2017, which also approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the Amendment to the Articles of Association of Limited Liability Companies with the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-0019228.AH.01.02. Year 2017 on September 19, 2017.

The establishment of this subsidiary was driven by stakeholders' aspirations to sharpen the focus on providing quality services as the solution to increasingly complex urban transportation problems. The Company has officially become a subsidiary of PT Kereta Api Indonesia (Persero) since September 15, 2008. KCI's presence in the commuter rail transportation service industry is not a sudden presence, but has gone through a long process of thought and preparation. Starting with the establishment of Jabodetabek Urban Transportation Division by PT KAI (Persero), which is separated from PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta.



Setelah pemisahan ini, pelayanan KRL di wilayah Jabotabek berada di bawah PT KAI (Persero) Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek sementara pelayanan KA jarak jauh yang beroperasi di wilayah Jabodetabek berada di bawah PT KAI Daop 1 Jakarta. Dan akhirnya PT KAI (Persero) Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek berubah menjadi sebuah perseroan terbatas, PT KCJ. Setelah menjadi perseroan terbatas, perusahaan ini mendapatkan izin usaha No. KP 51 Tahun 2009 dan izin operasi penyelenggara sarana perkeretaapian No. KP 53 Tahun 2009 yang semuanya dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Tugas pokok perusahaan yang baru ini adalah menyelenggarakan pengusahaan pelayanan jasa angkutan kereta api komuter dengan menggunakan sarana Kereta Rel Listrik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya serta pengusahaan di bidang usaha non angkutan penumpang.

KCI memulai modernisasi angkutan KRL pada tahun 2011 dengan menyederhanakan rute yang ada menjadi lima rute utama, penghapusan KRL ekspres, penerapan kereta khusus wanita, dan mengubah nama KRL ekonomi-AC menjadi kereta Commuter Line. Proyek ini dilanjutkan dengan renovasi, penataan ulang, dan sterilisasi sarana dan prasarana termasuk jalur kereta dan stasiun kereta yang dilakukan bersama PT KAI (Persero) dan Pemerintah. Pada 1 Juli 2013, KCI mulai menerapkan sistem tiket elektronik (E-Ticketing) dan sistem tarif progresif. Penerapan dua kebijakan ini menjadi tahap selanjutnya dalam modernisasi KRL Jabodetabek.

After this separation, KRL services in Jabotabek's area are under PT KAI (Persero), Jabotabek Urban Transport Division, while long-distance train services operating in the Jabodetabek area are under PT KAI Daop 1 Jakarta. Afterwards, PT KAI (Persero) Jabotabek Urban Transportation Division turned into a limited liability company, PT KCJ. After becoming a limited liability company, the company obtained a business license no. KP 51 of 2009 and the operating license for the operator of railway facilities No. KP 53 of 2009. All of which were issued by the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia. The main task of this new company is to organize commuter rail transportation services using Electric Rail Train facilities in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi (Jabodetabek) and its surrounding areas, as well as business in the non-passenger transportation business sector.

KCI started modernizing KRL transportation in 2011 by simplifying existing routes into five main routes, eliminating express KRL, implementing women-only trains, and changing the name of economy-AC KRL to Commuter Line train. This project was continued with the renovation, rearrangement, and sterilization of facilities and infrastructure including train lines and train stations which were carried out together with PT KAI (Persero) and the Government. On July 1, 2013, KCI started the use of electronic ticketing system (E-Ticketing) and a progressive fare system. The implementation of these two policies is the next stage in the modernization of KRL Jabodetabek.



Hingga Desember 2020, KCI telah memiliki 1.150 unit KRL, dan akan terus bertambah. Sepanjang tahun 2020, KCI telah melakukan penambahan armada sebanyak 120 unit. Hal ini untuk memenuhi permintaan penumpang yang terus bertambah dari waktu ke waktu.

Selama 2020, rata-rata jumlah pengguna KRL per hari mencapai 424.532 pengguna, dengan total pengguna KRL selama tahun 2020 sebanyak 155.378.627 pengguna. Selama tahun 2020 rekor pengguna KRL tertinggi sebanyak 1.011.656 pengguna yaitu pada tanggal 10 Februari sebelum masa pandemi, sedangkan pengguna KRL terendah sebanyak 81.617 pengguna pada tanggal 26 April. Sebagai operator sarana, kereta Commuter Line yang dioperasikan KCI saat ini melayani 80 stasiun di seluruh Jabodetabek, 11 Stasiun di wilayah Yogya-Solo, 4 Stasiun pelayanan KA Lokal Prambanan Ekspres di wilayah Yogya-Kutoarjo dan 10 Stasiun KA Lokal Merak Jaya di wilayah provinsi Banten, dengan total jangkauan rute mencapai 604.443 km.

As of December 2020, KCI has owned 1,150 KRL units, and will continue to grow. Throughout 2020, KCI has added 120 units to its fleet. This is to meet the increasing demand for passengers from time to time.

During 2020, the average number of KRL users per day reached 424,532 users, totaling at 155,378,627 by the end of the year. During 2020, the record for the highest KRL users was 1,011,656 users, namely on February 10 before the pandemic period, while the lowest KRL users were 81,617 users on April 26. As a facility operator, KCI's Commuter Line serves 80 stations in Jabodetabek, 11 stations in Yogya-Solo area, 4 local Prambanan Express train service stations in Yogya-Kutoarjo area, and 10 Merak Jaya local train stations in Banten province, with total route coverage reaching 604,443 km.

MAKSUD DAN TUJUAN

Purpose and Objective

Maksud dan tujuan Perseroan yaitu untuk melakukan usaha di bidang transportasi pada umumnya, khususnya di bidang perkeretaapian dengan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat yang meliputi usaha pengangkutan orang dengan kereta api dan usaha non angkutan penumpang dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

The Company's purpose and objective is to carry out business in the field of general transportation, specifically in the field of railways by providing high quality and competitive goods and/or services, which includes the business of people transportation by train and non-passenger transportation under the principles of Limited Company.



BIDANG USAHA

Line of Business

Sesuai dengan Anggaran Dasar, bidang usaha Perseroan adalah:

Pengusahaan Angkutan Penumpang

Pengangkutan Orang

Perusahaan telah melakukan pelayanan jasa transportasi kereta berbasis rel listrik mulai dari lintas sebagai berikut:

1. Central line: Bogor–Depok–Jakarta Kota
2. Loop line: Bogor–Depok–Tanah Abang–Kampung Bandan–Jatinegara
3. Cikarang/Bekasi line: Cikarang–Bekasi–Jatinegara–Jakarta Kota
4. Rangkasbitung/Maja/Serpong line: Rangkasbitung–Maja–Serpong–Tanah Abang
5. Tangerang line: Tangerang–Duri
6. Nambo line: Angke–Tanah Abang–Nambo
7. Tanjungpriok line: Jakarta Kota–Tanjungpriok
8. KRL Wilayah 6 Yogyakarta: Yogyakarta–Solo
9. KA lokal Prambanan Ekspres: Yogyakarta–Kutoarjo
10. KA Lokal Merak Jaya: Rangkasbitung–Merak

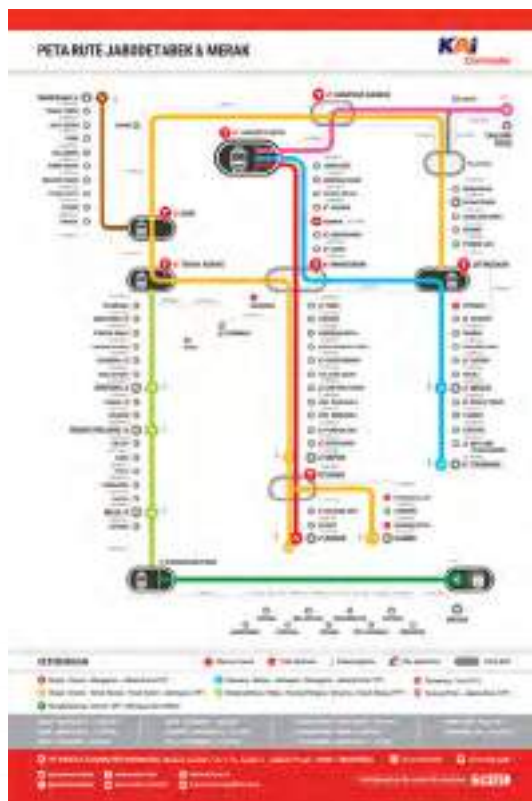
In accordance with the Articles of association, the Company's business covering:

Passenger Transport Business

Passenger Transport

The Company has carried out services of electric rail-based rail transport starting from the following traffic:

1. Central line: Bogor–Depok–Jakarta Kota
2. Loop line: Bogor–Depok–Tanah Abang–Kampung Bandan–Jatinegara
3. Cikarang/Bekasi line: Cikarang–Bekasi–Jatinegara–JJakarta Kota
4. Rangkasbitung/Maja/Serpong line: Rangkasbitung–Maja–Serpong–Tanah Abang
5. Tangerang line: Tangerang–Duri
6. Nambo line: Angke–Tanah Abang–Nambo
7. Tanjungpriok line: Jakarta Kota–Tanjungpriok
8. KRL Region 6 Yogyakarta: Yogyakarta–Solo Balapan
9. Prambanan Local Express Train: Yogyakarta–Kutoarjo
10. Merak Jaya Local Train: Rangkasbitung–Merak





Pengusahaan Non-Angkutan Penumpang

1. Sewa menyewa segala bentuk sarana dan prasarana yang diperlukan sebagai penunjang pelayanan perkeretaapian pada umumnya.
2. Mengusahakan jasa perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian termasuk di dalamnya perbaikan kereta api, perbengkelan kereta api, industri barang-barang (suku cadang) yang diperlukan untuk itu.
3. Mengusahakan jasa pengadaan barang dan jasa lainnya yang berhubungan dengan perawatan perkeretaapian.
4. Mengusahakan pemanfaatan tanah, bangunan, fasilitas pelayanan, dan jasa keahlian di bidang perkeretaapian.
5. Mengusahakan pelatihan keterampilan dalam bidang perkeretaapian.
6. Mengusahakan kereta api sebagai sarana promosi dan hiburan bagi penumpang kereta api.

Kegiatan non-angkutan penumpang dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu:

- 1) *Commuter Line*
 - a. Ruang Iklan yaitu suatu usaha yang memberikan tempat yang sudah ditentukan baik di dalam Commuter Line atau di luar untuk digunakan sebagai media iklan. Adapun space iklan di dalam dan luar Commuter Line sebagai berikut:

Non-Passenger Transport

1. *Lease all forms of facilities and infrastructure required to support railway services in general.*
2. *Provide maintenance services for railway facilities and infrastructure, including train repairs, train workshops, industrial goods (spare parts) needed for this purpose.*
3. *Provide services for the procurement of goods and other services related to railway maintenance.*
4. *Strive for the utilization of land, buildings, service facilities, and expertise services in the railway sector.*
5. *Strive for skills training in the railway sector.*
6. *Operate trains as a means of promotion and entertainment for train passengers.*

Non-passenger transportation activities are divided into two activities, namely:

- 1) *Commuter Line*
 - a. *Advertising Space is a business that provides a predetermined place inside or outside the Commuter Line to be used as an advertising medium. The advertising space inside and outside the Commuter Line is as follows:*



- b. *Passenger Information Display* adalah suatu tampilan informasi untuk penumpang yang mana tidak hanya informasi tentang Commuter Line tetapi ada juga berupa iklan yang berbentuk video.
- c. Kegiatan usaha memberikan fasilitas WiFi gratis kepada penumpang Commuter Line, di mana pendapatan yang perusahaan dapatkan dari sewa penempatan perangkat untuk WiFi dan *pop-up* iklan ketika penumpang menggunakan fasilitas WiFi gratis tersebut.
- d. *Ad Voice* adalah kegiatan usaha yang dilakukan di mana pemasangan iklan berupa suara.

2) Non-Commuter Line

- a. *Branding* di THB dan KMT yaitu memberikan *space* iklan kepada pihak ketiga untuk melakukan *branding* pada kartu THB dan KMT.
- b. C-Corner adalah jenis usaha yang dikembangkan oleh unit komersial dalam menjual produk suvenir. Dalam melakukan penjualannya tidak hanya dengan *offline* store tapi juga dengan *online*.

- b. *Passenger Information Display* is an information display for passengers, not only information about the Commuter Line but there is also an advertisement in the form of a video.
- c. Business activity provides free WiFi facilities to Commuter Line passengers. The Company earns the revenue from leasing device placement for WiFi and *pop-up* advertisements when passengers use the free WiFi facility.
- d. *Ad Voice* is a business activity carried out through voice advertisements.

2) Non-Commuter Line

- a. *Branding* on THB and KMT is providing advertising space to third parties to carry out branding activities on THB and KMT cards.
- b. C-Corner is a type of business developed by commercial units to sell souvenir products through *offline* and *online* stores.





WILAYAH OPERASIONAL

Operational Area



KCI Bogor/Depok-Manggarai-Jakarta Kota



KCI Bogor/Depok-Manggarai-Tanah Abang-Jatinegara



KCI Cikarang/Bekasi-Jatinegara-Tanah Manggarai-Jakarta Kota



KCI Tangerang-Duri



KCI Tanjung Priok-Kampung Bandan-Jakarta Kota



KCI Cikarang/Nambo-Citayam-Parung Panjang



KCI Rangkasbitung/Serpong-Tanah Abang



KCI Rangkasbitung-Merak







STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure

Struktur Organisasi KCI disahkan berdasarkan Peraturan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: 002/KCI/PER-DIR/X/2020 Tentang Organisasi dan Tata Laksana PT Kereta Commuter Indonesia.

Organizational Structure of KCI is ratified through the Board of Directors Decree Number: 002/KCI/PER-DIR/X/2020 concerning the Organizational Structure and Procedure in PT Kereta Commuter Indonesia.



President Director
Wiwik Widayanti



Corporate Secretary
Erni Sylviane Purba

- » External Relation & Corporate Image Care Department (CUSE)
- » Internal Relation & Multimedia Department (CUI)
- » General Affair Department (CUSG)
- » Protocol & Documentation Department (CUSP)



PYMT. Vice President Internal Audit
Santoswana

- » Audit Planning Monitoring & Operation Department (CUIP)
- » Audit Team



VP GCG, Risk Management, Compliance & Legal
Santoswana

- » GCG & Compliance Department (CULC)
- » Risk Management Department (CULR)
- » Legal Department (CULL)



Strategic Planning
Hasyim

- » Strategy Formulation Team
- » Performance Evaluation Team



VP Logistic
Sondang Dairi M.

- » Logistic Planning, Evaluation & Import Department (CUGP)
- » Rolling Stock Procurement Department (CUGR)
- » Non Rolling Stock Procurement Department (CUGN)
- » Warehouse & Distribution Department (CUGW)

Staff



**Finance & Administration
Director
M. Widodo**



**Budgeting & Accounting
Phone Nuryadin**

- » Budget Monitoring & Authorization Department (CFAA)
- » Budget Planning & Evaluation Department (CFAP)
- » General Accounting Department (CFAG)
- » Cost Accounting & Tax Department (CFAC)



**Finance
Devri Bawinto**

- » Finance Department (CFFF)
- » Revenue Verification Department (CFFF)



**PSO & TAC
Mega Rusiandi**

- » PSO & TAC Planning & Management Department (CFPP)
- » PSO & TAC Monitoring & Evaluation Department (CFPM)



**Human Capital
Yudi Eriyanto**

- » Organization Planning & Development Department (CFHP)
- » Recruitment & Employee Development Department (CFHR)
- » Service & Remuneration Department (CFHS)
- » Health Department (CFHH)



**Technical Director
Roppiq Lutzfi Azhar**



**Maintenance Planning &
Evaluation
Budi Heryanto**

- » Maintenance & Spare Part Planning Department (CTPP)
- » Maintenance & Spare Part Evaluation Department (CTPE)
- » Engineering Department (CTPR)



**Rolling Stock
Agung Suranto**

- » Line Maintenance Department (CTRL)
- » Quality Control Department (CTRQ)
- » Overhaul Department (CTRO)



**Information Technology
Albertus Indarko Wiyogo**

- » IT Research & Development Team
- » Information System Planning & Development Department (CTIP)
- » Information System Operation Department (CTIO)



**Infrastructure
Bowo Aji Kuncoro**

- » Civil Infrastructure Department (CTSC)
- » Mechanical Electrical Infrastructure Department (CTSM)



**Operation & Commercial
Director
Wawan Ariyanto**



**Train Operation
Rachmad Zaini Kurniawan**

- » Train Planning, Monitoring & Evaluation Department (COTP)
- » Train Operational Control Department (COTO)
- » Train Crew Department (COTC)



**Commercial
Karina Amanda**

- » Non Passengers Marketing & Sales Department (COCN)
- » Passengers Marketing & Sales Department (COCP)



**Train Services Facilities &
Customer Care
Sukairi**

- » Service Program & Evaluation Department (COHP)
- » Service Facilities Department (COHF)
- » Customer Care Department (COHC)



**HSE & Security
Made Gerina Yasa**

- » HSE Department (COSH)
- » Train Security Department (COST)
- » Assets & Station Security Department (COSA)



**Internal Consultant
Philippus Surjanto. H**



**Senior Manager Regional 6
Deddy Setiawan**



VISI DAN MISI

Vision and Mission



VISI

 | Vision

**MEWUJUDKAN JASA ANGKUTAN
KERETA KOMUTER SEBAGAI
PILIHAN UTAMA DAN TERBAIK.**

To realize commuter train transportation service
as most preferred and best choice.



MISI

 | Mission

**MENYELENGGARAKAN JASA
ANGKUTAN KERETA KOMUTER YANG
MENGUTAMAKAN, KESELAMATAN,
PELAYANAN, KENYAMANAN
DAN KETEPATAN WAKTU SERTA
BERWAWASAN LINGKUNGAN.**

To provide commuter train transportation service
with priority on safety, service, punctuality and eco-
friendly.

REVIEW VISI MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Vision and Mission Review by the Board of Commissioners
and Directors

Pada tahun 2018 dilakukan penetapan visi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: SK.044/CU/KCI/XI/2018 Tanggal 6 November 2018 Tentang Identitas.

Pada tahun 2019, Visi dan Misi Perseroan telah ditinjau kembali oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini dilakukan karena Perseroan mempunyai rencana untuk melakukan ekspansi wilayah kerja sebagaimana penugasan pengelolaan kereta lokal oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Berdasarkan hasil rapat maka akan dilakukan perubahan Visi Misi Perseroan yang akan dimasukkan ke dalam RJPP Perseroan 2020-2024.

In 2018 the establishment of vision that has been approved by the Board of Commissioners and Directors of the Company following the Decree No: SK.044/CU/KCI/XI/2018 dated November 6, 2018 concerning identity.

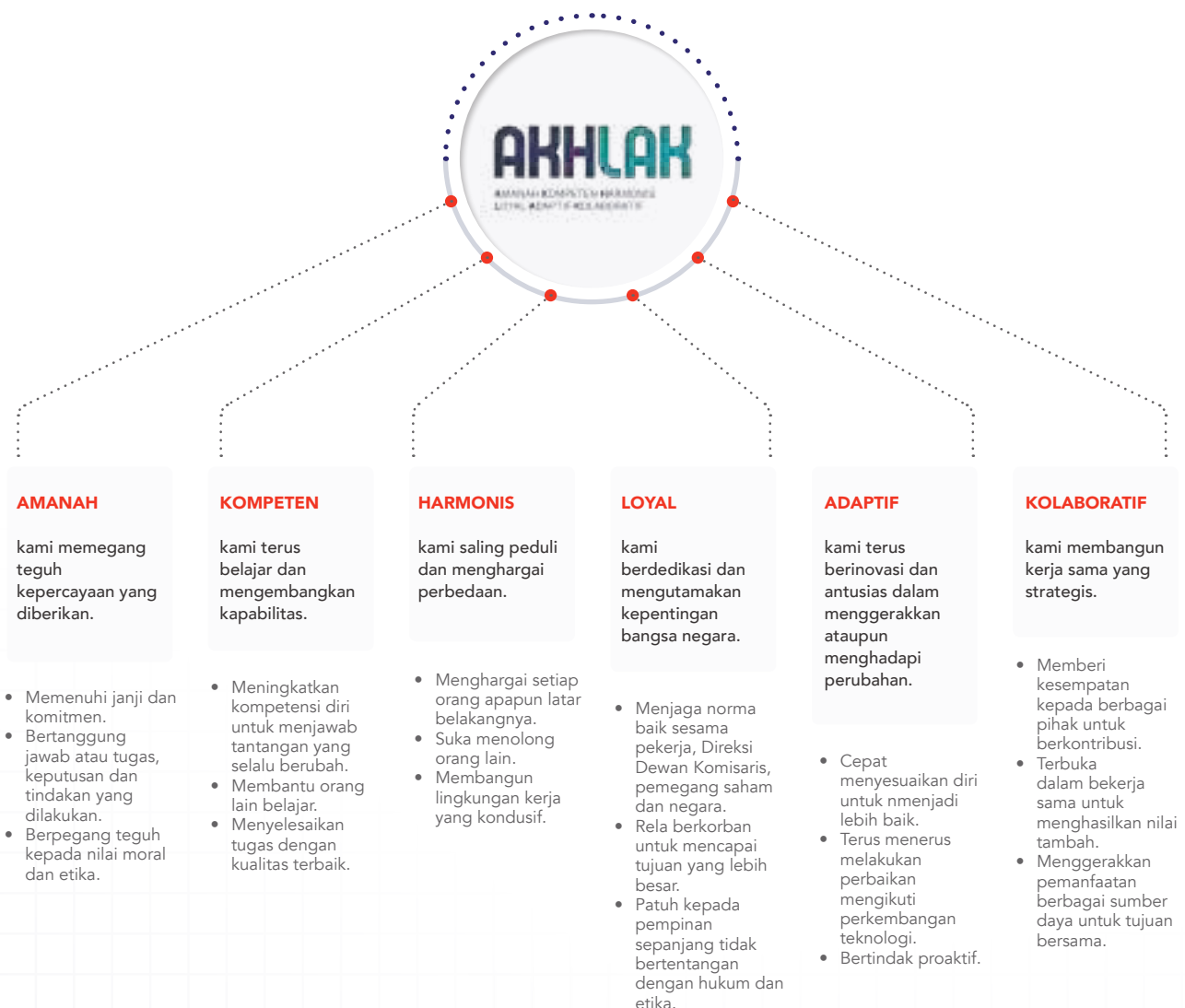
In 2019, the Company's vision and mission has been revisited by the BOD and BOC. This is done because the Company has a plan to do the expansion of the working area as a local train management assignment by PT Kereta Api Indonesia (Persero). Based on the results of the meeting, the Company will be changing the mission vision to be entered into the RJPP company 2020-2024.



Budaya Perusahaan Corporate Culture

Dalam rangka transformasi budaya untuk menyelesaikan sinergi Core Values BUMN yang sama, maka seluruh pegawai BUMN wajib mengimplementasikan Core Values "AKHLAK".

In the context of cultural transformation to comprehensively synergyze the same Core Values, all SOE employees are required to implement the Core Values "AKHLAK".



LOGO DAN PERUBAHANNYA

Logo and Transformations



Logo PT KCI dilakukan perubahan pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 28 September 2020 bersamaan dengan perubahan logo PT KAI sebagai perusahaan induk.

PT KCI's logo was changed in September 28, 2020 along with the change in the PT KAI logo as the holding company.

MAKNA LOGO

Logo Meanings

Terinspirasi dari bentuk rel kereta yang digambarkan dengan garis menyambung ke atas pada huruf A, KAI diharapkan terus maju dan menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik yang terintegrasi, terpercaya, bersinergi, dan kelak dapat menghubungkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Dengan menggunakan *typeface italic* yang dinamis dan modifikasi pada huruf A menggambarkan karakter KAI yaitu progresif, berpikiran terbuka, dan terpercaya. Grafik yang tegas namun ramah dengan perbedaan warna pada huruf diharapkan dapat mencerminkan hubungan yang harmonis dan kompeten antara KAI dan seluruh pemangku kepentingan.

Perpaduan antara warna biru tua yang menunjukkan stabilitas, profesionalisme, amanah, dan kepercayaan diri yang ditambah dengan aksen warna oranye yang menunjukkan antusiasme, kreativitas, tekad, kesuksesan, dan kebahagiaan.

Inspired by the shape of the railroad track which is depicted by a line connecting upwards in the letter A, KAI is expected to continue to advance and become the best integrated, reliable, synergized transportation ecosystem solution, and to connect Indonesia from Sabang to Merauke in the future.

By using a dynamic italic typeface and modifications to the letter A, it describes KAI's character, which is progressive, open-minded, and trustworthy. Firm but friendly graphics with different colors in the letters are expected to reflect a harmonious and competent relationship between KAI and all stakeholders.

The combination of dark blue which shows stability, professionalism, trust, and confidence coupled with orange color accents which shows enthusiasm, creativity, determination, success, and happiness.



Makna Commuter

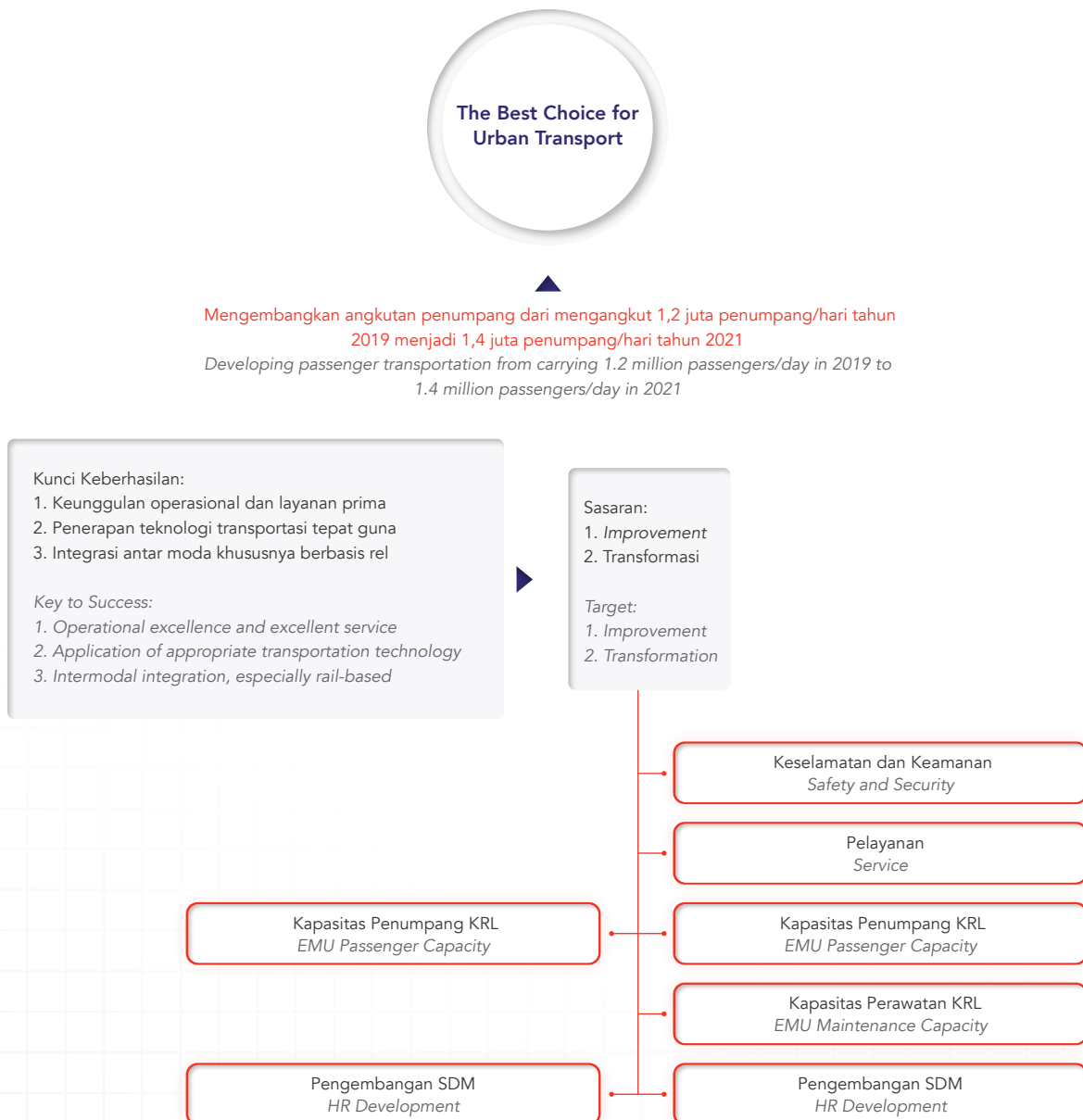
Warna merah melambangkan kekuatan dan energi Perseroan yang memiliki misi menyelenggarakan jasa angkutan kereta komuter yang selalu mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu serta berwawasan lingkungan.

Commuter Meaning

The red color symbolizes the strength and energy of the Company whose mission to provide commuter rail transportation services that always prioritize safety, comfort and punctuality and are environmentally friendly.

ARAH PENGEMBANGAN PERSEROAN

Development Objectives



Untuk menempatkan Perseroan sebagai *the Best Choice for Urban Transport*, dalam rangka mengangkut 1,2 juta penumpang per hari pada tahun 2019 dan 1,4 juta penumpang per hari pada tahun 2021, maka perlu didukung dengan sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan perusahaan yang tepat berdasarkan kondisi yang ada, sebagai berikut:

To become the Best Choice for Urban Transport, in order to transport 1.2 million passengers per day in 2019 and 1.4 million passengers per day in 2021, it should be supported by the appropriate objectives, strategies, policies and programs based on the following conditions:

IMPROVEMENT

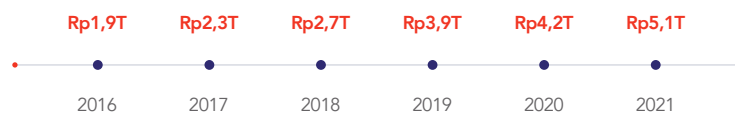
Peningkatan Performa dan Kapabilitas
Performance and Capability Enhancements

- Keselamatan dan Keamanan KRL/
KRL Safety and Security
- Pelayanan KRL/KRL Services
- Kapasitas Penumpang KRL/KRL
Passenger Capacity
- Kapasitas Perawatan KRL/KRL
Maintenance Capacity
- Pengembangan SDM/HR
Development
- Pendanaan untuk Investasi/
Financing for Investment
- EMU Safety and Security
- EMU Services
- EMU Passenger Capacity
- EMU Maintenance Capacity
- HR Development
- Investment Funding

Penumpang/hari
Passenger/day



Pendapatan/tahun
Income/year



TRANSFORMATION

Standard baru untuk
solusi transportasi
terpadu
*New standard
for integrated
transportation solution*

Inovasi Teknologi
Technology Innovation

Penerapan teknologi transportasi
Transportation technology implementation

Pengembangan solusi transportasi terpadu/integrasi antar moda
Development of integrated/intermodal transportation solutions



Berdasarkan arah pengembangan Perseroan sampai dengan tahun 2021, maka target krusial yang perlu menjadi fokus dalam RJPP ini adalah pada tahun 2020 mengangkut 1,3 juta penumpang per hari dan tahun 2021 mengangkut 1,4 juta penumpang per hari, yang mana detail portofolio laporan keuangan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

According to the Company's development objectives for 2021, the crucial target that needs to be focused in this RJPP is to carry 1.2 million passengers per day in 2019 and 1.4 million passengers per day in 2021, in which the financial statements portfolio could be seen in the following graph.

Portofolio KRL

KRL Portfolio

Komposisi Pendapatan Income Composition	2015	2019	2021
Angkutan Penumpang Passenger Transportation	41,5%	63,6%	77,1%
PSO	51,5%	36,4%	22,9%
Pendukung /noncore Support/noncore	7,0%	5,1%	4,9%

Angkutan Penumpang KRL

KRL Passenger Transportation

Angkutan Penumpang Passenger transportation	2015	2019	2021
Volume Volume	705 ribu penumpang /hari 705 thousand passengers/day	1,2 juta penumpang /hari 1.2 million passengers/day	1,4 juta penumpang /hari 1.4 million passengers/day
Pendapatan Revenue	Rp1,6 triliun Rp1.6 trillion	Rp3,9 triliun Rp3.9 trillion	Rp5,1 triliun Rp5.1 trillion

Laporan Keuangan

Financial Statements

Laporan Keuangan Financial statements	2015	2019	2021
Pendapatan Income	Rp1,7 triliun/triliun	Rp1,4 triliun/triliun	Rp5,3 triliun/triliun
Laba Bersih Net Profit	Rp254,1 miliar/billion	Rp589,1 miliar/billion	Rp589,5 miliar/billion
Total Aset Total Assets	Rp1,5 triliun/triliun	Rp 5,9 triliun/triliun	Rp10,2 triliun/triliun

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Profile



EDY WIDYAYA
Komisaris
Commissioner

MAQIN U. NORHADI
Komisaris Utama
President Commissioner

JOHN ROBERTHO
Komisaris
Commissioner

DANTO RESTYAWAN
Komisaris
Commissioner



MAQIN U. NORHADI

Komisaris Utama
President Commissioner

Kewarganegaraan Indonesia
Nationality

Usia/Tempat & Tanggal Lahir 50/Tuban, 16 Desember 1970
Age/Place & Date of Birth 50/Tuban, December 16, 1970

Riwayat Pendidikan *Educational Background*

- S2 Magister Manajemen, Universitas Gajah Mada-1996
- S1 Sarjana Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta-1994
- Master of Management, Gadjah Mada University-1996
- Bachelor of Economics, Muhammadiyah University, Surakarta-1994

Riwayat Jabatan *Position History*

Komisaris Utama PT KCI Juli 2020-sekarang
President Commissioner of PT KCI 2020-present

Dasar Hukum Penunjukan *Legal Basis of Appointment*

Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT KCI di Luar RUPSLB Nomor PT KAI (Persero) KP.303/VII/4/KA-2020 dan Nomor Yayasan Pusaka: 02/RIS-KCI/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur, Pelaksana Tugas Direktur, Komisaris, dan Pelaksana Tugas Komisaris Perseroan.
Circular Decision of Shareholders Outside the EGMS PT KAI (Persero) Number KP.303/VII/4/KA-2020 and Yayasan Pusaka Number: 02/RIS-KCI/VII/2020 dated July 17, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Directors, Acting Directors, Commissioners, and Acting Commissioners of the Company.

Pengalaman Kerja *Work Experience*

- Direktur Niaga PT KAI (Persero) (Mei 2020-sekarang)
- Senior Vice President, Regional CEO IV/Jakarta 2 Bank Mandiri (2018-2020)
- Senior Vice President, Regional CEO VII/ Jawa 2 Bank Mandiri (2016-2018)
- Senior Vice President, Group Head Corporate Banking II, Bank Mandiri (2015-2016)
- Commercial Director of PT KAI (Persero) (May 2020-present)
- Senior Vice President, Regional CEO IV/Jakarta 2 Bank Mandiri (2018-2020)
- Senior Vice President, Regional CEO VII/Java 2 Bank Mandiri (2016-2018)
- Senior Vice President, Group Head Corporate Banking II, Bank Mandiri (2015-2016)

Jabatan Rangkap *Concurrent Position*

Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Commercial Director of PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Pendidikan dan Pelatihan *Education and Training*

Beliau tidak berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan di tahun 2020.
He did not participate in any education and training activities in 2020.

Afiliasi *Affiliation*

Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners.

Periode Jabatan *Term of Office*

Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Komisaris Utama.
Has not served more than 2 (two) periods as President Commissioner.

Domisili *Domicile*

Tangerang Selatan, Indonesia
South Tangerang, Indonesia



EDY WIDYAYA

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan
Nationality

Indonesia

Usia/Tempat & Tanggal Lahir
Age/Place & Date of Birth

48/Surabaya, 21 Januari 1972

48/Surabaya, January 21, 1972

Riwayat Pendidikan Educational Background	- S2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya-2015 - S1 Manajemen Perusahaan, Universitas Kristen Indonesia-1997 - Master of Law Science, Jayabaya University-2015 - Bachelor of Corporate Management, Christian University of Indonesia-1997
Riwayat Jabatan Position History	Komisaris PT KCI Juni 2019-sekarang Commissioner of PT KCI June 2019-present
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Pada 14 Juni 2019 diangkat sebagai Komisaris PT Kereta Commuter Indonesia sesuai hasil RUPS Nomor KP.303/VI/1/KA-2019. On June 14, 2019 he was appointed as Commissioner of PT Kereta Commuter Indonesia according to the GMS Resolution Number KP.303/VI/1/KA-2019.
Pengalaman Kerja Work Experience	- Kasubbid Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ia-2 Kementerian BUMN (2015- sekarang) - Kasubbid Usaha Aneka Industri Ia Kementerian BUMN (2014-2015) - Kasubbid Usaha Industri Primer Ia.1 Kementerian BUMN (2012-2014) - Kasubbid Inventarisasi dan Mutasi Kekayaan BUMN II Kementerian BUMN (2010-2012) - Kasubbid Evaluasi Pendayagunaan Aset I Kementerian BUMN (2006-2010) - Head of Sub-Division of Energy, Logistics, Regions, and Tourism Ia-2 Ministry of SOEs (2015-present) - Head of Sub-Division of Miscellaneous Industries, Ministry of SOEs (2014-2015) - Head of Sub-Division of Primary Industry Ia.1 Ministry of SOEs (2012-2014) - Head of Sub Division of Inventory and Mutation of Wealth of BUMN II Ministry of BUMN (2010-2012) - Head of Sub-Division for Evaluation of Asset Utilization I Ministry of SOEs (2006-2010)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Kepala Sub Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Ia-2 BUMN Head of Sub-Sector of Energy, Logistics, Regions and Tourism Ia-2 BUMN
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	- Executive Education Direction Program - Online Pertamina Training & Consulting (15-18 Desember 2020) - Executive Education Direction Program - Online Pertamina Training & Consulting (December 15-18, 2020)
Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners.
Periode Jabatan Term of Office	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Komisaris. Has not served more than 2 (two) periods as Commissioner.
Domisili Domicile	Bekasi, Jawa Barat Bekasi, West Java



JOHN ROBERTHO

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan
Nationality

Indonesia

Usia/Tempat & Tanggal Lahir
Age/Place & Date of Birth

57/ Martebing, 23 April 1963
57/ Martebing, April 23, 1963

Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	S1 Teknik Mesin, Universitas HKBP Nommensen-1989 <i>Bachelor of Mechanical Engineering, HKBP Nommensen University-1989</i>
Riwayat Jabatan <i>Position History</i>	Komisaris PT KCI Juli 2020-Sekarang <i>Commissioner of PT KCI July 2020-Present</i>
Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT KCI di Luar RUPSLB Nomor PT KAI (Persero) KP.303/VII/4/KA-2020 dan Nomor Yayasan Pusaka: 02/RIS-KCI/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur, Pelaksana Tugas Direktur, Komisaris, dan Pelaksana Tugas Komisaris Perseroan, <i>Circular Decision of Shareholders Outside the EGMS PT KAI (Persero) Number KP.303/VII/4/KA-2020 and Yayasan Pusaka Number: 02/RIS-KCI/VII/2020 dated July 17, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Directors, Acting Directors, Commissioners, and Acting Commissioners of the Company.</i>
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	• Direktur Keselamatan dan Keamanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2019-Sekarang) • Direktur Teknik PT Kereta Commuter Indonesia (2019) • Executive Vice President LRT Jabodebek (2017-2019) • Corporate Deputy Director of Freight Marketing and Sales PT KAI (Persero) (2017) • Executive Vice President PT KAI Daop 1 Jakarta (2016-2017) • Director of Safety and Security of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2019-Present) • Director of Technic of PT Kereta Commuter Indonesia (2019) • Executive Vice President of LRT Jabodebek (2017-2019) • Corporate Deputy Director of Freight Marketing and Sales PT KAI (Persero) (2017) • Executive Vice President of PT KAI Daop 1 Jakarta (2016-2017)
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Direktur Keselamatan dan Keamanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) <i>Director of Safety and Security of PT Kereta Api Indonesia (Persero)</i>
Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training</i>	Beliau tidak berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan di tahun 2020. <i>He did not participate in any education and training activities in 2020.</i>
Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. <i>He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners.</i>
Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Plt. Komisaris. <i>Has not served more than 2 (two) periods as Acting Commissioner</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Yogyakarta, Indonesia



DANTO RESTYAWAN

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan
Nationality

Indonesia

Usia/Tempat & Tanggal Lahir
Age/Place & Date of Birth

56/ Kediri, 29 Agustus 1964

56/ Kediri, August 29, 1964

Riwayat Pendidikan Educational Background	- S2 Magister Transportasi, Institut Teknologi Bandung-1999 - S1 Teknik Sipil, Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta-1993 - Master of Transportation, Bandung Institute of Technology-1999 - Bachelor of Civil Engineering, Jakarta National Institute of Science and Technology (1993)
Riwayat Jabatan Position History	- Komisaris PT KCI Juli 2020-Sekarang - Commissioner of PT KCI July 2020-Present
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT KCI di Luar RUPSLB Nomor PT KAI (Persero) KP.303/VII/4/KA-2020 dan Nomor Yayasan Pusaka: 02/RIS-KCI/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur, Pelaksana Tugas Direktur, Komisaris, dan Pelaksana Tugas Komisaris Perseroan. Circular Decision of Shareholders Outside the EGMS PT KAI (Persero) Number KP.303/VII/4/KA-2020 and Yayasan Pusaka Number: 02/RIS-KCI/VII/2020 dated July 17, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Directors, Acting Directors, Commissioners, and Acting Commissioners of the Company.
Pengalaman Kerja Work Experience	- Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan (2019-sekarang) - Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (2018) - Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Darat dan Perkeretaapian, Balitbang Perhubungan Kementerian Perhubungan (2016) - Direktur Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (2016) - Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur (2014) - Director of Railway Traffic and Transportation Ministry of Transportation (2019-present) - Secretary of the Directorate General of Railways of the Ministry of Transportation (2018) - Head of Research and Development Center for Land and Railway Transportation, Transportation Research and Development Ministry of Transportation (2016) - Director of Railway Infrastructure Directorate General of Railways Ministry of Transportation (2016) - Head of Class I Railway Engineering Center for Eastern Java Region (2014)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan Director of Railway Traffic and Transportation Ministry of Transportation
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	Beliau tidak berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan di tahun 2020. He did not participate in any education and training activities in 2020.
Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. He has no affiliation with other members of the Board of Commissioners.
Periode Jabatan Term of Office	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Plt. Komisaris. Has not served more than 2 (two) periods as Acting Commissioner.
Domisili Domicile	Jakarta Selatan, Indonesia South Jakarta, Indonesia



PROFIL DIREKSI

Board of Directors Profile



ROPPIQ LUTZFI AZHAR

Direktur Teknik
Director of Technic

WIWIK WIDAYANTI

Direktur Utama
President Director

M. WIDODO

Direktur Keuangan dan Administrasi
Director of Finance and Administration

WAWAN ARIYANTO

Direktur Operasi dan Pemasaran
Director of Operation and
Marketing



WIWIK WIDAYANTI

Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan Indonesia
Nationality

Usia/Tempat & Tanggal Lahir 57/Cirebon, 19 Agustus 1963
Age/Place & Date of Birth 57/Cirebon, August 19, 1963

Riwayat Pendidikan *Educational Background*

- S2 Manajemen Perkeretaapian, Institut Teknologi Bandung-2002
- S1 Manajemen, Universitas Diponegoro-1989
- Master of Railway Management, Bandung Institute of Technology-2002
- Bachelor of Management, Diponegoro University-1989

Riwayat Jabatan *Position History*

- Direktur Utama PT KCI 2018-sekarang
- President Director of PT KCI 2018-present

Dasar Hukum Penunjukan *Legal Basis of Appointment*

Risalah Sirkuler Keputusan Pemegang Saham Nomor KP. 303/IV/1/KA-2018 dan 04/RIS-PT KCI/IV/2018 Tanggal 16 April 2018.
Circular Treatise of Shareholders' Decision number KP. 303/IV/1/KA-2018 and 04/RIS-PT KCI/IV/2018 dated April 16, 2018.

Pengalaman Kerja *Work Experience*

- Executive Vice President Daerah Operasi 4 Semarang (2016-2018)
- Executive Vice President Daerah Operasi 8 Surabaya (2015-2016)
- Executive Vice President Daerah Operasi 6 Yogyakarta (2014-2015)
- Executive Vice President Corporate Secretary (April-Desember 2014)
- Vice President Corporate Document Management (2013-2014)
- Staf Utama Direktur Utama (Maret-Oktober 2013)
- Executive Vice President District Operating 4 Semarang (2016-2018)
- Executive Vice President of Operating Area 8 Surabaya (2015-2016)
- Executive Vice President of Operating Area 6 Yogyakarta (2014-2015)
- Executive Vice President Corporate Secretary (April-December 2014)
- Vice President Corporate Document Management (2013-2014)
- Main Staff of President Director (March-October 2013)

Jabatan Rangkap *Concurrent Position*

Tidak ada
None

Pendidikan dan Pelatihan *Education and Training*

Beliau tidak berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan di tahun 2020.
She did not participate in any education and training activities in 2020.

Afiliasi *Affiliation*

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya dan Pemegang Saham.
She has no affiliation with other members of the Board of Directors and Shareholders.

Periode Jabatan *Term of Office*

Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Direktur Utama.
Has not served more than 2 (two) periods as President Director.

Domisili *Domicile*

Bandung, Indonesia



WAWAN ARIYANTO

Direktur Operasi dan Pemasaran
Director of Operation and Marketing

Kewarganegaraan Indonesia
Nationality

Usia/Tempat & Tanggal Lahir 51/Semarang, 7 Februari 1969
Age/Place & Date of Birth 51/Semarang, February 7, 1969

Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	S1 Manajemen, Universitas Muhammadiyah Surakarta-1993 Bachelor of Management, Muhammadiyah University, Surakarta-1993
Riwayat Jabatan <i>Position History</i>	Direktur Operasi dan Pemasaran PT KCI Juli 2020-Sekarang <i>Director of Operation and Marketing of PT KCI July 2020-Present</i>
Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT KCI di Luar RUPSLB Nomor PT KAI (Persero) KP.303/VII/4/KA-2020 dan Nomor Yayasan Pusaka: 02/RIS-KCI/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur, Pelaksana Tugas Direktur, Komisaris, dan Pelaksana Tugas Komisaris Perseroan <i>Circular Decision of Shareholders Outside the EGMS PT KAI (Persero) Number KP.303/VII/4/KA-2020 and Yayasan Pusaka Number: 02/RIS-KCI/VII/2020 dated July 17, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Directors, Acting Directors, Commissioners, and Acting Commissioners of the Company.</i>
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	• Corporate Deputy Director of Subsidiary Management (2020) • Corporate Deputy Director of Training and Education (2020) • Corporate Deputy Director of Personnel Care, Control, and Development (2017-2020) • PLT Direktur Utama PT Reska Multi Usaha (2017) • Executive Vice President Corporate Secretary (2016-2017) • Corporate Deputy Director of Subsidiary Management (2020) • Corporate Deputy Director of Training and Education (2020) • Corporate Deputy Director of Personnel Care, Control, and Development (2017-2020) • Acting President Director of PT Reska Multi Usaha (2017) • Executive Vice President Corporate Secretary (2016-2017)
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Tidak ada <i>None</i>
Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training</i>	Beliau tidak berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan di tahun 2020. <i>He did not participate in any education and training activities in 2020.</i>
Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya dan Pemegang Saham. <i>She has no affiliation with other members of the Board of Directors and Shareholders.</i>
Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Direktur. <i>Has not served more than 2 (two) periods as Director.</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jawa Tengah, Indonesia <i>Central Java, Indonesia</i>



ROPPIQ LUTZFI AZHAR

Direktur Teknik
Director of Technic

Kewarganegaraan
Nationality

Indonesia

Usia/Tempat & Tanggal Lahir
Age/Place & Date of Birth

45/Bandung, 13 Juni 1975
45/Bandung, June 13, 1975

Riwayat Pendidikan Educational Background	S1 Teknik Mesin, Universitas Diponegoro-2001 Bachelor of Mechanical Engineering, Diponegoro University-2001
Riwayat Jabatan Position History	Direktur Teknik PT KCI Juli 2020-Sekarang Director of Technic of PT KCI July 2020-Present
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT KCI di Luar RUPSLB Nomor PT KAI (Persero) KP.303/VII/4/KA-2020 dan Nomor Yayasan Pusaka: 02/RIS-KCI/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur, Pelaksana Tugas Direktur, Komisaris, dan Pelaksana Tugas Komisaris Perseroan Circular Decision of Shareholders Outside the EGMS PT KAI (Persero) Number KP.303/VII/4/KA-2020 and Yayasan Pusaka Number: 02/RIS-KCI/VII/2020 dated July 17, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Directors, Acting Directors, Commissioners, and Acting Commissioners of the Company.
Pengalaman Kerja Work Experience	• Corporate Deputy Director of Rollingstock Maintenance (2020) • Corporate Deputy Director of Rollingstock (2019-2020) • Corporate Deputy Director of Engineering and Rollingstock Asset (2018-2019) • Corporate Deputy Director of Rollingstock (2018) • General Manager Balai Yasa Surabaya Gubeng (2018) • Corporate Deputy Director of Rollingstock Maintenance (2020) • Corporate Deputy Director of Rollingstock (2019-2020) • Corporate Deputy Director of Engineering and Rollingstock Asset (2018-2019) • Corporate Deputy Director of Rollingstock (2018) • General Manager Balai Yasa Surabaya Gubeng (2018)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	Beliau tidak berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan di tahun 2020. He did not participate in any education and training activities in 2020.
Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya dan Pemegang Saham. She has no affiliation with other members of the Board of Directors and Shareholders.
Periode Jabatan Term of Office	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Direktur. Has not served more than 2 (two) periods as Director.
Domisili Domicile	Semarang, Indonesia



M. WIDODO

Direktur Keuangan Dan Administrasi
Director of Finance and Administration

Kewarganegaraan Indonesia
Nationality

Usia/Tempat & Tanggal Lahir 47/13 April 1973
Age/Place & Date of Birth 47/April 13, 1973

Riwayat Pendidikan <i>Educational Background</i>	S1 Akuntansi, Universitas Gadjah Mada-1999 <i>Bachelor of Accounting, Gadjah Mada University-1999</i>
Riwayat Jabatan <i>Position History</i>	• Direktur Keuangan Dan Administrasi PT KCI Juli 2020-Sekarang. • <i>Director of Finance and Administration of PT KCI July 2020-Present.</i>
Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT KCI di Luar RUPSLB Nomor PT KAI (Persero) KP.303/VII/4/KA-2020 dan Nomor Yayasan Pusaka: 02/RIS-KCI/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur, Pelaksana Tugas Direktur, Komisaris, dan Pelaksana Tugas Komisaris Perseroan <i>Circular Decision of Shareholders Outside the EGMS PT KAI (Persero) Number KP.303/VII/4/KA-2020 and Yayasan Pusaka Number: 02/RIS-KCI/VII/2020 dated July 17, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Directors, Acting Directors, Commissioners, and Acting Commissioners of the Company.</i>
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	• Direktur Keuangan dan Administrasi PT KA Properti Manajemen (2017-2020) • Plt. Direktur Keuangan dan Administrasi PT KA Properti Manajemen (2017) • <i>Vice President Budgeting</i> PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017) • Senior Manajer Keuangan DIVRE III Sumatera Selatan (2014) • Senior Manajer Keuangan DAOP 1 Jakarta (2012-2014) • <i>Director of Finance and Administration of PT KA Properti Manajemen (2017-2020)</i> • <i>Acting Director of Finance and Administration of PT KA Properti Manajemen (2017)</i> • <i>Vice President Budgeting</i> PT Kereta Api Indonesia (Persero) (2017) • Senior Finance Manager DIVRE III South Sumatra (2014) • Senior Finance Manager DAOP 1 Jakarta (2012-2014)
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Tidak ada <i>None</i>
Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training</i>	Beliau tidak berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan di tahun 2020. <i>He did not participate in any education and training activities in 2020.</i>
Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya dan Pemegang Saham. <i>She has no affiliation with other members of the Board of Directors and Shareholders.</i>
Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Direktur. <i>Has not served more than 2 (two) periods as Director.</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Bandung, Indonesia

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

Executive Officers Profile



Erni Sylviane Purba

Vice President Corporate Secretary

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir <i>Age/Place & Date of Birth</i>	37/Simalungun, 25 April 1984 37/Simalungun, 25 April 1984
Riwayat Pendidikan <i>Educational History</i>	S1 Teknik Informatika, Universitas Kristen Duta Wacana-2007 Bachelor of Informatics Engineering, Duta Wacana Christian University-2007
Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK-103/KCI/DIR-HRD/34/XI/2020 Tanggal 18 November 2020 Decision Letter of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK-103/KCI/DIR-HRD/34/XI/2020 Dated November 18, 2020
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	• Vice President Corporate Secretary (Oktober 2020-sekarang) • Vice President Corporate Communication (Maret 2019-Oktober 2020) • Manager Customer Relation and Digital Community (Februari 2017-Maret 2019) • Vice President Corporate Secretary (Oktober 2020-present) • Vice President Corporate Communication (March 2019-October 2020) • Manager of Customer Relation and Digital Community (February 2017-March 2019)
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Tidak ada None
Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta, Indonesia



Santoswana

PYMT. Vice President Internal Audit
Internal Audit Vice President Caretaker

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir <i>Age/Place & Date of Birth</i>	48/Bandung, 15 Mei 1972 48/Bandung, May 15, 1972
Riwayat Pendidikan <i>Educational History</i>	S2 Hukum, Universitas Indonesia-2010 Master of Law, University of Indonesia-2010
Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Surat Perintah Pelaksana Tugas sebagai PYMT VP Internal Audit: 185-1/DK-HR/KCI/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 Assignment Letter as Internal Audit VP Caretaker: 185-1/DK-HR/KCI/X/2020 dated October 1, 2020
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	• Vice President Governance, Risk, Compliance (GRC) and Legal (Desember 2020-sekarang) • Vice President Hukum dan Kepatuhan (April 2019-November 2020) • Vice President SPI (Juni 2016-April 2019) • GM Hukum dan Kepatuhan (Juli 2013-Juni 2016) • Vice President Governance, Risk, Compliance (GRC) and Legal (Desember 2020-present) • Vice President of Law and Compliance (April 2019-November 2020) • Vice President of SPI (June 2016-April 2019) • GM of Law and Compliance (July 2013-June 2016)
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Tidak ada None
Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Domisili <i>Domicile</i>	Depok, Jawa Barat Depok, West Java



Santoswana

Vice President Governance, Risk,
Compliance (GRC) and Legal

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir <i>Age/Place & Date of Birth</i>	48/Bandung, 15 Mei 1972 48/Bandung, May 15, 1972
Riwayat Pendidikan <i>Educational History</i>	S2 Hukum, Universitas Indonesia-2010 Master of Law, University of Indonesia-2010
Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK-103/KCI/DIR-HRD/88/XI/2020 Tanggal 1 Desember 2020 Decision Letter of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK-103/KCI/DIR-HRD/88/XI/2020 Dated December 1, 2020
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	• Vice President Governance, Risk, Compliance (GRC) and Legal (Desember 2020-sekarang) • Vice President Hukum dan Kepatuhan (April 2019-November 2020) • Vice President SPI (Juni 2016-April 2019) • GM Hukum dan Kepatuhan (Juli 2013-Juni 2016) • Vice President Governance, Risk, Compliance (GRC) and Legal (Desember 2020-present) • Vice President of Law and Compliance (April 2019-November 2020) • Vice President of SPI (June 2016-April 2019) • GM of Law and Compliance (July 2013-June 2016)
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Tidak ada None
Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Domisili <i>Domicile</i>	Depok, Jawa Barat Depok, West Java



Hasyim

Vice President Perencanaan
Strategis
Vice President Strategic Planning

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir <i>Age/Place & Date of Birth</i>	52/Pemalang, 18 Januari 1968 52/Pemalang, January 18, 1968
Riwayat Pendidikan <i>Educational History</i>	S2 Magister Manajemen, Universitas Persada Indonesia Y.A.I-2007 Master of Management, Universitas Persada Indonesia Y.A.I-2007
Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK-103/KCI/DIR-HRD/94/XI/2020 Tanggal 1 Desember 2020 Decision Letter of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK-103/KCI/DIR-HRD/94/XI/2020 Dated December 1, 2020
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	• Vice President Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko (April 2019-Sekarang) • Vice President Anggaran dan Akuntansi (Maret 2010-April 2019) • Vice President of Strategic Planning and Risk Management (April 2019-Present) • Vice President Budgets and Accounting (March 2010-April 2019)
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Tidak ada None
Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta, Indonesia



**Sondang
Dairi Manullang**

Vice President Logistik
Vice President Logistics

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	49/Karang Intan, 13 Juli 1971 49/Karang Intan, July 13, 1971
Riwayat Pendidikan Educational History	S1 Pertanian, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin-1994 Bachelor of Agriculture, University of Lambung Mangkurat, Banjarmasin-1994
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK-103/KCI/DIR-HRD/84/XI/2020 Tanggal 1 Desember 2020 Decision Letter of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK-103/KCI/DIR-HRD/84/XI/2020 Dated December 1, 2020
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President Logistik (Agustus 2019-Sekarang) • Vice President Anggaran dan Akuntansi (April 2019-Agustus 2019) • Vice President Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko (Agustus 2016-April 2019) • M. Perencanaan Strategis (Januari 2012-Agustus 2016) • Vice President of Logistics (August 2019-Present) • Vice President of Budget and Accounting (April 2019-August 2019) • Vice President of Strategic Planning and Risk Management (August 2016-April 2019) • M. Strategic Planning (January 2012-August 2016)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Afiliasi Affiliation	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Domisili Domicile	Jakarta, Indonesia



Phone Nuryadin

Vice President Anggaran dan
Akuntansi
Vice President Budgeting and
Accounting

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	43/Kananga, 23 Mei 1977 43/Kananga, May 23, 1977
Riwayat Pendidikan Educational History	S2 Universitas Indonesia-Magister Management 05/11/2004 Master Degree from the University of Indonesia-Masters in Management 05/11/2004
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK-103/KCI/DIR-HRD/36/XI/2020 Tanggal 1 Desember 2020 Decision Letter of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK-103/KCI/DIR-HRD/36/XI/2020 Dated December 1, 2020
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President Anggaran dan Akuntansi (Agustus 2019-Sekarang) • Vice President Logistik (April 2019-Agustus 2019) • GM Keuangan (April 2013-April 2019) • Vice President of Budgeting and Accountancy (August 2019-Present) • Vice President of Logistics (April 2019-August 2019) • GM Financial (April 2013-April 2019)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Afiliasi Affiliation	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat Depok, West Java



Devri Bawinto

Vice President Keuangan
Vice President Finance

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir <i>Age/Place & Date of Birth</i>	49/Jakarta, 17 Oktober 1971 49/Jakarta, October 17, 1971
Riwayat Pendidikan <i>Educational History</i>	S1 Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung-1997 <i>Bachelor of Industrial Engineering, Bandung Institute of Technology-1997</i>
Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK-103/KCI/DIR-HRD/37/XI/2020 Tanggal 1 Desember 2020 <i>Decision Letter of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK-103/KCI/DIR-HRD/37/XI/2020 Dated December 1, 2020</i>
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	• Vice President Keuangan PT KCI (April 2019-Sekarang) • Vice President Komersial (Mei 2013-April 2019) • Vice President Financial PT KCI (April 2019-Present) • Vice President Commercial (May 2013-April 2019)
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Tidak ada <i>None</i>
Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham <i>Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Bogor, Jawa Barat <i>Bogor, West Java</i>



Mega Rusiandi

Vice President Public Service
Obligation

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir <i>Age/Place & Date of Birth</i>	53/Jakarta, 20 Juni 1967 53/Jakarta, June 20, 1967
Riwayat Pendidikan <i>Educational History</i>	S1 Manajemen, STMIK Budi Luhur Jakarta-1998 <i>Bachelor of Management, STMIK Budi Luhur Jakarta-1998</i>
Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK-103/KCI/DIR-HRD/38/XI/2020 Tanggal 1 Desember 2020 <i>Decision Letter of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK-103/KCI/DIR-HRD/38/XI/2020 Dated December 1, 2020</i>
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	• Vice President Public Service Obligation (Mei 2019-sekarang) • Vice President Pelayanan (Mei 2015-Mei 2019) • Vice President Public Service Obligation (May 2019-present) • Vice President of Service (May 2015-May 2019)
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Tidak ada <i>None</i>
Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham <i>Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Depok, Jawa Barat <i>Depok, West Java</i>



Yudi Eriyanto

Vice President Sumber Daya Manusia
Vice President Human Resources

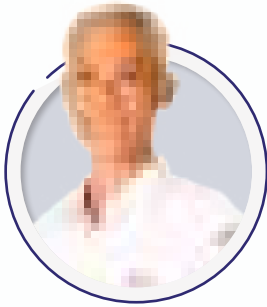
Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	54/Bandung, 19 Maret 1966 54/Bandung, March 19, 1966
Riwayat Pendidikan Educational History	S1 Hukum Perdata, Universitas Borobudur-1999 Bachelor Civil Law, Borobudur University-1999
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK-103/KCI/DIR-HRD/44/XI/2020 Tanggal 1 Desember 2020 Decision Letter of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK-103/KCI/DIR-HRD/44/XI/2020 Dated December 1, 2020
Pengalaman Kerja Work Experience	- Vice President Sumber Daya Manusia PT KCI (Maret 2019-Sekarang) - Vice President Organization Development PT KAI (Juli 2018-Maret 2019) - Senior Manager SDM dan Umum Daerah Operasi 1 Jakarta (Agustus 2015-Juli 2018) - Vice President Industrial Relation (April 2015-Agustus 2015) - Senior Manager SDM dan Umum Divisi Regional 3 Sumatera Selatan (Januari 2015-April 2015) - Vice President of Human Resources PT KCI (March 2019-Present) - Vice President Organization Development PT KAI (July 2018-March 2019) - Senior Manager of Human Resources and General Operating Area 1 Jakarta (August 2015-July 2018) - Vice President Industrial Relation (April 2015-August 2015) - Senior Manager of Human Resources and General Regional Division 3 South Sumatera (January 2015-April 2015)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Afiliasi Affiliation	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Domisili / Domicile	Bekasi, Jawa Barat / Bekasi, West Java



Budi Heryanto

Vice President Maintenance Planning and Evaluation
Vice President Maintenance Planning and Evaluation

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	46/Karawang, 14 Oktober 1974 46/Karawang, October 14, 1974
Riwayat Pendidikan Educational History	- S1 Teknik Mesin, Institut Teknologi Budi Utomo-2002 - D3 Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung-1996 - Bachelor of Mechanical Engineering, Budi Utomo Institute of Technology-2002 - Diploma of Mechanical Engineering, Institut Teknologi Bandung-1996
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK-103/KCI/DIR-HRD/35/V/2019 Tanggal 10 Mei 2019 Decision Letter of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK-103/KCI/DIR-HRD/35/V/2019 dated May 10, 2019
Pengalaman Kerja Work Experience	- Vice President Perencanaan dan Evaluasi Pemeliharaan (Mei 2019-Sekarang) - Vice President Pemeliharaan dan Quality Control April (2016-Mei 2019) - Manager Sarana PT KAI (Persero) (Februari 2015-April 2016) - Manager Unit Quality Control PT KAI (Persero) (September 2014-Februari 2015) - Manager EMU Maintenance (Juni 2014-Agustus 2014) - Vice President of Planning And Maintenance Evaluation (May 2019-Present) - Vice President of Maintenance and Quality Control April (2016-May 2019) - Manager Sarana PT KAI (Persero) (February 2015-April 2016) - Manager Unit Quality Control PT KAI (Persero) (September 2014-February 2015) - EMU Maintenance Manager (June 2014-August 2014)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Afiliasi Affiliation	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Domisili / Domicile	Karawang, Indonesia / Karawang, Indonesia



Agung Suranto

Vice President Pemeliharaan
dan Quality Control
Vice President Maintenance
and Quality Control

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir <i>Age/Place & Date of Birth</i>	55/Surakarta, 10 Mei 1966 55/Surakarta, May 10, 1966
Riwayat Pendidikan <i>Educational History</i>	S1 Fisika, Universitas Gadjah Mada-1995 Bachelor of Physics, Universitas Gadjah Mada-1995
Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK-103/KCI/DIR-HRD/62/XI/2020 Tanggal 1 Desember 2020 Decision Letter of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK-103/KCI/DIR-HRD/62/XI/2020 Dated December 1, 2020
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	- Vice President Pemeliharaan dan Quality Control (Mei 2019-Sekarang) - Vice President Technical Engineering of Rolling Stock (Januari 2015-Januari 2019) - Vice President Wagons (Agustus 2014-Januari 2015) - Vice President of Maintenance and Quality Control (May 2019-Present) - Vice President Technical Engineering of Rolling Stock (January 2015-January 2019) - Vice President Wagons (August 2014-January 2015)
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Tidak ada None
Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Domisili <i>Domicile</i>	Depok, Jawa Barat Depok, West Java



Albertus Indarko Wiyogo

Vice President Informasi
Teknologi
Vice President Information
Technology

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir <i>Age/Place & Date of Birth</i>	47/Cimahi, 23 September 1973 47/ Cimahi, September 23, 1973
Riwayat Pendidikan <i>Educational History</i>	S1 Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Telkom-1998 Bachelor of Informatics, Telkom College of Technology-1998
Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK.U/KH.608/I/29/SAP/KA-2019 Tanggal 23 Januari 2019 Decree of Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia number: SK. U/KH. 608/I/29/SAP/KA-2019 dated January 23, 2019
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	- Vice President Informasi dan Teknologi PT KCI (Januari 2019-Sekarang) - Vice President E-Commerce PT KAI (Januari 2017-Januari 2019) - Vice President IT Operation PT KAI (Agustus 2016-Januari 2017) - Vice President IT Planning and Governance PT KAI (September 2015-Agustus 2016) - Manager Network and Security Operation PT KAI (Januari 2015-September 2016) - Vice President of Information and Technology PT KCI (January 2019-Present) - Vice President of E-Commerce PT KAI (January 2017-January 2019) - Vice President IT Operation PT KAI (August 2016-January 2017) - Vice President IT Planning and Governance PT KAI (September 2015-August 2016) - Network and Security Operation Manager PT KAI (January 2015-September 2016)
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Tidak ada None
Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Domisili <i>Domicile</i>	Cimahi, Jawa Barat Cimahi, West Java



Bowo Aji Kuncoro

Vice President Prasarana
Vice President
Infrastructure

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	55/Grobogan, 16 November 1965 55/Grobogan, November 16, 1965
Riwayat Pendidikan Educational History	SLTA, STM Pembangunan Nasional-1983 Senior High School, Vocational High School Pembangunan Nasional-1983
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK-103/KCI/DIR-HRD/51/XI/2020 Tanggal 1 Desember 2020 Decision Letter of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK-103/KCI/DIR-HRD/51/XI/2020 Dated December 1, 2020
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President Prasarana (September 2014-Sekarang) • Manager Jalan Rel dan Jembatan (Maret 2014-September 2014) • Manager Program Anggaran Jalan Rel dan Jembatan (September 2013-Maret 2014) • Vice President of Infrastructure (September 2014-Present) • Railway and Bridge Road Manager (March 2014-September 2014) • Budget Program Manager Rail and Bridge Road (September 2013-March 2014)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Afiliasi Affiliation	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Domisili Domicile	Surakarta, Indonesia



**Rachmad
Zaini Kurniawan**

Vice President Operasi
Kereta Api
Vice President Train Operation

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	40/Surabaya, 2 Oktober 1980 40/Surabaya, October 2, 1980
Riwayat Pendidikan Educational History	S1 Manajemen, Universitas 17 Agustus-2006 Bachelor of Management, 17 Agustus University-2006
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK-103/KCI/DIR-HRD/73/XI/2020 Tanggal 1 Desember 2020 Decision Letter of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK-103/KCI/DIR-HRD/73/XI/2020 Dated December 1, 2020
Pengalaman Kerja Work Experience	• Train Operation Vice President PT KCI (Desember 2020-Sekarang) • Vice President Operasi Kereta Api PT KCI (September 2020-November 2020) • Pelaksana Tugas Vice President Operasi KA PT KCI (Februari 2020-September 2020) • Train Operation Vice President PT KCI (Desember 2020-Present) • Vice President of Train Operations PT KCI (September 2020-November 2020) • Acting Vice President of Train Operations PT KCI (February 2020-September 2020)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Afiliasi Affiliation	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Domisili Domicile	Surabaya, Jawa Timur Surabaya, East Java



Karina Amanda

Vice President Komersial
Vice President Commercial

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	36/Jakarta, 16 Agustus 1984 36/Jakarta, August 16, 1984
Riwayat Pendidikan Educational History	S1 Hukum, Universitas Indonesia-2006 Bachelor of Law, University of Indonesia-2006
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK-103/KCI/DIR-HRD/89/XI/2020 Tanggal 1 Desember 2020 Decision Letter of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK-103/KCI/DIR-HRD/89/XI/2020 Dated December 1, 2020
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President Komersial (April 2019-Sekarang) • Vice President Hukum dan Kepatuhan (Juni 2016-April 2019) • Manager Hukum (Juli 2013-Juni 2016) • Vice President Commercial (April 2019-Present) • Vice President of Law and Compliance (June 2016-April 2019) • Legal Manager (July 2013-June 2016)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Afiliasi Affiliation	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat Depok, West Java



Sukairi

Vice President Pelayanan
Vice President Service

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	53/Bangkalan, 22 Oktober 1967 53/Bangkalan, October 22, 1967
Riwayat Pendidikan Educational History	S1 Ekonomi, Universitas Padjadjaran-1994 Bachelor of Economics, Padjadjaran University-1994
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK-103/KCI/DIR-HRD/92/XI/2020 Tanggal 1 Desember 2020 Decision Letter of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK-103/KCI/DIR-HRD/92/XI/2020 Dated December 1, 2020
Pengalaman Kerja Work Experience	• Vice President Pelayanan (April 2019-Sekarang) • Vice President Public Service Obligation (Oktober 2015-April 2019) • Vice President Freight Marketing, Sales and Customer Care (Juni 2015-Oktober 2015) • Executive Vice President Operation (Agustus 2014-Juni 2015) • Vice President Daerah Operasi 3 Cirebon (Februari 2014-Agustus 2014) • Vice President of Service (April 2019-Present) • Vice President Public Service Obligation (October 2015-April 2019) • Vice President of Freight Marketing, Sales and Customer Care (June 2015-October 2015) • Executive Vice President Operation (August 2014-June 2015) • Vice President of Operation District 3 Cirebon (February 2014-August 2014)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Afiliasi Affiliation	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Domisili Domicile	Bandung, Jawa Barat Bandung, West Java



Made Gerina Yasa

Vice President Keamanan dan Keselamatan
Vice President Security and Safety

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	54/Buleleng, 24 April 1966 54/Buleleng, April 24, 1966
Riwayat Pendidikan Educational History	S1 Hukum, Universitas Merdeka Madiun-2009 Bachelor of Law, Merdeka University Madiun-2009
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK-103/KCI/DIR-HRD/72/XI/2020 Tanggal 1 Desember 2020 Decision Letter of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK-103/KCI/DIR-HRD/72/XI/2020 Dated December 1, 2020
Pengalaman Kerja Work Experience	- Vice President Keamanan dan Keselamatan (Desember 2018-Sekarang) - Senior Manager Pengamanan Daerah Operasi 8 Surabaya (Februari 2018-Desember 2018) - Senior Manager Pengamanan Daerah Operasi 7 Madiun (Maret 2016-Februari 2018) - Vice President of Security and Safety (December 2018-Present) - Senior Manager Security District Operations 8 Surabaya (February 2018-December 2018) - Senior Manager of Security District Operations 7 Madiun (March 2016-February 2018)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Afiliasi Affiliation	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Domisili Domicile	Malang, Indonesia



Philippus Surjanto Hartanto

Internal Consultant Expert

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	53/Surabaya, 26 Mei 1968 53/Surabaya, May 26, 1968
Riwayat Pendidikan Educational History	S2 Magister Manajemen, Universitas Persada Indonesia Y.A.I-2007 Master of Management-Universitas Persada Indonesia Y.A.I-2007
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK-103/KCI/DIR-HRD/96/XI/2020 Tanggal 1 Desember 2020 Decision Letter of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK-103/KCI/DIR-HRD/96/XI/2020 Dated December 1, 2020
Pengalaman Kerja Work Experience	- Internal Consultant Utama (Juli 2020-sekarang) - Plt. Director of Consumer Business PT RMU (2018-2020) - Vice President Sekretaris Perusahaan (2015-2018) - Main Internal Consultant (July 2020-present) - Acting Director of Consumer Business PT RMU (2018-2020) - Vice President Corporate Secretary (2015-2018)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Afiliasi Affiliation	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Domisili Domicile	Jakarta, Indonesia



STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Structure and Composition of Shareholders

Hingga 31 Desember 2020, struktur dan komposisi pemegang saham KCI, serta komposisi kepemilikan saham di atas 5% dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut.

As of December 31, 2020, the structure and composition of KCI shareholders, including the composition of share ownership above 5% are described in the following table and chart.

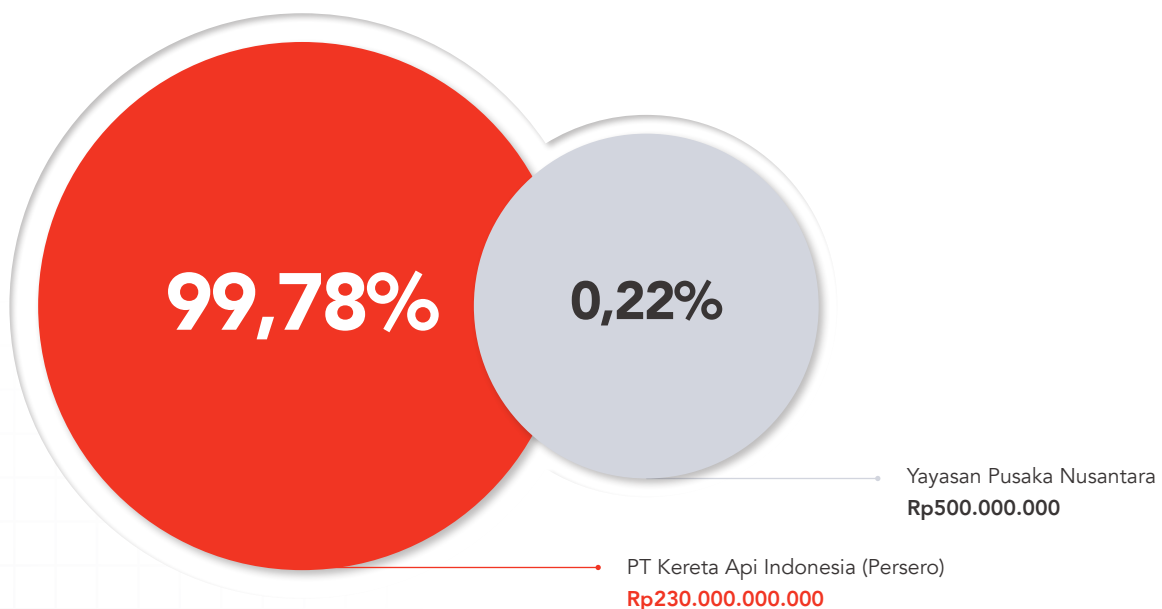
Nama Pemegang Saham Shareholder	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Percentage
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Rp230.000.000.000	99,78%
PT Yayasan Pusaka Nusantara	Rp500.000.000	0,22%

KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT YANG MEMILIKI <5% SAHAM

Public Shares With Less Than 5%

Hingga 31 Desember 2020, KCI belum pernah melepas sahamnya ke publik.

As of December 31, 2020, KCI has never issued its shares to the public.



KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Share Ownership of the Board of Commissioners and Directors

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Lembar Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Maqin U. Norhadi	Komisaris Utama President Commissioner	-	-
Edy Widyaya	Komisaris Commissioner	-	-
John Robertho	Komisaris Commissioner	-	-
Danto Restyawan	Komisaris Commissioner	-	-
Direksi Board of Directors			
Wiwik Widyanti	Direktur Utama President Director	-	-
Wawan Ariyanto	Direktur Operasi dan Pemasaran Director of Operation and Marketing	-	-
Roppiq Lutzfi Azhar	Direktur Teknik Director of Technic	-	-
M. Widodo	Direktur Keuangan dan Administrasi Director of Finance and Administration	-	-

KOMPOSISI KEPEMILIKAN LOKAL DAN ASING

Composition of Domestic and Foreign Ownership

Keterangan Description	2020		2019	
	Jumlah Saham Total Shares	%	Jumlah Saham Total Shares	%
Lokal Local				
Individu Individual				
Institusi Institution	Rp230.500.000.000	100,00	Rp230.500.000.000	100,00
Buy Back	-		-	
Pemerintah Daerah Local Government	-		-	
Pemerintah Government	-		-	
Jumlah Kepemilikan Lokal Total Local Ownership	Rp230.500.000.000	100,00	Rp230.500.000.000	100,00



Keterangan Description	2020		2019	
	Jumlah Saham Total Shares	%	Jumlah Saham Total Shares	%
Asing Foreign				
Individu Individual	-		-	
Institusi Institution	-		-	
Jumlah Kepemilikan Asing Total Foreign Ownership	-		-	
Jumlah Total	Rp230.500.000.000	100,00	Rp230.500.000.000	100,00

KRONOLOGI PENERBITAN DAN PENCATATAN OBLIGASI

Bond Issuance and Register Chronology

Hingga 31 Desember 2020, Perseroan belum pernah melakukan penerbitan obligasi.

Until December 31, 2020, the Company had not made any bond issuance.

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM DAN EFEK

Chronology of Share and Securities Listing

Kronologis Pencatatan Saham

Hingga 31 Desember 2020, Perseroan belum melakukan pencatatan saham di bursa efek, sehingga tidak terdapat informasi mengenai tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi serta nama bursa di mana saham dicatatkan.

Shares Listing Chronology

As of December 31, 2020, the Company has not listed any shares at stock exchange, therefore, information about shares listing year, total shares, shares par value and shares offering price for each corporate action and name of the stock exchange where the shares are listed are unavailable.

Program Buy Back Saham

Hingga 31 Desember 2020, Perseroan belum mempunyai kebijakan melakukan buy back saham.

Buy Back Stock Program

Until December 31, 2020, the Company did not have a stock buyback policy.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

Hingga 31 Desember 2020, Perseroan belum melakukan pencatatan efek lainnya di bursa efek sehingga tidak terdapat informasi mengenai nama efek, tahun penerbitan, tingkat bunga/ imbalan dan jatuh tempo serta nama bursa dan peringkat efek.

Other Securities Listing Chronology

As of December 31, 2020, the Company has not listed other securities at Stock Exchange, therefore, information about name of the securities, issuance year, interest/yield rate and maturity as well as name of the stock exchange and securities rating are unavailable.

Akses Informasi Daftar Pemegang Saham Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

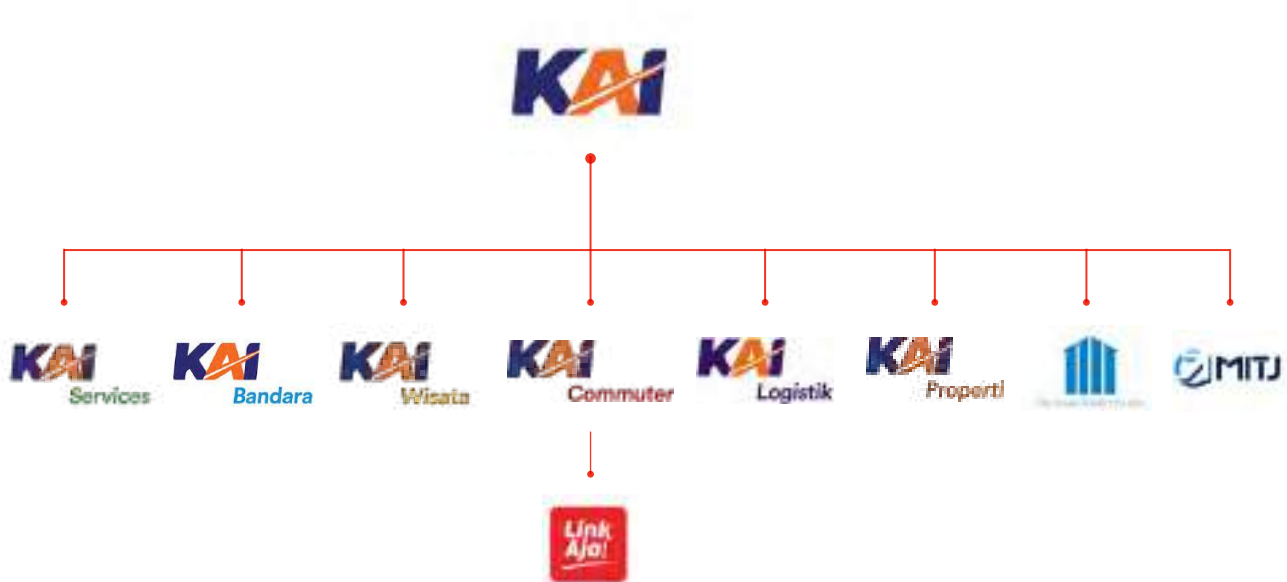
Perseroan memberikan akses informasi data kepada Pemegang Saham secara transparan yang dilakukan secara rutin.

Access to Shareholder List Information Monthly, Quarterly, and Semiannually

The Company provides transparent access to data information on a regular basis to shareholders.

STRUKTUR GRUP DAN ASOSIASI PERSEROAN

Corporate Group and Association Structure



PROFIL INDUK PERUSAHAAN

Holding Company Profile



PT Kereta Api Indonesia (Persero) didirikan berdasarkan akta tanggal 1 Juni 1999 No. 2 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, yang kemudian diperbaiki kembali dengan akta tanggal 13 September 1999 No. 14. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan tanggal 1 Oktober 1999 No.C-17171 HT.01.01. TH.99 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Januari 2000 No. 4 Tambahan No. 240/2000.

Berdasarkan surat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01-16788 tanggal 5 Oktober 2009, Direksi PT Kereta Api (Persero) mengeluarkan Instruksi Direksi No.16/OT.203/

PT Kereta Api Indonesia (Persero) was established based on the deed dated June 1, 1999 No. 2 which was made in front of Imas Fatimah, S.H., Sp. N., notary in Jakarta, which was subsequently repaired again with the deed of September 13, 1999 No. 14. The deed of establishment has received approval from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree date October 1, 1999 No. C-17171 HT. 01.01. TH. 99 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia on 14 January 2000 No.4 Supplement No. 240/2000.

Based on the approval letter of the Minister of Law and Human Rights RI No. AHU-AH. 01-16788 dated October 5, 2009, the Board of Directors of PT Kereta Api (Persero) issued the



KA-2010 mengenai perubahan nama PT Kereta Api (Persero) menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI terhitung tanggal 11 Mei 2010.

Seiring dengan dinamika dunia usaha dan berkembangnya tuntutan pasar, saat ini KAI juga menyelenggarakan kegiatan usaha penunjang lainnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Di antaranya adalah pengelolaan properti yang terkait dengan jasa kereta api, pariwisata berbasis kereta api, restoran di kereta api (*on train services*) dan di stasiun, termasuk jasa katering dan distribusi logistik.

instruction of Board of Directors No. 16/OT. 203/KA-2010 concerning the change of name of PT Kereta Api (Persero) to PT Kereta Api Indonesia (Persero) or KAI dated May 11, 2010.

*Along with the dynamics of the business world and the growing market demands, KAI also holding other supporting business activities by utilizing its resources. Among them are the management of properties related to railway services, tourism-based trains, restaurants in trains (*on train services*) and at stations, including catering services and distribution of logistics.*

Nama <i>Nama</i>	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Alamat Perusahaan <i>Company Address</i>	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117 PO Box 1163 Bandung 40000
Telepon <i>Phone</i>	022-4230031, 4230039
Fax	022-4203342 ext. 10039
E-mail	esd@kai.id esd@kai.id
Website	www.kai.id
Tanggal Pendirian <i>Establishment Date</i>	1 Juni 1999 <i>June 1, 1999</i>
Bidang Usaha <i>Business Line</i>	Melakukan usaha di bidang transportasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. <i>Carry out business in the transportation sector, as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce high quality and highly competitive goods and/or services to obtain/pursue profits in order to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies.</i>
Status	Badan Usaha Milik Negara (Persero) <i>State Owned Enterprises (Persero)</i>
Kepemilikan Saham <i>Share Ownership</i>	100% Pemerintah Republik Indonesia <i>100% Government of the Republic of Indonesia</i>
Dasar Hukum Pendirian <i>Legal Basis of Establishment</i>	Akta Pendirian PT Kereta Api (Persero) tanggal 1 Juni 1999 No. 2 <i>Deed of Establishment of PT Kereta Api (Persero) June 1, 1999 No. 2</i>
Akta Pendirian <i>Deed of Establishment</i>	Akta Notaris No. 2 dan Akta Notaris No. 14 tanggal 13 September 1999 dari Notaris Imas Fatimah, S.H, pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C- 17171 HT.01.01.TH.99 tanggal 1 Oktober 1999. <i>Notary Deed No. 2 and Notary Deed No. 14 dated September 13, 1999 from Notary Imas Fatimah, SH, legalization from the Minister of Justice of the Republic of Indonesia based on Decree No. C- 17171 HT.01.01.TH.99 dated October 1, 1999.</i>

PROFIL ENTITAS ANAK

Subsidiaries Profile



PT RESKA MULTI USAHA

PT Reska Multi Usaha bergerak dalam bidang usaha Restorasi KA, Service On Train (SOT), Jasa Boga (Catering), Resto & Cafe, Parkir, Outsourcing, dan Jasa Pengamanan. Komposisi kepemilikan saham PT Reska Multi Usaha yaitu PT KAI 99,74% dan Yayasan Pusaka 0,26%.

PT RESKA MULTI USAHA

PT Reska Multi Usaha engaged in the business of KA Restoration, Service On Train (SOT), Jasa Boga (Catering), Resto & Cafe, Parking, Outsourcing, and Security Services. Composition of PT Reska Multi Usaha shareholding PT KAI 99.74% and Yayasan Pusaka 0.26%.

Tanggal Pendirian Establishment Date	2 Juli 2003 July 2, 2003
Alamat Kantor Company Address	Stasiun Mangga Besar Lt. 1, Jl. Karanganyar no. 1, Jakarta Pusat
Telepon Phone	021-62302540
E-mail	reska.pusat@reska.co.id
Website	www.reska.co.id



PT RAILINK

PT Railink merupakan *joint venture* antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan PT Angkasa Pura II (Persero) dengan komposisi kepemilikan saham 60% KAI dan 40% AP II. Kegiatan usaha yang dijalannya yakni pengoperasian, pengoperasian pengelolaan dan pengusahaan kereta api bandara, pengembangan dan pengadaan stasiun kereta api di bandara dan di pusat kota, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kereta api, pembangunan prasarana kereta api, konsultasi dan desain sistem perkeretaapian, pengusahaan jasa lainnya yang menunjang usaha-usaha pokok.

PT RAILINK

PT Railink is a joint venture between PT Kereta Api Indonesia (Persero) and PT Angkasa Pura II (Persero) with shareholding composition of 60% KAI and 40% AP II. The business activities are operational, operation of the management and exploitation of airport trains, development and procurement of railway stations in the airport and in the city center, procurement and maintenance of railway facilities and infrastructures, construction of railway infrastructure, consultation and train design system, other services that support the main business.

Tanggal Pendirian <i>Establishment Date</i>	28 September 2006 <i>September 28, 2006</i>
Alamat Kantor <i>Company Address</i>	Stasiun KA Bandara Sudirman Baru (BNI City), Jl. Tanjung Karang No 1, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jakarta Cabang Medan: Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 14-Medan 20231, Sumatera Utara, Indonesia
Telepon <i>Phone</i>	061-4561331
E-mail	info@railink.co.id
Website	www.railink.co.id



PT KERETA API PARIWISATA

PT Kereta Api Pariwisata atau disingkat Kawisata bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar dalam wilayah Indonesia di bidang pariwisata kereta api, dan kegiatan usaha yang mendukung pariwisata kereta api dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Komposisi kepemilikan saham PT KA Pariwisata yaitu KAI 99,9% dan Yayasan Pusaka 0,1%.

PT KERETA API PARIWISATA

PT KA Wisata or abbreviated as Kawisata aims to provide high quality goods and competitive services in the Indonesian market in the field of railroad tourism, and business activities that support to railroad tourism by applying the principles of Limited Liability Company. The composition of PT KA Pariwisata share ownership is KAI 99.90% and Yayasan Pusaka 0.1%.

Tanggal Pendirian <i>Establishment Date</i>	8 September 2009 <i>September 8, 2009</i>
Alamat Kantor <i>Company Address</i>	Stasiun Gondangdia Pintu Selatan Lantai Dasar, Jl Srikaya I, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Selatan
Telepon <i>Phone</i>	021-38902233
E-mail	021-38902424
Website	info@kawisata.id
Website	www.kawisata.co.id



PT KA LOGISTIK

PT Kereta Api Logistik (Kalog) memiliki usaha di bidang layanan distribusi logistik berbasis kereta api, dengan kemasan bisnis *door to door service* untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi pelanggan kereta api yang didukung dengan angkutan pra dan lanjutan serta layanan penunjangnya, meliputi pengelolaan Terminal Peti Kemas (TPK), bongkar muat, pergudangan, pengepakan, pelabelan, pengangkutan, penjejakan, pengawalan logistik serta manajemen logistik dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Orientasi bisnis Kalog ke depan adalah sebagai jasa layanan distribusi logistik secara *Total Solution* melalui *End-to-End Services* atau dengan kata lain sebagai *SCM Service Provider*.

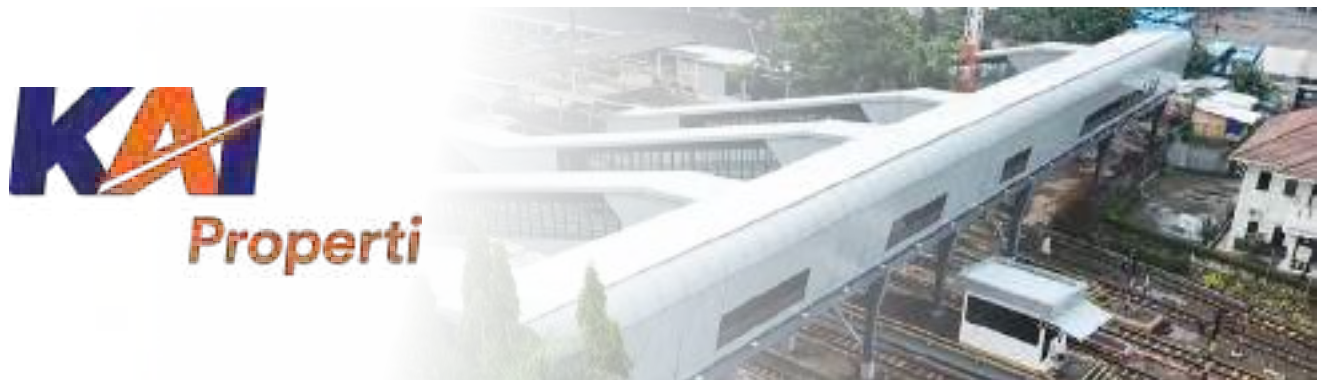
Fungsi dan peran kontributif Kalog terhadap jasa layanan yang telah disediakan oleh induknya adalah sebagai pencipta nilai tambah (*value creator*) sepanjang rantai nilai (*value chain*) layanan distribusi logistik, termasuk layanan yang telah disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), seperti angkutan barang dan pergudangan. Komposisi kepemilikan saham PT KA Logistik yaitu KAI 99,90% dan Yayasan Pusaka 0,1%.

PT KA LOGISTIK

PT Kereta Api Logistik (Kalog) carries out business in the field of railroad-based logistics distribution services, with door-to-door service business to provide continuous service for railroad customers supported by pre and advanced transportation and supporting services, including the management of Container Terminals (TPK), loading and unloading, warehousing, packaging, labeling, transportation, tracking, logistics escort and logistics management by applying the principles of Limited Liability Companies. Kalog's business orientation in the future is as a Total Solution logistics distribution service through an End-to-End Services or in other words as SCM Service Provider.

Kalog's contributive functions and roles for services provided by its chief are as value creators along the value chain of logistics distribution services, including services provided by PT Kereta Api Indonesia (Persero), such as freight transportation and warehousing. The composition of PT KA Logistik's share ownership is KAI 99.90% and Yayasan Pusaka 0.1%.

Tanggal Pendirian <i>Establishment Date</i>	8 September 2009 <i>September 8, 2009</i>
Alamat Kantor <i>Company Address</i>	Stasiun Gondangdia Pintu Selatan Lantai Dasar, Jl Srikaya I, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Selatan
Telepon <i>Phone</i>	021-31922299
Fax	021-31922288
E-mail	info@kalogistics.co.id
Website	www.kalogistics.co.id



PT KA PROPERTI MANAJEMEN

PT KA Properti Manajemen atau disingkat PT KAPM memiliki usaha di bidang pengelolaan aset/properti perkeretaapian milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) maupun pihak lainnya dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan serta memberikan nilai tambah aset/properti tersebut guna memenuhi standar mutu terbaik dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Komposisi kepemilikan saham PT KA Properti Manajemen yaitu KAI 99,63% dan Yayasan Pusaka 0,37%.

PT KA PROPERTI MANAJEMEN

PT KA Properti Manajemen or abbreviated as PT KAPM has a business in the field of railway asset/property management owned by PT Kereta Api Indonesia (Persero) and other parties with the aim of optimizing the utilization and providing added value of assets/property to meet the best quality standards by applying the principles of Limited Liability Companies. The composition of PT KA Properti Manajemen's share ownership are KAI 99.63% and Yayasan Pusaka 0.37%.

Tanggal Pendirian Establishment Date	8 September 2009 September 28, 2006
Alamat Kantor Company Address	Stasiun Sawah Besar Lt. 1, Jl. K.H. Samanhudi, Jakarta Pusat-10710
Telepon Phone	021-3451040 & 021 -3451404
Fax	021-3451087
E-mail	corporate@kapm.co.id
Website	www.kapm.co.id



PT PILAR SINERGI BUMN INDONESIA

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau disingkat PSBI merupakan Joint Venture dari 4 BUMN yaitu PT Wijaya Karya (Persero) (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) dengan kepemilikan saham WIKA 38%, KAI 25%, PN VIII 25%, dan JSMR 12%. PT PSBI bersama-sama dengan China Railway International Co. Ltd. dari Tiongkok membentuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk menyelenggarakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

PT PILAR SINERGI BUMN INDONESIA

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia or abbreviated PSBI is a Joint Venture of 4 BUMN, namely PT Wijaya Karya (Persero) (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) and PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) with the ownership of WIKA stock 38%, KAI 25%, PN VIII 25%, and JSMR 12%. PT PSBI together with China Railway International Co. Ltd. From China formed PT Kereta Rapid Indonesia China (KCIC) to carry out Jakarta-Bandung Rapid Train project.

Tanggal Pendirian Establishment Date	2 Oktober 2015 October 2, 2015
Alamat Kantor Company Address	Jl. D.I. Panjaitan Kav.9, Jakarta 13340, PO Box 4174
Telepon Phone	021-8192808, 8508640, 8508650
Fax	021-8191235



PT FINTEK KARYA NUSANTARA

LinkAja! merupakan uang elektronik nasional kebanggaan Indonesia berbasis server yang merupakan produk andalan dari PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) yang telah terdaftar di Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Izin Bank Indonesia Nomor 21/65/DKSP/SRT/B yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2019, Finarya secara resmi telah mendapat lisensi/izin dari Bank Indonesia sebagai Perusahaan Penerbit Uang Elektronik dan Penyelenggara Layanan Keuangan Digital Badan Hukum.

Finarya merupakan anak usaha yang dibentuk dari semangat sinergi nasional PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan tujuh badan usaha milik Negara (BUMN), yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Danareksa (Persero) yang berdiri pada tanggal 21 Januari 2019. Didukung oleh Telkomsel selaku operator selular terbesar di Indonesia dan jaringan besar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan ratusan ribu titik akses transaksi keuangan, keberadaan Finarya sebagai platform sistem pembayaran produk-produk BUMN akan membantu mendorong ekosistem transaksi keuangan non-tunai dan inklusi keuangan yang holistik di Indonesia, dengan fokus pada kebutuhan pembayaran mendasar seluruh kalangan masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2019 PT Kereta Commuter Indonesia membeli saham PT Fintek Karya Nusantara sebesar 2,03%.

PT FINTEK KARYA NUSANTARA

LinkAja! It is a national electronic money Indonesian pride server which is the flagship product of PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) which has been registered in Bank Indonesia. Based on Bank Indonesia license number 21/65/DKSP/SRT/B issued on February 21, 2019, Finarya has officially obtained license/permit from Bank Indonesia as Electronic Money Issuer Company and Legal Entity Digital Financial Services Provider.

Finarya is a subsidiary formed by the spirit of national synergy of PT Telekomunikasi Cellular (Telkomsel) and seven state-owned enterprises (BUMN), namely PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), and PT Danareksa (Persero), which was established on January 21, 2019. Supported by Telkomsel as the largest mobile operator in Indonesia and a large network of state-owned banks (Himbara) with hundreds of thousands of financial transaction access points, the existence of Finarya as a platform of payment system of state-owned products will help drive the ecosystem of non-cash financial transactions and the holistic financial inclusion in Indonesia, with a focus on the fundamental payment needs of the whole people

In 2019, PT Kereta Commuter Indonesia bought the shares of PT Fintek Karya Nusantara amounting to 2.03%.

Tanggal Pendirian Establishment Date	21 Februari 2019 February 21, 2019
Alamat Kantor Company Address	Jl. Jend Sudirman, SCBD Lot 11A, Kav 52-53, The Energy Building 21 st Floor, South Jakarta Jakarta 12190
Telepon Phone	info@linkaja.id
Fax	www.linkaja.id



PT MODA INTEGRASI TRANSPORTASI JABODETABEK

PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek atau disingkat MITJ merupakan *Joint Venture* dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dan PT MRT Indonesia (MRT) dengan kepemilikan saham KAI 49% dan MRT 51%. KAI bersama-sama dengan MRT membentuk Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) untuk mematangkan konsep integrasi perkeretaapian dan sarana transportasi lainnya.

PT MODA INTEGRASI TRANSPORTASI JABODETABEK

PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek or abbreviated as MITJ is a Joint Venture of PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) and PT MRT Indonesia (MRT) with 49% share ownership in KAI and 51% in MRT. KAI and MRT formed the Jabodetabek Transportation Integration Mode (MITJ) to finalize the concept of integrating railways and other transportation facilities.

Tanggal Pendirian <i>Establishment Date</i>	10 Desember 2019 <i>December 10, 2019</i>
Alamat Kantor <i>Company Address</i>	Wisma Nusantara Lt. 3 Jalan MH Thamrin 59 Jakarta 10350-Indonesia
Telepon <i>Phone</i>	(+62-21) 314 4555
Fax	info@mitj.co.id



SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

Pertumbuhan dan perkembangan bisnis harus didukung dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan kapasitas mumpuni. Untuk itu, KCI mengelola SDM secara efektif dan terarah sejak proses rekrutmen hingga akhir kariernya guna mencetak SDM berkualitas yang membantu Perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif. Strategi yang dijalankan Perusahaan mengacu pada visi, misi, dan strategi yang sejalan dengan arah dinamika industri di skala nasional dan global.

Aktivitas-aktivitas yang mendukung peningkatan kualitas SDM dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pada tahun 2020, Perusahaan dihadapkan pada kondisi luar biasa seiring merebaknya wabah COVID-19 yang menuntut Perusahaan untuk memberikan perhatian lebih pada pengelolaan SDM. Adaptivitas menjadi kunci untuk mempertahankan produktivitas SDM agar tetap optimal walau kegiatan operasional berubah secara drastis.

Business growth and development shall be supported by the ability of Human Resources (HR) who have strong competence and capacity. Therefore, KCI manages its HR in an effective and focused manner from the recruitment process to the end of their career in order to produce quality human resources that will help the Company to gain a competitive advantage. The Company carries out the strategy by referring to the vision, mission, and strategy that is in line with the dynamics of the industry on a national and global scale.

The Company carries out activities that support the improvement of human resources quality consistently and continuously. In 2020, the Company faced an extraordinary condition due to the outbreak of COVID-19, which required the Company to pay more attention to HR management. Adaptivity is the key to maintaining human resources productivity in order to remain optimal amidst the drastic change of operational activities.



Meski dihadapkan pada kondisi yang menantang, SDM Perseroan mampu untuk menyesuaikan diri seiring karakter kompeten yang terus diasah dari tahun-tahun sebelumnya. Pembentukan karakter kompeten ini juga diimbangi dengan penguatan kerangka jenjang karir dan deskripsi pekerjaan yang jelas bagi seluruh karyawan. Sebagai hasilnya, SDM Perseroan bertumbuh dengan memiliki keterampilan teknis dan non-teknis dalam menjalankan pekerjaannya dengan tepat serta tangkas dalam menghadapi kendala yang hadir dari masa-masa yang penuh tantangan.

Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM)

KCI sebagai Perseroan yang bergerak di sektor transportasi telah banyak mengalami dinamika organisasi melalui kebijakan pengelolaan SDM yang berfokus pada peningkatan kompetensi Pegawai. Beberapa langkah kebijakan telah diambil dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai maupun peningkatan kinerja Perusahaan. Berikut penerapan kebijakan SDM KCI:

1. Implementasi Kebijakan Perencanaan SDM

Tujuan dari perencanaan SDM ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh *supply* dan *demand* dalam konteks SDM Perseroan. KCI telah menerapkan program perencanaan SDM melalui analisis kebutuhan Pegawai dengan metode analisis Proses Bisnis Perseroan. Berikut rinciannya:

- a. **Penyusunan proses bisnis**
Telah berlangsung selama bulan Februari-September 2020, adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan (demi meraih tujuan tertentu). Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa subproses yang masing-masing memiliki atribut sendiri tetapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari superprosesnya. Analisis proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan.
- b. **Penyusunan Struktur Organisasi**
Dari hasil Proses Bisnis didapat berapa jumlah kebutuhan SDM dan bagaimana menetapkan struktur organisasi yang ideal mengacu pada jumlah kebutuhan SDM.
- c. **Penyusunan Job Profile**
Dari hasil Struktur Organisasi, selanjutnya dilakukan penyusunan JP, dan ini yang sedang dilakukan. JP merupakan suatu pernyataan tertulis yang berisi tujuan dari dibentuknya suatu jabatan/tugas. Uraian ini berisi gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan, bagaimana suatu pekerjaan

Despite facing challenging conditions, the Company's human resources managed with improved competent characters from previous years. The formation of competent character is also balanced with strengthening the framework of career paths and clear job descriptions for all employees. As a result, the Company's HR has grown to skillful employees, both technical and non-technical. They managed to carry out their work properly and being agile in dealing with obstacles that come from challenging times.

Policy of Human Resources (HR)

As a Company engaged in the transportation sector, KCI has experienced a lot of organizational dynamics through HR management policy that focuses on improving Employees' competence. Some policy measures have been taken in order to increase Employee performance and improve the Company's performance. The implementation of PT KCI HR policies:

1. Implementation of HR Planning Policy

The purpose of this HR planning is to ensure the conformity between labor and employment, both in terms of number and quality. The process is based on supply and demand in the context of the Company's HR. PT KCI has implemented an HR planning program through the needs of employees with the Company's business process analysis method. Here are the details:

- a. **Business process arrangement**
Taking place during February-September 2020, was a assembly of interrelated activities or structured work to resolve a particular problem or result in a product or service (to achieve certain objectives). A business process can be broken down into several subprocesses that each have its own attributes but also contribute to achieving the objectives of the superprocess. Business process analysis generally involves mapping processes and subprocesses within them to a degree of activity or activity.
- b. **Organizational Structure Preparation**
From the results of the business process, how many HR needs and how to establish an ideal organizational structure refers to the number of HR needs.
- c. **Creating Job Profile**
From the results of Organizational structure, then made a JP arrangement, and this is what is being done. JP is a written statement that contains the purpose of the establishment of a department/task. This description contains an overview of what the job holder should do, how a job is done, the reasons why the work is done, the relationship between a particular position

dilakukan, alasan-alasan mengapa pekerjaan tersebut dilakukan, hubungan antara suatu posisi tertentu dan posisi lainnya di luar lingkup pekerjaannya dan di luar organisasi (eksternal) untuk mencapai tujuan unit kerja dan Perseroan secara luas.

2. Implementasi Kebijakan Rekrutmen dan Seleksi Pegawai:

a. Program Induction

Program Induction telah dilaksanakan terhadap Pegawai yang telah mengikuti tes rekrutmen. Setelah Pegawai dinyatakan lolos seleksi, Pegawai tersebut wajib mengikuti agenda *Induction* sebagai pengenalan terhadap budaya dan sistem kerja.

Pada 2020, sistem *Induction* yang digunakan sudah dibuat berupa buku sehingga Pegawai baru dapat belajar dan memahami secara fleksibel.

3. Implementasi kebijakan penempatan Pegawai:

Penempatan Pegawai dilakukan tidak hanya terhadap Pegawai baru namun juga berjalan berkelanjutan sehingga SDM dapat terus memonitor penempatan yang pas terhadap seluruh Pegawai.

4. Implementasi Kebijakan Reward Management:

a. Remunerasi

Remunerasi yang merupakan pemberian gaji atau pendapatan tambahan terhadap Pegawai juga telah dilakukan oleh KCI. Penghasilan tetap dan tidak tetap dibayarkan setiap tanggal 24 dan 25.

b. Benefit

Benefit yang diberikan seperti uang duka dan pensiun Pegawai.

5. Implementasi Kebijakan Performance Management:

a. Pelatihan dan Pengembangan SDM;

Pelatihan dan pengembangan yang merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang oleh Perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan kemampuan pegawai telah dilaksanakan secara berkala. Ini dilakukan untuk memperbaiki *gap* antara kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan dengan yang dimiliki Pegawai.

b. Key Performance Indicator;

KPI telah dilaksanakan pada 2020 yang telah diberlakukan untuk level tertentu, yaitu hingga level Vice President (VP). Hingga saat ini, proses penyusunan masih berjalan dengan beriringan dengan Proses Bisnis.

6. Implementasi Kebijakan Career Management

Bertujuan dalam hal pengembangan yang efektif dari talenta yang ada, serta kepuasan terhadap kebutuhan pengembangan secara spesifik bagi Pegawai. Selain itu, *Career Development* juga bertujuan untuk meningkatkan

and the other position beyond the scope of its work and outside the organization (external) to achieve the objectives of the work unit and the company broadly.

2. Implementation of Employment Recruitment Policies and Selection:

a. Induction Program

The *Induction Program* has been implemented against officers who have taken the recruitment test. After the officer has passed the selection, the officer must follow the *Induction* agenda as an introduction to the company's culture and work system.

In 2020, the induction system used has been made in the form of books so that new officers can learn and understand flexibly.

3. Implementation of Employee Placement Policy:

Employees' placement was conducted not only on new employee but also the existing, so that human resources can continue to monitor the placement of all employees.

4. Implementation of Reward Management Policy:

a. Remuneration

Remuneration which is the granting of additional salary or investigation to the officer has also been conducted by PT KCI. Fixed income and no fixed on 24 and 25.

b. Benefit

Benefit provided such as money of grief and employee retirement.

5. Implementation of Performance Management Policy:

a. Human Resources Training and Development;

Training and development which is a series of activities designed by the Company to improve the knowledge, skills, and ability of employees have been carried out periodically. This is done to correct the gap between the competencies that the company needs with those owned by the employee.

b. Key Performance Indicator;

In 2020, KPI have been implemented to specific levels, particularly up to Vice President (VP) level. Up until now, the formulation process is still running in conformity with Business Process.

6. Implementation of Career Management Policies

Objective at effective development of existing talents, and satisfaction to the needs of specific development for the officer. In addition, career development also aims to improve the overall performance of the organization, improve the loyalty and motivation of the officers, and help



performa keseluruhan dari organisasi, meningkatkan loyalitas dan motivasi Pegawai, serta membantu menetapkan kebutuhan *training* di masa mendatang. Dalam hal kebutuhan *Career Management*, KCI menerapkan 3 proses utama, yakni:

- a. Asesmen Pegawai;
Merupakan proses untuk memperoleh data atau informasi dari nilai kompetensi yang disyaratkan Perusahaan terhadap Pegawai. Dengan ini dapat diperoleh informasi mengenai sesuai atau tidaknya kompetensi Pegawai dengan apa yang dipersyaratkan Perusahaan.
- b. Promosi Jabatan
Merupakan proses pengisian jabatan yang kosong oleh Pegawai yang terlebih dahulu telah melalui proses asesmen. Pada 2020, Divisi SDM telah melakukan promosi jabatan untuk 60 karyawan.
- c. Rotasi Jabatan
Merupakan salah satu media pengembangan pegawai, di mana rotasi merupakan pemindahan Pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain dengan tingkat jabatan yang setara. Ini dilakukan untuk memberikan pengalaman yang lebih terhadap pengembangan skill Pegawai sehingga siap untuk menempati jabatan di atasnya.

7. Implementasi Kebijakan *Employee Relation*

- a. Hubungan Industrial
Merupakan media Perusahaan dalam menghubungkan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas berjalannya proses bisnis KCI.

to establish the needs of training in the future. In terms of career management needs, PT KCI implements three main processes:

- a. *Employee Assessment*;
It is the process to obtain data or information from the competency values required by the Company to employees. This can be obtained information regarding the appropriate or absence of the officer's competence with what the company requires.
- b. *Promotion*
It is the process of filling vacant office by the officer who first through the assessment process. In 2020, HR Division has carried out promotions for 60 employees.
- c. *Rotation of Department*
One of the media for employees' development, in which rotation is the transfer of employee from one position to another with equal position level. This aims to provide a more experience to employees' skill development to be prepared to occupy the upper level position.

7. Implementation of *Employee Relation Policy*

- a. *Industrial Relations*
The Company's media to connect all parties related or interested to PT KCI's business process.

VISI, MISI, DAN TUJUAN SDM

Vision, Mission, and HR Objectives

Visi

Menyiapkan SDM yang berkualitas untuk mendukung Perusahaan, sebagai penyedia jasa transportasi publik yang utama dan terbaik.

Misi

Menyelenggarakan pengelolaan SDM yang berbasis pada sistem teknologi dan berbasis kompetensi.

Tujuan

Terpenuhinya kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi dan dapat mendukung target Perusahaan.

Vision

Prepare quality human resources to support the Company, as the main and best provider of public transportation services.

Mission

Organize HR management based on technology systems and competency.

Objectives

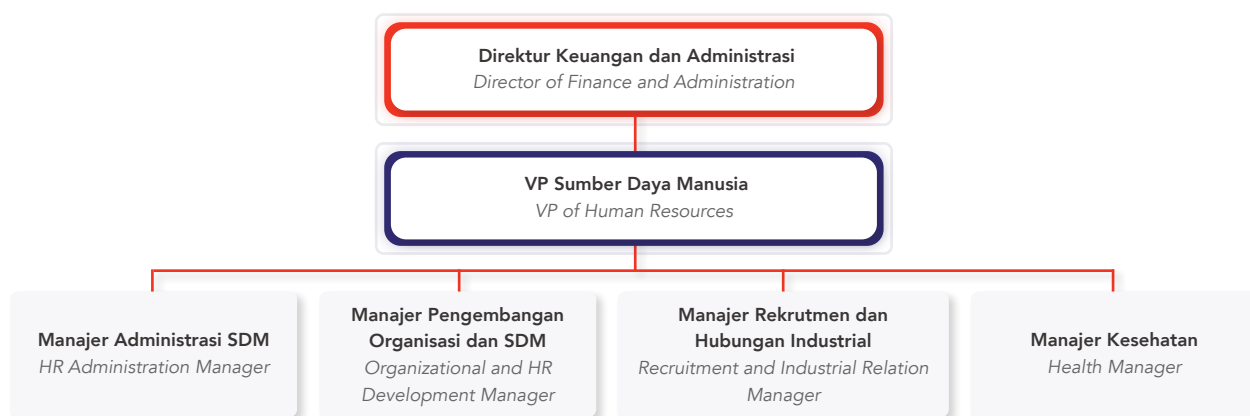
Fulfill the needs for competent human resources to support the Company's target achievement.

STRUKTUR PENGELOLA SDM

Human Resources Management Structure

Struktur pengelolaan SDM KCI ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor SK.024/KCI/DIR-HRD/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018.

KCI's HR management structure is set based on the Board of Directors SK Decree No. 024/KCI/DIR-HRD/X/2018 dated October 3, 2018.



Vice President Sumber Daya Manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan administrasi SDM meliputi pengelolaan database pegawai, peraturan kepegawaian, sistem administrasi kepegawaian, penggajian dan remunerasi, sistem informasi SDM, hubungan industrial dan kegiatan pemutusan hubungan kerja, jaminan hari tua dan koordinasi terhadap jaminan pelayanan kesehatan pegawai.
2. Merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan pengembangan SDM meliputi kebutuhan SDM, rekrutmen pegawai, penilaian kinerja, kompetensi pegawai, pengembangan karir pegawai, perubahan dan pengembangan organisasi.
3. Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh unit kerja di bawah tanggung jawabnya.
4. Menyusun kebutuhan biaya pegawai dan biaya pengembangan SDM.

Vice President of Human Resources is responsible to:

1. Plan, control and evaluate HR administration policies including the management of the database of employees, employees regulations, employees administration system, payroll and remuneration, HR information systems, industrial relations and termination of employment activities, insurance of the old age and coordination of the health services assurance of employees.
2. Plan, control and evaluate the human resources development policy including human resource needs, employee recruitment, performance appraisal, employee competence, employee career development, change and organizational development.
3. Integrate and coordinate the entire unit of work under its responsibility.
4. Develop the needs of employees and human resource development costs.



Manager Administrasi SDM mempunyai tugas dan tanggung jawab:	Manager of HR Administration is responsible to:
1. Menyusun, mengelola dan mengevaluasi database pegawai baik data <i>hardcopy</i> dan data yang termuat dalam sistem komputerisasi. 2. Menyusun, mengelola dan mengevaluasi rencana anggaran biaya pegawai. 3. Menyusun, mengelola dan mengevaluasi Sistem Informasi Kepegawaian. 4. Mengadministrasikan pengangkatan, mutasi, promosi, demosi, dan pensiun pegawai. 5. Menyusun dan mengevaluasi Sistem Penggajian dan Remunerasi pegawai, termasuk tagihan kepada pegawai dan luran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 6. Mengelola kebijakan mengenai jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. 7. Melakukan perhitungan PPh pasal 21 terhadap penghasilan pegawai. 8. Melakukan koordinasi dan monitoring pembayaran PPh pasal 21 tersebut dengan unit pajak Perusahaan. 9. Mengkoordinasikan data peserta jaminan pelayanan kesehatan pegawai, 10. Menyusun dan menyampaikan laporan pekerjaan kepada atasan. 11. Mengevaluasi rencana kerja dan laporan pekerjaan bawahan.	1. <i>Compile, manage and evaluate the database of employees both hardcopy data and data contained in the computerized system.</i> 2. <i>Compile, manage and evaluate the employee's cost budget plan.</i> 3. <i>Compile, manage and evaluate the personnel information system.</i> 4. <i>Administer the appointment, mutation, promotion, demotion, and retirement of employees.</i> 5. <i>Develop and evaluate the salary and remuneration system, including bills to employees and the membership of BPJS Employment and BPJS Kesehatan.</i> 6. <i>Manage policies regarding old composition guarantees, health insurance, occupational accident guarantees and death guarantees.</i> 7. <i>Calculate Income Tax article 21 of the employee's earnings.</i> 8. <i>Coordinate and monitoring the payment of article 21 PPh with the Company's tax unit.</i> 9. <i>Coordinate the data of the participants health care assurance</i> 10. <i>Compile and deliver job reports to employers.</i> 11. <i>Evaluate work plans and reports of subordinate work.</i>
Manager Pengembangan Organisasi dan SDM mempunyai tugas dan tanggung jawab:	Manager of Organizational Development and HR is responsible to:
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan kebutuhan Organisasi & SDM. 2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan penilaian kinerja. 3. Menyusun dan melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai. 4. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengembangan karir pegawai. 5. Menyusun dan mengkoordinasikan perubahan Organisasi dan pengembangan Organisasi. 6. Menyusun dan menyampaikan laporan pekerjaan kepada VP SDM. 7. Menyusun kebutuhan biaya pegawai dan biaya pengembangan SDM. 8. Menyusun dan mengkoordinasikan penetapan KPI (Key Performance Indicator) Pegawai. 9. Mengevaluasi rencana kerja dan laporan pekerjaan bawahan.	1. <i>Develop and implement policy requirement of & HR organization.</i> 2. <i>Compile and implement a performance assessment policy.</i> 3. <i>Develop and implement employee competency development.</i> 4. <i>Develop and implement the employee career development policy.</i> 5. <i>Draft and coordinate organizational change and development.</i> 6. <i>Compile and deliver work report to the VP of HR.</i> 7. <i>Develop the needs of employees and human resource development costs.</i> 8. <i>Draft and coordinate the KPI (Key Performance Indicator) for employees.</i> 9. <i>Evaluate work plans and reports of subordinate work.</i>

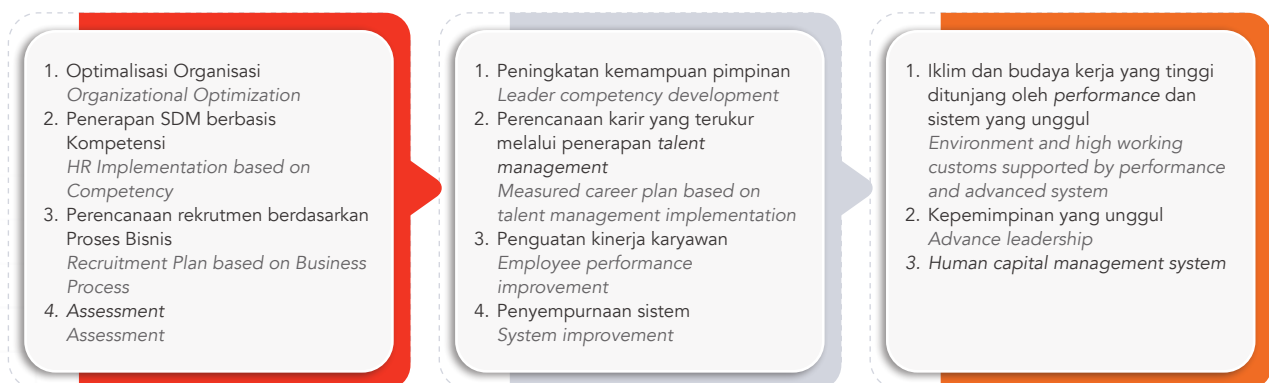
Manager Rekrutmen dan Hubungan Industrial	Manager of Recruitment and Industrial Relations
1. Menyusun, mengelola dan mengevaluasi kebijakan rekrutmen pegawai. 2. Menyusun, mengelola dan mengevaluasi sistem rekrutmen pegawai yang didasarkan pada kebijakan rekrutmen pegawai. 3. Menyusun, mengelola dan mengevaluasi setiap tahapan dalam proses rekrutmen pegawai. 4. Menyusun dan mengelola Peraturan Perusahaan (PP) dan peraturan terkait kepegawaian di lingkungan Perusahaan. 5. Menyusun dan mengelola hubungan industrial baik di internal Perusahaan maupun dalam kaitannya dengan eksternal Perusahaan. 6. Menyusun dan mengelola pengurusan dokumen dan administrasi dengan institusi ketenagakerjaan. 7. Menyusun dan mengelola kebijakan pemutakhiran dan sosialisasi ketentuan ketenagakerjaan dan kepegawaian. 8. Menyusun dan mengelola program sosialisasi kepada pegawai terkait dengan hubungan industrial. 9. Menyusun program mitigasi atas kegiatan terkait hubungan industrial. 10. Menyusun dan menyampaikan laporan pekerjaan kepada atasan. 11. Mengevaluasi rencana kerja dan laporan pekerjaan bawahan. 12. Berkoordinasi dengan Unit Hukum dan Kepatuhan Perusahaan dalam hal terjadi kasus Perselisihan Hubungan Industrial, termasuk pemberian asistensi seluruh data dukung yang dibutuhkan	1. Develop, manage and evaluate employee recruitment policies. 2. Develop, manage and evaluate employee recruitment systems based on employee recruitment policies. 3. File, manage and evaluate each stage in the recruitment process. 4. Compile and manage company regulations (PP) and related personnel regulations in the Company's environment. 5. Develop and manage industrial relations in both the Company's internal and in relation to the Company's external. 6. Organize and manage document and administrative management with employment institutions. 7. Compile and manage update policies and socialization for employment and occupational regulations. 8. Organize and manage socialization programs to employees related to industrial relations. 9. Develop mitigation programs for activities related to industrial relations. 10. Compile and deliver job reports to superiors. 11. Evaluate work plans and reports of subordinate work. 12. Coordinate with the Company's Legal and Compliance Unit in any Industrial Relations Dispute, including the provision of assistance for all required supporting data.
Manager Kesehatan mempunyai tugas dan tanggungjawab:	Manager of Health has the following duties and responsibilities:
1. Merumuskan penjabaran pelaksanaan strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang telah ditetapkan. 2. Menyusun program Anggaran Kesehatan. 3. Mengelola program pelayanan kesehatan meliputi administrasi kepesertaan, dan pelayanan kesehatan kepada pegawai. 4. Mengelola pelayanan kesehatan di PPK Kerjasama/Provider yang sudah ditetapkan sesuai perjanjian kerjasama serta melakukan verifikasi klaim provider dan proses pembayarannya. 5. Mengelola pelayanan restitusi biaya pengobatan dimulai dari pengumpulan berkas permohonan restitusi sampai dilakukan penghitungan/verifikasi dan proses pembayaran. 6. Mengelola proses registrasi dan verifikasi kepesertaan untuk updating database. 7. Mengelola program pemeriksaan kesehatan rekrutmen, pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan awak KA sebelum dinas serta pemeriksaan kesehatan lainnya di lingkungan kerja.	1. Formulate the elaboration of strategies and policies implementation related to predetermined primary tasks and responsibilities. 2. Formulate a Health Budget program. 3. Manage the health service program including membership administration and health services for employees. 4. Manage health services on Cooperation/Provider Agreement as determined by the cooperation agreement and verify provider claims including its process payments. 5. Manage medical expense restitution services from application filing to calculating/verifying and payment processing. 6. Manage the registration process and membership verification for updating database. 7. Manage medical checkup program for recruitment, periodic medical checkup, mandatory medical checkup for train crew, and other medical checkup in working environment.



Manager Kesehatan mempunyai tugas dan tanggungjawab:	Manager of Organizational Development and HR is responsible to:
8. Mengadakan program penyuluhan kesehatan, program pencegahan terhadap kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja dan penanganan korban akibat kecelakaan kerja maupun kecelakaan kereta api lainnya di lingkungan kerja. 9. Mengadakan pembinaan dan evaluasi kinerja SDM di lingkungan unit kesehatan dan fasilitas Pos Kesehatan serta Pos Pemeriksaan Kesehatan Awak KA. 10. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (Quality Improvement) pengelolaan kesehatan dan fasilitas kerja Pos Kesehatan serta Pos Kesehatan Awak KA secara berkelanjutan serta pengelolaan resiko di unitnya. 11. Mengadakan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan mutu pelayanan kesehatan di Pos Kesehatan dan Pos Pemeriksaan Kesehatan Awak KA.	8. Conduct health education programs, work accidents and occupational disease prevention programs, handling work accidents victims, and other accidents in working environment. 9. Conduct counseling and performance evaluation for employees within the health unit and Health Post facilities, as well as Train Crew Health Checkpoints. 10. Implement a sustainable quality improvement process for health management and work facilities for Health Posts and Train Crew Health Posts, including manage the risks within each unit. 11. Monitor, supervise and check the quality of health services at Health Posts and Train Crew Health Checkpoints.

ROADMAP SDM

Roadmap SDM



Selain itu, Perusahaan juga menerapkan *roadmap* sebagai berikut:

- Penyesuaian Struktur Organisasi Perusahaan sesuai dengan perkembangan bisnis dan penugasan kepada Perusahaan.
- Kinerja unit yang dikaitkan sebagai capaian prestasi yang berdampak terhadap *reward*.
- Pengelolaan pegawai kalangan *millennial* untuk menyiapkan motor penggerak bagi kemajuan Perusahaan.

In addition, the Company also implements the following *roadmap*:

- Adjustment of the Company's Organizational Structure in accordance with business developments and assignments to the Company.
- Unit performance which is linked as achievement that has an impact on rewards.
- Employee management among millennials to prepare the driving force for the Company's progress.

PENCAPAIAN ROADMAP SDM DI TAHUN 2020

HR Roadmap Achievement In 2020

Berdasarkan roadmap yang telah disusun, pada tahun 2020 Perusahaan berhasil merealisasikan pencapaian sebagai berikut:

- *New Business Process* yang diharapkan dapat menciptakan organisasi berbasis BPM yang fleksibel, efektif dan efisien;
- *Continuous Organization Structure Review* agar terciptanya budaya kolaboratif;
- Kompetensi yang relevan berdasarkan hasil analisa mendalam pada aplikasi *job management tools*;
- *Talent Mapping* agar terciptanya organisasi yang adaptif, fleksibel, efektif dan efisien.

Based on the roadmap that has been formulated, in 2020 the Company succeeded in realizing the following achievements:

- *New Business Process* which is expected to create a flexible, effective and efficient BPM-based organization;
- *Continuous Organization Structure Review* to create a collaborative culture;
- *Relevant competencies* based on the results of in-depth analysis on *job management tools* applications;
- *Talent Mapping* to create an adaptive, flexible, effective and efficient organization.





REKRUTMEN

Recruitment

A. Dasar Pelaksanaan

- a. Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia No. 009/KCI/DIR-HRD/IV/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Pengadaan Pegawai;
- b. Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia No. 022/KCI/DIR-HRD/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Perubahan dan Tambahan (P dan T) atas Surat Keputusan Direksi No. SK-009/KCI/DIR-HRD/IV/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Pengadaan Pegawai;
- c. Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia No. 023/KCI/DIR-HRD/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Perubahan dan Tambahan (P dan T) atas Surat Keputusan Direksi No. SK-009/KCI/DIR-HRD/IV/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Pengadaan Pegawai;
- d. Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia Nomor: KEP.U/KP.501/I/1/KA-2016 tanggal 28 Januari 2016 Tentang Pengujian dan Pemeriksaan Kesehatan;
- e. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 yang terkait dengan pemenuhan Pegawai.

B. Mekanisme dan Jalur Rekrutmen

Mekanisme rekrutmen dilakukan melalui sistem *e-recruitment* di mana pelamar harus mendaftarkan akun terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran lamaran di <https://recruitment.krl.co.id/>. Jalur rekrutmen di Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud di atas, dibagi menjadi tiga jalur yaitu:

- a. Jalur Reguler;
- b. Jalur Profesional; dan
- c. Jalur khusus yang dibagi menjadi:
 - Rekrutmen yang bersumber dari PKWT Perusahaan;
 - Rekrutmen yang bersumber dari TNI/POLRI; dan
 - Rekrutmen yang bersumber dari ahli waris Pegawai yang wafat dalam Dinas.

C. Pelaksanaan Rekrutmen

Rekrutmen dilaksanakan dengan mempertimbangkan jumlah dan waktu pemenuhan Pegawai sebagaimana yang tertuang dalam RKAP tahun berjalan. Untuk itu *timeline* setiap program dibuat untuk setiap gelombangnya.

A. Basis of Implementation

- a. Decree of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia No. 009/KCI/DIR-HRD/IV/2019 dated April 12, 2019 concerning Employee Procurement;
- b. Decree of the Directors of PT Kereta Commuter Indonesia No. 022/KCI/DIR-HRD/VII/2019 dated July 3, 2019 concerning Amendments and additions (P and T) of the Board of Directors decree No. SK-009/KCI/DIR-HRD/IV/2019 dated April 12, 2019 concerning Employee Procurement;
- c. Decree of the Directors of PT Kereta Commuter Indonesia No. 023/KCI/DIR-HRD/VII/2019 dated July 5, 2019 concerning Amendments and additions (P and T) of the Board of Directors Decree No. SK-009/KCI/DIR-HRD/IV/2019 dated April 12, 2019 concerning Employee Procurement;
- d. Decree of the Board of Directors of PT Kereta Api Indonesia number: KEP. U/KP. 501/I/1/KA-2016 dated January 28, 2016 concerning testing and health screening;
- e. The Company's Budget work plan (RKAP) 2020 related to the fulfillment of the employment quota.

B. Mechanism and Recruitment Bureaucracy

The recruitment mechanism is conducted through *e-recruitment* system where applicants must register an account before registering for application at <https://recruitment.krl.co.id/>. The recruitment bureaucracy in the Company based on Directors Decree as mentioned above, is divided into three lines: Jalur Reguler;

- a. Regular path;
- b. Professional path; and
- c. Special lines are divided into:
 - Recruitment sourced from the Company's PKWT;
 - Recruitment sourced from the TNI/POLRI; and
 - Recruitment from the heirs of officers who died in the Dinas.

C. Recruitment

Recruitment is carried out by considering the number and time of fulfillment of the officer as contained in the RKAP of the year. For that timeline each program is created for Each loop. Job announcement containing information

Pengumuman lowongan yang berisi informasi tentang posisi, syarat umum/khusus, batas penyampaian lamaran melalui *website* resmi dan jadwal pengumuman hasil seleksi ditayangkan minimal 5 hari sebelum batas penyampaian lamaran. Seleksi rekrutmen dilaksanakan secara sistem gugur melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Validasi: pada tahap ini dilakukan validasi data pelamar untuk dipilih sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, kemudian dilakukan *ranking* berdasarkan nilai UN (SMA)/IPK (PT) dan diambil data sejumlah N 7 (kuota formasi dikalikan rasio suksesi rekrutmen tahun sebelumnya).
- b. Tahap Administrasi: pada tahap ini pelamar yang telah terpilih pada tahap validasi dipanggil untuk diperiksa kesesuaian dokumen persyaratan dan pengukuran *body mass index* (BMI).
- c. Pengujian Kesehatan: pada tahap ini dilakukan tes kesehatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam SK terkait milik Induk Perusahaan. Tes dilakukan di laboratorium klinik yang terpilih sebagai rekanan. Hasil tes kesehatan harus sesuai dengan kelas kesehatan untuk masing-masing formasi sebagai berikut:
 - a) Kelas I: Untuk Awak Kereta
 - b) Kelas II: Untuk Pegawai pelaksana pemeliharaan sarana dan prasarana
 - c) Kelas III: Untuk Pegawai administrasi
 - d) Kelas IV: Untuk Tenaga Profesional
 - e) Kelas V: Untuk Tenaga managerial
- d. Psikotest: pada tahap ini psikotest dilakukan oleh lembaga penyedia asesmen yang terpilih berdasarkan hasil pengadaan barang dan atau jasa. Mekanisme tes disesuaikan dengan standar yang berlaku.
- e. Wawancara: merupakan tahapan terakhir yang menentukan kelulusan pelamar. Wawancara dilakukan oleh unit SDM dan Unit Pengguna.

D. Laporan Hasil Rekrutmen

Hasil rekrutmen dilaporkan kepada Direktur utama dan Direktur yang membawahi SDM sekaligus sebagai permohonan dilakukan tandatangan kontrak kerja pegawai (PKWT/PKWTT). Kemudian setelah penandatanganan kontrak, laporan disampaikan juga kepada Direktur SDM KAI untuk rekrut Pegawai Jalur Profesional.

about position, general/special terms, limit of application submission through the official website and schedule of the selection result announcement shown at least 5 days before application submission limit. The selection of recruitment is in the system of fall through the following stages:

- a. *Validation phase: At this stage is the validation of applicants' data to be selected according to the stipulated requirements, then rank based on the value of UN (SMA)/IPK (PT) and data collected in the amount of N 7 (formation quota multiplied by the ratio of the previous year's recruitment succession).*
- b. *Administration stage: At this stage applicants who have been elected at the validation stage are called to be examined by the requirements document and measurement body mass index (BMI).*
- c. *Health testing: At this stage a health test is conducted based on provisions stipulated in the related Decree of the Parent Company. Tests were conducted in a clinical laboratory elected as a partner. Health test results must correspond to the health class for each formation as follows:*
 - a) *Class I: For Train crew*
 - b) *Class II: For implementing personnel maintenance facilities and infrastructure*
 - c) *Class III: For administrative officers*
 - d) *Class IV: For professional personnel*
 - e) *Class V: For managerial personnel*
- d. *Psychotest: At this stage the psychotest is conducted by the provider of selected assessment providers based on the results of the procurement of goods and or services. The test mechanisms are adjusted to the prevailing standards.*
- e. *Interview: Is the last stage determining applicant's graduation. The interview is conducted by HR unit and User Unit.*

D. Recruitment Report

The recruitment results are reported to the President Director and Director who overtakes the HR as well as the application for the signature of employee contract (PKWT/PKWTT). After the signing of the contract, the report will be submitted to the HR director of KAI to recruit professional track officers.



Total Rekrutmen Pegawai Organik 2020
Permanent Staff Recruitment in 2020

Jenis Kelamin Gender	2020	2019
Pria Male	10	224
Wanita Female	5	42
Jumlah Total	15	266

Jalur Rekrutmen
Recruitment Method

Jenis Kelamin Gender	2020			2019		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Jalur Reguler Regular	10	5	15	223	42	265
Jalur Khusus Private	-	-	-	-	-	-
Jalur Profesional Professional	-	-	-	1	-	1
Jumlah Total	-	-	15	-	-	266

Rekrutmen Berdasarkan Jenjang Jabatan Recruitment Based on Position Level

Jenis Kelamin Gender	2020			2019		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Direktorat Utama Main Directorate	-	1	1	15	14	29
Direktorat Keuangan dan Administrasi Financial and Administration Directorate	-	1	1	6	2	8
Direktorat Teknik Technic Directorate	2	-	2	67	1	68
Direktorat Operasi dan Pemasaran Operational and Marketing Directorate	8	3	11	136	25	161
Jumlah Total	10	5	15	224	42	266

Rekrutmen Berdasarkan Tingkat Pendidikan Recruitment Based on Educational Level

Tingkat Pendidikan Educational Level	2020			2019		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
SD Elementary	1	-	1	-	-	-
SLTP Junior High School	-	-	-	-	-	-
SLTA Senior High School	6	4	10	158	25	183
D3 Diploma	-	-	-	34	7	41
S1 Bachelor	3	1	4	32	10	42
S2 Postgraduate	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	10	5	15	224	42	266



KOMPOSISI PEGAWAI

Employee Composition

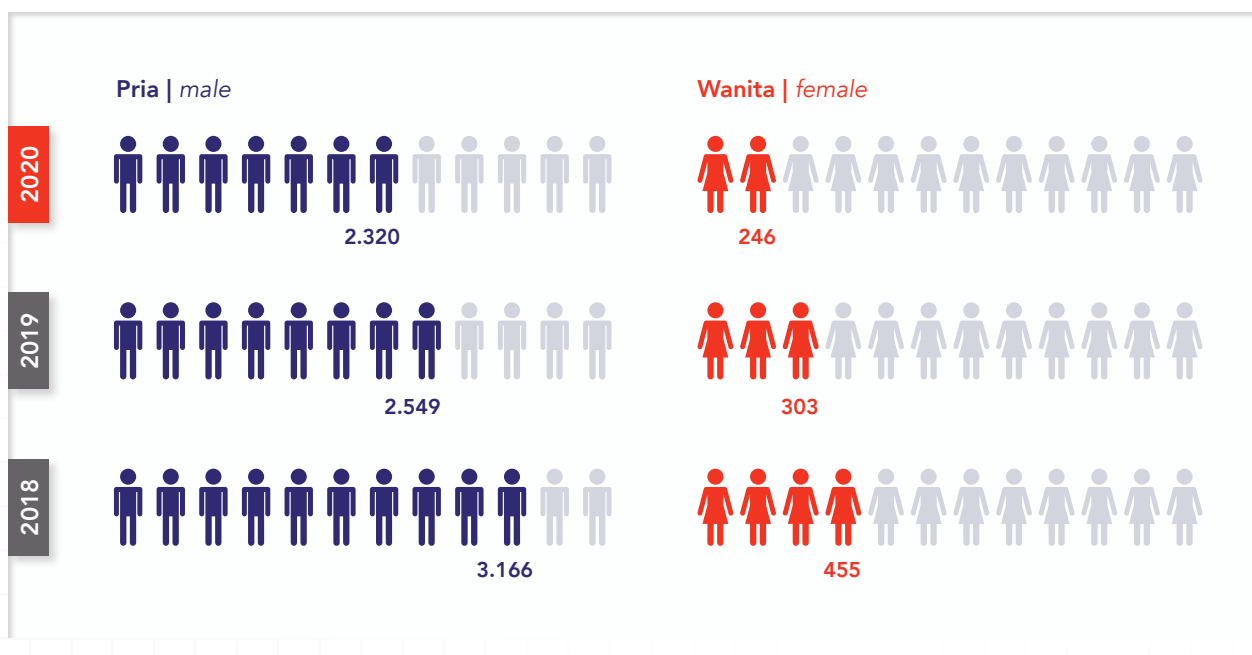
Per 31 Desember 2020, jumlah pegawai Perusahaan tercatat sebanyak 2.566 orang atau menurun sebanyak 286 orang atau -10,03%. Adapun pembagian komposisi pegawai berdasarkan golongan, pendidikan, fungsi, usia, jabatan, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut.

As of December 31, 2020, the Company's total employees was recorded as many as 2,566 employee or decreased by 286 or -10.03%. The description of employee composition by group, education, function, age, position, and gender are as follows.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Composition of Employee Based on Gender

	2020	2019	2018
Pria Male	2.320	2.549	3.166
Wanita Female	246	303	455
Jumlah Total	2.566	2.852	3.621



Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Employees Composition Based on Job Grade

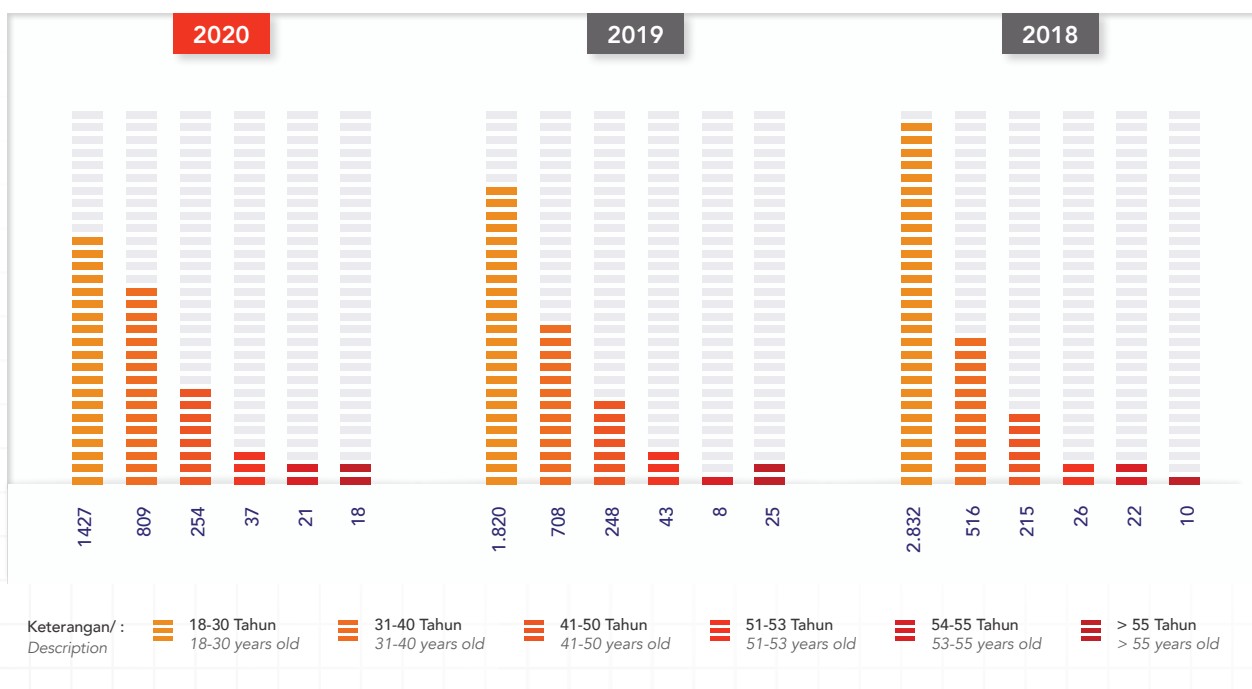
	2020			2019			2018		
	Kebutuhan Demand	Realisasi Realization	Persentase Percentage	Kebutuhan Demand	Realisasi Realization	Persentase Percentage	Kebutuhan Demand	Realisasi Realization	Persentase Percentage
Golongan I Grade I	4	5	125%	4	4	100%	4	4	100%
Golongan II Grade II	2.091	2.077	99%	2.235	2.068	93%	1.811	1.784	99%
Golongan III Grade III	415	412	99%	549	409	74%	450	369	82%
Golongan IV Grade IV	18	19	105%	8	21	263%	10	16	160%
Non-Golongan Non-Grade	45	53	118%	159	350	220%	1.490	1.448	97%
Jumlah Total	2.573	2.566	99,7%	2.955	2.852	97%	3.765	3.621	96%





Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur Employees Composition Based on Age

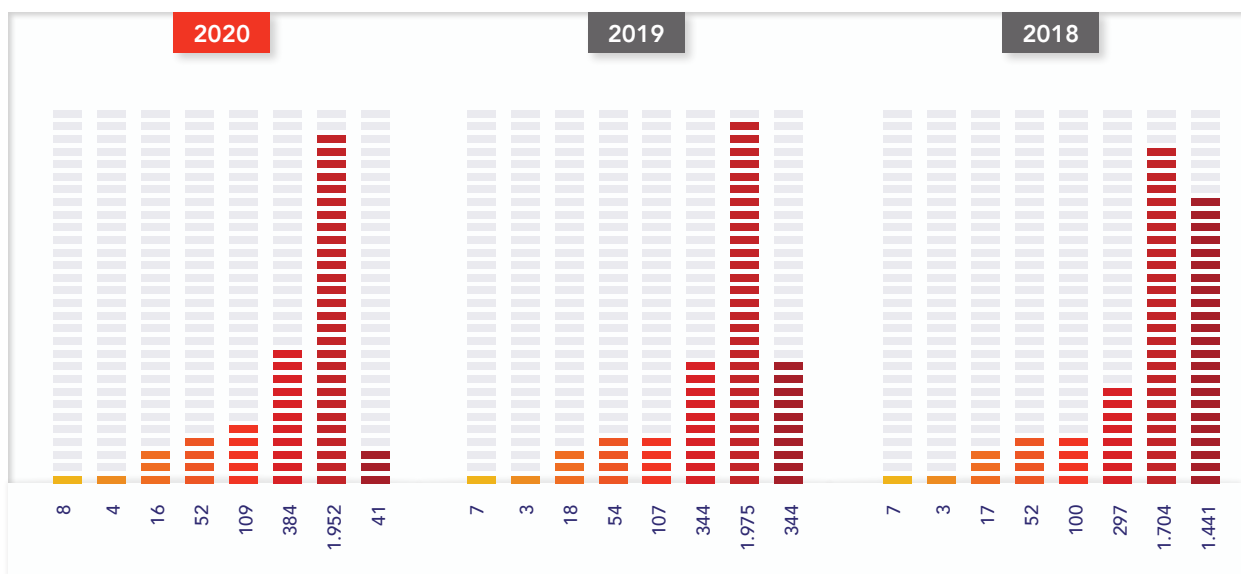
	2020			2019			2018		
	Kebutuhan Demand	Realisasi Realization	Persentase Percentage	Kebutuhan Demand	Realisasi Realization	Persentase Percentage	Kebutuhan Demand	Realisasi Realization	Persentase Percentage
18-30 tahun 18-30 years old	1.427	1.427	100%	2.032	1.820	90%	3.065	2.832	92%
31-40 tahun 31-40 years old	812	809	99,6%	633	708	112%	468	516	110%
41-50 tahun 41-50 years old	257	254	99%	230	248	108%	191	215	113%
51-53 tahun 51-53 years old	35	37	106%	27	43	159%	20	26	130%
54-55 tahun 53-55 years old	22	21	95%	16	8	50%	13	22	169%
>55 tahun > 55 years old	20	18	90%	17	25	147%	8	10	125%
Jumlah Total	2.573	2566	99,7%	2.955	2.852	97%	3.765	3.621	96%



Komposisi Berdasarkan Jenjang Jabatan

Composition Based on Organizational Level

	2020	2019	2018
Direksi & Komisaris <i>Directors & Commissioners</i>	8	7	7
Perangkat Komisaris <i>Commissioners Committee</i>	4	3	3
Vice President	16	18	17
Manager	52	54	52
Junior Manager-Assistant Manager	109	107	100
Senior Supervisor-Junior Supervisor	384	344	297
Junior Staf-Staf, MPP, Probation	1.952	1.975	1.704
PKWT Contract	41	344	1.441
Jumlah <i>Total</i>	2.566	2.852	3.621



Keterangan :
Description

■ Direksi & Komisaris
Directors & Commissioners

■ Perangkat Komisaris
Commissioners Committee

■ Vice President

■ Manager

■ Junior Manager
Assistant Manager

■ Senior Supervisor
Junior Supervisor

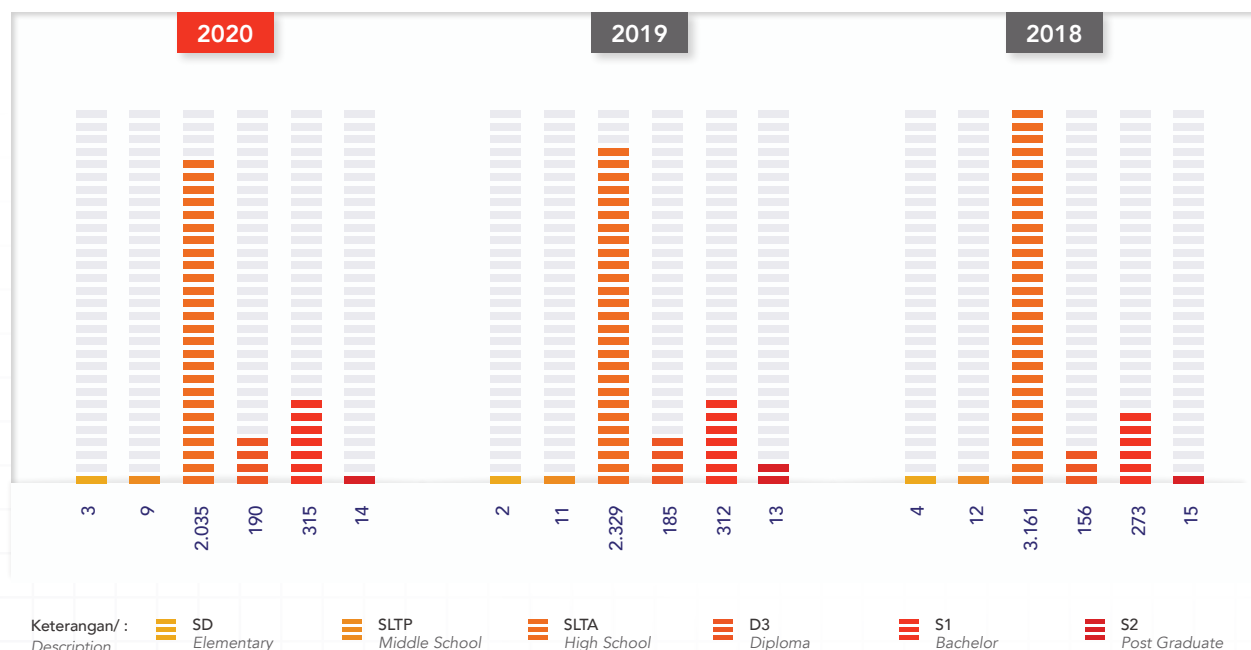
■ Junior Staf-Staf,
MPP, Probation

■ PKWT
Contract



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Employees Composition Based on Educational Level

	2020			2019			2018		
	Kebutuhan Demand	Realisasi Realization	Persentase Percentage	Kebutuhan Demand	Realisasi Realization	Persentase Percentage	Kebutuhan Demand	Realisasi Realization	Persentase Percentage
SD Elementary	2	3	150%	2	2	100%	4	4	100%
SLTP Middle School	9	9	100%	15	11	73%	16	12	75%
SLTA High School	2.045	2.035	99%	2.225	2.329	105%	3.223	3.161	98%
D3 Diploma	188	190	101%	255	185	73%	166	156	94%
S1 Bachelor	317	315	99%	441	312	71%	347	273	79%
S2 Post Graduate	12	14	117%	17	13	76%	9	15	167%
Jumlah Total	2.573	2.566	99,7%	2.955	2.852	97%	3.765	3.621	96%



Komposisi Pegawai Berdasarkan Fungsi

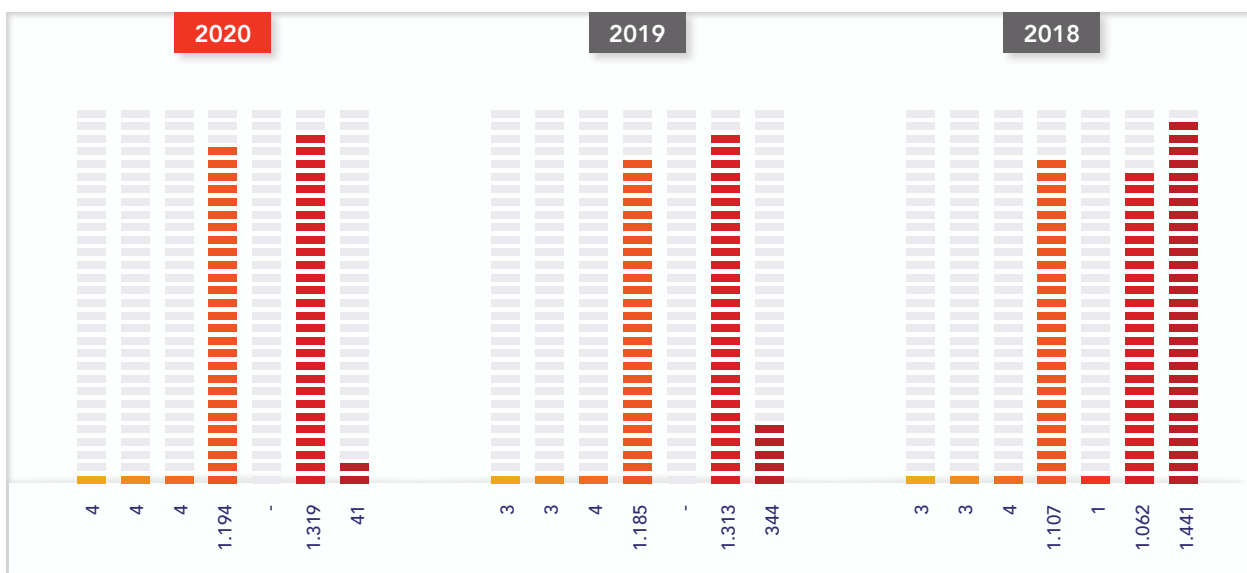
Employees Composition Based on Function

	2020			2019			2018		
	Kebutuhan Demand	Realisasi Realization	Persentase Percentage	Kebutuhan Demand	Realisasi Realization	Persentase Percentage	Kebutuhan Demand	Realisasi Realization	Persentase Percentage
Pegawai Perawatan Sarana Rolling Stock Maintenance Officer	563	562	99,8%	624	557	89%	555	529	95%
Pegawai Kantor Perawatan Sarana (BY & Dipo) Rolling Stock Maintenance Officer (BY & Dipo)	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%
Pegawai Kantor Unit Sarana Rolling Stock Unit Officer	25	25	100%	20	24	120%	17	22	129%
Pegawai Operasi Sarana Rolling Stock Operational Officer	533	542	102%	471	535	114%	471	459	97%
Pegawai Prasarana Infrastructure Officer	42	40	95%	42	37	88%	36	37	103%
Pegawai Komersialisasi – Optimalisasi Commercial and Optimization Officer	886	828	93%	1.230	1.163	95%	2.189	2.059	94%
Pegawai Umum, Administrasi & Direksi General Affair, Administration & Directors	524	569	108%	568	536	94%	497	515	104%
Jumlah Total	2.573	2.566	99,7%	2.955	2.852	97%	3.765	3.621	96%



Komposisi Berdasarkan Status Kepegawaian Composition Based on Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2020	2019	2018
Komisaris Board of Commissioners	4	3	3
Perangkat Komisaris Commissioners Committee	4	3	3
Direksi Board of Directors	4	4	4
Perbantuan KAI KAI Assistance	1.194	1.185	1.107
Perbantuan TNI/POLRI TNI/POLRI Assistance	-	-	1
Mandiri KCI KCI Internal	1.319	1.313	1.062
PKWT Contract	41	344	1.441
Jumlah Total	2.566	2.852	3.621



Keterangan / :
Description

- Komisaris
Board of Commissioners
- Perangkat Komisaris
Commissioners Committee
- Direksi
Board of Directors
- Perbantuan KAI
KAI Assistance

- Perbantuan TNI/POLRI
TNI/POLRI Assistance
- Mandiri KCI
KCI Internal
- PKWT
Contract



TINGKAT PERPUTARAN PEGAWAI

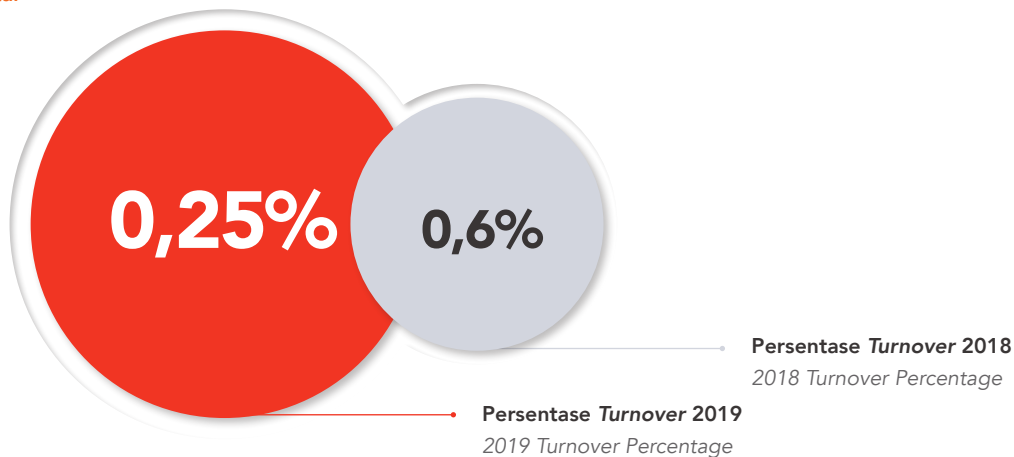
Employee's Turnover Level

Selama tahun 2020, tingkat perputaran pegawai Perseroan adalah 11,77% terdiri dari 323 orang mengundurkan diri, habis kontrak, diberhentikan hormat & tidak hormat. Secara umum, tingkat perputaran pegawai tertinggi masih didominasi oleh pegawai yang selesai kontrak. Pergerakan angka perputaran pegawai yang tidak signifikan di tahun 2020 menunjukkan bahwa Perusahaan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pegawai.

During 2020, the turnover rate of the Company's employees was 11.7% consisting of 323 people resigned, end of contract, as well as respectfully and disrespectfully terminated. In general, the highest level of employee turnover is still dominated by employees who finished contracts. The movement of insignificant personnel turnover in 2020 shows that the Company creates a conducive environment for employees.

Total Turnover

Turnover Total



Alasan Turnover

Turnover Reasons

Alasan Berhenti Resignation Reason	2020	2019
Atas Permintaan Sendiri (APS) Self Request	1	8
Berhenti dengan Hormat APS Honorable Resignation	6	6
Berhenti Tidak dengan Hormat Dishonored Resignation	2	13
Selesai Kontrak End of Contract	313	721
Pemutusan Hubungan Kerja Termination	1	1
Jumlah Total	323	749

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Competency Development

Total Pelatihan selama 2020 sebanyak 51 kegiatan dengan program RKAP sebanyak 89 kegiatan, sehingga tercapai sebesar 59%. Hal ini dikarenakan penyesuaian pelaksanaan pelatihan terhadap kegiatan operasional dan prioritas program Perseroan. Jumlah peserta pelatihan tahun 2020 sebanyak 944 orang dengan target RKAP sebesar 957 pegawai sehingga tercapai sebesar 99%, hal ini dikarenakan penyesuaian dengan rencana kegiatan/operasional Perusahaan.

Total Training in 2020 were 51 activities with the RKAP program as many as 89 activities or reached 59%. This was due to adjustment of training on the Company's operational activities and program. Total trainees in 2020 were 944 employees with the RKAP target of 957 employees or reached 99%, this was due to the adjustments with the Company's activities/operational plan.

No.	Nama Pelatihan Training Title	Jumlah Peserta Total Participants	Tanggal Pelatihan Training Date
Triwulan 1 Quarter 1			
1	Kursus Bahasa Indonesia TKA Indonesian Language Course TKA	1	11 Februari-12 Maret 2020 February 11-March 12, 2020
2	Human Resources Management Human Resources Management	3	27-31 Januari 2020 January 27-31, 2020
3	Sertifikasi Tenaga Pemeriksaan dan Perawatan Sarana Perkeretaapian Certification for Train Facilities Control and Maintenance Officers	121	21-24 Januari 2020 January 21-24, 2020
4	Induction Program Induction Program	13	03-07 Februari 2020 February 03-07, 2020
5	Designing Training Program Designing Training Program	1	11-13 Februari 2020 February 11-13, 2020
6	Training Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker RI Training for General HSE Expert	3	10-22 Februari 2020 February 10-22, 2020
7	Training Legislative Drafting Basic Level Training Legislative Drafting Basic Level	1	05-07 Februari 2020 February 05-07, 2020
8	Training PPMSDM Berbasis SKKNI untuk Manajer Training for SKKNI-based PPMSDM for Managers	1	24-27 Februari 2020 February 24-27, 2020



No.	Nama Pelatihan Training Title	Jumlah Peserta Total Participants	Tanggal Pelatihan Training Date
9	Training Teknisi K3 Listrik <i>Training for Electricity SHE Technician</i>	2	17-22 Februari 2020 <i>February 17-22, 2020</i>
10	Workshop Certified Business Process Management (Phase II) <i>Workshop Certified Business Process Management (Phase II)</i>	1	28-29 Februari 2020 <i>February 28-29, 2020</i>
11	Rolling Stock Maintenance Management Training <i>Rolling Stock Maintenance Management Training</i>	20	17-20 Februari 2020 <i>February 17-20, 2020</i>
12	Pelatihan Penulisan Makalah Quality Excellent Activity (QEA) <i>Training for Quality Excellent Activity (QEA) Writings</i>	4	12-13 Februari 2020 <i>February 12-13, 2020</i>
13	Workshop Proses Bisnis Perusahaan <i>Workshop for Company Business Process</i>	65	3 Maret 2020 <i>March 3, 2020</i>
14	Workshop Supply Chain Risk Management <i>Workshop Supply Chain Risk Management</i>	4	13 Maret 2020 <i>March 13, 2020</i>
15	Workshop Proses Bisnis Perusahaan <i>Workshop Corporate Business Process</i>	65	18-19 Maret 2020 <i>March 18-19, 2020</i>
Triwulan 2 Quarter 2			
16	Workshop Penyusunan Job Profile <i>Workshop Job Profile Formulation</i>	30	1-2, 8-9 & 15-16 April 2020 <i>April 1-2, 8-9 & 15-16, 2020</i>
17	Webinar Live Motivation <i>Webinar Live Motivation</i>	144	20 Mei 2020 <i>May 20, 2020</i>
18	Pelatihan Executive Management Program <i>Executive Management Program Training</i>	1	22 Juni 2020 <i>June 22, 2020</i>
19	Workshop Penyusunan Job Profile <i>Workshop Job Profile Formulation</i>	30	11, 18, 25 Juni 2020 <i>June 11, 18, 25, 2020</i>
Triwulan 3 Quarter 3			
20	Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik Tingkat Pelaksana Angkatan I Tahun 2020 <i>Maintenance Officers for Electric Train Facilities, Staff Level, First Batch 2020</i>	20	21-29 Juli 2020 <i>July 21-29, 2020</i>
21	Risk Based Budgeting <i>Risk Based Budgeting</i>	1	27-29 Juli 2020 <i>July 27-29, 2020</i>

No.	Nama Pelatihan Training Title	Jumlah Peserta Total Participants	Tanggal Pelatihan Training Date
22	Workshop Job Profile <i>Job Profile Workshop</i>	10	15 Juli 2020 <i>July 15, 2020</i>
23	Workshop Penyusunan Kompetensi & Pelatihan Pegawai <i>Employee Competence & Training Formulation Workshop</i>	10	30 Juli 2020 <i>July 30, 2020</i>
24	Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik Tingkat Pelaksana Angkatan II Tahun 2020 <i>Maintenance Officers for Electric Train Facilities, Staff Level, Second Batch 2020</i>	30	5-13 Agustus 2020 <i>August 5-13, 2020</i>
25	Workshop Penyusunan Proses Bisnis <i>Business Process Formulation Workshps</i>	30	31 Agustus, 1 & 3 September <i>August 31-September 1 & 3, 2020</i>
26	Pelatihan Online Class Marketing Intermediate <i>Online Class Marketing Intermediate Training</i>	1	7-9 September 2020 <i>September 7-9, 2020</i>
27	Training Ahli K3 Muda Sertifikasi BNSP <i>Beginner HSE Expert Training, BNSP Certification</i>	2	21-24 September 2020 <i>September 21-24, 2020</i>
28	Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik Tingkat Pelaksana Angkatan I Tahun 2020 <i>Maintenance Officers for Electric Train Facilities, Staff Level, First Batch 2020</i>	65	21-29 Juli 2020, 5-13 Agustus 2020 & 1 September-2 Oktober 2020 <i>21-29 Juli 2020, 5-13 Agustus 2020 & 1 September-2 Oktober 2020</i>
Triwulan 4 Quarter 4			
29	Tenaga Perawatan dan Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik Tingkat Pelaksana Angkatan I Tahun 2020 <i>Maintenance and Control Officers for Electric Train Facilities, Staff Level, First Batch 2020</i>	20	1 September-2 Oktober 2020 <i>September 2-October 2, 2020</i>
30	Tenaga Perawatan Dan Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik Tingkat Pelaksana Angkatan II Tahun 2020 <i>Maintenance and Control Officers for Electric Train Facilities, Staff Level, Second Batch 2020</i>	25	6 Oktober-10 November 2020 <i>October 6- November 10, 2020</i>
31	Pelatihan Pengetahuan Teknik Sarana KRL untuk Masinis <i>KRL Facilities Technical Knowledge Training for Machinist</i>	28	21 Oktober-6 November 2020 <i>October 21-November 6, 2020</i>
32	Pelatihan Ahli K3 Umum <i>General HSE Expert Training</i>	3	19-24 Oktober & 2-7 November 2020 <i>October 19-24-November 2-7, 2020</i>



No.	Nama Pelatihan Training Title	Jumlah Peserta Total Participants	Tanggal Pelatihan Training Date
33	Diklat Awak Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik Muda Angkatan I Tahun 2020 <i>Electric Train Facilities Officers, Beginner Level, First Batch 2020</i>	20	16 November-15 Desember 2020 <i>November 16-December 15, 2020</i>
34	Pelatihan Operator K3 Forklift sertifikasi Kemnaker RI Batch I <i>Safety Training for Forklift Operator, Ministry of Manpower Certification, Batch I</i>	10	16-18 November 2020 <i>November 16-18, 2020</i>
35	Pelatihan Operator K3 Forklift sertifikasi Kemnaker RI Batch II <i>Safety Training for Forklift Operator, Ministry of Manpower Certification, Batch II</i>	10	19-21 November 2020 <i>November 19-21, 2020</i>
36	Training Operator Crane KLS III Sertifikasi Kemnaker RI Batch I <i>Operator Crane KLS III Training, Ministry of Manpower Certification, Batch I</i>	10	25-27 November 2020 <i>November 25-27, 2020</i>
37	Training ERM Fundamentals Based on ISO 31000:2018 <i>ERM Fundamentals Based on ISO 31000:2018 Training</i>	18	30 November-2 Desember 2020 <i>November 30-December 2, 2020</i>
38	Pelatihan Operator K3 Forklift sertifikasi Kemnaker RI Batch I <i>Safety Training for Forklift Operator, Ministry of Manpower Certification, Batch I</i>	20	16-18 & 19-21 November 2020 <i>November 16-18 & 19-21, 2020</i>
39	Pelatihan Hiperkes Bagi Paramedis <i>Hiperkes training for Paramedic</i>	10	23-27 November 2020 <i>November 23-27, 2020</i>
40	Pelatihan Neuro Linguistic Programming (NLP) Advance <i>Neuro Linguistic Programming (NLP) Advance Training</i>	1	09-10 November 2020 <i>November 09-10, 2020</i>
41	Workshop Penyusunan Proses Bisnis <i>Business Process Formulation Workshop</i>	16	11, 25 November 2020 <i>November 11, 25, 2020</i>
42	Kursus Bahasa Indonesia TKA <i>Indonesian Language Course for Foreign Eepatriate</i>	1	Desember 2020-Februari 2021 <i>December-February 2020</i>
43	Diklat Petugas Langsir dan Wesel Untuk Pegawai Depo dan Overhaul <i>Shunting and Wesel Training for Train Depot and Overhaul Officers</i>	91	7-15 Desember 2020 <i>December 7-15,2020</i>
44	Training Operator Crane KLS III Sertifikasi Kemnaker RI Batch I <i>Operator Crane KLS III Training, Ministry of Manpower Certification, Batch I</i>	10	1-4 Desember 2020 <i>December 1-4,2020</i>
45	Pelatihan Pelayanan di Atas Kereta Untuk Masinis dan Masinis Pertama <i>On Train Service Training for Machinist and Primary Machinist</i>	21	14-15 Desember 2020 <i>December 14-15,2020</i>

Detail Peserta Pelatihan

Detail of Training Participants

Jabatan Position Level	Jumlah Peserta Tahun 2020 2020 Total Trainee	Jumlah Realisasi Pelatihan Training Realization	% Pelatihan % Training
Direksi & Komisaris Directors & Commissioners	7	8	114%
Perangkat Komisaris Commissioners Committee	4	4	100%
Vice President	17	16	94%
Manager	54	52	96%
Junior Manager-Assistant Manager	112	109	97%
Senior Supervisor-Junior Supervisor	358	384	107%
Junior Staf-Staf, MPP, Probation	1.987	1.952	98%
PKWT Contract	34	41	121%
Jumlah Total	2.573	2.566	100%

Detail Rincian Pelatihan

Detail of Training

Kategori Category	Uraian Description	Total 2019 Total 2019	Total 2020				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah Total
Peserta Participants	Peserta Participants	2.460	305	205	160	274	944
Pelatihan Training	Pelatihan Training	170	15	8	12	16	51
Klasifikasi Classification	Hard Skill	122	12	7	12	14	45
	Soft Skill	48	3	1	-	2	6
Jenis Pelatihan Training Type	Kursus Course	4	1	-	-	1	2
	Seminar	1	-	-	-	-	-
	Sertifikasi Certification	38	4	-	1	5	10
	Training	104	6	1	6	8	21
	Workshop	22	4	6	5	2	17
	Webinar		-	1	-	-	1



Kategori Category	Uraian Description	Total 2019 Total 2019	Total 2020				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah Total
Direktorat Directorate	Dewan Komisaris Board of Commissioners	10	2	-	-	-	2
	Direktorat Utama Main Directorate	220	35	34	1	16	86
	Direktorat Keuangan & Administrasi Directorate of Finance and Administration	109	51	84	51	20	206
	Direktorat Teknik Directorate of Technic	807	173	27	65	161	426
	Direktorat Operasi & Pemasaran Directorate of Operation and Marketing	1.274	44	60	43	77	224
Jabatan Position	Dewan Komsiaris Board of Commissioners	10	2	-	-	-	2
	Direksi Board of Directors	28	-	1	-	1	2
	VP	27	3	6	5	2	16
	Manager	78	38	12	6	20	76
	Junior Manager	25	16	9	-	-	25
	Assistant Manager	54	34	31	12	4	81
	Senior Supervisor	2	-	-	-	-	-
	Supervisor	89	24	29	-	1	54
	Junior Supervisor	290	39	29	7	-	75
	Staf Staff	1.314	135	86	129	245	595
	Probation	516	13	-	1	-	14
	PKWT Contract	7	1	2	-	1	4
Kategori Category	Dasar	18	2	1	0	1	4
	Khusus		9	7	7	13	36
	Mandatory		4	0	5	2	11

Kategori Category	Uraian Description	Total 2019 Total 2019	Total 2020				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Jumlah Total
Lokasi Location	Bandung	18	1	-	-	-	1
	Bekasi	15	-	-	3	2	5
	Bogor	1	-	-	-	-	-
	Depok	9	1	-	1	2	4
	Jakarta	117	12	8	8	11	39
	Solo	1	-	-	-	1	1
	Surabaya	170	1	-	-	-	1

Program Sertifikasi Pegawai Mandatori

Mandatory Certification Program

Deskripsi Description	TW I	TW II	TW III	TW IV
Tersertifikasi & Mandatori Certified and Mandatory	121 (1 program)	-	41 (1 program)	-

Program Sertifikasi Pegawai Non Mandatori

Non-Mandatory Certification Program

Deskripsi Description	TW I	TW II	TW III	TW IV
Non Mandatori Non Mandatory	6 (3 program)	-	67 (4 program)	88 (7 program)



REALISASI BIAYA PENGEMBANGAN PEGAWAI 2020

Realization of Employee Development in 2020

Perseroan telah merealisasikan biaya pengembangan pegawai sebesar Rp2.390.581.413 dari target RKAP sebesar Rp3.868.126.662 sehingga tercapai sebesar 62% untuk keseluruhan program pelatihan selama tahun 2020.

The Company has realized the employee development cost of Rp2,390,581,413 from RKAP target of Rp3,868,126,662 or reached 62% for the entire training program during 2020.

PRODUKTIVITAS PEGAWAI

Employee Productivity

Realisasi produktivitas pegawai pada tahun 2020 tercapai sebesar Rp759.079.615 atau sebesar 85% dari program. Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, maka produktivitas pegawai pada tahun 2020 tercatat mengalami penurunan sebesar 13%.

Realization of employee productivity in 2020 reached Rp759,079,615 or 85% of the program. If compared with the achievements of the previous year, employee productivity in 2020 was recorded to have decreased by 13%.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Industrial Relation

PT Kereta Commuter Indonesia senantiasa membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara Perseroan dengan Pegawai sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. PT Kereta Commuter Indonesia telah melakukan penyelesaian pembaharuan Peraturan Perusahaan Tahun 2019-2021 yang disahkan dengan Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: TAR. 436/PHIJSK-PK/PP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 untuk terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dengan Pegawai yang bertujuan menjadi pegangan bagi Perusahaan maupun Pegawai untuk menjamin hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kelangsungan usaha Perseroan. Setiap 2 (dua) tahun sekali dilaksanakan pembahasan dan pembaharuan Peraturan Perusahaan.

PT Kereta Commuter Indonesia continues to build a harmonious, dynamic, and equitable industrial relationship between the company and its Employees in accordance with the Employment Regulations and the prevailing Laws and Regulations. PT kereta commuter indonesia has completed the renewal of Company Regulation Year 2019-2021 which was ratified with Decree of Ministry of Manpower Republic of Indonesia number: TAR. 436/PHIJSK-PK/PP/III/2019 dated March 29, 2019 for harmonious, dynamic, and fair industrial relations with employees, to be the grip for the Company and Employees. It is to ensure the fulfillment of rights and obligations of each party to improve employees' welfare and business continuity. The Company carries out discussion and renewal of the Company Policy every 2 (two) years.

Hal yang menjadi fokus kegiatan di Hubungan Industrial adalah:

- Melaksanakan tata kelola hubungan industrial baik di internal Perseroan maupun dalam kaitannya dengan eksternal Perseroan.
- Melaksanakan pengurusan dokumen dan administrasi dalam kaitannya dengan hubungan Perseroan dan institusi ketenagakerjaan.
- Melaksanakan pemutakhiran kebijakan dan sosialisasi terkait implementasi ketenagakerjaan.
- Memberikan asistensi dalam pelaksanaan pembinaan kepada Pegawai terkait dengan hubungan industrial.
- Mempersiapkan dokumen administrasi kepegawaian serta berkoordinasi dengan unit Hukum Perusahaan dalam hal terjadi perkara perdata hubungan industrial yang melibatkan Perusahaan.
- Melaksanakan administrasi pada unit hubungan industrial Perseroan.

Penyusunan Kebijakan

Hubungan Industrial PT Kereta Commuter Indonesia telah menyusun Draft Surat Keputusan dan Instruksi Direksi berjumlah 88 kebijakan, yang terdiri dari:

The focus of Industrial Relations activities are:

- Conduct industrial relations governance either in the company's internal and in relation to the Company's external.
- Perform document management and administration in relation to the Company's relations and employment institutions.
- Implement policy updates and socialization regarding employment implementation.
- Provide assistance in the implementation of coaching to employees related to industrial relations.
- Prepare personnel administration documents and coordinate with the Company's legal unit in case of civil relations of Industrial affairs involving the Company.
- Administrate the Company's industrial relations unit.

Policy Formulation

Industrial Relations of PT Kereta Commuter Indonesia has compiled a Draft of Decree and Directors Instruction totaling 88 policies, which consist of:

Deskripsi Description	Kebijakan Tahun 2020 Policies in 2020	Kebijakan Tahun 2019 Policies in 2019
Surat Keputusan Direksi Baru New Board of Directors Decree	35	25
Surat Keputusan Direksi Perubahan dan Tambahan (P dan T) Deed of Board of Directors related to Amendment and Additional (P&T)	5	5
Instruksi Direksi Board of Directors' Instruction	12	8



PENYELESAIAN KASUS PEGAWAI

Settlement of Employee Cases

Hubungan Industrial PT Kereta Commuter Indonesia telah melakukan penyelesaian kasus pegawai sebanyak 20 kasus yang terdiri dari:

- a. Mangkir
- b. Indisipliner
- c. Penggunaan Uang Pendapatan

The Industrial relation of PT Kereta Commuter Indonesia has settled 20 employee cases which consists of:

- a. Absent
- b. Discipline
- c. Assets Malfunction

Jenis Sanksi <i>Sanction Type</i>	Jumlah <i>Total</i>
Surat Peringatan 1 <i>Warning Letter 1</i>	10
Surat Peringatan 2 <i>Warning Letter 2</i>	4
Surat Peringatan 3 <i>Warning Letter 3</i>	2
PHK, Resign, dianggap mengundurkan diri, dll <i>Termination, Resign, Backing, etc</i>	3
Surat Pernyataan/Pembinaan Unit <i>Statement Letter/Unit Coaching</i>	1



PELAPORAN KETENAGAKERJAAN

Employment Report

Hubungan Industrial PT Kereta Commuter Indonesia telah melakukan pelaporan Pegawai yang keluar dari Perusahaan ke Suku Dinas Ketenagakerjaan sejumlah 2 pegawai.

The Industrial relation of PT Kereta Commuter Indonesia has been reporting resigned employees to the Employment Department totaling 2 employees.

TINGKAT KEPUASAN PEGAWAI

Employee Satisfaction Level

KCI menjalankan survei kepuasan pegawai tidak hanya untuk mengukur seberapa bahagia pegawai namun juga mengukur seberapa berdedikasi mereka terhadap visi dan misi Perseroan. Mengukur kepuasan pegawai dibutuhkan karena merupakan indikator penting dari kesehatan Perseroan dan cara yang baik untuk menemukan area peningkatan. KCI percaya bahwa ketika pegawai puas dengan lingkungan kerja dan pekerjaan mereka, mereka lebih berhasrat dan lebih termotivasi, yang pada akhirnya mengarah pada produktivitas yang lebih tinggi dan pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu, kepuasan pegawai dinilai penting bagi keberhasilan Perseroan.

KCI implemented employee satisfaction surveys not only to measure how satisfy employees are but also to measure how dedicated they are to the Company's vision and mission. Measuring employee satisfaction is necessary because it is an important indicator of the Company's health and a good way to find areas of improvement. KCI believes that when employees are satisfied with their work environment and work, they are more passionate and more motivated, which ultimately leads to higher productivity and better services. Therefore, employee satisfaction is important for the Company's success.

Di tahun 2020, KCI menjalankan survei kepuasan pegawai dengan skor sebesar 4,16 dari Skala 5 (Puas). Angka kepuasan ini meningkat dibanding tahun 2019 yang mencatat hasil 4,01. Berikut adalah aspek yang mendapat nilai kepuasan tertinggi dari pegawai dalam survei tersebut:

In 2020, KCI conducted an employee satisfaction survey with a score of 4.16 out of 5 (Satisfied). This score increased from 4.01 in 2019. The following are the aspects with the highest satisfaction scores from employees in the survey:



Aspek Kepuasan Satisfaction Aspect	Skor Score	Rekomendasi Recommendation
Reputation	4,57	Sebagai salah satu pilihan utama moda transportasi darat untuk masyarakat Jabodetabek, PT KCI dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas pelayanannya setiap tahun. Ditambah dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Perseroan, para pegawai pun merasa bangga menjadi bagian dari PT KCI dan merasa puas dengan perusahaan tempat mereka bekerja. <i>As one of the most favorite land transportation modes for Jabodetabek citizens, PT KCI managed to maintain and further improve its service quality every year. Along with the Company's innovations, the employees feel proud to be part of PT KCI and are satisfied to work within the company.</i>
Job Security	4,29	PT KCI dinilai dapat memberikan kepastian kepada para pegawai untuk bertahan di Perseroan. Tidak ada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Perseroan, terutama pada masa pandemi ini. Hal tersebut dapat meningkatkan keinginan pekerja untuk terus berkontribusi tanpa mengkhawatirkan keberlangsungan statusnya sebagai pegawai. <i>PT KCI is considered to be able to provide assurance and retain the employees. The Company has not layoff any employee, something to be proud of in this pandemic situation. This can increase employees' willingness to continue their contribution to the company without worrying about the continuation of their status as employees.</i>
Coordination and Collaboration	4,25	Pegawai PT KCI menilai koordinasi yang terjalin dengan sesama pegawai, baik dalam satu unit maupun antar unit semakin baik dan perlu dipertahankan. Dengan lancarnya koordinasi, maka hal ini dapat mempermudah dinamika kerja. Oleh karena itu, aspek ini menjadi salah satu aspek yang menjadi kepuasan para pegawai. <i>PT KCI employees assess that their coordination with fellow employees, both within one unit and between units is getting better and needs to be maintained. Conducive coordination can facilitate the dynamics of work, therefore, this aspect becomes one of the aspects determining employee satisfaction.</i>

Aspek Kepuasan <i>Satisfaction Aspect</i>	Skor Score	Rekomendasi Recommendation
Engagement index	76,4%	Indeks engagement PT KCI tahun 2020 sebesar 76.64% dan termasuk dalam kategori High yang menunjukkan bahwa indeks engagement PT KCI sudah baik dan mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang sebesar 71,53%. Berdasarkan survei kepuasan pegawai 2020, terdapat 76,64% atau 1.530 orang responden yang memiliki keterikatan kerja yang engaged atau baik. Dan 20,96% atau 419 orang memiliki keterikatan yang terbilang nearly engaged atau cukup baik. <i>The engagement index in 2020 is 76.64% and categorized as High. It shows that the engagement index of PT KCI is good and has increased from 71.53% in 2019.</i> <i>Based on the 2020 employee satisfaction survey, there were 76.64% or 1,530 respondents categorized as well engaged. In addition, 20.96% or 419 people have an attachment that is considered nearly engaged or quite good.</i>



TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology



PT Kereta Commuter Indonesia merupakan perusahaan penyelenggara pelayanan jasa angkutan kereta api commuter dengan menggunakan sarana Kereta Rel Listrik yang senantiasa berupaya memberikan pelayanan dan kontribusi yang optimal kepada masyarakat. KCI sangat memahami bahwa perkembangan teknologi informasi (TI) sangat pesat dan dinamis. Perseroan tidak hanya dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan tersebut, namun hal tersebut menjadi sebuah kebutuhan agar pengelolaan operasional dapat berjalan efektif dan efisien serta meningkatkan produktivitas. Kehadiran TI berperan penting dalam pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi di Perseroan.

PT Kereta Commuter Indonesia is a commuter rail service provider with the means of electric railways that always strive to provide optimum service and contribution to the community. KCI understands that the development of information technology (IT) is very fast and dynamic. The Company is not only required to be able to adapt to these developments, but it becomes a necessity so that operational management can run effectively and efficiently and increase productivity. IT plays a significant role in the retrieval, collection, processing, saving, socializing, and presenting the Company's informations.



Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip GCG khususnya dalam pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), perlu disusun Tata Kelola ICT yang menjadi bagian integral dari *Enterprise Governance* agar dapat menjamin pemanfaatan implementasi ICT yang optimal, terukur dan terarah.

Tata kelola TI merupakan tanggung jawab pimpinan perusahaan dan manajemen eksekutif dan merupakan bagian integral tata kelola perusahaan yang terdiri dari kepemimpinan dan struktur organisasi serta proses-proses yang menjamin bahwa organisasi TI dapat mendukung dan memperluas sasaran serta strategi organisasi.

Menurut ITGI (*IT Governance Institute*), tata kelola TI pada dasarnya berfokus pada dua hal yaitu bagaimana TI memberikan nilai tambah bagi bisnis dan penanganan risiko pada implementasi TI. Tujuan tata kelola TI menurut ITGI adalah mengarahkan investasi TI untuk menjamin performa TI memenuhi tujuan-tujuan berikut:

1. Kesesuaian TI dengan organisasi dan realisasi keuntungan yang dijanjikan
2. Penggunaan TI memungkinkan organisasi memaksimalkan manfaat dan memperbesar peluang
3. Pertanggungjawaban dalam penggunaan sumber daya TI
4. Manajemen yang sesuai dengan risiko-risiko yang berkaitan dengan TI.

Tata kelola TI memperhatikan dua hal yaitu nilai tambah TI bagi bisnis dan mitigasi risiko TI. Nilai TI didorong oleh penyelarasan strategis TI dan bisnis, sedangkan mitigasi risiko didorong oleh tanggung jawab kepada organisasi. Keduanya membutuhkan dukungan dari sumberdaya yang cukup dan dapat diukur untuk menjamin bahwa hasil yang diharapkan terpenuhi. Hal ini mengarah pada lima area utama untuk tata kelola TI yang didorong oleh nilai yang diberikan kepada *stakeholder* (*stakeholder value drivers*). Dua diantara area tersebut merupakan hasil, yaitu pengiriman nilai (*value delivery*) dan manajemen risiko (*risk management*). Tiga area lainnya merupakan pendorong, yaitu keselarasan strategis (*strategic alignment*), manajemen sumber daya (*resource management*), dan pengukuran performa (*performance measurement*).

In the context of implementing GCG principles, especially in managing the Information and Communication Technology (ICT), it is necessary to develop ICT Governance which is an integral part of Enterprise Governance to ensure the optimal, measurable and targeted utilization of ICT implementation.

IT governance is the responsibility of company leaders and executive management and is an integral part of corporate governance consisting of leadership and organizational structure and processes that ensure that IT organizations can support and expand organizational goals and strategies.

According to ITGI (IT Governance Institute), IT governance basically focuses on two things, namely how IT provides added value to business and risk management in IT implementation. The goal of IT governance according to ITGI is to direct IT investment to ensure IT performance meets the following objectives:

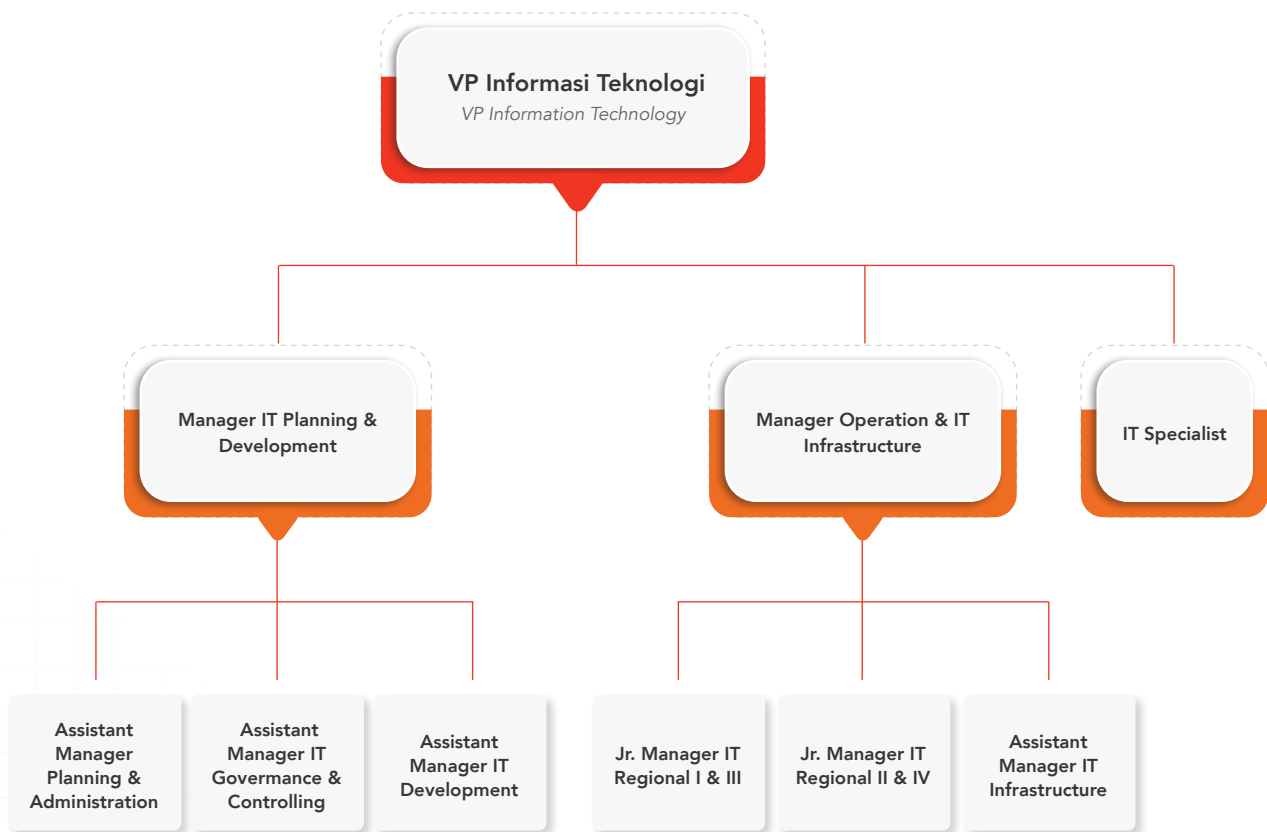
1. *IT suitability with the organization and the realization of promised benefits*
2. *IT utilization allows organizations to maximize benefits and increase opportunities*
3. *Accountability in the use of IT resources*
4. *Management in accordance with IT-related risks.*

IT governance pays attention to two things, IT added value for business and IT risk mitigation. IT value is driven by the strategic alignment of IT and business, while risk mitigation is driven by responsibility to the organization. Both require support from sufficient and measurable resources to ensure that the expected results are met. This leads to five main areas for IT governance that are driven by the value given to stakeholders (stakeholder value drivers). Two of these areas are outcomes, namely value delivery and risk management. The other three areas are driving, namely strategic alignment, resource management, and performance measurement.



Tata Kelola TI merupakan salah satu pilar utama dari *Good Corporate Governance* (GCG), maka dalam pelaksanaan Tata Kelola TI yang baik sangat memerlukan standar yang memberikan kerangka kerja tata kelola TI yang efektif, efisien dan mencerminkan suatu proses pengambilan keputusan yang baik serta kepemimpinan dalam penyelenggaraan Tata Kelola TI. Adapun struktur TI di Perseroan adalah sebagai berikut:

IT Governance is one of the main pillars of Good Corporate Governance (GCG). Thus, the implementation of good IT Governance highly requires standards that provide an IT governance framework that is effective, efficient and reflects a good decision making process and leadership in the implementation of IT Governance. The Company's IT Structure is as follows:



Program	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Implementation		Kebutuhan Dukungan IT IT Support Demand
Operasi Perka Perka Operation	Tata Kelola Perka Perka Governance	Perencanaan, <i>Monitoring & Evaluasi</i> Perka * Tidak mengendalikan Perka <i>Planning, Monitoring & Perka Evaluation</i> * Does not control Perka	• Sistem Informasi Jadwal Perjalanan • Sistem Informasi <i>Tracking</i> Perjalanan • Sistem Informasi Evaluasi Perka • Sistem <i>Telephony</i> Terintegrasi (Pusat <i>Monitoring</i> KRL-Dipo-Stasiun) • Sistem <i>Video Monitoring</i> (CCTV) • <i>Trip Schedule Information System</i> • <i>Trip Tracking Information System</i> • <i>Perka Evaluation Information System</i> • <i>Integrated Telephony System (Monitoring center-KRL-Dipo-station) Video Monitoring System (CCTV)</i>
Sarana KRL KRL Rolling Stocks	Tata Kelola Sarana KRL Governance of KAI Rolling Stocks	Perencanaan Pengoperasian, <i>Monitoring & Evaluasi Sarana KRL</i> <i>Operational planning, Monitoring & evaluation of KRL Rolling Stocks</i>	• Sistem Informasi Rencana Stamformasi KRL • Sistem <i>Monitoring & Informasi Realisasi SF</i> • <i>System Information Plan KRL stamlineups</i> • <i>Monitoring System & SF Realization Information</i>
		Perencanaan, Pemeliharaan & Evaluasi Sarana KRL <i>Planning, Maintenance & evaluation of KRL Rolling Stocks</i>	• Sistem Informasi <i>Monitoring Sarana</i> • Sistem Informasi Pemeliharaan Sarana • <i>Information System Monitoring Facility</i> • <i>Facility Maintenance Information System</i>
		Pengoperasian & Evaluasi Fasilitas (Dipo) Pemeliharaan Sarana KRL <i>Operation & Facility Evaluation (DIPO) Maintenance KRL Rolling Stocks</i>	• Sistem Informasi Fasilitas & Akupansi Perawatan • Sistem <i>Telephony Area Perawatan</i> • Sistem <i>Video Monitoring Keamanan (CCTV)</i> • <i>Information Systems Facilities & Treatment Occupancy</i> • <i>Telephony Area Care system</i> • <i>Security Video Monitoring System (CCTV)</i>
Prasarana Infrastructure	Tata Kelola Prasarana Stasiun Governance of Station Infrastructure	Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Kelistrikan Stasiun <i>Operational planning, Monitoring & evaluation of EMU Rolling Stocks</i>	• Sistem Informasi Distribusi Listrik Stasiun • Sistem Kontrol & <i>Monitoring Backup Power</i> • Sistem Informasi Penanganan Gangguan Kelistrikan • <i>Station Electrical Distribution Information System</i> • <i>Control system & Monitoring Backup Power</i> • <i>Electrical Interference Management Information System</i>
		Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Stasiun Terkait Sesuai Ruang Lingkup KCI *Tidak termasuk pembangunan/ konstruksi baru <i>Building maintenance planning related stations in accordance with KCI scope</i> *Exclude construction/new construction	• Sistem Informasi Manajemen Proyek • Sistem Informasi Aset, <i>Monitoring & Perawatan</i> • <i>Project Management Information System</i> • <i>Asset information System, Monitoring & Maintenance</i>



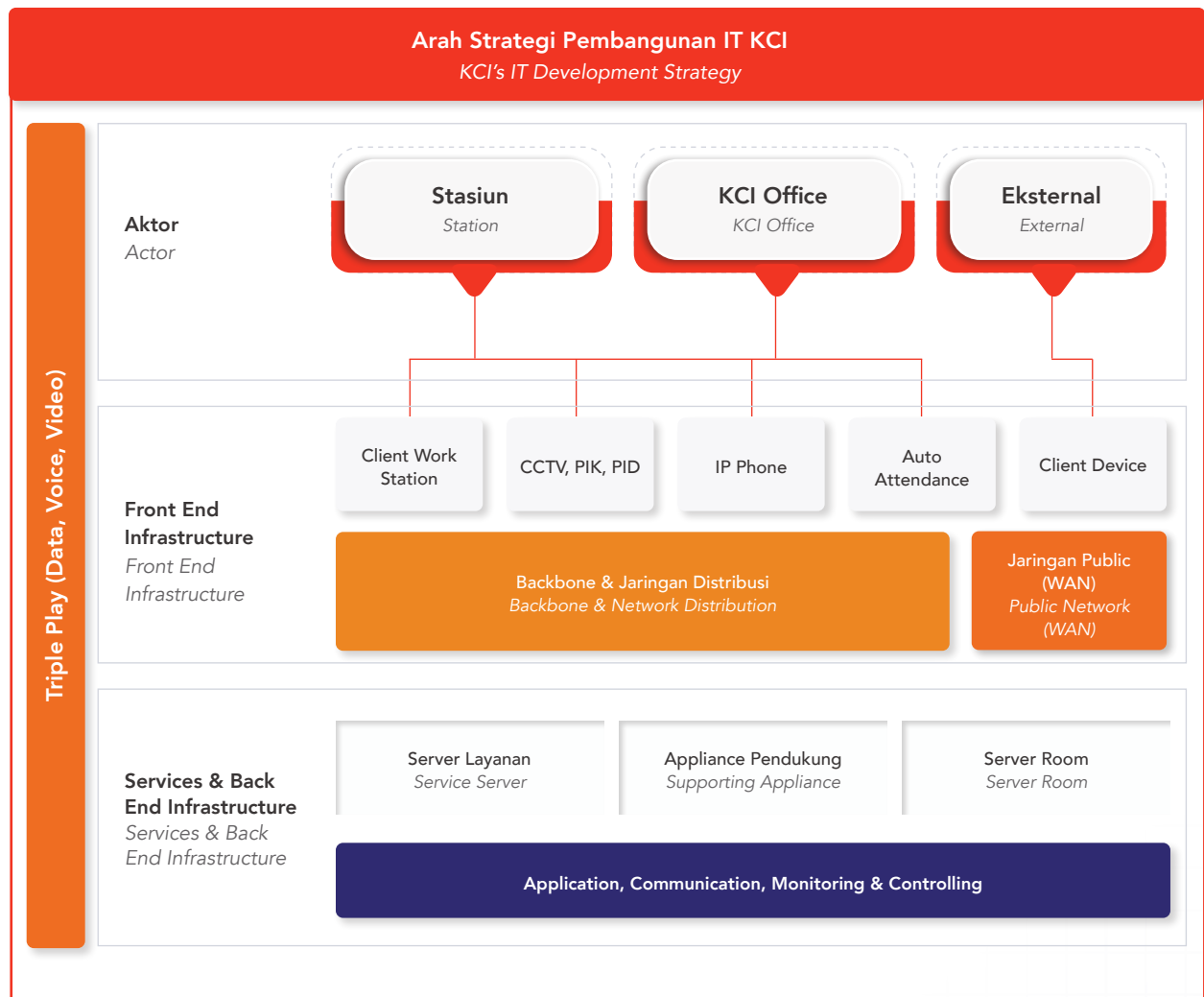
Program	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan <i>Corporate Governance Implementation</i>		Kebutuhan Dukungan IT <i>IT Support Demand</i>
Pengusahaan Penumpang <i>Passenger Business</i>	Tata Kelola Usaha Core <i>Core Business Governance</i>	Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Penjualan Tiket (<i>Ticketing</i>) <i>Planning, Controlling & Ticket sales Evaluation (Ticketing)</i>	• Sistem Otomatisasi Loker Penjualan • Sistem Otomatisasi <i>Ticketing</i> (VM) • Sistem Informasi <i>Inventory</i> & Distribusi Tiket • Sistem Informasi <i>Trend</i> Perjalanan (Naik/Turun) & • Pertumbuhan Penumpang • Sistem <i>Video Monitoring</i> Loker (CCTV) • Sistem <i>Telephony</i> Terintegrasi-Loker (VoIP) • <i>Sales Counter Automation System</i> • <i>Ticketing Automation System (VM)</i> • <i>Inventory Information System & Ticket Distribution</i> • <i>Travel Trend Information System (UP/Down) & passenger growth</i> • <i>Video Monitoring counter (CCTV) system</i> • <i>Integrated Telephony System-Counters (VoIP)</i>
		Perencanaan, Pengelolaan & Evaluasi Tarif & Penerapan Subsidi (PSO) <i>Planning, Management & Pricing Evaluation & Subsidies application (PSO)</i>	• Sistem Informasi Formulasi Pentarifan • Sistem Otomatisasi Pentarifan (<i>Automatic Fare Collection/AFC</i>) • Sistem Informasi Database & Formulasi Subsidi • <i>Information System formulation of Pricing</i> • <i>Automatic Fare Collection (AFC)</i> • <i>Database Information System & subsidies formulation</i>
Pengusahaan Non-Penumpang <i>Non-Passenger Business</i>	Tata Kelola Usaha Non-Core <i>Non-Core Business Governance</i>	Perencanaan, Pengelolaan, Evaluasi dan Pengembangan Usaha Non-Core (tidak termasuk perusahaan non-core di stasiun) <i>Planning, Management, Evaluation and Development of Non-Core Businesses (excluding non-core operations at stations)</i>	• Sistem Informasi Database Media Usaha Non-Core • Portal Web Pemasaran Usaha Non-Core • Sistem Informasi Monitoring Akupansi Usaha Non-Core • <i>Non-Core Business Media Database Information System</i> • <i>Non-Core Business Marketing Web Portal</i> • <i>Non-Core Business Occupancy Monitoring Information System</i>

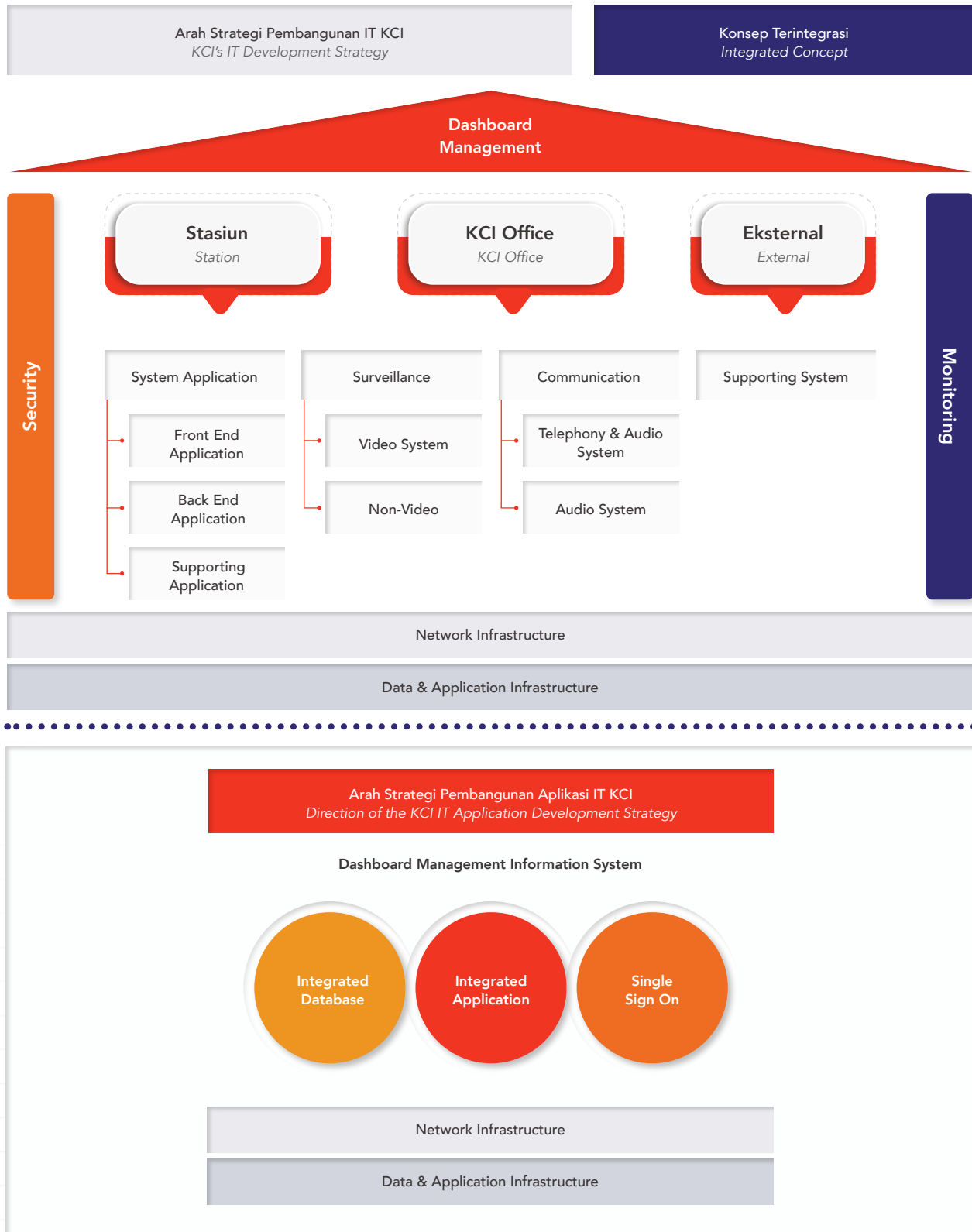
Program	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Implementation		Kebutuhan Dukungan IT IT Support Demand
Pelayanan Service	Tata Kelola Pelayanan Service Governance	Perencanaan, Pengelolaan, Monitoring & Evaluasi Pelayanan Penumpang di Stasiun dan di KRL <i>Planning, Management, Monitoring & Evaluation of Passenger Services at Stations and in KRL</i>	• Sistem Informasi Database & Monitoring Fasilitas Pelayanan • Sistem Informasi Announcer Stasiun (ATA) • Sistem Informasi Broadcast Gangguan Pelayanan • Sistem Telephony Terintegrasi-Announcer (CCTV) • Public Interface Informasi Pelayanan KRL kepada Penumpang • Sistem Informasi Help Desk & Komplain Penumpang • Sistem Informasi Pengelolaan Loyalty Penumpang (CRM) • System Information Database & Monitoring service facilities • Information System Announcer Station (ATA) • System Information Broadcast Disruption Service • Integrated Telephony system-Announcer (CCTV) • Public Interface Information Services KRL to passengers • System Information Help Desk & Passenger Complaints • Passenger Loyalty Management Information System (CRM)
		Perencanaan, Pengelolaan, Monitoring & Evaluasi Keselamatan di Lingkungan Stasiun dan di KRL <i>Planning, Managing, Monitoring & Safety Evaluation at Stations and in KRL</i>	• Sistem Informasi Database & Monitoring Fasilitas Keselamatan • Sistem Announcement/Peringatan Keselamatan • Database Information System & Monitoring safety Facilities • Announcement System/Safety Warning
		Perencanaan, Pengelolaan, Monitoring & Evaluasi Kebersihan Stasiun dan di KRL <i>Planning, Management, Monitoring & Evaluation of Cleanliness of the Station and in EMU</i>	• Tools Monitoring Kehadiran Petugas Kebersihan (Absensi) • Sistem Informasi Database & Monitoring Fasilitas Kebersihan • Monitoring Attendance Tools for Cleaning Officers (Attendance) • Database Information System & Monitoring Hygiene Facilities
Keamanan & Ketertiban Security & Order	Tata Kelola Pengamanan Security Governance	Perencanaan, Pengelolaan & Evaluasi Keamanan/Ketertiban Stasiun & Lokasi Strategis <i>Planning, Management & Station Security Evaluation/Order & Strategic Location</i>	• Sistem Informasi Pengawasan Keamanan Terpadu (Surveillance) • Tools Monitoring Kehadiran Petugas (Absensi) • Sistem Video Monitoring (CCTV) • Integrated security Surveillance Information System (Surveillance) • Monitoring Attendance Tools (Attendance) • Video Monitoring System (CCTV)
		Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Keamanan/Ketertiban di KRL <i>Planning, Control & Security Evaluation/Order in KRL</i>	



Program	Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan <i>Corporate Governance Implementation</i>		Kebutuhan Dukungan IT <i>IT Support Demand</i>
Keuangan <i>Finance</i>	Tata Kelola Keuangan <i>Financial Governance</i>	Perencanaan & Monitoring Realisasi Anggaran Perusahaan <i>Planning & Monitoring the Realization of Company's Budget</i> Perencanaan, Pengelolaan & Evaluasi Akuntansi Perusahaan <i>Planning, Management & Company Accounting Evaluation</i> Perencanaan, Pengelolaan & Verifikasi/Validasi Lalu Lintas Arus Kas Perusahaan <i>Planning, Management & Verification/validation of the Corporate Cash Flow Traffic</i>	• Sistem Informasi Akuntansi & Keuangan Terintegrasi • Sistem Settlement Pendapatan Keuangan • Sistem Verifikasi & Validasi Lalu Lintas Keuangan • Accounting Information System & Integrated Finance • Financial Income Settlement System • Financial Traffic Verification & Validation System
SDM <i>HR</i>	Tata Kelola Personalia <i>HR Governance</i>	Perencanaan, Pengelolaan, Monitoring & Evaluasi Personalia <i>Planning, Management, Monitoring & Personnel Evaluation</i>	• Sistem Informasi HR Terintegrasi (HRIS) • Tools Monitoring Kehadiran Karyawan (Absensi) • Integrated HR Information System (HRIS) • Employee Attendance Monitoring Tools (attendance)
Logistik <i>Logistics</i>	Tata Kelola Pengadaan & Logistik <i>Procurement & Logistics Governance</i>	Perencanaan, Pengelolaan, Monitoring & Evaluasi Pengadaan <i>Planning, Management, Monitoring & Personnel Evaluation</i> Perencanaan, Pengelolaan, Monitoring & Evaluasi Logistik <i>Planning, Management, Monitoring & Logistics Evaluation</i>	• Sistem Pengadaan Terintegrasi (E-procurement) • Portal Web Pengadaan (Online Bidding) • Integrated Procurement System (E-procurement) • Procurement Web Portal (Online Bidding) • Sistem Informasi Logistik Terintegrasi • Integrated Logistics Information System
Kesekretariatan <i>Secretarial</i>	Tata Kelola Sekretariat Perusahaan <i>Corporate Secretariat Governance</i>	Pengelolaan Kehumasan, Dokumentasi & Utilisasi Fasilitas Kesekretariatan <i>PR Management, Documentation & Secretarial Facilities Utilization</i>	• Web Portal Corporate • Sistem Informasi Dokumentasi Terintegrasi (E-Doc) • Sistem Informasi Utilisasi Fasilitas Kesekretariatan • Web Portal Corporate • Integrated Documentation Information System (E-Doc) • Information Dissemination System for secretarial facilities
Legal	Tata Kelola Hukum & Kepatuhan <i>Legal Governance & Compliance</i>	Pembuatan & Pengarsipan Legal Dokumen <i>Issuance & Archiving Legal Document</i> Monitoring Kepatuhan Perusahaan <i>Corporate Compliance Monitoring</i>	Sistem Informasi Rekam & Monitoring Legal Document <i>Information System Record & Legal Document Monitoring</i> Sistem Informasi Rekam & Monitoring Tata Laksana Kepatuhan <i>Information System Record & Compliance Monitoring</i>
Perencanaan Strategik <i>Strategic Plan</i>	Tata Kelola Perencanaan <i>Planning Governance</i>	Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Strategik Perusahaan <i>Monitoring, Evaluation & reporting on the Implementation of Corporate Strategic Planning</i>	• Sistem Informasi Rekam Perencanaan Strategik • Sistem Informasi Monitoring & Pelaporan Pelaksanaan Rencana Strategik • Strategic Planning Information System • Information Monitoring System & Reporting Strategic plan implementation

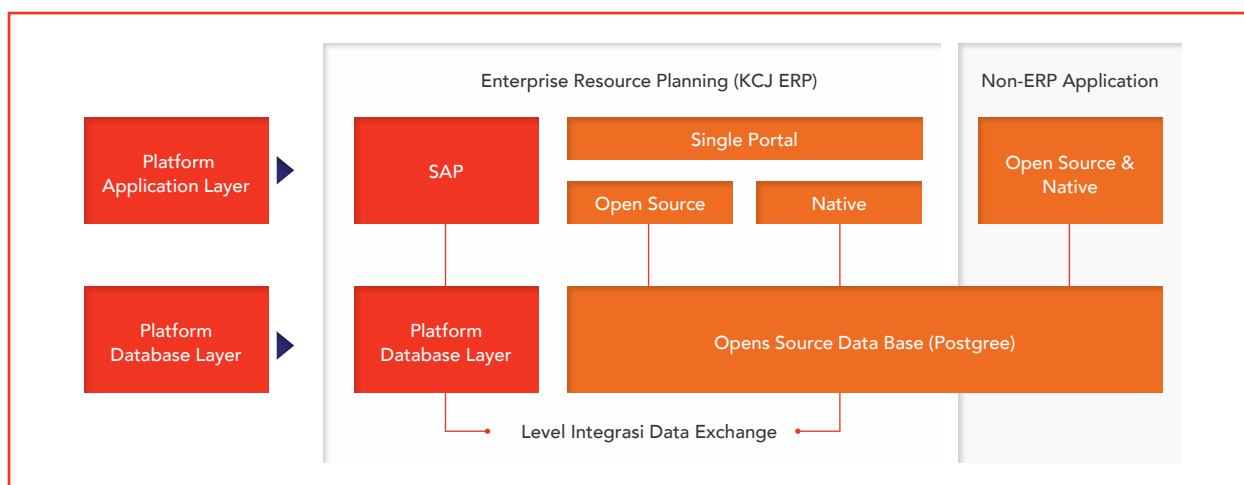
Arah Strategi Pembangunan IT IT Development Strategy





Arsitektur Pembangunan Aplikasi Application Development Architecture

ERP	Ruang Lingkup Scope
SAP	Akuntansi & Keuangan Accountancy & Finance
Single Portal Application	Sistem Informasi Produksi & Pendukung yang tidak tercakup dalam SAP Production & Support Information System outside SAP
Public Application	Corporate Web Portal, Marketing Web Portal, Mobile Apps Info KRL/Pelayanan Corporate Web Portal, Marketing Web Portal, Mobile Apps Info EMU/Service



Strategi Pembangunan Aplikasi Application Development Plan

Single Portal Application | Open Source

- Sistem Informasi Database Media Usaha Non-Core
- Sistem Informasi Monitoring Okupansi Usaha Non-Core
- Sistem Informasi Database dan Monitoring Fasilitas Pelayanan
- Sistem Informasi Announcer Stasiun (ATA)
- Sistem Informasi Broadcast Gangguan Pelayanan
- Public Interface Informasi Pelayanan KRL kepada Penumpang
- Sistem Informasi Help Desk dan Komplain Penumpang
- Sistem Informasi Pengelolaan Penumpang (CRM)
- Sistem Informasi Database & Monitoring Fasilitas Keselamatan
- Sistem Announcement/Peringatan Keselamatan
- Non-Core Business Media Database Information System
- Non-Core Business Occupancy Monitoring Information System
- System Information Database and Monitoring service facilities
- Information System Announcer Station (ATA)
- Disruptions Broadcast Information Systems Services
- Public Interface Information Services KRL to passengers
- System Information Help Desk and Complaint of Passengers
- Passenger Management Information System (CRM)
- Database Information System & Monitoring safety Facilities
- Announcement System/Safety Warning



Strategi Pembangunan Aplikasi Application Development Plan

• Sistem Informasi Database & Monitoring Fasilitas Kebersihan • Sistem Informasi Pengawasan Keamanan Terpadu (Surveillance) • Sistem Settlement Pendapatan Keuangan • Sistem Informasi Logistik Terintegrasi • Sistem Informasi Dokumentasi Terintegrasi (E-Doc) • Sistem Informasi Utilisasi Fasilitas Kesekretariatan • Sistem Informasi Rekam dan Monitoring Legal Document • Sistem Informasi Rekam Perencanaan Strategik • Sistem Informasi Monitoring & Pelaporan Pelaksanaan Rencana Strategis • Sistem Informasi Jadwal Perjalanan • Sistem Informasi Tracking Perjalanan • Sistem Informasi Gangguan/Keterlambatan/Pembatalan Perjalanan • Sistem Telephony Terintegrasi (Pusat Monitoring-KRL-Dipo-Stasiun) • Sistem Informasi Dinasan Awak KRL • Sistem Informasi Rencana Stamformasi KRL • Sistem Monitoring & Informasi Realisasi SF • Sistem Informasi Monitoring Sarana • Sistem Informasi Fasilitas & Akupansi Perawatan • Sistem Telephony Area Perawatan • Sistem Informasi Distribusi Listrik Stasiun • Sistem Kontrol & Monitoring Backup Power • Sistem Informasi Penanganan Gangguan Kelistrikan • Sistem Informasi Manajemen Proyek • Sistem Informasi Aset, Monitoring & Perawatan	• Database Information System & Monitoring Hygiene Facilities • Integrated security Surveillance Information System (Surveillance) • Financial Income Settlement System • Integrated Logistics Information System • Integrated Documentation Information System (E-Doc) • Secretarial Facilities System Information • Information System record and Monitoring Legal Document • Strategic Planning Information System • System Monitoring Information & Reporting Implementation of Strategic plan • Trip Schedule Information System • Trip Tracking Information System • Interruption Information System/Delay/Cancellation of Travel • Integrated Telephony System (Monitoring Center-KRL-Dipo-Station) • KRL Crew Information System • System Information Plan Stamlineups KRL • Monitoring System & SF Realization Information • Information System Monitoring Facility • Information Systems Facilities & Treatment Occupancy • Telephony Area Care system • Station Electrical Distribution Information System • Control System & Monitoring Backup Power • Electrical Interference Management Information System • Project Management Information System • Asset information System, Monitoring & Maintenance

Native

• Sistem Otomatisasi Loker Penjualan • Sistem Otomatisasi Peniketan (VM) • Sistem Informasi Inventory & Distribusi Tiket • Sistem Informasi Trend Perjalanan (Naik/Turun) & Pertumbuhan Penumpang • Sistem Informasi Formulasi Pentarifan • Sistem Otomatisasi Pentarifan (Automatic Fare Collection/ AFC) • Sistem Informasi Database & Formulasi Subsidi • Sistem Absensi (Auto Attendance)	• Sales Counter Automation System • Ticketing Automation System (VM) • Inventory Information System & Ticket Distribution • Trip Trend Information System (Increase/Decrease) & Passenger Growth • Charging Formulation Information System • Automatic Fare Collection (AFC) • Database Information System & Subsidies Formulation • Attendance System (Auto Attendance)

Arah Strategi Pembangunan Infrastruktur Jaringan Direction of Network Infrastructure Development Strategy					
Keterangan Description	Content	Triple Play (Data, Voice, Video)			
	Parameter	Skalabilitas Scale	Keandalan Capability	Ketersediaan Availability	Keamanan Security
Station Backbone Online		10G			
Backbone Data Centre					
Backbone DRC					
Backbone Online Dipo, Crew KRL Online Dipo Backbone, EMU Crew					
Jaringan Distribusi Stasiun Station Distribution Network		1G	Industrial	Redundant (HA)	Trusted
Jaringan Distribusi Kantor Pusat Head Office Distribution Network					
Jaringan Distribusi Dipo, Kantor Crew KRL Dipo, EMU Crew Distribution Network					
Internet Public		1G			

Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Tahun 2020

KCI berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan dan pemutakhiran sistem TI yang dimiliki. Untuk itu, Perseroan berupaya mengadaptasi infrastruktur teknologi terkini. Pengembangan TI di Perseroan antara lain difokuskan untuk mendukung percepatan proses bisnis serta proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Pemanfaatan TI juga berguna untuk melakukan penyesuaian pola operasional Perseroan ke arah yang lebih efisien, tersinergi dengan perkembangan zaman, serta mendorong peningkatan daya saing. Hal tersebut bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan Perseroan dan mendukung kegiatan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu dan produktivitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan.

Untuk mewujudkan pelayanan dan kontribusi yang optimal kepada masyarakat, Perseroan telah melakukan sebuah inovasi terhadap mekanisme pembayaran tiket untuk penggunaan Jasa Angkutan Kereta Commuter, yaitu dengan menggunakan Uang Elektronik yang disebut Kartu Multi Trip (KMT). Dalam

Information Technology System Development in 2020

KCI is committed to continuously developing and updating its IT systems. Hence, the Company seeks to adapt the latest technology infrastructure. IT development in the Company, among others, are focused on supporting the acceleration of business processes and integrated decision-making processes. IT utilization is also useful to adjust the Company's operational patterns to be more efficient, synergized with the trend, and to increase competitiveness. It also aims to accommodate the Company's needs and support operational activities to improve time efficiency and productivity of the Company's human resources.

To achieve optimum service and contribution to the community, the Company has invented a ticket payment mechanism for Commuter Train Transport Services by using Electronic Money called Multi Trip Card (KMT). In carrying out the Electronic Money Operational activities, policies are needed to support its



melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Uang Elektronik tersebut dibutuhkan kebijakan-kebijakan guna menunjang Penyelenggaraan Uang Elektronik. Tujuan dari kebijakan penyelenggaraan Elektronik yaitu untuk meminimalisir risiko yang timbul terhadap kegiatan Penyelenggaraan Uang Elektronik serta demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pada tahun 2020, Perusahaan telah melakukan serangkaian pengembangan sistem TI antara lain:

1. Pengembangan *Data Center* dengan melakukan migrasi core aplikasi *e-ticketing* dan melakukan penarikan perangkat infrastruktur di Rempoa ke Juanda untuk memperkuat posisi Juanda sebagai DRC (*Disaster Recovery Center*)
2. Infrastruktur server menggunakan virtualisasi dimana operating sistem, aplikasi dan database beroperasi dalam virtual mesin
3. Infrastruktur jaringan IT menggunakan *fiber optic*, jaringan Metri-E dan Broadband
4. Peningkatan *IT Security* melalui:
 - a. Penggantian perangkat *next generation firewall*, perangkat baru menjadi *central management* yang memiliki kemampuan terintegrasi dengan perangkat lainnya;
 - b. Implementasi perangkat *web application firewall*, digunakan untuk perlindungan aplikasi milik KCI yang berbasis web dan memiliki akses publik terhadap serangan dan gangguan dari luar;
 - c. Implementasi perangkat *secure web proxy*, digunakan untuk pengelolaan penggunaan internet di KCI agar lebih aman dan cepat;
 - d. Pergantian perangkat *access switch*, perangkat baru digunakan untuk mengganti perangkat milik Telkom di seluruh stasiun yang saat ini bersifat *managed services*;
5. Pemasangan CCTV terintegrasi dengan MITJ di Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Juanda;
6. *Fleetsight* untuk mengantisipasi insiden yang terjadi dalam perjalanan KRL yang penyebabnya tidak bisa teridentifikasi, melalui:
 - a. 108 *Trainset*
Setiap rangkaian KRL terpasang 2 unit GPS di kabin masinis
 - b. 17 *Trainset*
Pemasangan CCTV dilakukan di gerbong kedua. Pemasangan terdiri dari 1 unit MDVR untuk melakukan recording.

implementation. The objectives of the implementation policy is to minimize the risks from Electronic Money Operation activities and to provide better services for the public.

In 2020, the Company has carried out a series of IT system developments, including:

1. *Development of Data Center by migrating the core application of e-ticketing and withdrawing infrastructure equipment in Rempoa to Juanda to strengthen Juanda's position as DRC (Disaster Recovery Center)*
2. *Server infrastructure using virtualization where operating systems, applications and databases operate in virtual machines*
3. *IT network infrastructure using fiber optic, Metri-E network and Broadband*
4. *Improved IT Security through:*
 - a. *Replacement of the next generation firewall device, the new device becomes a central management that has the ability to integrate with other devices;*
 - b. *Implementation of a web application firewall device, used to protect KCI's web-based applications and have public access against attacks and outside interference;*
 - c. *Implementation of a secure web proxy device, used for managing internet usage at KCI to make it more secure and fast;*
 - d. *Replacement of access switch equipment, new equipment used to replace Telkom's equipment in all station*
5. *Installation of CCTV integrated with MITJ at Tanah Abang Station and Juanda Station;*
6. *Fleetsight to anticipate incidents that occur during KRL trips whose causes cannot be identified, through:*
 - a. 108 *Trainsets*
Each series of KRL has 2 GPS units installed in the driver's cabin
 - b. 17 *Trainsets*
CCTV installation is carried out in the second carriage. The installation consists of 1 MDVR unit for recording.

7. Perubahan tampilan informasi perjalanan pada TV info dari MINI PC + WINDOWS + OPEN SOURCE XIBO menjadi Android TV Box dan aplikasi buatan sendiri.

7. Changed display of travel information on TV info from MINI PC + WINDOWS + OPEN SOURCE XIBO to Android TV Box and homemade applications.



Menjadi

Into





8. Implementasi E-Ticketing untuk Wilayah Yogya-Solo yang mencakup:
- Penambahan fitur transaksi Topup KMT dan Sales KMT menggunakan CVIM THB.
 - Aktivasi kartu pra bayar langsung pada Gate
 - QR Ticketing menggunakan Link Aja
 - Menggunakan Secure Acces Modul (SAM) yang berbasis GPN (Gerbang Pembayaran Nasional).

8. Implementation of E-Ticketing for Yogya-Solo Region which includes:
- Additional KMT Topup and KMT Sales transaction features using CVIM THB.
 - Activation of prepaid card directly on Gate
 - QR Ticketing using Link Aja
 - Using Secure Access Module (SAM) based on GPN (National Payment Gateway).

Perseroan juga melakukan pengembangan TI lainnya yang dideskripsikan melalui tabel berikut:

The Company also carries out other IT developments which are described in the following table:

PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2020

Development of Information Technology System In 2020

No	Nama Aplikasi/ Sistem Name of the Application/ System	Tujuan Pembuatan Development Objective	Uraian Singkat Brief Description	Unit Pengguna User
1	Aplikasi SSO (Single Sign-On)	Mengintegrasikan seluruh aplikasi dengan satu user <i>Integrate all applications within one user</i>	Portal akses untuk aplikasi-aplikasi KCI yang sudah terintegrasi, dengan adanya portal ini diharapkan semua aplikasi di KCI Login dengan satu user untuk semua aplikasi. <i>Access portal for integrated KCI applications. Through this portal, all KCI's application login will be integrated into one user.</i>	IT
2	Whistle Blowing System	Memudahkan pelaporan tindak KKN di lingkungan KAI Commuter <i>Ease KAI Commuter's employees to report potential fraud</i>	Sebuah portal yang bertujuan untuk mengajak seluruh stakeholder PT Kereta Commuter Indonesia untuk dapat berpartisipasi secara langsung dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate dengan cara melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia. <i>A portal that aims to invite all stakeholders of PT Kereta Commuter Indonesia to participate directly in implementing Good Corporate principles by reporting all forms of violations that occur within PT Kereta Commuter Indonesia.</i>	GCG



No	Nama Aplikasi/ Sistem Name of the Application/ System	Tujuan Pembuatan Development Objective	Uraian Singkat Brief Description	Unit Pengguna User
3	Settlement RMU	Mewujudkan sinergi KAI Grup dan terwujudnya penggunaan KMT sebagai <i>payment</i> di luar jasa <i>commuter</i> <i>Synergize KAI Group and enable KMT as payment method outside commuter services</i>	Aplikasi penunjang rekonsiliasi <i>settlement</i> KCI-RMU dalam penggunaan KMT di gate parkir ResParking di seluruh wilayah Jabodetabek. Aplikasi ini dikemas dalam format baru sehingga proses rekonsiliasi sampai pembayaran bisa dilakukan H+1 dari tanggal <i>settlement</i> . <i>Application to support KCI-RMU settlement reconciliation in using KMT at ResParking gates throughout Jabodetabek area. This application is packaged in a new format so that the reconciliation process until payment due can be made H+1 from the settlement date.</i>	Commercial
4	Card Management System (CMS)	KMT sebagai <i>Card Issuer</i> <i>KMT as Card Issuer</i>	Aplikasi pendukung KMT sebagai <i>Card Issuer</i> . CMS ini disiapkan untuk mempermudah penerapan KMT di luar lingkungan KAI Commuter. <i>KMT support application as a Card Issuer. This CMS is prepared to facilitate the implementation of KMT outside the KAI Commuter environment.</i>	Commercial
5	New KRL Access plus modul baca Saldo KMT New KRL Access plus KMT Balance reading module	Kemudahan pengecekan saldo bagi <i>customer</i> <i>Ease customers to check their balance</i>	Aplikasi <i>Mobile</i> yang digunakan pengguna KRL untuk melihat jadwal, memantau posisi kereta, memantau kepadatan stasiun, informasi terkini terkait perjalanan KRL dan pengecekan saldo KMT di perangkat <i>handphone</i> yg mempunyai fitur NFC. <i>Mobile application for KRL users to view schedules, monitor train positions, monitor station density, the latest information regarding KRL trips and check KMT balances on cellphone devices that have NFC features.</i>	Pelayanan Services
6	C-Vero Verifikasi Keuangan C-Vero Financial Verification	<i>Paperless</i> dalam pelaporan keuangan dan administrasi stasiun <i>Paperless financial reporting and station administration</i>	Aplikasi yang mempermudah pemeriksa keuangan dalam melakukan proses verifikasi keuangan stasiun. Hal ini merupakan terobosan baru karena mengubah pelaporan manual menjadi pelaporan <i>online</i> . <i>Application to ease financial examiners to carry out the station's financial verification process. A new breakthrough that changes manual reporting to online reporting.</i>	Keuangan dan Commercial Finance and Commercial
7	Mobile Presensi Mobile Attendance	Kemudahan access presensi tanpa harus menyentuh <i>Touchless access for daily attendance</i>	Aplikasi <i>Mobile</i> yang mempermudah pegawai KAI Commuter dalam melakukan absensi beserta laporan presensinya. <i>A mobile application to ease the Company's employees to fill in and report their attendance.</i>	SDM HR

No	Nama Aplikasi/ Sistem Name of the Application/ System	Tujuan Pembuatan Development Objective	Uraian Singkat Brief Description	Unit Pengguna User
8	Settlement Railink	Sinergi KAI Grup dan terwujudnya penggunaan KMT sebagai <i>payment</i> di luar jasa <i>commuter</i> <i>Synergize KAI Group and enable KMT as payment method outside commuter services</i>	Aplikasi yang digunakan Railink untuk melakukan proses rekonsiliasi settlement dengan pihak perbankan yang bekerja sama dengan PT Railink. <i>The application used by Railink to carry out the settlement reconciliation process with banks in collaboration with PT Railink.</i>	Commercial
9	Penerapan Teknologi Nifi dan Kafka <i>Implementation of Nifi and Kafka Technology</i>	Kemudahan data <i>management</i> <i>Ease data management process</i>	Teknologi yang digunakan dalam proses mengalirkan data <i>tap-in</i> dan <i>tap-out</i> penumpang dari gate ke server SOTC. <i>The technology used in the process of streaming passenger tap-in and tap-out data from the gate to the SOTC server.</i>	IT
10	PSO Online PT KCI	Kemudahan pelaporan dan verifikasi PSO <i>Ease the reporting and verification of PSO</i>	Aplikasi untuk mempermudah unit terkait dalam pelaporan dan Anev PSO. <i>Application to make it easier for related units in reporting and PSO Anev.</i>	PSO
11	E-Office Modul CTOD (Commuter Travel on Duty)	Kemudahan admin perjalanan dinas <i>Ease the administration of work travel</i>	Salah satu modul di e-Office untuk memfasilitasi administrasi pegawai KCI yang akan melakukan perjalanan dinas secara online. <i>One of the modules in the e-Office to facilitate KCI's employees to register their work travel through online administration.</i>	SDM HR
12	Self Assesment COVID-19	Untuk mengetahui potensi bahaya pada diri <i>To identify any potential health danger</i>	Aplikasi web sebagai wadah untuk pencatatan self- assesment gejala-gejala COVID-19 pada pegawai KCI sebelum berangkat kerja ke kantor. <i>The web application to record the self-assessment of COVID-19 symptoms for KCI's employees before going to work.</i>	Kesehatan Health
13	Pengembangan KRL Akses KRL Akses Development	Kemudahan customer <i>Ease of customers</i>	Menambahkan modul <i>booking</i> antrian di stasiun dalam rangka mencegah kerumunan orang di stasiun di masa Pandemi dan modul pengecekan Saldo KMT. <i>Added queue booking module at stations to prevent crowds at stations during the Pandemic and KMT Balance checking module.</i>	Pelayanan Services



No	Nama Aplikasi/ Sistem Name of the Application/ System	Tujuan Pembuatan Development Objective	Uraian Singkat Brief Description	Unit Pengguna User
14	Integrasi Fleet Sight dan CTrack <i>Integrating Fleet Sight and CTrack</i>	Kemudahan data management <i>Ease data management process</i>	Pengiriman data dari Server <i>Fleetsight</i> ke Server KCI dan Data sudah dapat ditampilkan pada <i>environment server development C-Track</i> . <i>Sending data from Fleetsight Server to KCI Server and the data can already be displayed on C-Track development server environment.</i>	IT
15	Pengembangan SOT <i>SOT Development</i>	<i>Compliance Bank Indonesia Compliance with Bank Indonesia</i>	Pengembangan Sistem Otomatisasi <i>Ticketing</i> yang sesuai dengan standar peraturan Bank Indonesia terutama dalam hal keamanan <i>password</i> dan kesesuaian lainnya. <i>Development of a Ticketing Automation System that complies with Bank Indonesia regulatory standards, especially in terms of password security and other compliance.</i>	Commercial dan IT <i>Commercial and IT</i>
16	Pengembangan Enkripsi Konfigurasi Gate <i>Gate Configuration Encryption Development</i>	<i>Troubleshoot gate</i>	Mengubah file konfigurasi di <i>gate</i> menjadi terenkripsi. <i>Change the configuration file at the gate to be encrypted.</i>	IT
17	Integrasi Antar Modal <i>Intermodal Integration</i>	<i>Sharing resources</i>	Penyesuaian aplikasi <i>E-Ticketing</i> agar terintegrasi dengan <i>E-Ticketing</i> KA Bandara milik PT Railink. <i>Adjustment of the E-Ticketing application to be integrated with PT Railink's Airport Train E-Ticketing.</i>	Commercial
18	Project Pengembangan Pembayaran E-Ticketing menggunakan QR Link Aja <i>E-Ticketing Payment Development Project using QR Link Aja</i>	Pengembangan QR code <i>QR Code development</i>	Pengembangan metode pembayaran atas transaksi yang terjadi di <i>E-Gate</i> dan <i>Commuter Vending Machine (CVIM)</i> menggunakan QR dengan metode <i>Customer Presented Mode (CPM)</i> dengan <i>Source-of-fund</i> mitra <i>online payment</i> yang bekerja sama dengan KCI. <i>Development of payment methods for transactions at E-Gate and Commuter Vending Machine (CVIM) using QR with Customer Presented Mode (CPM) method with Source-of-fund online payment partners in collaboration with KCI.</i>	Commercial



AKSES INFORMASI DAFTAR PEMEGANG SAHAM BULANAN, TRIWULANAN, DAN SEMESTER

Information Access on Monthly, Quarterly, and Semi-Annually Shareholders Register

Hingga 31 Desember 2020, Perseroan belum melakukan pencatatan saham di bursa efek, sehingga tidak terdapat informasi mengenai daftar pemegang saham bulanan, triwulanan, dan semester.

As of December 31, 2020, the Company has not listed any shares at stock exchange. Therefore, information about shareholders register of monthly, quarterly, and semi-annually are unavailable.

DAFTAR ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, DAN VENTURA BERSAMA

List of Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

Hingga 31 Desember 2020, KCI tidak memiliki entitas anak. Untuk entitas asosiasi, PT KCI bekerja sama dengan anak perusahaan lain dari induk perusahaan yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero), antara lain adalah PT Reska Multi Usaha, PT Railink, PT KA Pariwisata, PT Kereta Api Logistik (Kalog), dan PT KA Properti Manajemen. Untuk ventura bersama, PT KCI melakukan pembelian saham PT Finarya Karya Nusantara atau lebih dikenal dengan Link Aja!.

As of December 31, 2020, KCI has no subsidiaries associates, and joint ventures. For the associate entity, PT KCI is working with another subsidiary of the Company's holders, PT Kereta Api Indonesia (Persero), among others are PT Reska Multi Usaha, PT Railink, PT KA Pariwisata, PT Kereta API Logistik (Kalog), and PT KA Properti Manajemen. For the joint venture, PT KCI cooperate in the development of PT Finarya Karya Nusantara or better known as Link Aja!.



NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Name and Address of Capital Market Supporting Institutions and Professionals

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto dan Rekan (RSM Indonesia)
Plaza ASIA Level 10
Jln. Jenderal Sudirman Kav.59
Jakarta 12190, Indonesia
T: (021) 5140 1340
F: (021) 5140 1350

Jasa yang diberikan
Melaksanakan audit laporan keuangan.

Komisi
Rp3,712 Miliar (fee untuk keseluruhan KAI Group)

Periode Penugasan
1 tahun

PUBLIC ACCOUNTING FIRM

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto dan Rekan (RSM Indonesia)
Plaza ASIA Level 10
Jln. Jenderal Sudirman Kav.59
Jakarta 12190, Indonesia
T: (021) 5140 1340
F: (021) 5140 1350

Services
Conducted financial statement audit.

Fee
Rp3.712 billion (the fee was for the entire KAI Group)

Assignment Period
1 Year

NOTARIS

Hannywati Gunawan S.H.
Jl. Mangga Besar V no.10 RT.08/5
Kota Tua, Mangga Besar-Tamansari
Jakarta barat
T: (021) 6241822

Komisi
Komisi diberikan atas setiap pekerjaan yang diberikan sesuai dengan besaran tarif jasa notaris yang telah ditentukan.

Periode Penugasan
Berdasarkan kebutuhan Perseroan.

NOTARY

Hannywati Gunawan S.H.
Jl. Mangga Besar V no.10 RT.08/5
Kota Tua, Mangga Besar-Tamansari
West Jakarta
T: (021) 6241822

Fee
The commission is paid for each job proposed in accordance with the specified rate of service for the notary.

Assignment Period
Based on the Company's needs.

INFORMASI PADA WEBSITE PERSEROAN

Information on the Company's Website



Website resmi PT KCI bisa diakses di www.krl.co.id. Melalui website ini, PT KCI menyampaikan seluruh informasi-informasi terkait Perseroan yang ingin diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai komitmen untuk senantiasa menjalankan kinerja Perseroan secara transparan dan akuntabel, KCI menyediakan informasi yang dapat diakses oleh seluruh investor maupun pemangku kepentingan lainnya melalui situs resmi Perseroan yakni www.krl.co.id. Informasi yang ditampilkan dalam situs meliputi berbagai informasi relevan dan aktual mengenai sejarah dan profil Perseroan, pedoman dan kode etik serta Laporan Tahunan. Situs resmi KCI juga menampilkan informasi penting mengenai rute dan jadwal KRL, pelelangan, serta lowongan pekerjaan.

PT KCI's official website is accessible at www.krl.co.id. Through this website, PT KCI conveys all information related to the Company to the public.

As a commitment to always pose the Company's performance, transparently and in an accountable manner, KCI provides information that could be accessed by all stakeholders through the Company's official website, www.krl.co.id. The published information contains relevant and actual information about Company's history and profile, code of conducts and annual report. Official website of KCI also provides important information about EMU Commuter Line route and schedule, tender, and job vacancy.



Melalui website, pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi sebagai berikut:

1. TENTANG KAMI
 - a. Info Perusahaan
Berisi tentang sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, logo dan makna logo perusahaan, serta budaya perusahaan.
 - b. Tata Kelola Perusahaan
Berisi tentang berbagai upaya tata kelola perusahaan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* di antaranya mengenai GCG Code, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman *Whistleblowing System*, *Board Manual*, serta Kode Etik dan Etika Bisnis.
 - c. Laporan Tahunan
Berisi tentang laporan tahunan dan keuangan Perusahaan.
 - d. Direksi dan Komisaris
Berisi tentang biodata Direksi dan Komisaris Perusahaan.
2. LAYANAN
 - a. Info Pelanggan
Berisi tentang jadwal perjalanan KRL terupdate.
 - b. Saran dan Kritik
Berisi tentang saran dan kritik untuk KCI.
 - c. Layanan Pelanggan
Berisi tentang etika dan tata cara naik KRL.
3. PERJALANAN KRL
 - a. Peta Rute
Berisi tentang rute yang dilayani KRL.
 - b. Jadwal KRL
Berisi tentang jadwal KRL.
 - c. Info Tarif Perjalanan
Berisi tentang tarif perjalanan KRL.
4. PROCUREMENT
Berisi tentang informasi lelang.
5. INFORMASI TERKINI
Informasi mengenai berita terbaru tentang KCI sehingga para pemangku kepentingan dapat selalu mengikuti perkembangan terkini aktivitas Perseroan melalui website.
6. KARIER
Berisi tentang informasi lowongan pekerjaan.
7. SPACE IKLAN
Berisi tentang informasi untuk pemasangan iklan di KRL.

Through website, stakeholders could obtain the following information:

1. ABOUT US
 - a. Company Info
It contains company's history, company's vision and mission, logo and its meaning, and corporate culture.
 - b. Corporate Governance
It contains the efforts to implement Good Corporate Governance, namely GCG Code, Gratification Control Guidelines, Whistleblowing System Guidelines, Board Manual, as well as Code of Conduct and Business Ethics.
 - c. Annual Report
It contains annual and financial reports.
 - d. Board of Directors and Board of Commissioners
Contains biodata of Board of Directors and Board of Commissioners.
2. SERVICES
 - a. Customer Information
It contains the latest schedule of KRL's trip itinerary.
 - b. Suggestions and Critics
It contains suggestion and critics for KCI.
 - c. Customer Service
It contains the ethics and procedure of using KRL.
3. KRL's TRIP
 - a. Route Map
It contains the routes served by KRL.
 - b. KRL's Schedule
It contains the schedule of KRL.
 - c. Trip Fare Information
It contains the fare of KRL's trip.
4. PROCUREMENT
It contains the information about auction.
5. LATEST INFORMATION
Information about the latest information of KCI so as the stakeholders can always keep up the latest progress of Company's activities through the website.
6. CAREER
It contains the latest information about job vacancy.
7. SPACE FOR ADVERTISEMENT
It contains the information for advertising on KRL service.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Education and/or Training for the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

Nama Name	Jabatan Position	Program Pendidikan/ Pelatihan Education/Training Program	Waktu Time	Tempat Location	Penyelenggara Organizer
Dariyadi	Plt. Komisaris Acting Commissioner	Supply Chain Management	13 Maret 2020 March 13, 2020	Hotel Holiday Inn Bandung Pasteur	HC BUMN
Edy Widya	Komisaris Commissioner	Executive Education Direction Program	15-18 Desember 2020 December 15- 18, 2020	Online	Pertamina Training & Consulting
Djoko Paryoto	Anggota Komite Manajemen Risiko Member of Risk Management Committee	Supply Chain Management	13 Maret 2020 March 13, 2020	Online	Badan Standardisasi Nasional National Standardization Agency
Sofyan Hasan	Anggota Komite Manajemen Risiko Member of Risk Management Committee	Webinar Manajemen Risiko di Sektor Publik Risk Management in Public Sector Webinar	13 Mei 2020 May 13, 2020	Online	Badan Standardisasi Nasional National Standardization Agency
Bimo Poerwadi	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	Webinar Manajemen Risiko di Sektor Publik Risk Management in Public Sector Webinar	13 Mei 2020 May 13, 2020	Online	Badan Standardisasi Nasional National Standardization Agency
Johny Sudharmono	Anggota Komite Audit Member of Audit Committee	- Awareness SNI ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) - Awareness SNI ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management System) - Post COVID-19 Pandemic	- 12 Agustus 2020 - August 12, 2020 - 19 November 2020 - November 19, 2020	Online	Badan Standardisasi Nasional National Standardization Agency
Heriyanto Wibowo	Sekretaris Dewan Komisaris Secretary to the Board of Commissioner	Finance for Non Finance People	22 Agustus 2020 August 22, 2020	Online	PT Pratama Indomitra Konsultan



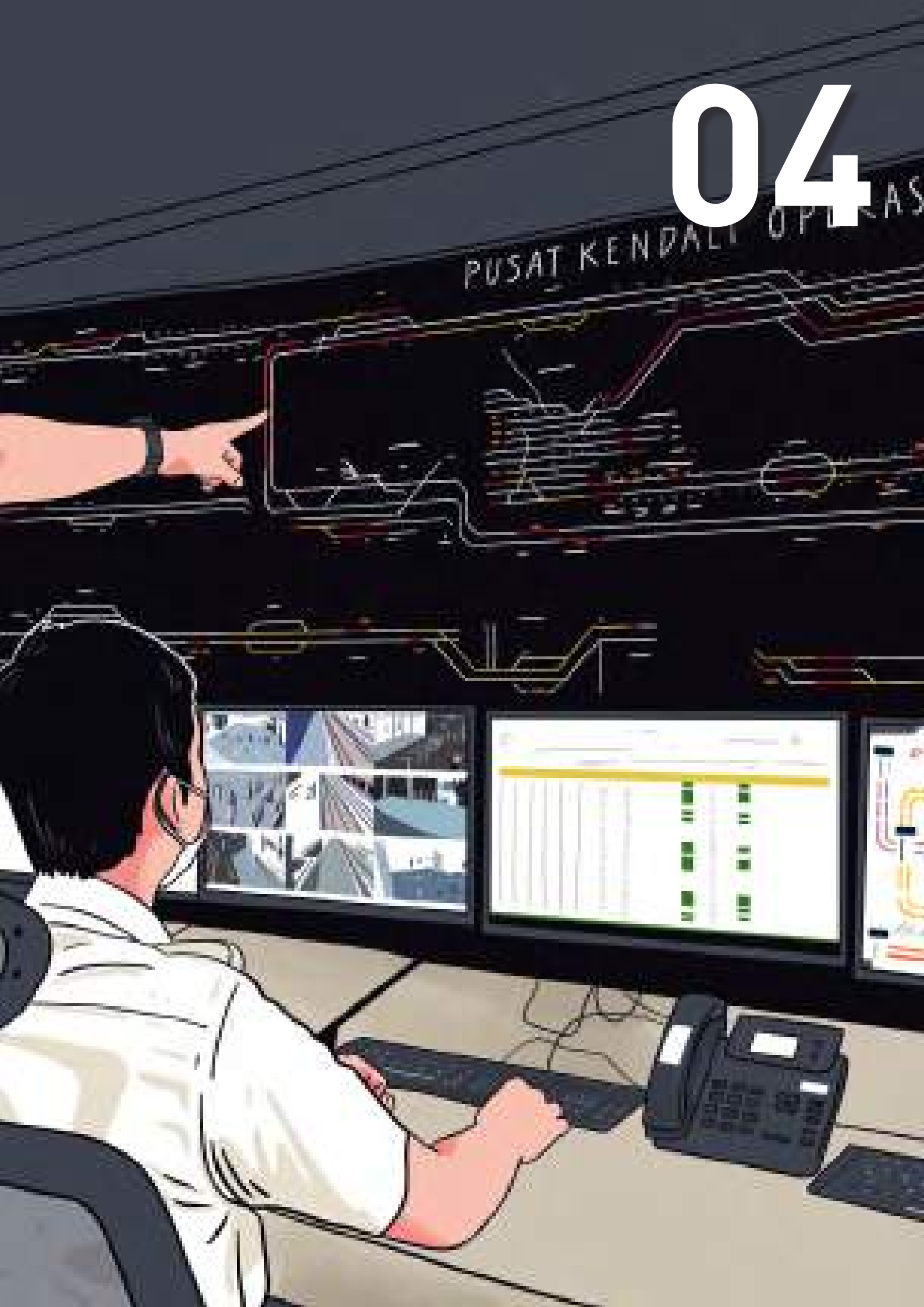
ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion & Analysis

- 174 **Kondisi Makroekonomi Indonesia dan Tinjauan Industri di 2020**
Macroeconomic Condition of Indonesia and Industry Overview in 2020
- 177 **Permintaan Produk Secara Nasional**
National Product Demand
- 179 **Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha**
Operating Overview Per Business Segment
- 181 **Tinjauan Kinerja Keuangan**
Financial Performance Review
- 198 **Kemampuan Membayar Utang**
Solvency
- 199 **Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal**
Capital Structure and Capital Structure Policy
- 200 **Investasi Barang Modal**
Capital Investment
- 202 **Perbandingan antara Target pada Awal Tahun Buku Dengan Hasil yang Dicapai (Realisasi), dan Target atau Proyeksi yang Ingin Dicapai untuk Satu Tahun Mendatang**
Comparison between Targets at Beginning of Fiscal Year with Achievement (Realization) and Target or Projection for Next Year
- 202 **Key Performance Indicator**
Key Performance Indicator
- 203 **Tingkat Kesehatan Perusahaan**
Company Soundness Level
- 203 **Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar**
Marketing Aspect and Market Share
- 204 **Rencana Realisasi Pengembangan Strategis Bisnis 2021**
Business Strategic Realization Plan in 2021
- 205 **Prospek Usaha**
Business Prospect
- 206 **Prospek Industri Masa Depan**
Future Industry Prospects
- 208 **Informasi Material Terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal**
Material Information Related to the Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition or Restructuration of the Debt/ Capital
- 208 **Kebijakan Dividen**
Dividend Policy
- 209 **Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen yang Dilaksanakan Perseroan (ESOP/MSOP)**
Employee and/or Management Stock Option Plan (ESOP/MSOP)
- 209 **Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum**
Realization of Public Offering Proceeds
- 209 **Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi**
Material Information with Conflict of Interest and/or Transaction with Affiliated Party
- 212 **Saldo dan Transaksi Signifikan dengan Pihak Berelasi**
Significant Balance and Transaction with Related Parties
- 213 **Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan**
Change in Regulation with Significant Impact to the Company
- 214 **Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perseroan pada Tahun Buku Terakhir**
Changes in Accounting Policy Implemented in Current Fiscal Year
- 216 **Informasi Keberlangsungan Usaha**
Information on Business Continuity



04





KONDISI MAKROEKONOMI INDONESIA DAN TINJAUAN INDUSTRI DI 2020

Macroeconomic Condition of Indonesia and Industry Overview in 2020



Tahun 2020 merupakan periode yang penuh tantangan bagi seluruh negara di dunia hal ini dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 yang bermula dari Kota Wuhan, Tiongkok, kemudian menyebar dengan luas dan cepat termasuk ke Indonesia. Pandemi COVID-19 mengubah tatanan perilaku serta berdampak melemahkan perekonomian Indonesia, hal tersebut sebagai akibat dari pembatasan aktivitas ekonomi dan pembatasan kegiatan sosial di masyarakat.

Tekanan pertumbuhan ekonomi mulai terjadi pada Triwulan III-2020 dan -2,07% pada Triwulan IV-2020. Nilai tukar Rupiah sempat mengalami tekanan hingga mencapai Rp16.495 pada bulan April 2020, namun menjelang akhir tahun 2020 nilai tukar Rupiah terhadap USD menunjukkan pemulihan ke level sebelum pandemi, yaitu sebesar Rp14.050 dan terus stabil. Perlambatan aktivitas ekonomi yang signifikan tercermin dari laju inflasi sepanjang tahun 2020 yang tercatat menurun hingga 1,69% year-on-year (YoY) dibandingkan dengan inflasi tahun 2019 sebesar 2,59% (YoY).

Year 2020 was significantly challenging for all countries in the world. It all started in the city of Wuhan, China, the COVID-19 pandemic was then spread rapidly all across the world, including to Indonesia. This pandemic has changed public's behavior and weakened Indonesia's economy due to the restrictions on economic and social activities.

Economic growth pressures began to occur in Quarter III-2020 and closed at -2.07% in Quarter IV-2020. The Rupiah exchange rate was pressed to Rp16,495 in April 2020 and slowly recovering to pre-pandemic levels, which was Rp14,050 by the end of 2020. The significant slowdown in economic activity was reflected in the inflation rate throughout 2020, which was recorded to decline by 1.69% year-on-year (YoY) compared to 2.59% (YoY) in 2019.



Selain tren inflasi yang menurun, pelemahan aktivitas ekonomi di Indonesia menyebabkan penurunan akan permintaan barang impor, hal ini memicu neraca perdagangan dalam negeri sepanjang periode 2020 mengalami surplus cukup tinggi yaitu mencapai USD21,75 miliar, tentu saja hal ini jauh lebih baik daripada neraca perdagangan di tahun 2019 yang mengalami defisit sebesar minus USD3,59 miliar.

In addition to the downward trend in inflation, the weakening economic activity in Indonesia led to lower demand of imported goods. This triggered the domestic trade balance to a high surplus, reaching USD21.75 billion. This figure is far higher than the trade balance in 2019, which recorded a deficit of minus USD3.59 billion.

Ekonomi Indonesia Indonesia's Economy

Indikator Indicator	2020	2019	2018	2017
Pertumbuhan Ekonomi PDB (%) GDP Economic Growth	(2,07)	5,02	5,17	5,07
Nominal PDB (USD Miliar) GDP Nominal (USD Billion)	1.059,30	1.119,13	1.042,68	1.015,29
PDB/Kapita (USD) GDP/Capital (USD)	3.917	4.192	3.945,29	3.885
Neraca Perdagangan (USD Miliar) Trade Balance (USD Billion)	21,75	(3,59)	(8,7)	18,81
Suku Bunga Acuan (%) Net Interest Rate (%)	3,75	5,00	6,00	4,25
Inflasi (%) Inflation (%)	1,69	2,59	3,13	3,61

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia
Source: Central Bureau of Statistics, Ministry of Finance, Bank Indonesia

Kondisi pemulihan ekonomi Indonesia berangsur-angsur membaik dengan adanya kehadiran secara bertahap vaksin COVID-19 yang memiliki tingkat efektivitas tinggi seperti Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna sehingga dapat memberikan sentimen positif bagi perkembangan ekonomi serta dapat memulihkan kondisi jasa transportasi di Indonesia.

Indonesia's economy gradually recovering along with the presence of COVID-19 vaccines that have a high level of effectiveness such as Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, and Moderna. It provided positive sentiments for economic development and restored the transportation service condition in Indonesia.

Tinjauan Industri

Pandemi COVID-19 yang terdeteksi di Indonesia sejak Maret 2020 memiliki dampak signifikan terhadap kinerja industri jasa transportasi secara keseluruhan. Berkaitan dengan hal tersebut, penurunan volume penumpang PT KCI terdampak signifikan sebesar -54% pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Industry Overview

The COVID-19 pandemic in Indonesia was first detected on March 2020 and significantly affected the overall performance of transportation service industry. Thus, PT KCI recorded a significant decrease in passengers' volume, down by 54% compared to 2019.



No	Bulan	Volume Penumpang/Passengers Volume							%			
		Realisasi KRL 2019	RKAP Revisi 2020			Realisasi 2020			(7:4)	(8:5)	(9:3)	(9:6)
			KRL	KA LOKAL	TOTAL	KRL	KA LOKAL	TOTAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Januari January	27.767.522	26.732.824		26.732.824	26.732.800		26.732.800	100%		96%	100%
2	Februari February	25.305.397	25.616.046		25.616.046	25.616.036		25.616.036	100%		101%	100%
3	Maret March	28.366.448	18.552.076		18.552.076	18.552.076		18.552.076	100%		65%	100%
Jumlah TW 1 Total 1 st Quarter		81.439.367	70.900.946		70.900.946	70.900.912		70.900.912	100%		87%	100%
4	April April	28.061.755	5.137.541		5.137.541	5.137.541		5.137.541	100%		18%	100%
5	Mei May	28.540.122	5.076.605		5.076.604	5.076.604		5.076.604	100%		18%	100%
6	Juni June	25.816.361	8.591.419		8.591.419	8.591.419		8.591.419	100%		33%	100%
Jumlah TW II Total 2 nd Quarter		82.418.238	18.805.564		18.805.564	18.805.564		18.805.564	100%		23%	100%
7	Juli July	29.715.282	11.039.186		11.039.186	11.115.920		11.115.920	101%		37%	101%
8	Agustus August	27.650.765	10.933.657		10.933.657	11.013.659		11.013.659	101%		40%	101%
9	September September	28.293.437	9.607.105		9.607.105	9.677.782		9.677.782	101%		34%	101%
Jumlah TW III Total 3 rd Quarter		85.659.484	31.579.948		31.579.948	31.807.361		31.807.361	101%		37%	101%
10	Oktober October	29.334.105	8.292.357	446.842	8.739.199	10.127.718	238.700	10.366.418	122%	53%	35%	119%
11	November November	28.563.207	8.091.111	493.838	8.584.949	11.621.800	277.445	11.899.245	144%	56%	42%	139%
12	Desember December	28.859.942	8.390.157	582.291	8.972.448	11.329.531	269.596	11.599.127	135%	46%	40%	129%
Jumlah TW IV Total 4 th Quarter		86.757.245	24.773.625	1.522.971	26.296.596	33.079.049	785.741	33.864.790	134%	52%	39%	129%
Tahunan		336.274.343	146.060.083	1.522.971	147.583.053	154.592.886	785.741	155.378.627	106%	52%	46%	105%

Sumber: Laporan Manajemen Tahunan, 2020
Source: Management Report, 2020

Strategi yang dapat dilakukan oleh industri jasa transportasi angkutan komuter dalam rangka merespon ketidakpastian yang masih terjadi ke depannya, adalah tetap melakukan operasional KRL dengan tetap memperhatikan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian transportasi perkeretaapian dalam masa adaptasi kebiasaan baru yaitu Surat Edaran Kementerian Perhubungan No.14 Tahun 2020.

To respond the potential uncertainties in the future, the commuter transportation service industry continues to carry out KRL operations by implementing the guidelines and technical instructions for controlling rail transportation during the adaptation of new normal period as enacted through Circular Letter of the Ministry of Transportation No.14 Year 2020.



PERMINTAAN PRODUK SECARA NASIONAL

National Product Demand

Sistem transportasi kereta komuter merupakan ide untuk meringankan tingkat kemacetan jalan dan mengurangi polusi di kota meskipun hanya memberikan solusi jangka pendek. Untuk mengurangi kemacetan dan polusi, diperlukan pendekatan holistik untuk mengatasi akar penyebab seperti menetapkan tarif jalan (*road fares*). Meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan adalah kunci untuk mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kereta komuter. Dengan menggunakan KRL, penumpang dapat mengurangi waktu perjalanan mereka sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi *generalised cost* penumpang secara umum.

Kereta api komuter juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi produktivitas dan peluang untuk menciptakan inklusi sosial dengan menggerakkan orang. Hal ini mendukung kemampuan individu atau keluarga untuk mengakses peluang ekonomi dan pekerjaan, pendidikan, fasilitas kesehatan, rekreasi, olahraga, dan kegiatan sosial lainnya. Dengan memperluas layanan di kota-kota lain, nilai kawasan komersial dan residensial dapat menjadi lebih tinggi ketika properti berlokasi dekat dengan stasiun kereta komuter.

Commuter rail transportation system is an idea to reduce road congestion level and city pollution despite its short-term effects. To reduce congestion and pollution, a holistic approach is needed to address the root causes such as setting road fares. Improving service efficiency and quality is the key to encourage the community to switch from private vehicles to commuter trains. By using KRL, passengers can reduce their travel time thereby increasing productivity and reducing passenger cost in general.

Commuter train also holds an important role in facilitating productivity and opportunities to create social inclusion by mobilizing people. It supports the ability of individuals or families to access economic opportunities including employment, education, health facilities, recreation, sports, and other social activities. By expanding services to other cities, the existence of commuter train station will also increase the value of commercial and residential areas.



KCI diharapkan berkembang untuk dapat mengoperasikan dan mengelola kereta komuter di kawasan perkotaan Indonesia lainnya. Transportasi komuter perkotaan berpotensi untuk dikembangkan di beberapa kota seperti Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya di mana studi pendahuluan telah dilakukan. Beberapa layanan KA Lokal, yaitu layanan kereta api komuter atau antarkota dengan jarak dekat hingga menengah yang berada di bawah pengelolaan KAI, direncanakan akan dikelola oleh KCI. Seperti kereta api relasi Kutoarjo-Yogyakarta-Solo (KA Prambanan Ekspres) di mana pemerintah sedang mempersiapkan infrastruktur elektrifikasi jalur KRL, dan relasi Rangkasbitung-Merak (KA Lokal Merak).

Selain itu Pemerintah Indonesia memiliki visi untuk mengembangkan sistem kereta api perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi yang berbeda. Kebutuhan untuk kereta api perkotaan di Indonesia diidentifikasi atas dasar bahwa penyediaan layanan harus tersedia di kota-kota besar dengan populasi yang telah mencapai lebih dari tiga juta atau pergerakan/mobilitas masyarakat di perkotaan sudah memerlukan angkutan umum berbasis rel. Berikut merupakan proyeksi pengembangan kereta api perkotaan.

KCI aspires to operate and manage commuter trains in other Indonesian urban areas. Urban commuter transportation has the potential to be developed within several cities such as Yogyakarta, Bandung and Surabaya, where preliminary studies have been carried out. KCI has been planning to manage several local train services, namely commuter or intercity train services with close to medium range under KAI management, such as Kutoarjo-Yogyakarta-Solo railroad (Prambanan Ekspres train). In these regions, the government is currently preparing electrification infrastructure for KRL line, and connecting train for Rangkasbitung-Merak (Merak Local Train).

Moreover, Indonesia's Government has a vision to develop an urban rail system that is integrated with different transportation modes. The need for urban rail in Indonesia is identified on the basis that the provision of services shall be available in big cities with more than three million populations in which their movement/mobility requires railbased public transportation. The following is a projection of urban railroad development.

Kota City	Panjang Rel (km) Rail Length (km)	Tahun Pembangunan Development Year
Wilayah Jawa-Bali Java-Bali Region		
Jabodetabek	900	2010-2025
Bandung	100	2015-2025
Surabaya	420	2015-2025
Semarang	240	2020-2025
Yogyakarta	80	2020-2025
Malang	140	2025
Denpasar	150	2025
Non Jawa-Bali Outside Java-Bali		
Medan	240	2020-2025
Palembang	240	2020-2025
Pekanbaru	370	2025
Padang	340	2025
Bandar Lampung	180	2020-2025
Makassar	170	2020-2025
TOTAL	3.700	

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Operating Overview Per Business Segment

Pandemi COVID-19 melanda di hampir seluruh negara di dunia yang secara langsung mengancam keselamatan jiwa serta berdampak secara signifikan terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat termasuk pada memburuknya kondisi perekonomian global, termasuk perekonomian Indonesia. Pandemi COVID-19 memaksa negara-negara yang terinfeksi untuk melakukan karantina baik dalam skala besar (nasional) maupun lokal (regional) yang berakibat pada melambatnya aktivitas ekonomi yang tercermin pada tingkat pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -4,3%, jauh menurun dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yang sebesar 2,9%.

Kondisi serupa juga dialami Indonesia yang tergambar dari penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dari 5,02% pada tahun 2019 menjadi -2,07% di tahun 2020 dimana angka kontraksinya hampir serupa dengan angka kontraksi perekonomian global (sekitar -7%). Dampak terhadap perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19 secara signifikan dirasakan juga di DKI Jakarta yang notebenanya merupakan pusat ekonomi nasional. Dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, secara signifikan menurunkan tingkat mobilitas masyarakat baik untuk tujuan aktifitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.

The COVID-19 pandemic hit almost all countries in the world. It directly threatens life safety and significantly affects all aspects of people's lives, including the worsening of global's and Indonesia's economic conditions. The COVID-19 pandemic forced infected countries to impose quarantine policy both on a large (national) and local (regional) scale. It resulted in economic slowdown as reflected in the global economic growth rate in 2020 which contracted by -4.3%, significantly decreased compared to 2.9% in 2019.

Indonesia also experienced similar conditions as illustrated by the decline in the national economic growth rate from 5.02% in 2019 to -2.07% in 2020. The contraction rate was almost similar to the global economic contraction rate (around -7%). The impact of COVID-19 pandemic on the national economy was also significantly felt in DKI Jakarta, the center of the national economy. The enactment of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy in DKI Jakarta area and its surroundings has significantly reduced the level of community mobility both for the economic and social activities purpose.

Segmen Angkutan Penumpang dan Subsidi Pemerintah (PSO)

Passenger Transport Segment and Government Subsidy (PSO)/Public Service Obligation Subsidy

Di tengah berbagai kondisi yang penuh dengan tantangan tersebut, Perseroan tetap mampu mencatatkan kinerja dan prestasi yang membanggakan di sepanjang tahun 2020. Volume penumpang pada Tahun 2020 tercapai sebesar 105% dibandingkan dengan program, dengan rincian sebagai berikut:

- Volume penumpang KRL tercapai sebesar 106% dari program.
- Volume penumpang KA lokal tercapai 52% dari program, hal ini disebabkan realisasi KM-KA Lokal terealisasi sebesar 89%, dikarenakan terdapatnya program KA Lokal Merak yang awalnya diprogramkan sebanyak 12 KA perhari terealisasi sebanyak 8 KA perhari.

In the midst of various challenging conditions, the Company managed to record excellent performance and achievements throughout 2020. Passenger volume in 2020 was achieved 105% of the program, as described below:

- The volume of KRL passengers reached 106% of the program.*
- The volume of local train passengers reached 52% of the program. This was due to the realization of 89% Local KM-KA, as the Merak Local Train program was realized at 8 trains per day from the targeted 12 trains per day.*



- c. Realisasi Volume penumpang KRL dan KA lokal tercapai sebesar 105% dari program.

KM penumpang pada Tahun 2020 tercapai sebesar 105% dibandingkan dengan program, dengan rincian sebagai berikut:

- KM penumpang KRL tercapai sebesar 107% dari program.
- KM penumpang KA lokal tercapai 44% dari program.
- Volume KA Lokal terealisasi sebesar 52%, dikarenakan terdapatnya program KA Lokal Merak yang awalnya diprogramkan sebanyak 12 KA perhari terealisasi sebanyak 8 KA perhari.
- Realisasi KM penumpang KRL dan KA lokal tercapai sebesar 105% dari program.

Okupansi dinamis pada tahun 2020 tercapai sebesar 103% dari program, hal ini disebabkan ketercapaian:

- KM Penumpang tercapai 105% dibandingkan dengan program.
- KM Tempat duduk (KM-TD) tercapai 102% dibandingkan dengan program.

- c. The volume of KRL and local train passengers reached 105% of the program.

Passengers' KM in 2020 reached 105% of the program, with details as follows:

- Train passengers' KM reached 107% of the program.
- Local train passengers' KM reached 44% of the program.
- Local train volume reached 52%, as the Local Merak Train program was realized at 8 trains per day from the targeted 12 trains per day.
- The realization of passengers' KM for KRL and local trains reached 105% of the program.

Dynamic occupancy in 2020 reached 103% of the program, due to:

- Passenger' KM achieved 105% of the program.
- Seating's KM (KM-TD) achieved 102% of the program.

Segmen Non Angkutan Penumpang dan Pendukung Angkutan KA

Non Passenger and Train Supporting Segments

Pendapatan non angkutan penumpang berasal dari sewa space iklan di KRL, sharing infrastructure dan penjualan c-corner. Pendapatan pendukung angkutan KA berasal dari THB dan penjualan perdana KMT.

Pada tahun 2020 realisasi pendapatan non angkutan penumpang dan pendukung angkutan KA sebesar Rp81.978.471.905 atau sebesar 72% terhadap program. Pendapatan non angkutan penumpang dan pendukung ini terdiri dari:

- Pendapatan sewa space iklan di KRL sebesar Rp46.076.496.805.
- Pendapatan sharing infrastructure sebesar Rp11.203.434.730.
- Pendapatan atas penjualan KMT dan THB sebesar Rp23.991.085.450.
- Pendapatan penjualan c-corner sebesar Rp38.123.282.
- Pendapatan tenant akses sebesar Rp58.363.638.
- Pendapatan sewa KRL sebesar Rp432.000.00.
- Pendapatan suplesi dan penalty sebesar Rp178.958.000.

Jika dibandingkan tahun 2019 pendapatan non angkutan penumpang dan pendukung angkutan KA tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 52%.

Non-passenger revenue was derived from advertisement space rentals on KRL, infrastructure sharing and c-corner sales. Meanwhile, the train supporting revenue derived from THB and the initial sale of KMT.

In 2020, the realization of non-passenger and train supporting revenue was Rp81,978,471,905 or 72% of the program. This non-passenger and supporting revenue consists of:

- Advertisement space rental revenue of Rp46,076,496,805.
- Infrastructure sharing revenue of Rp11,203,434,730.
- Revenue from the sale of KMT and THB of Rp23,991,085,450.
- C-corner sales revenue of Rp38,123,282.
- Tenant access revenue of Rp58,363,638.
- KRL rental revenue of Rp432,000.00.
- Supply and penalty revenue of Rp178.958.000.

When compared to 2019, the revenue from non-passenger and supporting train transportation segment was decreased by 52% in 2020.

Segmen Lain-Lain

Other Segments

Pendapatan lain-lain terdiri dari pendapatan bunga, jasa giro dan denda kepada vendor. Realisasi pendapatan lain-lain pada tahun 2020 sebesar Rp65,521 miliar atau meningkat 118% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp54,696 miliar.

Secara keseluruhan, pada tahun 2020 pendapatan lain-lain terealisasi sebesar 788% jika dibandingkan dengan program, hal ini disebabkan kenaikan nilai wajar investasi pada kepemilikan saham PT Fintek Karya Nusantara dan penggantian dari pemerintah atas PSO tahun 2019.

Other revenue consists of interest income, current account and fines to vendors. Realization of other revenue in 2020 was Rp65.521 billion, increased by 118% compared to Rp54.696 billion in 2019.

Overall, other revenue in 2020 was realized by 788% of the target. This was due to the increase in the fair value of investment in PT Fintek Karya Nusantara and the government's replacement to the 2019 PSO.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Review

Perseroan berhasil mencatatkan kinerja keuangan positif seiring keberhasilan manajemen dalam memetakan tantangan dan mengambil langkah cepat dalam penanganan COVID-19. Ditengah kondisi pertumbuhan industri transportasi yang lemah, KCI berhasil mencatatkan pencapaian pendapatan bersih sebesar Rp77,685 miliar atau 193% dari yang ditargetkan.

The Company managed to record positive financial performance. This was inseparable from the management's success in mapping challenges and executing adaptive measures in handling COVID-19. In the midst of weak transportation industry growth conditions, KCI managed to record a net profit of Rp77,685 billion or achieving 193% of the target.





ASET

Asset

Pada tahun 2020, jumlah aset Perseroan tercatat sebesar Rp1.835,205 miliar, terbagi menjadi 51,04% aset lancar dan 48,96% aset tidak lancar, mengalami kenaikan Rp16,863 miliar atau 0,93% dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp1.818,342 miliar. Kenaikan jumlah aset Perseroan ini seiring dengan kenaikan aset lancar sebesar Rp4,513 miliar atau 0,48% dan kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp12,349 miliar atau 1,39%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya, dan biaya dibayar di muka.

In 2020, the Company's total assets was amounted to Rp1,835.205 billion, divided into 51.04% current assets and 48.96% non-current assets. It increased by Rp16.863 billion or 0.93% from Rp1,818.342 billion in the previous year. The increase in the Company's total assets conformed with the increase in current assets of Rp4.513 billion or 0.48% and the increase in non-current assets of Rp12.349 billion or 1.39%. This was mainly due to the increase in cash and cash equivalents, restricted funds and prepaid expenses.

Tabel Aset Tahun 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016

Table of Asset 2020, 2019, 2018, 2017, and 2016

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Aset Assets	2020	2019	2018	2017	2016	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
						Selisih Difference	%
Aset Lancar Current Assets							
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	611.613	461.073	420.118	639.322	517.985	150.540	32,65%
Dana Dibatasi Penggunaannya Restricted Funds	124.272	112.584	65.869	70.329	45.527	11.688	10,38%
Piutang Usaha Trade Receivables							
Pihak Berelasi dan Intercompany Related Parties and Intercompany	61.684	65.048	86.676	182.163	129.723	(3.363)	(5,17%)
Pihak Ketiga Third Parties	8.395	42.065	1.724	8.108	3.083	(33.669)	(80,04%)
Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Assets	917	1.721				(803)	(46,67%)
Persediaan Inventory	115.798	149.499	77.195	33.725	29.977	(33.700)	(22,54%)
Uang Muka Advances	201	226	207	1.320	996	(25)	(11,19%)
Biaya Dibayar di muka Prepaid Expenses	13.709	203	275	75	-	13.506	6657,52%
Pajak Dibayar di muka Advance Tax	-	99.432	99.380	0	-	(99.432)	(100,00%)

Aset Assets	2020	2019	2018	2017	2016	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
						Selisih Difference	%
Pendapatan Masih Harus Diterima <i>Accrued revenues</i>	13	241	1.031	386.940	149.475	(227)	(94,52%)
Jumlah Aset Lancar <i>Total Current Assets</i>	936.606	932.093	752.646	1.322.137	876.987	4.513	0,48%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets							
Aset Pajak Tangguhan <i>Deferred Tax Assets</i>	70.336	92.922	135.605	28.404	13.457	(22.585)	(24,31%)
Aset Tetap <i>Fixed Assets</i>	770.923	781.838	674.671	619.298	533.575	(10.914)	(1,40%)
Aset Tak Berwujud <i>Intangible Assets</i>	2.595	3.894	6.899	3.415	5.123	(1.297)	(33,33%)
Aset Hak Guna <i>Right of Use Assets</i>	1.664	-	-	-	-	1.664	100,00%
Investasi Jangka Panjang <i>Long Term Investment</i>	53.080	7.596	-	-	-	45.483	598,73%
Aset Lain-lain <i>Other Assets</i>	0.0004	0.0004	0.0004	19.983	55.261	0	0,00%
Jumlah Aset Tidak Lancar <i>Total Noncurrent Assets</i>	898.599	886.250	817.175	671.101	607.416	12.349	1,39%
Jumlah Aset <i>Total Assets</i>	1.835.205	1.818.342	1.569.821	1.993.238	1.484.403	16.863	0,93%

Total Aset
Total Assets





Aset Lancar

Aset lancar naik 0,48% atau Rp4,513 miliar dari tahun 2019 sebesar Rp932,093 miliar menjadi sebesar Rp936,606 miliar pada tahun 2020. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp150,540 miliar atau 32,65% dari tahun 2019 sebesar Rp461,073 miliar menjadi sebesar Rp611,613 miliar pada tahun 2020. Kenaikan pada kas dan setara kas ini disebabkan oleh meningkatnya arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu adanya fasilitas KMK di tahun 2020. Selain itu, kenaikan ini juga dikompensasikan dengan penurunan piutang usaha sebagai berikut:

1. Piutang Usaha Pihak Ketiga sebesar Rp33,669 miliar atau 80,04% dari tahun 2019.
2. Pajak Dibayar di Muka sebesar Rp99,432 miliar atau 100% dari tahun 2019, karena adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2019.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar meningkat 1,39% atau sebesar Rp12,349 miliar dibandingkan tahun 2019 dari sebesar Rp886,250 miliar menjadi Rp898,599 miliar pada tahun 2020. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan investasi jangka panjang sebesar Rp45,483 miliar atau 598,73% dari tahun 2019 karena penilaian kembali nilai investasi PT Finarya. Kenaikan ini dikompensasikan dengan penurunan:

1. Aset Pajak Tangguhan sebesar Rp22,585 miliar atau 24,31% dari tahun 2019.
2. Aset Tetap sebesar Rp10,914 miliar atau 1,40% dari tahun 2019 karena pengurangan kegiatan investasi di tahun 2020.

Current Assets

Current assets increased by 0.48% or Rp4.513 billion from Rp932.093 billion in 2019 to Rp936.606 billion in 2020. This increase was due to an increase in cash and cash equivalents of Rp150.540 billion or 32.65% from Rp461.073 billion in 2019 to Rp611.613 billion in 2020. The increase in cash and cash equivalents was due to an increase in cash flows from financing activities due to KMK facility in 2020. In addition, this increase was also compensated by a decrease in business receivables as follows:

1. Third Party Accounts Receivable amounting to Rp33.669 billion or 80.04% from 2019.
2. Prepaid Tax of Rp99.432 billion or 100% from 2019, due to the refund of the 2019 corporate income tax overpayment.

Non-Current Assets

Non-current assets increased by 1.39% or Rp12.349 billion compared to 2019 from Rp886.250 billion to Rp898.599 billion in 2020. This increase was due to an increase in long-term investment of Rp45.483 billion or 598.73% from 2019 due to the reassessment of PT Finarya's investment value. This increase is compensated by a decrease in:

1. Deferred Tax Assets amounting to Rp22.585 billion or 24.31% from 2019.
2. Fixed Assets of Rp10.914 billion or 1.40% from 2019 due to a reduction in investment activities in 2020.

LIABILITAS

Liability

Jumlah liabilitas Perseroan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp805,752 miliar, terbagi menjadi 59,96% liabilitas jangka pendek dan 40,04% liabilitas jangka panjang. Liabilitas mengalami penurunan Rp18,937 miliar atau 2,30% dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp824,691 miliar. Penurunan jumlah liabilitas Perseroan ini sebagian besar dikarenakan penurunan pada jumlah liabilitas jangka pendek.

The Company's total liabilities in 2020 were recorded at Rp805.752 billion, divided into 59.96% short-term liabilities and 40.04% long-term liabilities. It decreased by Rp18.937 billion or 2.30% compared to Rp824.691 billion in the previous year. The decrease in the Company's total liabilities was largely due to the lower short-term liabilities.

Tabel Aset Liabilitas 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016

Table of Liabilities 2020, 2019, 2018, 2017, and 2016

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Liabilitas <i>Liabilities</i>	2020	2019	2018	2017	2016	Kenaikan/(Penurunan) <i>Increase/(Decrease)</i>	
						Selisih <i>Difference</i>	%
Liabilitas Jangka Pendek <i>Current Liabilities</i>							
Utang Usaha <i>Account Payables</i>							
Pihak Berelasi dan Intercompany <i>Related Parties and Intercompany</i>	8.901	22.658	64.801	47.853	29.959	(13.755)	(60,71%)
Pihak Ketiga <i>Third Parties</i>	87.493	202.707	181.614	91.909	96.646	(115.214)	(56,84%)
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya <i>Other Short Term Liabilities</i>	7.091	7.499	8.826	11.301	14.417	(408)	(5,44%)
Beban Akrual <i>Accrued Expenses</i>	130.228	103.674	221.115	79.651	49.987	26.554	25,61%
Utang Pajak <i>Taxes Payables</i>	12.609	17.685	24.430	112.312	26.268	(5.075)	(28,70%)
Pendapatan Diterima di muka <i>Unearned Revenues</i>	69.729	92.947	57.271	69.362	59.729	(23.217)	(24,98%)
Utang Bank Jangka Pendek <i>Short Term Bank Loans</i>	100.000	-	-	-	-	100.000	100,00%
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun <i>Current Maturities of Long-term Loans</i>	44.581	70.439	30.806	30.806	37.343	(25.857)	(36,71%)



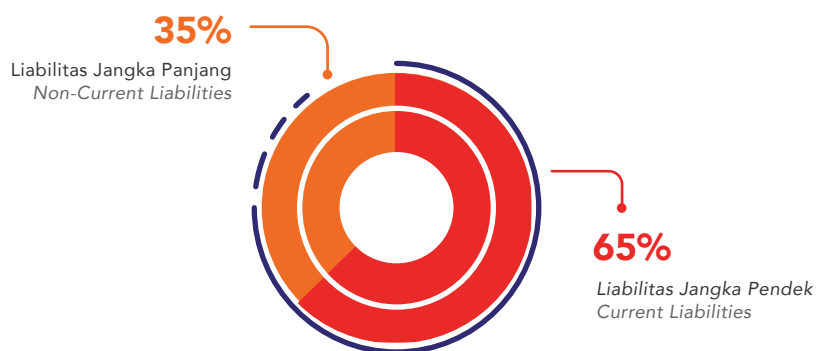
Liabilitas <i>Liabilities</i>	2020	2019	2018	2017	2016	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
						Selisih Difference	%
Liabilitas Sewa <i>Lease Liability</i>	729	-	-	-	-	729	100,00%
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek <i>Short-term Employee Benefits Liability</i>	21.737	122.687	64.157	103.563	44.247	(100.950)	(82,28%)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek <i>Total Current Liabilities</i>	483.102	640.297	653.020	546.757	358.596	(157.194)	(24,55%)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities							
Liabilitas Jangka Panjang Setelah dikurangi yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun <i>Long Term Debt Net of Current Maturity</i>							
Utang Bank <i>Bank Loan</i>	304.264	180.675				123.588	68,40%
Liabilitas Sewa <i>Lease Liability</i>	796	-				796	100,00
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang <i>Long Term Employee Benefits Liabilities</i>	17.590	3.718	5.130	4.404	3.621	13.872	373,11%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang <i>Total Non-Current Liabilities</i>	322.650	184.394	174.968	146.425	176.448	138.256	74,98%
Jumlah Liabilitas <i>Total Liabilities</i>	805.752	824.691	827.988	693.182	535.044	(18.937)	(2,30%)

Total Liabilitas
Total Liabilities



Komposisi Liabilitas 2020

Liabilities Composition in 2020



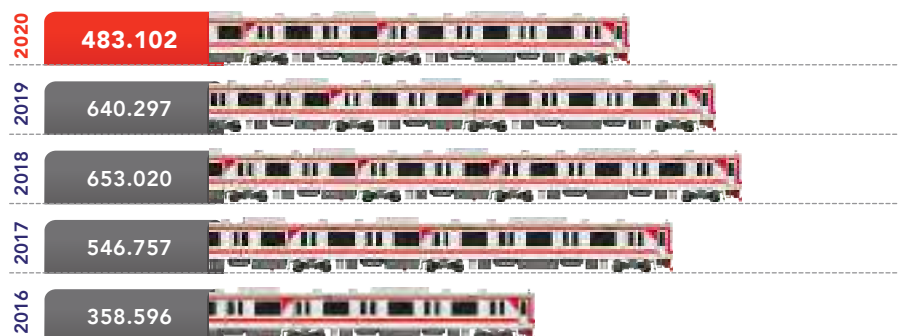
Liabilitas Jangka Panjang

Non-Current Liabilities



Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities





Liabilitas Jangka Pendek

Terjadi penurunan pada liabilitas jangka pendek sebesar 24,55% atau Rp100,950 miliar dari tahun 2019 sebesar Rp640,297 miliar menjadi sebesar Rp483,102 miliar di tahun 2020. Adapun penurunan ini disebabkan oleh:

1. Penurunan Liabilitas Jangka Pendek Pihak Ketiga sebesar Rp115,214 miliar atau 56,84% dari tahun 2019.
2. Penurunan Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp23,217 miliar atau 24,98% dari tahun 2019 karena terdapat penurunan pendapatan diterima di muka atas sewa space iklan.
3. Kenaikan Utang Bank Jangka Pendek sebesar Rp100,000 miliar atau 100% dari tahun 2019 karena terdapat penambahan fasilitas KMK.
4. Penurunan Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun sebesar Rp25,857 miliar atau 36,71% dari tahun 2019.
5. Penurunan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek sebesar Rp100,950 miliar atau 82,28% dari tahun 2019 karena penurunan biaya pegawai.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan sebesar Rp138,256 miliar atau naik 74,98% dibanding Liabilitas jangka panjang tahun 2019 sebesar Rp184,394 miliar menjadi Rp322,650 miliar pada tahun 2020. Adapun kenaikan ini disebabkan oleh:

1. Kenaikan Utang Bank sebesar Rp123,588 miliar atau 68,40% dari tahun 2019 karena terdapat penambahan penarikan pinjaman kredit investasi atas pembelian KRL.
2. Kenaikan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang sebesar Rp13,872 miliar atau 373,11% dari tahun 2019.

Short-term Liabilities

Current liabilities decreased by 24.55% or Rp100.950 billion from Rp640.297 billion in 2019 to Rp483.102 billion in 2020. This decrease was due to:

1. Decrease in Short-Term Liabilities of Third Parties by Rp115.214 billion or 56.84% from 2019.
2. Decrease in Unearned Revenue by Rp23.217 billion or 24.98% from 2019 due to the lower unearned revenue from advertising space rentals.
3. An increase in Short-Term Bank Loans by Rp100.000 billion or 100% from 2019 due to the addition of KMK facilities.
4. Decrease in long-term liabilities maturing in one year by Rp25.857 billion or 36.71% from 2019.
5. Decrease in Short-Term Employee Benefits Liabilities by Rp100.950 billion or 82.28% from 2019 due to a decrease in employee costs.

Long-Term Liabilities

Long-term liabilities increased by Rp138.256 billion or up 74.98% compared to long-term liabilities in 2019 of Rp184.394 billion to Rp322.650 billion in 2020. This increase was due to:

1. An increase in Bank Loans by Rp123.588 billion or 68.40% from 2019 due to an additional withdrawal of investment credit loans for the purchase of KRL.
2. Increase in Long-Term Employee Benefits Liabilities by Rp13.872 billion or 373.11% from 2019.



EKUITAS

Equity

Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.029,453 miliar, mengalami kenaikan Rp35,800 miliar atau 3,60% dibandingkan tahun 2019 karena terdapat laba tahun berjalan sebesar Rp77,685 miliar dan pembayaran dividen sebesar Rp37,879 miliar.

The Company's total equity in 2020 was recorded at Rp1,029.453 billion, an increase of Rp35.800 billion or 3.60% compared to 2019 due to profit for the year of Rp77.685 billion and dividend payments of Rp37.879 billion.

Tabel Ekuitas Tahun 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016

Table of Equity 2020, 2019, 2018, 2017, and 2016

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas Equity	2020	2019	2018	2017	2016	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
						Selisih Difference	%
Modal Saham Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Capital Stock-Par Value of Rp1,000,000 per share							
Modal dasar Rp542.000 Modal ditempatkan dan disetor penuh Rp230.500 saham Share Capital 542,000 Issued and Fully Paid 230,500 shares	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500	0.00	0,00%
Saldo Laba Retained earnings							
Ditentukan Penggunaannya Appropriate Reserve	718.904	723.447	723.447	475.792	331.597	(4.542)	(0,63%)
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	77.685	37.879	(214.050)	590.571	383.653	39.806	105,09%
Komponen Ekuitas Lainnya Other Components of Equity	2.362	1.825	1.936	3.193	3.609	537	29,42%
Jumlah Ekuitas Total Equity	1.029.453	993.652	741.833	1.300.056	949.359	35.801	3,60%

Total Ekuitas

Total Equity





LABA TAHUN BERJALAN DAN JUMLAH LABA KOMPREHENSIF

Profit for the Year and Total Comprehensive Income for the Year

Pada tahun 2020, laba tahun berjalan Perseroan terealisasi sebesar Rp77,686 miliar, menurun signifikan sebesar Rp174,243 miliar atau 69,16% dibanding dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp251,929 miliar.

In 2020, total profit for the year was realized at Rp77.686 billion, significantly decreased from Rp174.243 billion or 69.16% compared to Rp251.929 billion in 2019.

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp173,596 miliar atau 68,94% dari Rp251,818 miliar di tahun 2019 menjadi Rp78,222 miliar di tahun 2020.

Total comprehensive income for the year in 2020 was decreased by Rp173.596 billion or 68.94% from Rp251.818 billion in 2019 to Rp78.222 billion in 2020.

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Tahun 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016

Table of Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 2020, 2019, 2018, 2017, and 2016

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	2020	2019	2018	2017	2016	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
						Selisih Difference	%
Pendapatan Net Revenue	1.883.277	2.741.595	2.537.731	2.722.469	2.044.957	(858.318)	(31,31%)
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(1.403.659)	(1.881.533)	(1.809.872)	(1.574.558)	(1.328.312)	(477.873)	(25,40%)
Laba Bruto Gross Profit	479.618	860.062	727.859	1.147.911	716.645	(380.444)	(44,23%)
Beban Usaha Operating Expenses	(387.508)	(517.080)	(464.367)	(444.111)	(319.276)	(129.571)	(25,06%)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Revenue (Expense)	36.153	(21.989)	(154.084)	(40.758)	(1.148)	58.142	264,42%
Laba Usaha Operating Income	128.263	320.994	109.409	663.042	396.222	(187.714)	(60,04%)
Pendapatan Bunga Interest Income	7.194	11.855	30.214	19.810	15.455	(4.660)	(39,31%)
Pengembalian PSO tahun Sebelumnya Return of the Previous PSO	3.347	32.779	(540.385)	-	-	(29.431)	(89,79%)
Beban Keuangan Interest Expenses	(24.012)	(22.566)	(15.330)	(18.933)	(20.975)	1.445	6,41%
Laba Sebelum Pajak Profit Before Income Tax	114.795	343.062	(416.094)	663.919	390.702	(228.267)	(66,54%)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2020	2019	2018	2017	2016	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
						Selisih Difference	%
Beban Pajak <i>Tax Expense</i>	(37.109)	(91.133)	106.782	(168.609)	(102.310)	(54.024)	(59,28%)
Laba Tahun Berjalan <i>Profit for the Year</i>	77.686	251.930	(309.311)	495.310	288.392	(174.243)	(69,16%)
Penghasilan Komprehensif Lain yang Tidak Direklasifikasi ke Laba (Rugi) pada Periode Berikutnya: <i>Other Comprehensive (Loss) Income not to be Reclassified to Profit (loss) in Subsequent Period:</i>							
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan <i>Other Comprehensive Income Current Year</i>	537	(111)	(1.257)	(417)	2.524	648	584,51%

Laba Bersih Net Profit





Pendapatan

Pendapatan Perseroan berasal dari pendapatan angkutan penumpang, kompensasi pemerintah (PSO), pendapatan non angkutan, dan pendapatan pendukung angkutan. Pada tahun 2020, Perseroan meraih pendapatan sebesar Rp1,883 miliar, turun sebesar Rp858,318 miliar atau 31,31% dibanding tahun 2019. Penurunan pendapatan Perseroan dikarenakan:

1. Pendapatan penumpang dan pendapatan kompensasi pemerintah (PSO) turun sebesar 29,9% atau Rp771,061 miliar dari tahun 2019 sebesar Rp2.572,360 miliar menjadi Rp1.801,298 miliar di tahun 2020. Penurunan ini sejalan dengan penurunan penumpang KRL akibat pandemi COVID-19.
2. Pendapatan non angkutan turun sebesar 51,52% atau Rp86,928 miliar dari tahun 2019 sebesar Rp168,728 miliar menjadi Rp81,799 miliar di tahun 2020. Penurunan ini disebabkan karena penurunan pendapatan sewa space iklan di KRL.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp477,873 miliar atau 25,40% dari Rp1.881,533 miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp1.403,659 miliar pada tahun 2020. Adapun penurunan ini dikarenakan:

1. Penurunan biaya perawatan sarana perkeretaapian sebesar 14,43% atau Rp54,518 miliar dari tahun 2019 karena adanya perubahan jadwal perawatan akibat bergesarnya kedatangan KRL.
2. Penurunan biaya pegawai operasional sebesar 19,45% atau Rp23,455 miliar dari tahun 2019 karena adanya efisiensi pegawai operasional.
3. Penurunan biaya sewa stasiun sebesar 100% atau Rp449,076 miliar dari tahun 2019 karena perubahan skema kontrak PSO PT KCI dan PT KAI, dimana pada tahun 2020 biaya-biaya di stasiun (yang dibebankan menjadi biaya sewa stasiun) yang dikeluarkan oleh PT KAI dipotong langsung pada saat penagihan PSO.

Laba Bruto

Laba bruto merupakan selisih dari pendapatan bersih serta beban pokok pendapatan. Dengan perhitungan tersebut, Perseroan berhasil membukukan laba kotor tahun 2020 sebesar Rp479,618 miliar, mengalami penurunan Rp380,444 miliar atau 44,23% dibanding tahun 2019 sebesar Rp860,062 miliar.

Beban Usaha

Beban usaha pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp129,571 miliar atau 25,06% menjadi (Rp387,508) miliar dibanding tahun 2019 sebesar (Rp517,080) miliar.

Revenue

The Company's revenue derived from passenger transportation revenue, government compensation (PSO), non-transportation income, and transportation support income. In 2020, the Company achieved revenue of Rp1.883 billion, a decrease of Rp858.318 billion or 31.31% compared to 2019. The decrease in the Company's revenue was due to:

1. Passenger revenue and government compensation income (PSO) decreased by 29.9% or Rp771.061 billion from Rp2,572.360 billion in 2019 to Rp1,801.298 billion in 2020. This decrease is in line with the decline in KRL passengers due to the COVID-19 pandemic.
2. Non-transportation revenue decreased by 51.52% or Rp86.928 billion from Rp168.728 billion in 2019 to Rp81.799 billion in 2020. This decrease was due to a decrease in advertising space rental income on KRL.

Cost of Revenue

Cost of revenue decreased by Rp477.873 billion or 25.40% from Rp1,881.533 billion in 2019 to Rp1,403.659 billion in 2020. This decrease was due to:

1. Decrease in the cost of railway facilities maintenance by 14.43% or Rp54.518 billion from 2019 due to the changes in the maintenance schedule to conform with the shift in KRL arrival.
2. Decrease in operational employee costs by 19.45% or Rp23.455 billion from 2019 due to the operational employees efficiency.
3. Decrease in Station Rental Fees by 100% or Rp449.076 billion from 2019 due to changes in the PSO contract scheme of PT KCI and PT KAI, where in 2020 costs at stations (which are charged as station rental fees) are incurred by PT KAI deducted directly at the time of billing PSO.

Gross profit

Gross profit is the difference of net income and cost of revenue. With this calculation, the Company managed to record gross profit at Rp479.618 billion, decreased by Rp380.444 billion or 44.23% compared to Rp860.062 billion in 2019.

Operating Expenses

Operating expenses in 2020 decreased by Rp129.571 billion or 25.06% to Rp387.508 billion compared to 2019 of Rp517.080 billion.

Pendapatan (Beban) Lain-Lain

Perseroan membukukan Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp36,153 miliar di tahun 2020, mengalami kenaikan sebesar Rp58,142 miliar atau 264,42% dibanding beban lain-lain di tahun 2019 sebesar Rp21,989 miliar. Kenaikan Pendapatan (Beban) Lain-Lain disebabkan oleh penilaian kembali nilai investasi PT Finarya.

Laba Usaha

Laba usaha merupakan laba bruto dikurangi beban usaha dan pendapatan (beban) lain-lain. Dengan perhitungan tersebut, Perseroan mencatat laba usaha tahun 2020 sebesar Rp128,263 miliar, mengalami penurunan Rp211,585 miliar atau 60,04% dibanding tahun 2019 sebesar Rp320,994 miliar. Penurunan Laba Usaha paling signifikan dikarenakan penurunan pendapatan akibat adanya pandemi COVID-19.

Pendapatan Bunga

Perseroan membukukan Pendapatan Bunga sebesar Rp7,194 miliar di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4,660 miliar atau 39,31% dibanding Pendapatan Bunga di tahun 2019 sebesar Rp11,855 miliar.

Pengembalian PSO Tahun Sebelumnya

Perseroan membukukan Pengembalian PSO Tahun Sebelumnya sebesar Rp3,347 miliar di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp29,431 miliar atau 89,79% dibanding Pengembalian PSO Tahun Sebelumnya di tahun 2019 sebesar Rp32,779 miliar. Penurunan ini disebabkan karena berkurangnya koreksi Audit PSO.

Beban Keuangan

Perseroan membukukan Beban Keuangan sebesar Rp24,012 miliar di tahun 2020, mengalami kenaikan sebesar Rp1,445 miliar atau 6,41% dibanding Beban Keuangan di tahun 2019 sebesar Rp22,566 miliar.

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak merupakan laba tahun berjalan sebelum dikurangi manfaat (beban) pajak. Dengan perhitungan tersebut, Perseroan mencatat laba sebelum pajak tahun 2020 sebesar Rp114,795 miliar, mengalami penurunan Rp228,267 miliar atau 66,54% dibanding tahun 2019 sebesar Rp343,062 miliar.

Beban Pajak

Perseroan mencatat Beban Pajak sebesar Rp37,109 miliar pada tahun 2020, mengalami penurunan sebesar Rp54,024 miliar atau 59,28% dibanding tahun 2019 sebesar Rp91,133 miliar. Penurunan Beban Pajak dikarenakan adanya penurunan laba sebelum pajak dan tarif pajak badan.

Other Income (Expenses)

In 2020, the Company recorded Other Income of Rp36.153 billion an increase of Rp58.142 billion or 264.42% compared to Rp21.989 billion in 2019. The increase was due to the revaluation of PT Finarya's investment value.

Operating Income

Operating income is the difference of gross profit, operating expenses, and other income (expenses). As calculated, the Company recorded operating income in 2020 of Rp128.263 billion, decreased by Rp211.585 billion or 60.04% compared to Rp320.994 billion in 2019. The most significant decrease in Operating Income was due to the lower revenue due to the COVID-19 pandemic.

Interest income

The Company recorded Interest Income of Rp7.194 billion in 2020, a decrease of Rp4.660 billion or 39.31% compared to Rp11.855 billion in 2019.

Previous Year's PSO Return

The Company recorded Previous Year's PSO Returns of Rp3.347 billion in 2020, decreased by Rp29.431 billion or 89.79% compared to Rp32.779 billion in 2019. This decrease was due to the reduced correction of PSO Audit.

Interest Expenses

The Company recorded Interest Expenses of Rp24.012 billion in 2020, an increase of Rp1.445 billion or 6.41% compared to Rp22.566 billion in 2019.

Profit Before Tax

Profit before tax is profit for the year before deducting tax benefits (expenses). As calculated, the Company recorded profit before tax of Rp114.795 billion in 2020, a decrease of Rp228.267 billion or 66.54% compared to Rp343.062 billion in 2019.

Tax Expense

The Company recorded Tax Expense of Rp37.109 billion in 2020, a decrease of Rp54.024 billion or 59.28% compared to Rp91.133 billion in 2019. The decrease in tax expense was due to the lower profit before tax and corporate tax rates.



Laba Tahun Berjalan

Perseroan mencatat Laba Tahun Berjalan sebesar Rp77,686 miliar pada tahun 2020, mengalami penurunan sebesar Rp174,243 miliar atau 69,16% dibanding tahun 2019 sebesar Rp251,930 miliar. Penurunan Laba Tahun Berjalan dikarenakan efek pandemi COVID-19.

Profit for the Year

The Company recorded Profit for the Year of Rp77.686 billion in 2020, decreased by Rp174.243 billion or 69.16% compared to Rp251.930 billion in 2019. The lower Profit for the Year was due to the effects of the COVID-19 pandemic.

ARUS KAS

Cash Flows

Saldo kas dan setara kas akhir tahun 2020 mengalami kenaikan Rp150,541 miliar atau 32,65% dibandingkan tahun 2019 dari Rp461,073 miliar menjadi Rp611,615 miliar yang terdiri dari kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp92,935 miliar, kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar (Rp101,411) miliar dan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp159,017 miliar.

The balance of cash and cash equivalents as of the end of 2020 increased by Rp150.541 billion or 32.65% from Rp461.073 billion to Rp611.615 billion. It consist of net cash from operating activities of Rp92.935 billion, net cash used for investing activities of (Rp101.411) billion, and net cash from financing activities of Rp159.017 billion.

Tabel Laporan Arus Kas 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016

Table of Statements of Cash Flows 2020, 2019, 2018, 2017, and 2016

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(In million Rupiah, unless otherwise stated)

Laporan Arus Kas Statements of Cash Flows	2020	2019	2018	2017	2016	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
						Selisih Difference	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities							
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Receipt from Customers	701.595	1.405.494	1.395.210	1.313.433	946.034	(703.899)	(50,08%)
Penerimaan dari Pemerintah Cash Receipts from Government	1.195.072	1.225.865	1.056.089	1.123.035	1.085.187	(30.792)	(2,51%)
Penerimaan Bunga Cash Receipts from Interest Income	7.422	12.647	30.214	20.512	14.642	(5.224)	(41,31%)
Pembayaran kepada Pemasok Payment to Suppliers	(1.358.308)	(1.925.513)	(1.575.965)	(1.382.302)	(1.385.027)	(567.206)	(29,46%)
Pembayaran kepada Pegawai Payments to Employees	(436.002)	(296.782)	(465.471)	(341.663)	(268.207)	139.220	46,91%

Laporan Arus Kas Statements of Cash Flows	2020	2019	2018	2017	2016	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
						Selisih Difference	%
Pembayaran Pajak Payment of Tax	(5.075)	(48.385)	(182.952)	(122.638)	(134.960)	(43.309)	(89,51%)
Pembayaran dari Restitusi Pajak Payment from Tax Restitution	98.507	-	-	-	-	98.507	100,00%
Pembayaran kepada Pemerintah Payment to Government	(86.264)	(75.449)	(120.966)	(95.023)	(88.613)	10.815	14,34%
Pembayaran Bunga dan Beban Keuangan Payment of Interest and Finance Expenses	(24.011)	(22.565)	(15.121)	(18.933)	(20.975)	1.445	6,41%
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Flows Provided from Operating Activities	92.935	275.311	121.038	496.423	148.082	(182.373)	(66,24%)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investment Activities							
Penempatan Dana Dibatasi Penggunaannya Placement in Restricted Fund	(30,126)	(51,715)	-	9.178	-	(21.589)	(41,75%)
Pencairan Dana Dibatasi Penggunaannya Withdrawal in Restricted Fund	18,418	5,000	(119.673)	(177.923)	(135.938)	13.419	268,37%
Perolehan Aset Tetap Acquisition of Fixed Asset	(89,703)	(201,111)	4.460	(24.802)	14.473	(111.408)	(55,40%)
Penambahan Investasi Saham Addition to Share Investments	-	37.000	-	-	-	(37.000)	(100,00%)
Kas bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash used to Investing Activities	(101.411)	(284.826)	(120.404)	(193.547)	(123.359)	(183.415)	(64,40%)



Laporan Arus Kas Statements of Cash Flows	2020	2019	2018	2017	2016	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
						Selisih Difference	%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Funds Activities							
Pembayaran Utang Bank Jangka Panjang Payment of Long Term Bank Loans	(17.610)	(50.623)	(30.806)	(37.343)	(26.203)	(33.012)	(65,21%)
Penerimaan Utang Bank Jangka Pendek Payment of Short Term Bank Loans	100.000	-	-	-	-	100.000	100,00%
Pembayaran Dividen Payments of Dividends	(37.879)	-	(247.655)	(144.196)	(127.061)	37.879	100,00%
Pembayaran Liabilitas Sewa Payment of Lease Liability	(835)	-	-	-	-	835	100,00%
Penerimaan Pinjaman Bank Proceeds from Bank Loans	115.341	101.094	58.623	-	70.073	14.247	14,09%
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Net Cash from Financing Activities	159.017	50.471	(219.838)	(181.539)	(83.192)	108.546	215,07%
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas Increase Cash and Cash Equivalents	150.541	40.954	(219.204)	121.337	(58.469)	109.587	267,59%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beggining of Year	461.073	420.118	639.322	517.985	576.454	40.955	9,75%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of Year	611.615	461.073	420.118	639.322	517.985	150.541	32,65%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp183,415 miliar atau 66,24% menjadi Rp92,935 miliar yang terutama berasal dari penerimaan dari pemerintah. Sedangkan pada tahun 2019, kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah sebesar Rp275,311 miliar.

Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2020 naik sebesar (Rp164,422) miliar atau 64,40% menjadi (Rp101,411) miliar. Sedangkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2019 sebesar (Rp284,826) miliar.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan di tahun 2020 naik sebesar Rp108,546 miliar atau 215,07% menjadi Rp159,017 miliar yang terutama berasal dari kenaikan penerimaan pinjaman bank. Sedangkan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2019 sebesar Rp50,471 miliar.

Cash Flows from Operating Activities

Net cash flows from operating activities in 2020 decreased by Rp183.415 billion or 66.24% to Rp92.935 billion, which mainly derived from the government revenue. Meanwhile in 2019, net cash from operating activities was amounted to Rp275.311 billion.

Cash Flows Used for Investing Activities

Net cash flows used for investing activities in 2020 increased by (Rp164.422) billion or 64.40% to (Rp101.411) billion. Meanwhile, net cash flows used for investing activities in 2019 was (Rp284.826) billion.

Cash Flows from Financing Activities

Cash flows from financing activities in 2020 increased by Rp108.546 billion or 215.07% to Rp159.017 billion which mainly derived from the increase in bank loan receipts. Meanwhile, cash flows from financing activities in 2019 was amounted to Rp50.471 billion.

Tabel Rasio Kinerja Keuangan Tahun 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016

Table of Financial Ratio 2020, 2019, 2018, 2017, and 2016

Aspek Keuangan Financial Aspects	2020	2019	2018	2017	2016	Kenaikan/(Penurunan) Increase/(Decrease)	
						Selisih Difference	%
Imbalan kepada Pemegang Saham Return on Equity	8,47%	37,17%	(31,09%)	67,91%	45,84%	28,70	(77,21)
Imbalan Investasi Return on Investment	13,42%	26,27%	(22,76%)	39,42%	32,60%	(12,85)	(48,92)
Rasio Kas Cash Ratio	126,60%	72,01%	64,33%	116,93%	144,45%	54,59	75,81
Rasio Lancar Current Ratio	193,87%	145,57%	115,26%	241,81%	244,56%	48,3	33,18
Periode Penagihan (hari) Collection Period (Day)	13,58	14,26	12,71	25,51	50,19	0,68	(4,77)
Perputaran Total Aset Total Assets Turn Over	108,20%	159,38%	169,66%	138,48%	142,11%	(51,18)	(32,11)
Ekuitas pada Total Aset Equity to Total Assets Ratio	56,09%	54,65%	47,26%	65,22%	63,96%	1,44	2,63



KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Solvency

Kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga selama tahun 2020 dapat dilihat dari rasio likuiditas Perseroan. Rasio likuiditas yang dihitung dengan cara aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek, yaitu 193,87% pada tahun 2020 dari 145,57% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan kemampuan membayar utang jangka pendek Perseroan naik di tahun 2020.

Rasio Likuiditas

1. Rasio Kas
Perseroan menunjukkan angka rasio kas sebesar 126,60% di tahun 2020, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 sebesar 72,01%. Rasio kas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aset lancar yang lebih *liquid* (*liquid assets*).
2. Rasio Lancar
Rasio lancar pada tahun 2020 menunjukkan angka 193,87%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 145,57%. Hal ini menunjukkan kemampuan membayar utang jangka pendek Perseroan naik pada tahun 2019.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Selama tahun 2020, periode penagihan piutang terhitung selama 13,58 hari atau mengalami kenaikan dari periode penagihan di tahun 2019 yang terhitung selama 14,26 hari. Penurunan periode penagihan piutang menunjukkan 4,77%.

The Company's ability to settle obligations to third parties during 2020 can be seen from the Company's liquidity ratio. The liquidity ratio is calculated by means of current assets divided by current liabilities, which was 193.87% in 2020 from 145.57% in 2019. This shows that the Company's ability to pay its current liabilities was increased in 2020.

Liquidity Ratio

1. Cash Ratio
The Company showed a cash ratio of 72.01% in 2019, an increase compared to 2018 of 64.33%. Cash ratio is used to measure the ability of the Company to pay obligations that shall be immediately fulfilled with current assets that are more liquid (liquid assets).
2. Current Ratio
Current ratio in 2020 showed the figure of 193.87%, higher than 145.57% in 2019. This shows that the Company's ability to pay its current liabilities was increased in 2020.

Receivables Collectibility Level

Throughout 2020, the receivables collectability level was 13.58 days or increased from the 12.71 days in 2019. The increase in the receivables collectibility period showed 4.77%.



STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Capital Structure and Capital Structure Policy

Komposisi Struktur Modal Capital Structure Composition	2020		2019		Perubahan (%) Changes (%)
	Jumlah (Rp juta) Total (Millions)	%	Jumlah (Rp juta) Total (Millions)	%	
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	483.102	26,32	640.297	35,21	(24,55)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	322.651	17,58	184.394	10,14	74,98
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	805.753	43,91	824.691	45,35	2,30
Ekuitas Equity	1.029.453	56,09	993.652	54,65	3,60
Aset Assets	1.835.206	100,00	1.818.343	100,00	0,93

Struktur modal Perseroan pada tahun 2020 didominasi oleh ekuitas dibandingkan dengan liabilitas.

The Company's capital structure in 2019 was dominated by equity compared to liabilities.



INVESTASI BARANG MODAL

Capital Investment

Perseroan melakukan investasi barang modal pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

The Company carried out the following capital investment in 2020:

No	Uraian Description	2020				%		Keterangan Information
		Fisik Physical	Anggaran Budget	Fisik Physical	Realisasi Realization	(5:3)	(6:4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. SARANA SARANA								
	Total Sarana KRL 2020 Total KRL Rollingstock 2020	120	101.363.598.911	120	88.576.453.736	100	87	Realisasi kedatangan KRL Jan-Des 2020 sebanyak 120 dari program 120 unit. Arrival Realization of KRL Jan-Dec 2020 as 120 units from the 120 programs.
B. FASILITAS FACILITIES								
1	Alat Timbangan Portable Portable weighing Equipment	1	3.410.000.000	0	-	-	0	Sudah proses kontrak, dijadwalkan barang datang bulan Januari 2021. It has been in the contract process, the goods are scheduled to arrive in January 2021.
2	Arrester Tester Arrester Tester	1	600.000.000	0	-	-	0	Sudah proses PBJ tetapi terjadi gagal lelang. The PBJ process has been carried out but the auction failed.
3	Forklift 3 Ton Forklift 3 Ton	1	482.496.300	0	-	-	0	Sudah kontrak, dijadwalkan barang datang di bulan Februari. Already contracted, the goods are scheduled to arrive in February.
4	Forklift 5 Ton Forklift 5 Ton	1	807.196.500	0	-	-	0	
5	Truk Engkel-Gudang Engkel Truck-Warehouse	1	387.773.100	1	298.056.000	100	77	Realisasi bulan November sudah dilakukan pengujian termin I, untuk termin II menunggu box dan perlengkapan lainnya. Realization in November termin I testing has been carried out, for term II is waiting for the box and other equipment.
	Total Fasilitas Total Facilities		5.687.465.900		298.056.000			
C. PRASARANA INFRASTRUCTURE								
Prasarana Bangunan Building Infrastructure								
1	Pembuatan Ruang KUPT Crew Depok KUPT Crew Depok's Office	1	355.825.516	1	209.496.891	100	59	- Biaya pemagaran lahan untuk UPT Crew - Perizinan IMB KUPT Crew Depok - Cost of land fencing for UPT Crew - Permit for IMB KUPT Crew Depok
	Total Prasarana Bangunan Total Building Infrastructure		355.825.516		209.496.891			
	Total Prasarana Total Infrastructure		355.825.516		209.496.891			
TOTAL A, B, DAN C			107.406.890.327		89.084.006.627		82,9	

Penyerapan anggaran investasi tahun 2020 terealisasi sebesar Rp89.084 miliar dari program sebesar Rp107.406 miliar atau 82,9%. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Sarana KRL
Realisasi kedatangan sarana Januari s.d Desember 2020 sebanyak 120 unit dari program 120 unit. Anggaran terealisasi sebesar Rp88.576 miliar dari program Rp101.363 miliar atau 87%. Tidak terserapnya anggaran sesuai program disebabkan antara lain:
 - a. Tidak terealisasi pembayaran 10% kedua untuk *shipment* 11 dan 12 dikarenakan masih terdapat 48 unit menunggu sertifikat dari Dirjen.
 - b. Adanya kontrak pemindahan *port*.
 - c. Tidak terealisasinya biaya inspeksi dikarenakan pandemi COVID-19.
2. Fasilitas terealisasi sebesar Rp0,3 miliar dari program pekerjaan sebesar Rp5,69 miliar atau sebesar 5,24%. Realisasi investasi fasilitas sebesar Rp0,30 miliar yaitu pengadaan truk engkel untuk Gudang. Namun terdapat pengadaan yang belum terealisasi antara lain:
 - a. Alat Timbang *Portable* (sudah kontrak, dijadwalkan barang datang di bulan Januari tahun 2021).
 - b. *Arrester Tester* (sudah proses PBJ, tetapi terjadi gagal lelang).
 - c. Forklift 3 Ton dan 5 Ton untuk gudang (sudah kontrak, dijadwalkan barang datang di bulan Februari tahun 2021).
3. Investasi prasarana terdiri dari prasarana bangunan, prasarana tanah dan prasarana IT. Realisasi investasi prasarana sebesar Rp209,5 juta yang digunakan untuk biaya pembuatan pagar lahan KUPT crew Depok dan perijinan IMB. Dikarenakan adanya retensi untuk pembangunan *underpass* stasiun Depok, Pasar Minggu, dan Duren Kalibata pada tahun 2019, terdapat pengeluaran anggaran investasi sebesar Rp619.287.323.

The absorption of the 2020 investment budget was realized at Rp89,084 billion from the program amounting to Rp107,406 billion or 82.9%. This is due to, among other things:

1. KRL facilities
From January to December 2020, facilities was realized at 120 units, from the target of 120 units. The budget was realized at Rp88,576 billion from Rp101,363 billion or 87%. The non-absorption of the budget according to the program was due to, among others:
 - a. The second 10% payment was not realized for shipments 11 and 12 because there were still 48 units waiting for a certificate from the Director General.
 - b. There is a port transfer contract.
 - c. The inspection fee was not realized due to the COVID-19 pandemic.
2. Facilities was realized at Rp0.3 billion from the target of Rp5.69 billion or 5.24%. Facility investment was realized at Rp0.30 billion for the procurement of ankle trucks for warehouses. There were procurements that have not been realized, namely:
 - a. Portable Weighing Equipment (already contracted, the goods are scheduled to arrive in January 2021).
 - b. Arrester Tester (in the PBJ process, the auction was failed).
 - c. 3 Ton forklifts and 5 Ton for warehouse (already contracted, the goods are scheduled to arrive in February 2021).
3. Infrastructure investment consists of building infrastructure, land infrastructure, and IT infrastructure. The infrastructure investment was realized at Rp209.5 million which was used to build the land fence for KUPT Depok crew and IMB permits. Due to the retention for the underpass construction of Depok, Pasar Minggu, and Duren Kalibata stations in 2019, there was an investment budget expenditure of Rp619,287,323.



PERBANDINGAN ANTARA TARGET PADA AWAL TAHUN BUKU DENGAN HASIL YANG DICAPAI (REALISASI), DAN TARGET ATAU PROYEKSI YANG INGIN DICAPAI UNTUK SATU TAHUN MENDATANG

Comparison between Targets at Beginning of Fiscal Year with Achievement (Realization) and Target or Projection for Next Year

Perbandingan antara RKAP Tahun 2020 dengan Realisasi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Laba (rugi) setelah pajak sebesar Rp77,685 miliar atau sebesar 193% dari program Rp40,305 miliar.
2. Tingkat Kesehatan Perseroan berdasarkan perhitungan menurut Keputusan Menteri Negara BUMN No: KEP-100/MBU/2002, memiliki realisasi skor sebesar 88,50 dari program 86,00 atau mencapai tingkat kesehatan dengan predikat SEHAT "AA".
3. Realisasi Kontrak Manajemen (KPI) sebesar 97,78 dari program sebesar 100,00.
4. Penyerapan realisasi investasi tahun 2020 secara fisik sebesar 95% dan anggaran sebesar Rp89,08 miliar dari program pada tahun 2020 sebesar Rp107,41 miliar atau 83%.

The comparison between the 2020 RKAP and its Realization is as follows:

1. Profit (loss) after tax was realized at Rp77.685 billion or 193% of Rp40.305 billion target.
2. The Company calculates its Health Level based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No: KEP-100/MBU/2002. It was realized at 88.50 out of 86.00 target or categorized as HEALTHY with the "AA" title.
3. Management Contracts (KPI) was realized at 97.78 of 100.00 target.
4. Physical absorption of investment in 2020 was 95% from the target of Rp89.08 billion. It was 83% of the target in 2020 of Rp107.41 billion.

KEY PERFORMANCE INDICATOR

Key Performance Indicator

Berdasarkan perhitungan sesuai kamus KPI tahun 2020, Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2020 memiliki realisasi skor sebesar 97,78 dari program 100,00.

Based on the calculations referring to the 2020 KPI dictionary, the Company's Key Performance Indicator (KPI) in 2020 was realized at 97.78 from 100.00 target.

No	Aspek Key Performance Indicator Key Performance Indicator Aspect	Jumlah Indikator Total Indicators	Bobot Bobot	Tahun/Year			%	
				2019	2020			
				Real Skor Score Realization	Target Skor Score Target	Real Skor Score Realization	7:6	7:5
A	Keuangan dan Pasar Finance and Market	4	20,00	20,00	20,00	19,21	96%	96%
B	Produk dan Proses Product and Process	3	18,00	18,00	18,00	17,63	98%	98%
C	Fokus Pelanggan Customer Focus	4	24,00	24,00	24,00	24,00	100%	133%
D	Fokus Tenaga Kerja Manpower Focus	5	20,00	20,00	20,00	19,38	97%	97%
E	Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial Leadership, Gevernance, and Social Responsibility	5	18,00	17,76	18,00	17,55	98%	99%
	Jumlah Total	21	100,00	93,76	100,00	97,78	98%	104%

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Company Soundness Level

Tingkat Kesehatan Perseroan berdasarkan perhitungan menurut Kep Meneg BUMN No: KEP-100/MBU/2002, memiliki realisasi skor sebesar 88,50 dari program 86,00 atau tingkat kesehatan Perseroan dengan predikat Sehat "AA".

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Tingkat kesehatan pada aspek keuangan dan pasar sebesar 40,50 dari target 36,00.
2. Tingkat kesehatan pada aspek operasional sebesar 33,00 dari target 35,00.
3. Tingkat kesehatan pada aspek administrasi sebesar 15,00 dari target 15,00.

Company Soundness Level based on the calculations referring to Decree of Minister of State-Owned Enterprises No: KEP-100/MBU/2002 was realized at 88.50 from 86.00 target, or categorized at Healthy "AA".

The details are as follows:

1. *Soundness in financial aspects is 40.50 from the target of 36.00.*
2. *Soundness in operational aspects is 33.00 from the target of 35.00.*
3. *Soundness in administration aspects is 15.00 from the target of 15.00.*

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Subsequent Material Information and Facts after Accountant Reporting Date

Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan dibuat untuk Perseroan untuk tahun buku 2020.

There were no material information and fact occurred after the accountant's date in the 2020 fiscal year.

ASPEK PEMASARAN DAN PANGSA PASAR

Marketing Aspect and Market Share

Perseroan memiliki kegiatan pemasaran dengan tujuan menjadikan seluruh produk, jasa, dan layanan KCI memiliki *brand* yang kuat sehingga dapat menunjang aktivitas pemasaran serta pertumbuhan penjualan jasa secara signifikan. Untuk mencapai *brand awareness* di masyarakat, KCI melakukan komunikasi pemasaran yang optimal serta *positioning* KCI yang unik, tepat dan relevan dari seluruh produk dan jasa pada setiap *target market*, sehingga akan lebih menjamin keberhasilan program ekspansi bisnis yang tengah dijalankan. Agar pencapaian misi tersebut terlaksana, KCI merancang strategi komunikasi pemasaran yang diaplikasikan secara berkesinambungan selaras dengan perkembangan kondisi industri dan sasaran pengembangan bisnis.

Di tahun 2020, kegiatan pemasaran difokuskan pada upaya peningkatan fasilitas pelayanan dan *awareness* ekspansi serta operasional wilayah baru yaitu 1 (Rangkasbitung-Merak) dan 6 (Yogyakarta-Solo; Kutoarjo- Yogyakarta). Selain itu, KCI juga berfokus pada integrasi antar moda, pengelolaan uang elektronik, serta *e-commerce*.

The Company's marketing activities aim to build a strong brand for all KCI's products and services to support marketing activities and to drive sales growth significantly. To achieve brand awareness in the community, KCI carries out optimal marketing communications, positions its products and services to be a unique, precise and relevant to each target market, so as to ensure the success of the ongoing business expansion program. In order to achieve this mission, KCI designs a marketing communication strategy that is applied continuously in line with the development of industrial conditions and business development goals.

In 2020, the Company focused its marketing activities on the efforts to improve service facilities and expansion awareness, as well as new regional operations in region 1 (Rangkasbitung-Merak) and region 6 (Yogyakarta-Solo; Kutoarjo-Yogyakarta). In addition, the Company also focused on intermodal integration, electronic money management, and e-commerce.



RENCANA REALISASI PENGEMBANGAN STRATEGIS BISNIS 2021

Business Strategic Realization Plan in 2021

PT KCI berkomitmen memaksimalkan bisnis yang berkaitan dengan pelayanan jasa angkutan komuter. Untuk mendukung hal tersebut maka telah dilakukan beberapa upaya pengembangan strategis bisnis selama tahun 2020 dengan deskripsi sebagai berikut:

1. Integrasi Antarmoda (Juanda, Sudirman, Pasar Senen, dan Tanah Abang).
2. Pengembangan KRL Access.
3. Pengembangan bisnis KCI di luar Jabodetabek, yaitu KRL dan KA Lokal Wilayah 6 Yogyakarta, dan KA Lokal Merak Wilayah 1 Jakarta.

PT KCI is committed to maximizing the business related to commuter transportation services. To support this, the Company carried out several strategic business development efforts throughout 2020 with the following descriptions:

1. *Intermodal integration (Juanda, Sudirman, Pasar Senen, and Tanah Abang).*
2. *Development of KRL Access.*
3. *Development of KCI's business outside Jabodetabek, namely Commuter Train and Local Train Region 6 Yogyakarta, as well as Local Train Merak Region 1 Jakarta.*

PROSPEK USAHA

Business Prospect

Di tahun mendatang, KCI akan terus meningkatkan integrasi antar stasiun yang mencakup stasiun Gondangdia, Manggarai, Tebet, Palmerah, dan Jakarta Kota. Komitmen ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 103 Tahun 2015 tentang badan pengelolaan transportasi Jabodetabek dan mendelegasikan sebagian kewenangan BPTJ ke Pemprov DKI serta Revisi Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2018 tentang rencana induk transportasi Jabodetabek Tahun 2018-2019 dengan menjadikan DKI sebagai pemegang mandat penyusunan rencana aksi. Melalui integrasi ini, masyarakat terutama pengguna KRL Commuter Line akan semakin mudah berpindah moda transportasi dengan adanya stasiun terpadu. Perseroan akan menyelesaikan pembangunan sarana prasarana Stasiun Terpadu yang meliputi penataan kawasan stasiun, peningkatan prasarana di dalam stasiun, pembangunan halte di sekitar stasiun, serta manajemen sirkulasi pengguna dan kendaraan untuk mengurangi kemacetan di sekitar stasiun. Ke depannya, stasiun-stasiun KRL telah terintegrasi secara fisik maupun informasi dengan moda lain mulai dari Transjakarta, MRT, ojek daring maupun pangkalan, hingga mikrotrans dan bajaj. Tentunya ini akan membuat pelanggan menjadi semakin nyaman menggunakan transportasi publik.

KCI juga tengah melakukan persiapan pelaksanaan program strategis penugasan PT KCI terkait KA Lokal Wilayah 2 Bandung dan Wilayah 8 Surabaya. Rencana tersebut dilakukan agar pelayanan KRL bisa diperluas dan KCI dapat berekspansi ke luar wilayah Jabodetabek sehingga KCI bisa lebih banyak berkontribusi di masyarakat.

Dalam rangka mendukung transportasi KA Bandara Soekarno Hatta KCI juga telah siap melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dan sistem operasional Kereta Rel Listrik (KRL). Penyesuaian ini bertujuan untuk tetap dapat memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna jasa KRL serta memberikan kepastian bagi seluruh pengguna KRL, khususnya bagi yang ingin mengintegrasikan perjalanan KRL dengan Kereta Bandara Soekarno Hatta.

Mencakup layanan secara keseluruhan, KCI akan semakin meningkatkan keunggulan layanan dengan mengembangkan proses pembayaran tiket yaitu top up melalui KRL Access dan QR Payment. Serta KMT akan jadi *payment gateway* dan *open loop* terhadap pembayaran moda transportasi. Sebelumnya, pengguna KRL dapat memperoleh informasi seputar jadwal perjalanan KRL, posisi kereta secara *real time*, tarif, serta informasi kepadatan di stasiun, dan mengecek saldo. Di tahun depan, pengguna juga dapat melakukan topup melalui aplikasi di *smartphone*, sehingga akses perjalanan menjadi lebih mudah dan bisa dilakukan di mana saja.

In the coming year, KCI will continue to improve the integration between stations which include Gondangdia, Manggarai, Tebet, Palmerah, and Jakarta Kota stations. This based on Presidential Regulation NO. 103 of 2015 concerning the transportation management institution for Jabodetabek and the delegation of BPTJ's partial authority to the DKI Provincial Government and the Presidential Regulation Revision No. 55 of 2018 concerning the transportation master plan for Jabodetabek in 2018-2019 by mandating DKI as the action plans arranger. Through this integration, the public, especially the Commuter Line users, will find it easier to switch modes of transportation through the integrated station. The Company will finalize the construction process which includes layouting the station area, improving the station' infrastructure, building bus stops around the station, and managing the circulation of users and vehicle to reduce congestion around the station. In the future, KRL stations will be physically and informationally integrated with other modes such as Transjakarta, MRT, online and bases transportation, to microtrans and bajaj. This will provide more convenience public transportation users.

KCI is also preparing the strategic program assignment to operate Local Trains Region 2 Bandung and Region 8 Surabaya. The plan aims to expand KRL services and KCI's role outside the Jabodetabek area so that KCI can contribute more to the community.

To support the operation of Soekarno Hatta Airport train transportation, KCI is also ready to adjust with the provisions and operational system of the Electric Rail Train (KRL). This adjustment aims to provide consistent maximum service to KRL service users and provide certainty for all KRL users, especially for those who want to integrate KRL trip with Soekarno Hatta Airport Train.

Overall, KCI will further enhance service excellence by developing ticket payment process by providing top up feature through KRL Access and QR Payment. In addition, KMT will be a payment gateway and an open loop for transportation modes payments. Previously, KRL users could obtain information about KRL trip schedules, real-time train positions, fares, information on stations capacity, and check balances. Next year, users will also be able to top up via an application on their smartphone, ensuring easier travel access from anywhere.



PROSPEK INDUSTRI MASA DEPAN

Future Industry Prospects



Dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 diperkirakan masih akan dirasakan di tahun 2021, baik secara global maupun nasional. Pandemi COVID-19 membawa ketidakpastian yang tinggi terhadap perekonomian global dan nasional. Namun demikian, tahun 2021 disambut dengan semangat optimisme yang tinggi oleh sebagian besar kalangan di Indonesia dengan berbagai kemajuan positif dari dunia medis atas hasil uji coba vaksin COVID-19 serta kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami perbaikan (pertumbuhan positif) setiap kuartalnya di sepanjang tahun 2020 (secara tahunan -2,07%) meskipun masih di bawah target Bank Indonesia yang sebesar -2% ke -1% (year on year). Adapun tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran 4,5%-5,3% (proyeksi kementerian Keuangan RI).

Proyeksi dan harapan akan membaiknya kondisi kesehatan maupun perekonomian nasional di tahun 2021, secara langsung berpengaruh pada perencanaan operasi dan layanan yang akan dijalankan oleh Perseroan di tahun 2021. Pulihnya aktivitas

The impact of COVID-19 pandemic is estimated to remain in 2021, both globally and nationally as it has brought high uncertainty to the global and national economy. Despite so, Indonesia's people embrace year 2021 with a high spirit of optimism along with positive progress from the medical sector on the COVID-19 vaccine trial. Indonesia's economic growth performance also grows positively quarter by quarter, all throughout 2020, or -2.07% year on year, although still below Bank Indonesia's target of -2% to -1% (year on year). Meanwhile, Indonesia's economic growth rate in 2021 is estimated to be in the range of 4.5%-5.3% (projection of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia).

Projections and hopes for better health conditions and national economy in 2021 has a direct impact on the Company's operation and service plans in 2021. The gradual recovery of community's economy and social activities will increase community's mobility,



ekonomi dan sosial masyarakat secara berangsur-angsur akan mendorong peningkatan pergerakan (mobilitas) masyarakat khususnya di wilayah DKI Jakarta sehingga permintaan (*demand*) atas pengguna layanan Perseroan diharapkan dapat pulih. Kekebalan kelompok atau *herd immunity* memegang peranan penting dalam memulihkan pola layanan Perseroan dikaitkan dengan penerapan kebijakan *physical distancing*, dimana dengan adanya kebijakan tersebut membawa konsekuensi pada pembatasan jumlah pelanggan di dalam kereta sehingga meningkatnya rasio biaya/pelanggan maupun biaya/kilometer. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlangsung di tahun 2021, sehingga Perseroan masih akan sangat intensif dalam penyelenggaraan layanannya.

Optimisme membaiknya kondisi ekonomi di tahun 2021 menjadi momentum bagi Perseroan dalam mengoptimalkan berbagai potensi bisnis yaitu melakukan pengembangan operasional perusahaan di wilayah 2 Bandung dan wilayah 8 Surabaya sehingga KCI memiliki peluang dalam industri jasa angkutan komuter yang lebih baik.

especially in the DKI Jakarta area thereby drive the demand for the Company's services. Group immunity or herd immunity plays an important role in restoring the Company's service patterns associated with the implementation of physical distancing policies. This policy has consequences to limit the number of customers on the train so that the ratio of costs/customers and costs/kilometers increases. This condition is expected to continue in 2021, so the Company will remain intensive in providing its services.

The Company capitalizes on the optimism to improve economic conditions in 2021 as the momentum to optimize numerous business potentials. One of which is to expand the company's operations in region 2 Bandung and region 8 Surabaya, widening KCI's opportunities in the commuter transportation service industry.



INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI ATAU RESTRUKTURASI UTANG/MODAL

Material Information Related to the Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/ Consolidation, Acquisition or Restructuration of the Debt/Capital

Pada tahun 2020, Perseroan tidak melakukan divestasi, penggabungan/peleburan usaha, dan akuisisi.

In 2020, the Company did not carry out divestment, merger/ consolidation, and acquisition.

Di sisi lain, Perseroan melakukan investasi sarana sebanyak 120 unit atau sebesar Rp88,5 miliar, fasilitas dalam bentuk truk engkel untuk gudang atau sebesar Rp0,30 miliar, dan prasarana dalam bentuk pembuatan pagar lahan KUPT crew Depok dan perijinan IMB atau sebesar Rp209,5 juta.

On the other hand, the Company invested in 120 units of facilities or Rp88.5 billion, facilities in the form of ankle trucks for warehouses or Rp0.30 billion, and facilities in the form of land fence for KUPT Crew Depok and IMB license or Rp209.5 million.

Perseroan juga melakukan ekspansi peluasan layanan keluar Jabodetabek, yaitu ke Yogyakarta, Solo, Kutoarjo, Rangkasbitung, dan Merak.

The Company also expanded its services to outside Jabodetabek area, namely to Yogyakarta, Solo, Kutoarjo, Rangkasbitung, and Merak.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Dividend Policy

Berdasarkan Risalah Umum Pemegang Saham No. KAI KP.303/VI/4/KA-2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 tidak ada Dividen yang dibagikan ke pemegang saham PT Kereta Commuter Indonesia di tahun 2020.

Based on the Minutes of General Meeting of Shareholders No. KAI KP.303/VI/4/KA-2020 dated June 29, 2020 concerning the Approval and Ratification of the 2019 Annual Report, the Company did not distribute dividends to shareholders of PT Kereta Commuter Indonesia in 2020.

Dividen Dividend	Tahun Pembagian Dividen Dividend Payout Year			
	2020	2019	2018	2017
Laba Bersih Kinerja Tahun Sebelumnya (Rp juta) Net Profit of Previous Year (Rp million)	251.818	(310.568)	495.309	288.391
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp juta) Paid Cash Dividend (Rp million)	37.879	0	247.655	144.196
Payout Ratio Payout Ratio	15,04%	0,00%	50,00%	50,00%
Tanggal Pengumuman Announcement Date	29 Juni 2020 June 29, 2020	14 April 2019 April 14, 2019	28 Maret 2018 March 28, 2018	23 Maret 2017 March 23, 2017

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PEGAWAI DAN/ATAU MANAJEMEN YANG DILAKSANAKAN PERSEROAN (ESOP/MSOP)

Employee and/or Management Stock Option Plan (ESOP/MSOP)

Hingga Desember 2020, Perseroan belum memiliki program kepemilikan saham oleh pegawai dan/atau manajemen sehingga informasi terkait jumlah saham, jangka waktu, persyaratan pegawai dan/atau manajemen yang berhak dan sebagainya tidak tersedia dalam Laporan Tahunan 2020.

As of December 2020, the Company did not have an employee and/or management stock option plan. Hence, there were no information regarding the number of shares, periods, eligible employee, and/or management requirements in this 2020 Annual Report.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Realization of Public Offering Proceeds

Hingga akhir tahun 2020, Perseroan tidak mendaftarkan Perseroan di pasar modal serta tidak melakukan penawaran umum saham kepada publik (*Initial Public Offering/IPO*), sehingga informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tidak relevan untuk disajikan pada Laporan Tahunan ini.

As of the end of 2020, the Company did not registered on capital market and did not carry out initial public offering. Hence, the information regarding the realization of the use of proceeds from the public offering is not relevant to be presented in this Annual Report.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Material Information with Conflict of Interest and/or Transaction with Affiliated Party

Perseroan melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang berelasi. Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

The Company conducts financial transactions with related parties. Nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak-Pihak yang Berelasi dan Intercompany <i>Related Parties and Intercompany</i>	Sifat Hubungan <i>Nature of Relationship</i>	Sifat Transaksi <i>Nature of Transaction</i>
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pemegang Saham Perusahaan <i>Company's Shareholder</i>	Piutang usaha, pendapatan PSO, utang usaha, jasa sewa <i>Account receivables, account payables, rent expense</i>
PT Kereta Api Pariwisata	Entitas Sepengendali <i>Under Common Control Entity</i>	Utang usaha, beban akomodasi hotel dan tiket perjalanan <i>Account payables and travel expense, outsourcing</i>
PT Kereta Api Properti Manajemen	Entitas Sepengendali <i>Under Common Control Entity</i>	Utang usaha dan transaksi jasa konstruksi <i>Account payables and construction services transaction</i>



Pihak-Pihak yang Berelasi dan Intercompany <i>Related Parties and Intercompany</i>	Sifat Hubungan <i>Nature of Relationship</i>	Sifat Transaksi <i>Nature of Transaction</i>
PT KA Logistik	Entitas Sepengendali <i>Under Common Control Entity</i>	Biaya pengangkutan <i>Freight charges</i>
PT Railink	Entitas Sepengendali <i>Under Common Control Entity</i>	Aset keuangan lancar lainnya, biaya listrik aliran atas <i>Other current financial assets, electricity expense</i>
PT Reska Multi Usaha	Entitas Sepengendali <i>Under Common Control Entity</i>	Utang Usaha, Biaya Kebersihan, Outsourcing <i>Account payables, Cleaning Service Fee, Outsourcing</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah <i>Related Entity with the Government</i>	Penempatan kas dan setara kas, pemberian pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka pendek <i>Placement of cash and cash equivalents, Issuance of long-term loan, Issuance of short-term loan</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah <i>Related Entity with the Government</i>	Penempatan kas dan setara kas, pemberian pinjaman jangka panjang, dana dibatasi penggunaannya <i>Placement of cash and cash equivalents, restricted cash, Issuance of long-term loan</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah <i>Related Entity with the Government</i>	Penempatan kas dan setara kas, dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, pemberian pinjaman jangka panjang <i>Placement of cash and cash equivalents, time deposits restricted funds, issuance of long-term loan</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah <i>Related Entity with the Government</i>	Penempatan kas di bank <i>Placement of cash in bank</i>
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah <i>Related Entity with the Government</i>	Perawatan perangkat E-ticketing, perawatan perangkat C-Vim, sharing revenue E-ticketing <i>Sharing revenue E-ticketing/E-Ticketing maintenance, Vending Machines maintenance, E-Ticketing Cooperation</i>
PT Sygma Metrasys Solution	Entitas Berelasi dengan Pemerintah <i>Related Entity with the Government</i>	External IT support aplikasi SAP 2020 <i>External IT support for SAP 2020 applications</i>
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah <i>Related Entity with the Government</i>	Pengadaan asuransi program pesangon <i>Payment of contribution for defined benefit plan</i>

Pihak-Pihak yang Berelasi dan Intercompany Related Parties and Intercompany	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Asuransi Jiwa Inhealth	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Related Entity with the Government	Pengadaan program asuransi kesehatan Payment of health insurance program
PT Sigma Cipta Caraka	Entitas Berelasi dengan Pemerintah Related Entity with the Government	Utang usaha, sewa data center Account payables, rent data centre
PT Fintek Karya Nusantara	Penyertaan saham Investment in shares	Piutang usaha, pendapatan space iklan, sharing infrastruktur Account receivables, advertising space revenue, sharing infrastructure

Sifat Hubungan dan Transaksi dengan Pihak Berelasi yaitu:

- Sifat hubungan berelasi
PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah pemegang saham utama Perseroan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta entitas di mana PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki pengaruh signifikan.
- Transaksi dengan Pihak Berelasi
Karena memiliki sifat hubungan tersebut di atas, transaksi dengan pihak berelasi memungkinkan syarat, nilai dan kondisi menjadi tidak sama apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak ketiga.

Nature of Relationships and Transactions with Related Parties, namely:

- Nature of relationship
PT Kereta Api Indonesia (Persero) is the majority shareholder of the Company. All entities that are owned and controlled by PT Kereta Api Indonesia (Persero) and also entities where the PT Kereta Api Indonesia (Persero) have significant influence.
- Transactions with Related Parties
Because of these relationships, it is possible that the value and terms of transaction are not the same as those that would result from transactions between third parties.





SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

Significant Balance and Transaction with Related Parties

Perseroan melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

The Company carried out financial transactions with related parties with the following details:

Keterangan Description	2020	2019
Piutang Usaha Account Receivables		
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	209.041.682.863	206.395.318.878
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Subtracted by: Allowance for Impairment	(148.453.034.761)	(148.430.115.678)
Jumlah Total	60.588.648.102	57.965.203.200
PT Railink	5.003.219.686	3.013.008.414
PT Reska Multi Usaha	1.250.000.000	3.750.000.000
PT Fintek Karya Nusantara	-	320.000.000
Jumlah Total	6.253.219.686	7.083.008.414
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment	(5.157.183.768)	-
Jumlah-Neto Total-Net	1.096.035.918	7.083.008.414
Persentase terhadap Total Aset Percentage to Total Assets	3,36%	3,58%
Utang Usaha Account Payable		
PT Reska Multi Usaha	2.139.695.699	497.475.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2.076.826.125	10.345.325.378
PT Kereta Api Pariwisata	1.291.898.489	2.423.511.894
PT Kereta Api Properti Manajemen	1.036.542.460	4.390.531.571
PT Nutech Integrasi	729.399.726	397.430.000
PT Sigma Cipta Caraka	479.600.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	250.000.000	250.000.000
PT Sigma Metrasys Solution	248.047.250	54.771.616
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	177.965.589	628.925.199
PT Asuransi Jiwa Inhealth	238.408.396	21.404.794
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	139.380.615	-
PT Telekomunikasi Selular (Persero) Tbk	93.772.800	-
PT Sucofindo (Persero)	-	501.832.100
Jumlah Total	8.901.537.149	22.657.511.552
Persentase terhadap Total Aset Percentage to Total Assets	0,49%	1,25%

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERSEROAN

Change in Regulation with Significant Impact to the Company

Peraturan Perundang-Undangan yang dipandang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan pada tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

1. Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang telah diimplementasikan di PT Kereta Commuter Indonesia kedalam Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor SK-032.1/KCI/DIR-HRD/VI/2020 Tentang Protokol Kebiasaan Baru. Adapun ketentuan tersebut berdampak signifikan baik secara maupun tidak langsung terhadap Penurunan Pendapatan. Adapun isi aturan tersebut yaitu mengatur:
 - a. Pembatasan jumlah kapasitas penumpang dalam satu kereta maksimal 74 orang;
 - b. Bagi penumpang yang akan menggunakan moda transportasi KRL wajib menggunakan masker, mengenakan baju lengan panjang, dan disarankan untuk memakai pelindung wajah atau *face shield*;
 - c. Dilakukan pengecekan suhu badan sebelum naik KRL, dengan suhu maksimal penumpang yang diizinkan naik KRL 37,3°C; dan
 - d. Terhadap balita di bawah 5 tahun tidak diperbolehkan menggunakan KRL, sedangkan terhadap lansia di atas 60 tahun hanya diperbolehkan menggunakan KRL pada pukul 10.00-14.00.
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Bahwa ketentuan tersebut dipandang berdampak signifikan pada:
 - a. Pendapatan Perusahaan akibat adanya pengurangan jumlah operasional KRL yang beroperasi maksimal sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan pembatasan kapasitas penumpang dan juga akibat penurunan jumlah penumpang sehubungan dengan adanya pembatasan operasional kantor-kantor dengan pelaksanaan bekerja dari rumah (*work from home*);
 - b. Efektivitas Kerja Perusahaan akibat pembagian jam kerja dengan pengaturan maksimum pegawai yang bekerja di kantor maksimal sebanyak 50% dari jumlah pegawai, dan bekerja di rumah sebanyak 50% dari jumlah pegawai.

The following are the laws and regulations that are considered to have a significant impact on the Company in 2020:

1. Ministry of Transportation Circular No. 14 of 2020 concerning Guidelines and Technical Instructions for Railway Transportation in the New Normal Adaptation Period to Prevent the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), which has been implemented at PT Kereta Commuter Indonesia in the Board of Directors's Decree of PT Kereta Commuter Indonesia Number SK-032.1/KCI/DIR-HRD/VI/2020 on the New Normal Protocol. The provisions have a significant impact either directly or indirectly on the Decrease in Revenue. The content of the rules regulates:
 - a. Limiting total passengers in one train to a maximum of 74 people;
 - b. For passengers who will use the KRL transportation mode, they are required to wear masks, long-sleeved clothes, and are advised to wear face shields;
 - c. Body temperature checks before boarding the KRL. The maximum temperature of passengers allowed to ride the KRL is 37.3°C; and
 - d. Toddlers under 5 years old are not allowed to ride the KRL, while the elderly over 60 years are only allowed to use the KRL at 10.00-14.00.
2. Regulation of the Minister of Health No. 9 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions to Accelerate the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), and Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning the Handling of Corona Virus Disease 2019. The provision is deemed to have a significant impact on:
 - a. The Company's revenue due to its impact to reduce total KRL operations to operate until 20.00 WIB with restrictions on passenger capacity. It also reduces total passengers due to operational restrictions on corporations' activities with the implementation of work from home policy;
 - b. The Company's Work Effectiveness due to the division of working hours. The maximum arrangement of employees work from office is 50% of the total employees, and employees work from home is 50% of the total employees



PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERSEROAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Changes in Accounting Policy Implemented in Current Fiscal Year

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru dan revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Berikut adalah standar baru, amandemen, dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yaitu:

1. PSAK 71: Instrumen Keuangan;
2. PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
3. PSAK 73: Sewa;
4. PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
5. PSAK 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
6. PSAK 71 (Amandemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
7. ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;
8. PSAK 1 (Amandemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;
9. PSAK 25 (Amandemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
10. PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah;
11. ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan;
12. ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah;
13. ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa;
14. PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba; dan
15. Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

1. PSAK 71: Instrumen Keuangan
PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan

Adoption of New and Revised Statement of Financial Standards (PSAK) and Interpretation of PSAK (ISAK)

The following are revision, amendments and adjustments of standards and interpretation of standard issued by DSAK-IAI and effectively applied for the year starting on or after January 1, 2020, are as follows:

1. PSAK 71: Financial Instrument;
2. PSAK 72: Revenue from Contract with Customer;
3. PSAK 73: Lease;
4. PSAK 62 (Amendment 2017): Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract;
5. PSAK 15 (Amendment 2017): Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures;
6. PSAK 71 (Amendment 2018): Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation;
7. ISAK 35: Presentation of Non-Profit Oriented Entity Financial Statements;
8. PSAK 1 (Amendment and Improvement 2019): Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements;
9. PSAK 25 (Amendment 2019): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors;
10. PSAK 102 (Revised 2019): Accounting for Murabahah;
11. ISAK 101: Revenue Recognition on Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership;
12. ISAK 102: Impairment on Murabahah Receivable;
13. ISAK 36: Interpretation of the Interaction between the Provisions Regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases
14. PPSAK 13: Revocation of PSAK 45: Nonprofit Entity Financial Reporting; and
15. Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60 regarding Interest Rate Benchmark Reform.

Except for the changes described below, the implementation of these standards did not result in a substantial change in the Company's accounting policies and had no material impact on the financial statements of the current year or previous year.

1. PSAK 71: Financial Instruments
PSAK 71 replaces PSAK 55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new arrangements for the classification and



pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

2. **PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"**
PSAK 72 menggantikan PSAK 23: "Pendapatan" dan memperkenalkan model pengakuan pendapatan 5 (lima) langkah dan menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).
3. **PSAK 73: Sewa**
PSAK 73 menggantikan PSAK 30: "Sewa" yang mensyaratkan Perusahaan sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah dalam laporan keuangan.

Penerapan amandemen dan penyesuaian standar di atas tidak memberikan pengaruh material terhadap laporan keuangan.

measurement of financial instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows, recognizing and measuring allowance for impairment losses on financial instruments using an expected credit loss model, which replaces incurred credit loss model and provides a simpler approach for hedge accounting..

2. **PSAK 72: "Revenue from Contracts with Customers"**
PSAK 72 replaces PSAK 23: "Revenue" and introduces 5 (five)-step model of revenue recognition and determines that the revenue is recognized when control of goods has been transferred or when (or during) the rendering of services (performance obligation is satisfied).
3. **PSAK 73: Leases**
PSAK 73 replace PSAK 30: "Leases", which requires the Company as the lessee to recognize right-of-use assets and lease liabilities related to leases transaction that were previously classified as operating leases under PSAK 30, except for short-term leases or leases with low-value assets.

The implementation of the aforementioned amendments and adjustments to the standards has no material effect on the financial statement.



INFORMASI KEBERLANGSUNGAN USAHA

Information on Business Continuity

Dalam upaya menjaga kelangsungan usaha Perseroan, KCI senantiasa mengikuti perkembangan serta aktivitas ekonomi maupun dinamika industri yang bertujuan untuk meraih peluang usaha, memitigasi risiko, dan mengembangkan kapabilitas jangka panjang. Melalui upaya tersebut, Perseroan diharapkan mampu mempertahankan kinerja keuangan yang positif.

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Perseroan tidak menghadapi hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha sampai dengan tahun 2020. Pertumbuhan kinerja operasional dan keuangan Perseroan dalam 3 tahun terakhir sebagaimana dimuat pada bagian Ikhtisar Data Keuangan Penting dan Ikhtisar Indikator Kinerja Operasional mencerminkan kondisi Perseroan yang mampu mempertahankan kelangsungan usahanya.

Assessment Manajemen atas Hal-hal yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk melanjutkan usaha di masa mendatang memadai. Selain itu, manajemen Perseroan tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan usahanya. Sampai dengan lima tahun terakhir, Perseroan telah mendapatkan opini dari Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (McMillan Woods) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, termasuk di dalamnya adalah posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas Perseroan.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Assessment

Manajemen menggunakan asumsi-asumsi dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal yang di antaranya adalah indikator-indikator ekonomi seperti PDB, tingkat inflasi, nilai tukar, dan proyeksi untuk masa yang akan datang.

To maintain the Company's business continuity, KCI always follows the developments of economic activities and industrial dynamics, which aim to seize business opportunities, mitigate risks, and develop long-term capabilities. Through these efforts, the Company aspires to maintain a positive financial performance.

Potential Significant Impact on Business Continuity

In 2020, the Company did not face any issue that have a significant impact on business continuity. The Company's operational and financial performance in the last 3 years as contained in the Summary of Important Financial Data and Summary of Operational Performance Indicators reflect the Company's capability in maintaining its business continuity.

Management Assessment on Issues with Significant Impact on Business Continuity

The Management has assessed the Company's capability to maintain its business sustainability. The Company's resources to continue its business in the future are sufficient, and the Company's management does not acknowledge any material uncertainty that potentially causes significant hesitation on the Company's ability to continue its business. In recent five years, the Company has obtained an opinion from the Public Accounting Firm Rama Wendra (McMillan Woods) that the financial statements have been presented fairly in all material aspects, including its financial position, financial performance, and cash flows.

Management's Assumption in Carrying Out the Assessment

Management uses assumptions from various internal and external sources, including economic indicators such as GDP, inflation rate, exchange rate, and for future projections.





SPINNING THE LIMIT
TO WIN FROM PANDEMIC



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

220	Tata Kelola Perusahaan <i>Good Corporate Governance</i>
221	Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan <i>Objectives of Corporate Governance Implementation</i>
222	Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan <i>Commitment to Implementation of Corporate Governance</i>
223	Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan <i>Principles of Corporate Governance</i>
226	Jejak Langkah Unit GCG <i>The Step of The GCG Unit</i>
227	Kegiatan Implementasi Tata Kelola Perusahaan Tahun 2020 <i>Corporate Governance Implementation Activity 2020</i>
229	Kebijakan dan Struktur Tata Kelola Perusahaan <i>Corporate Governance Policy and Structure</i>
230	Penilaian Penerapan Good Corporate Governance <i>GCG Assessment</i>
258	Road Map GCG <i>GCG Road Map</i>
259	Rapat Umum Pemegang Saham <i>General Meeting of Shareholders (GMS)</i>
269	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>
284	Direksi <i>Board of Directors</i>
306	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi <i>Frequency and Attendance Level of Board of Commissioners and Board of Directors Meetings</i>
328	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Directors</i>
330	Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris <i>Committees Under the Board of Commissioners</i>
341	Kebijakan Remunerasi <i>Remuneration Policy</i>
347	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>
358	Audit Internal <i>Internal Audit</i>
384	Akuntan Publik <i>Public Accountant</i>
389	Sistem Pengendalian Internal <i>Internal Control System</i>
391	Manajemen Risiko <i>Risk Management</i>
401	Perkara Penting yang Dihadapi Perseroan <i>Legal Disputes</i>
402	Publikasi 2020 <i>Publication in 2020</i>
403	Kode Etik Perusahaan <i>Company's Code of Conduct</i>
426	Sistem Pelaporan Pelanggaran <i>Whistleblowing System</i>
435	LHKPN <i>LHKPN</i>
438	Akses Informasi dan Data Perseroan <i>Access to Company Information and Data</i>



05





TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

KCI berkomitmen untuk dapat mewujudkan perusahaan yang dipercaya pemangku kepentingan, berkinerja unggul, serta tumbuh secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah aspek krusial yang harus diinternalisasikan dalam setiap kegiatan usaha. Dengan berpegang pada komitmen tersebut, Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik yang berlaku di ranah nasional, regional, maupun internasional yang relevan dan sesuai dengan dinamika bisnis Perseroan.

KCI is committed to create a company that is trusted by stakeholders, has excellent performance, and grows sustainably. Therefore, the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) is a crucial aspect that must be internalized in every business activity. By adhering to this commitment, the Company complies with the development of best governance practices in the national, regional, and international level and in accordance with the dynamics of the Company's business.



TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Objectives of Corporate Governance Implementation

Tujuan diterapkannya GCG dalam Perseroan agar Perseroan memiliki prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan Perseroan yang berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan dan etika berusaha, dimana di dalamnya memuat beberapa aspek seperti GCG, Board Manual, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Kode Etik, LHKPN dan Gratifikasi. Adanya hal-hal tersebut di atas menyatakan komitmen Perseroan dalam menerapkan GCG dalam setiap bisnis usahanya. Adapun tujuan dalam penerapan GCG adalah sebagai berikut:

The purpose of GCG implementation within the Company is requiring the principles underlying the process and mechanism of the Company management based on the rules and policy and code of conduct, in which it contains several aspects such as GCG, Manual Board, Internal Control System, Whistleblowing System, Code of Conduct, LHKPN and gratification. Stated are to declare the Company's commitment to implement GCG in every business. The objectives in implementing GCG are as follows:





KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Commitment to Implementation of Corporate Governance



Bagi Perseroan, praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) atau GCG bukan hanya sekadar kewajiban melainkan telah menjadi bagian dari setiap inisiatif dalam program kerja serta pelayanan yang diberikan kepada seluruh elemen di Perseroan. Dari tahun ke tahun, komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan dan tingkat kepatuhan GCG yang semakin baik sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan dan *best practice* yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan status Perseroan sebagai anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka landasan untuk melaksanakan praktik GCG mengacu pada ketentuan GCG yang berlaku di BUMN. Acuan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Kemudian dalam melakukan evaluasi atau asesmen GCG secara berkala menggunakan indikator yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Praktik GCG di Perseroan juga telah diatur dalam SK Direksi Nomor SK.037/CU/KCI/IX/2017.

For the Company, Good Corporate Governance (GCG) practices are not merely obligations but are part of every initiative in the work program and services provided to all elements in the Company. From year to year, the commitment is realized through the implementation and level of GCG compliance that increasingly better in accordance with the foundation of legislation and best practices that apply in Indonesia. In accordance with the status of the Company as a subsidiary of State-Owned Enterprises (SOE), then the foundation for implementing GCG practice refers to the provisions of GCG that apply in BUMN. The reference is contained in regulation of the Minister of State BUMN No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011. Then in conducting the evaluation or assessment of GCG periodically using indicators that are governed in the decision of the Secretary of State Minister of BUMN Number SK-16/S.MBU/2012 on indicators/parameters assessment and evaluation of good Corporate Governance implementation in state-owned enterprises. GCG practice in the Company is also governed by the Board of Directors decree No. 037/CU/KCI/IX/2017.

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Principles of Corporate Governance

Perseroan menyadari bahwa dalam setiap kegiatan Perseroan perlu menjunjung tinggi etika dan sikap-sikap yang mengamalkan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya Transparansi, Akuntabilitas Tanggung Jawab, Kesetaraan dan Independensi. Kelima hal tersebut juga harus ditambah harmoni sehingga adanya keseimbangan dalam penerapan GCG di Perseroan. Berikut adalah penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan di Perseroan:

The Company realizes the urgency to uphold ethics and attitudes that apply the principles of GCG. These principles include Transparency, Accountability, Responsibility, Equality and Independence. These five things must also be added to harmony so that there is a balance in the implementation of GCG in the Company. The following is the implementation of the principles of corporate governance in the Company:

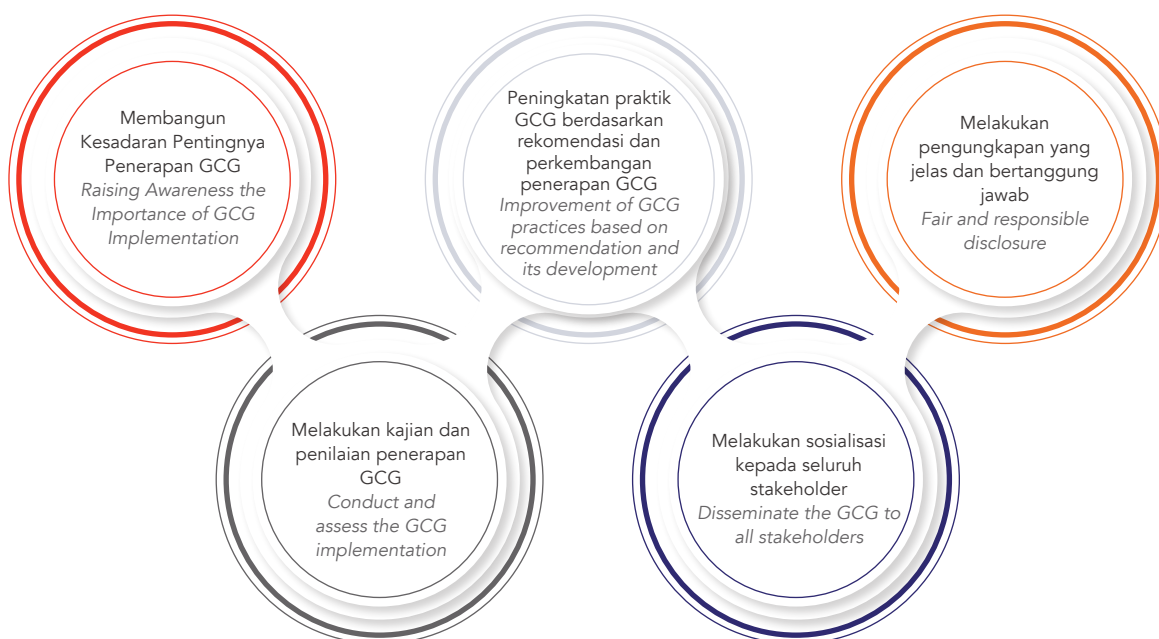
Prinsip Principles	Uraian Penerapan Prinsip-Prinsip GCG The Implementation of GCG Principles
Keterbukaan Transparency	Perseroan mempunyai kebijakan dalam melakukan pengambilan keputusan dan keterbukaan informasi yang relevan kepada seluruh <i>stakeholder</i> baik <i>stakeholder</i> internal dan eksternal sesuai dengan kebijakan peraturan perundangan-undangan yang ada. Perseroan menjamin pengungkapan informasi yang diberikan merupakan data yang akurat, jelas, memadai, tepat waktu, mampu telusur dan mudah diakses pada semua kalangan <i>stakeholder</i>. Informasi yang diberikan Perseroan diberikan melalui hal-hal sebagai berikut: - Media Massa - Website Perusahaan - Media Sosial - Laporan Tahunan <i>The Company has policies in the matter of decision making and disclosure of relevant information to all stakeholders both internal and external stakeholders in accordance with the regulatory policy. The Company guarantees that the disclosure of information provided is accurate, clear, adequate, timely, able to search and accessible to all stakeholders. The information provided by the Company are provided through the following matters:</i> - Mass Media - Company Website - Social Media - Annual Report
Akuntabilitas Accountability	Perseroan menerapkan akuntabilitas dengan mengungkapkan dengan jelas tugas dan kewajiban pegawai serta hak, wewenang dan tanggung jawab antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi serta Manajemen dari level atas hingga level bawah. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: - Melakukan RUPS sesuai ketentuan yang berlaku - Direksi mengelola Perusahaan yang sejalan dengan ketentuan yang ada - Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi tentang pengelolaan Perusahaan - Seluruh pegawai melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan unit kerjanya masing-masing <i>The Company implements accountability by disclosing the duties and obligations of the employees and the rights, authority and responsibilities of Shareholders, Board of Commissioners, Directors, and management from the upper level to the lower level. It can be seen from the following statements:</i> - Conduct the GMS according to applicable provisions - The Board of Directors manages the Company in line with existing provisions - The Board of Commissioners supervises and advises the Board of Directors on the management - All employees perform duties and functions in accordance with their respective working units



Prinsip Principles	Uraian Penerapan Prinsip-Prinsip GCG The Implementation of GCG Principles
Responsibilitas Responsibility	Perseroan senantiasa melakukan penerapan seluruh kegiatan usahanya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan hasil masukan dan arahan atas pelaksanaan bisnis dari para <i>stakeholder</i>. Perseroan melakukan tanggung jawabnya baik kepada pegawai sebagai mitra strategis dalam bisnis Perusahaan dengan cara memberikan hak-hak pegawai serta melakukan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diperlukan. Perseroan melakukan tanggung jawab kepada para mitra kerja untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan komunikatif sehingga proses kerja dapat berjalan lancar. Perseroan melakukan tanggung jawab sosial dengan membangun lingkungan yang aman dan terkendali untuk kegiatan operasional Perseroan. <i>The Company continues to implement all its business activities by complying with prevailing laws and regulations, implementing the results of inputs and directives on the implementation of business from stakeholders. The Company performs its responsibility for its employees as strategic partners in the Company's business by providing employees' rights and coaching and development in accordance with the necessary educational competencies. The Company conducts responsibility to the partners to conduct business activities in accordance with the prevailing rules and communicative to support the good business process. The Company conducts social responsibility by establishing a safe and controlled environment for the operational activities of the Company.</i>
Kewajaran Fairness	Perseroan menerapkan asas kewajaran kepada seluruh <i>stakeholder</i> secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perseroan. Perseroan juga membuka seluruh akses informasi kepada seluruh <i>stakeholder</i> untuk memberikan masukan yang konstruktif terhadap pengelolaan Perseroan sesuai dengan aturan pemberian informasi yang wajar dan bertanggung jawab. Dalam penerapan usahanya Perseroan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk penerimaan, pengembangan kompetensi dan berkariir tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan serta kondisi fisik. <i>The Company applies the principle of fairness to all stakeholders fairly between the rights and obligations given to and by the Company. The Company also disclosing all information access to all stakeholders to provide constructive feedback on the Company's management in accordance with the rules of providing reasonable and responsible information. In the application of the Company's business provides board opportunities for acceptance, competency development and career without discriminate gender, ethnicity, religion, race and group and physical conditions.</i>
Independensi Independency	Prinsip independensi diterapkan dengan melakukan penerapan kode etik yang diperbaharui sesuai dengan kebutuhan atau hasil evaluasi dari manajemen yang didalamnya terdapat peraturan mengenai transaksi dengan pihak lain, benturan kepentingan dan peraturan lainnya yang mengikat kepada seluruh Insan Perseroan sehingga independensi dapat berjalan dengan objektif. Hal ini ditandai dengan pengambilan keputusan yang menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dan setiap Insan Perseroan saling menghormati hak dan kewajiban yang ada serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. <i>The principles of the index are implemented by manifesting the updated code of conduct according to the needs or results of the evaluation of the management in which there are regulations regarding transactions with other parties, conflicts of interest and other regulations that bind to all the Company's elements so that the index can run objectively. It is characterized by decision making that avoids a conflict of interest and each Company's employee respect the rights and obligations that exist and in accordance with the basic of each duties and functions.</i>

TAHAPAN IMPLEMENTASI GCG DI KCI

GCG Implementation In KCI





JEJAK LANGKAH UNIT GCG

The Step of The GCG Unit

2017

- Pembentukan Unit Policy GCG
GCG Unit Policy Establishment
- Membuat kebijakan-kebijakan tentang GCG di antaranya (Pedoman GCG, Pedoman Pelaporan Gratifikasi, Pedoman Pelaporan WBS, LHKPN, Board Manual, Kode Etik) GCG
Determine the GCG Policies (GCG Manual, Gratification Disclosure, WBS, LHKPN, Board Manual, Code of Conduct)
- Pembentukan tim Whistleblowing System
WBS Team Establishment
- Pembentukan tim Komite Etika
Ethic Committee Team Establishment
- Pembentukan perangkat Dewan Komisaris (Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit)
GCG The Board of Commissioners Support Establishment (Risk Management and Audit Committee)

2018

- Penetapan dan pengesahan Budaya Perusahaan
Establishment and ratification of corporate customs
- Melaksanakan Assessment GCG
Conducting GCG Assessment
- Pembuatan Quality Manual
Book Quality Manual Book determination
- Penyempurnaan Kode Etik
Code of Conduct improvements
- Pembuatan SOP-SOP Pendukung GCG
GCG Determining GCG supporting SOPs

2019

- Pembuatan Aplikasi Kode Etik Online
Code of Conduct Application determination
- Pembuatan Pedoman Sistem Manajemen Mutu
Quality Management System Manual determination
- Penyempurnaan Kode Etik
Code of Conduct improvements
- Pembuatan Roadmap GCG GCG
Roadmap determination

2020

- Penerapan Kode Etik Online
Implementation of Online Code of Conduct
- Launching Commuter Whistleblowing System (WBS)
Commuter Whistleblowing System (WBS) Launching

KEGIATAN IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2020

Corporate Governance Implementation Activity 2020

Januari

- 1 Januari 2020
Sosialisasi GCG-Pelaporan LHKPN 2019

January

- January 1, 2020
GCG Socialization-Reporting LHKPN 2019

Februari

- 7 Februari 2020
Sosialisasi GCG-Pelaporan LHKPN 2019

February

- 7 February 2020
GCG Socialization-Reporting LHKPN 2019

Maret

- 4 Maret 2020
Sosialisasi GCG-Pengendalian Gratifikasi
- 9 Maret 2020
Persiapan re-sertifikasi dan pelaksanaan audit internal ISO 9001:2015
- 18 Maret 2020
Sosialisasi GCG-Ucapan terima kasih pelaporan LHKPN 2019
- 20 Maret 2020
Sosialisasi GCG-Informasi Commuter Innovation Challenge 2020
- 30 Maret 2020
SNI Award

March

- March 4, 2020
GCG Socialization-Gratification Control
- March 9, 2020
Preparation of re-certification and implementation of ISO 9001:2015 internal audit
- March 18, 2020
GCG socialization-Appreciation for reporting LHKPN 2019
- March 20, 2020
GCG Socialization-Commuter Innovation Challenge
- March 30, 2020
SNI Award

April

- 8 April 2020
Sosialisasi GCG-Tetap profesional dengan segala kondisi
- 21 April 2020
Sosialisasi GCG-Partisipasi kuis tentang budaya perusahaan

April

- April 8, 2020
GCG Socialization-Remaining professional in all conditions
- April 21, 2020
GCG socialization-Quiz participation about corporate culture

Mei

- 5 Mei 2020
Hasil partisipasi kuis budaya perusahaan
- 13 Mei 2020
Sosialisasi GCG-Komitmen tolak gratifikasi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri

May

- May 5, 2020
Corporate culture quiz participation results
- May 13, 2020
GCG Socialization-Commitment to deny gratification in the context of Eid Al-Fitr

Juni

- 22 Juni 2020
Sosialisasi GCG-Partisipasi kuis kode etik
- 29 Juni 2020
Sosialisasi GCG-Review dokumen mutu, pelaksanaan audit internal dan persiapan *surveillance* ISO 9001

June

- 22 June 2020
GCG Socialization-Participation in the code of ethics quiz
- 29 June 2020
GCG Socialization-Review of quality documents, implementation of internal audits and preparation of ISO 9001 *surveillance*



Juli

- **8 Juli 2020**
Sosialisasi GCG-Hasil partisipasi kuis pedoman etika dan perilaku insan KCI
- **16 Juli 2020**
Sosialisasi GCG-Insan KCI tolak gratifikasi
- **23 Juli 2020**
Sosialisasi GCG-Disiplin waktu sebagai budaya kerja
- **29 Juli 2020**
Sosialisasi GCG-Go live aplikasi kode etik online

July

- **July 8, 2020**
GCG Socialization-Results of participation in the quiz on ethics and behavior of KCI personnel
- **July 16, 2020**
GCG Socialization-KCI Personnel Fight Gratification
- **23 July 2020**
GCG socialization-Time discipline as work culture
- **29 July 2020**
GCG Socialization-Go live of the online code of conduct application

Agustus

- **3 Agustus 2020**
Sosialisasi GCG-Susunan Direksi KAI dan KCI
- **7 Agustus 2020**
Sosialisasi GCG-Kebijakan mutu KCI

August

- **August 3, 2020**
GCG socialization-KAI and KCI Board of Directors
- **7 August 2020**
GCG socialization-KCI quality policy

September

- **1 September 2020**
Sosialisasi budaya 3M di lingkungan KCI
- **2 September 2020**
Hasil rekapitulasi pengisian kode etik online

September

- **September 1, 2020**
3M cultural socialization within KCI
- **September 2, 2020**
The recapitulation of filling in the online code of ethics

Oktober

- **2 Oktober 2020**
Hasil rekapitulasi pengisian kode etik online KCI

October

- **October 2, 2020**
The results of the recapitulation of filling out the KCI online code of ethics

November

- **25 November 2020**
Sosialisasi GCG-Commuter Whistleblowing System

November

- **November 25, 2020**
GCG socialization-Commuter Whistleblowing System

KEBIJAKAN DAN STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Policy and Structure

Struktur dan mekanisme GCG dalam Praktik GCG di Perseroan terdiri atas Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan Organ Pendukung GCG merupakan organ Perseroan yang membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam implementasi GCG. Adapun Komite di bawah Dewan Komisaris, di antaranya Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Sekretaris Dewan Komisaris.

PENANGGUNG JAWAB IMPLEMENTASI GCG

Dalam penerapannya, penanggungjawab atas penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilaksanakan pada Unit Hukum dan Kepatuhan dengan Keputusan Direksi Nomor SK-005.1/KCJ/DIR-HRD/III/2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana, di tahun 2018 terdapat Revisi atas Surat Keputusan Direksi tersebut dengan dikeluarkannya SK-024/KCI/DIR-HRD/X/2018 sehingga mengubah Struktur Organisasi pengelolaan GCG menjadi tanggung jawab Unit Sekretaris Perusahaan.

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan memiliki kebijakan pedoman dan prosedur dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini diukung oleh kebijakan kebijakan yang memuat hak, kewajiban, tugas pokok, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab pada setiap lini.

Perseroan secara berkala melakukan pemantauan atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan melakukan penyempurnaan serta memastikan bahwa penerapan tata kelola yang dilakukan berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

The structure and mechanism of GCG in the Company's GCG practice consist of the main organs and supporting organs. The main organs consist of general Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Board of Directors. Meanwhile, GCG Support Organ is the Company's organ that assists the duties and obligations of the Board of Commissioners and Directors in implementing GCG. The Committee under the BOC, including the Audit Committee, Risk Management Committee, Secretary of the Board of Commissioners.

GCG IMPLEMENTATION AUTHORIZATION

In its implementation, the authorization for the implementation of good corporate governance principles implemented in the Unit of Law and Compliance with the decision of the Board of Directors Decree No. 005.1/KCJ/DIRHRD/III/2016 on organizational structure and governance, in 2018 there was a revision of the Decree of the Board of Directors with the issuance of SK-024/KCI/DIR-HRD/X/2018 to change the organizational structure of GCG management to be the responsibility of the Corporate Secretary Unit.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

The Company has policy of guidelines and procedures for implementing good corporate governance. This is subject to policy policies that contain the rights, obligations, principal tasks, functions and powers and responsibilities of each line.

The Company periodically conducts monitoring of policies and improvements and ensures the implementation of good and sustainable governance.



PENILAIAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

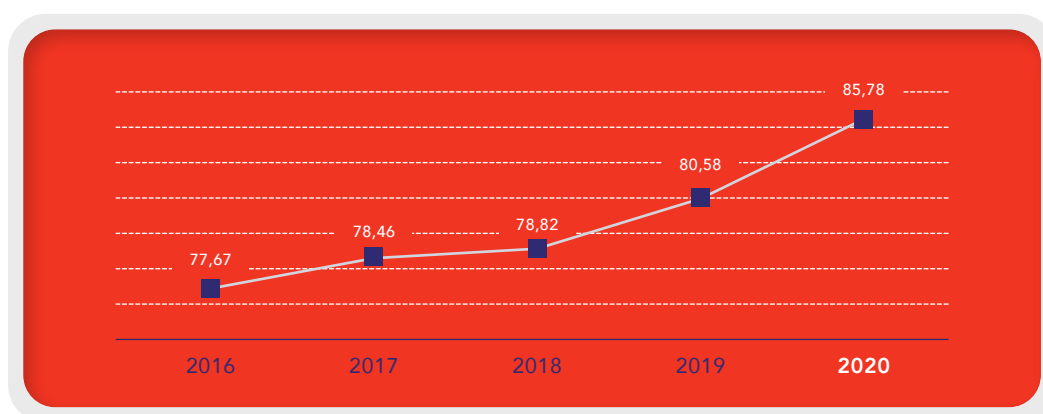
GCG Assessment

Pengukuran penerapan aktivitas GCG menggunakan parameter yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor 16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Penilaian GCG dalam PT Kereta Commuter Indonesia dilakukan melalui 2 cara yaitu *assessment* dan *self-assessment*. Untuk tahun 2020 telah dilakukan *assessment* yang dinilai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan perolehan nilai 85,78.

Measurement of the implementation of GCG activities using parameters set by the Ministry of SOES as stipulated in the Decree of the Secretary of State of BUMN No. 16/S. MBU/2012 on indicators/parameters assessment and evaluation of good Corporate Governance implementation in state-owned enterprises.

GCG Assessment in PT Kereta Commuter Indonesia was conducted through 2 ways: *assessment* and *self assessment*. In 2020, the Company has conducted *assessment* by Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) achieving 85.78.



Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Assessment Aspects/Indicator/Parameter	Bobot Value	Capaian Achievement				
		2016	2017	2018	2019	2020
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	5,24	5,93	6,33	6,40	93,57
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal Shareholder/GMS/Capital Owner	9,000	7,44	7,53	6,88	6,98	78,14
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Monitoring Board	35,000	26,67	28,01	28,58	29,76	89,37
Direksi Board of Directors	35,000	29,68	30,55	28,88	29,13	91,85
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,000	6,02	6,44	8,14	8,30	97,49
Aspek Lainnya* Other Aspects *	0,000	-	-	-	-	-
TOTAL NILAI Total Score	100,00	77,67	78,46	78,82	80,58	85,78

Kriteria yang digunakan dalam self-assessment maupun assessment GCG

Atas assessment dan self assessment yang diterapkan di PT KCI, pada dasarnya mengikuti 2 ketentuan pokok, yaitu:

- Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, dan P&T Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.
- Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 Tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Pihak yang melakukan assessment GCG tahun 2020

Penilaian Permohonan untuk pelaksanaan Assessment GCG PT Kereta Commuter Indonesia nomor surat 322/DU-CS/KCI/XI/2020 tanggal 18 November 2020 perihal Permohonan Kerjasama Melaksanakan Asesmen GCG Tahun 2020 PT Kereta Commuter Indonesia kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta. Dengan Surat Tugas Nomor ST-20/PW09/4.1/2021 mengenai penugasan tentang pelaksanaan Assessment GCG tahun 2020 di PT KCI.

Criteria used in self-assessment and assessment of GCG

On the assessment and Self Assessment applied at PT KCI, basically follow 2 basic provisions, namely:

- Regulation of the Minister of SOE Number: PER-01/MBU/2011 Dated August 1, 2011 on the implementation of Good Corporate Governance in BUMN, and P&T regulation of the Minister of State BUMN Number: PER-09/MBU/2012 dated July 16, 2012 about the amendment to the regulation of the Minister of State BUMN Number: PER-01/MBU/2011 concerning the implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
- The decree of the Ministry of BUMN No: SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance implementation.

The party conducting GCG assessment in 2020

Assessment of application for GCG Assessment of PT Kereta Commuter Indonesia Letter Number 292/DK-HR/KCI/X/2019 to Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) representative of DKI Jakarta. By letter of Duty number ST-999/PW09/4.1/2009 regarding the assignment on the implementation of the Assessment GCG in 2019 at PT KCI.

SKOR ASSESSMENT GCG 2020

GCG Assessment Score in 2020

Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Assessment Aspects/Indicator/Parameter	Bobot Value	Capaian Achievement		Predikat Predicate
		Skor Score	%	
Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,55	93,57	Sangat Baik Very Good
Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal Shareholder/GMS/Capital Owner	9,00	7,03	78,14	Baik Good
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Monitoring Board	35,00	31,28	89,37	Sangat Baik Very Good
Direksi Board of Directors	35,00	32,14	91,85	Sangat Baik Very Good



Aspek Pengujian/Indikator/Parameter <i>Assessment Aspects/Indicator/Parameter</i>	Bobot <i>Value</i>	Capaian <i>Achievement</i>		Predikat <i>Predicate</i>
		Skor <i>Score</i>	%	
Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,00	8,77	97,49	Sangat Baik <i>Very Good</i>
Aspek Lainnya* <i>Other Aspects*</i>	0,00	0,00	-	-
TOTAL NILAI <i>Total Score</i>	100,0	100,00	85,78	Sangat Baik <i>Very Good</i>

Skor assessment GCG 2020

GCG Assessment Score in 2020

No	Aspek Governance <i>Governance Aspects</i>	Jumlah Rekomendasi <i>Total Recommendation</i>
1.	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment To Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>	
2.	Pemegang Saham/RUPS <i>Shareholder/GMS/Capital Owner</i>	5
3.	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	4
4.	Direksi <i>Board of Directors</i>	3
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Disclosure And Transparency</i>	
6.	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	
JUMLAH <i>TOTAL</i>		

Rekomendasi assessment GCG Tahun 2020

Atas hasil assessment GCG yang telah dilakukan penilaian oleh BPKP, PT KCI berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap temuan *area of improvement* dalam penilaian tersebut, berikut hasil rekomendasi assessment di tahun 2020.

GCG Assessment Recommendation In 2020

For the results of GCG assessment that has been done by BPKP, PT KCI is committed to follow up with each area of improvement findings in the assessment, following assessment recommendation in year 2020.

Aspek Pemegang Saham Shareholders Aspects

No	Parameter Parameter	Rekomendasi Recommendation
1.	Surat Keputusan Pemegang Saham tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi masih merujuk ke Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 29 Maret 2012, belum merujuk ke Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, yang diundangkan tanggal 6 Juli 2020; <i>Shareholders' Decree regarding the guidelines for the appointment and dismissal of the Board of Directors still refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-03/MBU/2012 concerning Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries dated March 29, 2012, not yet referring to the Ministerial Regulation State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-04/MBU/06/2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-03/MBU/2012 concerning Guidelines for Appointing Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries, which was promulgated on 6 July 2020;</i>	Memperbaharui Surat Keputusan Pemegang Saham (PS) PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Tata Kelola Anak Perusahaan (<i>Subsidiary Governance</i>) di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero), sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan; <i>Renewed Shareholders' Decree of PT Kereta Api Indonesia (Persero) regarding Subsidiary Governance within PT Kereta Api Indonesia (Persero), in accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-04/MBU/06/2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-03/MBU/2012 concerning Guidelines for Appointing Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries;</i>
2.	Belum ada aturan secara eksplisit yang menetapkan maksimal jumlah jabatan sebagai Komisaris yang dapat dipegang seorang Komisaris; <i>There is no explicit rule that stipulates the maximum number of positions as a Commissioner that can be held by a Commissioner;</i>	Membuat aturan secara eksplisit yang menetapkan maksimal jumlah jabatan sebagai Komisaris yang dapat dipegang seorang Komisaris; <i>Make explicit rules that stipulate the maximum number of positions as a Commissioner that can be held by a Commissioner;</i>
3.	Pemegang Saham/RUPS belum mengesahkan pedoman penyusunan RJPP, tidak terdapat pembahasan/pengkajian RJPP oleh Pemegang Saham dalam risalah sirkuler keputusan Pemegang Saham tentang persetujuan dan pengesahan rencana jangka panjang perseroan, dan pengesahan RJPP dilaksanakan tidak tepat waktu; <i>The Shareholders/GMS have not ratified the guidelines for the preparation of the RJPP, there is no discussion/assessment of the RJPP by the Shareholders in the circular minutes of the Shareholders' decisions regarding the approval and ratification of the company's long-term plan, and the ratification of the RJPP is not carried out on time;</i>	Mengesahkan pedoman penyusunan RJPP, memuat pembahasan/pengkajian RJPP oleh Pemegang Saham dalam risalah sirkuler keputusan Pemegang Saham tentang persetujuan dan pengesahan rencana jangka panjang perseroan, dan mengesahkan RJPP tepat waktu; <i>Approve the guidelines for the preparation of the RJPP, contain the discussion/assessment of the RJPP by the Shareholders in the circular minutes of the Shareholders' decisions regarding the approval and ratification of the company's long-term plan, and ratify the RJPP on time;</i>



No	Parameter Parameter	Rekomendasi Recommendation
4.	Pemegang Saham belum melakukan pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan, dan belum terdapat rencana tindak atas <i>area of improvement</i> yang dihasilkan dari <i>assessment GCG</i> ; <i>Shareholders have not discussed and evaluated the implementation of Good Corporate Governance in the company, and there is no action plan for areas of improvement resulting from the GCG assessment;</i>	Membahas dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan, dan segera menindaklanjuti <i>area of improvement</i> yang dihasilkan dari <i>assessment GCG</i> ; <i>Discuss and evaluate the implementation of Good Corporate Governance in the company, and immediately follow up on areas of improvement resulting from the GCG assessment;</i>
5.	RUPS/Pemilik Modal belum menetapkan sistem penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris. <i>The GMS/Capital Owners have not established a system for receiving reports regarding symptoms of declining performance from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.</i>	Menetapkan sistem penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris. <i>Establish a system for receiving reports regarding symptoms of declining performance from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.</i>

Aspek Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Aspects

No	Parameter Parameter	Rekomendasi Recommendation
1.	Dewan Komisaris belum menyampaikan tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RJPP 2020-2024 kepada Pemegang Saham; <i>The Board of Commissioners has not submitted a written response in the form of opinions and suggestions regarding the 2020-2024 RJPP draft to the Shareholders;</i>	Menyampaikan tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran atas rancangan RJPP 2020-2024 kepada Pemegang Saham; <i>Submit written responses in the form of opinions and suggestions on the 2020-2024 RJPP draft to Shareholders;</i>
2.	Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi, namun belum terdapat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP; <i>The Board of Commissioners gives approval to the RKAP draft submitted by the Board of Directors, but there is no conclusion that the draft RKAP is in line with and/or not in line with the RJPP;</i>	Memberikan persetujuan RKAP dengan memberikan kesimpulan bahwa RKAP selaras/tidak selaras dengan RJPP; <i>Approving the RKAP by concluding that the RKAP is in line with/not in line with the RJPP;</i>

No	Parameter Parameter	Rekomendasi Recommendation
3.	Dewan Komisaris melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris, namun Dewan Komisaris belum mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris yang dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris dan melaporkannya dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; <i>The Board of Commissioners measures and assesses the performance of the Board of Commissioners, but the Board of Commissioners has not evaluated the performance achievement of each member of the Board of Commissioners as outlined in the minutes of the Board of Commissioners' Meeting and reported in the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners;</i>	Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan menuangkannya dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dan melaporkannya dalam Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; <i>Evaluate the performance achievements of each member of the Board of Commissioners and include it in the Minutes of Meetings of the Board of Commissioners and report it in the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners;</i>
4.	Dewan Komisaris menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham, namun belum terdapat penilaian kinerja Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing. <i>The Board of Commissioners assesses the Board of Directors and reports the results of the assessment to the Shareholders, but there has been no individual performance assessment of the Board of Directors with the realization of each achievement.</i>	Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing. <i>Assessing individual performance of the Board of Directors with the realization of each achievement.</i>

Aspek Direksi

The Board of Directors Aspects

No	Parameter Parameter	Rekomendasi Recommendation
1.	Direksi belum menyampaikan rancangan RJPP 2020-2024 kepada Pemegang Saham sesuai jadwal yang telah ditentukan; <i>The Board of Directors has not submitted the 2020-2024 RJPP draft to the Shareholders according to a predetermined schedule;</i>	Menyampaikan rancangan RJPP 2020-2024 kepada Pemegang Saham sesuai jadwal yang telah ditentukan; <i>Submitting the 2020-2024 RJPP draft to the Shareholders according to a predetermined schedule;</i>
2.	Terdapat jabatan kosong di perusahaan; <i>There are vacant positions in the company;</i>	Mengisi jabatan kosong di perusahaan; <i>Filling vacant positions in the company;</i>
3.	Direksi belum melaporkan tingkat pencapaian target kinerja anggota Direksi secara individu. <i>The Board of Directors has not reported the level of achievement of the performance targets of individual members of the Board of Directors.</i>	Melaporkan tingkat pencapaian target kinerja anggota Direksi secara individu. <i>Report the level of achievement of the performance targets of individual members of the Board of Directors.</i>



Tindak Lanjut Rekomendasi Assessment GCG Tahun 2019 yang Dilaksanakan pada Tahun 2020
Follow-up to Recommendations for the 2019 GCG Assessment Implemented in 2020

No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan <i>Commitment to the Implementation of Sustainable Governance</i>	Melakukan penyelarasan antara <i>Board Manual</i> dan Pedoman GCG. <i>Alignment between the Board Manual and the GCG Guidelines.</i>	Koordinasi dengan PT KAI perihal progres revisi SK Tata Kelola Anak Perusahaan dan Pedoman GCG PT KAI. <i>Coordination with PT KAI regarding the progress of the revision of the SK Governance for Subsidiaries and PT KAI's GCG Guidelines.</i>
	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan <i>Commitment to the Implementation of Sustainable Governance</i>	Menetapkan mekanisme dan sanksi apabila terdapat pelanggaran aturan perilaku oleh anggota Direksi dan/atau Komisaris. <i>Establish mechanisms and sanctions if there are violations of the rules of conduct by members of the Board of Directors and/or Commissioners.</i>	Sudah dibuatkan Revisi Kode Etik Tahun 2019. <i>The 2019 Code of Conduct has been revised.</i>
	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan <i>Commitment to the Implementation of Sustainable Governance</i>	Memuat pernyataan komitmen bahwa perusahaan akan membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Perilaku. <i>Contains a statement of commitment that the company will make financial reports in accordance with the provisions of the Code of Conduct.</i>	Sudah dibuatkan Revisi Kode Etik Tahun 2019. <i>The 2019 Code of Conduct has been revised.</i>
	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan <i>Commitment to the Implementation of Sustainable Governance</i>	Menetapkan mekanisme penanganan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Direksi atau Komisaris. <i>Establish a mechanism for handling violations of the code of ethics committed by members of the Board of Directors or Commissioners.</i>	Sudah dibuatkan Revisi Kode Etik Tahun 2019. <i>The 2019 Code of Conduct has been revised.</i>
	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan <i>Commitment to the Implementation of Sustainable Governance</i>	Menyatakan secara eksplisit komitmen anggota Direksi dan Komisaris untuk mematuhi Pedoman Perilaku/Kode Etik. <i>Explicitly state the committee members of the Board of Directors and Commissioners to comply with the Code of Conduct/Code of Ethics.</i>	Sudah dibuatkan Revisi Kode Etik Tahun 2019. <i>The 2019 Code of Conduct has been revised.</i>
	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan <i>Commitment to the Implementation of Sustainable Governance</i>	Menetapkan mekanisme untuk memastikan semua insan Perseroan membaca dan memahami ketentuan gratifikasi untuk kemudian mematuhi. <i>Establish a mechanism to ensure that all Company personnel read and understand the gratification provisions and then comply with them.</i>	Sudah dibuatkan Revisi Kode Etik Tahun 2019. <i>The 2019 Code of Conduct has been revised.</i>
	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan <i>Commitment to the Implementation of Sustainable Governance</i>	Melakukan evaluasi atas kebijakan dan efektivitas pelaksanaan WBS. <i>Evaluate policies and effectiveness of WBS implementation.</i>	Akan dibuatkan survei tentang efektivitas pelaksanaan penerapan GCG termasuk Pengendalian Gratifikasi, WBS di Lingkungan Perseroan. <i>A survey will be made on the effectiveness of the implementation of GCG implementation including Gratification Control, WBS in the Company's environment.</i>

No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan <i>Commitment to the Implementation of Sustainable Governance</i>	Menetapkan mekanisme dimana pelaporan pelanggaran aturan gratifikasi melalui media yang tidak bisa diubah dan ditangani oleh komite etika yang dapat beranggotakan Sekretaris Perusahaan, VP Hukum, VP SPI, dan VP SDM. <i>Establish a mechanism whereby the reporting of violations of the gratification rules through the media cannot be changed and is handled by an ethics committee which can consist of the Corporate Secretary, VP of Law, VP of SPI, and VP of HR.</i>	Sudah dibuatkan aplikasi GCG Online yang saat ini masih dalam tahap uji coba dan dalam proses pembuatan SK Pengendalian Gratifikasi di Unit Policy GCG. <i>The GCG Online application has been made which is currently still in the pilot stage and in the process of making a Gratification Control Decree in the GCG Policy Unit.</i>
2	Pemegang Saham/RUPS <i>Shareholders/GMS</i>	Menetapkan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi pada PT KCI dengan mempertimbangkan perubahan mekanisme pengangkatan Direksi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri BUMN PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN. <i>Establish Guidelines for the Appointment and Dismissal of Directors at PT KCI by considering changes in the mechanism for appointing Directors as stipulated in the Minister of SOEs Regulation PER-03/MBU/02/2015 dated 17 February 2015 concerning the Requirements for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of SOEs.</i>	Manajemen PT KCI telah membuat surat kepada Direktur Utama PT KAI dan Unit Subsidiary PT KCI perihal usulan tindak lanjut rekomendasi Assessment GCG PT KCI Tahun 2018. <i>PT KCI management has written a letter to the President Director of PT KAI and PT KCI's Subsidiary Unit regarding the proposed follow-up to PT KCI's 2018 GCG Assessment recommendations.</i>
	Pemegang Saham/RUPS <i>Shareholders/GMS</i>	Mengingatkan kembali Kementerian BUMN mengenai penetapan Direksi PT KCI dan melibatkan Pemegang Saham Minoritas dalam pemilihan Direksi dan Komisaris PT KAI (Persero) dalam masa yang akan datang atau menetapkan dalam kebijakan pengelolaan anak perusahaan PT KAI (Persero) tentang masa berlakunya Pelaksana Tugas sesuai dengan ketentuan Kementerian BUMN. <i>Reminding the Ministry of SOEs regarding the determination of the Board of Directors of PT KCI and involving Minority Shareholders in the selection of Directors and Commissioners of PT KAI (Persero) in the future or setting out in the policy of managing the subsidiary of PT KAI (Persero) regarding the validity period of the Executing Tasks in accordance with the provisions of the Ministry BUMN.</i>	Manajemen PT KCI telah membuat surat kepada Direktur Utama PT KAI dan Unit Subsidiary PT KCI perihal usulan tindak lanjut rekomendasi Assessment GCG PT KCI Tahun 2018. <i>PT KCI management has written a letter to the President Director of PT KAI and PT KCI's Subsidiary Unit regarding the proposed follow-up to PT KCI's 2018 GCG Assessment recommendations.</i>



No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Pemegang Saham/RUPS Shareholders/GMS	Mengatur jenis-jenis jabatan rangkap yang menimbulkan benturan kepentingan Pedoman Tata Kelola Anak Perusahaan. <i>Regulate the types of concurrent positions that cause conflicts of interest in the Subsidiary Governance Guidelines.</i>	Manajemen PT KCI telah membuat surat kepada Direktur Utama PT KAI dan Unit Subsidiary PT KCI perihal usulan tindak lanjut rekomendasi Assessment GCG PT KCI Tahun 2018. <i>PT KCI management has written a letter to the President Director of PT KAI and PT KCI's Subsidiary Unit regarding the proposed follow-up to PT KCI's 2018 GCG Assessment recommendations.</i>
	Pemegang Saham/RUPS Shareholders/GMS	Menyatakan alasan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris secara transparan dalam Keputusan RUPS termasuk karena berakhirnya masa jabatan. <i>State the reasons for the dismissal of members of the Board of Directors and Commissioners transparently in the GMS Resolution, including the end of the term of office.</i>	Manajemen PT KCI telah membuat surat kepada Direktur Utama PT KAI dan Unit Subsidiary PT KCI perihal usulan tindak lanjut rekomendasi Assessment GCG PT KCI Tahun 2018. <i>PT KCI management has written a letter to the President Director of PT KAI and PT KCI's Subsidiary Unit regarding the proposed follow-up to PT KCI's 2018 GCG Assessment recommendations.</i>
	Pemegang Saham/RUPS Shareholders/GMS	Mengesahkan RJPP secara tepat waktu sesuai ketentuan. <i>Approve the RJPP in a timely manner according to the provisions.</i>	Manajemen PT KCI telah membuat surat kepada Direktur Utama PT KAI dan Unit Subsidiary PT KCI perihal usulan tindak lanjut rekomendasi Assessment GCG PT KCI Tahun 2018. <i>PT KCI management has written a letter to the President Director of PT KAI and PT KCI's Subsidiary Unit regarding the proposed follow-up to PT KCI's 2018 GCG Assessment recommendations.</i>
	Pemegang Saham/RUPS Shareholders/GMS	Menetapkan pedoman penyusunan RJPP dan RKAP dalam Keputusan RUPS. <i>Establish guidelines for the preparation of RJPP and RKAP in the GMS Resolution.</i>	Manajemen PT KCI telah membuat surat kepada Direktur Utama PT KAI dan Unit Subsidiary PT KCI perihal usulan tindak lanjut rekomendasi Assessment GCG PT KCI Tahun 2018. <i>PT KCI management has written a letter to the President Director of PT KAI and PT KCI's Subsidiary Unit regarding the proposed follow-up to PT KCI's 2018 GCG Assessment recommendations.</i>

No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Pemegang Saham/RUPS Shareholders/GMS	Menetapkan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris PT KCI yang berasal dari luar PT KAI (Persero). <i>Establish a mechanism for the appointment and dismissal of the Board of Commissioners of PT KCI from outside PT KAI (Persero).</i>	Manajemen PT KCI telah membuat surat kepada Direktur Utama PT KAI dan Unit Subsidiary PT KCI perihal usulan tindak lanjut rekomendasi Assessment GCG PT KCI Tahun 2018. <i>PT KCI management has written a letter to the President Director of PT KAI and PT KCI's Subsidiary Unit regarding the proposed follow-up to PT KCI's 2018 GCG Assessment recommendations.</i>
	Pemegang Saham/RUPS Shareholders/GMS	Menetapkan anggota Dewan Komisaris Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris dan secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan pengangkatannya. <i>Determine the members of the Independent Board of Commissioners at least 20% of the members of the Board of Commissioners and explicitly stated in the decision of his appointment.</i>	Manajemen PT KCI telah membuat surat kepada Direktur Utama PT KAI dan Unit Subsidiary PT KCI perihal usulan tindak lanjut rekomendasi Assessment GCG PT KCI Tahun 2018. <i>PT KCI management has written a letter to the President Director of PT KAI and PT KCI's Subsidiary Unit regarding the proposed follow-up to PT KCI's 2018 GCG Assessment recommendations.</i>
	Pemegang Saham/RUPS Shareholders/GMS	Menetapkan Komisaris baru tepat waktu sesuai dengan ketentuan. <i>Appoint new Commissioners on time in accordance with the provisions.</i>	Manajemen PT KCI telah membuat surat kepada Direktur Utama PT KAI dan Unit Subsidiary PT KCI perihal usulan tindak lanjut rekomendasi Assessment GCG PT KCI Tahun 2018. <i>PT KCI management has written a letter to the President Director of PT KAI and PT KCI's Subsidiary Unit regarding the proposed follow-up to PT KCI's 2018 GCG Assessment recommendations.</i>
	Pemegang Saham/RUPS Shareholders/GMS	Menetapkan ketentuan pengaturan perangkap jabatan bagi Dewan Komisaris termasuk jumlah maksimum jabatan rangkap yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris dengan keputusan RUPS. <i>To stipulate the provisions for setting up concurrent positions for the Board of Commissioners, including the maximum number of concurrent positions that may be held by a member of the Board of Commissioners with the resolution of the GMS.</i>	Manajemen PT KCI telah membuat surat kepada Direktur Utama PT KAI dan Unit Subsidiary PT KCI perihal usulan tindak lanjut rekomendasi Assessment GCG PT KCI Tahun 2018. <i>PT KCI management has written a letter to the President Director of PT KAI and PT KCI's Subsidiary Unit regarding the proposed follow-up to PT KCI's 2018 GCG Assessment recommendations.</i>



No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Pemegang Saham/RUPS Shareholders/GMS	Menyebutkan secara eksplisit alasan pemberhentian termasuk karena berakhirnya masa jabatan dalam Surat Keputusan pemberhentian Komisaris. <i>State explicitly the reasons for dismissal, including the end of the term of office in the Decree on the dismissal of the Commissioner.</i>	Manajemen PT KCI telah membuat surat kepada Direktur Utama PT KAI dan Unit Subsidiary PT KCI perihal usulan tindak lanjut rekomendasi Assessment GCG PT KCI Tahun 2018. <i>PT KCI management has written a letter to the President Director of PT KAI and PT KCI's Subsidiary Unit regarding the proposed follow-up to PT KCI's 2018 GCG Assessment recommendations.</i>
	Pemegang Saham/RUPS Shareholders/GMS	Menetapkan sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu) dan Dewan Komisaris (kolegial) Anak Perusahaan, yang memuat sekurang- kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan dalam Keputusan Pemegang Saham/RUPS. <i>Establish a system/guideline for evaluating the performance of the Board of Directors (collegial and individual) and the Board of Commissioners (collegial) of Subsidiaries, which contains at least the main performance indicators and success criteria in the Decision of the Shareholders/GMS.</i>	Manajemen PT KCI telah membuat surat kepada Direktur Utama PT KAI dan Unit Subsidiary PT KCI perihal usulan tindak lanjut rekomendasi Assessment GCG PT KCI Tahun 2018. <i>PT KCI management has written a letter to the President Director of PT KAI and PT KCI's Subsidiary Unit regarding the proposed follow-up to PT KCI's 2018 GCG Assessment recommendations.</i>
	Pemegang Saham/RUPS Shareholders/GMS	Menyertakan formula perhitungan gaji/honorarium dan mengesahkan Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi. <i>Include a salary/honorarium calculation formula and ratify the Guidelines for Determining the Income of the Board of Commissioners and the Board of Directors.</i>	Manajemen PT KCI telah membuat surat kepada Direktur Utama PT KAI dan Unit Subsidiary PT KCI perihal usulan tindak lanjut rekomendasi Assessment GCG PT KCI Tahun 2018. <i>PT KCI management has written a letter to the President Director of PT KAI and PT KCI's Subsidiary Unit regarding the proposed follow-up to PT KCI's 2018 GCG Assessment recommendations.</i>
	Pemegang Saham/RUPS Shareholders/GMS	Menetapkan pedoman penunjukan audit eksternal dan melaksanakan pembahasan/pengkajian/penelaahan terhadap calon-calon auditor eksternal yang diajukan oleh Dewan Komisaris. <i>Establish guidelines for the appointment of external audits and carry out discussions/assessments/reviews of external auditor candidates proposed by the Board of Commissioners</i>	Manajemen PT KCI telah membuat surat kepada Direktur Utama PT KAI dan Unit Subsidiary PT KCI perihal usulan tindak lanjut rekomendasi Assessment GCG PT KCI Tahun 2018. <i>PT KCI management has written a letter to the President Director of PT KAI and PT KCI's Subsidiary Unit regarding the proposed follow-up to PT KCI's 2018 GCG Assessment recommendations.</i>

No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Pemegang Saham/RUPS Shareholders/GMS	Menetapkan pedoman penyusunan laporan pengawasan Dewan Komisaris serta melakukan telaah dan penilaian terhadap kinerja pengawasan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris, capaian kinerja berdasar KPI Dewan Komisaris dan capaian kinerja Perseroan. <i>Establish guidelines for the preparation of the supervisory report of the Board of Commissioners and conduct a review and assessment of the supervisory performance of the Board of Commissioners by considering the report on the results of the supervision of the Board of Commissioners, performance achievements based on the KPI of the Board of Commissioners and the Company's performance achievements.</i>	Manajemen PT KCI telah membuat surat kepada Direktur Utama PT KAI dan Unit Subsidiary PT KCI perihal usulan tindak lanjut rekomendasi Assessment GCG PT KCI Tahun 2018. <i>PT KCI management has written a letter to the President Director of PT KAI and PT KCI's Subsidiary Unit regarding the proposed follow-up to PT KCI's 2018 GCG Assessment recommendations.</i>
	Pemegang Saham/RUPS Shareholders/GMS	Menetapkan pedoman/kebijakan dividen yang memuat pertimbangan dan formula penentuan besarnya. <i>Establish guidelines/dividend policies that contain considerations and formulas for determining the amount.</i>	Manajemen PT KCI telah membuat surat kepada Direktur Utama PT KAI dan Unit Subsidiary PT KCI perihal usulan tindak lanjut rekomendasi Assessment GCG PT KCI Tahun 2018. <i>PT KCI management has written a letter to the President Director of PT KAI and PT KCI's Subsidiary Unit regarding the proposed follow-up to PT KCI's 2018 GCG Assessment recommendations.</i>
	Pemegang Saham/RUPS Shareholders/GMS	Memberikan arahan untuk peningkatan tata kelola perusahaan yang baik kepada Direksi dan Manajemen secara eksplisit dan jelas. <i>Provide directions for improving good corporate governance to the Board of Directors and Management explicitly and clearly.</i>	Telah dilakukan arahan dalam RUPS terkait peningkatan tata kelola perusahaan di PT KCI. <i>Directions have been made at the GMS regarding the improvement of corporate governance at PT KCI.</i>
	Pemegang Saham/RUPS Shareholders/GMS	Menindaklanjuti <i>areas of improvement</i> dari hasil <i>assessment</i> GCG khususnya pada aspek Pemegang Saham/RUPS. <i>Following up on areas of improvement from the results of the GCG assessment, especially in the aspect of Shareholders/GMS.</i>	Telah dilakukan pembahasan pada BOD BOC tentang tindak lanjut <i>assessment</i> GCG. <i>There has been a discussion at the BOD BOC regarding the follow-up to the GCG assessment.</i>
	Pemegang Saham/RUPS Shareholders/GMS	Menetapkan sistem penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris. <i>Establish a system for receiving reports regarding symptoms of declining performance from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.</i>	Manajemen PT KCI telah membuat surat kepada Direktur Utama PT KAI dan Unit Subsidiary PT KCI perihal usulan tindak lanjut rekomendasi <i>assessment</i> GCG PT KCI Tahun 2018. <i>The management of PT KCI has written a letter to the President Director of PT KAI and the Subsidiary Unit of PT KCI regarding the proposed follow-up to PT KCI's 2018 GCG assessment recommendations.</i>



No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
3	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Membuat laporan realisasi peningkatan kompetensi setelah pelaksanaan program pengembangan Dewan Komisaris. <i>Make a report on the realization of competency improvement after the implementation of the Board of Commissioners development program.</i>	Sudah tersedianya laporan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris untuk tahun 2019 <i>There is a report on improving the Board of Commissioners' competence in 2019</i>
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Memuat teknis pemberian persetujuan dan tata/ ketepatan waktu atas rancangan RJPP dalam <i>Board Manual</i> . <i>Contains technical approvals and procedures/ timeliness of the RJPP draft in the Board Manual.</i>	Sudah dimasukkan ke dalam SK Dekom Nomor: SK.008/KOM/KCI/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 perihal mekanisme pengambilan keputusan, pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. <i>It has been included in the Decision Letter of the Board of Commissioners Number: SK.008/KOM/KCI/X/2019 dated October 21, 2019 regarding the mechanism for making decisions, monitoring and providing advice to the Board of Commissioners.</i>
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Memberikan tanggapan secara tertulis tentang rancangan RJPP kepada RUPS. <i>Provide written responses regarding the RJPP draft to the GMS.</i>	Menunggu rancangan RJPP 2020-2024 yang diajukan oleh Direksi. <i>Waiting for the 2020-2024 RJPP draft submitted by the Board of Directors.</i>
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Menetapkan mekanisme bagi Dewan Komisaris untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari <i>stakeholder</i> dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan. <i>Establish a mechanism for the Board of Commissioners to respond/follow up on suggestions, problems or complaints from stakeholders and submit to the Board of Directors the required resolution suggestions.</i>	Sudah dimasukkan ke dalam SK Dekom Nomor: SK.008/KOM/KCI/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 perihal mekanisme pengambilan keputusan, pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. <i>It has been included in the Decision Letter of the Board of Commissioners Number: SK.008/KOM/KCI/X/2019 dated October 21, 2019 regarding the mechanism for making decisions, monitoring and providing advice to the Board of Commissioners.</i>

No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Menetapkan kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengelolaan sumber daya manusia. <i>Establish policies regarding supervision and providing advice on human resource management.</i>	Sudah dimasukkan ke dalam SK Dekom Nomor: SK.008/KOM/KCI/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 perihal mekanisme pengambilan keputusan, pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. <i>It has been included in the Decision Letter of the Board of Commissioners Number: SK.008/KOM/KCI/X/2019 dated October 21, 2019 regarding the mechanism for making decisions, monitoring and providing advice to the Board of Commissioners.</i>
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Melakukan telaah mengenai pengembangan karir serta pelaksanaannya, yang meliputi penempatan karyawan pada jabatan dalam struktur organisasi Perseroan, promosi dan demosi, mutasi khususnya rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi termasuk penerapan aturan SDM/HRD PT KAI (Persero) terkait penugasan karyawan PT KAI (Persero) di PT KCI. <i>Conduct a study on career development and its implementation, which includes the placement of employees in positions within the Company's organizational structure, promotions and demotions, transfers, especially promotion plans and mutations to one level of position under the Board of Directors, including the application of PT KAI (Persero) HR/HRD regulations related to the assignment of PT KAI (Persero) employees of KAI (Persero) at PT KCI.</i>	Surat Dekom No. 040/KOM/KCI/X/2019 tanggal 27 November 2019 tentang telaah efektivitas penerapan GCG Tahun 2018-2019. <i>Board of Commissioners' Letter No. 040/KOM/KCI/X/2019 dated 27 November 2019 regarding the review of the effectiveness of the 2018-2019 GCG implementation.</i>
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Menetapkan kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap <i>Establish policies regarding supervision and providing advice to</i>	
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	a Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. <i>Accounting policies and preparation of financial statements are in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia.</i>	Sudah dimasukkan ke dalam SK Dekom Nomor: SK.008/KOM/KCI/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 perihal mekanisme pengambilan keputusan, pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. <i>It has been included in the Decision Letter of the Board of Commissioners Number: SK.008/KOM/KCI/X/2019 dated October 21, 2019 regarding the mechanism for making decisions, monitoring and providing advice to the Board of Commissioners.</i>



No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	b Kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya. <i>Policies for the procurement of goods and services and their implementation.</i>	Sudah dimasukkan ke dalam SK Dekom Nomor: SK.008/KOM/KCI/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 perihal mekanisme pengambilan keputusan, pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. <i>It has been included in the Decision Letter of the Board of Commissioners Number: SK.008/KOM/KCI/X/2019 dated October 21, 2019 regarding the mechanism for making decisions, monitoring and providing advice to the Board of Commissioners.</i>
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	c Kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut. <i>Quality and service policies and implementation of these policies.</i>	Sudah dimasukkan ke dalam SK Dekom Nomor: SK.008/KOM/KCI/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 perihal mekanisme pengambilan keputusan, pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. <i>It has been included in the Decision Letter of the Board of Commissioners Number: SK.008/KOM/KCI/X/2019 dated October 21, 2019 regarding the mechanism for making decisions, monitoring and providing advice to the Board of Commissioners.</i>
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Menyampaikan hasil telaahan Dewan Komisaris atas penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik kepada Direksi dan menindaklanjuti seluruh area of improvement hasil assessment GCG yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris. <i>Delivering the results of the Board of Commissioners' review on the implementation of the principles of Good Corporate Governance to the Board of Directors and following up on all areas of improvement resulting from the GCG assessment that are under the authority of the Board of Commissioners.</i>	Telaahan hasil assessment GCG telah dilakukan oleh Sekdekom. <i>The GCG assessment results have been reviewed by the Secretary to the Board of Commissioners.</i>
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Melakukan self assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan menuangkannya dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. <i>Conduct a self-assessment of the performance of the Board of Commissioners and include it in the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners.</i>	Pelaksanaan Laporan Kinerja Dekom disampaikan Desember 2019. <i>The implementation of the Board of Commissioners Performance Report was submitted in December 2019.</i>

No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Melakukan telaah dan pengawasan kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga dalam Rencana Kerja Dewan Komisaris dan menyampaikan kepada RUPS. <i>Reviewing and supervising the compliance of the Board of Directors with applicable laws and regulations and agreements with third parties in the Board of Commissioners' Work Plan and submitting it to the GMS.</i>	Surat Dewan Komisaris No. 040/KOM/KCI/X/2019 Tanggal 27 November 2019 tentang telaah efektivitas penerapan GCG tahun 2018-2019. <i>Board of Commissioners Letter No. 040/KOM/KCI/X/2019 on 27 November 2019 regarding the review of the effectiveness of GCG implementation in 2018-2019.</i>
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Melakukan penilaian atas efektivitas audit eksternal serta melaksanakan peran dalam pemilihan auditor eksternal. <i>Assessing the effectiveness of external audits and carrying out roles in selecting external auditors.</i>	Surat Dewan Komisaris No. 040/KOM/KCI/X/2019 Tanggal 27 November 2019 tentang telaah efektivitas penerapan GCG tahun 2018-2019. <i>Board of Commissioners Letter No. 040/KOM/KCI/X/2019 on 27 November 2019 regarding the review of the effectiveness of GCG implementation in 2018-2019.</i>
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Melakukan penilaian atas efektivitas kinerja auditor internal. <i>Assessing the effectiveness of the internal auditor's performance.</i>	Surat Dewan Komisaris No. 040/KOM/KCI/X/2019 Tanggal 27 November 2019 tentang telaah efektivitas penerapan GCG tahun 2018-2019. <i>Board of Commissioners Letter No. 040/KOM/KCI/X/2019 on 27 November 2019 regarding the review of the effectiveness of GCG implementation in 2018-2019.</i>
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Menetapkan mekanisme penerimaan keluhan langsung dari stakeholder serta melakukan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris. <i>Establish a mechanism for receiving complaints directly from stakeholders and reviewing complaints related to SOEs received by the Board of Commissioners.</i>	Sudah dimasukkan ke dalam SK Dekom Nomor: SK.008/KOM/KCI/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 perihal mekanisme pengambilan keputusan, pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris. <i>It has been included in the Decision Letter of the Board of Commissioners Number: SK.008/KOM/KCI/X/2019 dated October 21, 2019 regarding the mechanism for making decisions, monitoring and providing advice to the Board of Commissioners.</i>



No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Mendorong Direksi untuk menetapkan KPI individual dan kemudian melakukan telaaah dan penilaian kinerja Direksi secara individual berdasarkan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individual. <i>Encouraging the Board of Directors to set individual KPIs and then conduct a review and assessment of the performance of the Board of Directors individually based on the criteria, targets and key performance indicators included in the individual Board of Directors Management Contract.</i>	Akan dilakukan pembahasan KPI Individual Direksi dan Dewan Komisaris. <i>There will be a discussion on the Individual KPIs for the Board of Directors and the Board of Commissioners.</i>
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Mengusulkan tantiem/insentif kinerja tahun yang bersangkutan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan Perseroan. <i>Propose performance bonuses/incentives for the year concerned by considering the results of the Board of Directors' performance assessment (KPI) and the achievement of the Company's health level.</i>	Sudah dilakukan <i>benchmark</i> ke Pertamina perihal mekanisme usulan pemberian tantiem/insentif dan akan diusulkan pada Laporan Kinerja Tahun 2019 kepada RUPS. <i>Benchmarks have been made to Pertamina regarding the proposed mechanism for the provision of bonuses/incentives and will be proposed in the 2019 Performance Report to the GMS.</i>
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Melampirkan pakta integritas dalam setiap usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS/Pemegang Saham. <i>Attach an integrity pact in every proposed action of the Board of Directors which must obtain a recommendation from the Board of Commissioners and approval of the GMS/Shareholders.</i>	Sudah dilaksanakan sesuai dengan Surat Dewan Komisaris Kepada Direksi Nomor: 030/KOM/KCI/X/2019 Tanggal 10 Oktober 2019 perihal tanggapan Dewan Komisaris atas usulan RKAP tahun 2019 dan penyeteroran modal kepada PT Fintech Karya Nusantara. <i>It has been carried out in accordance with the Letter of the Board of Commissioners to the Board of Directors Number: 030/KOM/KCI/X/2019 dated October 10, 2019 regarding the response of the Board of Commissioners to the proposed 2019 RKAP and investment of capital to PT Fintech Karya Nusantara.</i>
4	Direksi <i>Board of Directors</i>	Mendokumentasikan (membuat laporan) pelaksanaan program pengembangan yang dilaksanakan. <i>Documenting (making reports) the implementation of the development program implemented.</i>	Data pelatihan dibuatkan rekapitulasi dan dimasukkan ke dalam laporan manajemen. <i>The training data is recapitulated and entered into the management report.</i>

No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Direksi <i>Board of Directors</i>	Menetapkan standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi baik di dalam rapat maupun di luar rapat dengan disesuaikan karakteristik hal-hal yang harus diputuskan dan mengkomunikasikan standar tersebut kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait. <i>Setting a time standard for the speed of decision-making by the Board of Directors both inside and outside the meeting by adjusting the characteristics of the matters that must be decided and communicating these standards to the relevant organizational level below the Board of Directors.</i>	Standar waktu pengambilan keputusan sudah ada dan akan direview kembali. <i>Standard decision-making time already exists and will be reviewed again.</i>
	Direksi <i>Board of Directors</i>	Melakukan pengisian jabatan yang masih kosong sesuai formasi jabatan dalam struktur organisasi tahun 2018. <i>Fill in the vacant positions according to the position formation in the 2018 organizational structure.</i>	Sudah mulai dilakukan pengisian jabatan dan per 27 Desember 2019 telah terisi 183 posisi dari total 225 posisi jabatan mulai dari Asisten Manajer hingga Direksi (Kecukupan 81,3%). <i>Filling of positions has started and as of December 27, 2019 183 positions have been filled out of a total of 225 positions ranging from Assistant Manager to Directors (81.3% Adequacy).</i>
	Direksi <i>Board of Directors</i>	Menyusun <i>Career Development Plan</i> untuk setiap jabatan di Perseroan. <i>Prepare Career Development Plan for each position in the Company.</i>	Sedang dibuatkan SK Direksi tentang <i>Career Development</i> di SDM. <i>A decree from the Board of Directors is being made on Career Development in HR.</i>
	Direksi <i>Board of Directors</i>	Menyelaraskan <i>Career Development Plan</i> dan rencana suksesi dengan kebijakan promosi dan mutasi PT KAI (Persero) dan mengkoordinasikan pelaksanaannya. <i>Align the Career Development Plan and succession plan with the promotion and transfer policies of PT KAI (Persero) and coordinate their implementation.</i>	Rencana suksesi kebijakan promosi dan mutasi sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh PT KAI. <i>The succession plan for promotion and mutation policies is in accordance with the rules issued by PT KAI.</i>
	Direksi <i>Board of Directors</i>	Menetapkan mekanisme bagi Direksi dalam merespon usulan peluang bisnis baik dari pegawai, manajemen di bawah Direksi, anggota Direksi, maupun Dewan Komisaris. <i>Establish a mechanism for the Board of Directors in responding to proposed business opportunities from employees, management under the Board of Directors, members of the Board of Directors, and the Board of Commissioners.</i>	Mekanisme kebijakan bagi Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dalam proses review. <i>Policy mechanism for the Board of Directors to respond to proposed business opportunities in the review process.</i>



No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Direksi Board of Directors	Memastikan setiap usulan investasi disertai FS yang memuat kajian bisnis, operasional, risiko, dan legal/hukum yang memadai. <i>Ensure that each investment proposal is accompanied by an FS containing adequate business, operational, risk, and legal/legal studies.</i>	Sedang disusun SK Direksi tentang Kebijakan Prosedur Pengelolaan Investasi di Lingkungan PT KCI, termasuk di dalamnya mengatur tentang usulan investasi yang memerlukan <i>Feasibility Study</i> (FS) dan asesmen risiko. <i>The Board of Directors' Decree is currently being drafted on the Policy on Investment Management Procedures within PT KCI, including regulating investment proposals that require Feasibility Study (FS) and risk assessment.</i>
	Direksi Board of Directors	Meningkatkan kualitas hubungan dengan pemasok/ vendor dengan: <i>Improve the quality of relationships with suppliers/vendors by:</i>	
	Direksi Board of Directors	a Melaksanakan <i>assessment</i> pemasok/ <i>vendor</i> secara terintegrasi berdasarkan pencapaian QCDS (<i>quality, cost, delivery, service</i>). <i>Carry out integrated supplier/vendor assessment based on QCDS achievement (quality, cost, delivery, service).</i>	Dalam proses evaluasi vendor menggunakan metode QCDS. <i>In the vendor evaluation process using the QCDS method.</i>
	Direksi Board of Directors	b Mengembangkan <i>Vendor Management System</i> dan memanfaatkannya untuk meningkatkan pengendalian internal. <i>Develop a Vendor Management System and utilize it to improve internal control.</i>	Rencana pengembangan <i>Vendor Management System</i> masih dibahas di Unit Logistik. <i>The Vendor Management System development plan is still being discussed in the Logistics Unit.</i>
	Direksi Board of Directors	c Menyusun <i>e-catalog</i> untuk barang yang sesuai dan membangun <i>e-procurement</i> untuk meningkatkan transparansi. <i>Develop e-catalog for appropriate goods and build e-procurement to increase transparency.</i>	Dalam proses analisa untuk penggunaan LKPP. <i>In analysis process for LKPP.</i>
	Direksi Board of Directors	Meningkatkan kualitas hubungan dengan karyawan dengan: <i>Improve the quality of relationships with employees by:</i>	
	Direksi Board of Directors	a Menetapkan jenis kebijakan Perseroan yang harus dikomunikasikan kepada karyawan dan jenis kebijakan perusahaan yang harus melibatkan karyawan dalam perumusannya. <i>Determine the types of Company policies that must be communicated to employees and the types of company policies that must involve employees in their formulation.</i>	Dalam proses pembuatan kebijakan tentang hal-hal yang perlu dikomunikasikan ke karyawan. <i>In the process of making policies about things that need to be communicated to employees.</i>

No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Direksi Board of Directors	b Menusun kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan dan untuk pelaksanaan survei kepuasan karyawan <i>Develop policies regarding assessment methods to measure employee satisfaction and for the implementation of employee satisfaction surveys</i>	Dalam proses pembuatan kebijakan mekanisme pelaksanaan survei kepuasan pelanggan. <i>In the process of making policy, the mechanism for implementing a customer satisfaction survey.</i>
	Direksi Board of Directors	Mendokumentasikan dalam risalah rapat mengenai evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya dan tindak lanjut atas arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris sebelumnya baik yang masih dalam <i>progress</i> maupun yang telah selesai ditindaklanjuti. <i>Documenting in the minutes of the meeting regarding the evaluation of the implementation of the decisions of the previous meeting and the follow-up to the directions and/or decisions of the previous Board of Commissioners, both those that are still in progress and those that have been followed up.</i>	Sudah mulai dilakukan dokumentasi risalah rapat sesuai dengan rekomendasi BPKP. <i>Documentation of the minutes of the meeting has begun in accordance with the recommendations of BPKP.</i>
	Direksi Board of Directors	Meningkatkan pengawasan <i>internal</i> dengan: <i>Improve internal control by:</i>	
	Direksi Board of Directors	a Memutakhirkan <i>Internal Audit Charter</i> dan fungsi dan tugas pokok VP <i>Internal Control</i> (SPI) dengan menambah akses pelaporan langsung kepada Dewan Komisaris. <i>Updating the Internal Audit Charter and the main functions and duties of VP Internal Control (SPI) by adding access to direct reporting to the Board of Commissioners.</i>	Sudah disahkan <i>Internal Audit Charter</i> tanggal 14 Februari 2019. <i>It has been approved by the Internal Audit Charter on February 14, 2019.</i>
	Direksi Board of Directors	b Menambah tenaga auditor pada SPI sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas SPI sesuai dengan ruang lingkup pengawasannya. <i>Adding auditors to the SPI in accordance with the needs needed to support the implementation of SPI duties in accordance with the scope of their supervision.</i>	Sudah dilakukan usulan ke SDM. <i>A proposal has been made to HR.</i>



No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Direksi Board of Directors	c Menugaskan VP <i>Internal Control</i> (SPI) untuk membuat <i>audit universe</i> dan menerapkan <i>risk-based audit</i> secara terstruktur, melengkapi infrastruktur tugasnya dengan pedoman-pedoman pengawasan (<i>assurance</i> dan <i>consulting</i>) yang diperlukan, serta melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit secara berkala dengan <i>internal</i> atau <i>external review</i> <i>Assign VP Internal Control (SPI) to create an audit universe and implement a risk-based audit in a structured manner, complete the task infrastructure with the necessary supervision (assurance and consulting) guidelines, as well as assess the quality assurance program and improve the audit function on a regular basis with internal or external review</i>	Sedang dilakukan penyusunan <i>draft Audit Universe</i> mengacu pada <i>Risk-Based Audit</i> . <i>The draft of the Audit Universe is being drafted referring to the Risk-Based Audit.</i>
	Direksi Board of Directors	d Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan yang dilakukan dengan pendekatan risiko. <i>Develop an Annual Monitoring Work Program which is carried out with a risk approach.</i>	Sedang dalam proses penyusunan PKAT tahun 2020. <i>Currently in the process of drafting the 2020 PKAT.</i>
	Direksi Board of Directors	e Melaksanakan pengawasan atas penerapan pengendalian internal dan manajemen risiko. <i>Carry out supervision over the implementation of internal control and risk management.</i>	Telah dilakukan pengawasan atas penerapan pengendalian internal dengan menerbitkan: Laporan hasil audit operasional Unit Prasarana. <i>Supervision has been carried out on the implementation of internal control by issuing: Report on the results of the operational audit of the Infrastructure Unit.</i>
	Direksi Board of Directors	f Mendokumentasikan (mencatat) kegiatan konsultasi yang diberikan termasuk pemberian rekomendasi dalam perbaikan proses bisnis dan pencapaian strategi Perseroan. <i>Documenting (recording) the consulting activities provided, including providing recommendations for improving business processes and achieving the Company's strategy.</i>	Telah dilakukan dokumentasi atas kegiatan konsultasi yang dilaksanakan. <i>Documentation of the consultation activities carried out has been carried out.</i>

No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Direksi Board of Directors	g Menyusun daftar monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dan melaporkan kemajuannya secara periodik kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Pemegang Saham/RUPS dalam bentuk Laporan Manajemen. <i>Compile a monitoring list of follow-up recommendations on the results of supervision carried out by internal and external parties and report their progress periodically to the Board of Directors and copied to the Board of Commissioners and submitted to the Shareholders/GMS in the form of a Management Report.</i>	Unit SPI telah menyusun daftar monitoring tindak lanjut rekomendasi internal dan eksternal dan telah dilaporkan ke dalam bentuk Laporan Manajemen. <i>The SPI Unit has compiled a monitoring list for the follow-up of internal and external recommendations and has been reported in the form of a Management Report.</i>
	Direksi Board of Directors	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan dan memberikan nilai terhadap capaian program kerja pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan serta mengatur penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan. <i>Evaluate the implementation of the duties of the Corporate Secretary and provide value to the achievements of the work program for the implementation of the duties of the Corporate Secretary and arrange for the preparation of reports on the implementation of the duties of the Corporate Secretary.</i>	Akan dibuatkan laporan kinerja Sekper yang dinilai oleh Direksi pada awal tahun 2020. <i>Corporate Secretary's performance report will be made which will be assessed by the Board of Directors in early 2020.</i>
	Direksi Board of Directors	Meningkatkan pengelolaan kinerja unit dengan: <i>Improve unit performance management by:</i>	



No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Direksi Board of Directors	a Menyusun pedoman dan prosedur standar pengukuran dan penilaian kinerja unit dan/atau Jabatan, menetapkan ukuran kinerja (KPI) yang merupakan turunan dari Kontrak Manajemen Perusahaan yang dilengkapi dengan kamus KPI (penjelasan/definisi berikut formula, sumber data, pihak-pihak terkait, dan periode pengukuran) untuk kemudian diterapkan secara konsisten. <i>Develop standard guidelines and procedures for measuring and assessing unit and/or position performance, establishing performance measures (KPI) which are derivatives of the Company Management Contract which is equipped with a KPI dictionary (explanation/definition along with formulas, data sources, related parties, and period). measurement) to be applied consistently.</i>	Saat ini Unit CD dan CR sedang dalam proses penyusunan KPI. <i>Currently, the CD and CR Units are in the process of preparing KPIs.</i>
	Direksi Board of Directors	b Menetapkan indikator kinerja PT KCI untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi yang memenuhi kriteria SMART dan melakukan evaluasi ketepatan indikator kinerja secara periodik. <i>Establish PT KCI performance indicators for each position in the organizational structure that meet the SMART criteria and evaluate the accuracy of performance indicators periodically.</i>	Saat ini Unit CD dan CR sedang dalam proses penyusunan KPI. <i>Currently, the CD and CR Units are in the process of preparing KPIs.</i>
	Direksi Board of Directors	c Membuat aplikasi komputer untuk pengukuran dan penilaian kinerja. <i>Create computer applications for performance measurement and assessment.</i>	Saat ini Unit CD dan CR sedang dalam proses penyusunan KPI. <i>Currently, the CD and CR Units are in the process of preparing KPIs.</i>
	Direksi Board of Directors	d Menetapkan target kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi secara spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memiliki jangka waktu yang diturunkan dan selaras dengan target kinerja level di atasnya sesuai RKAP. <i>Set performance targets for each position in the organizational structure that are specific, measurable, achievable, reasonable and have a reduced timeframe and are in line with the performance targets of the level above it in accordance with the RKAP.</i>	Saat ini Unit CD dan CR sedang dalam proses penyusunan KPI. <i>Currently, the CD and CR Units are in the process of preparing KPIs.</i>

No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Direksi Board of Directors	e Menyusun Kontrak Kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi Perseroan dan melakukan evaluasi capaiannya secara periodik. <i>Prepare Performance Contracts for each position in the Company's organizational structure and evaluate its achievements periodically.</i>	Saat ini Unit CD dan CR sedang dalam proses penyusunan KPI. <i>Currently, the CD and CR Units are in the process of preparing KPIs.</i>
	Direksi Board of Directors	f Menggunakan hasil evaluasi capaian kinerja sebagai bagian dari <i>early warning system</i> . <i>Using the results of the evaluation of performance achievements as part of the early warning system.</i>	Saat ini Unit CD dan CR sedang dalam proses penyusunan KPI. <i>Currently, the CD and CR Units are in the process of preparing KPIs.</i>
	Direksi Board of Directors	Meningkatkan pengelolaan teknologi informasi dengan: <i>Improve the management of information technology by:</i>	
	Direksi Board of Directors	a Memastikan kesesuaian <i>Master Plan</i> Teknologi Informasi (MPTI) dengan strategi Perseroan. <i>Ensure the conformity of the Information Technology Master plan (MPTI) with the Company's strategy.</i>	MPTI akan dibuatkan yang terbaru pada akhir 2020. <i>The latest MPTI will be made at the end of 2020.</i>
	Direksi Board of Directors	b Memetakan kebutuhan dan merencanakan SDM TI untuk mendukung perubahan lingkup bisnis Perseroan. <i>Mapping IT HR needs and planning to support changes in the Company's business scope.</i>	Perencanaan kebutuhan SDM TI ada pada RKA 2020. <i>Planning for IT HR needs is in RKA 2020.</i>
	Direksi Board of Directors	c Merencanakan audit atas TI perusahaan secara periodik. <i>Plan periodic audits of the company's IT.</i>	Pada tahun 2019 sudah dilaksanakan audit teknologi informasi. <i>In 2019, an information technology audit was carried out.</i>
	Direksi Board of Directors	d Menetapkan IT SLA <i>Establish IT SLA</i>	Dalam proses pembuatan IT SLA <i>In the process of making IT SLA</i>
	Direksi Board of Directors	e Menyusun laporan pelaksanaan TI perusahaan dengan memperhatikan kesesuaian pelaksanaan TI dengan RKAP dan dengan MPTI Perseroan. <i>Prepare reports on the company's IT implementation by taking into account the conformity of IT implementation with the RKAP and with the Company's MPTI.</i>	Dalam proses pembuatan laporan kinerja TI dengan RKAP. <i>In the process of making IT performance reports with RKAP.</i>
	Direksi Board of Directors	Meningkatkan mutu layanan dengan: <i>Improve service quality by:</i>	



No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Direksi Board of Directors	a Menetapkan kebijakan SPM untuk internal Perseroan. <i>Establish the SPM policy for the Company's internal.</i>	SPM PT KCI masih dibahas oleh unit terkait. <i>PT KCI's SPM is still being discussed by related units.</i>
	Direksi Board of Directors	b Meningkatkan pengendalian mutu layanan sehingga keluhan pelanggan dapat ditekan seminimal mungkin. <i>Improve service quality control so that customer complaints can be minimized.</i>	Sudah dibuatkan program pengendalian mutu layanan. <i>A service quality control program has been created.</i>
	Direksi Board of Directors	Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa dengan: <i>Improving the quality of procurement of goods and services by:</i>	
	Direksi Board of Directors	a Menambahkan klausul hak-hak dan kewajiban pemasok dan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pedoman pengadaan barang/jasa. <i>Adding clauses on the rights and obligations of suppliers and companies in accordance with applicable regulations in the guidelines for the procurement of goods/services.</i>	Telah dimuat dalam juklak PBJ tahun 2019. <i>It has been published in the 2019 PBJ operational guidelines.</i>
	Direksi Board of Directors	b Melaksanakan dan menggunakan format perencanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. <i>Implement and use the planning format for the procurement of goods and services in accordance with the Instructions for the Implementation of the Procurement of Goods and Services.</i>	Proses pengadaan telah sesuai dengan juklak PBJ tahun 2019. <i>The procurement process is in accordance with the 2019 PBJ operational guidelines.</i>
	Direksi Board of Directors	c Memastikan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dapat diakses oleh stakeholder. <i>Ensure that the Policy on the Procurement of Goods and Services is accessible to stakeholders.</i>	Pengadaan barang dan jasa dimasukkan ke dalam website krl.co.id <i>Procurement of goods and services is entered on the website krl.co.id</i>
	Direksi Board of Directors	d Memastikan penyusunan HPS dilakukan dengan keahlian, perhitungan, dan sumber data yang handal. . <i>Ensure that HPS preparation is carried out with expertise, calculations, and reliable data sources.</i>	Penyusunan HPS dengan menggunakan sumber-sumber data yang handal. <i>Preparation of HPS using reliable data sources.</i>
	Direksi Board of Directors	e Mengumumkan total HPS secara terbuka. <i>Announce HPS totals publicly.</i>	Sudah dilakukan di tahun 2019. <i>Already done in 2019.</i>

No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Direksi Board of Directors	Meningkatkan efektifitas pendidikan dan pelatihan dengan: <i>Increase the effectiveness of education and training by:</i>	
	Direksi Board of Directors	a Menyusun kebijakan mengenai program pendidikan dan pelatihan serta memuat kebijakan mengenai evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan. <i>Develop policies on education and training programs and include policies on post-education and training evaluations.</i>	Dalam proses pembuatan SK Pendidikan dan Pelatihan serta evaluasinya. <i>In the process of making the Education and Training Decree and its evaluation.</i>
	Direksi Board of Directors	b Melakukan analisis dan evaluasi atas pengaruh pendidikan dan pelatihan yang diberikan terhadap kompetensi dan kinerja individu yang melaksanakan. <i>Conduct analysis and evaluation of the effect of education and training provided on the competence and performance of individuals who implement it.</i>	Dalam proses pembuatan laporan evaluasi program pasca pendidikan dan pelatihan. <i>In the process of making post-education and training program evaluation reports.</i>
	Direksi Board of Directors	Menyusun kebijakan mengenai sistem penilaian kinerja bagi karyawan yang mencakup: <i>Develop a policy regarding the performance appraisal system for employees which includes:</i>	
	Direksi Board of Directors	a Sistem penilaian kinerja individu (KPI). <i>Individual performance appraisal system (KPI).</i>	Dalam proses pembuatan SK KPI dan Performance Karyawan. <i>In the process of making KPI Decision Letter and Employee Performance.</i>
	Direksi Board of Directors	b Sistem penilaian kinerja atas kompetensi karyawan. <i>Performance appraisal system on employee competence.</i>	Dalam proses pembuatan SK KPI dan Performance Karyawan. <i>In the process of making KPI Decision Letter and Employee Performance.</i>
	Direksi Board of Directors	c Perumusan dan penetapan indikator kinerja individu dan target kinerja yang ditetapkan oleh atasan langsung. <i>Formulation and determination of individual performance indicators and performance targets set by the direct supervisor.</i>	Dalam proses pembuatan SK KPI dan Performance Karyawan. <i>In the process of making KPI Decision Letter and Employee Performance.</i>



No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Direksi Board of Directors	d Melaksanakan sistem penilaian kinerja bagi seluruh karyawan PT KCI dan memanfaatkan hasil penilaian kinerja tersebut untuk pengembangan karyawan. <i>Implement a performance appraisal system for all employees of PT KCI and utilize the results of the performance appraisal for employee development.</i>	Dalam proses pembuatan SK KPI dan <i>Performance</i> Karyawan. <i>In the process of making KPI Decision Letter and Employee Performance.</i>
	Direksi Board of Directors	Meningkatkan pengelolaan risiko dengan: <i>Improve risk management by:</i>	
	Direksi Board of Directors	a Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko yang memuat kerangka, tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko dan penanganannya. <i>Develop and establish risk management policies that contain the framework, stages of risk management implementation, risk reporting and handling.</i>	Penyusunan SK Direksi tentang Penerapan <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM)/Manajemen Risiko Korporat dengan dilampirkan Kebijakan ERM, Piagam ERM, Manual ERM, Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola ERM. <i>Preparation of the Decree of the Board of Directors regarding the Implementation of Enterprise Risk Management (ERM)/Corporate Risk Management attached with the ERM Policy, ERM Charter, ERM Manual, Duties and Responsibilities of ERM Management Officers.</i>
	Direksi Board of Directors	b Menyusun struktur organisasi dan uraian tugas pengelolaan risiko yang mencakup seluruh risiko secara komprehensif. <i>Develop an organizational structure and job descriptions of risk management that cover all risks comprehensively.</i>	
	Direksi Board of Directors	c Meningkatkan <i>awareness</i> dan kompetensi di bidang pengelolaan risiko serta membangun budaya sadar risiko. <i>Increase awareness and competence in the field of risk management and build a risk awareness culture.</i>	Unit CR telah melakukan <i>awareness</i> dengan mengikutsertakan beberapa pejabat dan pekerja mengikuti pelatihan dan sertifikasi <i>Qualified Risk Governance Professional</i> (QRGP) dan <i>Qualified Risk Management Officer</i> (QRMO). <i>The CR Unit has raised awareness by involving several officials and workers in training and certification of Qualified Risk Governance Professional (QRGP) and Qualified Risk Management Officer (QRMO).</i>
	Direksi Board of Directors	d Menyusun rencana kerja perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko. <i>Prepare company work plans to implement risk management policies.</i>	Telah dibuatkan RKAP 2020 berbasis risiko (<i>risk-based budgeting</i>). <i>Risk-based budgeting has been made for the 2020 RKAP.</i>
	Direksi Board of Directors	e Melakukan pemantauan terhadap program manajemen risiko secara berkala. <i>Monitoring the risk management program on a regular basis.</i>	Unit CR telah melakukan <i>monitoring</i> terhadap mitigasi risiko secara berkala. <i>The CR Unit has carried out monitoring of risk mitigation on a regular basis.</i>

No.	Aspek Aspects	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut/Rencana Tindak Lanjut Follow-up/Follow-up Plan
	Direksi Board of Directors	f Melakukan analisis risiko beserta strategi penanganannya atas Rancangan RKAP Perseroan. <i>Conduct a risk analysis and its handling strategy on the Company's Draft RKAP.</i>	Telah dilakukan analisis risiko atas rancangan RKAP 2020. <i>A risk analysis has been carried out on the 2020 RKAP draft.</i>
	Direksi Board of Directors	g Menyusun Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko yang memuat profil risiko dan pelaksanaan manajemen risiko yang disampaikan kepada Dewan Komisaris secara berkala dan juga kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris. <i>Prepare a Risk Management Implementation Report that contains a risk profile and risk management implementation which is submitted to the Board of Commissioners on a regular basis and also to the Shareholders through the Board of Commissioners.</i>	Akan dilakukan, seiring dengan rencana implementasi ERM. <i>Will be carried out, in line with the ERM implementation plan.</i>
	Direksi Board of Directors	Melakukan <i>assessment</i> atas pengendalian intern perusahaan level entitas dan level aktivitas serta menyusun <i>internal control report</i> yang mencakup pernyataan tanggung jawab manajemen untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai serta melakukan penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku Perseroan. <i>Performing an assessment of the company's internal control at the entity level and activity level and compiling an internal control report that includes a statement of management's responsibility to establish and maintain an adequate internal control structure and financial reporting procedure as well as assessing the effectiveness of the internal control structure and financial reporting procedures at the end the Company's financial year.</i>	Sedang disusun SK Direksi tentang Kebijakan Prosedur Pengelolaan Investasi di Lingkungan PT KCI, termasuk di dalamnya mengatur tentang usulan investasi yang memerlukan <i>Feasibility Study</i> (FS) dan asesmen risiko. <i>The Board of Directors' Decree is currently being drafted on the Policy on Investment Management Procedures within PT KCI, including regulating investment proposals that require Feasibility Study (FS) and risk assessment.</i>
	Direksi Board of Directors	Menginstruksikan kepada Kepala SPI untuk menyusun laporan atas hasil monitoring tindak lanjut secara sistematis dan dibuat secara berkala serta disampaikan kepada Direksi serta ditembuskan kepada Dewan Komisaris serta dimuat dalam Laporan Manajemen dan dilaporkan kepada Pemegang Saham. <i>Instruct the Head of SPI to compile reports on the results of follow-up monitoring systematically and periodically and submitted to the Board of Directors and copied to the Board of Commissioners and included in the Management Report and reported to the Shareholders.</i>	Unit SPI telah menyusun laporan atas hasil monitoring tindak lanjut, dan telah dilaporkan kepada Direksi dan Komisaris melalui Komite Audit. <i>The SPI Unit has prepared a report on the results of follow-up monitoring, and has been reported to the Board of Directors and Commissioners through the Audit Committee.</i>



ROAD MAP GCG

GCG Road Map

ROAD MAP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT KCI

Road Map Good Corporate Governance PT KCI



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

Para pemegang saham dapat melakukan pengambilan keputusan penting terkait kinerja Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS juga menjadi tempat di mana pemegang saham dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Namun, baik Dewan Komisaris maupun Direksi tidak didelegasikan dalam pelaksanaan RUPS ini.

PENYELENGGARAAN RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi sesuai dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar.

Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dijelaskan bahwa RUPS memiliki fungsi sentral bagi para Pemegang Saham dalam menentukan kebijakan terkait Perusahaan. Yang dimaksud dengan RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan berarti keduanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RUPS Tahunan (RUPST)

RUPS Tahunan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan tiap-tiap tahun, yang meliputi:

- RUPS mengenai Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan.
- RUPS Tahunan mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan. Dalam Acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan.

RUPS Luar Biasa (RUPSPLB)

Berdasarkan AD ART Perseroan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Adapun Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

- Semua RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS tersebut maka RUPS dapat diadakan di

Shareholders can make important decision-making regarding to the performance of the Company in the general meeting of Shareholders (GMS). The GMS also serve as a place where shareholders can evaluate the performance of the BOC and the BOD. However, neither the Board of Commissioners nor the Board of Directors were delegated in the implementation of this GMS.

GMS IMPLEMENTATION

The general meeting of Shareholders (GMS), is the Company's organ that holds the authority that is not given to the Board of Commissioners and/or Directors in accordance with the law and the Articles of Association.

According to Law No. 40 year 2007 explained that the GMS has a central function for shareholders in determining the policy regarding the Company. The GMS in the Company's Articles of association shall mean both the annual GMS-and the extraordinary GMS, unless expressly stated otherwise.

Annual GMS (AGMS)

The annual GMS, the general meeting of shareholders held each year, including:

- GMS on annual report and annual calculation.
- The annual GMS concerning the approval of the work plan and Company budget.

The annual GMS to approve the annual report shall be held no later than June after the end of the relevant fiscal year. In the event of the annual GMS can also be included into proposals submitted by the Board of Commissioners and/or a shareholder representing at least 1/10 (one tenth) of the amount of shares issued by the Company with a valid voting rights provided that the proposal in question must have been received by the Board of Directors before the date of the annual GMS invitation.

Extraordinary GMS (EGMS)

Based on the Company's Article of Association, Extraordinary GMS can be held at any time based on the needs for the Company's interests. The venue and the invitation of the General Meeting of Shareholders.

- All GMS are held in the place of the Company's domicile or in the place where the Company conducts its main business activities located in the territory of the Republic of Indonesia.
- If the GMS is present and/or represented by all Shareholders and all shareholders approve the holding of the GMS, the GMS may be held anywhere in the territory of the Republic



manapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

3. RUPSLB dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
4. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS.

RUPS Sirkuler

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 telah menentukan bahwa RUPS dapat dilaksanakan tanpa perlu adanya rapat secara fisik dengan melalui keputusan sirkuler. Keputusan Sirkuler ditentukan dalam Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas, terkait dengan ketentuan tersebut pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS (di luar rapat fisik) tetapi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pelaksanaan RUPS yang dilakukan seperti biasa secara langsung. Keputusan tersebut hanya dapat diambil dengan syarat semua pemegang saham yang memiliki hak suara menyetujuinya secara tertulis.

Hak Pemegang Saham

Hak pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki secara proporsional.

Apabila setelah dilakukan penawaran, ternyata masih terdapat sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham lainnya yang masih berminat secara proporsional.

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang belum diambil bagian oleh pemegang saham, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga, dengan memperhatikan keputusan RUPS mengenai pengeluaran saham tersebut.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana dan Penyelenggaraan RUPS

- a. Semua RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang

of Indonesia.

3. RUPSLB can make a decision if the decision is approved unanimously.
4. The Board of Directors shall hold the annual GMS and extraordinary GMS with the call of GMS.

Circular GMS

In the Law No. 40 year 2007 has determined that the GMS can be implemented without the need for a physical meeting by a circular decision. The decision of the circumvenement is determined in article 91 of the Limited Liability Company, relating to the provisions of the Shareholders can make a binding decision outside the GMS (outside physical meeting) but has the same legal force as the implementation of the GMS conducted as usual directly. The decision can only be taken on the condition of all shareholders who have the right to approve it in writing.

Shareholder Rights

The right of Shareholder whose name was recorded in the Shareholder register has the right to take part on the shares to be issued within 14 (fourteen) days from the date the offer is made and each shareholder is entitled to take a balanced share with the amount of shares they have proportionally.

If after the offer, there still remains the remaining shares that have not been taken part then the Board of Directors has the right to offer the remaining shares to other shareholders who are still interested proportionally.

If after a period of 14 (fourteen) days since the offer to the Shareholders still have the remaining shares that have not been taken part by the shareholders, then the Board of Directors shall offer the remaining shares to the third party, with respect to the GMS decision regarding the issuance of the shares.

Shareholder Responsibility

Every Shareholder according to law shall be subject to the Company's Articles of Association and all decisions taken legally in the GMS and the prevailing laws and regulations.

GMS Plan and Implementation

- a. All GMS are held in the place of the Company's position or in the place where the Company conducts its main business activities located in the territory of the Republic of Indonesia.

saham menyetujui diadakannya RUPS tersebut maka RUPS dapat diadakan di manapun dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

- c. RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
- d. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa dengan didahului pemanggilan RUPS.
- e. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini dapat pula dilakukan atas permintaan:
 1. Seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; atau
 2. Dewan Komisaris.
- f. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- g. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- h. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
- i. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
- j. Perseroan wajib memberikan salinan bahan RUPS kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.
- k. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.
- l. RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
- m. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS pemegang saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan lain.
- n. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Kedua.
- o. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
- p. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau

- b. *If in the GMS present and/or represented all shareholders approve the holding of the GMS then the GMS can be held anywhere in the territory of the Republic of Indonesia.*
- c. *The GMS may decide if the decision is unanimously agreed.*
- d. *The Board of Directors shall hold annual GMS and extraordinary GMS with the call of GMS.*
- e. *Implementation of the GMS as referred to in paragraph 4 of this article can also be done on request:*
 1. *A shareholder representing at least 1/10 (one tenth) of the total shares issued by the Company with valid voting rights; or*
 2. *Board of Commissioners.*
- f. *The Board of Directors shall be obliged to call the GMS within a period of 14 (fourteen) calendar days as of the date of request for the GMS received.*
- g. *The invitation of GMS shall be conducted within 14 (fourteen) calendar days prior to the date of the GMS, taking into account the date of the calling and the date of GMS.*
- h. *The GMS invitation is conducted by the registered letter and/or advertisement in the newspaper.*
- i. *In the call of GMS, the date, time, place and the eyes of the meeting with the notice that the material to be discussed in the GMS is available in the office of the Company since the date of GMS call until the date of GMS.*
- j. *The Company shall give a copy of the GMS material to the Shareholders for free if requested.*
- k. *In the event that the call is not in accordance with the registered letter and/or advertisement in the newspaper, the resolution of the GMS remains valid if all shareholders with valid voting rights are present or represented in the GMS and the decision is unanimously agreed.*
- l. *The GMS is led by one of the shareholders selected by and from among those present.*
- m. *The GMS may be established if the Shareholder GMS is at least 51% (fifty one percent) of the total shares with voting rights present or represented, except the statutory and/or the Articles of Association of the Company determines otherwise.*
- n. *In case the quorum is not achieved, the second meeting call can be held.*
- o. *In the call of the second GMS must be mentioned that the first GMS are established and do not reach the quorum.*
- p. *The second GMS shall be valid and entitled to make a decision if in the GMS at least 50% (fifty percent) of the total shares with voting rights present or represented,*



- diwakili, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.
- q. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS.
- r. Dalam RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- s. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
- t. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah tanggal RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
- u. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- v. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
- w. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- x. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
- y. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- z. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan lain, dengan ketentuan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.
- aa. Dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan 1 (satu) alternatif dengan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- ab. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
- unless the articles of association determines otherwise.
- q. In the matter that the Quorum of the second meeting is not reached, the Company may apply to the Chairman of the District court whose legal area is within the Company's position on the Company's application in order to established the quorum.
- r. In the third GMS shall be mentioned that the second GMS shall be held and do not reach the quorum, and the third GMS will be held with the quorum established by the Chairman of the District Court.
- s. The second and third GMS shall be made within a period of no later than 7 (seven) calendar days prior to the second or third GMS held.
- t. The second and third GMS Shall be held in the most immediate period of 10 (ten) calendar days and at least 21 (twentyone) calendar days after the date of the GMS preceding it.
- u. Shareholders either alone or represented under the authorization letter, are entitled to attend the GMS and exercise the right of his vote in accordance with the number of shares he owns.
- v. The Chairman of the meeting has the right to request that power of attorney to represent Shareholders shown to him at meeting time.
- w. In the GMS, each stake grants its owner the right to issue 1 (one) vote.
- x. Voting concerning persons shall be done in an unsigned or closed voice and on other matters orally, unless the Chairman of the meeting determines otherwise without objection from the shareholders present in the GMS.
- y. All decisions taken based on deliberation for consensus.
- z. In case the decision based on deliberation for consensus is not reached, the decision is valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (one-second) part of the total number of votes issued, unless the Company's Articles of association determines otherwise, with the provisions, voting about themselves is done by an unsigned closed letter.
- aa. In case of proposal of more than 2 (two) alternatives and the voting results have not obtained 1 (one) alternative with a vote of more than $\frac{1}{2}$ (half) part of the number of votes issued, then re-election to (two) proposals that received the most votes so that one (1) proposal received a vote of more than $\frac{1}{2}$ (half).
- ab. The voting blanko or unauthorized vote is deemed to be not present and not counted in determining the number of votes issued in the GMS.

ac. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah yang dilakukan RUPS secara fisik, dengan semua yang dimiliki Pemegang Saham yang telah disetujui dan ditandatangani oleh semua Pemegang Saham yang memberikan persetujuan tentang kami. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

ac. Shareholders may also make lawful decisions made by the GMS physically, with all Shareholders who have been approved and signed by all shareholders who have consented to us. Decisions taken in this way, have the same power as the decision taken legitimately in the GMS.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Annual General Meeting of Shareholders

Pada tahun 2020, Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan, yaitu RUPS Pertanggung Jawaban Manajemen Agenda RUPS telah disusun dan dicantumkan dalam undangan RUPS. Selama RUPS berlangsung acara dipimpin oleh Pemegang Saham.

In 2020, the Company held 1 (one) Annual GMS, namely the Management Accountability GMS. The GMS agenda has been prepared and included in the GMS invitation. The GMS the is chaired by the Shareholders.

Perseroan menyelenggarakan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar yang menyebutkan bahwa Direksi Wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima dari Pemegang Saham. Surat Pemanggilan RUPS mencakup informasi dari tanggal, waktu tempat dan agenda yang akan dibicarakan dalam RUPS.

The Company conducted the GMS in accordance with the articles of association that mention that the Board of Directors shall make the GMS call within 14 days from the date of the request of the GMS received from the shareholders. The letter of the GMS includes information from the date, time of venue and agenda to be discussed in the GMS.

Permintaan Request	RUPS Kinerja Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year Performance GMS	RUPS 2020 GMS 2020
Permintaan Penyelenggaraan RUPS Request for GMS	Surat Nomor KF.101.IX/1/KA-2018 Tanggal 20 September 2018 Tentang Penyampaian Jadwal RUPS RKAP Tahun 2019 Letter Number: KF.101.IX/1/KA-2018 Dated September 20, 2018 Concerning the Submission of the 2019 Annual GMS RKAP Schedule	-
Pemanggilan RUPS Summon to the GMS	Surat Nomor: 106/DU-CS/KCI/IX/2018 Tanggal 24 September 2018 Tentang Undangan RUPS RKAP Tahun 2018 Letter Number: 106/DU-CS/KCI/IX/2018 dated September 24, 2018 Regarding Invitation for the 2019 Annual General Meeting of Shareholders	- Nomor: 5/CS/KCI/VI/2020 Tanggal 25 Juni 2020 Undngan RUPS tahunan persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 Anak Perusahaan PT KAI (Persero) - Number: 5/CS/KCI/VI/2020 Dated June 25, 2020 Invitation to the annual GMS approval and ratification of the 2019 financial year annual report of a subsidiary of PT KAI (Persero) - Nomor: 162/DU-CS/KCI/VI/2020 Tanggal 25 Juni 2020 tentang Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Buku 2019 Anak Perusahaan PT KAI persero -- Number: 162/DU-CS/KCI/VI/2020 dated June 25, 2020 concerning Approval and Ratification of the 2019 Book Annual Report of PT KAI Persero subsidiary



Permintaan Request	RUPS Kinerja Tahun Buku 2019 2019 Fiscal Year Performance GMS	RUPS 2020 GMS 2020
Pelaksanaan RUPS GMS Implementation	RUPS RKAP Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2018 di Jakarta 2019 RKAP GMS was held on October 2, 2018 in Jakarta	-
Risalah RUPS Minutes of the GMS	Perseroan telah menyampaikan risalah RUPS RKAP 2019 kepada Pemegang Saham The Company has submitted minutes of 2019 RKAP GMS to Shareholders	-

Agenda dan Keputusan RUPS Tahun Buku 2020

Agenda and Resolution of GMS 2020

No.	Tanggal Date	Jenis RUPS RUPS Type	Nomor Number	Perihal Subject	Keterangan Description
1	31 Maret 2020 March 31, 2020	RUPS Tahunan Annual GMS	-	Persetujuan laporan Ratification of the 2019 financial year report	-
2	17 Juli 2020 July 17, 2020	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Kereta Commuter Indonesia di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Circular Decisions of the Shareholders of PT Kereta Commuter Indonesia outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders.	KP.303/VII/4/KA-2020	RUPSLB tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur, Pelaksana Tugas Direktur, Komisaris, dan Pelaksana Tugas Komisaris Perseroan. EGMS regarding Dismissal and Appointment of Director, Acting Director, Commissioner, and Acting Commissioner.	Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagai berikut: a. Sdr. Subakir sebagai Direktur; b. Sdr. Januar Parlindungan sebagai Pelaksana Tugas Direktur; c. Sdr. Saridal sebagai Pelaksana Tugas Direktur; d. Sdr. Edi Sukmoro sebagai Komisaris Utama; a. Sdr. Dariyadi sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Dismiss with honor the following names: a. Mr. Subakir as Director; b. Mr. Januar Parlindungan as Acting Director; c. Mr. Saridal as Acting Director; d. Mr. Edi Sukmoro as President Commissioner; e. Mr. Dariyadi as Acting Commissioner

No.	Tanggal Date	Jenis RUPS RUPS Type	Nomor Number	Perihal Subject	Keterangan Description
					Mengangkat nama-nama sebagai berikut: a. Sdr. Wawan Ariyanto sebagai Pelaksana Tugas Direktur; b. Sdr. M. Widodo sebagai Pelaksana Tugas Direktur; c. Sdr. Roppiq Lutzfi Azhar sebagai Pelaksana Tugas Direktur; d. Sdr. Maqin U. Norhadi sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama; e. Sdr. John Robertho sebagai Pelaksana Tugas Komisaris; f. Sdr. Danto Restyawan sebagai Pelaksana Tugas Komisaris. Name the following: a. Mr. Wawan Ariyanto as Acting Director; b. Mr. M. Widodo as Acting Director; c. Mr. Roppiq Lutzfi Azhar as Acting Director; d. Mr. Maqin U. Norhadi as Acting President Commissioner; e. Mr. John Robertho as Acting Commissioner; f. Mr. Danto Restyawan as Acting Commissioner.
					terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan ini sampai dengan adanya Keputusan Pemegang Saham untuk pengangkatan Direktur dan Komisaris definitif.
					Mengukuhkan kembali susunan Direksi, Pelaksana Tugas Direksi, Dewan Komisaris dan Pelaksana Tugas Komisaris Perseroan sebagai berikut: a. Sdr. Wiwik Widayanti sebagai Direktur Utama; b. Sdr. Wawan Ariyanto sebagai Pelaksana Tugas Direktur; c. Sdr. M. Widodo sebagai Pelaksana Tugas Direktur; d. Sdr. Roppiq Lutzfi Azhar sebagai Pelaksana Tugas Direktur; e. Sdr. Maqin U. Norhadi sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama; f. Sdr. Edy Widyaya sebagai Komisaris; g. Sdr. John Robertho sebagai Pelaksana Tugas Komisaris; a. Sdr. Danto Restyawan sebagai Pelaksana Tugas Komisaris.



No.	Tanggal Date	Jenis RUPS RUPS Type	Nomor Number	Perihal Subject	Keterangan Description
					starting from the effective date of this Decree until the decision of the Shareholders for the appointment of definitive Directors and Commissioners. Reaffirmed the composition of the Board of Directors, Acting Directors, Board of Commissioners and Acting Commissioners of the Company as follows: a. Mrs. Wiwik Widayanti as President Director; b. Mr. Wawan Ariyanto as Acting Director; c. Mr. M. Widodo as Acting Director; d. Mr. Roppiq Lutzfi Azhar as Acting Director; e. Mr. Maqin U. Norhadi as Acting President Commissioner; f. Mr. Edy Widyaya as Commissioner; g. Mr. John Robertho as Acting Commissioner; h. Mr. Danto Restyawan as Acting Commissioner.
28 Desember 2020 <i>December 28, 2020</i>	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Kereta Commuter Indonesia di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. <i>Circular Decisions of the Shareholders of PT Kereta Commuter Indonesia outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders.</i>	KP.303/ XII/14/KA- 2020	RUPSLB tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. EGMS <i>regarding Appointment Members of the Company's Board of Commissioners and Directors.</i>	Mengangkat nama-nama sebagai berikut: a. Sdr. Wawan Ariyanto sebagai Direktur Operasi dan Pemasaran; b. Sdr. M. Widodo sebagai Direktur Keuangan; c. Sdr. Roppiq Lutzfi Azhar sebagai Direktur Teknik; d. Sdr. Maqin U. Norhadi sebagai Komisaris Utama; e. Sdr. John Robertho sebagai Komisaris; f. Sdr. Danto Restyawan sebagai Komisaris; terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan ini dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan selaku Pelaksana Tugas Direktur dan Pelaksana Tugas Komisaris yang diangkat berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Kereta Commuter Indonesia di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor PT KAI (Persero) KP.303NII/4/KA-2020 dan Nomor Yayasan Pusaka 02/RIS-KCINII/2020 tanggal 17 Juli 2020.	

No.	Tanggal Date	Jenis RUPS RUPS Type	Nomor Number	Perihal Subject	Keterangan Description

Appointed the following:

- Mr. Wawan Ariyanto as Director of Operations and Marketing;
- Mr. M. Widodo as Director of Finance;
- Mr. Roppiq Lutzfi Azhar as Director of Technic;
- Mr. Maqin U. Norhadi as President Commissioner;
- Mr. John Robertho as Commissioner;
- Mr. Danto Restyawan as Commissioner;

as of the effective date of this Decree with the term of office continuing the remaining term of office as Acting Director and Acting Commissioner who are appointed based on the Circular Decision of the Shareholders of PT Kereta Commuter Indonesia outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders Number PT KAI (Persero) KP.303NII/ 4/ KA-2020 and Heritage Foundation Number 02/RIS-KCINII/2020 dated 17 July 2020.

Mengukuhkan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- Sdri. Wiwik Widayanti sebagai Direktur Utama
- Sdr. Wawan Ariyanto sebagai Direktur Operasi dan Pemasaran
- Sdr. M. Widodo sebagai Direktur Keuangan
- Sdr. Roppiq Lutzfi Azhar sebagai Direktur Teknik
- Sdr. Maqin U. Norhadi sebagai Komisaris Utama
- Sdr. Edy Widyaya sebagai Komisaris
- Sdr. John Robertho sebagai Komisaris
- Sdr. Danto Restyawan sebagai Komisaris.

Reaffirmed the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as following:

- Mrs. Wiwik Widayanti as President Director
- Mr. Wawan Ariyanto as Director of Operations and Marketing
- Mr. M. Widodo as Director of Finance
- Mr. Roppiq Lutzfi Azhar as Director of Technic
- Mr. Maqin U. Norhadi as President Commissioner
- Mr. Edy Widyaya as Commissioner
- Mr. John Robertho as Commissioner
- Mr. Danto Restyawan as Commissioner.



PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN TINDAK LANJUT KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN

Decision Making and Follow-Up to Annual AGMS Decisions

Pengambilan keputusan dan tindak lanjut keputusan RUPS tahunan dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Board Manual yang dimonitoring secara berkelanjutan.

Decision making and follow-up to annual AGM decisions are carried out in accordance with the policies set out in the Board Manual which are monitored on an ongoing basis.

KEHADIRAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

The Attendance of The Annual GMS for Fiscal Year 2020

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Tahun Buku 2020

Attendance of Board of Commissioners and Directors in GMS 2020

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran dalam RUPS Tahun Buku 2020 Attendance in GMS Fiscal Year 2020
Wiwik Widayanti	Direktur Utama President Commissioner	√
Wawan Ariyanto	Direktur Operasi dan Pemasaran Director of Operational and Marketing	√
M. Widodo	Direktur Keuangan Director of Finance	√
Roppiq Lutzfi Azhar	Direktur Teknik Director of Technic	√
Maqin U. Norhadi	Komisaris Utama President Commissioner	√
Edy Widayaya	Komisaris Commissioner	√
John Robertho	Komisaris Commissioner	√
Danto Restyawan	Komisaris Commissioner	√

REALISASI KEPUTUSAN RUPS TAHUN BUKU SEBELUMNYA

Realization of Previous Year's GMS Resolution

Seluruh keputusan RUPS pada tahun anggaran 2019 sudah dilaksanakan pada tahun 2020.

All resolutions in the fiscal year 2019 have been implemented in 2020.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Penunjukan serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS dan tertera di dalam Anggaran Dasar Perseroan yang mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lebih lanjut dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners duty is supervising and giving advice to the Board of Directors for the purposes and objectives of the Company. The appointment and appointment of the BOC are appointed by the GMS and listed in the Articles of Association of the Company in reference to LAW No. 40 year 2007 about the Limited Liability Company. Further described the function, authority, and responsibilities of the Board of Commissioners.

KRITERIA DAN PROSES PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Criteria for Appointment of The Board of Commissioners' Members

Perseroan memiliki kriteria persyaratan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 Ayat 1 sampai dengan 10, yakni Anggota Dewan Komisaris PT Kereta Commuter Indonesia adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
2. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
4. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - Dinyatakan pailit;
 - Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
5. Selain persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat 4 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada

The Company has criteria for prospective member requirements The Board of Commissioners as stated in the Budget Company Basis Article 14 Paragraphs 1 to 10, viz Member of the Board of Commissioners of PT Kereta Commuter Indonesia is an individual who meets the requirements as following:

1. *The Board of Commissioners consists of 1 (one) member or more.*
2. *Board of Commissioners consisting of more than 1 (one) the member constitutes the assembly and each member of the Board of Commissioners cannot act alone, but rather based on the Board's of Commissioner decision.*
3. *In the event that the Board of Commissioners consists of more than 1 (one) a member, then a member of the Board of Commissioners are appointed as President Commissioners.*
4. *Which can be appointed as a member of the Board Commissioners are capable individuals do legal actions, except within 5 (five) years before his appointment:*
 - *Declared bankrupt;*
 - *Become a member of the Board of Directors or Board of Commissioners or a member of the Board of Trustees stated guilty of causing a Company or Public Corporation declared bankrupt; or*
 - *Convicted of a criminal offense detrimental to the State finances and/or which related to the financial sector.*
5. *In addition to the requirements referred to in paragraph 4 This article appoints members of the Board of Commissioners done by considering integrity, dedication, understanding management problems Company related to one function management, have adequate knowledge in the Company's line of business, and can provide sufficient time to carry out their duties and other requirements based on regulations legislation.*
6. *Appointment of members of the Board of Commissioners who are not meet the requirements referred to in point 4*



poin 4 dan poin 5 di atas, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

7. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
8. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh Para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
9. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
10. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

and point 5 above, null and void due to the law when other members of the Board of Commissioners or Directors know that these requirements are not fulfilled.

7. Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS.
8. Members of the Board of Commissioners are appointed from candidates proposed by the Shareholders and the nomination is binding for the GMS.
9. The term of office of the members of the Board of Commissioners is determined 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office.
10. Any member of the Board of Commissioners may at any time dismissed based on the GMS decision with mention the reason.

SUSUNAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Composition of The Board of Commissioners

Komposisi Dewan Komisaris dan Perangkat Dewan Komisaris

Struktur Organisasi Dewan Komisaris PT KCI ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT KCI Nomor: SK.006/KOM/KCI/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Dewan Komisaris, yang terdiri dari:

1. Dewan Komisaris
2. Sekretaris Dewan Komisaris
3. Komite Audit
4. Komite Manajemen Risiko

Susunan Dewan Komisaris

1. Berdasarkan Risalah Sirkuler Keputusan Pemegang Saham PT Kereta Commuter Indonesia, Nomor PT KAI (Persero): KP.303/VII/4/KA-2020, Nomor Yayasan Pusaka: 02/RIS-KCI/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur, Pelaksana Tugas Direktur, Komisaris, dan Pelaksana Tugas Komisaris Perseroan, berdasarkan Akta Pendirian PT KAI Commuter Jabodetabek No. 457 tanggal 15 September 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, SH yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-74707.AH.01.01.tanggal 16 Oktober 2008, yang persetujuan perubahannya dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00022753.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019, serta perubahan susunan kepengurusan terakhir yang dinyatakan dalam Akta Nomor

Composition of the Board of Commissioners and its Committee

The organizational structure of the Board of Commissioners of the Board of Commissioners of PT KCI is determined by the Decree of Board of Commissioners of PT KCI number: SK.006/KOM/KCI/X/2019 dated October 21, 2019 concerning the determination of the organizational structure of the Board of Commissioners, consisting of:

1. Board of Commissioners
2. Secretary of the Board of Commissioners
3. Audit Committee
4. Risk Management Committee

Board of Commissioners Composition

1. Based on the Decree of Circular Shareholders Decision of PT Kereta Commuter Indonesia, PT KAI (Persero): KP. 303/XI/1/KA-2020, Yayasan Pusaka Number: 02/RIS-KCI/VII/2020 dated July 17, 2020 concerning the appointment of the Company's Commissioners, that has been completed in the statement of shareholders of PT Kereta Commuter Indonesia Number 457, dated September 15, 2008 which was made before the notary Ilmiawan Dekrit S, SH, which has been ratified by Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-74707.AH.01.01.dated October 16, 2008, whose amendment approval was stated in the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-00022753.AH.01.02 Year 2019 dated January 18, 2019, as well as changes to the latest management structure stated in Deed Number 19 dated October 14, 2019, both Deeds

19 tanggal 14 Oktober 2019, kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Tri Mulyahati, SH., M.KN, Notaris di Kota Bekasi, yang laporan pemberituannya telah diterima dan tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHUAH.01.03-0352258 tanggal 29 Oktober 2019, susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Tugas Komisaris Utama: Maqin U. Norhadi
- b. Komisaris: Edy Widyaya
- c. Pelaksana Tugas Komisaris: John Robertho
- d. Pelaksana Tugas Komisaris: Danto Restyawan

2. Berdasarkan Risalah Sirkuler Keputusan Pemegang Saham PT Kereta Commuter Indonesia, Nomor PT KAI (Persero): KP.303/XII/14/KA-2020, Nomor Yayasan Pusaka: 08/RIS-KCI/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, berdasarkan Akta Pendirian PT KAI Commuter Jabodetabek No. 457 tanggal 15 September 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, SH yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-74707.AH.01.01. tanggal 16 Oktober 2008, yang Anggaran Dasarnya telah diubah beberapa kali dan terakhir dinyatakan dalam Akta Nomor 12 tanggal 13 November 2020, yang persetujuan dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0077290.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 19 November 2020, serta perubahan susunan kepengurusan terakhir yang dinyatakan dalam Akta nomor 13 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tri Mulyahati, S.H., M.Kn yang disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0315676 tanggal 29 Juli 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

- a. Komisaris Utama: Maqin U. Norhadi
- b. Komisaris: Edy Widyaya
- c. Komisaris: John Robertho
- d. Komisaris: Danto Restyawan
- e. Direktur Utama: Wiwik Widayanti
- f. Direktur Operasi dan Pemasaran: Wawan Ariyanto
- g. Direktur Keuangan: M. Widodo
- h. Direktur Teknik: Roppiq Lutzfi Azhar

Per 31 Desember 2020, Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang sesuai dengan surat pengangkatan dan pembagian tugas masing-masing anggota, yaitu:

were made before Notary Tri Mulyahati, SH., M.KN, Notary in Bekasi, whose notification report has been received and recorded in the database of the Administration System for Legal Entities and Human Rights as stated in its letter Number AHUAH.01.03-0352258 dated October 29, 2019, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

- a. Acting President Commissioner: Maqin U. Norhadi
- b. Commissioner: Edy Widyaya
- c. Acting Commissioner: John Robertho
- d. Acting Commissioner: Danto Restyawan

2. Based on the Circular Minutes of the Shareholders Decision of PT Kereta Commuter Indonesia, PT KAI (Persero) Number: KP.303/XII/14/KA-2020, Yayasan Pusaka Number: 08/RIS-KCI/XII/2020 dated December 28, 2020 concerning Appointment of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, based on the Deed of Establishment of PT KAI Commuter Jabodetabek No. 457 dated September 15, 2008 made before the Notary Ilmiawan Dekrit S, SH which has been ratified by Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-74707.AH.01.01. dated October 16, 2008, the Articles of Association have been amended several times and most recently stated in Deed No. 12 dated November 13, 2020, the approval of which is stated in the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0077290.AH.01.02.TAHUN 2020 dated November 19, 2020, as well as changes to the latest management structure stated in Deed number 13 dated July 20, 2020 made before the Notary Tri Mulyahati, SH, M.Kn which was ratified by a Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0315676 dated July 29, 2020, the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors is as follows:

- a. President Commissioner: Maqin U. Norhadi
- b. Commissioner: Edy Widyaya
- c. Commissioner: John Robertho
- d. Commissioner: Danto Restyawan
- e. President Director: Wiwik Widayanti
- f. Director of Operations and Marketing: Wawan Ariyanto
- g. Director of Finance: M. Widodo
- h. Technical Director: Roppiq Lutzfi Azhar

As of December 31, 2020, the Board of Commissioners consists of 4 (four) people according to the letter of appointment and division of duties of each member, namely:

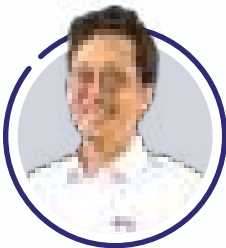


INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Independency

Maqin U. Norhadi

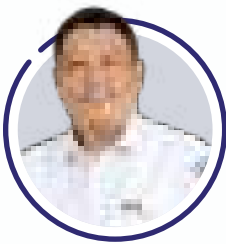
Komisaris Utama | President
Commissioner



Masa Jabatan Term of Office	2020-2025
Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Kereta Commuter Indonesia di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KP.303/XII/14/KA-2020 tanggal 28 Desember 2020. <i>Circular Decision of the Shareholders of PT Kereta Commuter Indonesia outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders KP.303/XII/14/KA-2020 dated December 28, 2020.</i>
Keterangan Description	Belum menjabat pada 2 periode <i>Has not served 2 period</i>

Edy Widyaya

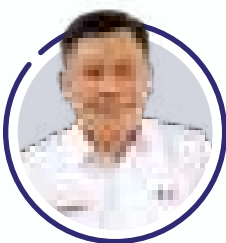
Komisaris | Commissioner



Masa Jabatan Term of Office	2019-2024
Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Risalah RUPS No. PT KAI (Persero) KP.303/VI/1/KA-2019 dan No. Yayasan Pusaka 04/RIS-KCI/VI/2019. <i>Minutes of GMS No. PT KAI (Persero) KP.303/VI/1/KA-2019 and No. Pusaka Foundation 04/RIS-KCI/VI/2019.</i>
Keterangan Description	Menjabat untuk periode kedua <i>Served for the second period</i>

John Robertho

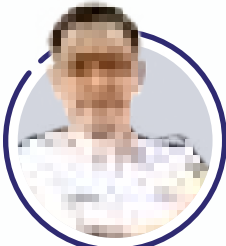
Komisaris | Commissioner



Masa Jabatan Term of Office	2020-2025
Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Kereta Commuter Indonesia di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KP.303/XII/14/KA-2020 tanggal 28 Desember 2020. <i>Circular Decision of the Shareholders of PT Kereta Commuter Indonesia outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders KP.303/XII/14/KA-2020 dated December 28, 2020.</i>
Keterangan Description	Belum menjabat pada 2 periode <i>Has not served 2 period</i>

Danto Restyawan

Komisaris | Commissioner



Masa Jabatan Term of Office	2020-2025
Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Kereta Commuter Indonesia di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KP.303/XII/14/KA-2020 tanggal 28 Desember 2020. <i>Circular Decision of the Shareholders of PT Kereta Commuter Indonesia outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders KP.303/XII/14/KA-2020 dated December 28, 2020.</i>
Keterangan Description	Belum menjabat pada 2 periode <i>Has not served 2 period</i>

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Independency

Pernyataan Independensi Independency Statements	Maqin U. Norhadi (Komisaris Utama) President Commissioner	Edy Widyaya (Komisaris) Commissioner	John Robertho (Komisaris) Commissioner	Danto Restyawan (Komisaris) Commissioner
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada PT KCI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; <i>Not a member of the Public Accountant Office, Legal Consultant Office, Public Assessment Services office or other party that provides insurance services, non-insurance services, assessment services and/or other consulting services to PT KCI within the last 6 (six) months;</i>	√	√	√	√
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PT KCI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir (kecuali Komisaris Independen); <i>Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of PT KCI within 6 (six) months of the last (except the Independent Commissioner);</i>	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PT KCI; <i>Do not have direct or indirect shares in PT KCI;</i>	√	√	√	√
Keluarga tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PT KCI; <i>Families do not have direct or indirect shares in PT KCI;</i>	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham PT KCI; <i>Do not have an affiliated relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Shareholders of PT KCI;</i>	√	√	√	√



Pernyataan Independensi Independency Statements	Maqin U. Norhadi (Komisaris Utama) President Commissioner	Edy Widyaya (Komisaris) Commissioner	John Robertho (Komisaris) Commissioner	Danto Restyawan (Komisaris) Commissioner
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT KCI; <i>Do not have direct or indirect business relationship related to the business activities of PT KCI;</i>	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah; <i>Not serving as a manager of a political party and/or a candidate/member of the legislature and/or a candidate or serving as the head/Deputy head of regional government;</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di PT KCI. <i>No other position can pose a conflict of interest related to the position in PT KCI.</i>	√	√	√	√

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Keluarga
Board of Commissioners and Family Share Ownership

Nama Name	Kepemilikan Saham Share Ownership					
	Pribadi pada Perseroan Personal to the Company		Keluarga pada Perusahaan Relatives to the Company		Pribadi/Keluarga pada Perusahaan Lain Personal/Relatives to other Company	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Maqin U. Norhadi	x	x	x	x	x	x
Edy Widyaya	x	x	x	x	x	x
John Robertho	x	x	x	x	x	x
Danto Restyawan	x	x	x	x	x	x

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS UTAMA

Board of Commissioners' Duties and Responsibilities

Terdapat 2 (dua) Tingkatan Fungsi Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris, antara lain:

1. *Level Performance*, yaitu Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi, serta memberikan masukan kepada RUPS.
2. *Level Conformance*, yaitu berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahap selanjutnya untuk memastikan nasihat telah dijalankan, serta dipenuhinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku.

There are 2 (two) levels of supervisory function conducted by the Board of Commissioners, among others:

1. *Performance Level*, the Board of Commissioners supervise by providing guidance and instruction to the Board of Directors, and provide input to the GMS.
2. *The Conformance Level*, which is the implementation of supervision activities at a later stage to ensure the advice has been carried out, as well as the fulfillment of provisions in the prevailing laws and articles of association.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Authorities

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Komisaris memiliki wewenang-wewenang, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang;
2. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
3. Memasuki bangunan-bangunan dan pekarangan, gedung, Kantor atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan;
4. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya, bila diperlukan;
5. Pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
6. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
7. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
8. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris;
9. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
10. Membentuk Komite Audit Komite Pengembangan Usaha dan Komite Manajemen Risiko, serta komite lain jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;

In carrying out its duties and obligations, the Board of Commissioners has the following authorities:

1. Provide consent to the acceptance of medium/long term loans;
2. See books, letters, and other documents, check the cash for verification purposes and other securities and inspect the Company's wealth;
3. Entering buildings and grounds, buildings, offices or other places used or controlled by the Company;
4. Attend work meetings/coordination with the Board of Directors and all its ranks, if required;
5. Other officers on any issues concerning the management of the Company;
6. Knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
7. Request the Board of Directors and/or other officers under the Board of Directors with knowledge to attend the Board of Commissioners meeting;
8. Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners;
9. Suspend members of the Board in accordance with the provisions of the Company's Articles of association;
10. Establish an Audit Committee of the Business Development Committee and Risk Management Committee, as well as other committees if deemed necessary by observing the Company's capabilities;



11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan; 12. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu; 13. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; 14. Melakukan tindakan pengawasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar, termasuk dalam kaitannya dengan pengawasan sistem teknologi informasi Perseroan; pengelolaan sumber daya manusia; akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; pengadaan barang dan jasa; perkara dan sengketa material yang menyangkut Perseroan; standar mutu dan pelayanan; serta kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian yang material dan komitmen yang dibuat Perseroan dengan pihak ketiga yang bersifat material; 15. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.	11. Attending the Board of Directors' meetings and giving views on the things discussed; 12. Use experts for certain matters and within a certain period of the Company's burden, if deemed necessary; 13. Perform the Company's management actions in certain circumstances for a specified period in accordance with the provisions of the Company's Articles of association; 14. Conducting surveillance measures as long as not contrary to the provisions of the Articles of Association, including in relation to the supervision of the Company's information technology system; Human resource management; Accounting and drafting of financial statements; Procurement of goods and services; matters and disputes concerning the Company; quality standards and services; And the Company's compliance with the provisions of the material agreement and the commitments made by the Company with a third party that is material. 15. Exercise any other supervisory authority as long as not contrary to statutory regulations, Articles of association and/or GMS decision.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Assignment Distribution

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duty and Responsibility
Maqin U. Norhadi	Komisaris Utama President Commissioner	Memimpin Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Komisaris termasuk Organ Pendukung Dewan Komisaris yang ada (Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite-Komite). Mendorong pengembangan kemampuan Dewan Komisaris, Direksi serta manajemen Perusahaan secara keseluruhan. Mengkoordinasikan fokus perhatian antar anggota Dewan Komisaris yang mencakup seluruh bidang tugas Direksi. <i>Leading the Board of Commissioners in the implementation of functions, duties, authorities and obligations of the Commissioner including supporting organs of the Board of Commissioners (Secretary to the Board of Commissioners and committees). To encourage the development of Board of Commissioners, Directors and Company management as a whole. Coordinate the focus of attention among members of the Board of Commissioners covering all the duties of Board of Directors.</i>

Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duty and Responsibility
Edy Widyaya	Komisaris Commissioner	Mengkoordinasikan pemantauan dan pengawasan atas bidang-bidang di lingkungan Direktorat Utama & Direktorat Keuangan dan Administrasi. Sebagai Ketua Komite Audit, bertanggung jawab dalam pengawasan dan memberikan nasihat secara berkala mengenai efektivitas sistem Pengendalian Internal (Internal Control), Penerapan Good Corporate Governance (GCG), dan Kepatuhan (Compliance) terhadap peraturan/kebijakan yang berlaku. <i>Coordinate monitoring and oversight of areas in the environment of the main Directorate & the Directorate of Finance and Administration. As the chairman of the Audit Committee, it is responsible for monitoring and providing periodic advice on the effectiveness of internal control systems, the implementation of Good Corporate Governance (GCG), and compliance with the prevailing regulations/policies. (Finance and administration)</i>
John Robertho	Komisaris Commissioner	Mengkoordinasikan pemantauan dan pengawasan atas bidang-bidang di lingkungan Direktorat Teknik. <i>Coordinate monitoring and oversight of areas in the environment of the main Directorate & the Directorate of Technic.</i>
Danto Restyawan	Komisaris Commissioner	Mengkoordinasikan pemantauan dan pengawasan atas bidang-bidang di lingkungan Direktorat Operasi dan Pemasaran. <i>Coordinate monitoring and oversight of areas in the Directorate of Engineering and Directorate of Operations & Marketing.</i>



PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS (BOARD MANUAL)

Board Manual For Board of Commissioners

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) disusun sebagai acuan dalam menjalankan tugas sebagai Dewan Komisaris di Perseroan. Penyusunan *Board Manual* ini sebagai wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) guna mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan secara konsisten dan dengan sebaik-baiknya.

Adapun hal-hal yang diatur dalam *Board Manual* antara lain:

1. Tugas Dewan Komisaris
2. Kewajiban Dewan Komisaris
3. Wewenang Dewan Komisaris
4. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
5. Etika Jabatan Dewan Komisaris
6. Independensi (Kemandirian) Dewan Komisaris
7. Rapat Dewan Komisaris
8. Hubungan Dewan Komisaris dengan RUPS
9. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi
10. Hubungan Dewan Komisaris dengan Komite di Bawah Dewan Komisaris
11. Sekretaris Dewan Komisaris
12. Persyaratan Dewan Komisaris
13. Komposisi Dewan Komisaris
14. Komisaris Independen
15. Pengangkatan Jabatan Dewan Komisaris
16. Masa Jabatan Dewan Komisaris
17. Program Pengenalan Dewan Komisaris
18. Perangkapan Jabatan Dewan Komisaris
19. Pengunduran Diri Jabatan Dewan Komisaris
20. Pemberhentian Dewan Komisaris
21. Keadaan Lowong Dewan Komisaris
22. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
23. Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris

The guidelines of the Board of Commissioners and Directors (*Board Manual*) are drafted as a reference in carrying out duties as the Board of Commissioners in the Company. The *Board Manual* as a manifestation of the Company's commitment in implementing *Good Corporate Governance* (GCG) in order to achieve the vision and to perform the mission that has been consistently prepared properly.

The things arranged in the *Board Manual* include:

1. Duties of Board of Commissioners
2. Obligation of Board of Commissioners
3. Authority of the Board of Commissioners
4. Responsibilities of the Board of Commissioners
5. Ethics Department of the Board of Commissioners
6. Independency of the Board of Commissioners
7. Board of Commissioners Meeting
8. Relationship of the Board of Commissioners with GMS
9. The Board of Commissioners' relationship with Directors
10. Relationship to the Board of Commissioners under the Board of Commissioners
11. Secretary of the Board of Commissioners
12. Board of Commissioners Requirements
13. Composition of Board of Commissioners
14. Independent Commissioner
15. Appointment of the Board of Commissioners
16. Duty Term of Board of Commissioners
17. Board of Commissioners Introduction Program
18. The role of the Board of Commissioners
19. Resignation of Board of Commissioners Department
20. Termination of Board of Commissioners
21. Condition of Board of Commissioners
22. Evaluation of Board of Commissioners' Performance
23. Board of Commissioners' Capability Improvement Program

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

Board of Commissioners' Assignment Implementation Report 2020

Dewan Komisaris memiliki program kerja yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2020. Adapun program kerja dan kegiatan terkait pengawasan atas pengelolaan Perseroan yang telah direalisasikan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners has that has been established work program for 2020. The work programs and activities related to the supervision of the Company's management that has been realized throughout 2020 are as follows:

Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020

1. Mengikuti program sertifikasi/pelatihan.
2. Evaluasi efektivitas penerapan GCG, termasuk kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang: Pengembangan Karir, Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Mutu dan Pelayanan, Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Teknologi Informasi.
3. Memberikan persetujuan RKAP 2020-Revisi.
4. Memberikan persetujuan RKAP 2021.
5. Melakukan kunjungan lapangan operasi.
6. Memberikan persetujuan Laporan Manajemen Triwulan I, II, dan III Tahun 2020.
7. Memberikan persetujuan Laporan Manajemen Tahun 2020.
8. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan 2020.
9. Melakukan rapat internal Dewan Komisaris.
10. Melakukan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
11. Mengikuti RUPS Laporan Kinerja 2019.
12. Mengikuti RUPS RKAP 2020.
13. Mengikuti RUPS RKAP 2021.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

A. Pengembangan SDM

Sesuai RKAP Dewan Komisaris Tahun 2019 PT Kereta Commuter Indonesia (revisi) tentang pengembangan kompetensi Dewan Komisaris dan perangkatnya, diantaranya adalah peningkatan kompetensi bagi Dewan Komisaris dan Organ Perangkat Dewan Komisaris khususnya dalam bidang manajemen keuangan dan manajemen risiko strategis secara korporasi. Dewan Komisaris dan perangkat telah memenuhi hal tersebut dengan mengikuti beberapa pelatihan dan webinar sebagai berikut: Pelatihan Supply Chain Management "Strategi mengelola risiko operasional, gangguan dan ketidakpastian dalam rantai pasokan di BUMN dan Anak Perusahaan" pada tanggal 13 Maret 2020, Awareness SNI ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) pada tanggal 12 Agustus 2020, Finance For Non Finance People the role of finance function pada tanggal 22 Agustus 2020.

B. Produk Administrasi

1. Surat Keputusan Dewan Komisaris
Terdapat beberapa hal yang diputuskan selama tahun 2020 dengan dikeluarkannya 8 (delapan) Surat Keputusan Dewan Komisaris, antara lain Penetapan Piagam Komite Audit dan Manajemen Risiko, Pengangkatan Anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko serta internal ke-organisasian Dewan Komisaris.

Board of Commissioners Program in 2020

1. Join the certification/training program.
2. Evaluation effectiveness of GCG implementation, including policy and implementation of policy in the field: Career development, Accounting and Financial Statements Preparation, Procurement of Goods and Services, Quality and Service, Risk Management, Internal Control, and Information Technology.
3. Provide approval for the RKAP 2020-revision.
4. Provide approval for the RKAP 2021.
5. Make a field visit operation.
6. Provide approval for the quarterly management report I, II, and III 2020.
7. Provide approval for the Management report year 2020.
8. Provide approval of the Annual Report 2020.
9. Conduct internal meetings of the Board of Commissioners.
10. Coordination meetings of the Board of Commissioners and Directors.
11. Attend the GMS performance report 2019.
12. Attend the GMS of the RKAP 2020.
13. Attend the GMS of RKAP 2021.

Implementation of the Board of Commissioners' Duties

A. Human Resources Development

According to the RKAP of the Board of Commissioners in 2020 of PT Kereta Commuter Indonesia (revised) on the competency development of the Board of Commissioners and its committee, including the increase of competency for Board of Commissioners and Organs of the Board of Commissioners, especially in the field of financial management and strategic risk management. The Board of Commissioners and the committees has been fulfilled by following trainings and webinars: Supply Chain Management Training "Strategies for managing operational risk, disruption and uncertainty in supply chains in SOEs and Subsidiaries" on March 13, 2020, Awareness SNI ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management System) on August 12, 2020, Finance For Non Finance People the role of finance function on August 22, 2020.

B. Product Administration

1. Decision Letter of the Board of Commissioners
There are several things decided during the year 2020 with the issuance of 8 (eight) Decree of the Board of Commissioners, among others the Ratification of Audit and Risk Management Committee Charter, Appointment of Audit and Risk Management Committee Members and the internal organization of the Board of Commissioners.



2. Surat masuk

Di tahun 2020 terdapat 39 surat maupun undangan yang diterima oleh Dewan Komisaris dari Manajemen PT KCI, baik dari Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Sekretaris Perusahaan, antara lain, penyampaian kondisi kinerja Perusahaan selama masa COVID-19, permohonan persetujuan pengalihan dan penggunaan anggaran investasi tahun 2019, permohonan tanggapan tertulis dan persetujuan Dewan Komisaris tentang revisi RKAP tahun 2020, Permohonan perubahan struktur organisasi PT KCI dan pejabat VP, dan permohonan persetujuan Dewan Komisaris atas pembukaan kantor cabang wilayah VI PT KCI.

3. Surat keluar

Di tahun 2020 terdapat 32 surat yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris, antara lain berupa narasi/redaksi visi & misi pada RJPP 2020-2024 PT Kereta Commuter Indonesia, penurunan kinerja Perusahaan PT KCI Tahun 2020 atas Dampak COVID-19, tanggapan atas *corporate action* lainnya baik yang ditujukan kepada Direktur Utama maupun ke Pemegang Saham serta penyampaian hasil kunjungan Dewan Komisaris.

C. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris tidak hanya melalui laporan tertulis namun juga melakukan koordinasi yang baik dengan Direksi. Komisaris Utama selaku pimpinan rapat selalu menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. Agenda Pembahasan rapat antara lain tentang laporan kinerja perusahaan per bulan/triwulan/dan semester, persiapan pengoperasian KA Lokal, pembelian unit bisnis KA Basoetta, dan rencana strategis lainnya dalam rangka peningkatan pendapatan, selama setahun rapat tersebut telah dilaksanakan sebanyak 12 kali yang diselenggarakan baik di Jakarta maupun luar kota.

D. Rapat internal Dewan Komisaris

Adapun rapat internal yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama setahun telah dilaksanakan sebanyak 5 kali dengan agenda antara lain, pembahasan tindak lanjut *assessment* GCG, monitoring kinerja Manajemen KCI, dsb.

E. Kunjungan lapangan

Selama tahun 2020 Dewan Komisaris beserta Perangkat Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan ke wilayah operasional PT KCI sebanyak 3 kali. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memantau langsung kondisi dan perkembangan PT KCI, baik dalam bidang sarana maupun prasarananya.

2. Incoming letter

In 2020, there were 39 letters and invitations received by the Board of Commissioners from the Management of PT KCI, both from the President Director, Finance Director and Corporate Secretary, among others, submission of the Company's performance conditions during the COVID-19 period, application for approval of transfer and use of the year's investment budget. 2019, requests for written responses and approval from the Board of Commissioners regarding the revision of the 2020 RKAP, requests for changes to the organizational structure of PT KCI and VP officials, and requests for approval from the Board of Commissioners for the opening of regional branch offices of PT KCI.

3. Outgoing letter

In 2020, there were 32 letters issued by the Board of Commissioners, among others in the form of narration/redaction vision & mission on the 2020-2024 RJPP PT Kereta Commuter Indonesia, the decline in the performance of PT KCI in 2020 due to the impact of COVID-19, responses to other good corporate actions addressed to the President Director as well as to the Shareholders as well as the delivery of the results of the visit of the Board of Commissioners.

C. Board of Commissioners Meeting with Board of Directors

Supervision function by the Board of Commissioners not only through written reports but also doing good coordination with the Board of Directors. The President Commissioner as the head of the meeting always attend the Board of Commissioners meeting with Board. Agenda of the meeting is among others about the performance report of the Company per month/quarter/and semester, preparation of Local Train operations, purchase of business unit of Basoetta train, and other strategic plans in order to increase revenues. During the year, the meeting has been carried out 12 times in Jakarta and out of town.

D. Internal meeting of the Board of Commissioners

The internal meeting carried out by the Board of Commissioners for a year has been implemented 5 times with the agenda, among others, discussion of the followup of GCG assessment, monitoring of KCI management performance, etc.

E. Field visits

During 2020, the Board of Commissioners and its committees visited PT KCI operational area 3 times. The visit aims to directly monitor the conditions and developments of PT KCI, both in the field of facilities and infrastructure.

No.	Program Kerja Work Programs	Realisasi Program Kerja Work Program Implementation
1	Pengembangan SDM <i>HR Development</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
2	Produk Administrasi <i>Administration Product</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
3	Rapat Dewan komisaris dengan Direksi <i>Coordination Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
4	Rapat Internal Dewan Komisaris <i>Internal meeting of the Board of Commissioners</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>
5	Kunjungan Lapangan <i>Field Visit</i>	Terlaksana <i>Implemented</i>

PROGRAM ORIENTASI DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Orientation Program

Dengan latar belakang anggota Dewan Komisaris yang berasal dari beberapa pihak yang merepresentasikan Pemegang Saham, maka keberadaan Program Pengenalan sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar para Anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang kompak, komprehensif dan efektif. Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, wajib diberikan Program Pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum;
2. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengadakan Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Dalam hal pergantian jabatan Dewan Komisaris bukan jabatan Komisaris Utama, maka Komisaris Utama wajib untuk ikut mengenalkan Perusahaan dan segala kondisinya kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Jika Komisaris Utama berhalangan, maka tanggung jawab ikut mengenalkan Perusahaan berada pada Direktur Utama;
3. Program pengenalan meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Perseroan;
 - b. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum;
 - c. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya;

With the background of members of the Board of Commissioners that come from several parties representing shareholders, the existence of the introduction Program is very important to implement. This is done so that the members of the Board of Commissioners can know each other and cooperate as a team that is compact, comprehensive and effective. The provisions of the introductory program include the following:

1. *For the newly appointed members of the Board of Commissioners, the introduction Program shall be given the general condition of the Company;*
2. *The Corporate Secretary is responsible for the introduction of the newly appointed Board of Commissioners member Program. In the event of substitution of the Board of Commissioners not the position of President Commissioner, the President Commissioner shall introduce the Company and its conditions to the newly appointed member of the Board of Commissioners. If the President Commissioner is absent, the responsibilities of introducing the Company are at the President Director;*
3. *The introductory Program includes:*
 - a. *Implementation of Good Corporate Governance principles in the Company;*
 - b. *Description of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors by law;*
 - c. *The Company's description relates to the purpose, nature, and scope of activities, financial and operating performance, strategy, short-term and long-term business plan, competitive position, risk, internal control and other strategic problems;*



- d. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit;
- e. Keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Direksi dan Dewan Komisaris;
- f. Pemahaman terkait dengan prinsip etika dan norma yang berlaku di lingkungan Perseroan serta masyarakat setempat;
- g. *Team Building*. Dalam kegiatan ini menyertakan Direksi, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya.
4. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke kantor-kantor cabang, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.
5. Program pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan setelah pengangkatan Komisaris yang bersangkutan.

Pada tahun 2020 Perseroan melakukan program pengenalan Dewan Komisaris yaitu kepada Jajaran Dewan Komisaris dengan Jajaran Direksi PT KCI dan Insan KCI pada 12 Agustus 2020.

- d. *Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies and Audit Committees;*
- e. *Information regarding the obligations, duties, responsibilities and rights of the Board of Directors and Board of Commissioners;*
- f. *Understanding related to the principles of ethics and norms that apply in the environment of the Company and local communities;*
- g. *Team Building. In this activity include the Board of Directors, both the new and the former.*
4. *An introductory program can be a presentation, a meeting, a visit to the Company's facilities, visits to the branch offices, reviewing the Company's documents or other programs deemed to be suitable for the needs.*
5. *This introductory program is conducted no later than 3 months after the appointment of the Commissioner.*

In 2020, the Company carried out introduction program to the Board of Commissioners and the Board of Directors and KCI employees on August 12, 2020.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Training and Competency Development

Dewan Komisaris dari waktu ke waktu ikut serta dalam program pelatihan guna meningkatkan keahliannya. Perseroan mendorong seluruh anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program pengembangan diri sesuai kebutuhan melalui alokasi anggaran pelatihan yang ditetapkan setiap tahunnya. Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perseroan.

Ketentuan-ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris;
- b. Rencana untuk melaksanakan Program Peningkatan Kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
- c. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk menyajikan presentasi kepada Anggota Dewan Komisaris lainnya dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan (*sharing knowledge*);

From time to time, the Board of Commissioners participate in the training program to improve its expertise. The Company encourages all members of the Board of Commissioners to attend a self-development program as needed through the allocation of training budgets set annually. Improvement of capability is important for the Board of Commissioners can always update information about the latest developments of the Company's core business.

The provisions of the capability improvement Program for the Board of Commissioners are as follows:

- a. *Capability improvement Program implemented in order to improve the effectiveness of the Board of Commissioners work;*
- b. *The plan to implement the Capability Improvement Program shall be included in the work plan and Budget of the Board of Commissioners;*
- c. *Each member of the Board of Commissioners who attend the Capability Improvement Program such as seminars and/or trainings is requested to present presentations to other members of the Board of Commissioners in order to share information and knowledge (sharing knowledge);*

- d. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.

- d. The member of the Board of Commissioners is responsible for making a report on the implementation of the capability improvement Program. The report is submitted to the Board of Commissioners.

Program Peningkatan Kapabilitas antara lain:

- Pengetahuan terkait dengan prinsip-prinsip hukum korporasi dan *updating* peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, serta sistem pengendalian internal;
- Pengetahuan berkaitan dengan manajemen strategis dan formulasinya;
- Pengetahuan berkaitan dengan manajemen risiko;
- Pengetahuan terkait dengan pelaporan keuangan yang berkualitas.

Capabilities Improvement Program, among others:

- Knowledge related to corporate law principles and updating of laws relating to the Company's business activities, as well as internal control systems;
- Knowledge related to strategic management and its formulation;
- Knowledge related to risk management;
- Knowledge related to quality financial reporting.

Selama tahun 2020, berikut pelatihan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dan jajarannya:

During 2020, the following training was conducted by the Board of Commissioners and its ranks:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Waktu Time	Tempat Venue	Kegiatan Event	Penyelenggara Organizer
1	Maqin U. Norhadi	Komisaris Utama President Commissioner	-	-	-	-
2	Edy Widyaya	Komisaris Commissioner	15-18 Desember 2020 December 15-18, 2020	Online	Executive Education Direction Program	Pertamina Training & Consulting
3	John Robertho	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
4	Danto Restyawan	Komisaris Commissioner	-	-	-	-
5	Dariyadi	Plt. Komisaris Acting Commissioner	13 Maret 2020 March 13, 2020	Hotel Holiday Inn Bandung Pasteur	Supply Chain Management	HC BUMN

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

Assessment of The Performance of The Board of Commissioners Supporting Boards

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris dilakukan secara kolegial pada setiap 1 tahun periode yang dilakukan secara *self assessment* bersamaan dengan penilaian kinerja Dewan Komisaris. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan penilaian untuk perpanjangan masa kerja anggota Komite Penunjang Dewan Komisaris pada periode berikutnya. Penilaian meliputi kehadiran dalam rapat, realisasi program kerja serta kualitas telaah/saran/rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris.

Performance evaluation of the Board of Commissioners' Committee members was conducted in a collegial every 1 year in a self assessment period along with the performance assessment of the Board of Commissioners. The results of the evaluation will be the assessment material for the extension of the work period of the Board of Commissioners support in the next period. The assessment includes attendance at the meeting, the realization of the work program and the quality of the study/suggestion/recommendation given to the Board of Commissioners.



DIREKSI

Board of Directors

Direksi memiliki tugas utama untuk menjalankan tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi wajib memastikan agar Perseroan memperhatikan kepentingan pihak konsumen, Pemegang Saham, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

The Board of Directors has the main duty to conduct actions relating to the Company's management for the benefit of the Company in accordance with the purpose and objectives of the Company. The Board of Directors must ensure that the Company pays attention to the interests of consumers, Shareholders and other stakeholders.

KRITERIA PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI

The Board of Directors' Appointment Criteria

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan bahwa Pengangkatan anggota Direksi Perusahaan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan dilakukan oleh RUPS melalui proses pencalonan berdasarkan pedoman yang diatur sebagai berikut:

Based on the Articles of Association of the Company that the appointment of the Company's Board of Directors is carried out on the principles of Good Corporate Governance, namely professionalism, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness. The appointment of the Company's Board of Directors is conducted by the GMS through the nomination process based on the following guidelines:

Persyaratan dan Komposisi Direksi

Komposisi Direksi

- Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. Apabila Direksi lebih dari 1 (satu) orang maka seorang di antaranya diangkat menjadi Direktur Utama;
- Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengelolaan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
- Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.

Board of Directors Requirements and Composition

Composition of the Board of Directors

- The Company's Board of Directors consists of 1 (one) member of the Board of Directors. If the Board of Directors is more than 1 (one) person then one of them is appointed President Director;
- In the event that the BOD consists of 2 (two) members of the Board of Directors or more, the Division of Duties and Management Authority among the members of the Board of Directors shall be determined;
- In the event that the GMS do not establish, the Division of duties and authorities of the Board of Directors shall be determined based on the decision.

Persyaratan Direksi

Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi yaitu:

- Syarat Formal, yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - Dinyatakan pailit;
 - Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
 - Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anak Perusahaan, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Board of Directors Requirements

Requirements to be nominated as members of the Board of Directors are:

- Formal requirement, which is a capable individual who conducts legal action, except within 5 (five) years before his appointment once:
 - Declared bankrupt;
 - Being a member of the Board of Directors or a member of the BOC/Supervisory Board which is convicted of causing any SOE, subsidiary and/or Company shall be declared bankrupt;
 - Convicted of criminal acts that harm the finances of the State, SOE, subsidiaries, Company, and/or related to the financial sector.

2. Pemenuhan Syarat Formal di atas, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Syarat Formal di atas batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris ataupun pihak lainnya yang berkepentingan mengetahui dan melaporkan tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
 3. Syarat Materil terhadap Calon Anggota Direksi, yaitu meliputi:
 - a. Pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (*track record*) yang menunjukkan Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum keberhasilan dalam BUMN/Anak Perusahaan pencalonan.
 - b. Keahlian, dalam arti yang bersangkutan:
 - 1) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan yang bersangkutan;
 - 2) Memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola Perusahaan;
 - 3) Memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan Perseroan.
 - 4) Integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - a. Perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
 - b. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - c. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan Perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
 4. Kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk
 - a. Memformulasikan dan mengartikulasikan visi Perusahaan.
 - b. Mengarahkan pejabat dan karyawan Perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan Perusahaan.
2. *The fulfillment of formal requirements above, evidenced by a statement signed by the prospective members of the Board of Directors and the letter held by the Company. The appointment of Board Members who do not meet the requirements as referred to the Formal requirements above are void due to the law from the time the other members of the Board of Directors or the BOC or any other interested parties know and report no fulfillment of those requirements.*
 3. *Materil requirements on prospective members of the Board of Directors, including:*
 - a. *Experience, in the sense of having a track record that shows the Company/Institution where it is concerned to work before the success in the SOE/Subsidiaries candidacy.*
 - b. *Expertise, in the relevant sense:*
 - 1) *Having adequate knowledge in the Company's business field concerned;*
 - 2) *Have an understanding of management and corporate governance;*
 - 3) *Have the ability to formulate and implement strategic policies in order to develop the Company.*
 - 4) *Integrity, in the sense of the concerned never involved:*
 - a. *The deeds manipulation and deviant practices in the place of the work before the candidacy (dishonest);*
 - b. *The deed of the ineligible appointment may not fulfill the agreed commitment to the place of work before the nomination (misconduct);*
 - c. *Categorized deeds may provide profit against the law to the concerned and/or other parties prior to the nomination (misconduct);*
 - d. *Acts that may be categorized as a breach of provisions relating to the principles of sound corporate management (misconduct).*
 4. *Leadership, in the sense with the concerned ability to*
 - a. *Formulate and articulate the vision of the Company.*
 - b. *Direct officers and employees of the Company to be able to do something to realize the Company's objectives.*



c. Membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan Perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan Perusahaan. 5. Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan yang bersangkutan. 6. Syarat lain, yang meliputi: a. Bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif; b. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah; c. Berusia tidak melebihi 58 tahun ketika akan menjabat Direksi; d. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, Anggota Direksi pada BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan; e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi; f. Tidak menjabat sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut; g. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Direksi) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.	c. <i>Uplift (encourage) and motivate the officers and employees of the Company to be able to realize the Company's objectives.</i> 5. <i>Have a strong will (enthusiastic) and high dedication to advance and develop the Company in question.</i> 6. <i>Other terms, which include:</i> a. <i>Not a political party administrator, and/or legislative member, and/or not currently running as a candidate for legislative members;</i> b. <i>Not the Head/Deputy head of the region and/or not being nominated as a candidate head/Deputy chief of the District;</i> c. <i>Not exceeding 58 years old when going to the Board of Directors;</i> d. <i>Not being an official of the Board, member of the Board of Commissioners/Monitoring Board in SOE, member of Board of Directors in SOE, Subsidiaries and/or Company, except signing a letter of statement willing to resign from the post if elected as a member of the Board of Directors of subsidiaries;</i> e. <i>Not held officer title based on statutory regulations is forbidden to be concurrently with the Office of the Board of Directors, unless signed a statement letter willing to resign from the post if elected as a member of the Board of Directors;</i> f. <i>Not serving as a member of the Board of Directors in the relevant Company for 2 (two) consecutive periods;</i> g. <i>Healthy physical and spiritual (not suffered any diseases that can inhibit the execution of duties as a member of the Board of Directors) and proved by the health certificate of a government hospital.</i>

KOMPOSISI DIREKSI

Board of Directors' Composition

Berdasarkan Risalah Sirkuler Keputusan Pemegang Saham PT Kereta Commuter Indonesia, Nomor PT KAI (Persero): KP.303/XII/14/KA-2020, Nomor Yayasan Pusaka: 08/RIS-KCI/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, maka susunan Direksi sebagai berikut:

Based on the Circular Minutes of the Shareholders' Decision of PT Kereta Commuter Indonesia, PT KAI (Persero) Number: KP.303/XII/14/KA-2020, Yayasan Pusaka Number: 08/RIS-KCI/XII/2020 dated December 28, 2020 regarding the Appointment of Members the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, the composition of the Board of Directors is as follows:

1. Direktur Utama: Wiwik Widayanti
2. Direktur Operasi dan Pemasaran: Wawan Ariyanto
3. Direktur Keuangan: M. Widodo
4. Direktur Teknik: Roppiq Lutzfi Azhar

Per 31 Desember 2020, komposisi Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Direktur Utama: Wiwik Widayanti
2. Direktur Operasi dan Pemasaran: Wawan Ariyanto
3. Direktur Keuangan: M. Widodo
4. Direktur Teknik: Roppiq Lutzfi Azhar

1. President Director: Wiwik Widayanti
2. Director of Operations and Marketing: Wawan Ariyanto
3. Director of Finance: M. Widodo
4. Director of Technic: Roppiq Lutzfi Azhar

As of December 31, 2020, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:

1. President Director: Wiwik Widayanti
2. Director of Operations and Marketing: Wawan Ariyanto
3. Director of Finance: M. Widodo
4. Director of Technic: Roppiq Lutzfi Azhar

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Board of Directors' Manual

Dalam rangka menjalankan tugas sebagai Direksi Perseroan, maka Direksi mengacu pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*). *Board Manual* merupakan wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) guna mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan secara konsisten dan dengan sebaik-baiknya.

Terkait Direksi, hal-hal yang diatur dalam Board Manual sebagai berikut:

1. Tugas Direksi
2. Kewajiban Direksi
3. Wewenang Direksi
4. Tanggung Jawab Direksi
5. Etika Jabatan Direksi
6. Independensi (Kemandirian) Direksi
7. Rapat Direksi
8. Hubungan Direksi dengan RUPS
9. Hubungan Direksi dengan Komisaris
10. Organ Pendukung Direksi
11. Persyaratan dan Komposisi Direksi
12. Pengangkatan dan Masa Jabatan Direksi
13. Perangkapan Jabatan Direksi
14. Berakhirnya Jabatan Anggota Direksi
15. Pemberhentian Sementara Direksi
16. Pengunduran Diri Jabatan Direksi
17. Keadaan Direksi Lowong
18. Program Pengenalan
19. Evaluasi Kinerja Direksi
20. Program Peningkatan Kapabilitas Direksi

In order to carry out duties as a Board of Directors, the Board of Directors refers to the working guidelines of the Board of Commissioners and Directors (*Board Manual*). *Board Manual* is a manifestation of the Company's commitment in implementing *Good Corporate Governance* (GCG) in order to achieve the vision and to perform the mission that has been consistently set and properly.

Related the Board of Directors, the following Board Manuals are as follows:

1. Duties of the Board of Directors
2. Obligation of the Board of Directors
3. Authority of the Board of Directors
4. Responsibilities of the Board of Directors
5. Code of Conduct of the Board of Directors
6. Independency of the Board of Directors
7. Meeting of the Board of Directors
8. Relationship of the Board of Directors with GMS
9. Relationship of the Board of Directors with the Board Commissioner
10. Organ Supporting the Board of Directors
11. Board of Directors' requirements and composition
12. Appointment and tenure of the Board of Directors
13. Concurrent Position of the Board of Directors
14. Termination of the Board of Directors
15. Temporary Suspension of the Board of Directors
16. Resignation of the Board of Directors
17. Vacant Position of the Board of Directors
18. Introductory Program
19. Evaluation of the Board of Directors' performance
20. The Board of Directors' Capability Development Program



TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI

Board of Directors' Duties and Authorities

Tugas Direksi

Adapun tugas-tugas Direksi antara lain:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Keputusan RUPS.
2. Direksi bertanggung jawab atas tugas dan fungsi untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan Perseroan. Dalam hal pembagian tugas dan fungsi Direksi tidak ditentukan oleh RUPS, maka pembagian tugas dan fungsi Direksi diatur dalam Rapat Direksi. Setiap anggota Direksi oleh karenanya bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut masing-masing.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Ketentuan dalam UUPT tersebut mengandung konsep *fiduciary duty*. *Fiduciary duty* adalah suatu doktrin yang menunjukkan jalinan hubungan yang terjadi antara Direksi dengan Perseroan, yaitu suatu kewajiban atas dasar itikad yang sebaik-baiknya, kepercayaan, keyakinan dan kejujuran yang dimiliki oleh penerima kepercayaan untuk kepentingan pemberi kepercayaan, dan dapat dikatakan pula yaitu suatu kewajiban untuk bertindak dengan tingkat kejujuran dan loyalitas yang setinggi-tingginya terhadap Perseroan untuk kepentingan terbaik Perseroan.

Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG seperti profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Setiap anggota Direksi wajib memiliki itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Directors' Duty

The duties of the Board of Directors are:

1. The Board of Directors shall carry out all actions relating to the Company's management for the benefit of the Company and in accordance with the purpose and objectives of the Company, as well as representing the corporation both inside and outside the court of all things and all occurrences with restrictions as stipulated in the laws and regulations, the Company's Articles of Association and/or GMS resolutions.
2. The Board of Directors are responsible for the duties and functions to perform management and management of the Company. In the event that the division of duties and functions of the Board of Directors is not determined by the GMS, the Division of Duties and functions of the Board of Directors shall be governed. Each member of the Board of Directors is therefore responsible for the performance of their respective duties and functions.
3. In carrying out its duties, the Board of Directors is authorized to conduct management in accordance with the appropriate policy, within the stipulated limits of the Company's constitution and/or articles of association. Provisions in the UUPT contain the concept of fiduciary duty. Fiduciary duty is a doctrine that shows the relationship between the Board of Directors and the Company, which is on the basis of the best faith, belief, confidence and honesty that is owned by the recipient of trust for the benefit of the trust, and can also be said to be an obligation to act with the level of honesty and loyalty highest to the Company for the best interests of the Company.

Board of Directors' Responsibility

In carrying out its duties, members of the Board of Directors must abide by the Company's Articles of association and the laws and regulations and must implement GCG principles such as professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, accountability and fairness.

Each member of the Board of Directors shall have a good faith and full responsibility in carrying out its duties for the Company's interests and business with respect to applicable legislation.

Tanggung Jawab Pribadi

Seorang Direktur dapat bertanggung jawab secara pribadi apabila:

1. Direktur tersebut telah lalai dan menyebabkan Perseroan rugi sebagai akibat dari kelalaiannya tersebut;
2. Direktur melakukan tindakan yang mengandung benturan kepentingan dan merugikan Perseroan; dan
3. Anggota Direksi bertindak di luar kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.

Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng dengan Direksi Lain

Setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab apabila terdapat kondisi-kondisi di bawah ini:

1. Kepailitan di mana kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut;
2. Pembelian kembali saham yang melampaui batas ketentuan UUPT, yaitu pembelian kembali yang menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib;
3. Setiap pernyataan yang keliru atau informasi yang menyesatkan dalam laporan tahunan Perseroan;
4. Setiap pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat menyesatkan mengenai keadaan Perseroan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat;
5. Pelaksanaan Pendayagunaan Aktiva Tetap untuk kepentingan Perseroan, serta menjamin pendayagunaan tersebut agar bebas dari tekanan, paksaan dan campur tangan dari pihak lain, antara lain dengan cara mengevaluasi perjanjian Pendayagunaan Aktiva tetap yang dianggap merugikan atau belum memberikan keuntungan yang optimal bagi Perseroan tersebut tidak dilakukan;
6. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Direksi memiliki wewenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan dan untuk mengambil keputusan atas nama Direksi, baik di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus

Personal Responsibility

A Director may be personally liable if:

1. The Director has been negligent and caused the Company to lose as a result of its negligence;
2. The Director performs actions that contain conflicts of interest and harm the Company; and
3. Members of the Board of Directors act outside of their authority as stipulated in the Company's constitution and Articles of Association.

Joint Responsibilities with other Directors

Each member of the Board of Directors is solely responsible for the following conditions:

1. Bankruptcy occurred due to errors or omissions of the Board of Directors and of the bankrupt property is insufficient to pay all obligations of the Company in the bankruptcy;
2. The buyback of shares that exceeded the provisions of the UUPT provision, i.e. a re-purchase that caused the Company's net worth to be smaller than the amount of capital placed added compulsory reserves;
3. Any erroneous statements or misleading information in the Company's annual report;
4. Any incorrect statements regarding the fact of the material or not revealing the material facts so that the statement made misleading about the Company's circumstances occurring at the time of the statement was made;
5. Implementation of the utilization of fixed assets for the benefit of the Company, as well as ensuring that the utilization is free from pressure, compulsion and interference from other parties, among others, by evaluating the agreement on the utilization of fixed assets that are considered harmful or yet provide optimal profit for the Company is not conducted;
6. Actions made by members of the Board of Directors outside decided by the meeting of the Board of Directors shall be the personal responsibility in question until the action is approved by the Board of Directors meeting.

Board of Directors' Authority

In performing its duties and obligations, in accordance with the provisions of the Articles of association of Directors has the authority to:

1. Establishing the Company's management policy;
2. Regulate the submission of the Board of Directors to represent the Company and to make decisions on behalf of the Board of Directors, both inside and outside the court



ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain;

3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS;
4. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengangkat Sekretaris Perseroan;
6. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Keputusan RUPS.

to one or several members of the Board of Directors who are specifically appointed to it or to a person or several employees of the Company either alone or jointly or to others;

3. To regulate the provisions of the Company's employment including the determination of salary, retirement or guarantee of the old days and other income for the Company's employees based on prevailing laws and regulations and resolutions of the GMS;
4. Appoint and dismiss the Company's officers based on the Company's regulations and prevailing laws and regulations;
5. Appoint the Corporate Secretary;
6. Perform all actions and other deeds regarding the management or ownership of the Company, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company in and out of the courts on all matters and events, by limiting the restrictions as provided in the laws and regulations, the Company's Articles of association and/or resolutions of the GMS.

Pembagian Tugas Direksi

Board of Directors' Assignment Distribution

Dalam menjalankan tugas dan perannya pada Perseroan, anggota Direksi memiliki tugasnya masing-masing sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Direktur Utama

Direktur dikoordinir oleh Direktur Utama dan bertanggungjawab atas:

1. Koordinasi fungsi-fungsi direktorat untuk hal-hal yang terkait dengan penetapan kebijakan dan strategi, pengendalian modal dan alokasi sumber daya, pengendalian risiko serta hubungan dengan pihak luar.
2. Penetapan arah, kebijakan, strategi dan rencana strategis serta pengendalian pengelolaan bisnis utama/inti Perusahaan dan bisnis pendukung Perusahaan.
3. Pengendalian dan koordinasi (secara langsung) penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan meliputi unit Umum, Dokumentasi, GCG dan Kesehatan, penyelenggaraan fungsi hukum dan kepatuhan, penyelenggaraan fungsi logistik meliputi pengadaan barang/jasa, pengendalian logistik, pergudangan dan distribusi, penyelenggaraan fungsi Satuan Pemeriksa Internal dan penyelenggaraan fungsi Corporate Communication.

In carrying out its duties and roles to the Company, members of the Board of Directors have their respective duties as described below:

President Director

The Director is coordinated by the President Director and responsible for:

1. Coordination of Directorate functions for the establishment of policies and strategies, capital control and allocation of resources, risk control and relations with outside parties.
2. The determination of direction, policy, strategic strategy and plan and control of the main business management/core Company and supporting business of the Company.
3. Control and coordination (directly) implementation of the function of the Company's secretary includes general units, documentation, GCG and health, implementation of legal and compliance functions, implementation of logistics functions including procurement of goods/services, logistics control, warehousing and distribution, implementation of Internal Audit Unit function and implementation of Corporate Communication function.

4. Tercapainya integritas dan sinergi kebijakan serta penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran Perseroan.
5. Terlaksananya rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Direksi.
6. Perumusan strategi bisnis yang dilakukan bersama dengan pemangku jabatan kunci, penetapan dan pengendalian implementasinya.

Direktur Keuangan dan Administrasi

Direktorat Keuangan dan Administrasi mempunyai tugas pokok menjalankan fungsi pengelolaan keuangan secara terpusat yang mencakup penyelenggaraan fungsi anggaran dan akuntansi, keuangan dan pengelolaan dana, perencanaan strategis dan manajemen risiko, dan SDM, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan unit-unit organisasi di bawahnya.

Selain tugasnya sebagai anggota Direksi dengan penetapan kewenangan serta tugas kolegial Direksi yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan Perseroan lainnya yang mengatur khusus mengenai hal tersebut, Direktur Keuangan dan Administrasi bertanggungjawab atas:

1. Perumusan dan penyusunan program/kebijakan keuangan dan pengelolaan dana meliputi: tata laksana perbendaharaan dan pengelolaan dana, mengevaluasi pembayaran internal dan eksternal Perseroan, mengendalikan dan mendistribusikan dana, mendayagunakan kas Perusahaan dan mengupayakan sumber-sumber pendanaan.
2. Penyusunan kebijakan akuntansi meliputi: pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan, laporan laba rugi Perseroan, laba rugi fiskal, sistem dan peraturan akuntansi dan laporan manajemen serta perhitungan biaya operasi penyelenggaraan KRL.
3. Perumusan dan penyusunan program/kebijakan anggaran meliputi: penyusunan RKA Perseroan, mengevaluasi otorisasi dan pelaksanaan anggaran serta mengendalikan anggaran Perseroan.
4. Pelaksanaan perhitungan, pengurusan, evaluasi dan pelaporan pajak dan asuransi.
5. Perumusan, pengkoordinasian, evaluasi penyusunan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan evaluasi penyusunan manajemen risiko Perseroan.
6. Perumusan, pengkoordinasian, evaluasi penyusunan manajemen risiko Perseroan terkait investasi keuangan meliputi prosedur, kontrol dan mitigasinya.

4. Achievement of integrity and synergy of policies and use of resources to achieve the objectives of the Company.
5. The implementation of the plans and policies that have been formulated by the Board of Directors.
6. Formulation of business strategy in conjunction with key stakeholders, determination and implementation control.

Finance and Administration Director

The Directorate of Finance and Administration has a fundamental task of conducting centralized financial management functions that include the implementation of budget and accounting functions, finance and fund management, strategic planning and risk management, and human resources, coordinating and integrating the organizational units underneath.

In addition to his duties as a member of the Board of Directors with the determination of the Authority and the duties of the Board of Directors stipulated in the Company's Articles of Association and other regulations and laws governing the Company, the Director of Finance and administration shall be liable for:

1. Formulation and preparation of financial programs/policies and fund management include: Governance of Treasury and fund management, evaluating the Company's internal and external payments, controlling and distributing funds, powering the Company's cash and seeking funding sources.
2. The formulation of accounting policies including: the implementation, control and evaluation of financial statements, the Company's income statement, fiscal income, system and accounting regulations and management reports as well as the calculation of the operation cost of the KRL.
3. Formulation and drafting of budget programs/policies include: Drafting The Company's RKA, evaluating the authorization and implementation of the budget and controlling the Company's budget.
4. Implementation of calculation, management, evaluation and reporting of taxes and insurance.
5. Formulation, coordinating, evaluation of the Company's long-term plan (RJPP) and work plan and budget of the Company (RKAP) and evaluation of the Company's risk management.
6. Formulation, coordination, evaluation of the Company's risk management related to financial investment, including procedures, controls and mitigations.



7. Perumusan dan penyusunan strategi SDM meliputi administrasi SDM, perencanaan dan pengembangan SDM, rekrutmen dan hubungan industrial baik internal maupun eksternal.

Direktur Teknik

Direktorat Teknik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi perencanaan pemeliharaan KRL, pemeliharaan dan *quality control* pemeliharaan KRL, prasarana dan IT yang mencakup fungsi perencanaan dan evaluasi, mengkoordinasikan, mengintegrasikan unit-unit organisasi di bawahnya dengan instansi lain yang terkait.

Selain tugasnya sebagai anggota Direksi dengan penetapan kewenangan serta tugas kolegial Direksi yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan Perseroan lainnya yang mengatur khusus mengenai hal tersebut, Direktur Teknik bertanggungjawab atas:

1. Perumusan, penyusunan dan evaluasi program/kebijakan serta koordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan perencanaan dan evaluasi pemeliharaan KRL, pemeliharaan KRL dan *quality control*, prasarana dan IT.
2. Evaluasi kinerja penyediaan, pemeliharaan, perbaikan sarana KRL untuk memenuhi kelaikan sarana, dan pengendalian biaya.
3. Evaluasi kualitas keandalan sarana KRL.
4. Mengkaji perkembangan teknologi sarana, metode pelatihan, proses sertifikasi dan prosedur pemeliharaan KRL.
5. Perumusan dan penyusunan program/kebijakan prasarana dan IT yang mendukung pelayanan pelanggan dan kebutuhan internal Perseroan.

Direktur Operasi dan Pemasaran

Direktorat Operasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi pengelolaan yang mencakup bidang keamanan dan keselamatan, bidang operasi, bidang komersial, bidang pelayanan dan bidang PSO (*Public Service Obligation*) KRL dan mengkoordinasikan unit-unit organisasi di bawahnya.

Selain tugasnya sebagai anggota Direksi dengan penetapan kewenangan serta tugas kolegial Direksi yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan Perusahaan lainnya yang mengatur khusus mengenai hal tersebut, Direktur Operasi dan Pemasaran bertanggung jawab atas:

1. Merumuskan, mengevaluasi program dan kebijakan keamanan dan keselamatan KRL yang dioperasikan Perseroan.

7. *Formulation and preparation of HR strategy includes human resources administration, planning and development of human resources, recruitment and industrial relations both internally and externally.*

Director of Technic

Directorate of Technic has the main task of organizing the function of maintenance planning KRL, maintenance and quality control maintenance KRL, infrastructure and IT that squeak the function of planning and evaluation, coordinate, integrate the organizational units underneath it with other related agencies.

In addition to his duties as a member of the Board of Directors with the determination of the authority and the duties of the Board of Directors stipulated in the Company's Articles of Association and other regulations and laws governing the Company, the Director of Technic shall be liable to:

1. *Formulation, drafting and evaluation of programs/policies and coordination with related parties in connection with the planning and evaluation of the maintenance of KRL, maintenance of KRL and quality control, infrastructure and IT.*
2. *Performance evaluation of the provision, maintenance, improvement of KRL means to fulfill means, and control of costs.*
3. *Evaluation quality reliability of KRL facility.*
4. *To assess the development of technological facilities, training methods, certification processes and KRL maintenance procedures.*
5. *Formulation and drafting of infrastructure and IT programs/policies that support customer service and internal needs of the Company*

Director of Operations and Marketing

The Directorate of Operations has a fundamental task of organizing a management function that includes the areas of security and safety, field of operation, commercial field, service field and field of PSO (Public Service Obligation) KRL and coordinate the organizational units utmt underneath.

In addition to his duties as a member of the Board of Directors with the determination of the authority and the duties of the Board of Directors stipulated in the Company's Articles of Association and regulations of other companies governing the matter, the Operations and Marketing Director is responsible for:

1. *Formulating, evaluating the security and safety policies of KRL operated by the Company.*

2. Merumuskan, menyusun program dan kebijakan operasi dan monitoring perjalanan KRL yang dioperasikan Perseroan. 3. Merumuskan, menyusun program dan kebijakan pengaturan awak KA KRL yang dioperasikan Perseroan. 4. Merumuskan dan menyusun program dan kebijakan pemasaran dan pengembangan usaha, penjualan dan pengendalian tiket KRL, periklanan, promosi, pelayanan pelanggan dan fasilitas pelayanan. 5. Merumuskan dan menyusun program dan kebijakan persediaan, distribusi dan penjualan tiket KRL. 6. Merumuskan dan menyusun program dan kebijakan pengelolaan SDM yang ditempatkan di loket. 7. Merumuskan dan menyusun program dan kebijakan pemasangan iklan (<i>advertising</i>) dan promosi. 8. Merumuskan dan menyusun program dan kebijakan pengelolaan kartu uang elektronik. 9. Merumuskan dan menyusun program dan kebijakan pengelolaan pelayanan pelanggan dan fasilitas pelayanan. 10. Merumuskan dan menyusun program dan kebijakan pengelolaan kebutuhan terkait penerimaan PSO.	2. <i>Formulating, arranging program and operating policies and monitoring of the Company's operated KRL trip.</i> 3. <i>Formulating, arranging programmes and policies of crew arrangement of KRL operated by the Company.</i> 4. <i>Formulate and develop marketing and business development programs and policies, sales and control of KRL tickets, advertising, promotion, customer service and service facilities.</i> 5. <i>Formulating and drafting programs and policies on supply, distribution and sale of KRL tickets.</i> 6. <i>Formulating and drafting the HR management programs and policies placed at the counter.</i> 7. <i>Formulating and compiling programs and policies on advertising and promotion.</i> 8. <i>Formulating and structuring electronic money card management programs and policies.</i> 9. <i>Formulating and develop programs and policies of customer service management and service facilities.</i> 10. <i>Formulating and drafting programs and management policies related to PSO acceptance.</i>

Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Professional Relationship

Secara operasional, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab harian yang berbeda-beda. Tugas utama Dewan Komisaris adalah sebagai pengawas dan pemberian nasihat, sedangkan tugas utama Direksi menjalankan pengelolaan operasional Perseroan. Semua tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Selain saling menghormati dan memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, Dewan Komisaris dan Direksi juga harus saling berkoordinasi serta bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kesinambungan usaha Perseroan jangka panjang. Pula menjadi teladan bagi jajaran di bawahnya.

Seluruh tata cara pedoman kerja, dan hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi telah ditetapkan dalam *Board Manual*. *Board Manual* merupakan pedoman di mana semua tanggung jawab, kewajiban, wewenang, hak, etika Dewan Komisaris dan Direksi, serta pengaturan rapat dan tata cara hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi tercantum di dalamnya.

In operation, the BOC and the BOD have different daily duties and responsibilities. The main task of the Board of Commissioners is as a supervisory and advice duty, while the main task of the Board of Directors conducts the Company's operational management. All duties, responsibilities, and authorities are each adapted to the rules of abuse and Articles of Association.

In addition to mutual respect and understanding of their duties and responsibilities, the Board of Commissioners and Board of Directors must also coordinate and cooperate to achieve the objectives and sustainability of the Company's long-term business. It is an example of the ranks beneath.

All procedures for work guidelines, and the relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors have been established in Board Manual. Board Manual is a guideline in which all responsibilities, obligations, authority, rights, ethics of the Board of Commissioners and Directors, as well as the arrangement of meetings and the procedures of the work relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors are listed therein.



Dalam mengambil keputusan yang menyangkut soal keberlangsungan usaha dan operasional Perseroan, serta menyatukan pandangan antara Dewan Komisaris dan Direksi, diperlukan adanya pertemuan secara berkala. Penyelenggaraan rapat berkala ini dilaksanakan dalam rangka membahas berbagai agenda yang menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang menjadi fokus Direksi dalam melaksanakan bisnis dan operasional Perseroan namun yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Maka dari itu perlu diadakan forum Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Rapat tersebut juga sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan memberikan tanggapan, catatan, dan nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat. Keputusan rapat dibuat berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat atau diambil berdasarkan suara terbanyak serta mengikat untuk dilaksanakan tindak lanjutnya. Jika terdapat anggota Dewan Komisaris, yang memiliki benturan kepentingan, tidak diperbolehkan memberikan suara, dan keterangan mengenai hal ini dicatat pada risalah rapat.

In making decisions concerning the sustainability of the Company's business and operations, and incorporating the views between the Board of Commissioners and the Board of Directors, a regular meeting is required. This periodic meeting is implemented in order to discuss the various agenda pertaining to the work plan, operations, business opportunity, and strategic issues that are the focus of the Board of Directors in conducting business and operation of the Company but which requires the approval of the Board of Commissioners. Therefore, a joint Meeting forum of the Board of Commissioners and Directors is required.

The meeting also as a form of coordination in order to discuss the periodic reports of the Board of Directors and provide responses, notes, and advice set forth in the minutes of the meeting. The decision of the meeting was made based on deliberations for consensus or was taken based on the most votes and binding to follow. If there are members of the Board of Commissioners, who have a conflict of interest, it is not allowed to vote, and a description of this is recorded on the minutes of the meeting.

Independensi Direksi

Independence of the Board of Directors

Pernyataan Independensi <i>Independency Statement</i>	Wiwik Widayanti (Direktur Utama)	Wawan Ariyanto (Direktur)	M. Widodo (Komisaris)	Roppiq Lutzfi Azhar (Komisaris)
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada PT KCI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; <i>Not a person in the Public Accountant Office, legal consultant Office, Public Assessment Services office or other party that provides insurance services, non-insurance services, assessment services and/or other consulting services to PT KCI within the last 6 (six) months;</i>	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PT KCI; <i>Do not have direct or indirect shares in PT KCI;</i>	√	√	√	√
Keluarga tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PT KCI; <i>Relatives do not have direct or indirect shares in PT KCI;</i>	√	√	√	√

Pernyataan Independensi Independency Statement	Wiwik Widayanti (Direktur Utama)	Wawan Ariyanto (Direktur)	M. Widodo (Komisaris)	Roppiq Lutzfi Azhar (Komisaris)
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham PT KCI; <i>Do not have an affiliated relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Shareholders of PT KCI;</i>	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT KCI; <i>Do not have direct or indirect business relationship related to the business activities of PT KCI;</i>	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah; <i>Not serving as a manager of a political party and/or a candidate/member of the legislature and/or a candidate or serving as the head/deputy head of regional government;</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di PT KCI. <i>No other position can pose a conflict of interest related to the position in PT KCI.</i>	√	√	√	√

Kepemilikan Saham Direksi dan Keluarga

Board of Directors and Family Share Ownership

Nama Name	Kepemilikan Saham Share Ownership					
	Pribadi pada Perseroan Personal to the Company		Keluarga pada Perusahaan Relatives to the Company		Pribadi/Keluarga pada Perusahaan Lain Personal/Relatives to other Company	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Wiwik Widayanti	x	x	x	x	x	x
Wawan Ariyanto	x	x	x	x	x	x
M. Widodo	x	x	x	x	x	x
Roppiq Lutzfi Azhar	x	x	x	x	x	x



Program Orientasi Direksi

Board of Directors' Orientation Program

Anggota Direksi yang baru diangkat, wajib diberikan Program Pengenalan mengenai kondisi Perseroan agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Direksi, proses bisnis Perseroan, serta dapat bekerja selaras dengan organ Perseroan lainnya. Penyelenggaraan program pengenalan tersebut merupakan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Program Pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas, tanggung jawab dan kewenangan Direksi berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal di Perseroan.
5. Keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Pemahaman terkait dengan prinsip etika dan norma yang berlaku di lingkungan Perseroan serta masyarakat setempat.
7. *Team Building*. Dalam kegiatan ini menyertakan Direksi, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya.

Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor cabang (apabila ada), ke fasilitas Perseroan, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahun 2020 dilakukan program pengenalan Direksi kepada Pegawai PT KCI yang dilaksanakan pada 21 Juli 2020.

Penilaian atas Kinerja Komite di bawah Direksi

Perseroan tidak memiliki Komite yang berada di bawah Direksi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi didukung oleh Unit Kerja yang dipimpin oleh Vice President/Manager serta Organ Fungsional Lainnya.

Newly appointed members of the Board of Directors must be given an introductory Program on the condition of the Company in order to understand its duties and responsibilities, the Company's business processes and to work in accordance with other Company's organs. The implementation of the recognition program is the responsibility of the Corporate Secretary. The introduction Program for the Board of Director members who are newly appointed at least includes:

1. *Implementation of Good Corporate Governance principles in the Company.*
2. *Information on the duties, responsibilities and authority of the Board of Directors under the prevailing regulations.*
3. *The overview of the Company relates to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plan, competitive position, risk, internal control and other strategic problems.*
4. *Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies in the Company.*
5. *Information regarding the obligations, duties, responsibilities and rights of the Board of Directors and Board of Commissioners.*
6. *Understanding related to the principles of ethics and norms that apply in the environment of the Company and local communities.*
7. *Team Building. In this activity include the Board of Directors, both the new and the former.*

An introductory Program can be a presentation, a meeting, a visit to a branch office (if any), to the Company's facilities, a review of the Company's documents or any other program deemed appropriate.

In 2020, the introduction of the Board of Directors to KCI's employees on July 21, 2020.

Performance Assessment of Committees Under the Board of Directors

The Company does not have a Committee under the Board of Directors. The implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors is supported by a Work Unit led by Vice President/Manager and Other Functional Organs.

Kebijakan Assessment Dewan Komisaris

Board of Commissioners Assessment Policy

Dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 ayat 2 b. 13 di mana Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan Laporan tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang baru lampau kepada RUPS merupakan dasar penyusunan untuk melakukan Assessment dan Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris. Adapun target-target Key Performance Indicator (KPI) yang dilengkapi dengan parameter, formula, pembobotan serta target kuantitatifnya sebagai acuan dalam memenuhi pelaksanaan Asesmen dan Evaluasi tersebut. Terdapat 4 aspek dalam KPI Dewan Komisaris, di antaranya:

1. Aspek Perencanaan, parameternya di antaranya perencanaan RKAP dan penetapan target korporat oleh Komisaris.
2. Aspek pengawasan dan nasihat, diukur melalui kepatuhan terhadap jadwal, kehadiran dalam rapat rapat Komisaris di Perseroan, rapat bersama Direksi maupun RUPS serta tindak lanjut hasil rapat tersebut dan kesesuaian dengan output yang diharapkan. Kualitas tanggapan maupun rekomendasi Komisaris dalam bentuk RKAP, Laporan Tahunan maupun Analisis Kinerja Triwulan.
3. Aspek Pelaporan: Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
4. Aspek Dinamis: Pengusulan eksternal audit, tindak lanjut penyelesaian masalah Perseroan, pembagian tugas Dewan Komisaris dan lain-lain.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahunnya yang kemudian disampaikan dalam RUPS dan pihak yang melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara self assessment kolegal berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan.

Realisasi pencapaian indikator kinerja Dewan Komisaris tahun 2020, sebagai berikut:

In the Articles of Association of the Company article 15 paragraph 2 b. 13 in which the Board of Commissioners is obliged to provide a report on the supervision duties that have been conducted during the New Year of the book to the GMS is the basis for the Assessment and performance evaluation of the BOC. The target Key Performance Indicator (KPI) is equipped with parameters, formula, weighted and the quantitative target as reference in fulfilling the implementation of the assessment and evaluation. There are 4 aspects of the Board of Commissioners KPI, including:

1. *Planning aspects, the parameters include the planning of RKAP and the determination of the corporate target by the Commissioner.*
2. *Aspects of supervision and advice, measured through compliance with the schedule, attendance at the meeting of Commissioners in the Company, meeting with the Board of Directors and GMS and follow-up results of the meeting and conformity with the expected output. The quality of the response or recommendation of Commissioners in the form of RKAP, annual Report and quarterly performance analysis.*
3. *Reporting aspects: Supervisory Board of Commissioners report.*
4. *Dynamic aspects: The external proposed audit, followup to the Company's problem solving, the division of the Duties of the Board of Commissioners and others.*

Performance assessment of the Board of Commissioners is conducted annually which is then presented in the GMS and the party conducting the performance assessment of the Board of Commissioners is done by self assessment collegial based on the established performance indicators.

Realization of performance indicators of the Board of Commissioners in 2020, as follows:



No	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
1	Kontribusi terhadap capaian kinerja Perseroan <i>Contribution to Company performance</i>	-	10	-	-	-	10
	Penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris <i>Delivering opinions and suggestions which are the obligation of the Board of Commissioners</i>	Poin Points	10	1	1	100	10
2	Penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris <i>Delivering opinions and suggestions which are the obligation of the Board of Commissioners</i>		15				16,25
a	Pendapat dan saran Dewan Komisaris atas RKAP 2021, Laporan Tahunan 2020 <i>Opinions and suggestions from the Board of Commissioners regarding the 2021 RKAP, 2020 Annual Report</i>	Jumlah Total	5	3	3	100	5
b	Ketepatan waktu penyampaian pendapat dan saran Dewan Komisaris atas RKAP 2021 Laporan Tahunan 2020 <i>Timeliness of submitting opinions and suggestions from the Board of Commissioners on the 2021 RKAP, 2020 Annual Report</i>	Hari Days	5	7	7	100,00	5,00
c	Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris <i>Responses to the actions of the Board of Directors which must be approved by the Board of Commissioners</i>	Jumlah Total	5	1	4	125	6,25
d	Ketepatan waktu pemberian tanggapan atas tindak Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris <i>Timely responses to the actions of the Board of Directors which must be approved by the Board of Commissioners</i>	Hari Days	5	7	3,5	200,00	10,00
3	Kontribusi terhadap penerapan GCG <i>Contribution to the implementation of GCG</i>		20				20
a	Kontribusi kualitas penerapan <i>Contribution to the implementation quality</i>	Poin Points	10	1	1	100	10
b	Tindak lanjut rekomendasi hasil assessment GCG-Aspek Dewan Komisaris <i>Follow up on recommendations from the GCG assessment results-aspects of the Board of Commissioners</i>	%	10	100%	100%	100	10

No	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
4	Tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris <i>Attendance Level of members of the Board of Commissioners</i>						20,00
a	Jumlah rapat internal Dewan Komisaris <i>Total internal meetings of the Board of Commissioners</i>	Jumlah Total	5	12	12	100,00	5,00
b	Jumlah rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Perseroan <i>Total meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company</i>	Jumlah Total	5	12	12	100,00	5,00
c	Tingkat kehadiran rapat internal Dewan Komisaris <i>Attendance Level of Board of Commissioners' Internal meetings</i>	%	5	100%	100%	100	5
d	Tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris dan Direksi <i>Level of Attendance at the meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i>	%	5	100%	100%	100	5
5	Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan Perseroan <i>Supervision and direction of the Board of Directors on Company plans and policies</i>	Jumlah Total	10	1	8	125	12,5
6	Efektifitas kegiatan organ pendukung Dewan Komisaris <i>Effectiveness of the activities of the supporting organs of the Board of Commissioners</i>		25				31,25
1	Komite Audit <i>Audit Committee</i>		10				12,50
a.	Pelaksanaan rapat internal Komite Audit <i>Implementation of Internal Audit Committee meetings</i>	Jumlah Total	5	12	17	125.00	6,25
b.	Laporan penugasan Komite Audit <i>Report on the assignment of the Audit Committee Report</i>	Laporan Report	5	2	3	125	6,25
2	Sekretaris Dewan Komisaris <i>Secretary to the Board of Commissioners</i>		5				6,25
	Penyelesaian Notulen Rapat <i>Meeting Minutes Settlement</i>	Laporan Report	5	24	37	125	6,25
JUMLAH TOTAL			100				110,00



Hasil Assessment GCG Dewan Komisaris

Results of the Board of Commissioners' GCG Assessment

Penjelasan Kriteria Criteria Explanation	Jumlah Parameter Total Parameter	Bobot Indikator Weight Indicator	Capaian 2020 2020 Achievement	
			Skor Score	Capaian Achievement
Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. <i>The Board of Commissioners carries out a training/learning program on an ongoing basis.</i>	2	1,35	1,24	92
Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan. <i>The Board of Commissioners divides duties, authorities and responsibilities clearly and determines the factors needed to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners/Supervisory Board.</i>	4	2,13	2,05	97
Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi. <i>The Board of Commissioners approves the draft RJPP and RKAP submitted by the Board of Directors.</i>	2	2,9	2,34	81
Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. <i>The Board of Commissioners provides direction to the Board of Directors on the implementation of company plans and policies.</i>	9	9,59	8,91	93
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan. <i>The Board of Commissioners supervises the Board of Directors on the implementation of company plans and policies.</i>	6	6,48	5,48	85
Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan. <i>The Board of Commissioners supervises the implementation of the subsidiary/joint venture Company management policies.</i>	2	1,5	1,5	100
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi. <i>The Board of Commissioners/Supervisory Board plays role in nominating members of the Board of Directors, assessing the performance of the Board of Directors (individual and collegial) and proposing performance bonuses/incentives in accordance with applicable regulations and taking into account the performance of the Board of Directors.</i>	3	2,44	1,79	73
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya. <i>The Board of Commissioners/Board of Supervisors takes action against potential conflicts of interest that concern themselves.</i>	1	0,57	0,48	83

Penjelasan Kriteria Criteria Explanation	Jumlah Parameter Total Parameter	Bobot Indikator Weight Indicator	Capaian 2020 2020 Achievement	
			Skor Score	Capaian Achievement
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. <i>The Board of Commissioners/Supervisory Board monitors and ensures that Good Corporate Governance practices are implemented effectively and sustainably.</i>	2	1,66	1,5	90
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. <i>The Board of Commissioners/Supervisory Board holds effective Board of Commissioners/Supervisory Board meetings and attends Board of Commissioners/Supervisory Board meetings in accordance with statutory provisions.</i>	3	1,35	1,27	94
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. <i>The Board of Commissioners/Supervisory Board has a Secretary of the Board of Commissioners/Board of Supervisors to support the secretarial duties of the Board of Commissioners/Supervisory Board.</i>	4	2,59	2,35	91
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif. <i>The Board of Commissioners/Supervisory Board has an effective Board of Commissioners/Supervisory Committee.</i>	5	2,44	2,4	98
Jumlah penilaian aspek Dewan Komisaris. <i>Number of Board of Commissioners Aspect Assessments</i>	43	35	31,3	89

Assessment Direksi

Board of Directors Assessment

Dalam Kontrak Manajemen antara Pemegang Saham Perseroan dengan Dewan Komisaris dan Direksi terdapat poin-poin yang berkaitan dengan assessment kinerja Direksi. Untuk mendapatkan hasil yang objektif, digunakan capaian penilaian skor sebagai acuan dalam melaksanakan assessment. Berdasarkan perhitungan sesuai kamus kontrak tahun 2019, Kontrak Manajemen Tahun 2020 memiliki realisasi skor sebesar 97,78 dari program 100 Sedangkan Tingkat Kesehatan Perseroan berdasarkan perhitungan menurut Kep Meneg BUMN No: KEP-100/MBU/2002, memiliki realisasi skor sebesar 88,50 dari program 86,00 atau tingkat kesehatan Perseroan dengan predikat sehat "AA".

In the management contract between the Company's Shareholders and the Board of Commissioners and the Board of Directors there are points related to the assessment of the performance of the Board of Directors. To obtain an objective result, the assessment is used as a reference for conducting assessment. Based on the calculation of the dictionary contract year 2019, the management contract year 2020 has the realization of a score of 97.78 from the target of 100. While the Company's health level based on the calculation according to the Determination of SOE Minister No: KEP-100/MBU/2002 has the realization of a score of 88.50 from the target of 86.00 or health level of the Company with a healthy predicate "AA".



Proses Pelaksanaan Penilaian

Assessment Process

Perseroan telah menetapkan kriteria penilaian kinerja Direksi berdasarkan target kinerja yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen yang mencakup aspek keuangan dan pasar, produk dan proses, pelanggan, tenaga kerja dan kepemimpinan tata kelola dan tanggung jawab sosial. Semua hal ini tercantum pada kontrak manajemen antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku Induk Perusahaan dengan PT Kereta Commuter Indonesia pada tahun 2020.

The Company has set the criteria of the Directors' performance assessment based on the agreed performance target in the management contract which covers financial and market aspects, products and processes, customers, labour and governance leadership and social responsibility. All these things are listed in the management contract between PT Kereta Api Indonesia (Persero) as the holding Company with PT Kereta Commuter Indonesia in 2020.

Kriteria/Indikator Kinerja

Performance Criteria/Indicators

Kriteria penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Pencapaian KPI dalam kontrak manajemen 2020.
2. Pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan 2020.
3. Penilaian Kinerja Perusahaan 2020.

The criteria of the Board of Directors' performance assessment are conducted using the following criteria:

1. Achievement of KPIS in 2020 management contracts.
2. Achievement of Corporate Soundness in 2020.
3. Company Performance Assessment in 2020.

Pihak yang Melaksanakan Penilaian

Party Conducting The Assessment

Penilaian kinerja Direksi Perseroan dievaluasi secara kolegial oleh Pemegang Saham dalam RUPS Kinerja Tahunan yang mengacu pada kontrak manajemen tahun 2020.

The Company's Board of Directors' performance assessment was evaluated on a collegially by the Shareholders in the annual performance GMS in reference to the management contract in 2020.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2020

Result of The Board of Commissioners' Performance Assessment In 2020

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Perseroan dilakukan dengan parameter sebagai berikut:

- a. Kontribusi terhadap capaian kinerja Perusahaan.
- b. Penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris.
- c. Kontribusi terhadap penerapan GCG.
- d. Tingkat kehadiran Anggota Dewan Komisaris.
- e. Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan Perusahaan.
- f. Efektivitas kegiatan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Performance assessment of the Company's Board of Commissioners is done by the following parameters:

- a. Contributions to the achievement of Company performance.
- b. Submission of opinions and suggestions in the obligation of the Board of Commissioners.
- c. Contributions to the implementation of GCG.
- d. Level of attendance of Board of Commissioners.
- e. Supervision and direction of the Board of Directors on Company's plans and policies.
- f. Effectiveness of Supporting Organ activities of the Board of Commissioners.

Berdasarkan parameter penilaian yang dilakukan hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris memenuhi target yang telah ditetapkan.

The assessment parameters made by the Board of Commissioners' performance assessment has fulfilled the target.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2020

Result of The Board of Directors' Performance Assessment In 2020

No.	Aspek KPI KPI Aspect	Jumlah Indikator Total Indicator	Bobot Weight	Tahun/Year			%	
				2019	2020		7:6	7:5
				Realisasi Skor Score Realization	Target Skor Score Target	Realisasi Skor Score Realization		
A	Keuangan dan Pasar Finance and Market	4	20,00	20,00	20,00	19,21	96%	96%
B	Produk dan Proses Product and Process	3	18,00	18,00	18,00	17,63	98%	98%
C	Fokus Pelanggan Customer Focus	4	24,00	18,00	24,00	24,00	100%	133%
D	Fokus Tenaga Kerja Labor Focus	5	20,00	20,00	20,00	19,38	97%	97%
E	Kepemimpinan, Tata Kelola, dan tanggung jawab sosial Leadership, Governance and Responsibility	5	18,00	17,76	18,00	17,55	98%	99%
Jumlah Total		21	100,00	93,76	100,00	97,78	98%	104%

Indikator Pengukuran Kinerja Utama Untuk Mengukur Kinerja Direksi Tahun 2020 Berdasarkan RKAP 2020

Key Performance Measurement Indicators For Measuring Directors' Performance In 2020 Based On The Company's Work Plan & Budget 2020

Realisasi KPI Aspek Keuangan dan Pasar Tahun 2020

Realization of KPIs for Financial and Market Aspects in 2020

No	Aspek Key Performance Indicator Key Performance Indicator Aspect	Jumlah Indikator Total Indicators	Bobot Weight	Tahun/Year			%	
				2019	2020		7:6	7:5
				Realisasi Skor Score Realization	Target Skor Score Target	Realisasi Skor Score Realization		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Keuangan dan Pasar Finance and Market	4	20,00	20,00	20,00	19,21	96%	96%
B	Produk dan Proses Product and Process	3	18,00	18,00	18,00	17,63	98%	98%



No	Aspek Key Performance Indicator Key Performance Indicator Aspect	Jumlah Indikator Total Indicators	Bobot Weight	Tahun/Year			%	
				2019	2020		7:6	7:5
				Realisasi Skor Score Realization	Target Skor Score Target	Realisasi Skor Score Realization		
C	Fokus Pelanggan Customer Focus	4	24,00	24,00	24,00	24,00	100%	133%
D	Fokus Tenaga Kerja Manpower Focus	5	20,00	20,00	20,00	19,38	97%	97%
E	Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial Leadership, Governance, and Social Responsibility	5	18,00	17,76	18,00	17,55	98%	99%
Jumlah Total		21	100,00	93,76	100,00	97,78	98%	104%

Hasil Assessment Penerapan GCG Direksi Tahun 2020

Assessment Result of GCG Implementation of The Board of Directors In 2020

No.	Uraian Description	Capaian Tahun 2020 (%) Achievements in 2020 (%)
1	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan. Board of Directors carry out training/learning programs on an ongoing basis.	80,992
2	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas. Board of Directors divides duties/functions, powers and responsibilities clearly.	95,822
3	Direksi Menyusun perencanaan Perusahaan. Board of Directors compiles a Company plan.	84,990
4	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan. Board of Directors plays role in meeting the Company's performance targets	94,017
5	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan. Board of Directors exercises operational and financial controls on the implementation of Company plans and policies.	91,641
6	Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar. Board of Directors carries out the management of the Company in accordance with the applicable laws and regulations and the articles of association.	100,00

No.	Uraian Description	Capaian Tahun 2020 (%) Achievements in 2020 (%)
7	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan stakeholders. <i>Board of Directors engages in value-added relationships for the Company and stakeholders.</i>	95,769
8	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi. <i>Board of Directors monitors and manages potential conflicts of interest for members of the Board of Directors and management under the Board of Directors.</i>	89,256
9	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu. <i>Board of Directors ensures that the Company carries out disclosure of information and communication in accordance with applicable laws and regulations and submits information to the Board of Commissioners/Board of Supervisors and Shareholders on time.</i>	100,00
10	Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. <i>Board of Directors holds meetings of the Board of Directors and attends the Board of Commissioners/Supervisory Board Meetings in accordance with statutory provisions.</i>	94,987
11	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif. <i>Board of Directors is obliged to carry out quality and effective internal supervision.</i>	83,986
12	Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif. <i>Board of Directors performs quality and effective Corporate Secretary functions.</i>	81,590
13	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. <i>Board of Directors holds the Annual GMS and other GMS in accordance with laws and regulations.</i>	93,274



FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Frequency and Attendance Level of Board of Commissioners and
Board of Directors Meetings

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Meeting

Rapat Dewan Komisaris dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Selama tahun 2020, telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut:

The Board of Commissioners meeting shall be conducted as part of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners. During 2020, the Board of Commissioners meeting was held 8 times with the following details:

No.	Rapat Meetings	Tanggal Date	Perihal Subject
1	BOC	21/04/2020	- Perkenalan Anggota Komite Manajemen Risiko Baru (Bapak Sofyan Hasan) - Pembahasan Laporan Kinerja Manajemen Februari s.d Maret 2020 - <i>Introduction of the New Risk Management Committee Member (Mr. Sofyan Hasan)</i> - <i>Discussion on Management Performance Report February to March 2020</i>
2	BOC	05/05/202	- Perkenalan Anggota Komite Audit Baru (Bapak Bimo Poerwadi) - Pembahasan Stress Test Dampak COVID-19 terhadap Kinerja PT KCI - <i>Introduction of the New Audit Committee Member (Mr. Bimo Poerwadi)</i> - <i>Discussion on the Impact of COVID-19 Stress Test on PT KCI's Performance</i>
3	BOC	12/05/2020	- Pembahasan Draft Laporan Dekom ke Pemegang Saham atas Penurunan Kinerja PT KCI akibat Dampak COVID-19 - Finalisasi SK Direksi Penerapan ERM - Monitor Addendum Kontrak PSO sehubungan dengan PSBB melalui 3 Skenario - Pembahasan Matriks Penilaian Kinerja Dewan Komisaris - <i>Discussion of the Draft Board of Commissioners' Report to Shareholders on the Decline in PT KCI's Performance due to the Impact of COVID-19</i> - <i>Finalization of the Decree of the Board of Directors for the Implementation of ERM</i> - <i>Monitor PSO Contract Addendum in relation to PSBB through 3 Scenarios</i> - <i>Discussion of the Board of Commissioners Performance Assessment Matrix</i>
4	BOC	19/05/2020	- Pembahasan Rencana Perpisahan Komite Lama - Update Penyusunan Konsep Surat Dewan Komisaris ke Pemegang Saham mengenai Penurunan Kinerja Perusahaan - Usulan Perubahan Struktur Organisasi PT KCI atas Hasil Probis - <i>Discussion of the Former Committee's Farewell Plan</i> - <i>Update on the Drafting of the Board of Commissioners' Letter to Shareholders regarding the Decline in Company Performance</i> - <i>Proposed Changes in PT KCI's Organizational Structure on Probis Results</i>

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020

Frequency and Attendance Level of the Board Of Commissioners' Meeting in 2020

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Kehadiran Attendance	Tingkat (%) Kehadiran Attendance (%)
BOC	All BOC	4	100%
BOC	All BOC	4	100%
BOC	All BOC	4	100%
BOC	All BOC	4	100%

RAPAT DIREKSI

Board of Directors' Meeting

Rapat Direksi dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Selama tahun 2020, telah diselenggarakan Rapat Direksi sebanyak 33 kali dengan rincian sebagai berikut:

The Board of Directors meeting is conducted as part of the duties and responsibilities of the Board. During 2020, the Board of Directors meeting has been held as many as 33 times with the following details:

No.	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda	Keputusan Rapat Resolutions
1	13 Januari 2020 January 13, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia	a. Evaluasi Kinerja 2019 dan Persiapan RKAP 2020 b. Rencana Pengadaan Kereta Double Decker a. 2019 Performance Evaluation and 2020 RKAP Preparation a. Double Decker Train Procurement Plan
2	29 Januari 2020 January 29, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia	a. Laporan Kinerja s.d Desember 2019 b. Penempatan Dana Liabilitas Paska Kerja di PT Jiwasraya (Persero) c. Penyertaan Modal LinkAja d. Rencana Integrasi Moda Transportasi Jabodetabek e. Dan lain-lain a. Performance Report up to December 2019 b. Placement of Post-Employment Liability Funds at PT Jiwasraya (Persero) c. LinkAja Capital Participation d. Jabodetabek Transportation Mode Integration Plan e. And others
3	11 Februari 2020 February 11, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia	a. Rencana kecukupan kebutuhan sarana b. Pembahasan rencana penugasan pengelolaan LRT Jabodebek c. Pengelolaan KA Prameks dimulai terhitung 1 Maret 2020 d. Perbaikan wesel di stasiun Jakarta Kota e. Proses rekrutment pegawai dari internal menggunakan kebijakan baru f. Sosialisasi KPI VP g. Kajian remunerasi Direksi dan Komisaris menggunakan Konsultan h. Pembinaan pegawai khususnya masinis i. Dilakukan sidak tes penggunaan narkoba kepada driver operasional j. Kajian terkait rencana pembelian KRL Double Decker a. Plan for the adequacy of facilities needs b. Discussion on the assignment plan for the Jabodebek LRT management c. Prameks train management starts from March 1, 2020 d. Money order repair at Jakarta Kota station e. The internal employee recruitment process uses the new policy f. VP KPI socialization g. Review of remuneration for Directors and Commissioners using Consultants h. Employee development, especially Train Driver (Machinist) i. Inspection of drug use tests conducted on operational drivers j. A study related to the planned purchase of the Double Decker KRL



No.	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda	Keputusan Rapat Resolutions
4	18 Februari 2020 <i>February 18, 2020</i>	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Persiapan pengoperasian KA Lokal Prameks dan Merak b. Pengecekan lintas terkait ruang bebas double decker guna opsi lain pengoperasian double decker c. Risk issue mengenai kekurangan stabling KRI untuk pembahasan saat penataan Daop 1 d. Pembahasan underpass baru di Stasiun.PSM, DRN, dan DP agar penggunaannya lebih dioptimalkan <i>a. Preparation for the operation of the Prameks and Merak Local Trains</i> <i>b. Cross check of double decker free space for other options for double decker operation</i> <i>c. Risk issue regarding the lack of stable KRI for discussion during Daop 1 arrangement</i> <i>d. Discussion on new underpasses at Station.PSM, DRN, and DP to optimize their use</i>
5	3 Maret 2020 <i>March 3, 2020</i>	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Instruksi penyebaran infeksi novel Corona Virus b. Permintaan pemasangan <i>hand sanitizer</i> di stasiun dan di dalam kereta c. Penyampaian hasil excom d. Penambahan pemberlakuan 5 stasiun KMT diundur e. Menindaklanjuti kebijakan tentang penundaan import karena defisit perdagangan dampak pandemic Covid, terhadap ijin rencana pembelian KRL seri 205 dan E217 f. Penandatanganan MOU dengan Bathur Ridho g. Diusulkan addendum PSO Tahun 2020 h. Skema bisnis baru dari pihak ADMG tidak disetujui oleh Direksi PT KCI i. Tindak lanjut temuan BPK j. Mewaspadaai kerjasama kontrak pengadaan dengan PT Multi Graha Teknika <i>a. Instructions for the spread of the novel Corona Virus infection</i> <i>b. Requests for the installation of hand sanitizers at stations and on trains</i> <i>c. Submission of excom results</i> <i>d. The addition of 5 KMT stations has been postponed</i> <i>e. Following up on the policy on import delays due to the trade deficit as a result of the Covid pandemic, regarding permits for the planned purchase of KRL series 205 and E217</i> <i>f. MOU signing with Bathur Ridho</i> <i>g. 2020 PSO addendum proposed</i> <i>h. The new business scheme from ADMG was not approved by the Directors of PT KCI</i> <i>i. Follow up on BPK findings</i> <i>j. Be wary of procurement contract cooperation with PT Multi Graha Teknika</i>

No.	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda	Keputusan Rapat Resolutions
6	10 Maret 2020 March 10, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Penerapan Protokol kesehatan di Stasiun dan atas KRL b. Penyiapan pengadaan APD untuk petugas frontliner c. Evaluasi keuangan PT KCI untuk persiapan layanan pengguna di masa pandemi d. Penyiapan ruang isolasi gawat darurat di Stasiun <i>a. Implementation of health protocols at stations and on KRL</i> <i>b. Preparation of PPE procurement for frontliner officers</i> <i>c. PT KCI's financial evaluation for the preparation of user services during the pandemic</i> <i>d. Preparation of an emergency isolation room at the station</i>
7	16 Maret 2020 March 16, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Pengadaan yang tidak terprogram terkait penanganan pandemi COVID-19 b. Melakukan efisiensi biaya dengan penundaan pengadaan kursi stasiun, LAA, dan pengadaan/pekerjaan lain dari masing-masing unit yang memungkinkan dilakukan penundanaan pelaksanaannya c. Antisipasi <i>double</i> pengadaan barang yang sama d. Pembuatan SOP penanganan COVID-19 e. Diagendakan pertemuan dengan Konsultan (Pak Pungki) untuk membahas perkembangan pembuatan probis f. Pembuatan KPI Unit selesai dalam waktu 2 minggu ke depan g. Pengaturan Physical Distancing baik di stasiun maupun di dalam KRL h. Kemungkinan usulan dilakukan addendum kontrak PSO <i>a. Procurement that is not programmed related to the handling of the COVID-19 pandemic</i> <i>b. Carry out cost efficiency by delaying the procurement of station seats, LAA, and other procurement/work from each unit that allows for delays in implementation</i> <i>c. Anticipate double procurement of the same goods</i> <i>d. Making SOP for handling COVID-19</i> <i>e. A meeting with the Consultant (Pungki) is scheduled to discuss the development of the probis</i> <i>f. KPI Unit creation is completed within the next 2 weeks</i> <i>g. Physical Distancing arrangements both at stations and inside KRL</i> <i>h. Possibility of a proposed addendum to the PSO contract</i>



No.	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda	Keputusan Rapat Resolutions
8	23 Maret 2020 March 23, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia	a. Presentasi menggunakan zoom terkait stress test asumsi pencapaian kinerja tahun 2020, efisiensi biaya dan usulan addendum PSO b. Unit Operasional agar cek kesiapan awak KA dan rangkaian untuk rencana normalisasi perjalanan KRL c. Melakukan pengaturan dinas Pegawai untuk memaksimalkan WFH d. Penymapaian bukti setor penggantian penggunaan Corporate Card e. Agenda RUPS dilaksanakan hari Selasa 31 Maret 2020 f. Wawancara dengan PWC terkait Kajian MITJ g. Membahas tindaklanjut beberapa temuan Audit BPK h. Diputuskan besaran presentasi IKKK untuk PT KCI i. Perijinan untuk pembelian KRL seri E217 masih belum keluar j. Pengajuan pengadaan alat pengukur suhu tubuh dirinci menjadi Opec. dan pengadaannya menggunakan anggaran dana unit IT <i>a. Presentation using zoom related to stress test assumption of performance achievement in 2020, cost efficiency and proposed PSO addendum</i> <i>b. Operational Unit to check the readiness of the train crew and the circuit for the normalization plan for KRL trips</i> <i>c. Arrange employee service to maximize WFH</i> <i>d. Submission of proof of deposit for replacement of use of Corporate Card</i> <i>e. The GMS agenda is held on Tuesday 31 March 2020</i> <i>f. Interview with PWC regarding the MITJ Study</i> <i>g. Discussed the follow-up to several BPK Audit findings</i> <i>h. Decided on the amount of IKKK presentation for PT KCI</i> <i>i. The license for the purchase of the E217 series KRL has not yet been issued</i> <i>j. Submissions for the procurement of body temperature measuring devices are detailed into Opec. and procurement using the IT unit's budget</i>
9	7 April 2020 April 7, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia	a. Pemasangan marka <i>physical distancing</i> di area Stasiun dan diatas KRL b. Rencana pengadaan <i>Thermo Scanner</i> di 10 Stasiun c. Pemberian vitamin dan masker kepada pegawai d. Pembahasan Perubahan Struktur Organisasi Berdasarkan Penyusunan Probis <i>a. Installation of physical distancing markings in the station area and above the KRL</i> <i>b. Procurement plan of Thermo Scanner in 10 Stations</i> <i>c. Providing vitamins and masks to employees</i> <i>d. Discussion of Changes in Organizational Structure Based on the Preparation of Probis</i>

No.	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda	Keputusan Rapat Resolutions
10	28 April 2020 April 28, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Rapat BOD-BOC dilaksanakan Kamis 30 April 2020 dengan metode Vicon b. PYMT CS: Direktur Utama, Pelakhar CS: CI c. Sekretaris Satgas Tanggap Darurat COVID-19 diserahkan kepada CD d. Keberadaan peralatan pengukur suhu tubuh <i>Thermo Scanner</i> di stasiun agar dimanfaatkan dengan menempatkan Petugas Pemantau e. Petugas Front Liner harus konsisten menggunakan APD masker dan sarung tangan f. Proses Kontrak dengan ADMG masih menunggu putusan Direksi ADMG g. Rencana usulan perubahan SO h. Peralatan suhu tubuh <i>Thermo scanner</i> telah terpasang di 10 stasiun i. Telah dilakukan pelatihan oleh Unit IT dan Pelayanan kepada Petugas Front Liner terkait pemahaman penggunaan <i>Thermo Scanner</i> <i>a. The BOD-BOC meeting was held on Thursday 30 April 2020 with the Vicon method</i> <i>b. PYMT CS: President Director, Pelakhar CS: CI</i> <i>c. Secretary of the COVID-19 Emergency Response Task Force handed over to CD</i> <i>d. The presence of Thermo Scanner body temperature measuring equipment at the station to be utilized by placing a Monitoring Officer</i> <i>e. Front liner officers must consistently use PPE masks and gloves</i> <i>f. The Contract Process with ADMG is still waiting for the decision of the ADMG Board of Directors</i> <i>g. SO change proposal plan</i> <i>h. Thermo Scanner body temperature equipment has been installed in 10 stations</i> <i>i. Training has been carried out by the IT and Service Unit for Front Liner Officers regarding understanding the use of Thermo Scanner</i>
11	05 Mei 2020 May 05, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i> a. Keputusan Pemerintah untuk penghentian Operasional KRL b. Laporan Pegawai Sakit c. Tes Swab untuk pegawai d. Tindak lanjut Advisor Sdr. Gatut S e. Usulan pengaturan WFH bagi BOD a. <i>Government's decision to stop KRL Operations</i> b. <i>Sick Employee Report</i> c. <i>Swab test for employees</i> d. <i>Follow-up Advisor Mr. Gatut S</i> e. <i>Proposed WFH arrangement for BOD</i>	a. KCI tidak ada rencana untuk melakukan PHK b. Skenario optimis dan moderate tidak ada penurunan penghasilan pegawai c. Pertimbangan pembayaran Gaji dan Tunjangan setiap pegawai d. Perhitungan TP sesuai laba perusahaan per bulan akan disesuaikan dengan perhitungan PT KAI e. IKKK akan dibayarkan apabila perusahaan memperoleh keuntungan f. Penerimaan kas masuk dari PSO TW 1 2020 <i>a. KCI has no plans to lay off</i> <i>b. Optimistic and moderate scenario, there is no decrease in employee income</i> <i>c. Consideration of salary and allowances for each employee</i> <i>d. The calculation of TP according to the company's profit per month will be adjusted to the calculation of PT KAI</i> <i>e. IKKK will be paid if the company makes a profit</i> <i>f. Cash receipts from PSO Q1 2020</i>



No.	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda	Keputusan Rapat Resolutions
12	12 Mei 2020 May 12, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Perhitungan premi pegawai perawatan sarana mengacu pada rekomendasi BPK RI b. Pembayaran THR mengacu pada SK Direksi PT KAI c. Pembayaran TP mengacu pada keputusan hasil rapat BOD 5 Mei 2020 d. Pembayaran insentif pajak kepada pegawai akan dibayarkan sesuai dengan tanggal setor pajak Pph 21 ke Kas Negara e. Pembayaran IKKK dan TP untuk Bulan April dan Mei akan dibayarkan f. Insentif bagi pegawai yang beresiko COVID-19 akan diberikan g. Ruang untuk Komut akan disiapkan eks ruang rapat 1000 h. Keputusan lebih lanjut atas proses pengangkatan Sdr Gatut sebagai Advisor akan dibahas bersama dengan Komut i. BOD dipersilahkan WFH dengan waktu 2 hari jika merasa lelah j. Minimalisir gangguan sarana dan CVIM, Gate dan Perangkat E-Ticketing lainnya k. Penyusunan jadwal posko a. <i>The calculation of the premium for facility maintenance employees refers to the recommendations of the BPK RI</i> b. <i>THR payment refers to the Decree of the Board of Directors of PT KAI</i> c. <i>TP payment refers to the decision of the BOD meeting on May 5, 2020</i> d. <i>Payment of tax incentives to employees will be paid according to the date of deposit of Pph 21 tax to the State Treasury</i> e. <i>IKKK and TP payments for April and May will be paid</i> f. <i>Incentives for employees who are at risk of COVID-19 will be given</i> g. <i>Room for Commute will be prepared ex meeting room 1000</i> h. <i>Further decisions on the process of appointing Mr. Gatut as Advisor will be discussed together with Komut</i> i. <i>BOD is welcome to WFH with 2 days if you feel tired</i> j. <i>Minimize interference with facilities and CVIM, Gate and other E-Ticketing Devices</i> k. <i>Preparation of postal schedule</i>
13	19 Mei 2020 May 19, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Arahan Menteri Perhubungan untuk melakukan integrasi system ticketing b. Tindakan lanjut atas SE-336/MBU/05/2020 tentang Antisipasi Skenario The New Normal c. Makanan untuk petugas pada saat hari raya Idul Fitri d. Pengadaan kereta INKA dan Double Decker dan tindak lanjut surat JR East a. <i>Directions from the Minister of Transportation to integrate the ticketing system</i> b. <i>Follow-up actions on SE-336/MBU/05/2020 regarding Anticipation of The New Normal Scenario</i> c. <i>Food for officers during Eid al-Fitr</i> d. <i>Procurement of INKA and Double Decker trains and follow-up to JR East letter</i>

No.	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda	Keputusan Rapat Resolutions
14	27 Mei 2020 May 27, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Perbaikan bahan panduan untuk <i>new normal</i> b. Pembahasan tentang Taspen Life c. Rencana BISPRO THB Baru dan Pelaksanaan Stasiun KMT d. Laporan integrasi E-Ticketing e. Kebutuhan Proses Bisnis f. Pekerjaan E-Ticketing a. <i>Repair guide material for new normal</i> b. <i>Discussion about Taspen Life</i> c. <i>New THB BISPRO Plan and KMT Station Implementation</i> d. <i>E-Ticketing integration report</i> e. <i>Business Process Needs</i> f. <i>E-Ticketing Jobs</i>
15	09 Juni 2020 June 09, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Pembahasan pengadaan E217 b. Persiapan peresmian 4 Stasiun Integrasi THB, PSE, SUD dan JUA a. <i>E217 procurement discussion</i> b. <i>Preparations for the inauguration of 4 THB, PSE, SUD and JUA Integration Stations</i>
16	16 Juni 2020 June 16, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Laporan Kinerja sampai dengan Bulan Mei 2020 b. Persiapan KA Lokal oleh PT KCI a. <i>Performance Report up to May 2020</i> a. <i>Local Railway Preparation by PT KCI</i>
17	02 Juli 2020 July 02, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Pembahasan TL Hasil RDP Komisi VI dengan PT KAI terkait kelebihan pembayaran PSO tahun 2015 dan 2016 b. Pembahasan perbaikan kelengkapan sesuai dengan Hasil Rapat RUPS Tahunan c. Kesepakatan rekening <i>payroll</i> BOD dipindahkan semua ke Rekening Bank Mandiri d. Pembahasan kelanjutan adendum kontrak kerjasama pengelolaan iklan di KRL dengan PT ADMG e. Usulan kerjasama dengan PT KALOG dalam penyewaan <i>space</i> kereta untuk pengiriman dokumen a. <i>TL discussion on Commission VI RDP results with PT KAI regarding overpayment of PSO in 2015 and 2016</i> b. <i>Discussion on improvement of completeness in accordance with the results of the Annual GMS Rapat</i> c. <i>All BOD payroll account agreements are transferred to Mandiri Bank Account</i> d. <i>Discussion on the continuation of the addendum to the advertising management cooperation contract on KRL with PT ADMG</i> e. <i>Proposed cooperation with PT KALOG in leasing train space for document delivery</i>



No.	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda	Keputusan Rapat Resolutions
18	27 Juli 2020 July 27, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Kajian Bisnis Survey Training JREast b. ADMG c. Amandemen MPPL Roda d. Risalah RUPS a. <i>JREast Survey Training Business Studies</i> b. <i>ADMG</i> c. <i>MPPL Wheel Amendment</i> d. <i>GMS Minutes</i>
19	04 Agustus 2020 August 04, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Optimalisasi Struktur Organisasi Berdasarkan Proses Bisnis b. Pengadaan KRL dengan INKA c. Market review dan ADMG d. CO Branding Bank Mandiri a. <i>Optimization of Organizational Structure Based on Business Process</i> b. <i>Procurement of KRL with INKA</i> c. <i>Market review and ADMG</i> d. <i>CO Branding Bank Mandiri</i>
20	14 Agustus 2020 August 14, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Kebijakan Penutupan Pintu Selatan Stasiun THB agar dilakukan konsolidasi dengan pihak Jaklinko dan dishub DKI b. Stabling di Stasiun Rangkas Bitung, tindak lanjut evaluasi KRL dan arahan D5 c. Progress SO d. Evaluasi Amandemen dengan ADMG e. Justifikasi harga sewa iklan di Era <i>New Normal</i> agar dibuatkan SK nya f. Evaluasi Perka Jakk-Kampung Bandan g. <i>Maintenance/Perbaikan stasiun</i> h. Pembuatan SK terkait Sarana i. Pengaturan WFH, MCU dan Rapid Pegawai j. Renovasi Ruang Meeting Utama untuk penerimaan tamu a. <i>THB Station's South Gate Closing Policy is to be consolidated with the Jaklinko and DKI Transportation Agency</i> b. <i>Stabling at Rangkas Bitung Station, follow-up to KRL evaluation and D5 directives</i> c. <i>Progress SO</i> d. <i>Evaluation of Amendments with ADMG</i> e. <i>Justification for advertising rental prices in the new normal era so that a decree is made</i> f. <i>Evaluation of the Jakk-Kampung Bandan Perka</i> g. <i>Station maintenance/repair</i> h. <i>Making SK related to Facilities</i> i. <i>WFH, MCU and Employee Rapid Settings</i> j. <i>Main Meeting Room renovation for reception</i>

No.	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda	Keputusan Rapat Resolutions
21	18 Agustus 2020 August 18, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Pengadaan, Pengujian dan Pengaturan Gudang b. Dengan akan dioperasikan KA Lokal oleh KCI agar dilakukan review terhadap anggaran dasar KCI c. Stabling Rangkas agar dapat dioperasikan September 2020 d. Standarisasi Griya Karya agar mengikuti standardisasi KAI e. Progress KA Lokal terdiri dari Pelayanan dan Ticketing, Penyesuaian Peron dan SDM <i>a. Procurement, Testing and Warehouse Arrangement</i> <i>b. With the operation of the Local Railway by KCI, a review of KCI's articles of association will be carried out</i> <i>c. Stabling Rangkas to be operational September 2020</i> <i>d. Griya Karya standardization to follow KAI standardization</i> <i>e. Local Train Progress consists of Service and Ticketing, Platform Adjustment and HR</i>
22	25 Agustus 2020 August 25, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Evaluasi Kinerja 2020 dan persiapan RKAP 2021 b. Persiapan KA Lokal c. Persiapan RangkasBitung dan pembatalan Jakarta Kota-Kampung Bandan d. Kegiatan Assesment Masinis, Penyelia, Pengadaan HT di Operasional dan Kebutuhan Dana PAM (BKO Marinir dan Brimob) e. Pengadaan Penjagaan Pintu Perlindungan Bukit Duri f. Rapid Test Pegawai KCI <i>a. Performance Evaluation 2020 and preparation of RKAP 2021</i> <i>b. Local Train Preparation</i> <i>c. RangkasBitung preparation and cancellation of Jakarta City-Kampung Bandan</i> <i>d. Machinist Assessment Activities, Supervisors, HT Procurement in Operations and PAM Fund Needs (BKO Marines and Brimob)</i> <i>e. Procurement of Guarding the Bukit Duri Crossing Gate</i> <i>f. KCI Employee Rapid Test</i>
23	31 Agustus 2020 August 31, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Usulan Pelaksanaan Transaksi Pengalihan Bisnis Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta b. Permohonan tanggapan Dewan Komisaris atas Penugasan Pembelian unit bisnis KA Bandara Soekarno-Hatta c. Kesepakatan untuk melaksanakan penandatanganan CSPA <i>a. Proposed Implementation of Soekarno-Hatta Airport Railroad Business Transfer Transactions</i> <i>b. Request for response from the Board of Commissioners on the Assignment to Purchase the Soekarno-Hatta Airport Railway business unit</i> <i>c. Agreement to carry out the signing of the CSPA</i>



No.	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda	Keputusan Rapat Resolutions
24	8 September 2020 <i>September 8, 2020</i>	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Materi Excom b. Adendum PSO c. Persiapan Paparan BOD KAI d. Paparan ke BOC mengenai Kajian Link AJA e. Persiapan KA Lokal a. <i>Excom Material</i> b. <i>PSO Addendum</i> c. <i>KAI BOD Exposure Preparation</i> d. <i>Exposure to BOC regarding the AJA Link Study</i> e. <i>Local Train Preparation</i>
25	06 Oktober 2020 <i>October 06, 2020</i>	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Paparan pemenuhan terhadap RJPP 2020-2024 b. Persiapan Penggantian Logo Baru Bagian Umum a. <i>Exposure to the fulfillment of the 2020-2024 RJPP</i> b. <i>Preparation for New Logo Replacement General Part</i>
26	13 Oktober 2020 <i>October 13, 2020</i>	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Materi Excom b. Adendum PSO c. Bahan Paparan ke BOD KAI d. Paparan ke Dewan Komisaris mengenai LinkAja e. Persiapan Stasiun KA Lokal a. <i>Excom Material</i> b. <i>PSO Addendum</i> c. <i>Exposure Material to BOD KAI</i> d. <i>Exposure to Board of Commissioners about LinkAja</i> e. <i>Local Train Station Preparation</i>
27	19 Oktober 2020 <i>October 19, 2020</i>	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Persiapan Uji Coba dan Launching KRL Jogja b. Pengiriman JR 205 ke Daop 6 c. Posko pegawai sarana untuk persiapan pengiriman KRL Jepang ke Daop 6 d. Persiapan E-Gate yang akan dipasang di Jogja, Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Klaten e. Persiapkan Banjrik, Cuci Kereta dan Petugas Frontliner yang ditugaskan di wilayah DAOP 6 a. <i>Preparation for Trial and Launching of KRL Jogja</i> b. <i>Delivery JR 205 to Daop 6</i> c. <i>Employee post Means for preparation for sending Japanese KRL to Daop 6</i> d. <i>Preparation of E-Gate to be installed in Jogja, Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Klaten</i> e. <i>Prepare Banjrik, Train Wash and Frontliner Officers assigned to DAOP 6 area</i>
28	12 November 2020 <i>November 12, 2020</i>	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Kelanjutan Asuransi Kesehatan Pegawai 2021 b. Investigasi PLH Pengiriman KRL JR205 Jembatan Kalioso a. <i>2021 Employee Health Insurance Continuation</i> b. <i>PLH Investigation of Delivery of KRL JR205 Kalioso Bridge</i>

No.	Tanggal Pelaksanaan Date	Agenda	Keputusan Rapat Resolutions
29	17 November 2020 November 17, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Pelantikan pejabat di lingkungan Kantor Pusat KAI (Penunjukan PYMT dan Pelakhar di KCI) b. Surat Permohonan Penyegaran Pegawai di KCI c. Persiapan bahan mengenai Renstra Bisnis KCI d. Himbauan Logo Baru pada Seragam efektif tanggal 1 Januari 2021 <i>a. Inauguration of officials within the KAI Headquarters (PYMT and Pelakhar Appointment at KCI)</i> <i>b. Letter of Application for Employee Refresher at KCI</i> <i>c. Preparation of materials regarding the KCI Business Strategic Plan</i> <i>d. Call for New Logo on Uniforms effective January 1, 2021</i>
30	24 November 2020 November 24, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Team Legal ADMG dan KCI akan cek kembali perjanjian dan memastikan semua sesuai dengan aturan dan mengutamakan GCG b. Kontrak Pengiriman KRL 205 dengan DAOP 1 c. Progres Jaklinko <i>a. ADMG and KCI Legal Team will recheck the agreement and make sure everything is in accordance with the rules and prioritizing GCG</i> <i>b. Contract Delivery of KRL 205 with DAOP 1</i> <i>c. Jaklinko's Progress</i>
31	27 November 2020 November 27, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Rencana Posko Nataru b. Paparan Rencana Pengadaan KRL <i>a. Nataru Command Post Plan</i> <i>b. Presentation of the KRL Procurement Plan</i>
32	02 Desember 2020 December 02, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Pembahasan Progres Implementasi Sistem Organisasi Baru b. Pembahasan Tunjangan Cuti c. Pembahasan Calon Advisor Agunan Paulus Samosir d. Kontrak Pengiriman KRL dan Uji Coba KRL Jogja-Solo <i>a. Discussion on the Progress of Implementation of the New Organizational System</i> <i>b. Discussion on Leave Allowance</i> <i>c. Discussion of Candidates for Collateral Advisor Paul Samosir</i> <i>d. KRL Delivery Contract and Jogja-Solo KRL Trial</i>
33	17 Desember 2020 December 17, 2020	Rapat BOD PT Kereta Commuter Indonesia <i>BOD's Meeting of PT Kereta Commuter Indonesia</i>	a. Temuan SPI JAGRO dan JR b. Kontrak Building Management c. ADMG d. Pembayaran Kontrak NOC 2019 e. Railink f. Rapid rutin Awak Sarana g. Beban PSL (Aktuarial) <i>a. SPI JAGRO and JR findings</i> <i>b. Building Management Contract</i> <i>c. ADMG</i> <i>d. 2019 NOC Contract Payment</i> <i>e. Railink</i> <i>f. Rapid Routine Crew of Facilities</i> <i>g. PSL (Actuarial) Expenses</i>



Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi Tahun 2020

Frequency and Attendance Level of the Board of Directors Meeting in 2020

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Kehadiran Attendance	Tingkat (%) Kehadiran Attendance (%)
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%
BOD & VP Corsec	All BOD & corsec	5	100%

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Joint Meeting of The Board of Commissioners and Directors

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020

Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Di tahun 2020, telah dilaksanakan 11 (sebelas) kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dengan rincian sebagai berikut:

Frequency and Attendance Level of Joint Meetings of Board of Directors and Board of Commissioners in 2020

The implementation of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors were conducted by the Board of Commissioners in order to carry out supervision and advising of the Board of Directors. In 2020, the combined meeting of the Board of Commissioners and Directors were conducted 11 (eleven) times, with the following details:

Tabel Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Table of Agenda for Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors

No.	Rapat Meeting	Tanggal Date	Perihal Agenda
1	BOC BOD	23/01/2020	- Laporan Kinerja s.d Desember 2019 - Penempatan Dana Liabilitas Paska Kerja di PT Jiwasraya (Persero) - Penyertaan Modal LinkAja - Rencana Integrasi Moda Transportasi Jabodetabek - <i>Performance Report up to December 2019</i> - <i>Placement of Post-Employment Liability Funds at PT Jiwasraya (Persero)</i> - <i>LinkAja Equity Participation</i> - <i>Jabodetabek Transportation Mode Integration Plan</i>
2	BOC BOD	25/02/2020	- Progres Audit KAP oleh RSM - Laporan Kinerja s.d Januari 2020 - Tindak Lanjut BOD BOC 23 Januari 2020 - <i>Public Accountant Audit Progress by RSM</i> - <i>Performance Report up to January 2020</i> - <i>Follow-up BOD BOC January 23, 2020</i>
3	BOC BOD	30/04/2020	- Perkenalan Anggota Komite Manajemen Risiko Baru - Progres Tindak Lanjut Rapat BOD BOC tanggal 25 Februari 2020 - Laporan Kinerja s.d Bulan Maret 2020 - Penanganan dan Dampak Virus COVID-19 - <i>Introduction of New Risk Management Committee Members</i> - <i>Follow-up Progress to the BOD BOC Meeting on February 25, 2020</i> - <i>Performance Report up to March 2020</i> - <i>Handling and Impact of the COVID-19 Virus</i>
4	BOC BOD	28/05/2020	- Progres Tindak Lanjut Rapat BOD BOC tanggal 30 April 2020 - Laporan Kinerja s.d Bulan April 2020 - Perubahan SO PT KCI - Progres Perizinan KA Lokal - <i>Progress of the Follow-up to the BOD BOC Meeting on April 30, 2020</i> - <i>Performance Report up to April 2020</i> - <i>Changes to PT KCI's SO</i> - <i>Local Train Licensing Progress</i>
5	BOC BOD	26/06/2020	- Laporan Kinerja s.d Bulan Mei 2020 - RJPP 2020-2024 PT KCI Hasil Kajian Final Konsultan PWC - <i>Performance Report up to May 2020</i> - <i>RJPP 2020-2024 PT KCI Final Study Results of PWC Consultants</i>
6	BOC BOD	28/07/2020	- Laporan Kinerja s.d Juni - Pembahasan Revisi RKAP 2020 - Dan lain-lain - <i>Performance Report up to June</i> - <i>Discussion on Revised RKAP 2020</i> - <i>And others</i>



No.	Rapat Meeting	Tanggal Date	Perihal Agenda
7	BOC BOD	06/08/2020	- Evaluasi Kinerja Semester I 2020 - Revisi RKAP 2020 - Perkenalan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru Evaluasi Kinerja Semester I 2020 - <i>Performance Evaluation of Quarter I 2020</i> - <i>Revised RKAP 2020</i> - <i>Introduction of new members of the Board of Commissioners and Board of Directors</i>
8	BOC BOD	28/09/2020	- Laporan Kinerja s.d Bulan Agustus 2020 - Pembelian Unit Bisnis KA Bandara Soetta - <i>Performance Report up to August 2020</i> - <i>Purchase of Soetta Airport Train Business Unit</i>
9	BOC BOD	21/10/2020	- Persiapan Pengoperasian KR Jogja-Klaten - Laporan Kinerja s.d Bulan September 2020 - Upaya Direksi dalam Efisiensi biaya - <i>Preparation for the Operation of Jogja-Klaten Train</i> - <i>Performance Report up to September 2020</i> - <i>Board of Directors' Efforts in Cost Efficiency</i>
10	BOC BOD	04/12/2020	- Laporan Kinerja Perusahaan s.d Oktober 2020 - Pembahasan RKAP 2021 - Persiapan Pengoperasian KRL Jogja-Solo - <i>Company Performance Report up to October 2020</i> - <i>Discussion on RKA 2021</i> - <i>Preparation for the Operation of Jogja-Solo Train</i>
11	BOC BOD	30/12/2020	- Laporan Kinerja Perusahaan s.d November dan Prognosa Desember 2020 - Pembahasan RKAP 2021 (versi efisiensi) - Master Plan IT - <i>Company Performance Report up to November and December 2020</i> - <i>Prognosis</i> - <i>Discussion on RKAP 2021 (efficiency version)</i> - <i>IT Master Plan</i>

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Frequency and Attendance Level of the Board of Commissioners and the Board of Directors' Meeting in 2020

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Kehadiran Attendance	Tingkat (%) Kehadiran Attendance (%)
BOC BOD	All BOC & BOD	8	100%
BOC BOD	All BOC & BOD	8	100%
BOC BOD	All BOC & BOD	8	100%
BOC BOD	All BOC & BOD	8	100%
BOC BOD	All BOC & BOD	8	100%
BOC BOD	All BOC & BOD	8	100%
BOC BOD	All BOC & BOD	8	100%
BOC BOD	All BOC & BOD	8	100%
BOC BOD	All BOC & BOD	8	100%
BOC BOD	All BOC & BOD	8	100%
BOC BOD	All BOC & BOD	8	100%

RAPAT KOMITE

Committee Meetings

No.	Rapat Meeting	Tanggal Date	Perihal Agenda
1	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	02/01/2020	- Pembahasan Asesmen Risiko KA Lokal - Finalisasi SK Direksi implementasi ERM - Discussion on Local Railway Risk Assessment - Finalization of Decree of the Board of Directors for ERM implementation
2	Komite Audit dan Resiko Audit and Risk Committee	02/01/2020	- KPI Individu Direksi dan Dewan Komisaris - Struktur Organisasi Baru PT KCI - Remunerasi - Individual KPIs for the Board of Directors and the Board of Commissioners - PT KCI's New Organizational Structure - Remuneration
3	Komite Audit dan Resiko Audit and Risk Committee	07/01/2020	- Progres penyusunan RJPP 2020-2024 PT KCI - Progress of preparation of RJPP 2020-2024 PT KCI
4	Komite Audit Audit Committee	07/01/2020	- Progres Self Assessment GCG Tahun 2019-aspek Dewan Komisaris - GCG Self-Assessment Progress for 2019-Aspects of the Board of Commissioners
5	Komite Audit Audit Committee	14/01/2020	- Progres Audit KAP 2019 - Perumusan Visi Misi RJPP 2020-2024 PT KCI - 2019 KAP Audit Progress - Formulation of PT KCI's 2020-2024 RJPP Vision and Mission



No.	Rapat Meeting	Tanggal Date	Perihal Agenda
6	Komite Manajemen Risiko <i>Risk Management Committee</i>	11/02/2020	- Laporan Kinerja s.d Januari 2020 - Peluang Usaha Investasi LinkAja - Rekap Target Pendapatan Non Core 2020 - <i>Performance Report up to January 2020</i> - <i>LinkAja Investment Business Opportunity</i> - <i>Recap of Non-Core Revenue Target 2020</i>
7	Komite Audit <i>Audit Committee</i>	18/02/2020	- Progres Audit 2019 - Pengelolaan Dana Pesangon PT KCI pada Jiwasraya - <i>2019 Audit Progress</i> - <i>Management of PT KCI Severance Fund at Jiwasraya</i>
8	Komite Audit <i>Komite Audit</i>	24/02/2020	Progres Audit 2019 KAP oleh RSM <i>KAP 2019 Audit Progress by RSM</i>
9	Komite Manajemen Risiko & Komite Audit <i>Risk Management Committee and Audit Committee</i>	03/03/2020	Pembahasan Konsultan Remunerasi <i>Remuneration Consultant Discussion</i>
10	Komite Audit dan Resiko <i>Audit and Risk Committee</i>	03/03/2020	- Finalisasi SK Direksi ERM - Finalisasi SK Direksi Pengendalian Internal - <i>Finalization of Decree of the Board of Directors of ERM</i> - <i>Finalization of Decree of the Board of Directors of Internal Control</i>
11	Komite Manajemen Risiko <i>Risk Management Committee</i>	10/03/2020	- Kebijakan & Master Plan IT serta Program Kerja Unit IT Tahun 2020 - Progres PT MITJ - Draft Risk Register Pendampingan Implementasi ERM - <i>IT Policy & Master Plan and IT Unit Work Program 2020</i> - <i>Progress of PT MITJ</i> - <i>Draft Risk Register for ERM Implementation Assistance</i>
12	Komite Manajemen Risiko <i>Risk Management Committee</i>	03/06/2020	- Update Stress Test COVID-19 - Persiapan New Normal - Feasibility Study KRL Premium - <i>Update Stress Test COVID-19</i> - <i>New Normal Preparation</i> - <i>Premium KRL Feasibility Study</i>
13	Komite Audit <i>Audit Committee</i>	09/06/2020	Pembahasan KPI Direksi atas Hasil Penyusunan dari Bapak Supiansyah, S.T., M.M., CIPM <i>Discussion of the Board of Directors' KPI on the results of the preparation of Mr. Supiansyah, S.T., M.M., CIPM</i>
14	Komite Audit <i>Audit Committee</i>	16/06/2020	- Evaluasi Pelaksanaan Operasi KRL selama Masa PSBB Transisi dan Rencana Operasi KRL Berikutnya - Status Tindak Lanjut Temuan Auditor (Internal & Eksternal) - <i>Evaluation of KRL Operation Implementation during the Transitional PSBB Period and Next KRL Operation Plan</i> - <i>Status of Follow-up on Auditor Findings (Internal & External)</i>

No.	Rapat Meeting	Tanggal Date	Perihal Agenda
15	Komite Audit <i>Audit Committee</i>	07/07/2020	- Hasil Kajian Final Proses Bisnis PT KCI oleh Konsultan - Laporan Triwulanan SPI s.d Juni 2020 - <i>Results of the Final Study of PT KCI's Business Process by the Consultant</i> - <i>SPI Quarterly Report up to June 2020</i>
16	Komite Manajemen Risiko <i>Risk Management Committee</i>	14/07/2020	Laporan Kinerja Manajemen Risiko s.d TW II <i>Risk Management Performance Report up to TW II</i>
17	Komite Audit dan Resiko <i>Audit and Risk Committee</i>	21/07/2020	Pemaparan Usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi oleh Konsultan Pungki Purnadi & Associates <i>Presentation of the Proposed Remuneration of the Board of Commissioners and Directors by Consultant Pungki Purnadi & Associates</i>
18	Komite Audit <i>Audit Committee</i>	04/08/2020	Format monitoring kinerja keuangan bulan Juni 2020 <i>Monthly financial performance monitoring format June 2020</i>
19	Komite Audit <i>Audit Committee</i>	19/08/2020	- Progres Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Eksternal & Internal Bulan Juli 2020 - Progres SK Direksi tentang Sistem Pengendalian Internal - Rencana Penerapan Audit Berbasis Risiko (Risk-Based Audit) - <i>Follow-up Status on the Recommendation of External & Internal Audit Results for July 2020</i> - <i>Progress of the Decree of the Board of Directors regarding the Internal Control System</i> - <i>Risk-Based Audit Implementation Plan</i>
20	Komite Audit <i>Audit Committee</i>	27/08/2020	- Perubahan Struktur Organisasi PT KCI dan Penetapan Sekretaris Perusahaan KCI - Top Ten Risk Tahun 2019-2020 - Progres SK Direksi tentang Pedoman ERM dan Roadmap ERM - <i>Changes in PT KCI's Organizational Structure and Appointment of KCI's Corporate Secretary</i> - <i>Top Ten Risks for 2019-2020</i> - <i>Progress of the Board of Directors' Decree on ERM Guidelines and ERM Roadmap</i>
21	Komite Audit <i>Audit Committee</i>	03/09/2020	- Pembelian Unit Bisnis KA Bandara Soetta - Penyertaan Modal PT KCI ke PT Finarya - <i>Purchase of Soetta Airport Train Business Unit</i> - <i>PT KCI's Equity Participation in PT Finarya</i>
22	Komite Manajemen Risiko <i>Risk Management Committee</i>	09/09/2020	Tindak Lanjut Rapat BOD BOC tanggal 27 Agustus 2020 terkait Top Ten Risk KCI <i>Follow-up to the BOD BOC Meeting on 27 August 2020 related to KCI's Top Ten Risks</i>
23	Komite Manajemen Risiko <i>Risk Management Committee</i>	16/09/2020	Top Risk PT KCI <i>PT KCI's Top Risk</i>



No.	Rapat Meeting	Tanggal Date	Perihal Agenda
24	Komite Manajemen Risiko <i>Risk Management Committee</i>	07/10/2020	Monitoring Top Ten Risk PT KCI <i>Top Ten Risk Monitoring</i>
25	Komite Audit <i>Audit Committee</i>	14/10/2020	- Risk Based Audit - Penambahan Investasi Hall Kereta Commuter Stasiun Yogyakarta - <i>Risk Based Audit</i> - <i>Additional Investment for Yogyakarta Station Commuter Train Hall</i>
26	Komite Audit dan Resiko <i>Audit and Risk Committee</i>	28/10/2020	Tindak lanjut Hasil Self Assessment GCG Tahun 2019-Aspek Dewan Komisaris <i>Follow-up on GCG Self-Assessment Results for 2019-BoC Aspects</i>
27	Komite Audit dan Resiko <i>Audit and Risk Committee</i>	11/11/2020	Pembahasan Kebijakan Teknologi Informasi (TI) dan Kinerja TI s.d Triwulan III <i>Discussion of Information Technology (IT) Policy and IT Performance up to Quarter III</i>
28	Komite Audit <i>Audit Committee</i>	18/11/2020	Pelaksanaan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa s.d Triwulan III 2020 <i>Implementation of Guidelines for Procurement of Goods and Services up to Quarter III 2020</i>
29	Komite Audit dan Resiko <i>Audit and Risk Committee</i>	10/12/2020	Pembahasan Teknis RKAP 2021 <i>RKAP 2021 Technical Discussion</i>

HUBUNGAN AFILIASI, RANGKAP JABATAN, DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Affiliation, Concurrent Position, Shareholding Relationship

Hubungan Keuangan dan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Hubungan afiliasi dalam Perseroan telah diatur dalam Kode Etik dengan tujuan menghindari konflik kepentingan antar sesama Insan PT Kereta Commuter Indonesia sebagai pribadi dan untuk kepentingan Perseroan. Insan Perseroan tidak diperbolehkan:

- Memiliki hubungan pekerjaan maupun pribadi termasuk istri/suami, anak, orang tua, sedarah dan/atau semenda sampai derajat/tingkat kedua, yang secara aktif menjadikannya pengambil keputusan di rekanan, perusahaan rekanan atau calon rekanan, perusahaan sejenis maupun pesaing.
- Memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk istri/suami, anak, orang tua, sedarah dan/atau semenda sampai derajat/tingkat kedua.

Tabel di bawah ini menunjukkan hubungan afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi:

Financial and Family Relationship of Members of The Board of Commissioners and Board of Directors

Affiliate relationships within the Company have been regulated in the Code of Conducts with the aim of avoiding conflicts of interest among PT Kereta Commuter Indonesia's personnel as individuals and for the benefit of the Company. KCI's employees are not allowed to:

- Have a work or personal relationship including wife/husband, children, parents, blood relation and/or a marriage up to the second degree/level, which actively makes them decision makers in partners, partner companies or potential partners, similar companies or competitors.
- Owning shares/ownership in a business entity that is a partner or competitor that can influence decision making, including wife/husband, children, parents, blood and/or a fine up to the second degree/level.

The table below shows the affiliation relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors:

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Table of Affiliation Relationship of the Board of Commissioners

Nama Name	Hubungan Keuangan dan/atau Kepengurusan dengan Financial and/or Management Relationship with			Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with			Hubungan Kepemilikan Saham Share Ownership Relationship with		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama dan Pengendali Main and Controlling Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama dan Pengendali Main and Controlling Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama dan Pengendali Main and Controlling Shareholders
Maqin U. Norhadi (Komisaris Utama/President Commissioner)	-	-	√	-	-	-	-	-	-
Edy Widyaya (Komisaris/ Commissioner)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
John Robertho (Komisaris/ Commissioner)	-	-	√	-	-	-	-	-	-
Danto Restyawan (Komisaris/ Commissioner)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RANGKAP JABATAN

Concurrent Position

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Rangkap jabatan Dewan Komisaris diatur berdasarkan Pasal 14 ayat 29 Anggaran Dasar Perseroan. Anggota Dewan Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

- Pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
- Jabatan lain yang menimbulkan benturan kepentingan.

Berikut tabel mengenai rangkap jabatan yang dimiliki Dewan Komisaris:

Concurrent Position of the Board of Commissioners

Concurrent position of the Board of Commissioners is regulated based on Article 14 paragraph 29 of the Articles of Association. Members of the Board of Commissioners are prohibited to serve concurrent position as:

- Political party management and/or legislative members and/or regional head/deputy regional head candidates;
- Other positions that give rise to a conflict of interest.

The following is a table regarding concurrent position held by the Board of Commissioners:



Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Table of Board of Commissioners' Concurrent Position

Nama Name	Rangkap Jabatan Concurrent Position	
	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Position at other Companies/Agencies	Nama Perusahaan/Instansi Lain Name of other Companies/Agencies
Maqin U. Norhadi	Direktur Niaga Commercial Director	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Edy Widyaya	Kepala Sub Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Head of Sub-Sector of Energy, Logistics, Regions and Tourism	Kementerian BUMN The Ministry of SOE
John Robertho	Direktur Keselamatan dan Keamanan Director of Safety and Security	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Danto Restyawan	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Director of Railway Traffic and Transport	Kementerian Perhubungan The Ministry of Transportation

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Table of Affiliation Relationship of the Board of Directors

Nama Name	Hubungan Keuangan dan/atau Kepengurusan dengan Financial and/or Management Relationship with			Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with			Hubungan Kepemilikan Saham Share Ownership Relationship with		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama dan Pengendali Main and Controlling Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama dan Pengendali Main and Controlling Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama dan Pengendali Main and Controlling Shareholders
Wiwik Widayanti (Direktur Utama/ President Director)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wawan Ariyanto (Direktur/ Director)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M. Widodo (Direktur/ Director)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roppiq Lutzfi Azhar (Direktur/ Director)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rangkap Jabatan Direksi

Untuk menghindari kemungkinan terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai berikut:

- Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
- Anggota Dewan Komisaris pada BUMN lain;
- Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
- Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/ atau kepala daerah/wakil kepala daerah; atau
- Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Perangkitan jabatan selain yang telah disebutkan di atas tetap memerlukan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris. Anggota Direksi Perseroan juga dilarang memegang jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 1 Badan Usaha Swasta (Pasal 36 Permen BUMN No. 1/2012).

Concurrent Position of the Board of Directors

To avoid the possibility of conflict of interest, members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent position as follows:

- Members of the Board of Directors of SOE, Regional Owned Enterprises, Private Owned Enterprises;
- Members of the Board of Commissioners at other SOEs;
- Other structural and functional positions at central and or regional government agencies/institutions;
- Management of political parties and/or candidates/ members of the legislature and/or candidates for regional head/deputy regional head and/or regional head/deputy regional head; or
- Other positions that may create conflict of interest.

Concurrent position other than those mentioned above still require approval from the Board of Commissioners meeting. Members of the Board of Directors of the Company are also prohibited from holding concurrent position as Members of the Board of Commissioners in more than 1 Private Business Entity (Article 36 of SOE Regulation No.1/2012).

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Table of Board of Directors' Concurrent Position

Nama Name	Rangkap Jabatan Concurrent Position	
	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Position at other Companies/Agencies	Nama Perusahaan/Instansi Lain Name of other Companies/Agencies
Wiwik Widayanti	-	-
Wawan Ariyanto	-	-
M. Widodo	-	-
Roppiq Lutzfi Azhar	-	-

Kepemilikan Saham

Adapun penjabaran mengenai kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi pada Perseroan yang disajikan dalam tabel-tabel di bawah ini:

Share Ownership

Share ownership description of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the Company is presented in the tables below:



Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Table of Shareholding of the Board of Commissioners

Nama Name	Kepemilikan Saham di KCI Share Ownership in KCI	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain Share Ownership in Other Companies
Maqin U. Norhadi	-	-
Edy Widayaya	-	-
John Robertho	-	-
Danto Restyawan	-	-

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

Table of Shareholding of the Board Of Directors

Nama Name	Kepemilikan Saham di KCI Share Ownership in KCI	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain Share Ownership in Other Companies
Wiwik Widayanti	-	-
Wawan Ariyanto	-	-
M. Widodo	-	-
Roppiq Lutzfi Azhar	-	-

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Directors

Dunia bisnis yang dinamis dan pergerakan industri 4.0 membuat Perseroan mempunyai tantangan untuk bisa tetap menjadi pemimpin pasar khususnya Perseroan yang menjadi penyedia jasa transportasi. Hal ini perlu disikapi dan diperhatikan bagi Insan KCI. Oleh karena itu Perseroan perlu mempunyai adanya keberagaman latar belakang disiplin ilmu dan pengalaman dalam rangka menghasilkan keputusan-keputusan strategis dan tepat dalam menghadapi persaingan bisnis. Perseroan berupaya untuk menjaga bauran keahlian dan Dewan Komisaris, Perangkat Dewan Komisaris dan Direksi yang mencakup berbagai bidang di antaranya Manajemen, Keuangan, Hukum, Sumber Daya Manusia, Sosial Politik, Teknik dan Perkeretaapian.

Adanya berbagai latar belakang membuat Perseroan berkomitmen untuk selalu meningkatkan kompetensi yang ada dan relevan bagi Dewan Komisaris, Perangkat Dewan Komisaris dan Direksi.

Dynamic business world and the movement of industry 4.0 make companies have a challenge to be able to remain as market leaders, especially companies that provide transportation services. This needs to be addressed and paid attention to by KCI Individuals. Therefore, the Company needs to have a diverse background of disciplines and experiences in order to produce strategic and appropriate decisions in the face of business competition. The Company strives to maintain a mix of expertise and the Board of Commissioners, Board of Commissioners' Supporting Organs and Board of Directors which cover various fields including Management, Finance, Law, Human Resources, Social Politics, Engineering and Railways.

The existence of various backgrounds makes the Company committed to always improving existing and relevant competencies for the Board of Commissioners, Board of Commissioners and Board of Directors.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Diversity Policy of the Board of Commissioners and Directors

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Diversity

Nama Name	Jabatan Position	Usia per 31 Desember 2020 Ages per December 31, 2020	Tingkat Pendidikan Terakhir Last Educational Level			Keahlian Skills				
			S1	S2	S3	Manajemen Keuangan Management Finance	Hukum Legal	SDM HR	Sosial Politik Socio-Politic	Teknik Perkeretaapian Train Engineering
Maqin U. Norhadi	Komisaris Utama President Commissioner	50 tahun years old	√	√		√	-	-	-	-
Edy Widyaya	Komisaris Commissioner	49 tahun years old	√	√		√	√	-	-	-
John Robertho	Komisaris Commissioner	57 tahun years old	√	-	-	-	-	-	-	√
Danto Restyawan	Komisaris Commissioner	56 tahun years old	√	√	-	-	-	-	-	√

Keberagaman Komposisi Direksi

Board of Directors Diversity

Nama Name	Jabatan Position	Usia per 31 Desember 2020 Ages per December 31, 2020	Tingkat Pendidikan Terakhir Last Educational Level			Keahlian Skills				
			S1	S2	S3	Manajemen Keuangan Management Finance	Hukum Legal	SDM HR	Sosial Politik Socio-Politic	Teknik Perkeretaapian Train Engineering
Wiwik Widayanti	Direktur Utama President Director	57 tahun years old	√	√	-	√	-	-	-	√
Wawan Ariyanto	Direktur Director	51 tahun years old	√	-	-	√	√	√	-	-
M. Widodo	Direktur Director	47 tahun years old	√	-	-	√	-	-	-	-
Roppiq Lutzfi Azhar	Direktur Director	45 tahun years old	√	-	-	-	-	-	-	√



KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Committees Under the Board of Commissioners

KOMITE AUDIT

Audit Committee

Komite Audit dibentuk berdasarkan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 003/KOM/KCI/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Struktur Komite Audit PT Kereta Commuter Indonesia, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua: Endra Gunawan selaku Komisaris
 - b. Anggota: Johny Sudharmono Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 004/KOM/KCJ/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.009/KOM/KCI/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 Tentang Struktur Komite Audit PT Kereta Commuter Indonesia dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua: Edy Widyaya selaku Komisaris
 - b. Anggota: Johny Sudharmono

Komite Audit bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan khususnya terkait aktivitas audit internal dan eksternal serta pengendalian kinerja Perseroan secara umum. Keanggotaan dan Profil Singkat Anggota Komite Audit sebagai berikut.

The Audit committee is formed on the following terms:

1. *Based on the Board of Commissioners Decree number: 003/KOM/KCI/XI/2018 dated November 12, 2018 concerning the structure of PT Kereta Commuter Indonesia Audit Committee, with the following composition:*
 - a. *Chairman: Endra Gunawan as Commissioner*
 - b. *Member: Johny Sudharmono Appointed pursuant to the Decree of the Board of Commissioners number: 004/KOM/KCJ/V/2017 dated May 10, 2017.*
2. *Based on the decree of the Board of Commissioners No.009/KOM/KCI/X/2019 dated October 21, 2019 concerning the structure of PT Kereta Commuter Indonesia Audit Committee with the following arrangement:*
 - a. *Chairman: Edy Widyaya as Commissioner*
 - b. *Member: Johny Sudharmono*

The Audit committee duty is to assist the Board of Commissioners in conducting supervision in particular related to internal and external Audit activities and the general control of the Company's performance. Membership and short profile of Audit committee members as follows:

Profil Komite Audit Audit Committee's Profile



Johny Sudharmono

Komite Audit
Audit Committee's Member

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	63/Solo, 10 Oktober 1957 63/Solo, October 10, 1957
Riwayat Pendidikan Educational History	- S1 Manajemen, Universitas Sebelas Maret Surakarta-1983 - S2 Sumber Daya Manusia, Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta-2005 - S3 Manajemen Strategik, Institut Bisnis & Informatika Indonesia-2010 - Bachelor of Management, Sebelas Maret University Surakarta -1983 - Master of Human Resources, IMMI Jakarta School of Management-2005 - Doctoral Degree in Strategic Management, Indonesian Institute of Business & Informatics-2010
Riwayat Jabatan Position History	- VP Corporate Secretary, Oktober 2020-sekarang - VP Corporate Secretary, October 2020-present - VP Corporate Communication, Maret 2019-Oktober 2020 - VP Corporate Communication, March 2019-October 2020
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Diangkat sebagai Komite Audit sejak tanggal 15 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK.004/KOM/KCI/V/2017 tentang Pengangkatan Komite Audit Periode Tahun 2017-2020. Appointed as the Audit Committee since May 15, 2017 based on the Decree of the Board of Commissioners No. SK.004/KOM/KCI/V/2017 concerning the Appointment of the Audit Committee for the 2017-2020 Period.
Pengalaman Kerja Work Experience	- GM Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) (2000-2003) - GM Korporasi PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) (2003-2004) - Direktur Utama PT Mega Eltra (Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia-Persero) (2004-2010) - Dewan Komisaris dan Ketua Komite Audit PT Rekasya Industri (Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia-Persero) (2011-2016) - GM Corporate Secretary PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) (2000-2003) - GM Corporation PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) (2003-2004) - President Director of PT Mega Eltra (a subsidiary of PT Pupuk Indonesia-Persero) (2004-2010) - Board of Commissioners and Chairman of the Audit Committee of PT Rekasya Industri (a subsidiary of PT Pupuk Indonesia-Persero) (2011-2016)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara (2015-sekarang) Lecturer at the Faculty of Economics and Business, Tarumanegara University (2015-present)
Pendidikan atau Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi Education or Training to Improve Competencies	- Certified in Enterprise Risk Governance (CERG) oleh ERMA Singapore (2014) - Sertifikat Qualified Risk Governance Professional (QRGP) oleh BNSP-Lembaga Sertifikasi Profesi LSP-MKS (2018) - Risk Beyond 2019 International Conference on Enterprise Risk Management oleh CRMS Indonesia (2019) - Certified in Enterprise Risk Governance (CERG) oleh ERMA Singapore (2014) - Sertifikat Qualified Risk Governance Professional (QRGP) oleh BNSP-Lembaga Sertifikasi Profesi LSP-MKS (2018) - Risk Beyond 2019 International Conference on Enterprise Risk Management oleh CRMS Indonesia (2019)
Afiliasi Affiliation	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Domisili Domicile	Gading Serpong, Tangerang
Jumlah Kepemilikan Saham KCI Share Ownership of KCI	-



Independensi dan Pedoman Kerja Komite Audit
Independency and Work Guidelines of Audit Committee

Pernyataan Independensi <i>Independence Statement</i>	Edy Widyaya Ketua	Johny Sudharmono Anggota
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada PT KCI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; <i>Not a member of the Public Accountant Office, Legal Consultant Office, Public Assessment Services office or other party that provides insurance services, non-insurance services, assessment services and/or other consulting services to PT KCI within the last 6 (six) months;</i>	√	√
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PT KCI dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir (kecuali Komisaris Independen); <i>Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of PT KCI within 6 (six) months of the last (except the Independent Commissioner);</i>	√	√
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PT KCI; <i>Do not have direct or indirect shares in PT KCI;</i>	√	√
Keluarga tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di PT KCI; <i>Relatives do not have direct or indirect shares in PT KCI;</i>	√	√
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham PT KCI; <i>Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Shareholders of PT KCI;</i>	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT KCI; <i>Do not have direct or indirect business relationship related to the business activities of PT KCI;</i>	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah; <i>Not serving as a manager of a political party and/or a candidate/member of the legislature and/or a candidate or serving as the head/Deputy head of regional government;</i>	√	√
Tidak memiliki jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terkait dengan jabatan di PT KCI. <i>No other position can pose a conflict of interest related to the position in PT KCI.</i>	√	√

Pedoman Kerja Komite Audit

Pedoman/Tugas Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugasnya berupa:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
6. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, meliputi:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internal;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris lainnya;

Work Guideline of Audit Committee

Audit Committee Guidelines/Duties

The Audit committee is tasked with assisting the BOC in carrying out its duties:

1. Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of internal control system and effectiveness of implementation of external auditors and internal auditors.
2. Assess the implementation of activities and audit results carried out by the Internal Supervision Unit and external auditors.
3. To provide recommendations on the improvement of management control system and its implementation.
4. Ensure that there is a satisfactory evaluation procedure of all information issued by the Company.
5. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners and the duties of other Board of Commissioners.
6. Perform other duties in accordance with the provisions of laws and/or regulations stipulated by the Board of Commissioners.

Duty, Responsibility, and Authority of Audit Committee

Duties and responsibilities of the Audit committee, including:

1. Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of internal control system and effectiveness of the duties of External Auditors and Internal Auditors;
2. Assess the implementation of activities and audit results carried out by the Internal Control Unit and External Auditor;
3. Provide recommendations on the completion of management control system and its implementation;
4. Ensure that there is a satisfactory evaluation procedure of all information issued by the Company;
5. Identify matters that require the attention of other Board Commissioners;



6. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung untuk meminta dan memperoleh keterangan dari Direksi, pejabat, maupun karyawan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit.
3. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari SPI maupun Auditor Eksternal Perseroan.
4. Mengadakan pemeriksaan khusus atas hasil audit SPI maupun audit eksternal Perseroan (apabila diperlukan).
5. Memberikan penugasan kepada SPI dan atau pihak ketiga yang dianggap kompeten atau ahli untuk melakukan penelitian, pengujian dan memberikan pendapat atas suatu masalah terkait dengan Perseroan.
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

6. Perform other duties in accordance with the provisions of the legislation and/or established by the Board of Commissioners.

The authority of the Audit Committee is as follows:

1. Access the Company's documents, data and information about the Company's employees, funds, assets and resources.
2. Communicate directly to request and obtain information from the Board of Directors, officers, or employees regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.
3. Obtain the information required from SPI as well as External Auditor of the Company.
4. Conduct special examinations on the results of the audit of SPI and external audit of the Company (if necessary).
5. Provide an assignment to SPI and or a third party deemed competent or expert to conduct research, test and give opinions on a problem related to the Company.
6. Perform other authorities granted by the Board of Commissioners.

Program dan Realisasi Komite Audit Tahun 2020

Program and Realization of Audit Committee in 2020

No.	Program Kerja Work Program	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement
1	Evaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Kepatuhan <i>Evaluation on the effectiveness of Internal Control System</i>	Jumlah Total	1	1	100%
2	Evaluasi efektivitas pelaksanaan tugas dan hasil Audit Auditor Eksternal dan Auditor Internal <i>Evaluation on the effectiveness of duties and results of the External and Internal Auditor</i>	Jumlah Total	1	1	100%
3	Evaluasi status tindak lanjut hasil Audit Eksternal dan Audit Internal <i>Evaluation on the follow-up status of External and Internal Audit results</i>	Jumlah Total	3	3	100%
4	Evaluasi Program Kerja Audit Internal Tahunan (PKAT) tahun 2021, yang disusun Satuan Pengawasan Intern (SPI); <i>Evaluation of the 2021 Annual Internal Audit Work Program (PKAT), compiled by the Internal Audit Unit (SPI);</i>	Jumlah Total	1	1	100%
5	Evaluasi efektivitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2019 PT KCI <i>Evaluation on the effectiveness of GCG implementation in 2019</i>	Jumlah Total	1	1	100%

No.	Program Kerja Work Program	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement
6	Melaksanakan Rapat Komite Audit <i>Conducting Audit Committee Meetings</i>	Jumlah Total	12	12	100%
7	Mengikuti Program Pelatihan /Sertifikasi atau sejenis <i>Attending the Training Program/Certification, or other kind</i>	Jumlah Total	2	2	100%
8	Melaksanakan Self Assessment kinerja Komite Audit 2019 <i>Conducting Self Assessment performance of Audit Committee 2019</i>	Jumlah Total	1	1	100%

Rekap Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting Recap

No.	Nama Name	Jabatan Position	Total Kewajiban Rapat Total Liability	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran Rapat (%) Meeting Attendance (%)
1	Edy Widya	Ketua Chairman	12	12	100%
2	Johny Sudharmono	Anggota Member	12	12	100%
3	Bimo Poerwadi	Anggota (Periode Mei 2020-sekarang) Member (Period May 2020-present)	8	8	100%

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Committee

Struktur Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.010/KOM/KCI/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 Tentang Struktur Komite Manajemen Risiko PT Kereta Commuter Indonesia, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua: Maqin U. Norhadi
- b. Anggota: Sofyan Hasan

The structure of the Risk Management Committee is established based on:

1. Based on the decree of the Board of Commissioners Number: SK.010/KOM/KCI/X/2019 dated October 21, 2019 concerning the structure of PT Kereta Commuter Indonesia's risk management committee, with the following composition:

- a. Chairman: Maqin U. Norhadi
- b. Member: Sofyan Hasan



Keanggotaan dan Profil Singkat Anggota Komite Manajemen Risiko

Membership and Brief Profile of Members of the Risk Management Committee

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko, di antaranya:

1. Melakukan *monitoring* risiko-risiko penting yang dihadapi Perseroan dan memberi saran mengenai perumusan kebijakan di bidang Manajemen Risiko;
2. Melakukan pengawasan penerapan manajemen risiko dan memberi arahan kepada Direksi Perseroan;
3. Memastikan bahwa penyusunan RJPP dan RKAP telah memperhatikan aspek manajemen risiko;
4. Melakukan kajian berkala atas efektivitas sistem manajemen risiko dan melaporkannya kepada Pemegang Saham Perseroan.

Duty, Responsibility, and Authority of Risk Management Committee

Duties and responsibilities of the Risk Management Committee, among others:

1. *Monitoring the risks suffered by the Company and advising on the formulation of policies in the field of risk management;*
2. *Supervising the implementation of risk management and give direction to the Board of Directors;*
3. *Ensuring that the preparation of RJPP and RKAP has paid attention to the aspect of risk management;*
4. *Conducting periodic review of the effectiveness of risk management system and report it to the Company's Shareholders.*

Program dan Realisasi Komite Manajemen Risiko Tahun 2020

Program and Realization of Risk Management Committee in 2020

No.	Program Kerja Work Program	Satuan Unit	Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement
1	Monitor dan evaluasi efektivitas <i>assessment</i> internal. <i>Monitor and evaluate effectiveness of internal assessment</i>	Jumlah Total	1	1	100%
2	Monitor dan evaluasi efektivitas pelaksanaan <i>assessment</i> oleh Risk Owner dan Asesor Eksternal. <i>Monitor and evaluate the effectiveness of assessment implementation by Risk Owner and External Assessor;</i>	Jumlah Total	2	2	100%
3	Monitor dan evaluasi status tindak lanjut hasil <i>assessment</i> Asesor Internal dan Asesor Eksternal. <i>Monitoring and evaluation of internal assessment result status and assessment result of External Assessor;</i>	Jumlah Total	3	3	100%
4	Monitor Program Kerja Asesor Internal Tahunan Tahun 2021, yang disusun oleh Unit Manajemen Risiko dan Perencanaan Strategis. <i>Monitors the annual Internal Assessor work program in 2021, compiled by the Risk Management Unit;</i>	Jumlah Total	1	1	100%
5	Melaksanakan Rapat Komite Manajemen Risiko. <i>Conducting a meeting of Risk Management Committee;</i>	Jumlah Total	12	12	100%
6	Mengikuti Program Pelatihan/Sertifikasi dalam rangka peningkatan kompetensi dan monitor pelaksanaan Program Pelatihan Manajemen Risiko sesuai level bagi Risk Owner/Unit Kerja PT KCI; <i>Join CPMA or similar training programs and monitors risk management training program according to the level of Risk Owner/work Unit of PT KCI;</i>	Jumlah Total	2	2	100%
7	Melaksanakan Self Assessment kinerja Komite Manajemen Risiko 2019. <i>Conducting Self Assessment performance of Risk Management Committee in 2019.</i>	Jumlah Total	1	1	100%

Rekap Rapat Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee Meeting Recap

No.	Nama Name	Jabatan Position	Total Kewajiban Rapat Total Liability	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran Rapat (%) Meeting Attendance (%)
1	Dariyadi	Ketua (Periode Oktober 2019- Juli 2020) <i>Chairman (October 2019-July 2020)</i>	7	7	100%
2	Maqin U. Norhadi	Ketua (Periode Agustus- Desember 2020) <i>Chairman (August-December 2020)</i>	5	5	100%
3	Djoko Paryoto	Anggota (Periode Mei 2017-Maret 2020) <i>Member (May 2017-March 2020)</i>	3	3	100%
4	Sofyan Hasan	Anggota (Periode April 2020-sekarang) <i>Member (April 2020-present)</i>	9	9	100%

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Secretary of The Board of Commissioners

Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: SK.005/KOM/KCI/VIII/2019 Tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Kereta Commuter Indonesia. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris berhak mendapatkan bantuan Sekretaris Dewan Komisaris atas biaya Perseroan. Secara umum, fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris, antara lain:

- Memberi dukungan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya.
- Menyediakan informasi untuk kebutuhan Dewan Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan.
- Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan rutin Direksi di dalam mengelola Perseroan seperti: *Business Plan*, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, Laporan Bulanan, Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Eksternal dan Laporan-laporan lain yang dibutuhkan.
- Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan

Appointed pursuant to the Decree of Board of Commissioners Number: SK.005/KOM/KCI/VIII/2019 dated August 30, 2019 concerning the dismissal and appointment of Board of Commissioners of PT Kereta Commuter Indonesia. To assist in the smooth execution of its duties, the Board of Commissioners is entitled to the Secretary of the Board of Commissioners for the Company. In general, the functions, duties and responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners, among others:

- Providing support to the Board of Commissioners to facilitate the duties of the Board of Commissioners in carrying out its functions.*
- Providing information to the needs of the Board of Commissioners in the framework of decision making.*
- Preparing the necessary materials in relation to routine reports of the Board of Directors in managing the Company such as: Business Plan, Annual report, quarterly report, monthly Report, Report of external Audit examination and other reports as required.*
- Preparing materials needed in connection with matters that must be obtained from the Board of Commissioners*



keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan segenap jajarannya.

- e. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan/rapat-rapat Dewan Komisaris, baik internal Dewan Komisaris maupun dengan Direksi dan jajarannya serta pihak-pihak lainnya.
- f. Menyiapkan dan mengkoordinasikan agenda rapat dengan pihak-pihak yang hadir dalam rapat.
- g. Menyiapkan dan mengirimkan undangan rapat kepada pihak-pihak yang diundang menghadiri rapat.
- h. Melakukan konfirmasi mengenai waktu, tempat, kehadiran serta hal-hal lain yang dipandang perlu demi kelancaran rapat.
- i. Membuat risalah rapat atas rapat-rapat rutin maupun non rutin Dewan Komisaris beserta komite-komitennya.
- j. Menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris.
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan tata persurutan termasuk tetapi tidak terbatas pada menyiapkan panggilan rapat dan kearsipan di Dewan Komisaris.
- l. Bertanggung jawab terhadap pembuatan, administrasi dan penyimpanan risalah rapat serta pendistribusian salinan risalah rapat Dewan Komisaris.
- m. Melakukan Koordinasi dengan Sekretaris Perseroan guna memperlancar pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.
- n. Pengaturan lebih lanjut terkait fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam dokumen tersendiri dengan memperhatikan ketentuan tentang Sekretaris Dewan Komisaris dalam *Board Manual*.

with respect to the management activities of the Company conducted by the Board of Directors and all its ranks.

- e. Conducting meetings of the Board of Commissioners, both internal Board of Commissioners and with the Board of Directors and their ranks and other parties.
- f. Preparing and coordinate the meeting agenda with the Parties attending the meeting.
- g. Setting-up and send meeting invitations to invited parties to attend the meeting.
- h. Confirming the time, place, presence and other things deemed necessary for the smooth meeting.
- i. Making a treatise meeting on routine and non-routine meetings of the Bord of Commissioners and its committees.
- j. Performing administrative and secretarial tasks relating to all activities of the Board of Commissioners.
- k. Implementing and coordinate administrative activities including but not limited to preparing meeting calls and archives in the Board of Commissioners.
- l. Responsible for the creation, administration and storage of the minutes of the meeting and distribution of minutes of the Board of Commissioners meeting.
- m. Coordinating with the Secretary of the Company in order to facilitate the implementation of its functions, duties and responsibilities.
- n. Further arrangement regarding the function, duties, responsibilities and authority of the Secretary of the Board of Commissioners shall be conducted by the Board of Commissioners in its own documents with respect to provisions on the Secretary of Board of Commissioners in *Manual Board*.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of Secretary of the Board of Commissioners



Heriyanto Wibowo

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of the Board of Commissioners

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	58 tahun, Temanggung, 30 Oktober 1962 58 years old, Temanggung, October 30, 1962
Riwayat Pendidikan Educational History	• S1-Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung • S2-Jurusan Transportasi, Institut Teknologi Bandung • Bachelor Degree-Department of Civil Engineering, Bandung Institute of Technology • Master Degree-Department of Transportation, Bandung Institute of Technology
Riwayat Jabatan Position History	-
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	SK.005/KOM/KCI/VIII/2019 Tanggal 30 Agustus 2019 SK.005/KOM/KCI/VIII/2019 August 30, 2019
Pengalaman Kerja	• 01/09/2019 s.d sekarang-Sekretaris Dewan Komisaris • 30/10/2018 s.d 30/10/2019-Wakil ketua tim pembebasan tanah proyek • 07/02/2018 s.d 08/10/2018-Project Director 1 Daerah Operasi 1 Jakarta • 10/05/2017 s.d 06/02/2018-Project Director 8 Divisi Regional IV Tanjung Karang • 26/04/2016 s.d 09/05/2017-Project Director 8 Sub Divisi Regional III.2 Tanjung Karang • 01/10/2015 s.d 25/04/2016-Executive Vice President Corporate Secretary • 21/08/2015 s.d 30/09/2015-Executive Vice President Risk Management • 07/01/2014 s.d 20/08/2015-Executive Vice President Risk Management • 26/03/2013 s.d 06/02/2014-Executive Vice President Railways Assets • 09/10/2012 s.d 23/03/2013-Staf Utama Direktur Utama • 30/07/2010 s.d 09/10/2012-EVP Perencanaan Strategik dan Pengembangan Bisnis • 17/05/2010 s.d 29/07/2010-Staf utama pada direktur utama • 30/08/2009 s.d 16/05/2010-Deputy EVP Divre III SS • 01/04/2009 s.d 02/08/2009-EVP Aset Produksi • 19/10/2006 s.d 31/03/2009-Kasubdit Tanah dan Bangunan Kp Bandung • 22/03/2006 s.d 18/10/2006-Kasi Program Pemeliharaan Jalan Rel Kp Bandung • 03/05/2005 s.d 21/03/2006-Kasi Jalan Rel dan Jembatan Daop 1 Jak • 24/10/2003 s.d 02/05/2005-Kasi Jalan Rel dan Jembatan Daop VIII sb • 31/07/2001 s.d 23/10/2003-Kasi Jalan Rel dan Jembatan Divre 1 Sumut • 04/10/1999 s.d 30/07/2001-Kepala Inspeksi Jembatan Eksploitasi Sumut • 19/09/1996 s.d 03/10/1999-Pengawas Seksi Jembatan Daop 1 Jakarta • 01/04/1992 s.d 17/09/1996-Kepala Sub seksi desain & konstruksi bangunan bawah subdit jembatan Kp bandung • 1988-PJKA Staf • 08/04/1987 s.d 07/08/1987-Civil Engineer



Work Experience	• 01/09/2019 until now-Secretary to the Board of Commissioners • 30/10/2018 to 30/10/2019-Deputy head of the project land acquisition team • 07/02/2018 to 08/10/2018-Project Director 1 Operation Area 1 Jakarta • 10/05/2017 to 06/02/2018-Project Director 8 Regional Division IV Tanjung Karang • 26/04/2016 to 09/05/2017-Project Director 8 Regional Sub Division III.2 Tanjung Karang • 01/10/2015 to 25/04/2016-Executive Vice President Corporate Secretary • 21/08/2015 to 30/09/2015-Executive Vice President Risk Management • 07/01/2014 to 20/08/2015-Executive Vice President Risk Management • 26/03/2013 to 06/02/2014-Executive Vice President Railways Assets • 09/10/2012 to 23/03/2013-President Staff President Director • 30/07/2010 to 09/10/2012-EVP Strategic Planning and Business Development • 17/05/2010 to 29/07/2010-Main staff of the President Director • 30/08/2009 to 16/05/2010-Deputy EVP Divre III SS • 01/04/2009 to 02/08/2009-EVP Production Assets • 19/10/2006 s.d 31/03/2009-Kasubdit Land and Building Kp. Bandung • 22/03/2006 to 18/10/2006-Head of Bandung Kp Railroad Maintenance Program • 24/10/2003 to 02/05/2005- Head Section of Railroads and Bridges Daop VIII sb • 31/07/2001 to 23/10/2003-Head of Railroad and Bridge Division of North Sumatra Division 1 • 04/10/1999 to 30/07/2001-Head of Inspection of North Sumatra Exploitation Bridge • 19/09/1996 to 03/10/1999-Section Supervisor of Daop 1 Jakarta Bridge • 01/04/1992 s.d 17/09/1996-Head of Sub-section of design & construction of buildings under sub-directorate of KP bandung bridge • 1988-PJKA Staff • 08/04/1987 to 07/08/1987-Civil Engineer
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-
Pendidikan atau Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi Education or Training to Improve Competencies	Januari 2020- ToT Transformation Leadership and Management Batch III Institut Transportasi dan Logistik Trisakti January 2020- ToT Transformation Leadership and Management Batch III Trisakti Institute of Transportation and Logistics
Afiliasi Affiliation	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Pernyataan Independensi Independency Statements	Belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode Has not served more than 2 (two) periods
Domisili Domicile	Gading Serpong, Tangerang
Jumlah Kepemilikan Saham KCI Share Ownership of KCI	-

KEBIJAKAN REMUNERASI

Remuneration Policy

REMUNERASI PEGAWAI

Employee Remuneration

Dasar Kebijakan Remunerasi/Penghasilan Pegawai adalah sesuai Surat Keputusan Direksi No: SK-011/KCI/DIR-HRD/V/2018 tentang Penghasilan Pegawai sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan SK-038/KCI/DIR-HRD/X/2019

Policy for remuneration/income of officers is pursuant to the Decree of the Board of Directors No: SK-011/KCI/DIRHRD/V/2018 on the employee's income as amended several times with SK-038/KCI/DIR-HRD/X/2019.

Komponen-Komponen Penghasilan Pegawai

Components of Employee Income

No.	Jenis Komponen Component Type	Pegawai Tetap Permanent Staff	Pegawai Tidak Tetap Contract Based
1.	Upah Pokok Basic Salary	Upah Pokok Basic Salary	Upah Salary
2.	Tunjangan Tetap Fixed Allowance	Tunj Perumahan, Tunj Admin Bank Housing, Bank Tax Expenses	Tidak No
3.	Tunjangan Tidak Tetap: Non-fixed Allowance		
	Tunjangan Transport Transport Allowance	Ya Yes	Tidak No
	Tunjangan Kinerja Performance Allowance	Ya Yes	Tidak No
	Tunjangan Jabatan Work Allowance	Ya Yes	Tidak No
	Tunjangan Kemahalan/Wilayah DAOP I Extra Allowance/DAOP	Ya Yes	Tidak No
	Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	Ya (untuk jabatan setingkat $\geq$ JM) Yes (for positions at the level of $\geq$ JM)	Tidak No
	Tunjangan Profesi Profession Allowance	Ya (untuk jabatan setingkat Pelaksana) Yes (for positions at the level of $\geq$ JM)	Tidak No
	Tunjangan Khusus Special Allowance	Ya (untuk pegawai dengan tugas dan jabatan tertentu) Yes (for employees with certain duties and positions)	Ya (untuk pegawai dengan tugas dan jabatan tertentu) Yes (for employees with certain duties and positions)
	Tunjangan Risiko Khusus Special Risk Allowance	Ya (untuk pegawai dengan tugas dan jabatan tertentu) Yes (for employees with certain duties and positions)	Tidak No



No.	Jenis Komponen Component Type	Pegawai Tetap Permanent Staff	Pegawai Tidak Tetap Contract Based
	Tunjangan Khusus Pejabat Struktural Tertentu <i>Specific Structural Officer Allowance</i>	Ya (untuk pegawai dengan tugas dan jabatan tertentu) <i>Yes (for employees with certain duties and positions)</i>	Tidak <i>No</i>
4.	Penghasilan non Upah: <i>Non-Salary Income</i>		
	Imbalan Kerja Keberhasilan Kinerja <i>(IKKK) Business Revenue Allowance</i>	Ya <i>Yes</i>	Ya <i>Yes</i>
	Tunjangan Hari Raya <i>Holy Day Allowance</i>	Ya <i>Yes</i>	Ya <i>Yes</i>
	Tunjangan Tambahan Penghasilan <i>Bonus Allowance</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>
	Tunjangan Pendidikan <i>Education Allowance</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>
	Tunjangan Rekreasi <i>Holiday Allowance</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>
	Tunjangan Cuti <i>Paid Leave</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>
	Tunjangan Prestasi (dibayarkan per triwulan) <i>Performance Allowance (paid per quarterly)</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>
	Emolumen <i>Emolumens</i>	Ya (untuk jabatan setingkat Pelaksana) <i>Yes (for Executor level positions)</i>	Tidak <i>No</i>
	Tunjangan Operasional Pelayanan Angkutan Lebaran/Natal & Tahun Baru <i>Operational for Eid/Christmas & New Year Operational Allowance</i>	Ya <i>Yes</i>	Ya <i>Yes</i>
	Tunjangan Kerja Operasional Awak Sarana Perkeretaapian <i>Cabin Crew Operational Allowance</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>
	Premi Jam Orang Produksi atas Perawatan Sarana <i>Basic Working Hour Allowance for Rolling Stocks Maintenance</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>
5.	Benefit <i>Benefits</i>		
	Jaminan Kesehatan <i>Health Insurance</i>	Ya <i>Yes</i>	Ya <i>Yes</i>
	BPJS Kesehatan <i>BPJS Kesehatan</i>	Ya <i>Yes</i>	Ya <i>Yes</i>

No.	Jenis Komponen Component Type	Pegawai Tetap Permanent Staff	Pegawai Tidak Tetap Contract Based
	BPJS Ketenagakerjaan <i>BPJS Ketenagakerjaan</i>	Ya Yes	Ya Yes
	Dana Pensiun <i>Pention Fund</i>	Ya Yes	Tidak No
	Asuransi Kesehatan Pensiun <i>Pention Health Insurance</i>	Ya (untuk jenis pegawai tertentu) Yes (for certain types of employees)	Tidak No

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration

Indikator Pemberian Remunerasi Direksi dan Komisaris

Persetujuan pemberian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Pemegang Saham menetapkan penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan pertimbangan indikator sebagai berikut:

1. Faktor Skala Usaha
2. Faktor Kompleksitas Usaha
3. Tingkat Inflasi
4. Kondisi dan Kemampuan Perusahaan

Kebijakan penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi merujuk pada:

1. Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia Nomor: KEP.U/KP.208/XII/KA-2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan tanggal 23 Desember 2015.
2. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Kereta Commuter Indonesia tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2018 Nomor PT KAI KP.303/X/12/KA-2017 nomor YAYASAN PUSAKA 40/RUPS-PT KCI/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.
3. Risalah Sirkuler Keputusan Pemegang Saham tentang Penetapan Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Nomor PT KAI (Persero) KP.303/VII/6/KA-2018 nomor Yayasan Pusaka 06/RIS-PTKCI/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
4. Risalah Sirkuler Keputusan Pemegang Saham tentang Penetapan Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi Nomor PT KAI (Persero) KP.303/VII/5/KA-2019 nomor Yayasan Pusaka 05/RIS-PTKCI/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.

Remuneration Indicator for the Board of Directors and the Board of Commissioners

Approval of remuneration of Board of Commissioners and Directors shall be stipulated by GMS. The shareholder determines the remuneration adjustment of the Board of Commissioners and BOD in consideration of the following indicators:

1. Business Scale Factor
2. Business Complexity factor
3. Inflation rate
4. Company's conditions and capabilities

The remuneration determination policy for the BOC and the BOD shall refer to:

1. Decision of Director of PT Kereta Api Indonesia number: KEP. U/KP. 208/XII/KA-2015 on the guidelines for earning determination of the Board of Commissioners and Directors of subsidiaries on December 23, 2015.
2. Minutes of the annual general meeting of shareholders of PT Kereta Commuter Indonesia on the approval of the work plan and the Company budget year 2018 of PT KAI KP. 303/X/12/KA-2017 YAYASAN PUSAKA number 40/GMS-PT KCI/X/2017 dated October 11, 2017.
3. Circular Treatise of Shareholders' decisions about the determination of the Board of Commissioners and Directors of PT KAI (Persero) KP. 303/VII/6/KA-2018 Yayasan Pusaka Number 06/RIS-PT KCI/VII/2018 dated July 19, 2018.
4. Circular Treatise of Shareholders' decisions about the determination of the Board of Commissioners and Directors of PT KAI (Persero) KP. 303/VII/5/KA-2019 Yayasan Pusaka Number 05/RIS-PT KCI/VII/2019 dated July 31, 2019.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka seluruh pemegang saham Perseroan sepakat untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

Based on the above, then all shareholders of the Company agreed to make the following decisions:

Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

The Remuneration Component of Board of Commissioners and Directors

Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Honorarium	Gaji Salary
Tunjangan Hari raya Keagamaan, Tunjangan Transportasi, Asuransi Purna jabatan Allowance for religious holidays, transportation allowances, full-term insurance	Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Asuransi purna Jabatan, Tunjangan perumahan Religious day allowance, full-term insurance, housing allowance
Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Bantuan hukum Health facilities, legal aid facilities	Fasilitas Kendaraan, Fasilitas Kesehatan, fasilitas bantuan hukum Vehicle facilities, health facilities, legal aid facilities
Tantiem Bonus	Tantiem Bonus

Tabel Metode Perhitungan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

The Board of Commissioners and Directors Remuneration Method

Remunerasi Remuneration	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Gaji/Honorarium Salary	Honorarium Komisaris utama ditetapkan sebesar 45% dari gaji Direktur Utama, sedangkan honorarium anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama The Honorary Commissioner's Honorarium is set at 45% of the President Director's salary, while the honorarium of the Board of Commissioners amounted to 90% of the Honorarium of the President Commissioner	Gaji Direktur Utama ditetapkan sesuai dengan RUPS Tahunan, gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama The salary of the President Director shall be stipulated in accordance with the annual GMS, salary of the Board of Directors 85% of President Director's salary
Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Tidak diberikan None	Diberikan sebesar Rp12.600.000 per bulan Sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019 Awarded Rp12,600,000 monthly PER-04/MBU/2014 as amended several times by PER-01/MBU/05/2019

Remunerasi Remuneration	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Tunjangan Transportasi <i>Transportation Allowance</i>	20% dari Honorarium per bulan sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019 <i>20% of Honorarium per month according to PER-04/MBU/2014 as amended several times last by PER-01/MBU/05/2019</i>	Tidak diberikan <i>None</i>
Asuransi Purna Jabatan <i>Pention Insurance</i>	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019 <i>Premium paid by the Company amounting to 25% of the salary in 1 year as PER-04/MBU/2014 as amended several times by the latest PER-01/MBU/05/2019</i>	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019 <i>Premium paid by the Company amounting to 25% of the salary in 1 year as PER-04/MBU/2014 as amended several times by the latest PER-01/MBU/05/2019</i>
Asuransi Purna Jabatan <i>Pension Insurance</i>	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019 <i>Premium paid by the Company amounting to 25% of the salary in 1 year as PER-04/MBU/2014 as amended several times by the latest PER-01/MBU/05/2019</i>	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019 <i>Premium paid by the Company amounting to 25% of the salary in 1 year as PER-04/MBU/2014 as amended several times by the latest PER-01/MBU/05/2019</i>
Tunjangan Hari Raya <i>Holy Day Allowance</i>	1 kali Honorarium sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019 <i>1-time Honorarium as PER-04/MBU/2014 as amended several times last with PER-01/MBU/05/2019</i>	1 kali Gaji sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019 <i>1-Time Salary PER-04/MBU/2014 as amended several times last with PER-01/MBU/05/2019</i>



Remunerasi Remuneration	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Fasilitas Kendaraan Vehicle Allowance	Tidak diberikan None	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional dengan memperhatikan keuangan Perusahaan, spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 2.500 cc 1 (one) unit along with maintenance and operational costs respectfully to the Company's expenses, specifications and vehicle type are governed by the Board of Commissioners with a maximum limit of 2,500 cc
Fasilitas Kesehatan Health Allowance	Dalam bentuk Asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost) sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019 Manifested in health insurance or change of medical expenses (at cost) PER-04/MBU/2014 as amended several times last by PER-01/MBU/05/2019	Dalam bentuk Asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost) sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019 Manifested in health insurance or change of medical expenses (at cost) PER-04/MBU/2014 as amended several times last by PER-01/MBU/05/2019
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Allowance	Sebesar pemakaian sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019 As PER-04/MBU/2014, as amended several times last by PER-01/MBU/05/2019	Sebesar pemakaian sesuai PER-04/MBU/2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PER-01/MBU/05/2019 As PER-04/MBU/2014, as amended several times last by PER-01/MBU/05/2019
Tantiem Bonus	Tidak dilakukan pembayaran Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas kinerja tahun 2018 There is no bonus payment to the BOC and the BOD for the performance of 2018	Tidak dilakukan pembayaran Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas kinerja tahun 2018 There is no bonus payment to the BOC and the BOD for the performance of 2018

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Berdasarkan SK Direksi Nomor SK-024/KCI/DIR-HRD/X/2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia, VP Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas pokok menjalankan hubungan dengan *stakeholder*, dekomentasi Perusahaan, Implementasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), *General Affair*/Umum, dan Kesehatan pegawai mengkoordinasi dan mengintegrasikan unit-unit organisasi di bawahnya.

Fungsi Sekretaris Perusahaan di Perseroan yaitu sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Perseroan dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik regulator, investor maupun masyarakat. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab atas berbagai fungsi terkait dengan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengungkapan informasi serta memastikan terbentuknya reputasi Perusahaan yang baik.

Berdasarkan Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap di Lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia, bahwa Gatut Sutiyatmoko diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan pada tanggal 5 Desember 2018 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.U/KH.608/XII/8/SAP/KA-2018.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi dengan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Based on the Board of Directors' Decree No. SK-024/KCI/DIRHRD/X/2018 on organizational structure and governance in PT Kereta Commuter Indonesia VP of Corporate Secretary has the main duty of maintain the relationship with stakeholders, corporate valuation, implementation of Good Corporate Governance (GCG), General Affair/general, and Health officer coordinate and integrate the organizational units under it.

Function of Corporate Secretary in the Company as liaison officer between the Company with various stakeholders (stakeholders) both regulators, investors and the public. The Corporate Secretary is also responsible for various functions related to the Company's compliance with legislation and information disclosure and ensuring a good corporate reputation.

Based on the appointment of permanent officers in PT Kereta Commuter Indonesia, Erni Sylviane Purba was appointed as the Corporate Secretary on March 14, 2019 through Decree of Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK. U/KH. 608/III/28/SAP/KA-2019 dated March 14, 2019.

The Corporate Secretary shall be directly responsible to the Board of Directors and appointed and dismissed under the Board of Directors' decision with the Company's internal mechanisms with the approval of the Board of Commissioners.



PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Profile of Corporate Secretary

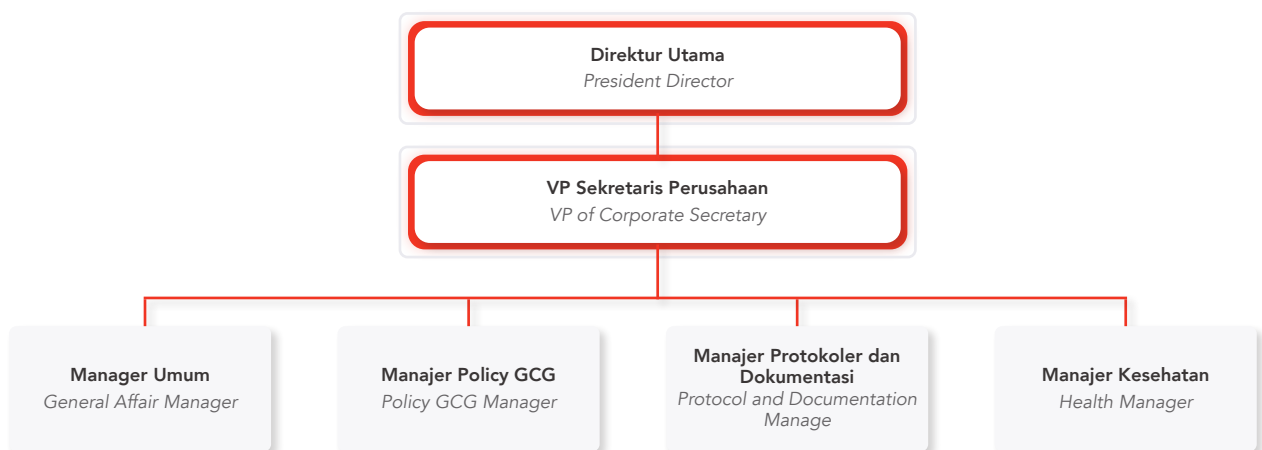


Erni Sylviane Purba
Corporate Secretary

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir <i>Age/Place & DOB</i>	37/Simalungun, 25 April 1984 37/Simalungun, 25 April 1984
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	S1 Teknik Informatika, Universitas Kristen Duta Wacana-2007 <i>Bachelor of Informatics Engineering, Duta Wacana Christian University-2007</i>
Riwayat Jabatan <i>Position History</i>	- VP Corporate Secretary, Oktober 2020-sekarang - VP Corporate Secretary, October 2020-Present - VP Corporate Communication, Maret 2019-Sekarang - VP Corporate Communication, March 2019-Present
Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Appointment</i>	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK-103/KCI/DIR-HRD/34/XI/2020 Tanggal 18 November 2020 <i>Decision Letter of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK-103/KCI/DIR-HRD/34/XI/2020 Dated November 18, 2020</i>
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	- Vice President Corporate Secretary (Oktober 2020-sekarang) - Vice President Corporate Communication (Maret 2019-Oktober 2020) - Manager Customer Relation and Digital Community (Februari 2017-Maret 2019) - Vice President Corporate Secretary (Oktober 2020-present) - Vice President Corporate Communication (March 2019-October 2020) - Manager of Customer Relation and Digital Community (February 2017-March 2019)
Jabatan Rangkap <i>Concurrent</i>	Tidak ada <i>None</i>
Pendidikan atau Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi <i>Education or Training to Improve Competencies</i>	-
Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham <i>Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders</i>
Pernyataan Independensi <i>Independency Statements</i>	-
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta, Indonesia
Jumlah Kepemilikan Saham KCI <i>Share Ownership of KCI</i>	-

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Organizational Structure



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

KCI sebagai Perusahaan Jasa Transportasi Publik berbasis Kereta Rel Listrik (KRL) yang menjadi tulang punggung transportasi Urban di Indonesia dan statusnya menjadi Anak Perusahaan BUMN maka Perseroan wajib mempunyai Sekretaris Perusahaan yang berfungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi dengan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-024/KCI/DIR-HRD/X/2018 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia, Sekretaris Perusahaan memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab di Perseroan, di antaranya sebagai berikut:

1. Merumuskan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional Perseroan, termasuk menjaga hubungan dengan stakeholder.
2. Menjalankan fungsi dokumentasi Perusahaan, general affairs/umum, kesehatan pegawai.

KCI as a public transportation service Company based on Electric Rail (KRL) which becomes the backbone of Urban transportation in Indonesia and its status to become a subsidiary of SOE, the Company must have a Corporate Secretary that serves as a liaison between the Company and other stakeholders.

The Corporate Secretary is directly responsible to the Board of Directors and appointed and discharged based on the Board of Directors decree with the Company's internal mechanisms with the approval of the Board of Commissioners.

Based on the decree of the Board of Directors No. SK-024/KCI/DIR-HRD/X/2018 on organizational structure and governance in PT Kereta Commuter Indonesia, the Corporate Secretary has several duties and responsibilities in the Company, including the following:

1. Formulating, coordinate, control and evaluate the implementation of the Company's operational tasks, including maintaining the relationship with the stakeholders.
2. Running the Company's documentation functions, general affair/general, employee health.



3. Menjalankan fungsi pengawasan dan implementasi pelaksanaan GCG di lingkungan Perusahaan, termasuk pelaksanaan assessment dan GCG Perusahaan.
4. Mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan unit-unit organisasi di bawahnya.
5. Melakukan koordinasi dalam hal pelaksanaan dan implementasi sistem ISO Perusahaan.
6. Menjalankan fungsi koordinasi dalam hal hubungan dengan Pemegang Saham Perusahaan, Dewan Komisaris Perusahaan dan perangkat Dewan Komisaris Perusahaan.

3. *Implementing the supervisory function and implementation of GCG in the Company's environment, including the implementation of Assessment and the Company GCG.*
4. *Coordinating, and integrate organizational units under it.*
5. *Coordinating in terms of implementation and implementation of the Company's ISO system.*
6. *Performing coordination function in relation with the shareholders of the Company, the Board of Commissioners of the Company and the device of the Board of Commissioners.*

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Duties Implementation Report

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas pokok antara lain menjalankan hubungan dengan stakeholder, melaksanakan Good Corporate Governance, bertanggung jawab pada dokumentasi Perusahaan dan general affairs/umum, memantau kesehatan pegawai, serta berkoordinasi dengan unit-unit organisasi di bawahnya.

Throughout 2020, the Corporate Secretary has carried out its main duties, among others, conducting relationships with stakeholders, implementing Good Corporate Governance, responsible for the Company's documentation and general affairs, monitoring employees' health, and coordinating with organizational units underneath.

Selama tahun 2019, tugas-tugas Sekretaris Perusahaan yang bersinggungan dengan stakeholder Perseroan yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

During 2020, the duties of Corporate Secretary related the Company's stakeholders can be seen in the following tables:

1. Unit Umum General Affair

Realisasi kinerja unit umum tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Following is realization of the health unit's performance towards the program in 2020:

No.	Uraian Description	Revisi RKAP 2020 RKAP Revision 2020				Keterangan Description
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Pakaian Dinas Karyawan <i>Employees' Official Clothes</i>			√	√	Terealisasi di TW IV (yang seharusnya Terealisasi di TW III), dikarenakan proses pengadaan berjalan 2 kali dan diantaranya karena terdapat penggantian logo perusahaan. <i>Realized in Quarter IV (which should have been realized in Quarter III), because the procurement process ran 2 times, one of them was due to the change in the company logo.</i>
2	Pengadaan Inventaris Kantor dan Griya Karya <i>Inventory procurement Offices and work houses</i>	√	√	√	√	Terealisasi TW I, untuk TW II s.d TW IV tidak ada dikarenakan efisiensi. <i>Realized in Quarter I, it was not carried out in Quarter II to Quarter IV due to efficiency program.</i>

2. Unit Kesehatan

Health Unit

No.	Uraian Program Program Description	Revisi RKAP 2020 RKAP Revision 2020				Realisasi 2020 Realization 2020				Keterangan Description
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
I Kesehatan Health										
1	Asuransi Kesehatan Health Insurance	√	√	√	√	√			√	Terealisasi Realized
2	Pelayanan Kesehatan Health Service					√	√	√	√	Terealisasi Realized
3	Medical Checkup, Pendalaman tes Kesehatan lainnya. Medical Check Up, other Medical Test.				√					Anggaran di gunakan untuk penanganan COVID-19 The budget was allocated for COVID-19 handling
II Pelayanan Kesehatan Penumpang Passengers Health Service										
1	Alat Kesehatan penunjang pelayanan penumpang. Medical Tools for passengers.	√	√	√	√					Anggaran digunakan untuk penanganan COVID-19 The budget was allocated for COVID-19 handling
2	P3K dan Perlengkapan First Aid Tools			√	√					Anggaran di gunakan untuk penanganan COVID-19 The budget was allocated for COVID-19 handling
3	Angkutan Lebaran dan Nataru Eid, Christmast, and New Year Transportation		√		√	√			√	Terealisasi Realized
4	Gawat Darurat Emergency	√	√	√	√	√			√	Terealisasi Realized
5	Pos Kesehatan (Obat, BHP, dan Bahan Medis) Medical Post (Medicines, BHP, and Medical Tools)			√	√	√			√	Terealisasi Realized
6	PMI Indonesian Red Cross	√			√	√			√	Terealisasi Realized
7	Pembukaan Pos Kesehatan Baru New Medical Post			√	√					Anggaran di gunakan untuk penanganan COVID-19 The budget was allocated for COVID-19 handling
III Kerumahtanggaan (KRT)						√			√	Terealisasi Realized



3. Unit Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Policy Unit

Skor hasil self assesment GCG pada tahun 2020 yang dilaksanakan oleh BPKP adalah sebagai berikut:

The results of Self-assessment GCG in 2020 conducted by BPKP are as follows:

Penjelasan Kriteria Criteria Description	Bobot Indikator Value Indicator	Capaian Tahun 2020 2020 Achievement		Penjelasan Description
		Skor Score	% Capaian % Achievements	
Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan A commitment to sustainable implementation of good corporate governance	7,00	6,550	93,571	Sangat Baik Very Good
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Holders	9,00	7,033	78,144	Baik Good
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Monitoring Board	35,00	31,280	89,371	Sangat Baik Very Good
Direksi Board of Directors	35,00	32,148	91,851	Sangat Baik Very Good
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Disclosure of Information and Transparency	9,00	8,774	97,489	Sangat Baik Very Good
Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	-	-	-
Skor Keseluruhan Total Score	100,00	85,785	85,785	Sangat Baik Very Good
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG Classification of GCG Implementation Quality	-	-	-	-

Sumber Unit Sekper PT KCI
Source: PT KCI Corporate Secretary Unit

Pada program GCG tahun 2020 terealisasi sebesar 85,785 dari program 100 atau tercapai sebesar 85,785%. Realisasi dari program kerja GCG tahun 2020 adalah sebagai berikut:

In the GCG program in 2020 was 85,785 from the program 100 or achieved at 85.785%. Realization from GCG program in 2020 are:

Laporan Kegiatan Unit GCG

GCG Unit Activity Report

No.	Program	Revisi RKAP 2020 RKAP Revision 2020	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Keterangan Description
			Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	
1	Asesmen GCG GCG Assessment	√	√	√	√	√			√	√	Asesmen GCG tahun 2020 sedang dalam proses kerjasama dengan BPKP DKI Jakarta, rencana proses assesmen GCG tahun 2020 dilaksanakan Januari-Maret 2021. <i>Assesmen GCG tahun The 2020 GCG assessment is in the process, partnering with the DKI Jakarta BPKP, the 2020 GCG assessment process is planned to be carried out January-March 2021</i>
2	FGD GCG										Rencana dilaksanakan setelah situasi COVID-19 kondusif. <i>Planned to be implemented after the COVID-19 situation is conducive.</i>
3	Sosialisasi GCG (Gratifikasi, WBS, LHKPN) GCG Socialization (Gratuities, WBS, LHKPN)		√	√	√	√			√	√	Sosialisasi persiapan dan pencocokan data wajib lapor dengan KAI. <i>Socialization of preparation and data matching of compulsory reporting to KAI</i>
4	Pembuatan Annual Report Preparation of Annual Report	√	√	√							Terealisasi <i>Realized</i>
5	Benchmarking GCG GCG Benchmarking										Rencana dilaksanakan setelah situasi COVID-19 kondusif <i>Planned to be implemented after the COVID-19 situation is conducive</i>



No.	Program	Revisi RKAP 2020 RKAP Revision 2020	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Keterangan Description
			Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	
6	Audit internal 9001 <i>Internal Audit 9001</i>	√	√	√	√	√					
7	Surveillance audit ISO 9001	√					√	√			Surveillance audit ISO 9001 dilaksanakan pada 18-19 Agustus 2020. <i>ISO 9001 surveillance audit will be held on August 18-19, 2020.</i>
8	ISO Award	√					√	√			Peringkat terbaik stasiun (1) Rangkasbitung; (2) Buaran; (3) Depok. <i>The best ranking stations (1) Rangkasbitung; (2) Buaran; (3) Depok</i>
9	ISO Awareness	√									Kegiatan dibatalkan untuk efisiensi anggaran. <i>Activities canceled for budget efficiency.</i>
10	ISO FGD										Kegiatan dibatalkan untuk efisiensi anggaran. <i>Activities canceled for budget efficiency.</i>
11	Innovation and Improvement Award	√					√	√			(1) Juara 1 karya proyek tim The Dauns (Pelayanan) Stasiun Ramah Lingkungan (2) Juara 3 karya proyek tim GGWP (Overhaul Manggarai) Alat Tes Motor Generator (1) 1st place, The Dauns team project (Service) Eco-Friendly Station (1) 3rd place winner, GGWP team project (Overhaul Manggarai) Motor Generator Test Tool

No.	Program	Revisi RKAP 2020 RKAP Revision 2020	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Keterangan Description
			Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	Prog	Real	
12	Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional <i>Quality Work Meeting and National Productivity</i>	√									
13	International Business Award	√					√	√			(1) Silver winner category Company of The Year Transport (Large) (2) Bronze winner category Company of The Year Consumer Service (Large) (3) Silver winner category Covid Response Most Valuable Service (4) Bronze winner category Covid Response Most Exemplary Employee
14	SNI Award	√					√	√			

- Laporan pengendalian gratifikasi dan WBS yang dipantau melalui akun e-mail laporgcg@krl.co.id pada tahun 2019 di antaranya parcel dalam bentuk makanan dan bunga yang dibagikan ke OB/cleaning service.
- Sebagai upaya sosialisasi dan diseminasi kebijakan terkait GCG, Whistleblowing System, Visi Misi, Budaya Perusahaan serta Sistem Manajemen Mutu, unit GCG telah melakukan:
 - Broadcast e-mail kepada setiap insan Perusahaan secara berkala.
 - Penempatan standing banner larangan gratifikasi di beberapa tempat strategis kantor dan seluruh Stasiun, Dipo dan Overhaul.
 - Kebijakan mengenai gratifikasi dan WBS telah ditampilkan dalam website Perusahaan.
- Pada kegiatan review kebijakan Governance yang telah diperbaharui maupun dilengkapi kebijakan tentang Kode Etik, Sistem Manajemen Mutu dan Gerakan Sadar Mutu serta Instruksi Direksi Tentang Kebijakan Sistem Manajemen Mutu.

- Gratification control report and WBS monitored through e-mail account laporgcg@krl.co.id in the year 2020 including parcel in the form of food and interest distributed to OB/cleaning service.*
- As an effort to socialize and disseminate policies related to GCG, Whistleblowing System, Vision Mission, corporate culture and quality management system, the GCG unit has done:*
 - Broadcast e-mails to every individual Company periodically.*
 - The placement of standing banner prohibition of gratification in several strategic places of office and all stations, Dipo and Overhaul.*
 - The policy on gratification and WBS has been displayed on the Company's website.*
- In the review of the policy on Governance policies that have been renewed and equipped with policies on the code of Ethics, quality management system and quality aware movement and instructions on the Management of Quality Systems Policy.*



PROGRAM PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary Training Program

Untuk mengembangkan potensi demi mencapai tujuan serta kinerja pada Perseroan secara maksimal, Sekretaris Perusahaan dan pegawai di unit Sekretaris Perusahaan perlu mengikuti berbagai program pelatihan. Di tahun 2020, Sekretaris Perusahaan tidak mengikuti pelatihan.

To live up the fullest potential towards achieving objectives and performance of the Company, Corporate Secretary and employees in its units need to attend various training programs. In 2020, Corporate Secretary did not participate in any training program.

Evaluasi Kinerja Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan dilakukan penilaian yang diukur dari pencapaian Key Performance Indicator secara tahunan dan merupakan bentuk kontrak manajemen antara Vice President Sekretaris Perusahaan dengan Direktur Utama Perseroan.

Performance Evaluation of the Corporate Secretary

Corporate Secretary's performance is assessed by the achievement of annual Key Performance Indicator and is a form of contract management between Vice President of Corporate Secretary and the Company's President Director.

No.	Indikator Indicators	Keterangan Description	Formula	Satuan Unit	Target	Prioritas Priority	Bobot Value	Realisasi Realization	Skor Score
1	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan stakeholder. <i>Organizing socialization and education activities with stakeholders.</i>	Jumlah realisasi kegiatan sosialisasi dan edukasi. <i>Total realization of socialization and education activities</i>	Jumlah realisasi/jumlah program x Bobot. <i>Total realization/total programs x Weight</i>	%	100	High	31.25	93.00	29.06
2	Memastikan terlaksananya kegiatan event Perusahaan yang bekerjasama dengan stakeholder. <i>Ensuring the implementation of Company events in collaboration with stakeholders</i>	Jumlah realisasi kegiatan event Perusahaan yang bekerjasama dengan stakeholder. <i>Total realizations of the Company's event activities in collaboration with stakeholders</i>	Jumlah realisasi/jumlah program x Bobot. <i>Total realization/total programs x Weight</i>	%	100	High	31.25	81.00	25.31

No.	Indikator Indicators	Keterangan Description	Formula	Satuan Unit	Target	Prioritas Priority	Bobot Value	Realisasi Realization	Skor Score
3	Tersedianya konten media sosial sebagai media komunikasi interaktif Perusahaan. <i>Availability of social media content as an interactive communication medium for the Company.</i>	Jumlah <i>release</i> konten pada sosial media yang dimiliki oleh Perusahaan. <i>Total content releases on social media owned by the Company</i>	Jumlah realisasi/jumlah program x Bobot. <i>Total realization/ total programs x Weight</i>	%	100	Medium	18.75	100.00	18.75
4	Mencegah pemberitaan negatif bagi Perusahaan. <i>Preventing negative news for the company</i>	Batas maksimal pemberitaan negatif adalah 3%. <i>The maximum limit for negative news is 3%</i>	3%/realisasi persentase pemberitaan negatif x Bobot. <i>3%/realized percentage of negative news x Weight</i>	%	32	Medium	18.75	1	18.75



AUDIT INTERNAL

Internal Audit

Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah satuan di bawah Direktur Utama yang melaksanakan kegiatan *assurance* dan konsultasi secara independen dan objektif guna memberi nilai tambah dan meningkatkan pelaksanaan operasi organisasi.

An internal supervision unit hereinafter referred to as SPI is a unit under the President Director who conducts assurance and consulting activities independently and objectively to provide added value and improve the implementation of organizational operations.

Dasar Penyelenggaraan SPI pada PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)

- Keputusan Menteri BUMN nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
- Keputusan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang perubahan atas PER-01/MBU/2011;
- Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.002/KCI/DIR-HRD/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Laksana PT KAI Commuter Jabodetabek;
- Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.006/CU/KCI/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Kereta Commuter Indonesia;
- Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.007/CU/KCI/II/2019 tentang Pedoman Audit Operasional di Lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia;
- Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.015/CU/KCI/IV/2019 tentang pedoman Audit Investigatif Satuan Pengawas Intern PT Kereta Commuter Indonesia; dan
- Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.033/CU/KCJ/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Penetapan Pedoman Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Internal dan Pemeriksaan serta Arahan Pemegang Saham PT KAI Commuter Jabodetabek.

Policy of Internal Audit Unit SPI at PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)

- Decree of the Minister of SOE Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on the implementation of Good Corporate Governance in state-owned enterprises;*
- Decree of the Minister of SOE number: PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning the amendment to PER-01/MBU/2011;*
- Decree of the Board of Directors No. SK-002/KCI/DIR-HRD/X/2018 dated January 15, 2018 on the establishment of Organizational Structure and Governance of PT KAI Commuter Jabodetabek;*
- Decree of the Board of Directors number: SK. 006/CU/KCI/II/2019 dated February 14, 2019 concerning the establishment of internal Audit Charter (SPI) of the internal control unit of PT Kereta Commuter Indonesia;*
- Decree of the Board of Directors number: SK. 007/CU/KCI/II/2019 on Operational Audit guideline in PT Kereta Commuter Indonesia;*
- Decree of the Board of Directors number: SK. 015/CU/KCI/IV/2019 on Investigative Audit guideline of Internal supervisory unit of PT Kereta Commuter Indonesia.*
- Decree of the Board of Directors number: SK. 033/CU/KCJ/IX/2017 dated September 11, 2017 concerning the determination of the follow-up Monitoring guidelines on the results of Internal Audit recommendations and the examination and direction of shareholders of PT KAI Commuter Jabodetabek.*

STANDAR INTERNASIONAL PRAKTIK PROFESIONAL AUDIT INTERNAL

International Standard of Professional Internal Audit Practices

Unit Satuan Pengawasan Intern mengatur Prinsip Internasional Praktik Profesional Audit Internal, Kode Etik, Standar Internasional untuk Profesional Praktik Audit Internal (standar), dan Definisi Audit Internal dengan mematuhi unsur-unsur wajib Kerangka Kerja Praktik Profesional Internasional The Institute of Internal Auditors.

Vice President Satuan Pengawasan Intern (VP SPI) melakukan pelaporan secara berkala mengenai kesesuaian praktik Unit SPI dengan Kode Etik dan standar-standar yang diatur dalam Piagam Pengawasan Internal kepada Direksi/Komisaris/Komite Audit.

The Intern Monitoring Unit Unit regulates The Internal International Audit Professional Principles, Code of Conduct, International Standard for Professionals of Internal Audit Practices (standards), and the definition of Internal Audit by complying with the mandatory elements of The Institute of Internal Auditors International Professional Practice framework.

Vice President of Internal Monitoring Unit (VP SPI) conducts periodic reporting on the suitability of the practice of SPI units with the Code of Ethics and the standards set out in the Internal supervision Charter to the BOD/BOC/Audit committee.

VISI, MISI, DAN TUJUAN SPI

Vision, Mission, and SPI Objectives

Visi

Menjadi unit audit yang bersih, berintegritas, profesional dan independen untuk memenuhi harapan *stakeholders*.

Vision

To be a clean, integrity, professional and independent audit unit to meet stakeholders' expectations.

Misi

Menyelenggarakan fungsi audit, konsultasi dan katalisator dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk mewujudkan pencapaian tujuan Perusahaan, meningkatkan dan melindungi nilai organisasi.

Mission

Conducting audit function, consultation and catalyst by implementing GCG principles to realize the achievement of Company objectives, improving and protecting the organizational value.

Tujuan

- Membantu Direksi untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa operasi Perusahaan telah berjalan sesuai tata kelola yang baik (*good governance*) dan berpedoman pada manajemen risiko serta sistem pengendalian Intern yang telah ditetapkan; dan
- Memberi masukan kepada manajemen untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

Objectives

- Assisting the Board of Directors to give reasonable assurance that the Company's operations have been in accordance with good governance and guidance on risk management as well as established internal control system; and*
- Provide input to management to improve governance, risk management, and internal control.*



FUNGSI SPI

SPI Function

Dalam menjalankan tugasnya, Unit SPI memiliki fungsi sebagai berikut:

- Membantu Direksi dalam menerapkan *Good Governance*, baik melalui kegiatan *assurance* maupun konsultasi melalui rekomendasi yang dihasilkan; dan
- Sebagai mitra strategis manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

In carrying out its duties, the SPI Unit has the following functions:

- Assisting the Board of Directors in implementing Good Governance through both assurance and consultation activities through the resulting recommendations; and*
- As strategic partner of management to improve the efficiency and effectiveness of operational, internal control, risk management and corporate governance.*

RUANG LINGKUP SPI

SPI scope

- Ruang lingkup audit internal antara lain termasuk namun tidak terbatas pada pengujian objektif atas bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian PT KCI.

- Internal audit scope includes but not limited to objective testing of evidence with the intent to provide an independent assessment of the adequacy and effectiveness of governance, risk management, and control of PT KCI.*

Penilaian audit internal termasuk mengevaluasi:

- Risiko yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis PT KCI diidentifikasi dan dikelola dengan tepat;
- Tindakan para pejabat, Direktur, pegawai, dan rekanan PT KCI patuh pada kebijakan, prosedur, hukum, peraturan, dan standar tata kelola yang berlaku;
- Hasil kegiatan atau program konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- Kegiatan atau program dilakukan secara efektif dan efisien;
- Proses dan sistem yang mapan patuh pada kebijakan, prosedur undang-undang dan peraturan yang dapat berdampak signifikan pada PT KCI;
- Informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, mengklasifikasikan, dan melaporkan adalah andal serta memiliki integritas;
- Sumber daya dan aset diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.

Internal audit assessments include evaluating:

- The risks associated with achieving the strategic objectives of PT KCI are identified and administered appropriately;*
- The actions of the officers, Directors, employees, and associates of PT KCI comply with the applicable policies, procedures, laws, regulations and governance standards;*
- Results of activities or programmes consistent with defined objectives and objectives;*
- Activities or programs conducted effectively and efficiently;*
- Processes and established systems comply with policies, legal procedures and regulations that can have a significant impact on PT KCI;*
- The information used to identify, measure, analyse, classify and report is reliable and has integrity;*
- Resources and assets are obtained economically, used efficiently, and adequately protected.*

b. Pelaporan hasil penilaian dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian kepada Direksi/Dewan Komisaris/Komite Audit/Manajemen, termasuk pihak luar yang berkepentingan.	b. Reporting the assessment and evaluation of the adequacy and effectiveness of governance, risk management and control of to the BOD/BOC/Audit Committee/Management, including the relevant outside parties.
c. VP SPI akan melaporkan secara berkala kepada Direksi/Komisaris/Komite Audit mengenai: 1) Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab SPI; 2) Rencana dan realisasi kinerja SPI; 3) Kesesuaian SPI dengan Kode Etik dan Standar IIA, dan rencana aksi untuk menunjukkan kesesuaian yang signifikan; 4) Eksposur risiko yang signifikan dan pengendalian, termasuk risiko <i>fraud</i>, masalah tata kelola, dan hal-hal lain yang memerlukan perhatian, atau sesuai permintaan Direksi Komisaris/Komite Audit; 5) Hasil audit atau kegiatan lainnya; 6) Persyaratan sumber daya; dan 7) Segala respon manajemen terhadap risiko yang mungkin tidak dapat diterima oleh PT KCI.	c. VP SPI will periodically report to the Board of Directors/Commissioners/Audit Committee to identify: 1) The purpose, authority, and responsibility of SPI; 2) Plan and realization of SPI performance; 3) SPI conformance with the IIA Code of Ethics and standards, and action plans to demonstrate significant conformity; 4) Significant risk exposure and control, including fraud risk, governance issues, and other matters requiring attention, or the appropriate request of the BOD Commissioner/Audit Committee; 5) Audit results or other activities; 6) Resource requirements; and 7) Any management response to risks that may not acceptable by PT KCI.
d. Jika memungkinkan, VP SPI mengkoordinasikan kegiatan dengan mempertimbangkan hasil audit dan hasil konsultasi pihak internal dan eksternal seperlunya.	d. Where possible, the VP of SPI coordinates the activity by considering the audit results and the results of consultation of internal and external parties as necessary.
e. SPI dapat memberikan saran dan jasa konsultasi klien terkait, sifat dan ruang lingkup yang akan disepakati dengan klien, namun SPI tidak memikul tanggung jawab manajemen.	e. SPI may provide advice and related client consulting services, properties and scope to be agreed with the client, but SPI assumes no responsibility for management.
f. Peluang untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian dapat diidentifikasi selama penugasan. Peluang ini akan dikomunikasikan ke tingkat manajemen.	f. Opportunities to improve governance efficiency, risk management, and control can be identified during assignments. These opportunities will be communicated to the management level.



PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWAS INTERNAL

The Head of The Internal Audit Unit Profile



Santoswana

PYMT. Vice President
Internal Audit
Internal Audit Vice President
Caretaker

Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir <i>Age/Place & Date of Birth</i>	48/Bandung, 15 Mei 1972 48/Bandung, May 15, 1972
Riwayat Pendidikan <i>Educational History</i>	S2 Hukum, Universitas Indonesia-2010 Master of Law, University of Indonesia-2010
Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Basis of Appointment</i>	Surat Tugas Pak Santos sebagai PYMT VP Internal Audit: 185-1/DK-HR/KCI/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 Assignment Letter as Internal Audit VP Caretaker: 185-1/DK-HR/KCI/X/2020 dated October 1, 2020
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	• Vice President Governance, Risk, Compliance (GRC) and Legal (Desember 2020-sekarang) • Vice President Hukum dan Kepatuhan (April 2019-November 2020) • Vice President SPI (Juni 2016-April 2019) • GM Hukum dan Kepatuhan (Juli 2013-Juni 2016) • Vice President Governance, Risk, Compliance (GRC) and Legal (Desember 2020-present) • Vice President of Law and Compliance (April 2019-November 2020) • Vice President of SPI (June 2016-April 2019) • GM of Law and Compliance (July 2013-June 2016)
Jabatan Rangkap <i>Concurrent Position</i>	Tidak ada None
Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Domisili <i>Domicile</i>	Depok, Jawa Barat Depok, West Java

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB VP SPI

VP SPI Duties and Responsibilities

Menurut Surat Keputusan Direksi Nomor SK-024/KCI/DIR-HRD/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia, berikut tugas dan tanggung jawab dari VP SPI.

VP SPI bertanggung jawab kepada Direktur Utama mempunyai tugas pokok menjalankan fungsi:

1. Assurance yaitu kegiatan penilaian bukti objektif oleh auditor internal untuk memberikan pendapat atau simpulan mengenai suatu entitas, operasi, fungsi, proses sistem, atau subjek lainnya) mencakup Audit Finansial, Operasional, Compliance Audit dan/atau hal-hal yang bersifat insidental.

According to the decree of the Board of Directors No.SK-024/KCI/DIR-HRD/X/2018, dated October 3, 2018 concerning organizational structure and governance in PT Kereta Commuter Indonesia, the following duties and responsibilities of the VP of SPI.

The VP of SPI is responsible to the President Director having the main task of performing the functions:

1. Assurance is an objective proof assessment by an internal auditor to provide an opinion or summary of an entity, operation, function, system process, or other subject matter) including financial Audit, operations, Compliance Audit and/or incidental matters.

2. *Consulting/konsultasi* yaitu jasa yang bersifat pemberian nasihat/saran perbaikan diselenggarakan berdasarkan permintaan spesifik unit dalam Perusahaan dengan tetap mempertahankan objektivitas independensi serta tidak menerima/mengambil alih tanggung jawab manajemen sebagai pemutus kebijakan dalam Perusahaan.
3. *Counterpart* untuk External Auditor dan Komite Audit Perusahaan.
4. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan unit-unit organisasi di bawahnya.

Tanggung jawab sehubungan dengan tugasnya, VP SPI bertanggungjawab:

1. Melaksanakan penilaian/pengujian yang objektif dan independen atas laporan hasil pemeriksaan seluruh kegiatan dalam Perusahaan menyangkut efisiensi dan efektivitas serta taat asas dalam kegiatan manajemen pada seluruh satuan organisasi Perusahaan.
2. Melaksanakan pemeriksaan dan penilaian yang berkaitan dengan masalah yang bersifat khusus (insidental) termasuk audit/pemeriksaan investigatif.
3. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengawasan penyelenggaraan infrastruktur, sistem aplikasi dan hasil audit kepatuhan kartu uang elektronik.
4. Menjalankan fungsi katalis dan *consulting* sesuai standar profesi yang berlaku dan mendorong percepatan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern.
5. Menandatangani Program Kerja Tahunan (PKT) dan Anggaran serta melaporkan untuk mendapat persetujuan Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
6. Monitoring, evaluasi dan memberikan masukan/usul/opini atas regulasi dan kebijakan/keputusan Direksi.
7. Melaksanakan administrasi dan/atau evaluasi terhadap seluruh laporan dan dokumen bahan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor/pemeriksa dari luar Perusahaan.
8. Melakukan pendampingan dan memberikan pertimbangan selama dilaksanakannya proses pemeriksaan oleh pihak auditor eksternal.
9. Bertanggungjawab terhadap setiap Laporan Hasil Pengawasan/Penilaian dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
10. Melaksanakan koordinasi dengan Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
11. Mengintegrasikan unit-unit organisasi di bawahnya.

2. *Consultant services that can advise/advice on improvements are conducted based on the specific request of the firm in the Company while maintaining independent objectivity and does not accept/take over management responsibilities as a policy breaker within the Company.*
3. *Counterpart for External Auditor and corporate Audit committee.*
4. *Coordinate and integrate organizational units underneath.*

Responsibility with respect to its duties, the VP of SPI is responsible to:

1. *Implement an objective and independent assessment/ testing of the report on the results of all the effectiveness in the Company concerning efficiency and effectiveness and adhere to the principles in management activities in all organizational units of the Company.*
2. *Perform the examination and assessment relating to specific problems (incidental) including audit/ investigative examination.*
3. *Conduct evaluation on the surveillance results of infrastructure maintenance, application system and the results of electronic money card compliance audit.*
4. *Perform the catalyst and consulting functions in compliance with the prevailing profession standards and encourage follow-up acceleration of internal and external surveillance results.*
5. *Sign the Annual Work Program (PKT) and budget and report to the approval of the President Director and/or the Board of Commissioners through the Audit Committee.*
6. *Monitor, evaluate and provide input/proposal/opinion on the regulations and policies/decisions of the Board of Directors.*
7. *Implement the administration and/or evaluation of all the reports and documents of inspection materials conducted by auditors/inspectors from outside the Company.*
8. *Guide and provide consideration during the implementation of the audit process by external auditors.*
9. *Be responsible of the report on the results of the supervision/assessment and reports to the President Director and/or the Board of Commissioners through the Audit Committee.*
10. *Coordinate with the President Director and/or Board of Commissioners through the Audit Committee.*
11. *Integrate the underneath organization units.*

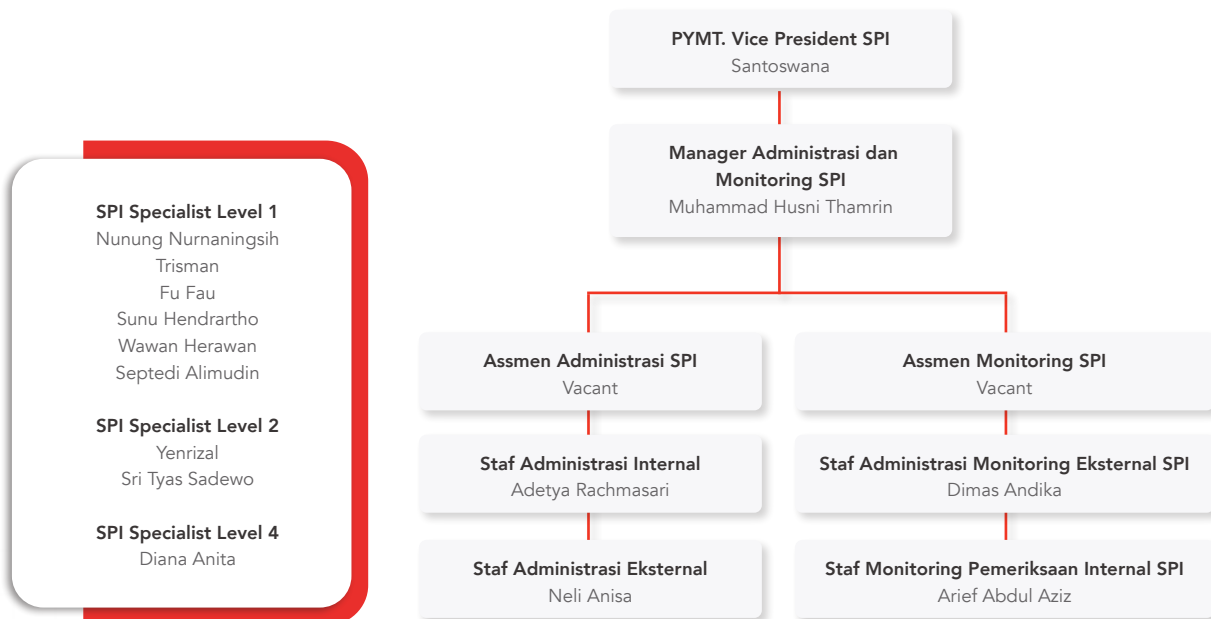


STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SPI

Structure and Position of Internal Audit Unit

Kedudukan Internal Audit Division berada di bawah langsung Main Direktorat (Direktorat Utama) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT KCI Nomor: 007/KCI/PER-DIR/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Utama.

The position of the Internal Audit Division is directly under the Main Directorate as stated in the Board of Directors' Decree of PT KCI Number: 007/KCI/PER-DIR/X/2020 dated October 19, 2020 regarding the Organization and Management of the Main Directorate.



KOMPOSISI UNIT AUDIT INTERNAL

Internal Audit Unit Composition

Susunan dan komposisi SDM Unit SPI sebanyak 14 (empat belas) orang, dengan rincian sebagai berikut:

The arrangement and composition of the human resources SPI Unit as much as 14 (fourteen), with the following details:

No.	Nama Name	NIPP/NIK Employee Number	Jabatan Position
1	Santoswana	1008	PYMT. Vice President SPI
2	Muhammad Husni Thamrin	48617	Manager Program & Monitoring SPI
3	Nunung Nurnaningsih	42526	Audit Spesialist 1
4	Trisman	45584	Audit Spesialist 1
5	Fu Fau	63597	Audit Spesialist 1
6	Sunu Hendratho	50542	Audit Spesialist 1
7	Wawan Herawan	41994	Audit Spesialist 1
8	Septedi Alimudin	1013	Audit Spesialist 1
9	Sri Tyas Sadewo	58233	Audit Spesialist 2
10	Diana Anita	1359	Audit Spesialist 4
11	Dimas Andika	1948	Staf Monitoring Pemeriksaan Eksternal SPI SPI External Examination Monitoring Staff
12	Arief Abdul Azis	1947	Staf Monitoring Pemeriksaan Internal SPI SPI Internal Examination Monitoring Staff
13	Neli Anisa	73709	Staf Administrasi Eksternal SPI SPI External Administration Staff
14	Adetya Rachmasari	2359	Staf Administrasi Internal SPI SPI Internal Administration Staff

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI INTERNAL AUDIT 2020

Internal Audit Training and Certification 2020

Pengembangan kompetensi meliputi antara lain program pendidikan dan pelatihan, *in house training* & penambahan wawasan. Program pendidikan dan pelatihan akan dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan atau sertifikasi audit yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Intern Audit (YPIA), Institute of Internal Audit (IIA), Lembaga Pendidikan Fraud Auditing dan Lembaga pendidikan lainnya yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan *in house training* antara lain mengikuti seminar, lokakarya yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga/yayasan/konsultan yang memadai. Program pendidikan & pelatihan, *in house training* & penambahan wawasan pegawai di unit SPI tahun 2020.

Competency development includes education and training programs, *in house training* & added insight. Education and training programs will be conducted through education and training programs or audit certifications which are held by Yayasan Pendidikan Intern Audit (YPIA), Institute of Internal Audit (IIA), Fraud Auditing institutions and other educational institutions that are relevant to the implementation of the work. While *in house training*, among others, seminars, workshops carried out by adequate institutions/foundations/consultants. Education Program & Training, *in house Training* & addition of employee insight in the SPI unit in 2020.



PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT SPI TAHUN 2020

2020 SPI Unit Development Program

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Lokakarya Training/Workshop	Penyelenggara Organizer
1	Wismarus Adam	Vice President SPI	COSO Based Internal Auditing	YPIA
			Pelatihan QIA Tingkat Lanjutan <i>QIA Training Advanced Level</i>	YPIA
			Pelatihan QIA Manajerial <i>QIA Training Managerial</i>	YPIA
2	Muhammad Husni Thamrin	Manager Program & Monitoring SPI	Pelatihan QIA Tingkat Dasar <i>QIA Training Basic Level</i>	YPIA
			Diklat Fraud Control System <i>Fraud Control System Training</i>	BPK
			Diklat Analytical Thinking for Auditor <i>Analytical Thinking for Auditor Training</i>	IIA
3	Nunung Nurnaningsih	Audit Spesialist 1	Pelatihan QIA Tingkat Lanjutan <i>QIA Training Advanced Level</i>	YPIA
			Pelatihan QIA Manajerial <i>QIA Training Managerial</i>	YPIA
			Diklat Analytical Thinking for Auditor <i>Analytical Thinking for Auditor Training</i>	YPIA
			Corporate Forensic Auditor	PPM
4	Trisman	Audit Spesialist 2	Diklat Fraud Control System <i>Fraud Control System Training</i>	BPK
			Corporate Forensic Auditor	PPM
5	Fu Fau	Audit Spesialist 3	Coso Based Internal Auditing	YPIA
			Pelatihan QIA Tingkat Lanjutan <i>QIA Training Advanced Level</i>	YPIA
			Pelatihan QIA Manajerial <i>QIA Training Managerial</i>	YPIA
6	Sunu Hendrarto	Audit Spesialist 1	Pelatihan QIA Manajerial <i>QIA Training Managerial</i>	YPIA
			Diklat Fraud Control System <i>Fraud Control System Training</i>	BPK
			Corporate Forensic Auditor	PPM
7	Wawan Herawan	Audit Spesialist 1	Pelatihan QIA Tingkat Lanjutan <i>QIA Training Advanced Level</i>	YPIA
			Diklat Fraud Control System <i>Fraud Control System Training</i>	BPK
			Diklat Analytical Thinking for Auditor <i>Analytical Thinking for Auditor Training</i>	YPIA

No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Lokakarya Training/Workshop	Penyelenggara Organizer
8	Septedi Alimudin	Audit Spesialist 1	Pelatihan QIA Tingkat Dasar <i>QIA Training Basic Level</i>	YPIA
			Diklat Analytical Thinking for Auditor <i>Analytical Thinking for Auditor Training</i>	YPIA
			Diklat Fraud Control System <i>Fraud Control System Training</i>	BPK
			Pelatihan QIA Tingkat Lanjutan <i>QIA Training Advanced Level</i>	YPIA
9	Sri Tyas Sadewo	Audit Spesialist 2	Pelatihan QIA Manajerial <i>QIA Training Managerial</i>	YPIA
			Diklat Fraud Control System <i>Fraud Control System Training</i>	BPK
			Diklat Analytical Thinking for Auditor <i>Analytical Thinking for Auditor Training</i>	YPIA
			Corporate Forensic Auditor	PPM
10	Diana Anita	Audit Spesialist 4	Diklat Fraud Control System <i>Fraud Control System Training</i>	BPK
			Pelatihan QIA Tingkat Lanjutan <i>QIA Training Advanced Level</i>	YPIA
			Corporate Forensic Auditor	PPM
			Pelatihan QIA Tingkat Lanjutan <i>QIA Training Advanced Level</i>	YPIA
11	Dimas Andika	Staf Monitoring Pemeriksaan Eksternal SPI <i>SPI External Examination Monitoring Staff</i>	Pelatihan QIA Tingkat Lanjutan <i>QIA Training Advanced Level</i>	YPIA
			Diklat Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Pemeriksaan <i>Examination Data Collection and Analysis Techniques Training</i>	BPK
			Diklat Analytical Thinking for Auditor <i>Analytical Thinking for Auditor Training</i>	YPIA
12	Arief Abdul Azis	Staf Monitoring Pemeriksaan Internal SPI <i>SPI Internal Examination Monitoring Staff</i>	Diklat Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Pemeriksaan <i>Examination Data Collection and Analysis Techniques Training</i>	BPK
			Pelatihan QIA Tingkat Dasar <i>QIA Training Basic Level</i>	YPIA
			Pelatihan QIA Tingkat Lanjutan <i>QIA Training Advanced Level</i>	YPIA



No.	Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan/Lokakarya Training/Workshop	Penyelenggara Organizer
13	Adetya Rachmasari	Staf Administrasi Internal SPI <i>SPI Internal Administration Staff</i>	Pelatihan QIA Tingkat Dasar <i>QIA Training Basic Level</i>	YPIA
			Diklat Analytical Thinking for Auditor <i>Analytical Thinking for Auditor Training</i>	YPIA
			Diklat Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Pemeriksaan <i>Examination Data Collection and Analysis Techniques Training</i>	BPK

SERTIFIKASI UNIT SPI

SPI Unit Certification

Nama Peserta Nama Peserta	Jabatan Position	Sertifikasi yang Telah Dimiliki Owned Certification
Santoswana	PYMT. Vice President of Internal Audit	Audit Internal Tingkat Manajerial <i>Internal Audit Managerial Level</i>
Fu Fau	Audit Spesialist 1	Certified Public Accountant (CPA)
Nunung Nurnaningsih	Audit Spesialist 1	QIA Tingkat Lanjutan <i>QIA Advanced Level</i>
Wawan Herawan	Audit Spesialist 1	QIA Tingkat Lanjutan <i>QIA Advanced Level</i>
Septedi Alimudin	Audit Spesialist 1	QIA Tingkat Dasar <i>QIA Basic Level</i>
Muhammad Husni Thamrin	Audit Planning, Monitoring, and Operation Manager	-
Farah Martha Yovita	Spesialist 2	QIA
Basunando Pamungkas	Spesialist 4	QIA Tingkat Dasar <i>QIA Basic Level</i>
Dimas Andika	Audit Planning and Monitoring Level 7	QIA Tingkat Dasar <i>QIA Basic Level</i>
Arief Abdul Aziz	Audit Planning and Monitoring Level 7	QIA Tingkat Dasar <i>QIA Basic Level</i>
Adetya Rachmasari	Operation Audit Level 7	-
Neli Anisa	Operation Audit Level 7	-

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Appointment and Dismissal of The Head of The Internal Audit Unit

Sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Direksi PT KCI Nomor: SK.006/CU/KCI/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) SPI PT KCI Bab II, Nomor 5 tentang Struktur dan Kedudukan "SPI dipimpin oleh seorang Vice President SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris".

As stated in the Board of Directors' Decree of PT KCI Number: SK.006/CU/KCI/II/2019 dated February 14, 2019 concerning Stipulation of the Internal Audit Charter of SPI Chapter II, Number 5 concerning Structure and Position "SPI is led by Vice President of SPI who is appointed and dismissed by the President Director and is approved by the Board of Commissioners".

PIAGAM SPI

Internal Audit Unit Charter

Perusahaan telah memiliki Piagam Audit SPI yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris, Direktur Utama dan VP SPI sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.031/CU/KCJ/IX/2017 Tanggal 11 September 2017, piagam ini merupakan pembaharuan dari Internal Audit Charter tahun 2016.

The Company has had the charter of SPI Audit which has been signed by the Board of Commissioners, President Director and VP of SPI pursuant to the Decree of the Board of Directors number SK. 031/CU/KCJ/IX/2017 dated September 11, 2017, this charter is an update of the Internal Audit Charter year 2016.

Hal-hal yang dimuat dalam Internal Audit Charter adalah:

- Bab I Pendahuluan berisi latar belakang pembuatan Internal Audit Charter dan dasar peraturan pembuatan Internal Audit Charter.
- Bab II Isi berisi tentang Visi & Misi, Tujuan, Definisi, Struktur dan Kedudukan, Fungsi, Ruang Lingkup, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang, Akuntabilitas, Independensi dan Objektivitas, Persyaratan Auditor, Kecakapan dan Kecermatan Profesional, Jaminan Kualitas, Pola Hubungan, Larangan Perangkapan Tugas, Standar Pelaksanaan SPI, Kode Etik.
- Bab III Penutup berisi tentang ketentuan pemberlakuan dan evaluasi atas Internal Audit Charter.

The things contained in the Internal Audit Charter are:

- Chapter I introduction contains the background of the creation of Internal Audit Charter and the basis of regulatory Internal Audit Charter.*
- Chapter II the contents are about the Vision & Mission, Objectives, Definitions, Structure and Position, Function, Scope, Duties and Responsibilities, Authority, Accountability, Interdiction and Objectivity, Requirements of Auditors, Skills and Professional Accuracy, Quality Assurance, Relationship Patterns, Duty Prohibitions, SPI Implementation Standards, Code of Conduct.*
- Chapter III cover is about the provisions of the application and evaluation of Internal Audit Charter.*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Duties and Responsibilities

- Menyusun dan menyampaikan Program Kerja Tahunan berbasis risiko kepada Direksi Komisaris/Komite Audit untuk dilakukan review dan disetujui;
- Berkomunikasi dengan manajemen Direksi/Komisaris/Komite Audit terkait dampak keterbatasan sumber daya pada rencana audit;
- Menelaah dan menyesuaikan rencana audit internal seperlunya, sebagai tanggapan atas perubahan bisnis, risiko, kegiatan, sistem, program dan pengendalian di PT KCI;

- To compile and submit a risk-based annual work Program to the Board of Directors/Audit Committee for Review and approval;*
- Communicating with the management of BOD/BOC/Audit Committee regarding the impact of resource limitations on the audit plan;*
- To study and adapt internal audit plans as necessary, in response to business changes, risks, activities, systems, programs and controls at PT KCI;*



- d. Berkomunikasi dengan Direksi/Komisaris/Komite Audit setiap terjadi perubahan sementara yang signifikan terhadap rencana Audit Internal;
 - e. Memastikan setiap penugasan dari rencana audit dijalankan, termasuk penetapan tujuan dan ruang lingkup, penugasan sumber daya yang tepat dan diawasi secara memadai, dokumentasi program kerja dan hasil pengujian, komunikasi hasil audit beserta kesimpulan dan rekomendasi yang tepat kepada pihak terkait;
 - f. Menindaklanjuti temuan audit dan tindakan korektif, dan melaporkan secara berkala kepada manajemen Direksi/Komisaris/Komite Audit setiap tindakan korektif yang tidak dilaksanakan secara efektif;
 - g. Memastikan prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi diterapkan dan ditegakkan;
 - h. Memastikan SPI secara kolektif memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk memenuhi syarat di Piagam Pengawasan Internal;
 - i. Memastikan tren dan masalah yang muncul yang dapat berdampak pada PT KCI dipertimbangkan dan dikomunikasikan kepada Direksi/Komisaris/Komite Audit;
 - j. Memastikan tren dan praktik yang berhasil dalam audit internal dipertimbangkan;
 - k. Menetapkan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang dirancang sebagai pedoman SPI;
 - l. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur PT KCI, kecuali jika kebijakan dan prosedur tersebut bertentangan dengan Piagam Pengawasan Internal. Konflik semacam itu akan diselesaikan atau dikomunikasikan kepada Direksi/Komisaris/Komite Audit;
 - m. Memastikan kesesuaian aktivitas SPI dengan Standar, dengan kualifikasi berikut:
 - 1. Dalam hal aktivitas SPI dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan untuk mematuhi bagian tertentu dari Standar, maka kesesuaian terhadap seluruh bagian lain dari standar dan pengungkapan penjelasan secukupnya sangat diperlukan;
 - 2. Jika Standar dipergunakan bersama dengan ketentuan yang diterbitkan oleh badan lain yang memiliki kewenangan, komunikasi Audit Internal dapat menyebutkan juga penggunaan ketentuan lain jika diperlukan. Dalam kasus ketika aktivitas Audit Internal menunjukkan kesesuaian dengan Standar dan terdapat inkonsistensi antara standar dan ketentuan-ketentuan lain, Auditor Internal dan aktivitas Audit Internal harus memenuhi standar dan dapat mematuhi ketentuan lain tersebut jika ketentuan itu lebih mengikat.
- d. *Communicating with the Board of Directors/Commissioners/Audit Committee any significant temporary changes to the Internal Audit plan;*
 - e. *Ensure that each assignment of the audit plan is executed, including the goal setting and scope, appropriate resource assignment and the monitored supervision, work program documentation and test results, audit communications, and appropriate conclusions and recommendations to the relevant parties;*
 - f. *To follow up on audit findings and corrective actions, and periodically report to the management of BOD/BOC/Audit Committee of any corrective action that is not executed effectively;*
 - g. *Ensure the principle of integrity, objectivity, confidentiality, and competence applied and enforced;*
 - h. *Ensure that SPI collectively owns or acquires any other knowledge, skills, and competencies necessary to qualify for the Internal Supervisory Charter;*
 - i. *Ensure that the emerging trends and problems that can affect PT KCI are considered and communicated to the Board of Directors/Commissioners/Audit Committee;*
 - j. *Ensure successful trends and practices in an criteria audit are considered;*
 - k. *Establish and ensure adherence to policies and procedures designed as SPI guidelines;*
 - l. *Ensure compliance with the policies and procedures of PT KCI, unless such policies and procedures conflict with the Internal supervision Charter. Such conflicts will be resolved or communicated to the Board of Directors/Commissioners/Audit Committee;*
 - m. *Ensure the suitability of SPI activities with the standard, with the following qualifications:*
 - 1. *In the event that SPI activity is prohibited by law or the statutory regulations to comply with certain portions of the standard, conformity to all other parts of the standard and disclosure of explanations is strictly necessary;*
 - 2. *If the standard is shared with provisions issued by other authorities, Internal Audit communications may also mention the use of other provisions if necessary. In cases where the Internal Audit activity demonstrates compliance with the standards and there is an inconsistency between the standard and other provisions, the internal auditor and the Internal Audit activity must meet the standards and be able to comply with the other provisions if the provision is more binding.*

WEWENANG

Authorities

a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan antara lain terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana, serta aset Perusahaan lainnya termasuk meminta keterangan atau penjelasan pada semua pejabat/pekerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SPI tanpa pembatasan; b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi/Komisaris/Komite Audit; c. Menetapkan ruang lingkup audit dan menerapkan teknik-teknik audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit; d. Meminta atau mendapatkan bantuan tenaga ahli/profesional, jika dianggap perlu, baik dari dalam maupun dari luar Perusahaan; e. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; f. Melakukan koordinasi dengan auditor eksternal dan institusi pengawasan lainnya; g. Melaksanakan kegiatan investigasi terhadap masalah yang menimbulkan kerugian Perusahaan; h. SPI tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan atau bertanggung jawab atas aktivitas yang direviu/diaudit. Tanggung jawab SPI terbatas pada pendapatnya terhadap aktivitas yang direviu/diaudit; dan i. VP SPI harus menolak penugasan konsultasi, memberikan saran, maupun penugasan jika tidak ada auditor yang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan tersebut.	a. Access all relevant information about the Company, among others, the records, employees, resources and funds, as well as other Company assets including requesting information or explanations on all officers/workers relating to the performance of the duties and functions of SPI without limitation; b. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee and members of the Board of Directors/Commissioners/ Audit Committee; c. Establish the scope of audit and implement the audit techniques required to achieve the audit objectives; d. Soliciting or obtaining assistance from experts/professionals, if deemed necessary, both from within and outside the Company; e. Conduct meetings periodically and incidental to the Board of Directors, BOC and/or the Audit Committee; f. Coordinate with external auditors and other supervisory institutions; g. Conduct investigative activities against problems that cause Company losses; h. SPI does not have the authority to implement or be responsible for the activities that are reviewed/audited. SPI's liability is limited to his or her opinion on the activity being reviewed/audited; and i. VP SPI must reject the assignment of consultation, advise, or assignment if there is no auditor who has the knowledge, skills, or competence required in carrying out all or part of the assignment.

KODE ETIK AUDITOR INTERNAL

Internal Auditor Code of Ethics

Kode Etik SPI mengadopsi *Code of Ethics* yang diterbitkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA), yang berlaku secara internasional, meliputi empat prinsip yaitu:

a. Prinsip Integritas

SPI harus membangun kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pengawasan agar output SPI dapat diandalkan untuk mengambil keputusan, untuk mewujudkan hal tersebut, Auditor wajib:

- 1) Melaksanakan tugasnya secara jujur, cermat, dan bertanggungjawab;

The SPI code of conduct adopts the *Code of Ethics* issued by the Institute of Internal Auditors (IIA), which is applicable internationally, including the following four principles:

a. Integrity Principles

SPI must build trust from interested parties on surveillance results in order for the output of SPI to be relied upon to make the decision, in order to achieve this, the Auditor shall:

- 1) Carry out its duties honestly, thoughtfully, and responsibly;



- 2) Mempelajari dan menarik simpulan hasil pengawasan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Tidak terlibat dalam kegiatan yang melawan hukum atau terlibat dalam tindakan yang dapat menjatuhkan nama profesi dan Perusahaan; dan
- 4) Taat dan memberi kontribusi pada pencapaian tujuan Perusahaan.

b. Prinsip Objektivitas

SPI harus menempatkan objektivitas profesional pada tempat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan yang sedang dikerjakan. Auditor harus melakukan penilaian secara berimbang dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun orang lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, auditor:

- 1) Tidak berpartisipasi atau memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi atau dinilai dapat mempengaruhi penilaian auditor, termasuk partisipasi atau hubungan yang dapat menimbulkan *conflict of interest*;
- 2) Tidak menerima apapun yang dapat mempengaruhi atau dinilai dapat mempengaruhi pertimbangan profesional; dan
- 3) Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan, dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang dikaji.

c. Prinsip Kerahasiaan

SPI dilarang menyebarkan informasi tanpa persetujuan pemilik informasi, kecuali apabila ada peraturan perundangan dan kewajiban profesional yang mengharuskannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Auditor:

- 1) Harus bijaksana dalam menggunakan dan mengamankan informasi yang diperoleh dalam penugasan, dan
- 2) Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau cara apapun yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau merugikan pencapaian tujuan Perseroan.

d. Prinsip Kompetensi

Auditor harus menerapkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan penugasan. Untuk mewujudkan hal tersebut:

- 1) Penugasan hanya diberikan kepada Auditor yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang sesuai;

- 2) *To learn and withdraw the results of supervision based on the prevailing laws and regulations;*
- 3) *Not engage in activities that are against the law or engage in acts that may impose a profession and Company name; and*
- 4) *Obey and contribute to the achievement of the Company objectives.*

b. Objectivity Principles

SPI must place professional objectivity at the highest place in collecting, evaluating, and reporting the activities in progress. Auditors should make assessments in a balanced sense by taking into consideration various relevant factors without being influenced by personal interests or others. To achieve this, auditors:

- 1) *Not participating or having any relationship that may affect or be assessed may affect the auditor's judgment, including any participation or relationship that may result in a conflict of interest;*
- 2) *Not accepting any that may affect or be assessed may affect professional consideration; and*
- 3) *Must disclose all the facts of the material he knows, which if not disclosed, may distort the report on the activity being studied.*

c. Confidentiality Principles

SPI is prohibited from spreading information without the consent of the owner of the information, except where applicable legislation and professional obligations require it. To achieve this, Auditors:

- 1) *Should be prudent in using and securing the information obtained in the assignment, and*
- 2) *Not use the information for personal interests or any means contrary to the prevailing regulations or harm the achievement of the Company's objectives.*

d. Competency Principles

Auditors must implement the necessary knowledge, expertise, and experience in carrying out assignments. To achieve this:

- 1) *Assignments are given only to Auditors with appropriate knowledge, expertise, and experience;*

- 2) Auditor melaksanakan penugasan sesuai standar audit yang berlaku; dan
- 3) Auditor senantiasa mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hasil penugasan.

- 2) Auditors perform assignments in accordance with applicable audit standards; and
- 3) Auditors continuously develop the ability to improve the effectiveness and quality of the assignment results.

PROGRAM KERJA SATUAN PENGAWASAN INTERN

SPI Unit Programs

Berdasarkan Standar International Praktik Profesional Audit Internal nomor 2010 tentang Perencanaan menyatakan bahwa:

1. Kepala Audit Internal harus mengelola aktivitas Audit Internal secara efektif untuk meyakinkan bahwa aktivitas tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.
2. Kepala Audit Internal harus menyusun perencanaan berbasis risiko (*risk-based plan*) untuk menetapkan prioritas kegiatan aktivitas audit internal sesuai dengan tujuan organisasi.
3. Perencanaan penugasan sebagai aktivitas audit internal harus didasarkan atas penilaian risiko yang terdokumentasikan, yang dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.
4. Masukan dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris harus diperhatikan dalam proses tersebut. Kepala Audit Internal harus mengidentifikasi dan mempertimbangkan harapan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan pemangku kepentingan lain untuk menyusun opini dan kesimpulan lain Audit Internal.
5. Kepala Audit Internal harus mempertimbangkan penerimaan rencana penugasan konsultasi berdasarkan potensi peningkatan pengelolaan risiko, nilai tambah, dan peningkatan kegiatan operasional yang dapat diberikan dari penugasan tersebut. Penugasan yang diterima harus tercakup dalam perencanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas disusun program kerja unit SPI PT KCI tahun 2020 yang meliputi program audit dan program non audit.

Program Audit

Perencanaan kegiatan audit untuk tahun anggaran 2020 disusun dengan fokus pada sasaran audit yang mempunyai risiko signifikan dan berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan Perusahaan.

Based on the Professional Practice of Internal Audit International Standards number 2010 on planning states that:

1. The head of Internal Audit should effectively manage Internal Audit activities to ensure that such activities provide added value to the organization.
2. The head of Internal Audit should develop risk-based plan to establish priority activities of internal audit activities in accordance with the objectives of the organization.
3. The assignment planning as an internal audit activity shall be based on the documented risk assessment, conducted at least once a year.
4. Input from the Board of Directors and Board of Commissioners must be considered in the process. The head of Internal Audit must identify and consider the expectations of the Board of Directors, the Board of Commissioners and other stakeholders to arrange the opinions and other conclusions of Internal Auditors.
5. The Head of Internal Audit should consider the acceptance of a consultation assignment plan based on potential increased risk management, value added, and increased operational activities that can be given from the assignment. Accepted assignments must be covered in planning.

In relation with the above, the working program of SPI unit in 2020 includes audit and non-audit program.

Audit Program

Planning audit activities for the fiscal year 2020 is structured with a focus on audit objectives that have a significant risk and negatively impact the achievement of the Company's objectives.



Pada tahun 2020, program audit disusun berdasarkan hasil prediksi dan identifikasi risiko-risiko serta pengalaman audit sebelumnya yang terkait dengan pencapaian program strategis Perusahaan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 dan menginventarisir hasil audit eksternal (BPK, KAP, SPI PT KAI) tahun sebelumnya yang kemudian menentukan Objek Audit.

Dengan demikian diharapkan penerapannya akan lebih efektif dan efisien serta memberi nilai tambah bagi pencapaian tujuan Perusahaan.

1. Sasaran Audit Tahun 2020

Sasaran Audit yang ditetapkan mengacu pada:
Maksud dan Tujuan Perusahaan, yaitu:

- Melakukan usaha di bidang transportasi pada umumnya, khususnya di bidang perkeretaapian dengan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di wilayah Jabodetabek yang meliputi usaha pengangkutan orang dengan kereta api dan usaha non angkutan penumpang dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas;
- Hasil temuan audit eksternal, yaitu temuan-temuan BPK, KAP dan SPI PT KAI; dan
- Hasil pengalaman audit di tahun sebelumnya.

2. Sasaran Audit Tahun 2020

Dari hasil prediksi dan identifikasi Program RKAP tahun 2020 PT KCI dan temuan-temuan hasil audit internal dan eksternal tahun sebelumnya maka pada tahun 2020 ditetapkan 4 (empat) fokus audit, yaitu:

- Tata Kelola dan Pengadaan Barang dan Jasa Unit Sekretaris Perusahaan;
- Tata Kelola Awak KA dan Operasi Sarana;
- Tata Kelola dan Pengadaan Barang dan Jasa Unit Keamanan dan Keselamatan; dan
- Tata Kelola dan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Unit Logistik.

Rincian materi audit dari masing-masing fokus audit ditetapkan sebagai berikut:

In 2020, the audit program structured based on predictions results, risks identification, and previous audit experience related to the achievement of the Company's strategic program as contained in the work plan and Company budget (RKAP) year 2020 and to audit the results of external audits (BPK, KAP, SPI PT KAI) in the previous year which then determine the Audit object.

Those expected application will be more effective and efficient and provide added value for the achievement of the Company's objectives.

1. Audit Objectives in 2020

The specified Audit objective refers to:

The Company's Target and Objectives, namely:

- Conducting business in the field of transportation in general, especially in the field of railways by providing high quality goods and/or services and strong competitiveness in the greater Jakarta area which includes transporting people with trains and non passenger transport business by applying the principles of limited liability Company;*
- Findings of external audit, namely findings of BPK, KAP and SPI PT KAI; and*
- Audit findings in the previous year.*

2. Audit Focus in 2020

From the prediction results, identification of the RKAP Program in 2020, and the findings of internal and external audit of the previous year, the Company set 3 (three) audit focus, namely:

- Governance & Procurement of Goods and Services for Corporate Secretary.*
- Governance of Railway Crew and Facility Operations;*
- Governance and Procurement of Goods and Services Security and Safety Unit; and*
- Governance and Procurement Process of Goods and Services Logistics Unit.*

The audit material of each audit focus are set as follows:

No.	Objek Audit Audit Objects	Tujuan Audit Audit Target
1.	Tata Kelola dan Pengadaan Barang dan Jasa Unit Sekretaris Perusahaan. <i>Governance and Procurement of Goods and Services for Corporate Secretary Unit.</i>	a. Penyusunan RAB, spesifikasi dan justifikasi kebutuhan b. Proses dan prosedur pelaksanaan pengadaan c. Evaluasi penggunaan UMOS dan pertanggungjawabannya d. Pengelolaan Griya Karya e. Pengelolaan barang inventaris f. Penanganan excess klaim g. Proses, hasil serta efektivitas MCU h. Proses pengadaan obat dan distribusinya i. Pengelolaan Poskes a. Preparation of RAB, specifications and justification of needs b. Procurement process and procedures c. Evaluation of UMOS use and its accountability d. Griya Karya Management e. Inventory management f. Handling excess claims g. MCU process, results and effectiveness h. The process of drug procurement and distribution i. Health Post Management
2.	Tata Kelola Awak KA dan Operasi Sarana. <i>Governance of Railway Crew and Facility Operations.</i>	a. Pelaksanaan pembayaran premi awak KA/Emolumen b. Kinerja operasi sarana c. Sertifikasi kecakapan awak KA d. Tata kelola dinasan awak KA e. Pengadaan barang & jasa f. Evaluasi perjalanan KA a. Implementation of premium payment for train crew/Emolumen b. Facility operation performance c. Train crew proficiency certification d. Administration of the train crew e. Procurement of goods & services f. Train trip evaluation
3.	Tata Kelola dan Pengadaan Barang dan Jasa Unit Keamanan dan Keselamatan. <i>Governance and Procurement of Goods and Services Security and Safety Unit.</i>	a. Penyusunan RAB, spesifikasi dan justifikasi kebutuhan b. Proses dan prosedur pelaksanaan pengadaan c. Evaluasi penggunaan UMDS dan pertanggungjawabannya d. Evaluasi realisasi pengadaan e. Standar keselamatan minimum di stasiun dan di atas KA f. Evaluasi pengamanan di stasiun dan atas KA a. Preparation of RAB, specifications and justification of needs b. Procurement process and procedures c. Evaluation of UMDS use and its accountability d. Evaluation of procurement realization e. Minimum safety standards at stations and on trains f. Evaluation of security at stations and on trains



No.	Objek Audit Audit Objects	Tujuan Audit Audit Target
4.	Tata Kelola dan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Unit Logistik. <i>Governance and Procurement Process of Goods and Services Logistics Unit.</i>	a. Proses, prosedur, pelaksanaan dan evaluasi pengadaan, termasuk evaluasi vendor b. Review harga barang satuan c. Pengawasan <i>timeline</i> pengadaan barang dan jasa d. Manajemen dokumen pengadaan barang dan jasa e. Administrasi gudang
5.	Non-PKT	Sesuai permintaan Direksi <i>As requested by the Board of Directors</i>

Program Non-Audit

Program non audit meliputi kegiatan konsultasi, monitoring tindak lanjut, pengembangan kompetensi pegawai, *continuous auditing*, pendampingan auditor eksternal, penugasan non audit atas permintaan Direksi, dan penilaian atas efektivitas manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.

- Konsultasi**
Kegiatan pemberian advis (nasihat) dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati dengan klien, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, pengelolaan risiko, dan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab dari manajemen kepada auditor internal. Contohnya termasuk: pemberian nasihat, fasilitasi, dan pelatihan. Konsultasi dapat bersifat permintaan dari manajemen (*on call*).
- Monitoring Tindak Lanjut**
Monitoring tindak lanjut dilaksanakan untuk temuan yang berasal dari auditor eksternal maupun auditor internal. Penyusunan program pelaksanaan monitoringtindak lanjut disusun berdasarkan:
 - Laporan hasil audit SPI PT KAI, BPK, dan KAP; dan
 - Laporan Hasil Audit Internal SPI PT KCI.
- Pengembangan Kompetensi (*Capacity Building*)**
Pengembangan kompetensi meliputi antara lain program pendidikan dan pelatihan, *in house training* & penambahan wawasan. Program pendidikan dan pelatihan akan dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan atau sertifikasi audit yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), Institute of Internal Audit (IIA), Lembaga Pendidikan *Fraud Auditing* dan Lembaga pendidikan lainnya yang relevan dengan pelaksanaan

Non-Audit Program

Non-audit programs include consulting activities, followup monitoring, employee competency development, *continuous auditing*, External Auditor mentoring, nonaudit assignments on the Board of Directors' requests, and assessment of the effectiveness of risk management and internal control systems.

- Consultation**
The activities of advising (advice) and other services required by the client, whose nature and scope of his assignment have been agreed with the client, aimed at adding value and improving the process of organizational governance, risk management, and control, without the transfer of responsibility from management to internal auditors. Examples include: providing advice, facilitation, and training. Consultation can be request by management (*on call*).
- Follow-up Monitoring**
Follow-up Monitoring is implemented for findings derived from external auditors as well as internal auditors. The implementation of follow-up monitoring program is compiled based on:
 - Reports of the audit results of PT KAI, BPK, and KAP; and
 - Report on the results of SPI Internal Audit PT KCI.
- Capacity Building**
Competency development includes, among others, education and training programs, *in-house training* & additional knowledge. The education and training program will be carried out through education and training programs or audit certification organized by the Internal Audit Education Foundation (YPIA), the Institute of Internal Audit (IIA), the Fraud Auditing Education Institute and other educational institutions relevant to the implementation of

pekerjaan. Sedangkan *in house training* antara lain mengikuti seminar, lokakarya yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga/yayasan/konsultan yang memadai.

4. *Continuous Auditing*

Continuous Auditing (CA) adalah metode yang digunakan oleh auditor untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait audit secara lebih berkelanjutan atau terus-menerus. Rezaee et al. (2001) mendefinisikan *Continuous Auditing* sebagai "proses yang sistematis dari pengumpulan bukti audit elektronik sebagai dasar yang reasonable untuk mengeluarkan opini tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disiapkan dengan *Realtime Accounting System* dan *paperless*." Ruang lingkup CA akan diterapkan pada transaksi yang dicatat dalam sistem SAP antara lain pencatatan *Purchase Requisition* (PR), *Purchase Order* (PO), dsb. yang terkait proses pengadaan, pengelolaan suku cadang, perawatan sarana dan lain-lain. Output CA adalah laporan yang memuat penyimpangan, anomali, & verifikasi userserta rekomendasi perbaikan.

5. *Counterpart Auditor Eksternal*

Sebagai pendamping dalam pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu: BPK, KAP, SPI PT KAI dan pihak lainnya. SPI melakukan pendampingan dalam pelaksanaan Audit dimaksud baik di lingkungan kerja PT KCI dalam hal sebagai berikut:

- a. Membantu pengumpulan dan kelengkapan data Audit; dan
- b. Membantu kelancaran kegiatan pembahasan dan pelaksanaan audit dengan *auditee* serta manajemen.

6. *Penugasan Non-Audit atas Permintaan Direksi*

Pelaksanaan penugasan khusus ini dimaksud yaitu penugasan non audit atas permintaan Direksi sebagai contoh rapat-rapat terkait dengan peraturan undang-undang, rapat terkait dengan *Public Service Obligation* (PSO)/*Track Access Charge* (TAC) dan sebagainya. Untuk program atas penugasan non audit tersebut disesuaikan dengan permintaan Direksi.

7. *Penilaian atas Efektivitas Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern*

Penilaian atas efektivitas manajemen risiko akan dikoordinasikan dengan unit manajemen risiko dan disesuaikan dengan program kerja serta rencana kerja anggaran Perusahaan. Sedangkan untuk penilaian efektivitas sistem pengendalian intern akan berkoordinasi dengan unit GCG dalam hal hasil penilaian GCG oleh BPKP. Penilaian atas efektivitas manajemen risiko dan sistem pengendalian intern dapat mempergunakan jasa pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko dan sistem pengendalian.

the work. Meanwhile, *in-house training* includes attending seminars, workshops carried out by adequate institutions/foundations/consultants.

4. *Continuous Auditing*

Continuous Auditing is a method used by auditors to conduct activities related to auditing in a more sustainable or continuous manner. Rezaee et al. (2001) defines continuous auditing as a "systematic process of collecting electronic proof of audit as a reasonable basis to issue opinions on the fairness of financial reporting prepared with *realtime accounting system* and *paperless*." The scope of CA will be applied to transactions recorded in the SAP system, among others, registration of PR, PO, & GR related to procurement process, management of spare parts, maintenance of facilities and others. Output CA is a report that contains deviations, anomalies, & user verification as well as repair recommendations.

5. *Counterpart External Auditor*

As a companion in the implementation of audits conducted by external parties, namely: BPK, KAP, SPI PT KAI and other parties. SPI conducts assistance in the implementation of the Audit referred to both in the working environment of PT KCI in the following cases:

- a. Assisting the collection and completeness of Audit data; and
- b. Assisting the smooth discussion and audit activities with *auditee* and management.

6. *Non-Audit Assignment on the Board of Directors Request*

The implementation of this special assignment is a non-audit assignment at the request of the Board of Directors as an example of monitoring of budget absorption, meetings related to legislation, meetings related to *Public Service Obligation* (PSO)/*Track access Charge* (TAC) and so on. The program for the non-audit assignment is adjusted to the Directors' request.

7. *Assessment of the Effectiveness of Risk Management and Internal Control System*

Assessment of the effectiveness of risk management will be coordinated with the risk Management unit and tailored to the working program as well as the Company's budget work plan. As for the effectiveness assessment of internal control system will coordinate with GCG unit in the result of GCG valuation by BPKP. Assessment of the effectiveness of risk management and internal control system can use the services of external parties that have competence in the areas of risk management and control systems.



Tabel Program Kegiatan Unit SPI Tahun 2020 (Program Audit)
Table of SPI Unit Activities Program in 2020 (Audit Program)

No	Program	Realisasi Realization		Keterangan Description
		Kegiatan Activity	Waktu Period	
A	Pemeriksaan Terkait Tata Kelola Pengamanan di Stasiun dan Di Atas KA, & HSE. <i>Checks Regarding Security Governance at Stations and On Trains, & HSE.</i>	1) Audit Tata Kelola Pengamanan di Stasiun dan Di atas KA & HSE (SPTA No: 008/SPI/KCI/III/2020 Tanggal 20 Maret 2020) 2) Perpanjangan SPTA No. 001/SPI/ KCI/V/2020 Tanggal 7 Mei 2020 3) Perpanjangan SPTA No.015/SPI/KCI/VI/2020 Tanggal 5 Juni 2020 1) <i>Security Governance Audit at Stations and Above KA & HSE (SPTA No: 008/SPI/KCI/III/2020 Dated March 20, 2020)</i> 2) <i>Extension of SPTA No. 001/SPI/ KCI/V/2020 May 7, 2020</i> 3) <i>Extension of SPTA No.015/SPI/KCI/VI/2020 dated June 5, 2020</i>	TW I s.d TW IV <i>Quarter I to Quarter IV</i>	Selesai <i>Done</i>
	Pemeriksaan Terkait Tata Kelola Awak KA, Perencanaan & Operasi Sarana. <i>Inspection on Railway Crew Governance, Facility Planning & Operation.</i>	1) Audit Tata Kelola Awak KA, Perencanaan, & Operasi Sarana (SPTA No.009/SPI/KCI/III/2020 tanggal 20 Maret 2020) 2) Perpanjangan SPTA No.010/SPI/KCI/V/2020 Tanggal 4 Mei 2020 3) Perpanjangan SPTA No.013/SPI/KCI/VI/2020/ Tanggal 1 Juni 2020 1) <i>Audit of Railway Crew Governance, Planning, & Facility Operation (SPTA No. 009/SPI/KCI/III/2020 dated March 20, 2020)</i> 2) <i>Extension of SPTA No.010/SPI/KCI/V/2020 on May 4, 2020</i> 3) <i>Extension of SPTA No.013/SPI/KCI/VI/2020/June 1, 2020</i>	TW I s.d TW IV <i>Quarter I to Quarter IV</i>	Selesai <i>Done</i>
	Pemeriksaan Terkait Tata Kelola Administrasi dan PBJ Pada Unit Sekretaris Perusahaan. <i>Examination Related to Administrative Governance and PBJ at the Corporate Secretary Unit.</i>	1) SPTA No.17/SPI/KCI/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 2) SPT Perpanjangan Tugas Audit No.22/SPI/ KCI/X/2020 Tanggal 1 Oktober 2020 1) <i>SPTA No.17/SPI/KCI/VIII/2020 dated August 31, 2020</i> 2) <i>SPT Extension of Audit Duty No.22/SPI/ KCI/X/2020 dated October 1, 2020</i>	TW III s.d TW IV <i>Quarter III to Quarter IV</i>	Konsep LHP <i>LHP Concept</i>

No	Program	Realisasi Realization		Keterangan Description
		Kegiatan Activity	Waktu Period	
	Pemeriksaan Terkait Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Logistik. <i>Examination Related to Goods and Services Procurement Governance at the Logistics Unit.</i>	1) SPTA No.18/SPI/KCI/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 2) SPT Perpanjangan Tugas Audit No.23/SPI/KCI/X/2020 Tgl 1 Oktober 2020; 3) SPT Perpanjangan Tugas Audit No.27/SPI/KCI/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020 1) SPTA No. 18/SPI/KCI/VIII/2020 dated 31 August 2020 2) SPT Extension of Audit Duty No.23/SPI/KCI/X/2020 dated October 1, 2020; 3) SPT Extension of Audit Duty No.27/SPI/KCI/XII/2020 Dated 28 December 2020	TW III s.d TW IV Quarter III to Quarter IV	Konsep LHP Konsep LHP
B	Konsultasi <i>Consultation</i>	1) Konsultasi Terkait Pengadaan dalam Rangka Penanganan Penyebaran Corona Disaese (COVID-19) di Lingkungan PT KCI (SPT No.007/SPI/KCI/III/2020 Tanggal 17 Maret 2020 2) Konsultasi dan Pendampingan di lingkungan PT KCI (SPT No.19/SPI/KCI/III/2020 Tanggal 31 Agustus 2020) 1) <i>Consultation on Procurement in the Context of Handling the Spread of Corona Disease (COVID-19) within PT KCI (SPT No. 007/SPI/KCI/III/2020 March 17, 2020</i> 2) <i>Consultation and Assistance within PT KCI (SPT No.19/SPI/KCI/III/2020 dated 31 August 2020)</i>	TW I 2020- TW II 2020 Quarter I to Quarter II TW III s.d TW IV Quarter III to Quarter IV	Selesai Done
	Risk Based Audit (RBA)	1) Penyusunan Pedoman Risk Based Audit (RBA) di Lingkungan PT KCI (SPT No.21/SPI/KCI/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020) 1) <i>Preparation of Risk Based Audit (RBA) Guidelines within PT KCI (SPT No. 21/SPI/KCI/VIII/2020 dated 31 August 2020)</i>	TW III 2020 s.d TW IV 2020 Quarter III to Quarter IV	Dalam proses penyusunan pedoman Risk Based Audit (RBA). <i>In the process of preparing Risk Based Audit (RBA) guidelines.</i>
	Continuous Auditing	Continuous Audit (CA) di Lingkungan PT KCI 1) SPTA No.04/SPI/KCI/II/2020 tanggal 28 Februari 2) SPTA No.20/SPI/KCI/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 Continuous Audit (CA) in PT KCI 1) <i>SPTA No.04/SPI/KCI/II/2020 dated February 28</i> 2) <i>SPTA No.20/SPI/KCI/VIII/2020 dated August 31, 2020</i>	TW I 2020- TW IV 2020 Quarter I to Quarter IV	Continuous Audit Sedang Berjalan. <i>In the Continuous Audit process.</i>



No	Program	Realisasi Realization		Keterangan Description
		Kegiatan Activity	Waktu Period	
Counterpart Audit Eksternal		1) Counterpart KAP RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Surat Tugas KAP RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. 1451019/RHP/1113 tanggal 14 Oktober 2019)	Tw III 2019-TW II 2020	Selesai
		2) Counterpart Audit BPK RI (Surat BPK No: 63/ST/IX-XX.2/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019)	Tw IV 2019-TW II 2020	Selesai
		3) Counterpart SPI PT KAI (Persero) Audit Operasional Anak Perusahaan (PT KCI) (SPTA No. 38/UI/OP/IX/KA-2020 Tanggal, 24 September 2020	TW III 2020-TW IV 2020	Dalam proses pendampingan Audit
		1) Counterpart KAP RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Letter of Assignment KAP RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners No. 1451019/RHP/1113 dated October 14, 2019)	Quarter III to Quarter II	Done
		2) BPK RI Counterpart Audit (BPK Letter No: 63/ST/IX-XX.2/10/2019 dated 16 October 2019)	Quarter IV to Quarter II	Done
		3) Counterpart SPI PT KAI (Persero) Subsidiary Operational Audit (PT KCI) (SPTA No. 38/UI/OP/IX/KA-2020 Date, 24 September 2020	Quarter III to Quarter IV	In the audit assistance process
Penyerapan Anggaran Budget Absorption		Posisi s.d bulan Desember 2020 laporan realisasi penyerapan anggaran unit SPI sebesar 100%. Position up to December 2020 report on the realization of the budget absorption of the SPI unit by 100%	TW I-TW IV 2020 Quarter I to Quarter IV	Realisasi atas penyerapan anggaran bulan Desember 2020 sebesar Rp43.987.076,00 (100%). Realization of budget absorption in December 2020 amounted to Rp43,987,076.00 (100%)

REALISASI MONITORING TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN AUDIT EKSTERNAL DAN INTERNAL 2020

Realization of Follow-Up Monitoring On The Findings Of External And Internal Audit 2020

PROGRES TINDAK LANJUT AUDIT RUTIN AUDIT INTERNAL INTERNAL AUDIT ROUTINE FOLLOW-UP PROGRESS							Desember 2020 December 2020						Keterangan Description
No	LHA	Periode Period	No.LHA	Objek/Sasaran Audit Audit Object/Audit Target	Jumlah Temuan Total Findings	Rekomendasi Recommendation	Realisasi Rekomendasi Tindak Lanjut Realization of Follow Up Recommendations				Sisa Balance		
							BD	MDP	TOD	SR	Temuan Findings	Rekomendasi Recommendation	
1	SPI PT KCI	2019	05/ LHA/ SPI/ XI/2019	Operasional Pengadaan Barang & Jasa Unit Prasarana. <i>Operational Procurement of Goods & Services for Facilities Unit.</i>	10	26	Selesai Done				Selesai Done	26 Rekomendasi Telah Selesai Ditindaklanjuti <i>26 Recommendations were Followed Up Entirely</i>	
2		2020	01/ LHA/ SPI/ III/2020	Operasional & Kepatuhan Atas Tata Kelola Administrasi SDM. <i>Operations & Compliance with HR Administration Governance.</i>	5	18	Selesai Done				Selesai Done	18 Rekomendasi Telah Selesai Ditindaklanjuti <i>18 Recommendations were Followed Up Entirely</i>	
3		2020	02/ LHA/ SPI/ IV/2020	Tata Kelola Pengelolaan Pendapatan Angkutan Penumpang & Floating Money. <i>Passenger Transport Revenue Management & Floating Money.</i>	7	9	Selesai Done				Selesai Done	9 Rekomendasi Telah Selesai Ditindaklanjuti <i>9 Recommendations were Followed Up Entirely</i>	
4		2020	03/ LHA/SPI /X/2020	Tata Kelola Awak KA, Perencanaan & Operasi Sarana di Unit Operasi KA. <i>Train Crew Governance, Facility Planning & Operation in Railway Operations Unit.</i>	4	12	-	7	-	5	4	7	- 5 Rekomendasi Telah Selesai Ditindaklanjuti; - 7 Rekomendasi Masih Dalam Proses Tindak Lanjut; - 0 Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti - 5 Recommendations were Followed Up Entirely; - 7 Recommendations are in the Follow Up Process; - 0 Recommendation has not been followed up



MATRIKS PROGRES TINDAK LANJUT AUDIT RUTIN AUDIT EKSTERNAL MATRIX OF EXTERNAL AUDIT ROUTINE FOLLOW-UP PROGRESS							Desember 2020 December 2020							Keterangan Description
No	LHA	Periode Period	No.LHA	Objek/ Sasaran Audit Object/Audit Target	Jumlah Temuan Total Findings	Rekomendasi Recommendation	Realisasi Rekomendasi Tindak Lanjut Realization of Follow Up Recommendations					Sisa Balance		
							BD	MDP	TOD	DS	SR	Temuan Findings	Rekomendasi Recommendation	
A. BPK RI														
1	BPK	2017	01/PD TT/ PSOKAI/ TP/03 /2018	PSO PT KAI	5	7	-	-	-	4	3	3	4	- 4 Rekomendasi Telah Ditindaklanjuti dan Diusulkan Selesai - 3 Rekomendasi Telah Selesai Ditindaklanjuti - 4 Recommendations were Followed Up and Proposed to be Finalized; - 3 Recommendations were Followed Up
2	BPK	2018	45/ AUDITAMA VII/PD TT/ 05/2019	PSO PT KAI	2	3	-	-	-	1	2	1	1	- 1 Rekomendasi Telah Ditindaklanjuti dan Diusulkan Selesai - 2 Rekomendasi Telah Selesai Ditindaklanjuti - 1 Recommendation was Followed Up and Proposed to be Finalized; - 1 Recommendation was Followed Up
3	BPK	2019	20/ AUDITAMA VII/PD TT/ 6/2020	PSO PT KAI	5	7	-	1	-	6	-	5	7	- 6 Rekomendasi Telah Ditindaklanjuti dan Diusulkan Selesai; dan - 1 Rekomendasi Masih Dalam Proses Tindak Lanjut. - 6 Recommendation were Followed Up and Proposed to be Finalized; - 1 Recommendation is in the Follow Up Process
4	BPK	2017- SM I 2020	29/ AUDITAMA VII/PD TT.07/ 2020	KEPATUHAN	2	3	-	1	-	2	-	2	3	- 2 Rekomendasi Telah Ditindaklanjuti dan Diusulkan Selesai; dan - 1 Rekomendasi Masih Dalam Proses Tindak Lanjut - 2 Recommendation were Followed Up and Proposed to be Finalized; - 1 Recommendation is in the Follow Up Process

MATRIKS PROGRES TINDAK LANJUT AUDIT RUTIN AUDIT EKSTERNAL MATRIX OF EXTERNAL AUDIT ROUTINE FOLLOW-UP PROGRESS							Desember 2020 December 2020							Keterangan Description
No	LHA	Periode Period	No.LHA	Objek/ Sasaran Audit Object/Audit Target	Jumlah Temuan Total Findings	Rekomendasi Recommendation	Realisasi Rekomendasi Tindak Lanjut Realization of Follow Up Recommendations					Sisa Balance		
							BD	MDP	TOD	DS	SR	Temuan Findings	Rekomendasi Recommendation	
B. SPI PT KAI (Persero)														
1	SPI PT KAI	2019	42/UI/LHA/ UI.2/XI/2019	Audit Operasional Prasarana & Sarana Audit Operasional Prasarana & Sarana	5	12						Selesai Done		12 Rekomendasi Telah Selesai Ditindaklanjuti 12 Recommendation were Followed Up
2	SPI PT KAI	2018	07/UI/LHA/ UI.1/II/2019	Audit Operasional & Keuangan PT KCI Audit Operasional & Keuangan PT KCI	5	12						Selesai Done		12 Rekomendasi Telah Selesai Ditindaklanjuti 12 Recommendation were Followed Up
3	SPI PT KAI	2017	27/UI/LHA/ UI.1/X/2017	Audit Aktifitas Operasional Anak Perusahaan Audit Aktifitas Operasional Anak Perusahaan	12	24	-	1	-	2	21	2	3	- 21 Rekomendasi Telah Selesai Ditindaklanjuti; - 1 Rekomendasi Masih Dalam Proses Tindak Lanjut; dan - 2 Rekomendasi Telah Ditindaklanjuti dan Diusulkan Selesai; - 21 Recommendation were Followed Up - 1 Recommendation is in the Follow Up Process - 2 Recommendation were Followed Up and Proposed to be Finalized;



EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System Effectivity Assessment

Pada tahun 2020 Perseroan telah melakukan evaluasi pengendalian internal yang diimplementasikan di Perusahaan. Evaluasi dilakukan atas kecukupan penerapan pengendalian internal sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan karena Perusahaan bertanggung jawab dan konsisten untuk menerapkan dan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal secara memadai sehingga dapat memberikan keyakinan atas penyajian laporan keuangan dan laporan kegiatan. Pelaksanaan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan oleh Unit SPI berdasarkan pada 5 (lima) aspek pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta pemantauan. Di samping itu, KAP dalam pemeriksaannya juga melakukan audit dan memberikan pendapat atas kepatuhan terhadap sistem pengendalian internal.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian menjadi salah satu pertimbangan manajemen untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengendalian internal secara berkelanjutan.

In 2020, the Company conducted an evaluation of internal controls implemented in the Company. Evaluation is done on the adequacy of the implementation of internal control in accordance with the established work program. This is done due to the Company is responsible and consistent to implement and implement the Internal Control System adequately so as to provide confidence in the presentation of financial statements and activity reports. Implementation of evaluation of the effectiveness of internal control system conducted by SPI Unit based on 5 (five) control aspect, namely control environment, risk assessment, control activity, information and communication system and monitoring. In addition, the KAP in its audit also conducts audits and gives opinions on adherence to internal control systems.

The evaluation of the implementation of control system is one of management considerations to improve the internal control system continuously.

AKUNTAN PUBLIK

Public Accountant

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perusahaan dilakukan dengan melaksanakan audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 4 April 2020 yang menghasilkan keputusan bahwa KAP untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahun 2020 adalah KAP yang sama dengan PT KAI dan pemilihan dilakukan oleh PT KAI. Berdasarkan hasil RUPS PT KAI pada tanggal 14 Mei 2020 Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar dan Rekan ditunjuk sebagai Auditor Eksternal yang melakukan audit independen terhadap laporan Keuangan Perusahaan. KAP Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar dan Rekan telah memiliki izin dari Menteri Keuangan RI No 477/KM.1/2015.

Penunjukan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum

The supervisory function of the Company's financial aspect external audit is conducted by Public Accountant. Based on the results of the general Meeting of Shareholders (GMS) on April 4, 2019 which resulted in the decision that the KAP to audit the financial statement year 2020 is the same KAP with PT KAI and the election is conducted by PT KAI. Based on the results of the GMS of PT KAI on May 14, 2020, Public Accountants Firm KAP Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar dan Rekan were appointed as external auditors who conduct independent audits of the Company's financial statements. KAP Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar dan Rekan have had permission from the Minister of Finance RI No 477/KM. 1/2015.

The appointment has been in accordance with regulation of the Minister of Finance No.17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008 article 3 paragraph 1 which mentions that the provision of general

atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Penunjukan Akuntan Publik telah melalui serangkaian proses pengadaan jasa di Perusahaan yang dilakukan PT KAI, mulai dari mengundang beberapa KAP yang telah terdaftar di BPK dan berpengalaman dalam mengaudit untuk ikut dalam proses pengadaan jasa KAP sampai dengan proses persetujuan Dewan Komisaris dan Pelaporan Kepada Pemegang Saham. Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar dan Rekan telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2020:

1. Laporan Rugi Laba komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; serta
2. Melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian intern.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar dan Rekan melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institusi Akuntan Publik Indonesia dan standar pemeriksaan keuangan negara yang diterbitkan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

audit services of the financial statements of an entity is carried out by the longest KAP for 6 (six) consecutive books and by a Public Accountant longest for 3 (three) consecutive books. The appointment of Public Accountant has been through a series of services procurement process in the Company conducted by PT KAI, starting from inviting several KAP that has been registered in BPK and experienced in auditing to participate in the process of procurement of the KAP until the approval process of the Board of Commissioners and reporting to Shareholders. Public Accountant Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar and Rekan has audited the financial position report of the Company on December 31, 2020:

1. *Comprehensive profit loss report, equity change report and cash flow statement for the years ended December 31, 2020; and*
2. *Conduct tests on the Company's compliance to certain statutory regulations and internal controls.*

Public Accountant Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar dan Rekan conducted audits based on the standards of auditing established by Institusi Akuntan Publik Indonesia and the standard of State financial examination issued by Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

MEKANISME PENUNJUKKAN AKUNTAN PUBLIK

Public Accountant Appointment Mechanisms

Berikut adalah tahapan dalam menentukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Perusahaan yang dilakukan oleh PT KAI selaku induk Perusahaan:

1. Pengadaan auditor independen dimulai dengan penyusunan KAK oleh Unit SPI PT KAI dan Unit Keuangan PT KAI sebagai syarat utama administrasi pengadaan agar mendapat persetujuan dari komite audit PT KAI.
2. Unit Logistik PT KAI melakukan pengadaan auditor independen berdasarkan KAK yang disetujui Direktur Utama PT KAI, arahan Komite Audit PT KAI, dan ketentuan yg berlaku.
3. Unit Logistik PT KAI mengajukan tiga calon auditor independen yg terpilih kepada Direktur Utama dan kemudian diserahkan kepada Komite Audit PT KAI.
4. Komite Audit PT KAI dan unit keuangan PT KAI melakukan telaah dan evaluasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris PT KAI membahas pada Rapat Dewan Komisaris PT KAI.

Here are the steps in determining Public Accountant and Public Accountant Firm (KAP) Company conducted by PT KAI as the holding Company:

1. *The procurement of independent auditors began with the preparation of KAK by PT KAI SPI Unit and PT KAI Finance Unit as the main requirement of procurement administration in order to get approval from PT KAI Audit committee.*
2. *Logistic Unit of PT KAI conducting independent auditor based on KAK approved by President Director of PT KAI, the Audit Committee directive of PT KAI, and the applicable provisions.*
3. *Logistics Unit of PT KAI shall propose three independent auditors who are elected to the President Director and then handed over to the Audit Committee of PT KAI.*
4. *PT KAI Audit Committee and PT KAI's financial unit perform the study and evaluation to be submitted to the Board of Commissioners.*
5. *Board of Commissioners of PT KAI discussed at the Board of Commissioners meeting of PT KAI.*



6. Dewan Komisaris PT KAI mengirimkan surat kepada Pemegang Saham mengenai usulan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP). 7. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi salah satu agenda pada RUPS LPT PT KAI. 8. Unit Keuangan PT KAI menginformasikan kepada Unit Keuangan PT KCI perihal hasil penunjukan Kantor Akuntan Publik serta waktu pelaksanaan auditnya.	6. Board of Commissioners of PT KAI sent a letter to the shareholders regarding the proposed appointment of Public Accountant Firm (KAP). 7. Appointment of public accountant and Public Accountant Firm (KAP) to be one of the agenda at the LPT Meeting of PT KAI. 8. PT KAI Financial unit informs the PT KCI Financial unit regarding the results of the appointment of Public Accountant and the audit event.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN AKUNTAN PUBLIK

Public Accountant Work Scope

1. Melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan entitas anak Tahun Buku 2019 yang mencakup review Konsolidasian atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 2. Melakukan review atas Laporan Hasil Kinerja Perusahaan untuk Tahun Buku 2019 sesuai dengan Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011 (atau sesuai dengan ketentuan yang baru bila ada perubahan).	1. Conducting general Audit of the Company's consolidated financial statements and Subsidiaries for fiscal year 2019 which includes the consolidated review of the financial statements in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia. 2. Conducting review of the Company's performance results Report for 2019 in accordance with the copy regulation of the State-Owned Enterprises Minister No. PER-04/MBU/2011 Dated August 19, 2011 (or in accordance with the new provisions when there is a change).

Berikut adalah daftar Kantor Akuntan Publik yang 5 (lima) tahun terakhir melakukan audit di KAI Group termasuk PT KCI, adapun segala biaya audit yang ada dibayarkan oleh PT KAI selaku induk Perusahaan.

Below is a list of Public Accountant offices of the last 5 (five) years conducting an audit at KAI Group including PT KCI, as for all audit costs paid by PT KAI as the parent of the Company.

PERIODE AUDIT DAN BIAYA AUDIT

Audit Period And Audit Fees

No.	Tahun Year	Nama Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Biaya Audit Keseluruhan PT KAI dan Anak Perusahaan PT KAI and Subsidiaries Audit Cost	Hasil Opini Audit Auditor Opinion	Jasa Lain Yang Diberikan Other Services
1	2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan <i>Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners</i>	Rudi Hartono Purba	Rp3,712 miliar/ <i>billion</i>	Wajar Dalam Segala Hal Material <i>Reasonable in All Material Matters</i>	Tidak Ada None
2	2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan <i>Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners</i>	Rudi Hartono Purba	Rp3,908 miliar/ <i>billion</i>	Wajar Dalam Segala Hal Material <i>Reasonable in All Material Matters</i>	Tidak Ada None
3	2018	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan <i>Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Partners</i>	Benny Andria	Rp4,22 miliar/ <i>billion</i>	Wajar Dalam Segala Hal Material <i>Reasonable in All Material Matters</i>	Tidak Ada None
4	2017	Rama Wendra	Rama Gautama	Rp1,937 miliar/ <i>billion</i>	Wajar Dalam Segala Hal Material <i>Reasonable in All Material Matters</i>	Tidak Ada None
5	2016	Hadori Sugianto Adi dan Rekan <i>Hadori Sugianto Adi and Partners</i>	Theodorus Hirijanto	Rp2,91 miliar/ <i>billion</i>	Wajar Dalam Segala Hal Material <i>Reasonable in All Material Matters</i>	Tidak Ada None

JASA LAIN YANG DIBERIKAN AKUNTAN PUBLIK

Other Services Provided By Public Accountants

Pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia kepada PT Kereta Commuter Indonesia sebagai Akuntan Publik tidak memberikan jasa lain selain lingkup audit tersebut di atas.

The party appointed by PT Kereta Api Indonesia to PT Kereta Commuter Indonesia as Public Accountant did not provide services other than the scope of the above audit.



EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT EKSTERNAL

External Audit Implementation Effectiveness

Direksi secara aktif melakukan pemantauan tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan audit eksternal dalam setiap rapat koordinasi antara Direksi dengan satuan-satuan kerja terkait sehingga diharapkan di masa yang akan datang temuan serupa tidak akan terulang kembali. Selain itu, Direksi juga senantiasa aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan auditor eksternal agar pelaksanaan audit berjalan dengan efektif dan apabila terjadi kendala dalam objek pemeriksaan dapat segera dicari solusi dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada. Komite Audit melakukan kajian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal untuk memastikan pelaksanaan audit tidak menemui hambatan dan seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan.

The Board of Directors actively conducts monitoring of the findings of external audit checks in each coordination meeting between the Board of Directors and the related units that are expected in the future similar findings will not be repeated. In addition, the Board of Directors actively conducting coordination and communication with external auditors in order to implement the audit effectively and if there is an obstacle in the examination object can be immediately sought solution in addressing any existing problems. The Audit Committee conducts an assessment of the effectiveness of external audits to ensure that the audit does not meet barriers and all findings are actionable according to the stipulated authority.

TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT KAP

Follow-Up On Public Accountants Audit Findings

Tindak lanjut temuan audit KAP senantiasa dimonitoring untuk memastikan bahwa seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya dan memberikan nilai tambah bagi Perusahaan. Jumlah temuan audit oleh KAP untuk tahun 2018 tidak ada temuan dalam periode General Audit Tahun Buku 2018 begitu pula pada tahun 2019 tidak terdapat temuan. Tindak lanjut temuan audit KAP terkait jasa audit yang diberikan tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The findings of the Public Accountant Firm audit are continuously monitored to ensure that all such findings have been followed up entirely and provide added value to the Company. The number of audit finding by KAP and General Audit was zero finding. As such, there was no finding in 2019. The follow-up of KAP audit findings related to the audit services provided in 2018, 2019 and 2020 are as follows:

No.	LHA	Keterangan Description	Tahun Year	Temuan Findings	Rekomendasi Recommendation	Tindak Lanjut Follow-Up	Status
1	KAP Public Accountant	Kepatuhan Compliance	2020	0	0	0	Close

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Perusahaan dilakukan berdasarkan aturan PT KCI SK.032/CU/KCJ/IX/2017 Tentang Penetapan Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*). Dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 Tanggal 24 Agustus 2012 perihal Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN. Penerapan tersebut dilakukan oleh Perusahaan secara khusus pada aspek-aspek penting yang ada misalnya aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, Operasional, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. Penerapan sistem pengendalian internal sendiri dilakukan agar dapat mengurangi potensi risiko yang mungkin terjadi atas seluruh kegiatan yang dilakukan di Perusahaan.

Perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal dalam lingkup Perusahaan berdasarkan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh Perusahaan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen sampai dengan tingkat Staf. Setiap Perusahaan dapat dikatakan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif apabila tujuan Perusahaan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Sistem Pengendalian Internal wajib diterapkan agar kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dapat meningkat secara berkesinambungan, selain adanya pengendalian internal dapat menjamin tersedianya data laporan manajemen secara umum maupun keuangan secara cepat, tepat, lengkap dan sistematis serta memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan. Komitmen Perusahaan ini tertuang dalam kebijakan Sistem Pengendalian Internal yang disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama PT KCI.

Internal control systems are conducted under the rules of PT KCI SK. 032/CU/KCJ/IX/2017 on the establishment of Internal Control system Implementation Guidelines. and Regulation of the Minister of SOE number PER-09/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning the implementation of Good Corporate Governance practices in SOE. The implementation is carried out to important aspects that exist, particularly to human resources (HR), finance, operations, procurement of goods and services (BJP) and compliance with the prevailing rules. Implementation of internal control system to reduce potential risks may occur in all activities undertaken by the Company.

The Company implements internal control system within the Company's scope based on the guidelines that have been set by the Company and other regulations applicable in the Company from the Board of Commissioners, Directors, management up to the staff level. Each Company can be said to have an effective internal control system if the objectives of the Company can be achieved properly according to the target.

Internal control system must be applied so that adherence to the prevailing regulation can increase continuously, in addition to Internal control can ensure the availability of management report data in general and in a fast, precise, complete and systematic and have a high level of effectiveness and efficiency of all business activities of the Company. The Company's commitment is in the Internal control system policy passed by the President Director and President Commissioner of PT KCI.

KERANGKA KERJA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System Framework

Kebijakan dan pedoman sistem pengendalian internal Perusahaan mengacu kepada *Internal Control Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commision (COSO-IC)* adapun tujuan pelaksanaan dari penerapan pengendalian internal Perusahaan yaitu adanya efektivitas dan efisiensi dalam seluruh kegiatan Perusahaan, akuntabilitas atas pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum baik yang ditetapkan oleh Perseroan, PT KAI dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Selain itu Perusahaan juga menerapkan sistem *Three Lines of Defense* agar pengendalian internal dan juga pengelolaan risiko dapat berjalan dengan baik.

The Company's internal control system policies and guidelines refer to the Internal Control Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commision (COSOIC) for the purpose of implementing the Company's internal control, namely the effectiveness and efficiency of all the Company's activities, accountability for financial reporting and compliance with the laws established by the Company, PT KAI and other applicable laws and regulations. In addition, the Company also implements the Three Lines of Defense system for internal control and risk management can run properly.



Setiap Pimpinan unit beserta jajarannya harus bertindak selaku pemilik risiko (*Risk Owner*) dan pengendali risiko (*Risk Control*). Untuk itu setiap Unit sebagai Lini Pertahanan Pertama (*First Line Defense*) bertugas untuk merumuskan *Risk Register* di Unitnya masing-masing. Unit Manajemen Risiko, GCG, Kepatuhan, Pengawasan Anggaran sebagai Lini Pertahanan Kedua (*Second Line Defense*) berfungsi sebagai pengawas dalam penerapan manajemen risiko secara korporasi (*Risk Oversight*) dan merumuskan *Risk Register* yang bersifat strategis (*Strategic Risk Register*).

Unit SPI sebagai Lini Pertahanan Ketiga (*Third Line Defense*) berfungsi sebagai Auditor Internal yang bersifat objektif dan independen yang melakukan pengawasan terhadap Unit-Unit Kerja pada Lini Pertahanan Pertama dan Kedua (*Risk Owner & Control* dan *Risk Oversight*).

Secara umum komponen sistem pengendalian internal Perusahaan terdiri dari:

- a. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian merupakan susunan dari standar, proses dan struktur yang menyediakan dasar untuk terlaksananya pengendalian internal dalam organisasi.
- b. Pengendalian Risiko
Proses mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi untuk memberikan asuransi yang cukup untuk pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian dilaksanakan pada semua tingkatan organisasi pada berbagai tahap proses bisnis dan dalam konteks lingkungan teknologi.
- c. Kegiatan Pengendalian
Mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan.
- d. Informasi & Komunikasi
Organisasi memerlukan informasi demi terselenggaranya fungsi pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses *iterative* dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.

Each unit leader and its team must act as the Risk Owner and the risk Control. Therefore, each unit as a first Line Defense is tasked to formulate a Risk Register in their respective units. The Risk Management Unit, GCG, Compliance, Budget Monitoring as second Line Defense serves as the supervisor in the implementation of corporate risk management (Risk Oversight) and formulates the Strategic Risk Register.

SPI unit as third Line Defense serves as an objective and independent Internal Auditor that supervises the work units on the first and second line of defense (Risk Owner & Control and Risk Oversight).

In general, components of the Company's internal control system consist of:

- a. Area Control
The control environment is an arrangement of standards, processes and structures that provide the basis for the implementation of internal control within the organization.
- b. Risk Control
The process of identifying, assessing, managing, and controlling events or situations to provide adequate assurance for the achievement of organizational objectives. Control activities are implemented at all levels of the organization at various stages of the business process and in the context of technological environment.
- c. Control Activities
Includes measures established through policies and procedures to help ensure the implementation of management directives in order to minimize the risk of achieving the objectives.
- d. Information & Communications
Organizations need information for the implementation of internal control functions in support of achieving the objectives. The management must acquire, produce, and use relevant and qualified information, whether derived from internal or external sources to support other internal control components as appropriate. Communication as referred to in the COSO internal control framework is an iterative and ongoing process for obtaining, sharing, and providing information. Internal communications must be a means of dissemination of information within the organization, either from top to bottom, from the ground up, or cross functional.

e. Pemantauan

Kegiatan pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya yang dimaksudkan untuk memastikan tiap-tiap komponen pengendalian internal ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Evaluasi berkelanjutan dibangun di dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda-beda guna menyajikan informasi tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, bervariasi lingkup dan frekuensinya tergantung pada hasil penilaian risiko, efektivitas evaluasi berkelanjutan dan pertimbangan manajemen lainnya.

e. Monitoring

Monitoring activities include ongoing evaluation, separate evaluations, or a combination of both of which are intended to ensure that each component of the internal control exists and functions accordingly. Continuous evaluation is built in the business process at different levels to provide timely information. A separate evaluation is done periodically, varying in scope and frequency depending on the outcome of risk assessment, effectiveness of ongoing evaluation and other management considerations.

EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Evaluation of The Effectiveness of The Internal Control System

Selama tahun 2020, Perseroan telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan efektivitas pengendalian internal yang telah dilakukan oleh Perseroan baik secara administratif ataupun kegiatan operasional di lapangan.

During 2020, the Company has evaluated the implementation of internal control that has been done by the Company either administrative or operational activities in the field.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

DASAR PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Risk Management System Implementation Basis

Penerapan Manajemen Risiko di PT Kereta Commuter Indonesia berlandaskan dari Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

The implementation of risk management in PT Kereta Commuter Indonesia is based on the regulation of the Minister of State-owned enterprises number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOE.

Adapun penerapan Manajemen Risiko dituangkan dalam Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor SK.006.2/CU/KCJ/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Penerapan *Standard Operational Procedure* (SOP) Manajemen Risiko Investasi di Lingkungan PT KAI Commuter Jabodetabek, di mana sistem manajemen risiko masih difokuskan kepada risiko investasi/rencana kegiatan investasi Perseroan dan dengan demikian disebut dengan penerapan sistem manajemen risiko secara terpisah (silo).

The implementation of risk management is ratified through the decision of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia number SK.006.2/CU/KCJ/III/2017 dated March 15, 2017 concerning the implementation of *Standard Operational Procedure* (SOP) investment risk Management in PT KAI Commuter Jabodetabek, in which the risk management system is still focused on investment risk/investment plan and thus is called a segregated risk management system implementation.



Untuk pengelolaan risiko Perseroan ke depan akan menerapkan *Enterprise Risk Management* (ERM) berdasarkan ISO 31000:2018. Penerapan ERM direncanakan akan diimplementasikan secara bertahap mulai tahun 2020. Dengan menerapkan *Enterprise Risk Management* diharapkan dapat menjamin nilai tambah Perseroan.

For the Company's future risk management will implement Enterprise Risk Management (ERM) based on ISO 31000:2018. The ERM implementation is planned to be implemented gradually starting from 2020. This ERM is expected to ensure added value of the Company.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Organizational Structure

Dalam menjalankan fungsi manajemen risiko berada di bawah Unit Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko yang dibentuk pada tahun 2017 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-002/KC.J/DIR-HRD/2/2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Perseroan. Struktur Organisasi Unit Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko berada di bawah Direktorat Keuangan dan Administrasi sebagaimana pemutakhiran Struktur Organisasi dengan Nomor SK.002/KCI/DIR-HRD/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tercantum sebagai berikut:

In carrying out the function of risk management are under the strategic planning and risk management Unit established in 2017 through the Board of Directors Decree No.SK-002/KC.J/DIR-HRD/2/2017 dated February 1, 2017 on the establishment of organizational structure and governance in the Company's environment. The organizational structure of the strategic planning and risk management Unit is located under the Directorate of Finance and Administration as it updates the organizational structure with number SK.002/KCI/DIR-HRD/I/2018 dated January 15, 2018 listed as follows:

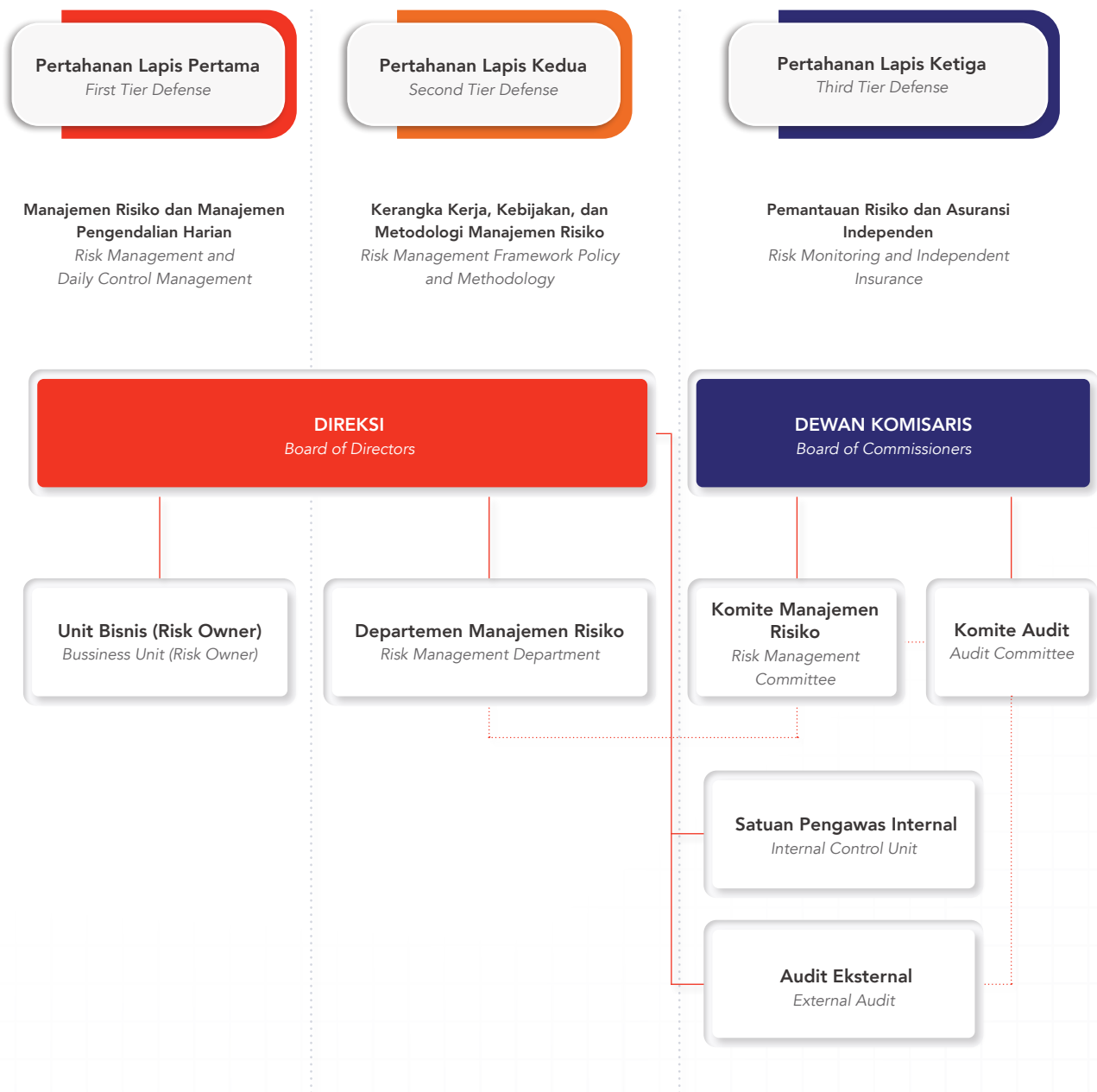


STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO

Risk Management Structure

PT Kereta Commuter Indonesia mengimplementasikan model tiga lini pertahanan (*Three Lines of Defense*) sebagai model penerapan manajemen risiko korporat sebagai berikut:

PT Kereta Commuter Indonesia implements *Three Lines of Defense* model as the following model of corporate risk management implementation:





1. Pertahanan Lapis Pertama dilaksanakan oleh unit bisnis/ kerja yang melakukan aktivitas operasional Perusahaan sehari-hari. Dalam hal ini unit bisnis/kerja melaksanakan aktivitas sebagai berikut:
 - a. Memastikan adanya lingkungan pengendalian (*control environment*) yang kondusif dan efektif di unit bisnis mereka, sebagai bentuk pengendalian risiko.
 - b. Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan serta berkontribusi dalam mengembangkan budaya pengelolaan risiko yang efektif.
 - c. Meminimalisir eksposur risiko dengan memastikan kendali dan mitigasi risiko dilaksanakan dengan efektif.
 2. Pertahanan Lapis Kedua dilaksanakan oleh Unit Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko sebagai unit kerja yang mendapat mandat serta kewenangan untuk menjadi koordinator penerapan manajemen risiko korporat di lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia. Dalam hal ini, Unit Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko melaksanakan aktivitas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, memantau, serta mengkaji penerapan manajemen risiko korporat secara keseluruhan.
 - b. Merumuskan, dan mengusulkan kepada Direksi untuk ditetapkan, serta memantau efektivitas dan relevansinya terhadap konteks yang berlaku pada PT Kereta Commuter Indonesia, berikut melakukan pembaruan Kebijakan, Pedoman, Prosedur, Kriteria Risiko, beserta perangkat kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses manajemen risiko.
 - c. Melakukan komunikasi dan konsultasi demi memfasilitasi unit bisnis/kerja dan atau Direksi dalam hal pelaksanaan proses manajemen risiko, serta ikut memantau, mengkaji, dan melaporkan risiko-risiko Perusahaan kepada Direksi (dan pihak lainnya atas sepengetahuan dan persetujuan Direksi), maupun efektivitas kerangka kerja, dan kebijakan manajemen risiko korporat, serta kriteria risiko yang digunakan.
 3. Pertahanan Lapis Ketiga dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal sebagai auditor internal, dan atau pihak eksternal independen/auditor/asesor eksternal. Dalam hal ini, Satuan Pengawas Internal melaksanakan aktivitas sebagai berikut:
 - a. Melakukan kajian dan verifikasi independen terhadap kesesuaian implementasi kerangka kerja, kebijakan, dan proses manajemen risiko yang dilakukan oleh unit bisnis/kerja.
 - b. Melaporkan hasil audit kepada para pihak yang berkepentingan, serta ikut dan memantau
1. *First Line Defense implemented by business/work units that perform daily operational activities. In this case, the business unit/work carries out the following activities:*
 - a. *Ensure a conducive and effective control environment in their business units, as a form of risk control.*
 - b. *Implement predefined risk management policies and contribute to developing a culture of effective risk management.*
 - c. *Minimize risk exposure by ensuring effective control and risk mitigation is implemented.*
 2. *Second Line Defense implemented by Strategic Planning and Risk Management Unit as a working unit that has been mandated and authorized to be the coordinator of implementation of corporate risk management in PT Kereta Commuter Indonesia environment. In this case, the strategic planning and risk management Unit carries out the following activities:*
 - a. *Implement, coordinate, develop, monitor, and review the implementation of corporate risk management as a whole.*
 - b. *Formulating, and proposing to the Board of Directors to be established, as well as monitoring its effectiveness and relevance to the context prevailing at PT Kereta Commuter Indonesia, following the renewal of the policies, guidelines, procedures, risk criteria, and the working devices required in the execution of the risk management process.*
 - c. *Conducting communication and consultation to facilitate business/work unit and/or Board of Directors in the implementation of risk management process, and also to monitor, review and report the Company's risks to the Board of Directors (and other Parties to the Board of Directors' knowledge and approval), as well as the effectiveness of the framework, and the corporate risk management policy and risk criteria.*
 3. *Third Line defense implemented by Internal Monitoring Unit as internal auditor, and or external party Independent/ auditor/external assessor. In this case, the Internal Monitoring Unit carries out the following activities:*
 - a. *Conducting independent review and verification of the conformity implementation of frameworks, policies and risk management processes conducted by business/work units.*
 - b. *Report the audit results to the parties concerned, and participate in and monitor the implementation*

pelaksanaan rekomendasi perbaikan atas hasil audit yang dilaksanakan oleh unit bisnis/kerja.

- c. Ikut melakukan komunikasi dan konsultasi kepada unit bisnis/kerja dalam hal mengidentifikasi peluang pengembangan dan atau perbaikan/peningkatan efektivitas pengelolaan risiko, serta ikut memantau dan mengkaji efektivitas kerangka kerja, dan kebijakan manajemen risiko korporat, serta kriteria risiko yang digunakan dalam penerapan manajemen risiko korporat, serta memberikan usulan pengembangannya kepada Unit Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko.

Dalam pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Perseroan, peranan Dewan Komisaris melalui Komite Manajemen Risiko berada di sektor ini yang berkoordinasi dengan Unit Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko.

of improvement recommendations on the results of audits carried out by business/work units.

- c. To conduct communication and consultation to business unit/work in identifying development opportunities and or improvement/enhancement of risk management effectiveness, as well as monitoring and reviewing the effectiveness of frameworks, and corporate risk management policies, as well as the risk criteria used in implementing corporate risk management, as well as providing proposed development to Strategic Planning Unit and Risk Management..

In the implementation of risk management in the Company's environment, the role of the Board of Commissioners through the Risk Management Committee is located in this sector which coordinates with Strategic Planning and Risk Management Unit.

PROFIL VP MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Vice President Profile



Santoswana

GCG, Risk Management,
Compliance & Legal

Kewarganegaraan Nationality	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	48/Bandung, 15 Mei 1972 48/Bandung, May 15, 1972
Riwayat Pendidikan Educational History	S2 Hukum, Universitas Indonesia-2010 Master of Law, University of Indonesia-2010
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK-103/KCI/DIR-HRD/88/XI/2020 Tanggal 1 Desember 2020 Decision Letter of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK-103/KCI/DIR-HRD/88/XI/2020 Dated December 1, 2020
Pengalaman Kerja Work Experience	- Vice President Governance, Risk, Compliance (GRC) and Legal (Desember 2020-sekarang) - Vice President Hukum dan Kepatuhan (April 2019-November 2020) - Vice President SPI (Juni 2016-April 2019) - GM Hukum dan Kepatuhan (Juli 2013-Juni 2016) - Vice President Governance, Risk, Compliance (GRC) and Legal (Desember 2020-present) - Vice President of Law and Compliance (April 2019-November 2020) - Vice President of SPI (June 2016-April 2019) - GM of Law and Compliance (July 2013-June 2016)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak ada None
Afiliasi Affiliation	Tidak mempunyai afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
Domisili Domicile	Depok, Jawa Barat Depok, West Java



Peran dan Tanggung Jawab VP Governance, Risk, Compliance (GRC) and Legal

Roles and Responsibilities of VP Governance, Risk, Compliance (GRC) and Legal

1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi strategi dan kebijakan mengenai penyusunan dan sosialisasi RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) dan KPI Corporate Tahunan.	1. <i>Formulating, coordinate and evaluate strategies and policies on the preparation and socialization of RJPP (long term Company plan) and annual Corporate KPI.</i>
2. Menyusun Laporan Manajemen, Laporan KPI Perusahaan dan Laporan Kinerja Perusahaan.	2. <i>Compiling management reports, Company KPI Reports, and Company performance reports.</i>
3. Merumuskan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi strategi dan kebijakan mengenai penyusunan dan sosialisasi SOP Manajemen Risiko terkait investasi.	3. <i>Formulating, coordinating and evaluating strategies and policies regarding the preparation and socialization of the investment-related risk management SOP.</i>
4. Menyelenggarakan assessment risiko Perusahaan seperti RJPP dan RKAP, serta assessment risiko investasi Perusahaan yang diajukan oleh Unit-Unit terkait.	4. <i>Conducting risk assessment of the Company such as RJPP and RKAP, as well as the risk assessment of the Company's investments filed by the relevant units.</i>
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi investasi Perusahaan.	5. <i>Monitoring and evaluation of the realization of the Company's investments.</i>
6. Melakukan pemantauan dan membuat laporan tindak lanjut mitigasi risiko hasil asesmen risiko investasi dari unit terkait investasi.	6. <i>Monitoring and creating a follow-up report on risk mitigation of investment risk assessment results from investment related units.</i>
7. Menyelenggarakan sosialisasi dan kegiatan <i>capacity building</i> perencanaan strategis dan manajemen risiko di Perusahaan.	7. <i>Conducting socialization and activities of strategic planning and risk management in the Company.</i>
8. Menyusun dan menyampaikan laporan pekerjaan kepada atasan.	8. <i>Compiling and deliver work report to superiors.</i>
9. Mengevaluasi rencana kerja dan laporan pekerjaan bawahan.	9. <i>Evaluating work plans and reports of subordinate work.</i>
10. Melakukan integrasi dan mengkoordinasikan seluruh Unit Kerja di bawah tanggung jawabnya.	10. <i>Integrating and coordinate the entire Unit of work under its responsibility.</i>

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Implementation

Kebijakan Manajemen Risiko

PT KCI dalam mengelola risiko mengacu pada Kebijakan Direksi Nomor SK.006.2/CU/KCJ/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Penerapan *Standard Operational Procedure* (SOP) Manajemen Risiko Investasi di Lingkungan PT KAI Commuter Jabodetabek di mana di dalamnya menjabarkan mengenai Prosedur yang akan diterapkan dalam proses manajemen risiko termasuk di dalamnya mengenai asesmen risiko hingga *Monitoring* dan evaluasi.

Risk Management Policy

In managing risk, the Company refers to the Board of Directors' Policy Number 006.2/CU/KCJ/III/2017 dated March 15, 2017 on the implementation of the Standard Operational Procedure (SOP) of investment risk management in PT KAI Commuter Jabodetabek environment where in it describes the procedures to be applied in the risk management process including the risk assessment to the Monitoring and evaluation.

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN UPAYA MITIGASI RISIKO

Risks Encountered by The Company and Risk Mitigation Measures

Untuk melengkapi implementasi atas penerapan ERM, PT KCI melakukan penyusunan *Top Ten Risk* yang telah diidentifikasi dari risiko-risiko tahun 2019 hingga tahun 2020.

Penetapan *Top Ten Risk* dilakukan melalui pendekatan *bottom-up* dan *top-down*. *Bottom-up* yaitu dengan memilih risiko yang memiliki level risiko yang tinggi, selanjutnya dilakukan pendekatan *top-down* yaitu meminta aspirasi dari BOD-BOC dalam menentukan risiko yang dianggap prioritas untuk ditindaklanjuti mitigasinya. Penetapan *Top Ten Risk* merupakan potensi-potensi risiko yang perlu mendapat perhatian utama yang dampaknya cukup signifikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan dapat mempengaruhi pencapaian Perseroan.

Pemilihan risiko-risiko ini telah melalui proses rating dan merupakan risiko yang masih relevan dan diselaraskan dengan sasaran korporasi dan sasaran unit. Dengan adanya *Top Ten Risk* ini diharapkan dapat dilakukan mitigasi serta pemantauan secara intensif baik oleh BOD dan BOC. Berikut *Top Ten Risk* tahun 2019-2020:

To complement the implementation of ERM, PT KCI has compiled the *Top Ten Risks* that have been identified from the year 2019 to 2020.

The *Top Ten Risk* is determined through a *bottom-up* and *top-down* approach. *Bottom-up* is carried out by choosing a risk that has a high level of risk, then a *top-down* approach is carried out by asking for aspirations from the BOD-BOC in determining the risk that is considered a priority to be mitigated. *Top Ten Risks* are potential risks that need to be highly anticipated due to its significant impact, both qualitatively and quantitatively, and could affect the Company's achievement.

The determination of these risks has gone through a rating process, it is relevant, and aligned with corporate and unit targets. This *Top Ten Risks* expected to ease the BOD and BOC in determining intensive mitigation and monitoring. The following are the *Top Ten Risks* for 2019-2020:

No.	Kategori Risiko <i>Risk Category</i>	Persentase <i>Percentage</i>
1.	Risiko Strategis <i>Strategic Risk</i>	20%
2.	Risiko Operasional <i>Operational Risk</i>	30%
3.	Risiko Finansial <i>Financial Risk</i>	40%
4.	Risiko Keselamatan dan Lingkungan <i>Environment and Security Risk</i>	10%
	Jumlah <i>Total</i>	100%

- Risiko Strategis merupakan risiko yang dihadapi perusahaan yang berhubungan dengan strategi perusahaan, termasuk di dalamnya politik dan ekonomi nasional, regulasi dan kondisi pasar global. Adapun risiko strategis yang dihadapi oleh PT KCI yaitu mengenai pengoperasian Railink Basoetta dan koreksi PSO.
- Risiko Operasional merupakan risiko yang berhubungan dengan sistem penyelenggaraan organisasi perusahaan, yang dapat disebabkan oleh tidak memadainya/kegagalan

- Strategic risk is related to the Company's strategy, including national politics and economics, regulations and global market conditions. PT KCI faces this risk due to the operation of Railink Basoetta and PSO correction.*
- Operational Risk is related to the Company's organizational management system, which can be caused by inadequate/failure of internal processes, systems, technology and*



proses internal, sistem, teknologi dan orang. Dari *Top Ten Risk* PT KCI tahun 2019 hingga tahun 2020 terdapat beberapa risiko operasional yang muncul yaitu mengenai stabling KRL, keterlambatan KA, sarana KRL, dan pengalihan SDM.

3. Risiko Finansial adalah risiko yang berhubungan dengan aspek keuangan perusahaan. Risiko finansial yang dihadapi perusahaan meliputi adanya risiko atas pengalihan bisnis, terganggunya *cashflow* akibat pandemi, dan mengenai penyertaan modal.
4. Risiko Keselamatan & Lingkungan merupakan risiko yang berhubungan dengan aspek keselamatan (misalnya keselamatan perka, keselamatan kerja, dll) serta berhubungan dengan pencemaran lingkungan. Risiko tersebut yaitu mengenai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

people. From the Top Ten Risks of PT KCI in 2019 to 2020, there are several operational risks, namely KRL stabling, train delays, KRL facilities, and HR transfer.

3. *Financial Risk is related to the financial aspects of the Company, it include the risk of business transfer, disruption of cash flow due to the Pandemic, and regarding capital participation.*
4. *Safety & Environment risk is a risk related to safety aspects, such as safety perka, work safety, etc.) as well as related to environmental pollution. The risk is regarding the Waste Water Treatment Plant (WWTP).*

MITIGASI RISIKO

Risk Mitigation

a. Risiko Strategis

Dalam memitigasi risiko strategis yang dihadapi perusahaan, langkah yang dilakukan oleh PT KCI mengenai risiko pengoperasian Railink Basoetta yaitu dengan melakukan pengurusan izin serta berkoordinasi dengan PT KAI dan Kemenhub dalam proses pengurusan izin tersebut. Sedangkan dalam risiko atas koreksi PSO, PT KCI melakukan usulan atas perubahan PM 17 Tahun 2018.

b. Risiko Operasional

Untuk mengatasi risiko operasional perusahaan tersebut, PT KCI melakukan langkah dengan melakukan monitoring atas kebutuhan stabling, melakukan rekayasa pola operasi akibat adanya kekusutan PerKA, menerapkan kerjasama *Long Term Part Agreement* dan menyusun *Man Power Planning*.

c. Risiko Finansial

Untuk mengatasi risiko yang muncul akibat pengalihan bisnis yaitu dengan melakukan langkah strategis berupa usulan untuk skema PSO dan untuk risiko terganggunya *cash flow* yaitu dengan melakukan revisi RKAP dengan menetapkan skala prioritas, melakukan addendum PSO dan melakukan perjanjian KMK dengan Lembaga Keuangan Nasional.

d. Risiko Keselamatan & Lingkungan

Atas risiko yang ditimbulkan dari risiko atas keselamatan & lingkungan, perusahaan melakukan mitigasi dengan melakukan pembangunan serta implementasi IPAL di lingkungan Depo.

a. Strategic Risk

In mitigating the strategic risks faced by the Company, PT KCI regarding the operational risks of Railink Basoetta are to manage permits and coordinate with PT KAI and the Ministry of Transportation in the process of obtaining these permits. While in the risk of PSO correction, PT KCI made a proposal for the amendment of PM 17 of 2018.

b. Operational Risk

To overcome the Company's operational risks, PT KCI took steps by monitoring the stabling needs, engineering the operating pattern due to the confusion of PerKA, implementing the Long Term Part Agreement cooperation and compiling Man Power Planning.

c. Financial Risk

To overcome the risks arising from the transfer of business, namely by taking strategic steps in the form of proposals for the PSO scheme and for the risk of disrupting cash flow, namely by revising the RKAP by setting priorities, making addendums to PSO and entering into KMK agreements with National Financial Institutions.

d. Safety & Environmental Risk

For the risks arising from risks to safety & the environment, the company mitigates by developing and implementing WWTPs within the Depot.

SOSIALISASI MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Socialization

Untuk meningkatkan kesadaran atas manajemen risiko, unit Manajemen Risiko melakukan beberapa kegiatan yaitu:

1. Melakukan sosialisasi dan pengenalan ERM kepada para calon pegawai.
2. Mengikutsertakan Risk Owner dalam sertifikasi Manajemen Risiko

To raise awareness of risk management, the risk Management unit performs several activities:

1. Conducting the socialization and introduction of ERM to prospective employees.
2. Involve risk Owner in risk management certification.

TANGGUNG JAWAB UNIT PENGELOLA RISIKO

Risk Management Unit Responsibilities

VP Governance, Risk, Compliance (GRC) and Legal mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi strategi dan kebijakan mengenai penyusunan dan sosialisasi RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) dan KPI Corporate Tahunan.
2. Menyusun Laporan manajemen, Laporan Kontrak Manajemen dan Laporan Kinerja Perusahaan.
3. Merumuskan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi strategi dan kebijakan mengenai penyusunan dan sosialisasi SOP Manajemen Risiko terkait Investasi.
4. Menyelenggarakan asesmen risiko untuk aktivitas investasi Perusahaan yang diajukan oleh unit-unit terkait.
5. Memonitoring dan evaluasi realisasi investasi Perusahaan.
6. Memonitoring dan membuat laporan tindakan lanjut mitigasi risiko hasil assessment risiko investasi dari unit terkait investasi.
7. Menyelenggarakan sosialisasi dan kegiatan capacity building perencanaan strategik dan manajemen risiko di Perseroan.
8. Menyusun dan menyampaikan laporan pekerjaan kepada atasan.
9. Mengevaluasi rencana kerja dan laporan pekerjaan bawahan.
10. Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh unit kerja di bawah tanggungjawabnya.

VP Governance, Risk, Compliance (GRC) and Legal have duties and responsibilities:

1. Formulating, coordinating and evaluating strategies and policies on the preparation and socialization of RJPP (Long Term Company Plan) and Annual Corporate KPI.
2. Compiling management reports, management contract reports and Company Performance Reports.
3. Formulating, coordinate and evaluate strategies and policies regarding the preparation and socialization of the investment-related risk management SOP.
4. Conducting risk assessment for the Company's investment activities filed by the relevant units.
5. Monitoring and evaluation of the Company's investment realization.
6. Monitoring and make a report on the risk mitigation of investment risk assessment results from investment related units.
7. Conducting socialization and capacity building activities of strategic planning and risk management in the Company.
8. Compiling and deliver work report to superiors.
9. Evaluating work plans and reports of subordinate work.
10. Integrating and coordinate the entire unit of work under its responsibility.



PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK DALAM PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

Roles and Responsibilities of Each Party in Managing Risk Management

Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam penerapan manajemen risiko, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Komite Manajemen Risiko berperan dalam mengawasi dan memberikan saran perbaikan atas penerapan Manajemen Risiko.
2. Direksi berperan dalam melaksanakan dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko, melakukan pemantauan penerapan manajemen risiko dan melaporkan hasil pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham kemudian memastikan bahwa selaras dengan KPI Perseroan.
3. Vice President berperan dalam mengawasi penerapan manajemen risiko.

The roles and responsibilities of each party In the application of risk management, as following:

1. *The Board of Commissioners and the Risk Management Committee play a role in supervising and providing improvement advice on the implementation of Risk Management.*
2. *The Board of Directors plays a role in implementing and evaluating the risk management policy, monitoring the implementation of risk management and reporting the results of the implementation of risk management to the Board of Commissioners and shareholders then ensuring in accordance with the Company's KPI*
3. *Vice President held a role in supervising the implementation of risk management.*

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI DI UNIT PERENCANAAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN RISIKO

Competency Development and Certification in The Strategic Planning and Risk Management Unit

Sertifikasi yang dimiliki oleh unit Manajemen Risiko yaitu:

The certifications owned by the Risk Management unit are:

Jabatan Position	Sertifikasi Certification
Vice President <i>Vice President</i>	QRGP (Qualified Risk Governance Professional) & CERG (Certified in Enterprise Risk Governance)
Manajer <i>Manager</i>	Certified Risk Management Officer (CRMO)
Asisten Manajer <i>Assistant Manager</i>	Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP)
Junior Supervisor <i>Junior Supervisor</i>	Certified Risk Management Officer (CRMO)
Staff <i>Staff</i>	Qualified Risk Management Officer (QRMO)

HASIL REVIEW SISTEM MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2020

Result of Risk Management System Review In 2020

Pada tahun 2020 Manajemen Risiko yang di Perseroan baru sebatas risiko investasi yang akan dilakukan Perseroan dan hasilnya semua pengajuan dari unit sudah dilakukan analisis risikonya dan disampaikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Perseroan.

In 2020, Risk management in the Company is limited to the risk of investment that will be done by the Company and the results of all submissions from the unit has been conducted analysis of the risks and delivered in accordance with the prevailing policies in the Company.

EVALUASI KINERJA MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Performance Evaluation

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana unit-unit pengelola risiko melaksanakan mitigasi yang telah disarankan oleh unit Manajemen Risiko. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi ini, unit Manajemen Risiko berkoordinasi dengan Unit Internal Control.

Monitoring and evaluation are carried out with the intention of knowing the extent to which the risk management units carries out the mitigation that has been advised by the risk Manager unit. In conducting this monitoring and evaluation, the risk Management Unit coordinates the Internal Control Unit.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan 2 (dua) metode yaitu:

- Secara proaktif dengan mendatangi unit-unit pengelola risiko.
- Secara pasif dengan meminta para pengelola risiko melaporkan pelaksanaan mitigasinya.

Monitoring and evaluation is implemented with 2 (two) methods:

- Proactively by visiting the risk management units.*
- Passively by asking the risk managers to report the implementation of its mitigations.*

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERSEROAN

Legal Disputes

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 tidak ada perkara hukum penting yang dilakukan oleh Perseroan.

As of December 31, 2020, there were no important legal matters undertaken by the Company.

PERKARA YANG DIHADAPI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

The Board of Commissioners and Directors' Legal Dispute

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, tidak ada perkara yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

As of December 31, 2020, there were no cases faced by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

SANKSI ADMINISTRATIF

Administrative Sanction

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak pernah dikenakan sanksi administratif oleh otoritas regulator dan otoritas lainnya.

As of December 31, 2020, members of the Board of Commissioners and Directors of the Company, never imposed administrative sanctions by regulatory authorities and other authorities.



PUBLIKASI 2020

Publication in 2020

Publikasi yang dilakukan PT Kereta Commuter Indonesia merupakan bentuk dari keterbukaan publik dan transparansi Perseroan terhadap masyarakat. Selama tahun 2020 Perseroan telah melakukan kegiatan siaran pers sebanyak 3 kali. Berikut adalah rincian kegiatan siaran pers.

PT Kereta Commuter Indonesia has carried out publications in the form of public openness and transparency to the community. Throughout 2020, the Company has published 3 (three) press release, with details as follows:

No.	Kegiatan Siaran Pers Press Release	Tanggal Date
1	PT KCI Sapa Pelanggan di Momen Imlek <i>PT KCI Greet Customers on Chinese New Year</i>	25 Januari 2020 <i>January 25, 2020</i>
2	Antisipasi Virus Corona, PT KCI Lakukan Sosialisasi Kesehatan di Sejumlah Stasiun. <i>Anticipating the Corona Virus, PT KCI Conducts Health Socialization at Several Stations</i>	3 Februari 2020 <i>February 3, 2020</i>
3	Capaian PT KCI Sepanjang Tahun 2019 <i>PT KCI's Achievements Throughout 2019</i>	5 Maret 2020 <i>March 5, 2020</i>
4	Mobilitas Masyarakat Semakin Berkurang, Jam Operasional KRL Menjadi 04.00-20.00 <i>Community's Mobility Declines, KRL Operational Hours was Changed into 04.00-20.00</i>	5 Maret 2020 <i>March 5, 2020</i>
5	KCI Senantiasa Perkuat Upaya Physical Distancing dan Ikuti Protokol Pencegahan COVID-19 <i>KCI Strives to Strengthen Physical Distancing and Follows COVID-19 Prevention Protocols</i>	3 April 2020 <i>April 3, 2020</i>
6	KRL Beroperasi Terbatas di Hari Lebaran Hanya Untuk Melayani di Sektor Pengecualian PSBB <i>Limited Operations of KRL on Eid Day, Serving Particular Sectors Outside Restricted Areas</i>	3 Mei 2020 <i>May 3, 2020</i>
7	PT KCI Siapkan Kebijakan Menghadapi New Normal <i>PT KCI Prepares Policy to Face the New Normal</i>	27 Mei 2020 <i>May 27, 2020</i>
8	PT KCI Uji Coba Informasi Antrean di Stasiun Bogor via Media Sosial @commuterline dan KRL Access <i>PT KCI Tests Queue Information at Bogor Station via Social Media @commuterline and KRL Access</i>	28 Juni 2020 <i>June 28, 2020</i>
9	Kereta Tiba di Stasiun Akhir Wajib Dikosongkan untuk Menghormati Pengguna KRL yang Telah Antre <i>Trains Arriving at the Last Station Must Be Emptied To Respect KRL Passengers Who Have Been Queuing</i>	30 Juni 2020 <i>June 30, 2020</i>
10	PT KCI Laksanakan Protokol Kesehatan dengan Ketat Sesuai Aturan Mendukung Kenormalan Baru yang Sehat, Disiplin, Produktif, dan Aman <i>PT KCI Implements Strict Health Protocols to Support Healthy, Disciplined, Productive, and Safe New Normal</i>	1 Juli 2020 <i>July 1, 2020</i>
11	Stasiun Bogor dan Cilebut Menjadi Stasiun Khusus KMT Mulai 13 Juli 2020 <i>Bogor and Cilebut Stations Transformed into KMT Special Stations Starting July 13, 2020</i>	3 Juli 2020 <i>July 3, 2020</i>
12	PT KCI Akan Tutup Sementara Akses Masuk Stasiun Tanah Abang di Sisi Selatan <i>PT KCI Will Temporarily Close Entrance Access to the South Side of Tanah Abang Station</i>	10 Agustus 2020 <i>August 10, 2020</i>
13	DKI Jakarta PSBB Penuh, KCI Tetap Terapkan Protokol Kesehatan dengan Ketat <i>DKI Jakarta Implements Tight Restrictions, KCI Continues to Strictly Apply Health Protocols</i>	11 September 2020 <i>September 11, 2020</i>

No.	Kegiatan Siaran Pers Press Release	Tanggal Date
14	KAI Commuter Bagikan 3.000 Masker Kepada Pengguna KRL di Sejumlah Stasiun Dalam Rangkaian Peringatan Sumpah Pemuda <i>In the Commemoration of Youth Pledge (Sumpah Pemuda) KAI Commuter Distributes 3,000 Masks to KRL Passengers at Several Stations</i>	27 Oktober 2020 October 27, 2020
15	Stasiun Jatinegara Baru Uji Coba Besok, Keselamatan dan Kenyamanan Penumpang Semakin Meningkat <i>New Jatinegara Station Trial Tomorrow, Increasing Passengers' Safety and Comfort</i>	15 Desember 2020 December 15, 2020
16	KAI Commuter Persembahkan Apresiasi untuk Perempuan Pengguna KRL pada Peringatan Hari Ibu <i>KAI Commuter Presents its Appreciation for Women Passengers on Mother's Day</i>	22 Desember 2020 December 22, 2020
17	Lebih Dari 2,9 Juta Pengguna Manfaatkan Layanan KRL Selama Sembilan Hari Pertama Masa Angkutan Natal dan Tahun Baru <i>More than 2.9 Million Users Take Advantage of KRL Services During the First Nine Days of the Christmas and New Year's Period</i>	27 Desember 2020 December 27, 2020

KODE ETIK PERUSAHAAN

Company's Code of Conduct

Kode Etik Perseroan merupakan bagian dari praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dalam rangka menerapkan pembangunan budaya dan karakter Perseroan PT Kereta Commuter Indonesia serta mencapai visi dan misi Perseroan. Nilai-nilai yang diterapkan pada Perseroan dalam Kode Etik Perusahaan yaitu integritas, profesional, inovasi dan keselamatan. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat membawa KCI menjadi Perseroan yang memiliki integritas tinggi, peduli terhadap pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, berkomitmen kepada semua pihak yang terkait, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang *capable*, percaya diri akan kemampuan Perseroan untuk terus bersinergi dengan baik, sehingga menjadikan PT Kereta Commuter Indonesia menjadi kebanggaan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Kode Etik PT KCI adalah pedoman yang mengatur etika usaha dan perilaku insan PT KCI untuk melaksanakan praktik-praktik pengelolaan Perusahaan yang baik. Adapun Insan Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang disebut Insan Perusahaan atau Insan KCI adalah Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pekerja Perusahaan termasuk pekerja yang ditugaskan di Induk Perusahaan dan instansi lainnya dan/atau pekerja Induk Perusahaan yang dipekerjakan di Perusahaan, serta pekerja lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan termasuk keluarga intinya.

The Company's Code of Conduct is part of Good Corporate Governance (GCG) practice in order to apply the development of culture and character of PT Kereta Commuter Indonesia Company and achieve the Company's vision and mission. The values applied to the Company in the Company's Code of Conducts are integrity, professionalism, innovation and safety. These values are expected to bring the KCI into a Company that has high integrity, care for the services provided to customers, committed to all parties concerned, supported by human resources who are capable, confident of the ability of the Company to continue to synergize well, then PT Kereta Commuter Indonesia becoming a pride for all stakeholders.

The code of conduct of PT KCI is a guideline governing the business ethics and Human behavior of PT KCI to implement good corporate governance practices. As for Member of Kereta Commuter Indonesia (KCI), called Insan Perusahaan or Insan KCI consist of the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees of the Company including the assigned workers in the holding Company and other agencies and/or employees of the holding Company employed in the Company, as well as other workers who directly or indirectly work for and on behalf of the Company including the core family.



PEMBERLAKUAN KODE ETIK

Code of Conduct Implementation

Kode Etik harus dimengerti, dipahami, disadari, dan dipatuhi sebagai wujud tanggung jawab terhadap Kode Etik Perseroan, Peraturan, dan Perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin dan menjaga usaha ini agar berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. PT Kereta Commuter Indonesia percaya dengan meletakkan etika dan perilaku yang baik, akan mampu membawa Perseroan ini menjadi Perseroan yang membanggakan dan terbaik di negara ini, bahkan mendapat apresiasi dari negara lain.

Dewan Komisaris dan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia berkomitmen terhadap penerapan pedoman perilaku dan etika kerja Perseroan PT Kereta Commuter Indonesia sebagai acuan utama bagi korporasi dan individu Insan KCI sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

Pedoman Etika Perseroan itu sendiri ditetapkan melalui Keputusan Direksi pada SK Direksi Nomor: SK.046/CU/KCI/IX/2019 Tanggal 24 September 2019 dan seluruh pihak mulai dari Dewan Komisaris, Direksi hingga Staf sudah melakukan komitmen terhadap kode etik dengan melakukan penandatanganan pakta integritas pada kode etik.

Isi Kode Etik

Perilaku Etika Perusahaan

Benturan Kepentingan

1. Benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) adalah situasi atau kondisi yang dihadapi, yang karena jabatan atau posisinya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan yang dapat merugikan Perusahaan.
2. Perusahaan mendefinisikan benturan kepentingan sebagai situasi di mana kepentingan pribadi Insan KCI dan kepentingan Perusahaan berada dalam posisi yang saling bertentangan.
3. Insan KCI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu kewajibannya terhadap Perusahaan.

Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi, Pemberian Donasi, Serta Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

1. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi
 - a. Gratifikasi dalam arti luas adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket

The Code of Conducts must be comprehensive, understood, realized, and obliged as a manifest of responsibility for the Company's Code of Conduct, Regulations, and Legislation applicable to ensure and safeguard this business in order to run in accordance with the established rules. PT Kereta Commuter Indonesia believes that by placing ethics and good behavior, will be able to bring the Company to be a proud and best Company in the country, even gaining appreciation from other countries.

The Board of Commissioners and Directors of PT Kereta Commuter Indonesia are committed to the implementation of the Company's code of conduct and ethics as the main reference for the KCI Corporation and Individuals in accordance with the provisions applicable in the Company.

The Company's Code of Conducts were determined by the decision of the Board of Directors on the Board of Directors decree number: SK. 046/CU/KCI/IX/2019 dated September 24, 2019 and all parties starting from the Board of Commissioners, Directors to the staff have committed to the code of conduct by signing the integrity Pact in the code of conduct.

Code Of Conducts Contents

Corporate Conducts behaviour

Conflict of Interest

1. *Conflict of Interest is a situation or condition that is faced, because the position or position has the authority that can potentially be abused, either intentionally or unintentionally for other purposes so as to affect the quality of their decision, as well as the performance of decision results that could harm the Company.*
2. *The Company defines a conflict of interest as a situation where the personal interests of the KCI human beings and the interests of the Company are in conflicting positions.*
3. *KCI employee are responsible for ensuring that personal interests outside of work do not interfere with the Company's obligations.*

Gratification and Acceptance, Donation, and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN)

1. Gratification Granting and Acceptance
 - a. *Gratuity in the broadest sense is the provision in the broad meaning, namely the giving of money, goods, rebate (discount), commissions, interest free*

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima dalam negeri maupun luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

- b. Insan KCI bersama keluarga wajib menolak semua bentuk gratifikasi yang mengarah pada suap sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali keadaan pada saat itu tidak mungkin untuk menolaknya. Yang dimaksud dengan keadaan tidak memungkinkan untuk menolak adalah jika Insan KCI tidak mengetahui pelaksanaan waktu dan tempat pemberian gratifikasi serta nama dan alamat pemberi gratifikasi. Dalam keadaan ini Insan KCI wajib melaporkan kepada Perusahaan.
- c. Pemberian dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Perusahaan telah diatur dalam Peraturan Direksi mengenai Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

2. Pemberian Donasi

- a. Dalam batas keputusan, donasi untuk tujuan amal dapat dibenarkan.
- b. Donasi untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan bila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Program CSR (Corporate Social Responsibility).
- c. Perseroan tidak diperkenankan memberikan dana, aset, atau keuntungan Perusahaan untuk kepentingan donasi politik kepada seorang atau lebih calon anggota Badan Legislatif, kecuali dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Insan KCI beserta keluarga inti wajib menolak semua bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali keadaan saat itu tidak memungkinkan untuk menolaknya. Dalam keadaan itu Insan KCI wajib melaporkan kepada Perseroan.

Kepedulian terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Serta Pelestarian Lingkungan

PT KCI mengelola keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta lingkungan untuk mendukung keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan yang diatur dalam Peraturan Direksi mengenai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Oleh karena itu, Insan KCI dalam melaksanakan kegiatannya harus melakukan hal sebagai berikut:

- a. Menaati setiap peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan;

loans, travel tickets, lodging facilities, travel, free medical treatment and other facilities both accepted domestically and abroad and carried out using electronic tools or without electronic means.

- b. *Insan KCI with the relatives must refuse all manifestation of gratification that leads to bribery as set forth in the legislation, unless the circumstances at that time is not possible to reject it. The meaning of the situation is not possible to refuse is if the KCI human beings do not know the time and place of provision of gratification and the name and address of the gratification. In this state, the KCI is obliged to report to the Company.*
- c. *The granting and acceptance of gratification in the Company's environment has been governed by the rules of Directors on gratuity control guidelines.*

2. Donation

- a. *Within the decision limit, donations for charity purposes are justified.*
- b. *Donations for other purposes should only be made in accordance with the provisions of the legislation, such as the CSR Program (Corporate Social Responsibility).*
- c. *The Company shall not provide the Company's funds, assets, or profits for political donations to one or more members of the legislative agency, unless otherwise provided in accordance with statutory regulations.*

3. Free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN)

KCI's employees and core families must reject all forms of corruption, collusion and nepotism (KKN) as stipulated in statutory regulations, unless the circumstances are not possible to reject them. Under the circumstances, Insan KCI is obliged to report to the Company.

Occupational Safety and Health Care (K3) and Environmental Preservation

PT KCI manages occupational safety and Health (K3) as well as the environment to support the success of the Company's business activity which is governed in the Board of Directors' implementation of the occupational Safety and Health Management System (SMK3). Therefore, KCI employee in carrying out its activities must do the following:

- a. *Comply with all laws and regulations of the Company on occupational safety and health and environmental preservation;*



- b. Mengutamakan tindakan yang bersifat pencegahan untuk mengantisipasi keadaan darurat;
- c. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan kerja dan permasalahan lingkungan yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku;
- d. Melaporkan setiap insiden, kecelakaan kerja dan permasalahan lingkungan yang terjadi kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan; dan
- e. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan secara berkala terhadap semua sarana dan fasilitas kerja.

Kesempatan yang Sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi

1. Direksi mempekerjakan, menetapkan besaran gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin usia, cacat khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
2. Direksi menjamin agar pekerja memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan, penelitian dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perseroan.

Integritas Laporan Keuangan

Semua informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan, catatan dan laporan lainnya harus dibuat dengan akurat, lengkap dan sejajar-jujurnya sesuai dengan transaksi Perusahaan. Dalam hal laporan dan catatan dibuat secara sengaja, sehingga tidak akurat atau lengkap, maka tindakan tersebut dianggap melanggar ketentuan Perusahaan dan pelakunya dapat dikenakan sanksi, yang berakibat sampai pemberhentian kerja. Direksi dan pekerja yang ikut serta dalam persiapan dokumen-dokumen Perusahaan diharuskan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dibuat dengan jelas, lengkap, akurat, dan dapat dimengerti oleh pihak lain.

Pemusnahan dokumen Perusahaan yang akan dilakukan investigasi oleh pemerintah atau auditor harus sesuai dengan prosedur dan memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan Perusahaan.

Keharusan untuk mematuhi standar akuntansi Keuangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Insan KCI yang bertanggung jawab dan melaksanakan fungsi-fungsi keuangan harus memahami dan menjalankan

- b. *Prioritize preventive measures to anticipate emergencies;*
- c. *Countermeasures the incidence of occupational accidents and environmental issues occurring in accordance with applicable standards and procedures;*
- d. *Report any incidents, occupational accidents and environmental problems that occur to the respective unit leaders and relevant authorities within the specified time limit; and*
- e. *To conduct the distribution, inspection and evaluation of compliance with regulations on occupational safety and health and the environment periodically to all facilities and office facility.*

The Equal Opportunity to Obtain Position and Level Promotions

1. *The Board of Directors employs, sets salaries, provides training, establishes career levels, and determines other employment requirements, regardless of the ethnic background of a person, religion, gender age, other special defects protected by the laws and regulations.*
2. *The Board of Directors guarantees that workers have the opportunity to participate in education, research and further development in line with the Company's competency and needs.*

Integrity of Financial Statements

All information relating to financial statements, records and other reports must be accurate, complete and truthfully in accordance with the Company's transactions. In the event that the reports and records are made intentionally, thus inaccurate or complete, the act shall be deemed to violate the Company's provisions and the perpetration may be sanctioned, resulting in the termination of employment. Directors and employees participating in the preparation of the Company's documents are required to ensure that the document is made clear, complete, accurate and understandable to the other party.

The destruction of the Company documents that will be investigated by the Government or auditors must comply with the procedures and comply with the laws and regulations of the Company.

The obligation to comply with financial accounting standards is done under the following provisions:

- a. *KCI employee responsible for and implementing the financial functions must understand and enforce the*

ketentuan Perusahaan di bidang akuntansi keuangan secara konsisten;

- b. Insan KCI yang bertanggung jawab dan melaksanakan fungsi akuntansi keuangan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan bidang akuntansi;
- c. Insan KCI yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi akuntansi dan keuangan dilarang melakukan pencatatan transaksi palsu; dan
- d. Insan KCI yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi akuntansi dan keuangan harus memperlakukan informasi keuangan sesuai klasifikasi informasi Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

Perlindungan Informasi Perusahaan dan Aset Tak Berwujud

1. Keharusan dalam melindungi informasi Perusahaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Insan KCI harus menjaga agar informasi Perusahaan selalu memenuhi karakteristik mudah dipahami sesuai dengan klasifikasi informasi;
 - b. Insan KCI wajib melindungi dan tidak membocorkan informasi rahasia Perusahaan;
 - c. Insan KCI sesuai kewenangan dan lingkungan kerjanya dapat melakukan akses terhadap informasi Perusahaan dan dilarang untuk membagikan kata sandi;
 - d. Semua pihak yang bekerjasama dengan Perusahaan harus menandatangani perjanjian yang di dalamnya terdapat klausul larangan memberikan informasi kepada pihak luar atau pihak yang tidak berkepentingan (*non disclosure agreement*); dan
 - e. Pengungkapan informasi hanya dapat dilakukan media yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan pejabat yang ditunjuk.
2. Keharusan untuk Menjaga Aset Tak Berwujud Informasi dan segala aset tak berwujud, termasuk hasil riset, teknologi, hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban Perusahaan menjadi milik Perusahaan yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Kekayaan intelektual termasuk hak paten, hak cipta dan kepemilikan informasi lain yang dimiliki Perusahaan yang merupakan salah satu hak aset tak berwujud yang berharga bagi Perusahaan. Oleh karena itu, Insan KCI wajib:
 - a. Menghormati hak atas kekayaan intelektual milik orang lain, karena setiap penggunaan yang tidak sah hak atas kekayaan intelektual milik orang lain dapat mengakibatkan risiko hukum bagi Perusahaan;
 - b. Berpartisipasi aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual; dan

Company's provisions in the field of financial accounting consistently;

- b. KCI employees who are responsible and implement the function of financial accounting must have the knowledge and ability of accounting field;*
- c. KCI employee responsible for accounting and financial functions are prohibited from recording fraudulent transactions; and*
- d. KCI employee responsible for the accounting and financial functions must treat financial information in accordance with the classification of the Company's information as well as the relevant laws and regulations.*

Safeguards of Company Information and Intangible Assets

- 1. The necessity in protecting the Company's information is done under the following provisions:*
 - a. KCI employee should keep the Company's information always meet the characteristics of easily understood according to the classification of information;*
 - b. KCI employee shall protect and do not divulge confidential information of the Company;*
 - c. KCI employee and their working environment may access to Company information and are prohibited from sharing the password;*
 - d. All Parties that cooperate with the Company must sign the agreement in which there is a prohibition clause providing information to outside parties or non-disclosure agreements; and*
 - e. Information disclosure can only be done by the media that has been determined by the Company and the appointed official.*
- 2. Obligation to Safeguard Intangible Assets Information and any intangible assets, including the results of research, technology, intellectual property rights acquired on assignment and/or at the expense of the Company becomes the property of the Company set forth in an agreement. Intellectual property including patents, copyrights and other proprietary information owned by the Company, which is one of the valuable intangible assets of interest to the firm. Therefore, the KCI employee are obliged to:*
 - a. Respect the intellectual property rights of others, because any unauthorized use of any intellectual property rights of another person may result in a legal risk to the Company;*
 - b. Actively participating to protect intellectual property rights; and*



- c. Turut serta dalam pengembangan suatu produk yang terkait dengan bidang kerjanya dan harus memperlakukan informasi dan hasil karya tersebut sebagai milik Perusahaan.

Informasi Orang Dalam

Terhadap transaksi antara Perusahaan dengan pihak lain termasuk transaksi aset yang belum atau tidak menjadi konsumsi publik, Insan KCI:

1. Tidak diperbolehkan memanfaatkan informasi yang belum dipublikasikan untuk memperoleh keuntungan atas informasi tersebut; dan/atau
2. Harus menjaga kerahasiaan informasi yang diketahuinya.

Perlindungan Aset Perusahaan

Aset Perusahaan merupakan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk mencapai tujuan Perusahaan. Pemeliharaan dan penggunaan serta perlindungannya merupakan usaha untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan.

Terhadap harta atau aset Perusahaan, Insan KCI harus:

1. Menjaga agar penggunaan aset Perusahaan dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi Perusahaan sesuai kaidah-kaidah sosial, ekonomi, dan finansial yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhitungkan risiko usaha terkait;
2. Menyimpan aset Perusahaan di tempat yang ditentukan Perusahaan;
3. Menjaga, memelihara, mengamankan dan menyelamatkan aset Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. Tidak menggunakan dan memanfaatkan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.

Kegiatan Sosial Politik

PT KCI menjamin hak setiap insan KCI untuk berserikat dan menyalurkan aspirasi politiknya selama tidak bertentangan dengan ketentuan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Perusahaan tidak memberikan kontribusi yang berasal dari dana Perusahaan atau menggunakan aset Perusahaan yang ditujukan untuk mendukung partai politik atau kandidat manapun.

Insan KCI dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik, di antaranya:

1. Menjadi anggota partai politik;

- c. *Participating in the development of a product related to its field of work and should treat the information and the work belonging to the Company.*

Internal Information

Against transactions between companies and other parties including asset transactions that have not been or are not a public consumption, the KCI employee:

1. *Prohibited to use the information that has not been published to benefit from the information; and/or*
2. *Obliged to maintain the confidentiality of the information he knows.*

Company Asset Safeguards

Company assets are resources owned by the Company to achieve the Company's objectives. Its maintenance and use and protection is an effort to maintain the Company's business sustainability.

For the Company's property or assets, KCI employee must:

1. *Maintain the usage of Company's assets to provide added value for the Company in accordance with social, economic and financial conventions that can be accounted for by calculating the risk of related business;*
2. *Keep the Company assets in the designated place within the Company;*
3. *Safeguards, maintain, secure and save the Company's assets in accordance with applicable provisions; and*
4. *Prohibited to use and utilize the Company's assets for personal interests, group interests and/or political activity and other third-parties.*

Socio-Political Activities

PT KCI guarantees the right of every human rights of KCI employee to union and to waive its political aspirations as long as it does not contradict against the Company's provisions and laws. The Company does not make contributions derived from Company funds or use Company assets intended to support any political party or candidate.

KCI's employee are prohibited from conducting activities that lead to the alignments of one candidate or deed that indicates involvement in practical politics or affiliated with a political party, including:

1. *Being a member of political parties;*

2. Memberikan dukungan kepada partai politik dan/atau kandidat manapun;
3. Mengikuti kampanye partai politik dan/atau kandidat manapun;
4. Mengunggah, mananggapi, atau menyebarluaskan gambar partai politik dan/atau kandidat manapun melalui media elektronik atau media sosial; dan/atau
5. Melakukan foto bersama dengan dan/atau kandidat manapun atau mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

Etika yang Terkait Dengan Stakeholders

Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika usaha. Standar etika yang berlaku umum di lingkungan PT KCI merupakan tata nilai moral yang digunakan untuk menentukan:

1. Hal-hal yang baik dan yang buruk;
2. Hal-hal yang terpuji dan yang tercela; dan
3. Hal-hal yang disetujui dan yang tidak disetujui.

Dalam rangka mewujudkan hubungan yang berkualitas dan beretika dengan para pemangku kepentingan, Perseroan memiliki komitmen sebagai berikut:

Etika Perusahaan dengan Pegawai

- a. PT KCI memperlakukan pegawai secara setara dan tidak membedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin dalam segala aspek. Pegawai Perusahaan tidak membedakan dan tidak boleh dikenakan tindakan diskriminasi karena alasan kesukuan, latar belakang etnis, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, senioritas, pendapat politik, keanggotaan serikat dan status sosial.
- b. PT KCI melakukan pengelolaan pegawai dan pengembangan SDM secara objektif dan transparan.
- c. PT KCI tidak mempekerjakan tenaga kerja anak-anak atau di bawah umur.
- d. PT KCI berkomitmen untuk menciptakan kondisi kerja dan lingkungan (kesehatan, keamanan, kenyamanan, keselamatan) serta memberikan hak pegawai sesuai peraturan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. PT KCI mendukung peningkatan kompetensi pegawai seluas-luasnya sehingga mampu mendukung Perusahaan untuk kompetitif dalam menghadapi perkembangan global. Pegawai Perusahaan dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, serasi dan seimbang antara Perusahaan dan pegawai.

2. *Providing support to any political party and/or candidate;*
3. *Following the campaign of any political party and/or candidate;*
4. *Uploading, responding, or distribute images of any political party and/or any candidate in electronic media or social media; and/or*
5. *Photograph with and/or any candidate or follow the symbol of the hand or movement used as a form of alignments.*

Ethics Related to Stakeholders

Ethics is a set of unwritten norms or values believed by a community as a standard of group behaviour based on regulatory and business ethics. The generally prevailing ethical standards in PT KCI environment are the moral values used to determine:

1. *Good and bad things;*
2. *Praiseworthy and unimpeachable matters; and*
3. *Approved and disapproved matters.*

In order to manifest the quality and ethical relationship with stakeholders, the Company has the following commitments:

Corporate Ethics with Employees

- a. *PT KCI treats employees equally and does not distinguish ethnic, religious, racial and gender in all aspects. Company officers do not discriminate and may not be subjected to discrimination due to tribes, ethnic background, religion, skin color, gender, age, seniority, political opinions, union membership and social status.*
- b. *PT KCI conducts employee management and development of human resources objectively and transparently.*
- c. *PT KCI does not employ the labor of children or minors.*
- d. *PT KCI is committed to creating working conditions and environment (health, safety, comfort, safety) as well as providing personnel rights in accordance with the Company's regulations and applicable laws.*
- e. *PT KCI supports the increase of competencies of employees as wide as possible to support the Company to be competitive in the face of global developments. Employees of the Company are required to participate and actively play to improve the productivity of the work through a dynamic, harmonious and balanced relationship between the Company and employees.*



f. PT KCI mengakui nilai dari seluruh pegawai yang berkomitmen untuk meningkatkan kinerja Perusahaan dengan menetapkan imbalan (<i>reward</i>). g. PT KCI menerapkan hukuman (<i>punishment</i>) kepada pegawai yang melanggar prosedur, ketentuan, hukum, peraturan Perusahaan, etika Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. h. PT KCI mendukung prinsip yang mencakup bidang-bidang hak asasi manusia, standar buruh, manajemen lingkungan, anti-korupsi, anti-pencucian uang, dan anti monopoli baik nasional maupun internasional. i. PT KCI harus melakukan sosialisasi kepada Insan PT KCI agar dapat memahami syarat dan ketentuan pokok kepegawaian sesuai Peraturan Perusahaan, Etika Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penerapan <i>Good Corporate Governance</i>. j. PT KCI berkomitmen untuk melakukan perjanjian bersama yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan (PP).	f. <i>PT KCI recognizes the value of all employees who are committed to improve the Company's performance by setting a reward.</i> g. <i>PT KCI applies punishment to employees who violate the procedures, provisions, laws, regulations of the Company, corporate ethics and legislation that apply transparently and accountable.</i> h. <i>PT KCI supports principles that include areas of human rights, labour standards, environmental management, anti-corruption, and anti-money laundering, and both national and international monopolies.</i> i. <i>PT KCI shall conduct socialization to the PT KCI employee in order to understand the terms and conditions of personnel in accordance with the Company's regulations, corporate ethics and the prevailing laws in the framework of Good Corporate Governance implementation.</i> j. <i>PT KCI is committed to the joint agreement which is contained in the Joint Work Agreement (PKB) and the Company Regulation (PP).</i>

Etika Perusahaan dengan Konsumen

- a. PT KCI mengutamakan kepuasan dan kepercayaan konsumen berdasarkan 4 (empat) pilar utama misi Perusahaan yaitu Keselamatan, Ketepatan waktu, Pelayanan, dan Kenyamanan.
- b. PT KCI terus menerus melakukan pengukuran kepuasan konsumen dalam rangka perbaikan terus menerus pelayanan kepada konsumen.
- c. PT KCI membuka layanan konsumen dan setiap karyawan yang terkait menindaklanjuti keluhan konsumen secara cepat dan responsif tanpa diskriminasi.
- d. PT KCI memberikan informasi yang diperlukan oleh konsumen secara akurat dan faktual.
- e. PT KCI mengembangkan prosedur dan mekanisme kerja untuk memastikan bahwa setiap keluhan yang diterima dapat diselesaikan secara komprehensif, sesuai dengan etika Perusahaan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- f. PT KCI melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- g. PT KCI mendukung prinsip ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang berfokus pada kepuasan pelanggan dan perbaikan terus menerus.
- h. Insan Perusahaan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen sesuai dengan Peraturan Perusahaan, Etika Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka memenuhi kepuasan konsumen.

Corporate Ethics with Consumers

- a. *PT KCI prioritizes customer satisfaction and trust based on 4 (four) key pillars of the Company's mission, namely safety, timeliness, service, and convenience.*
- b. *PT KCI continuously measures customer satisfaction in order to continuously improve the service to the consumer.*
- c. *PT KCI opens up consumer services and every employee who is associated with a fast and responsive consumer complaint without discrimination.*
- d. *PT KCI provides accurate and factual information needed by consumers.*
- e. *PT KCI develops procedures and mechanism of action to ensure that any complaints received can be completed comprehensively, in accordance with corporate ethics, regulations and legislation in force.*
- f. *PT KCI protects the rights of consumers in accordance with applicable laws and regulations.*
- g. *PT KCI supports the ISO 9001:2015, Quality management system (SMM) principle that focuses on customer satisfaction and continuous improvement.*
- h. *The Company's employee must provide the best service to the consumer in accordance with Company regulation, corporate ethics and the prevailing laws and regulations in order to fulfill customer satisfaction.*

Etika Perusahaan dengan Masyarakat

- PT KCI menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan mengedepankan prinsip moral dan etika untuk mencapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya.
- PT KCI menyediakan dana dalam mendukung tanggung jawab sosial, yang dituangkan dalam kebijakan, untuk memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat berdasarkan anggaran Perusahaan, peraturan Perusahaan, dan etika Perusahaan yang berlaku.
- PT KCI mengoptimalkan penyaluran program pemberdayaan masyarakat di wilayah operasi kepada masyarakat tanpa diskriminasi sesuai dengan anggaran Perusahaan, etika Perusahaan, peraturan Perusahaan berlaku.
- Insan Perusahaan dilarang memberikan janji-janji kepada masyarakat (pihak ketiga) di luar kewenangannya dalam penyaluran program pemberdayaan masyarakat.

Etika Perusahaan dengan Lingkungan

- PT KCI berupaya keras untuk meminimalkan dampak lingkungan dan menjadi Perusahaan yang ramah lingkungan.
- PT KCI meningkatkan kesadaran lingkungan kepada semua pegawai.
- PT KCI berkomitmen untuk melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- PT KCI menerapkan standar kerja dengan memperhatikan hasil Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- PT KCI akan berusaha mengembangkan teknologi terbaik untuk penanganan energi dan sumber daya yang berdampak pada masalah lingkungan.
- Insan Perusahaan dilarang merokok di sembarang tempat sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Insan Perusahaan mendukung program kebersihan lingkungan.

Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja

- PT KCI menjamin pelaksanaan kompetisi yang transparan, adil, setara dan wajar, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pengadaan barang dan jasa.
- PT KCI berkomitmen untuk berusaha menerapkan teknologi pengadaan (e-procurement) barang dan jasa untuk transparansi pengadaan barang dan jasa.
- PT KCI melakukan perikatan bisnis yang saling menguntungkan dan jelas dengan mitra kerja yang memiliki kepentingan sesuai dengan peraturan pengadaan

Corporate Ethics with Communities

- PT KCI maintains a harmonious relationship with the community and emphasizes moral and ethical principles to achieve the best results, without prejudice to other community groups.
- PT KCI provides funds in support of social responsibility, which is set forth in the policy, to provide value and benefit to the community based on the Company's budget, Company regulation, and applicable Company ethics.
- PT KCI optimizes the distribution of community empowerment programs in the area of operations to the Community without discrimination in accordance with the Company budget, Company Ethics, the Company's regulations apply.
- The Company's employee is prohibited from giving promises to the Community (third parties) outside its authority in the distribution of Community empowerment programs.

Corporate Ethics with the Environment

- PT KCI strives to minimize environmental impact and become a sound environmentally Company.
- PT KCI enhances environmental awareness to all employees.
- PT KCI is committed to perform waste management in accordance with the prevailing legislation.
- PT KCI implements working standards with respect to the results of environmental impact analysis (EIA), and the prevailing laws and regulations.
- PT KCI will strive to develop the best technology for energy handling and resources that impact environmental problems.
- The Company's employee is prohibited from smoking anywhere in accordance with the prevailing rules.
- The Company's employee supports environmental hygiene program.

Corporate Ethics with Partners

- PT KCI guarantees the implementation of the competition is transparent, fair, equal and fair, accountable and accountable for the procurement of goods and services.
- PT KCI is committed to strive to implement the technology of procurement (e-procurement) of goods and services for the transparency of procurement of goods and services.
- PT KCI conducts a mutually beneficial and clear business alliance with the partners who have an interest in accordance with the procurement regulations of goods



barang dan jasa yang berlaku di PT KCI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Insan Perusahaan tidak diperbolehkan menerima/tatap muka dengan rekanan di ruang kerja kecuali di ruang tamu dan ruang rapat.
- e. PT KCI menjatuhkan sanksi yang tegas kepada rekanan yang tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati bersama dan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- f. PT KCI menjamin dan meningkatkan iklim kebersamaan, menghargai, saling percaya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama, etika Perusahaan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- g. PT KCI melarang praktik dan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk melawan hukum, nepotisme, kolusi, suap, gratifikasi/hadiah dan korupsi.
- h. PT KCI mendukung penerapan praktik *Good Corporate Governance* yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- i. Insan Perusahaan dilarang memberikan atau menerima janji-janji kepada rekanan, meluluskan rekanan dalam rangka mengambil keuntungan pribadi, *conflict of interest*, nepotisme, kolusi, suap, gratifikasi dan korupsi.
- j. Insan Perusahaan dilarang memberikan atau menerima sesuatu kepada atau dari pihak manapun juga yang menurut sifatnya langsung atau tidak langsung berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Etika Perusahaan dengan Pemerintah

- a. PT KCI menjalankan bisnis selalu memenuhi peraturan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai fungsi pemerintah baik Pusat maupun Daerah berlandaskan pada standar etika dan komunikasi efektif dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan berkewajiban membangun dan membina hubungan kemitraan yang harmonis dengan Pemerintah.
- b. Insan PT KCI harus mampu memaksimalkan kemampuannya untuk membantu Perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab Perusahaan terhadap pemerintah. Perilaku yang harus dilakukan oleh Insan PT KCI:
 - Mentaati dan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menjalin hubungan yang harmonis, transparan dan komunikatif dengan dengan instansi Pemerintah.
 - Mendukung dan mensukseskan program Pemerintah, terutama di bidang transportasi berbasis kereta rel listrik.

and services applicable in PT KCI and the prevailing laws and regulations.

- d. The Company is not allowed to receive/face to face with the partner in the workspace except in the living room and meeting room.
- e. PT KCI impose strict sanctions on the partners who do not meet the provisions agreed with and violate applicable laws and regulations.
- f. PT KCI guarantees and promotes the climate of togetherness, respect, mutual trust in accordance with the provisions that have been agreed with, corporate ethics, regulations and applicable legislation.
- g. PT KCI prohibits practices and actions that are categorized as a form of unlawful, nepotism, collusion, bribery, gratification/reward and corruption.
- h. PT KCI supports the implementation of *Good Corporate Governance* practices established by the Government.
- i. The Company is prohibited from providing or accepting promises to associates, approve associates in the course of taking personal gain, conflict of interest, nepotism, collusion, bribery, gratification and corruption.
- j. The Company's employee is prohibited from giving or accepting anything to or from any party that is directly or indirectly related to its position or occupation.

Corporate Ethics with Governments

- a. PT KCI conducts business always meets regulations and maintains good relations with various government functions both central and regional based on the ethical standards and effective communication with respect to regulations and legislation in force. The Company is obliged to build and foster a harmonious partnership relationship with the government.
- b. PT KCI employee should be able to maximize its ability to assist the Company in realizing the corporate responsibility to the government. Obligated behavior for PT KCI employee are:
 - Comply and fulfill all applicable regulations.
 - Establishing harmonious, transparent and communicative relationship with Government agencies.
 - Supporting and success of Government programs, especially in the field of transport-based electric railways.

Etika Perusahaan dengan Pemegang Saham

- a. PT KCI menghormati kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham, baik pemegang saham minoritas maupun pemegang saham mayoritas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. PT KCI menjalin hubungan jangka panjang dengan Pemegang Saham yang dilandasi dengan itikad baik, saling percaya dan saling memberi manfaat, serta berkomitmen untuk senantiasa berusaha keras agar Perusahaan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan berdasarkan standar bisnis yang saling menguntungkan hingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pemegang saham.

Etika Perusahaan dengan Media Massa

- a. PT KCI memberikan informasi-informasi yang akurat, dapat dipahami, relevan dan berimbang yang diperlukan oleh masyarakat kepada media massa dan berbagai komunikasi publik lainnya.
- b. PT KCI mengembangkan dan memonitor informasi-informasi yang disampaikan oleh media massa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan perbaikan terus menerus Perusahaan dengan tetap memperhatikan aspek biaya, risiko, etika Perusahaan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. PT KCI melarang segala hal yang terkait dengan Informasi dan Teknologi atas sistem, telepon, e-mail, situs web, koneksi internet dan perangkat elektronik lainnya yang tidak pantas serta melanggar peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
- d. PT KCI menjalin kerjasama yang setara, seimbang dan saling mendukung dengan prinsip-prinsip keterbukaan yang bertanggungjawab.
- e. PT KCI dalam memberikan informasi kepada media massa dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menghindari adanya informasi yang tidak sesuai dan saling bertentangan.

Etika Perusahaan dengan Kreditur

- a. PT KCI melindungi hak dan kepentingan kreditur dengan mematuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian antara PT KCI dengan kreditur.
- b. PT KCI menjamin untuk selalu memberikan informasi setiap keadaan Perusahaan yang akurat untuk kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Standar Perilaku

Penerimaan dan Pemberian (Hadiah/Gratifikasi/Cinderamata)

- a. Komisaris, Direksi, Jajaran Manajemen dan Pegawai Perusahaan tidak diperkenankan terlibat dalam tindakan

Corporate Ethics with Shareholders

- a. *PT KCI respects the trust given by the shareholders, both minority shareholders and the majority shareholders in accordance with the prevailing law and regulations.*
- b. *PT KCI establish a long-term relationship with shareholders who are based in good faith, trust and mutually beneficial, and committed to always strive so that the Company will experience sustainable growth based on mutual business standards to be able to provide optimum contribution to the Shareholders.*

Corporate Ethics with Mass Media

- a. *PT KCI provides accurate, understandable, relevant and balanced information that is required by the public to the mass media and other public communications.*
- b. *PT KCI develops and monitors the information submitted by the mass media in the framework of service to the community and the continuous improvement of the Company with respect to the cost aspects, risks, corporate ethics, regulations and legislation in force.*
- c. *PT KCI prohibits all matters relating to information and technology on the systems, telephone, e-mail, websites, internet connections and other electronic devices which are inappropriate and violate the Company's regulations and statutory regulations.*
- d. *PT KCI establish equal, balanced and mutually supportive cooperation with the principles of responsible fairness.*
- e. *PT KCI in providing information to the mass media is conducted by the authorized officers to avoid any information that is not suitable and conflicting.*

Corporate Ethics with Creditors

- a. *PT KCI protects the rights and interests of creditors by complying with obligations pursuant to the Agreement between PT KCI and its creditors.*
- b. *PT KCI guarantees to always provide the accurate information of each Company's for creditors in accordance with the agreed agreement.*

Code of Conduct Standards

Admission and Awarding (Gift/Gratuities/Souvenirs)

- a. *The Board of Commissioners, Board of Directors, management and Company's officers shall not engage*



menawarkan, meminta, menerima dan memberi suap, hadiah/gratifikasi/ cinderamata dari rekanan atau pihak lain yang berkepentingan dengan Perusahaan.

- b. Dalam kondisi tidak dapat dihindari, Insan Perusahaan diperbolehkan dengan batasan menerima atau memberi hadiah dan sumbangan dari atau kepada pihak lain, dengan ketentuan sesuai dengan peraturan tentang pengendalian Gratifikasi di lingkungan PT KCI.
- c. Wajib melaporkan hal tersebut kepada Unit Policy GCG dan/atau menyerahkan penggunaannya kepada Perusahaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- d. Penerimaan atau pemberian hadiah/cinderamata/biaya perjalanan dinas oleh pihak sponsor tersebut harus:
 1. Tidak mempengaruhi pengambilan keputusan.
 2. Tidak ada kepentingan pribadi.
 3. Tidak ada unsur suap dan menimbulkan penafsiran suap.
 4. Tidak ada kewajiban untuk memberikan balasan.
 5. Tidak ada imbalan agar mendapat/memberi perlakuan khusus.
 6. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam kebijakan Perusahaan.

Perjamuan/Hiburan

- a. Insan Perusahaan diperkenankan untuk memberi atau menerima pemberian dalam bentuk perjamuan atau hiburan yang pantas dan tidak melanggar susila, apabila hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalin dan memelihara hubungan baik.
- b. Bentuk perjamuan dan hiburan yang dinilai pantas adalah perjamuan dan hiburan di tempat-tempat yang tidak memiliki citra negatif dan layak bagi pencitraan Perusahaan.
- c. Penerimaan dan pemberian perjamuan/hiburan tersebut harus:
 1. Tidak mempengaruhi pengambilan keputusan.
 2. Tidak ada kepentingan pribadi.
 3. Tidak ada unsur suap dan menimbulkan penafsiran suap
 4. Tidak ada kewajiban untuk memberikan balasan.
 5. Tidak ada imbalan agar mendapat/memberi perlakuan khusus.
 6. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam kebijakan Perseroan.

Potongan Harga

Potongan harga yang diberikan oleh rekanan atau calon rekanan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk kepentingan Perusahaan seluruhnya harus dibukukan/diserahkan untuk

in the actions of offering, soliciting, accepting and giving bribes, gifts/gratuities/souvenirs from associates or other interested parties with the Company.

- b. In the unavoidable condition, Company employee is permitted with the limitation of accepting or giving gifts and donations from or to other parties, with provisions in accordance with the regulations on the control of gratification in the environment of PT KCI.
- c. Must report the matter to the Unit Policy GCG and/or submit its use to the Company in accordance with the applicable mechanisms.
- d. Acceptance or awarding of gifts/souvenirs/service travel expenses by the sponsor must:
 1. Does not affect decision making.
 2. No personal interest.
 3. There is no element of bribery and giving interpretation of bribery.
 4. There is no obligation to give a return.
 5. There is no reward for getting/giving special treatment.
 6. Comply to the rules set forth in the Company's policy.

Banquet/Entertainment

- a. The Company employee is allowed to give or receive gifts in the form of appropriate banquets or entertainment and does not violate the moral, if it is done in order to establish and maintain good relations.
- b. Manifestation of appropriate banquets and entertainment are banquets and entertainment in places that have no negative imagery and are worthy of corporate branding.
- c. Acceptance and provision of such banquets/entertainment shall:
 1. Does not affect decision making.
 2. No personal interest.
 3. There is no element of bribery and giving interpretation of bribery.
 4. There is no obligation to give a return.
 5. There is no reward for getting/giving special treatment.
 6. Follow the rules set forth in the Company's policy.

Discounts

The discounted price provided by an associate or prospective partner in order to procure goods or services for the benefit of the Company must all be booked/submitted for the benefit of

kepentingan Perseroan dan diumumkan secara terbuka yang ditindaklanjuti sebagai dasar harga satuan berikutnya.

Dalam melakukan tugasnya Insan Perusahaan wajib menjaga segala manfaat yang diperolehnya benar-benar sepenuhnya diperuntukkan bagi Perusahaan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Konflik Kepentingan

- Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan Insan Perusahaan sebagai pribadi dan untuk kepentingan Perseroan, maka tidak diperkenankan:
 - Memiliki hubungan pekerjaan maupun pribadi termasuk istri/suami, anak, orang tua, sedarah dan/atau semenda sampai derajat/tingkat kedua, yang secara aktif menjadikannya pengambil keputusan di rekanan, Perusahaan rekanan atau calon rekanan, Perusahaan sejenis maupun pesaing.
 - Memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk saham tersebut dimiliki oleh istri/suami, anak, orang tua, sedarah dan/atau semenda sampai derajat/tingkat kedua.
 - Menggunakan jabatan atau posisinya di Perusahaan untuk maksud dan tujuan yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dengan Perusahaan.
- Insan Perusahaan tidak diperkenankan mewakili Perusahaan apabila:
 - Penggunaan informasi, akses atas harta dan sumber daya Perusahaan yang dimanfaatkan tidak untuk kepentingan Perusahaan;
 - Bertindak sebagai pencari atau perantara lain untuk keuntungan pribadi atau golongan dalam transaksi yang melibatkan Perusahaan;
 - Melakukan pekerjaan di luar Perseroan dan/atau terlibat dalam pengelolaan Perusahaan lain yang menjalin atau berusaha menjalin usaha dengan Perusahaan;
 - Memiliki hubungan keluarga karena hubungan istri/suami, anak, orang tua, sedarah dan/atau semenda dalam satu direktorat/sub direktorat/ departemen/ unit kerja;
 - Bertindak sebagai pengguna sekaligus panitia pengadaan.
- Pelanggaran atas konflik kepentingan termasuk namun tidak terbatas pada tindakan dan atau kegiatan sebagai

the Company and publicly announced as the basis for the next unit price.

In carrying out its duty, the Company's employee is obliged to maintain all the benefits that are fully allocated to the Company and comply with the prevailing regulations.

Conflicts of Interest

- To avoid occurrence of the conflicts of interests of the Company employee as private and for the benefit of the Company, then not allowed:
 - Has a work or personal relationship including a wife/ husband, child, parent, blood and/or semenda to degrees/second degree, which actively makes it a decision maker in a partner, a partner Company or a prospective partner, a similar Company and a competitor.
 - Has shares/ownership in a business entity that becomes a partner or competitor that can influence the decision making including the shares are owned by the wife/husband, child, parent, blood and/or Semenda to degrees/second level.
 - Use his position or position in the Company for purposes and objectives that may create conflicts between personal interests and the Company.
- The Company's employee may not represent the Company if:
 - Use of information, access to Company assets and resources utilized not for the benefit of the Company;
 - Act as a seeker or other intermediary for personal gain or group in transactions involving the Company;
 - Freelancing outside the Company scope and/or engage in the management of other companies that establish or attempt to establish business with the Company;
 - Having a family relationship because of the relationship between wife/husband, child, parent, blood and/or semenda in one Directorate/Sub/ Directorate/ Department/Work unit;
 - Act as a user as well as procurement Committee.
- Violation of the conflicts of interest including but not limited to the following actions and activities:



berikut:

- 1) Melakukan transaksi atas nama Perusahaan untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga;
 - 2) Menerima hadiah/manfaat terhadap segala macam jasa/informasi yang terkait dengan Perusahaan yang diberikan;
 - 3) Menjadikan/mengambil peluang bisnis dalam tugas-tugas Insan Perusahaan;
 - 4) Memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, teman atau golongan dan atau pihak lain manapun;
 - 5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir 3, akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Perusahaan.
- 1) *Conduct transactions on behalf of the Company for the self or relatives' interest;*
 - 2) *Receive gifts/benefits against all kinds of services/information related to the Company provided;*
 - 3) *Make/take business opportunities in the tasks of the Company's employee;*
 - 4) *Give preferential treatment to the family, relatives, friends or groups and or any other party;*
 - 5) *Violations as referred to in point 3, will be sanctioned in accordance with the regulations applicable in the Company.*

Anti Monopoli

1. PT KCI mendukung persaingan yang adil, terbuka, dan membangun serta mematuhi hukum anti monopoli yang berlaku baik nasional maupun internasional.
2. Insan Perusahaan tidak boleh terlibat dalam diskusi, kesepakatan resmi atau tidak resmi baik masalah harga, upah, biaya, syarat dan kondisi apapun dengan pesaing.

Antitrust

1. *PT KCI supports fair, open and constructive competition and complies with the prevailing antitrust laws both nationally and internationally.*
2. *The Company's employee should not engage in discussions, formal or unofficial agreements either the issue of price, wages, costs, terms and conditions of any kind with competitors.*

Pencucian Uang

- a. PT KCI melarang insan KCI baik atas nama pribadi maupun atas nama Perusahaan melakukan suatu perbuatan yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, menghibahkan, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan uang-uang hasil tindak pidana dengan tujuan mengaburkan atau menyembunyikan asal usul uang itu, sehingga muncul seolah-olah sebagai uang yang sah.
- b. PT KCI melarang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penerima hibah, sumbangan, penitipan, penukaran uang-uang yang berasal dari tindak pidana itu, dengan tujuan sama yaitu untuk mengaburkan, menyembunyikan asal usulnya.
- c. PT KCI menjamin dan mendukung peraturan dan perundang-undangan tentang pencucian uang baik nasional maupun internasional.

Money Laundering

- a. *PT KCI prohibits the human beings from either personal name or on behalf of the Company doing a deed that intentionally places, transfers, grants, pays, entrust, carries abroad, exchanges money on the outcome of a criminal offence for the purpose of obscuring or hiding the origin of the money, so as to appear as legitimate money.*
- b. *PT KCI prohibits accepting or mastering the placement, transfer, payment, grantee, donation, custody, exchange of money originating from the criminal act, for the same purpose as to obscure, conceal its origin.*
- c. *PT KCI guarantees and supports regulations and legislation on money laundering both nationally and internationally.*

Transaksi Bisnis Internasional

1. PT KCI mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku baik nasional maupun internasional tentang transaksi bisnis internasional, sepanjang Indonesia telah meratifikasinya.
2. Insan Perusahaan yang terlibat dalam masalah transaksi bisnis internasional harus memahami tentang peraturan

International Business Transactions

1. *PT KCI complies with the rules that apply both nationally and internationally about international business transactions, as long as Indonesia has ratified it.*
2. *The Company's employee engaged in international business transaction issues must understand about export-*

ekspor-impor, anti boikot, embargo, sanksi perdagangan dan pasar bebas.

Aktivitas Politik

- a. PT KCI melarang memberikan kontribusi atau pembayaran atau sumbangan atau sumber daya yang berasal dari Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung kepada partai-partai politik atau politikus perorangan.
- b. Insan Perusahaan dilarang melakukan pemaksaan/ancaman sehingga membatasi hak individu untuk menyalurkan aspirasi politiknya.
- c. PT KCI mematuhi kaidah dan peraturan tentang keterlibatan seorang pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekerjaan Lain

- a. Insan Perusahaan harus menghindari aktivitas di luar jam kerja Perusahaan yang dapat mengganggu tugas atau perbuatan yang melanggar etika, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. PT KCI melarang Insan Perusahaan melakukan pekerjaan di luar dinas yang mengganggu jam kerja kecuali pekerjaan dimaksud dilakukan untuk memenuhi tugas dinas dalam pelaksanaannya yang bersangkutan harus melaporkan ke atasan langsung sebelumnya.

Penggunaan Peralatan/Fasilitas Perusahaan

1. PT KCI menyediakan peralatan dan fasilitas yang memadai bagi Insan Perusahaan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien.
2. Insan Perusahaan harus menggunakan dan menjaga sebaik-baiknya peralatan dan fasilitas yang tersedia untuk kepentingan Perusahaan dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
3. Insan Perusahaan harus menggunakan fasilitas tersebut sesuai dengan etika, kesopanan, susila dan moralitas yang berlaku dan penuh tanggung jawab serta tidak mengandung unsur pornografi dan pelecehan seksual.
4. Insan Perusahaan harus mengamankan harta Perusahaan dari kerusakan dan kehilangan serta mengembalikan seluruh peralatan/fasilitas Perusahaan pada akhir masa tugas di Perusahaan.
5. Insan Perusahaan harus mengganti peralatan dan fasilitas yang hilang yang telah diserahkan dan di bawah tanggungjawabnya sesuai dengan nilai buku peralatan dan fasilitas tersebut.

Penggunaan dan Penanganan Informasi/Data

1. Insan Perusahaan dilarang memberikan/membocorkan

import regulations, anti-boycott, embargo, trade sanctions and free markets.

Political Activity

- a. PT KCI prohibits the contribution or payment or donations or resources derived from the Company either directly or indirectly to political parties or individual politicians.
- b. The Company is not allowed to conduct threats and restrict the rights of individuals to channel their political aspirations.
- c. PT KCI complies with the rules and regulations on the involvement of an officer in accordance with the prevailing provisions.

Other Task

- a. The Company's employee shall avoid activities outside of business hours that may interfere with the duties or deeds that violate the ethics, regulations and legislation in force.
- b. PT KCI prohibits the Company's work outside the service that interferes with working hours unless the work is done to fulfill the duties in the implementation in question should report to the supervisor directly before.

The Company's Equipment/Facilities Usage

1. PT KCI provides adequate equipment and facilities for the Company's employee to support the implementation of its duties effectively and efficiently.
2. The Company's employee must use and maintain the most appropriate equipment and facilities available for the benefit of the Company and do not use it for personal and family interests.
3. The Company's employee must use the facility in accordance with applicable ethics, politeness, moral and morality and do not contain any element of pornography and sexual harassment.
4. The Company will have to secure the Company's property from damage and loss and restore all Company equipment/facilities at the end of the assignment in the Company.
5. The Company shall replace the lost equipment and facilities that have been submitted and under its responsibility according to the value of the book of equipment and facilities.

Use and Handling of information/Data

1. The Company's employee are prohibited from providing/



informasi mengenai keuangan, operasional, data teknik, desain dan spesifikasi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, manajemen, dokumen hukum, data dan dokumen hasil audit, data insan Perusahaan, data remunerasi, data dan dokumen rekanan serta informasi Perusahaan lainnya baik secara tertulis maupun lisan kepada pihak lain manapun dan untuk alasan apapun atau kepentingan penyidikan/hukum tanpa seizin tertulis dari Direksi.

2. Insan Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dan hanya menggunakan informasi yang bersifat rahasia sebatas untuk keperluan pekerjaan.
3. Insan Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data serta tidak diperkenankan untuk meletakkan arsip atau data Perusahaan yang bersifat rahasia di tempat yang memungkinkan dilihat oleh orang yang tidak berhak.
4. Insan Perseroan harus melakukan pencatatan data transaksi dan informasi secara jujur, lengkap, benar, akurat, tepat waktu dan mudah dipahami berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Insan Perusahaan harus melaporkan seluruh informasi dan data yang diketahuinya dengan tepat, jujur, adil, benar dan akurat apabila diminta oleh atasannya/Direksi/Dewan Komisaris dalam waktu selama-lamanya 2 (dua) kali 24 jam.
6. Insan Perusahaan dilarang memasukkan tagihan atau permintaan pembayaran berdasarkan data yang diketahui palsu.
7. Insan Perusahaan harus menghindari pembicaraan mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan usaha, kondisi keuangan serta hal-hal lain tentang Perseroan di tempat-tempat umum yang memungkinkan hal tersebut terdengar oleh orang yang tidak berhak.
8. Insan Perusahaan harus mengembalikan seluruh dokumen/media apapun yang berisi informasi Perusahaan apabila sudah tidak bertugas di Perusahaan.
9. Insan Perusahaan harus tetap menjaga setiap informasi data yang pernah dikuasainya selama bekerja atau informasi yang diketahuinya selama bekerja, ketika Insan Perusahaan tersebut sudah tidak bertugas di Perusahaan tersebut. Insan Perusahaan tetap akan dimintakan pertanggungjawabannya apabila membocorkan informasi ketika yang bersangkutan sudah tidak bertugas di Perusahaan.

leaking information on finance, operations, technical data, design and specifications issued by the Company, management, legal documents, data and documents of audit, Company's employee data, remuneration data, data and documents of the partner and other Company's information either in writing or oral to any other party and for any reason or the interest of the investigation/law without the written consent from the Board of Directors.

2. *The Company's employee responsible to safeguard and use only confidential information for the employment purpose.*
3. *The Company's employees are obliged to maintain the confidentiality of information and data and are not allowed to place confidential records or corporate data in a place that is possible to be seen by unauthorized persons.*
4. *The Company's employee must record the transaction data and information honestly, complete, true, accurate, timely and understandable based on the accountable evidence.*
5. *The Company's employee has to report all information and data that it knows appropriately, honestly, fairly, correctly and accurately when requested by the superiors/Directors/Board of Commissioners within 2 (two) times for 24 hours.*
6. *The Company's employees are prohibited from adding bills or payment requests based on false data.*
7. *The Company's employee must not leak information and data relating to business activities, financial conditions and other matters about the Company in public places that make it possible to be heard by unauthorized persons.*
8. *The Company's employee has to return all documents/media containing the Company information if declared inactive from their duties.*
9. *The Company's employee must keep any data information that has been mastered during the work or information he or she knows during work, when the Company's employees are no longer served in the Company. The Company's employees will still be held accountable when divulging information if declared inactive from their duties.*

Penghormatan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Hak atas kekayaan intelektual merupakan kekayaan tidak berwujud yang meliputi hak paten, rahasia dagang, merek dagang, hak cipta dan informasi yang dimiliki Perseroan.
2. Insan Perseroan harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perseroan.
3. Insan Perseroan harus memperhatikan segala tindakan Perseroan dalam bentuk apapun untuk menjaga agar tindakannya tersebut tetap menghormati setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh pihak lain.
4. Insan Perseroan dalam menggunakan hak kekayaan intelektual Perseroan maupun orang lain harus sesuai dengan kewenangan serta keperluan dalam pekerjaan.
5. Insan Perseroan senantiasa melindungi serta menjaga informasi teknis atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Perusahaan.
6. Insan Perseroan senantiasa menaati peraturan ketika menggunakan kekayaan intelektual yang dimiliki Perseroan maupun orang lain, serta menggunakan sesuai dengan peruntukannya.
7. Insan Perseroan dilarang menggunakan hak atas kekayaan intelektual milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
8. Insan Perseroan dilarang menyampaikan maupun membocorkan informasi atas produk atau jasa baru sebelum adanya konfirmasi secara resmi oleh Perseroan.
9. Apabila terdapat informasi mengenai hak atas kekayaan intelektual yang belum jelas, harap terlebih dahulu berkoordinasi dengan Unit Hukum dan Kepatuhan.
10. Apabila Insan Perseroan menemukan adanya pelanggaran terhadap penggunaan hak atas kekayaan intelektual milik Perseroan maka Insan Perseroan wajib melaporkan kepada Unit Hukum dan Kepatuhan.

Reverence for Intellectual Property Rights

1. *Intellectual property rights constitute intangible wealth that includes patents, trade secrets, trademarks, copyrights and information owned by the Company.*
2. *The Company must actively participate to protect the intellectual property rights of the Company.*
3. *The Company's employee should observe any actions of the Company in any form to keep the act in respect of any intellectual property rights owned by the other party.*
4. *The Company's employee in the usage of the Company's intellectual property and other persons must be in accordance with the authority and work demand related.*
5. *The Company's employee always protecting and safeguard technical information on the intellectual property owned by the Company.*
6. *The Company's employee always complies with the rules when using the intellectual property owned by the Company and others, and use according to the regulation.*
7. *The Company's employees are prohibited from using corporate intellectual property for personal benefit.*
8. *The Company's employees are prohibited from conveying or divulging information on new products or services prior to the official confirmation by the Company.*
9. *In the case of any unclear intellectual property rights, please coordinate with the legal and compliance Unit.*
10. *If the Company's employee found a violation of the use of the Company's intellectual property rights, the Company is obliged to report to the Unit of law and compliance.*



Isi Kode Etik

Code of Conducts Contents



Mekanisme Penegakan Kode Etik

Prinsip Dasar

Pedoman Perilaku dan Etika Kerja ini menjadi pedoman bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas Perusahaan. Setiap pelanggaran terhadap pedoman perilaku dan standar etika yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian finansial maupun non finansial bagi Perusahaan, merupakan tindakan indisipliner yang patut dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya insan KCI dapat mengajukan pertanyaan mengenai pedoman perilaku dan etika kerja kepada atasan masing-masing.

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman perilaku dan etika kerja dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh insan KCI.

PERNYATAAN KEPATUHAN

- Insan PT KCI diharuskan memahami pedoman perilaku dan etika kerja Perusahaan.
- Setiap tahun segenap insan PT KCI wajib menyatakan kepatuhan terhadap pedoman perilaku dan etika kerja Perusahaan dan menandatangani surat pernyataan baik secara manual ataupun digital.
- Surat pernyataan yang ditandatangani merupakan salah satu syarat sebagai pegawai di PT KCI.
- Masing-masing atasan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap pegawainya terkait pedoman perilaku dan etika kerja untuk pegawai yang menjadi tanggungjawabnya.
- Pemantauan pengumpulan pernyataan kepatuhan pegawai baik secara manual atau digital setiap tahunnya dilakukan oleh Unit Policy Good Corporate Governance.

Pelaporan Pelanggaran Kode Etik

Adapun gambaran umum pelaporan sebagai berikut:

- Pelapor dapat menyampaikan laporan mengenai terjadinya atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan ini kepada Unit Policy Good Corporate Governance (GCG) baik secara langsung ataupun melalui surat atau e-mail yang disertai dengan minimal 2 (dua) bukti pendukung.
- Sehubungan dengan pelaporan terjadinya pelanggaran, pelapor harus menyebutkan secara jelas identitas pelaku pelanggaran dan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dan menyebutkan secara jelas identitas pelaku.
- PT KCI dan Unit Policy Good Corporate Governance menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Code of Conduct Enforcement Mechanism

Basic Principles

This Code of Conduct and Ethics Guidelines become a guideline to behave and act in carrying out the duties of the Company. Any breach of the Code of Conduct and ethical standards that may directly or indirectly result in financial or non-financial loss for the Company, is an indispliner action that should be penalized according to the level of infringement based on prevailing regulations.

In the implementation of the KCI human beings can ask questions about the code of conduct and work ethics to their respective superiors.

The Board of Directors are responsible for ensuring that the Code of Conduct and work ethics are understood and implemented by all KCI human beings.

COMPLIANCE DECLARATION

- PT KCI employees are required to understand the Company's code of Conduct.
- Each year all PT KCI employees shall declare compliance with the Code of Conduct and work ethics of the Company and sign a statement letter either manually or digitally.
- Signing the statement letter is one of the requirements as an employee of PT KCI.
- Each employer has an obligation to undertake the construction of its employees related to the Code of Conduct and work ethics for the employees who are responsible.
- Monitoring of statement collection of employee compliance either manually or digitally, and annually conducted by the Good Corporate Governance Policy Unit.

Disclosure of Code of Conduct Violations

The general overview of reporting is as follows:

- The whistleblower may submit a report on the occurrence or alleged violations of the Company's code to the Unit Policy of Good Corporate Governance (GCG) either directly or by mail or e-mail accompanied by a minimum of 2 (two) supporting evidence.*
- In line with the reporting of violations, the reporter shall clearly identify the identity of the perpetrator and the actions of the perpetrator committed by the performer and clearly mention the identity of the perpetrator.*
- PT KCI and Unit Policy Good Corporate Governance Guarantee the confidentiality of the reporter's identity.*



4. Kerahasiaan laporan akan dijamin kecuali perusahaan membutuhkan tindakan penyidikan lebih lanjut untuk kepentingan Perusahaan. 5. Laporan pelanggaran atau dugaan pelanggaran dikirim ke alamat e-mail laporgcg@krl.co.id ataupun dengan mendatangi langsung ke Unit Policy Good Corporate Governance.	4. The confidentiality of the report will be guaranteed unless the Company requires further investigation action for the benefit of the firm. 5. Reports of violations or alleged violations are sent to laporgcg@krl.co.id e-mail address or by directly to the Unit Policy of Good Corporate Governance.

Hierarki Penanganan Pelaporan Pelanggaran Kode Etik di KCI
Hierarchy of Code of Conduct Violations Report Processing in KCI

No.	Terlapor Suspect	Yang Menangani Manager	Dilaporkan Kepada Report Recipient	Verifikator Verifier
1.	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Pemegang Saham <i>Shareholders</i>
2.	Direksi <i>Board of Directors</i>	Dewan Komisaris dan Pemegang Saham <i>Board of Commissioners and Shareholders</i>	Dewan Komisaris dan Komite Audit <i>Board of Commissioners and Audit Committee</i>	Dewan Komisaris dan Pemegang Saham <i>Board of Commissioners and Shareholders</i>
3.	Vice President dan Manajer <i>VP and Manager</i>	Komite Etika (GCG, Sekper, Legal, SDM, SPI) <i>Ethic Committee (GCG, Corporate Secretary, Legal, HR, SPI)</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>	Komite Audit <i>Audit Committee</i>
4.	Pelaksana-Junior Manajer <i>Officer-Junior Manager</i>	Komite Etika (GCG, Sekper, Legal, SDM, SPI) <i>Ethic Committee (GCG, Corporate Secretary, Legal, HR, SPI)</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>	SPI
5.	Stakeholders	Komite Etika (GCG, Sekper, Legal, SDM, SPI) <i>Ethic Committee (GCG, Corporate Secretary, Legal, HR, SPI)</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>	SPI

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

1. Pelanggaran atas pedoman perilaku dan etika kerja ini diberikan sanksi sesuai Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Peraturan Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tim *Good Corporate Governance* berhak menyatakan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran kode Etik yang dilakukan.
3. Pelanggaran terhadap kode Etik Perusahaan akan ditindaklanjuti secara adil, tegas, konsisten.

Penyebarluasan Kode Etik

Perseroan melakukan sosialisasi kode etik menggunakan media cetak internal Perusahaan, *broadcast* e-mail, pembuatan poster dan melakukan sosialisasi secara klasikal.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Pada tahun 2020, tidak terdapat kasus pelanggaran kode etik yang terjadi di dalam Perseroan.

Ketentuan Mengenai Terjadinya Konflik Kepentingan Pribadi

KCI selalu berkomitmen untuk menciptakan kegiatan operasional yang menjunjung tinggi etika, baik dalam berbisnis dan bekerja serta terbebas dari praktik-praktik yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang disebabkan oleh benturan kepentingan. Oleh karena itu Perusahaan membuat kebijakan tentang benturan kepentingan yang diatur dalam surat keputusan Direksi Nomor SK.037/CU/KCI/IX/2017 tanggal 27 September 2017 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance di Lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia, Surat Keputusan Direksi Nomor SK.044/CU/KCI/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 dan Surat Keputusan Direksi PT KCI Nomor SK.025/CU/KCI/VI/2018 Tanggal 04 Juni 2018 Tentang Pedoman Kode Etik PT Kereta Commuter Indonesia yang kemudian dimutakhirkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.046/CU/KCI/IX/2019 Tanggal 24 September 2019.

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi yang dihadapi oleh Insan KCI yang karena jabatan atau posisinya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan, baik secara sengaja maupun kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan yang dapat merugikan Perusahaan. PT KCI telah membuat kebijakan tentang benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan dan seluruh Insan KCI diharuskan mengetahui berbagai bentuk benturan kepentingan, penyebab terjadinya benturan kepentingan dan tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi situasi benturan kepentingan.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

1. Violations of the code of conduct and ethics are subject to sanctions pursuant to the joint work Agreement and/or Company rules and the provisions of the prevailing laws and regulations.
2. Good Corporate Governance Team has the right to declare an occurrence or no violation of the Code of Conduct.
3. Violations of the Company's Code of Conduct will be acted fairly, firmly, consistently.

Code of Conduct Socialization

The Company conducts the socialization of ethical code using the Company's internal print media, broadcast e-mail, poster making and classical socialization.

Total of Code of Conducts Violation

In 2020, there were no cases of code violations that occurred within the Company.

Provisions Regarding the Occurrence of Personal Conflict of Interest

KCI has always been committed to creating operational activities that uphold ethics, both in doing business and working and free from practices that caused violations by conflicts of interest. Therefore, the Company makes a policy on the conflict of interest stipulated in the Decree of the Board of Directors number SK.037/CU/KCI/IX/2017 dated September 27, 2017 concerning the Code of Corporate Governance in the environment of PT Kereta Commuter Indonesia, Decree of the Board of Directors number SK.044/CU/KCI/X/2017 dated October 31, 2017 and decree of the Board of Directors of PT KCI number SK.025/CU/KCI/VI/2018 dated June 4, 2018 concerning the Code of conduct of PT Kereta Komuter Indonesia, which was then updated with Directors Decree Number 046/CU/KCI/IX/2019 dated September 24, 2019.

Conflict of interest is a condition faced by the KCI employee who because the position or position has the authority that can potentially be abused, either intentionally or in the quality of the decision, as well as the performance of decision results that could harm the Company. PT KCI has made policies on conflicts of interest in the Company's environment and all KCI's employee are required to know various conflicts of interest, the cause of conflicts of interest and actions to be taken in case of conflict of interest situations.



Bentuk-bentuk situasi tentang benturan kepentingan di Perusahaan antara lain:

1. Kondisi yang menyebabkan Insan KCI menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan dan Perusahaan yang menguntungkan pihak pemberi;
2. Kondisi yang menyebabkan penggunaan fasilitas/aset Perusahaan, jabatan, dan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
3. Kondisi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
4. Kondisi perangkapan jabatan di beberapa Perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. Kondisi yang memberikan akses khusus kepada Insan PT KCI atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
6. Kondisi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
7. Kondisi atas kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi di mana obyek tersebut merupakan hasil dari tim penilai;
8. Kondisi adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
9. Kondisi *post employment* (antara lain: berupa *trading influence*, rahasia, jabatan);
10. Kondisi pada saat seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
11. Kondisi bekerja lain, di mana bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
12. Kondisi yang memungkinkan pengguna diskresi (keputusan menurut pertimbangannya sendiri) yang menyalahgunakan wewenang;
13. Kondisi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan;
14. Kondisi memberikan keistimewaan maupun peluang kepada calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan;
15. Kondisi di mana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan PT KCI dengan pihak lain yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan PT KCI sehubungan dengan jabatannya di Perseroan;
16. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan PT KCI yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya Perusahaan yang ada;
17. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan Insan PT KCI mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

The circumstances of the conflict of interest in the Company include:

1. *Conditions that cause the KCI employee to granted gratification or granting or acceptance of gifts/souvenirs or entertainment on a decision or position and the Company that benefits the party of the providers;*
2. *Conditions that caused the use of Company facilities/assets, offices, and companies for personal, group, or class purposes;*
3. *Conditions that cause confidential information of the department or Company are used for personal or group purposes;*
4. *Conditions of concurrent position in some companies that have direct or indirect relationship, similar or not similar, so that can cause the use of a position for the sake of other departments;*
5. *Conditions that give special access to PT KCI Employees or certain parties to disobey the procedures and conditions that should be enforced;*
6. *Conditions that cause the supervision process are not in accordance with the procedure due to the influence and expectation of the supervised party;*
7. *The condition of the assessment of an object of qualification where the object is the result of the appraiser;*
8. *Condition of authority abuse;*
9. *Post employment conditions (among others: manifested in trading influence, secrets, offices);*
10. *Conditions in which a person can determine their own salary/remuneration amount;*
11. *Other working conditions, which work not in accordance with the main tasks and functions;*
12. *Conditions that make it possible for the user's discretion (a decision according to its own discretion) who authority abuse;*
13. *Conditions that make it possible to provide more information than the Company has determined;*
14. *Conditions provide privileges and opportunities to prospective providers of goods/services to win in the process of procurement of goods/services in the Company;*
15. *Conditions in which there is an affiliate/family relationship between PT KCI employee and other parties who have an interest in the decision and/or actions of PT KCI employee in relation to the Company's position;*
16. *Weakness of the organizational system, namely the situation that is a constraint for the achievement of the purpose of the implementation of the authority of PT KCI employee due to the rules, structure and current Company's custom;*
17. *Vested interest is the desire/need of PT KCI employees about personal matter.*

Guna menjamin bahwa pelaksanaan penanganan kegiatan benturan kepentingan dapat diketahui oleh seluruh Insan KCI serta seluruh *stakeholder* yang berhubungan dengan PT KCI maka seluruh pihak di lingkungan PT KCI menjadi contoh (*role model*) dalam menegakan benturan kepentingan. Unit Policy *Good Corporate Governance* dan Sekretaris Perusahaan menjadi pihak yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan tentang benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan.

Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan

Setiap Insan PT KCI dapat melaporkan kondisi benturan dengan melaporkan kepada:

- a. Atasan Langsung
Pelaporan melalui atasan langsung dapat dilakukan apabila diketahui pelapor yang merupakan Insan KCI yang terlibat langsung atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam kondisi benturan kepentingan.
- b. *Whistleblowing System*
Pelaporan melalui *Whistleblowing System* dilakukan apabila diketahui pelapor adalah Insan KCI atau pihak ketiga (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya potensi benturan kepentingan di Perusahaan. Pelaporan melalui *Whistleblowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan

Pelanggaran terhadap pedoman penanganan benturan kepentingan akan dikenakan sanksi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan PT KCI, Peraturan Kerja Bersama PT KAI dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah Pelanggaran Benturan Kepentingan

Sampai dengan per 31 Desember 2020 tidak ada pelanggaran benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Perseroan.

In order to ensure that the implementation of the conflict of interest activities can be known by all KCI employee and all stakeholders related to PT KCI then all the parties in the PT KCI is an example (role model) in the conflict of interest. Unit Policy Good Corporate Governance and Corporate Secretary are the parties assigned to supervise and construct the conflicts of interest in the Company.

Conflict of Interest Reporting Mechanisms

Each of PT KCI's employees are allowed to report impact conditions by reporting to:

- a. *Direct supervisor*
Reporting through a direct supervisor can be done when known whistleblowers who are the KCI employee are directly involved or have the potential to be directly involved in a conflict of interest conditions.
- b. *Whistleblowing System*
Reporting through Whistleblowing System triggered when known whistleblowers are the employee of PT KCI or third parties (customers, partners and communities) who do not have direct involvement, but are aware of potential conflicts of interest in the Company. Reporting through Whistleblowing System is implemented in accordance with the individual mechanisms established by the Company.

Sanctions for Conflict of Interest

Violations of the conflict of interest handling guidelines will be subject to applicable sanctions as stated in the Company rules of PT KCI, the Joint venture regulation of PT KAI and or the prevailing laws and regulations.

Total Conflicts of Interest Violations

As of December 31, 2020 there were no violations of conflicts of interest in the Company's environment.



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan bagian dari pengendalian Perseroan dalam mencegah kecurangan demi mewujudkan penerapan dan penegakan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) telah diatur melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK.038/CU/KCI/IX/2017 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang ditetapkan pada 28 September 2017.

Adapun hal-hal yang tercantum dalam pedoman tersebut, di antaranya:

1. Menangani pelaporan dugaan adanya pelanggaran secara sistematis, efektif dan efisien;
2. Memberikan perlindungan kepada seluruh pegawai dan/atau saksi yang telah memberikan informasi dan bukti.

Prinsip Dasar Whistleblowing System di PT Kereta Commuter Indonesia

1. Cepat: Laporan dugaan pelanggaran disampaikan melalui *Whistleblowing System* harus ditangani secara cepat.
2. Komunikatif: Perseroan akan melakukan komunikasi dengan pelapor terkait perkembangan tindak lanjut laporannya.
3. Kerahasiaan: Perseroan melindungi kerahasiaan identitas pelapor yang beritikad baik, laporan dan segala data lain yang terkait dengan laporan yang masuk melalui *Whistleblowing System*.
4. Keakuratan: Laporan yang masuk melalui *Whistleblowing System* yang akan ditindaklanjuti hanya yang terkait dengan hal-hal yang akurat, bukan berdasarkan dendam atau fitnah atau orientasi tertentu dalam melaporkan dugaan pelanggaran seseorang.
5. Tidak Diskriminatif: Setiap insan Perseroan dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Perseroan lainnya yang terjadi di lingkungan Perusahaan sesuai dengan bentuk tindak pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui *Whistleblowing System*.
6. Perlindungan: Perseroan memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang dapat merugikan pelapor.

Ruang Lingkup WBS

Whistleblowing System ini berlaku bagi seluruh Insan Perseroan termasuk pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya, dengan ruang lingkup yang diatur dalam pedoman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*)
2. Pelaporan dan tindak lanjut laporan pelanggaran
3. Hak dan kewajiban pelapor
4. Penghargaan dan sanksi
5. Lain-lain

Whistleblowing System is part of controlling the Company in preventing fraud to realize the implementation and enforcement of Good Corporate Governance. *Whistleblowing System Policy* has been governed by the Decree of the Board of Directors number SK. 038/CU/KCI/IX/2017 regarding the *Whistleblowing system* set on September 28, 2017.

As for the things listed in the guidelines, including:

1. Systematically, effectively and efficiently address the reporting of suspected violations;
2. Provide protection to all officers and/or witnesses who have provided information and evidence.

The Basic Principles of Whistleblowing System at PT Kereta Commuter Indonesia

1. Fast: Report alleged violations delivered through *Whistleblowing System* should be handled quickly.
2. Communicative: The Company will communicate with the reporters regarding the progress of the follow-up report.
3. Confidentiality: The Company protects a good faith identity of the reporter, the report and any other data related to the report entered through the *Whistleblowing System*.
4. Accuracy: reports entered into through the *Whistleblowing System* that will be acted upon only in relation to accurate matters, not based on grudges or defamation or orientation in reporting suspected violations.
5. Anti-discrimination: Any Company personnel can report violations committed by the other employee occurring in the Company's environment in accordance with the form of violations that can be reported through *Whistleblowing System*.
6. Protection: The Company provides protection against treatment that can harm the reporter.

WBS Scope

Whistleblowing System is applicable to all employee including other stakeholders, with the scope set out in this manual covering:

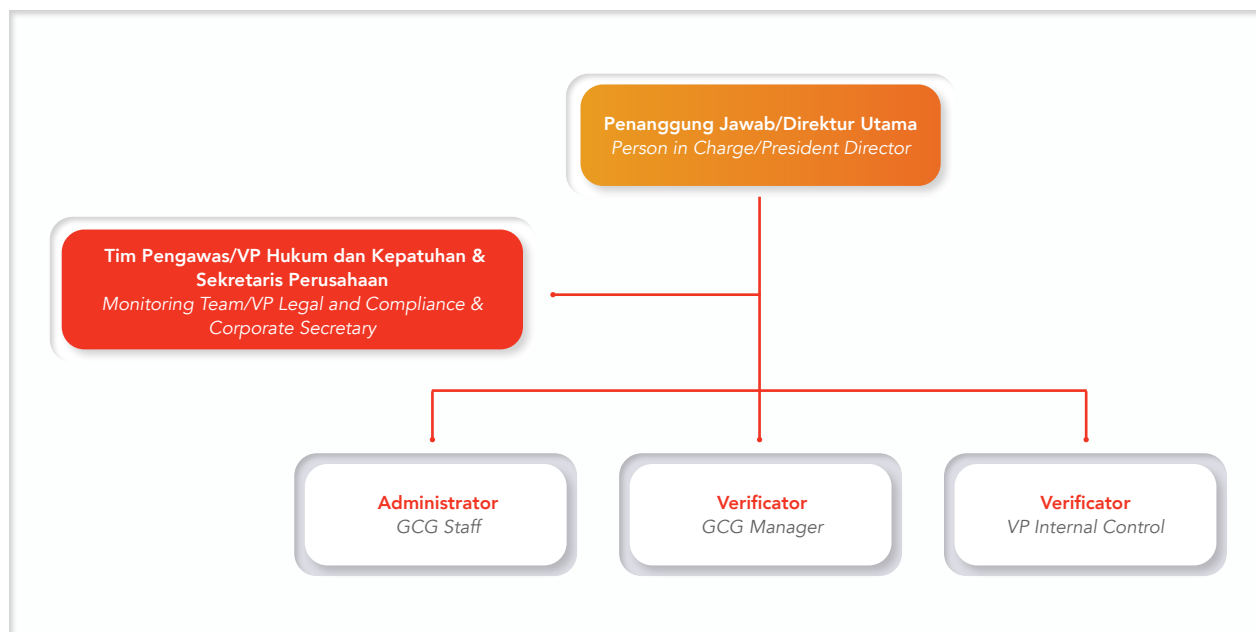
1. *Whistleblowing system*
2. Reporting and follow-up report violations
3. Reporting rights and obligations
4. Awards and Disclames
5. Other

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Whistleblowing Mechanism

Pelaksanaan WBS di PT KCI didukung oleh penyelenggara yang terdiri dari:

The implementation of WBS at PT KCI is supported by organizers consisting of:



Setiap penyelenggara memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK.038/CU/KCI/IX/2017. Perseroan menyediakan platform bagi pihak yang ingin melaporkan adanya bentuk pelanggaran berupa e-mail melalui laporgcg@krl.co.id.

Each organizer has the duties, authorities and obligations stipulated in the Decree of the Board of Directors Decree No. 038/CU/KCI/IX/2017. The Company provides a platform for the party who wants to report a form of e-mail violation through laporgcg@krl.co.id.

Penanganan Pengaduan

Mekanisme dalam sistem pelaporan pelanggaran terdiri dari proses yang saling terkait satu sama lainnya, meliputi:

1. Administrator menerima laporan dan memberikan tanda terima kepada pelapor;
2. Administrator mengadministrasikan laporan dugaan pelanggaran dalam Buku Agenda, dengan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nomor register laporan;
 - b. Tanggal penerimaan laporan;
 - c. Identitas pelapor (*full disclosure*);
 - d. Deskripsi singkat isi laporan;
 - e. Petugas penerima laporan.

Whistleblowing Mechanism

Mechanisms in the reporting system of violations consist of interrelated processes of each other, including:

1. The administrator receives the report and provides a receipt to the whistleblower;
2. The Administrator administates reports of alleged violations in the Agenda book, with at least containing:
 - a. Number register report;
 - b. Date of receipt of report;
 - c. Identity of the reporter (*full disclosure*);
 - d. Brief description of the report content;
 - e. The recipient of the report.



3. Administrator membuat resume penerimaan laporan dugaan pelanggaran, menyampaikan kepada verifikator setiap 1 (satu) minggu sekali, dengan dilampiri dokumen laporan yang diterima dari pelapor;

Penelaah melakukan telaahan terhadap hasil verifikasi dari verifikator, membuat laporan hasil telaahan termasuk usulan rekomendasi tindak lanjut penanganannya untuk disampaikan kepada Penanggung Jawab, paling lama 2 (dua) minggu terhitung sejak diterimanya laporan hasil verifikasi dari verifikator.

3. *The Administrator makes a resume of receipt report of alleged infringement, convey to the verifikator every 1 (one) week, by enclose the report documents received from the whistleblower;*

Reviewers review the verification results from the verifikator, generate a report of the review results including the follow-up recommendation to be submitted to the person responsible, at least 2 (two) weeks from the date of receipt of the verification result from the verifier.

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Protection to Whistleblower

Adapun hak-hak perlindungan yang Perseroan bagi pelapor dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perlindungan diberikan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perlindungan hanya dapat diberikan kepada pelapor dengan kategori *full disclosure* dan *partial anonymity*, dengan dirahasiakan identitas beserta laporan yang disampaikannya;
3. Pelapor menyampaikan permohonan perlindungan kepada Penanggung Jawab dalam hal pelapor menerima ancaman pemecatan yang tidak adil, penurunan pangkat, pelecehan, atau diskriminasi dalam bentuk, dan catatan yang merugikan dalam *file* pribadinya;
4. Bentuk perlindungan terhadap disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan balasan yang diterima;
5. Dengan pertimbangan tertentu, Perseroan dapat memberikan perlindungan kepada keluarga pelapor;
6. Pemberian perlindungan kepada pelapor dapat ditolak atau dihentikan apabila:
 - a. Terdapat bukti bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor kepada Perseroan ternyata palsu/fitnah atau mempunyai tujuan yang menyimpang dari tujuan penyelenggaraan WBS;
 - b. Terdapat bukti bahwa pelapor tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya.

The protection rights of the Company to reporters with the following provisions:

1. *Protection is provided to remain aware of the confidentiality and the provisions applicable in the Company and the prevailing laws and regulations;*
2. *Protection can only be given to whistleblowers in the full disclosure and partial anonymity categories, with the confidential identification of the report;*
3. *The whistleblowers shall submit an application for protection of the responsible person in the event that the reporter receives the threat of unfair dismissal, demotion, harassment, or discrimination in the form of, and adverse records in his personal files;*
4. *Form of protection against adjusted to the form of threat/retaliation received;*
5. *In certain consideration, the Company may provide protection to the family of whistleblowers;*
6. *Granting of protection to the reporter may be rejected or terminated if:*
 - a. *There is evidence that the report of violations submitted by the reporter to the Company shall be false/defamatory or have a deviant purpose from the purpose of the WBS.*
 - b. *There is evidence that the whistleblowers does not perform its obligations in maintaining the confidentiality of its identity and report.*

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Parties in Charge of Whistleblowing

No.	Terlapor Suspect	Yang Menangani Manager	Dilaporkan Kepada Report Recipient	Verifikator Verificator
1	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Pemegang Saham <i>Shareholders</i>
2	Direksi <i>Board of Directors</i>	Dewan Komisaris dan Pemegang Saham <i>Board of Commissioners and Shareholders</i>	Dewan Komisaris dan Komite Audit <i>Board of Commissioners and Audit Committee</i>	Dewan Komisaris dan Pemegang Saham <i>Board of Commissioners and Shareholders</i>
3	Vice President dan Manajer <i>VP and Manager</i>	Komite Etika (GCG, Sekper, Legal, SDM, SPI) <i>Ethic Committee (GCG, Corporate Secretary, Legal, HR, SPI)</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>	Komite Audit <i>Audit Committee</i>
4	Pelaksana-Junior Manajer <i>Officer-Junior Manager</i>	Komite Etika (GCG, Sekper, Legal, SDM, SPI) <i>Ethic Committee (GCG, Corporate Secretary, Legal, HR, SPI)</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>	SPI
5	Stakeholders	Komite Etika (GCG, Sekper, Legal, SDM, SPI) <i>Ethic Committee (GCG, Corporate Secretary, Legal, HR, SPI)</i>	Direktur Utama <i>President Director</i>	SPI

LAPORAN YANG DITERIMA SELAMA TAHUN 2020

Reports Received During 2020

Selama tahun 2020, Perseroan mencatat tidak adanya pengaduan mengenai praktik *Whistleblowing System*.

During 2020, the Company noted no complaints regarding the practice of Whistleblowing System.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Gratification Control

Kebijakan mengenai Gratifikasi di PT KCI diatur dalam Keputusan Direksi Nomor SK.039/CU/KCI/IX/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT KCI yang ditetapkan pada 28 September 2017. Dalam pedoman ini dijelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pengendalian gratifikasi, mekanisme pengendalian dan pelaporan gratifikasi, perlindungan, penghargaan dan implementasi serta sanksi yang didapat apabila melakukan pelanggaran tersebut.

The policy on gratification at PT KCI is governed by the decision of the Board of Directors Decree No. 039/CU/KCI/IX/2017 on the guidelines of gratification control in the PT KCI environment set on September 28, 2017. This guideline is explained about the basic principles of implementation of gratification control, control mechanism and reporting gratification, protection, awards and implementation and sanctions obtained when committing such violations.



Penanggung jawab pengendalian praktik gratifikasi yang terjadi di lingkungan Perseroan adalah Direktur Utama. Dalam penyelenggaraannya proses pengendalian tersebut dilakukan oleh Unit Sekretaris Perseroan.

Ruang Lingkup

Pedoman gratifikasi di PT Kereta Commuter Indonesia mengatur pengendalian gratifikasi antara Insan Perseroan dengan pihak-pihak terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Sekretaris Perusahaan Sebagai Unit Pengendali Gratifikasi Perusahaan

- Menyiapkan aturan terkait pengelolaan dan pengendalian praktik gratifikasi.
- Menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas terkait pengendalian praktik gratifikasi, baik dari penerimaan laporan gratifikasi sampai dengan pengiriman Surat Ketetapan Gratifikasi kepada Wajib Lapor Gratifikasi.
- Menyiapkan tempat penyimpanan bukti penyetoran uang yang diterima dari gratifikasi apabila ditetapkan Unit Pengendali Gratifikasi Induk Perusahaan/KPK menjadi milik Perseroan/Negara.
- Mendiseminasikan/sosialisasi/internalisasi kebijakan pengendalian Praktik Gratifikasi kepada Insan Perseroan, pihak lain, dan *stakeholders*.
- Menerima laporan, menyimpan benda gratifikasi, memilah kategori gratifikasi, memproses, dan menetapkan pemanfaatan Laporan Gratifikasi.
- Memantau dan mengevaluasi laporan yang telah diterima secara langsung maupun melalui media pelaporan *online* pada e-mail GCG PT KCI dan tindak lanjut yang telah dilakukan.
- Melaporkan kegiatan Unit Sekretaris Perusahaan sebagai Unit Pengendali Gratifikasi Perusahaan kepada penanggung jawab (Direktur Utama) setiap triwulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan dan untuk kemudian dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi Induk Perusahaan.
- Unit Sekretaris Perusahaan sebagai Unit Pengendali Gratifikasi memetakan area risiko Praktik Gratifikasi sesuai hasil evaluasi pengendalian internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal Perusahaan/*Internal Control*.
- Melakukan evaluasi bersama dengan Unit Pengendali Gratifikasi Induk Perusahaan atas efektivitas dari kebijakan terkait gratifikasi dan pengendaliannya di lingkungan Perusahaan.

The responsible control of the gratification practices occurring in the Company's environment is the President Director. In the implementation of the control process has been done by the Corporate Secretary Unit.

Scope

The gratuity guidelines at PT Kereta Commuter Indonesia govern the gratification of the Company employee with the parties relating to the Company's business activities.

Corporate Secretary Unit Duties and Responsibilities As Gratification Control Unit

- Setting-up policies related to the management and control of gratification practices.*
- Preparing the work device and facilities related to the control of gratification practices, either from the receipt of gratuity report up to the delivery of the gratification letter to free report.*
- Preparing the storage proof of depositing money received from gratification when specified the Company's master gratification Unit/KPK belongs to the Company/country.*
- Disseminating/socializing/internalizing the policy of control of gratification practices to the Company, other parties, and stakeholders.*
- Receiving reports, save gratuities, parse the gratification category, process and establish the utilization of gratification report.*
- Monitoring and evaluate the reports that have been received directly or through the online reporting media in PT KCI's GCG e-mail and follow-up has been done.*
- Reporting the activities of the Corporate Secretary Unit as the Corporate Gratification Unit to the person responsible (President Director) quarterly, at least 10 (ten) business days after the expiration of the relevant quarterly period and then reported to the Company's master gratification Unit.*
- Corporate Secretary Unit as a Gratification Control Unit mapping the risk area gratification practices in accordance with the evaluation of internal control conducted by the Company's Internal Control supervisory unit.*
- Evaluating along with the Holding Company's Gratification Unit for the effectiveness of the policies relating to its gratification and control in the Company's environment.*

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

1. Laporan praktik gratifikasi yang berupa penolakan atau penerimaan gratifikasi melalui unit Sekretaris Perusahaan secara langsung atau melalui e-mail GCG PT KCI akan dilaporkan kepada unit pengendali gratifikasi induk Perusahaan setiap triwulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan.
2. Laporan praktik gratifikasi yang berupa penolakan atau penerimaan gratifikasi melalui unit Sekretaris Perusahaan secara langsung atau melalui e-mail GCG PT KCI memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Identitas pelapor.
 - b. Jenis praktik gratifikasi.
 - c. Bentuk gratifikasi.
 - d. Perkiraan nilai benda gratifikasi.
 - e. Waktu/kegiatan dan tempat terjadinya praktik gratifikasi.
 - f. Nama pihak/lembaga pemberi.
 - g. Lampiran dokumen pendukung.
3. Unit Pengendali Gratifikasi Induk Perusahaan mengklarifikasikan semua laporan praktik gratifikasi ke dalam kategori penolakan atau penerimaan gratifikasi.
4. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan diterima lengkap oleh Unit Pengendali Gratifikasi Induk Perusahaan, Unit Pengendali Gratifikasi Induk Perusahaan memutuskan status pemanfaatan/penanganan laporan penerimaan gratifikasi.
5. Apabila penanganan laporan penerimaan Gratifikasi diputuskan diproses oleh Unit Pengendali Gratifikasi Induk Perusahaan maka Unit Pengendali Gratifikasi Induk Perusahaan menetapkan status pemanfaatan Benda Gratifikasi dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak Laporan Gratifikasi diputuskan penanganan laporannya.
6. Apabila penanganan laporan penerimaan Gratifikasi diputuskan diproses oleh KPK maka Unit Pengendali Gratifikasi Induk Perusahaan meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Laporan Gratifikasi diterima lengkap dari Wajib Lapor Gratifikasi.
7. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan diterima lengkap oleh KPK, Unit Pengendali Gratifikasi Induk Perusahaan berkoordinasi dengan KPK terkait proses dan penetapan status kepemilikan Benda Gratifikasi.
8. Dalam hal KPK menetapkan status kepemilikan Benda Gratifikasi menjadi milik Negara, maka Benda Gratifikasi tersebut wajib diserahkan Wajib Lapor gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi Induk Perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat penetapan dari KPK.

Gratification Disclosure

1. *The report of gratification practice which is the rejection or acceptance of gratification through the Corporate Secretary Unit directly or by e-mail GCG PT KCI will be reported to the Company's master gratification Unit quarterly, at least 10 (ten) working days after the end of the quarterly period.*
2. *Reports of gratification practices that are the rejection or acceptance of gratification through the Company's Secretarial Unit directly or by e-mail GCG PT KCI contain at least:*
 - a. *Identity of the reporter.*
 - b. *Types of gratification practices.*
 - c. *Form of gratification.*
 - d. *The approximate value of gratification objects.*
 - e. *Time/activity and place of gratification practice.*
 - f. *Name of party/giver institution.*
 - g. *Attachments of supporting documents.*
3. *The Holding Company's Gratification Unit clarify all gratification practice reports into the category of refusal or acceptance of gratification.*
4. *At least 3 (three) working days since the report is fully accepted by the Holding Company's Gratification Unit, the Company's Gratification Control Unit decides the utilization status/handling of gratification receipt report.*
5. *In the event that the handling of gratuity report is decided to be processed by the Holding Company's Gratification Unit, the Holding Company gratification Unit has set the status of the gratification object in a period of no more than 4 (four) working days since the gratification report is decided.*
6. *If gratification report is processed by the KPK, the Holding Company's Gratification Unit shall forward the report received to the KPK within 14 (fourteen) working days since the gratification report has been received completely from gratituation.*
7. *At least 30 (thirty) working days since the report has been completed by the KPK, the Holding Company Gratification Unit is coordinating with KPK regarding the process and determination of the ownership status of the gratification object.*
8. *In the matter of KPK sets the ownership status of the gratification object to belong to the state, the gratification object must be submitted for free report through the Company's gratification control Unit at least 7 (seven) working days since the receipt of the confirmation letter from KPK.*



9. Dalam hal KPK menetapkan status kepemilikan benda gratifikasi tersebut menjadi milik Perseroan, maka Unit Pengendali Gratifikasi Induk Perusahaan menetapkan pemanfaatannya paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya surat penetapan dari KPK.
 10. Dalam hal KPK menetapkan status kepemilikan Benda Gratifikasi tersebut menjadi milik pelapor/Penerima maka dihitung tanggal surat penetapan, benda tersebut sah menjadi milik pelapor/penerima.
 11. Unit Pengendali Gratifikasi Induk Perusahaan akan menyampaikan seluruh data laporan Praktik Gratifikasi yang diteruskan ke KPK kepada Unit Sekretaris Perusahaan selaku Unit Pengendali Gratifikasi Perusahaan secara periodik setiap enam bulan sekali.
 12. Distribusi Benda Gratifikasi
 - a. Apabila Benda Gratifikasi berbentuk uang maka pelapor/penerima menyimpan benda tersebut selama proses penetapan laporan penerimaan Gratifikasi dan mengirimkan ke Kas Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan KPK menjadi milik Negara;
 - b. Apabila Benda Gratifikasi berbentuk selain uang maka wajib diserahkan oleh pelapor/penerima kepada Unit Sekretaris Perusahaan beserta dokumen pendukung lainnya yang relevan.
 13. Ketentuan lainnya:
 - a. Dalam hal diperlukan, pelapor wajib memenuhi undangan Unit Pengendali Gratifikasi Induk Perusahaan dan/atau KPK jika menurut pertimbangan Unit Pengendali Gratifikasi Induk Perusahaan dan/atau KPK diperlukan informasi lebih lanjut terkait Praktik Gratifikasi yang telah dilaporkannya. Tujuan undangan tersebut adalah klarifikasi pemetaan Praktik Gratifikasi yang terjadi di lingkungannya;
 - b. KPK akan menerbitkan surat penetapan mengenai kepemilikan Benda Gratifikasi sesuai dengan kewenangannya dan Wajib Lapo Gratifikasi diwajibkan patuh terhadap ketentuan tersebut;
 - c. Wajib Lapo Gratifikasi yang telah menyampaikan Laporan Gratifikasi sesuai ketentuan berdasarkan Pedoman ini (yang tidak sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi serta tidak terkait temuan pengawas internal), tidak dikenakan ancaman tindak pidana sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali jika diatur lain.
9. In the matter of KPK sets the ownership status of the gratification object to belong to the Company, the Holding Company Gratification Unit shall establish its utilization at least 2 (two) business days from the receipt of the assignment from KPK.
 10. In the matter of KPK sets the ownership status of the gratification object to be the property of the reporter/ receiver then the date of the letter of confirmation, the object is valid belongs to the reporter/receiver.
 11. The Holding Company's Gratification Unit will convey the entire gratification practices report data forwarded to the KPK to the Corporate's secretary Unit as the Company's Gratification Unit periodically once every six months.
 12. Gratification Object Distribution
 - a. In the matter of gratuities in the form of money, the reporter/receiver saves the item during the process of accepting the gratification receipt and submitting it to the State Treasury at least 7 (seven) working days since the establishment of the KPK belongs to the state;
 - b. If gratuities are manifested as cash then it must be submitted by the applicant/recipient to the Unit of Corporate Secretary along with other relevant supporting documents.
 13. Other provisions:
 - a. In the urgent matter, the applicant shall meet the invitation of the Holding Company Gratification Unit and/or KPK if in consideration the Holding Company Gratification Unit and/or KPK is required further information regarding the gratification practices that have been reported. The purpose of the invitation is to clarify the mapping of gratification practices occurring in its environment;
 - b. KPK will issue a letter of determination regarding the ownership of the gratification object in accordance with its authority and must report gratification is obliged to comply with the provision;
 - c. Gratuities that have been submitted the gratification report in accordance with the provisions under this code (which is not conducted investigation, investigation, and prosecution of corruption crimes and not related to the findings of internal supervisory), are not subject to a criminal threat as set out in Law No. 21 of 2001 concerning the amendment to Law No. 31 of 1999 on corruption eradication, unless otherwise.

Perlindungan Hukum

1. Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum yaitu:
 - a. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - b. Pemindahan tugas/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - c. Bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Perseroan;
 - d. Kerahasiaan identitas.
2. Direktur Utama selaku penanggung jawab pengendalian Gratifikasi di Perseroan wajib memberikan perlindungan terhadap Insan Perseroan yang menyampaikan Laporan Gratifikasi sebagaimana angka 1.
3. Setiap Insan Perseroan dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Insan Perseroan lainnya karena melaporkan Praktik Gratifikasi.
4. Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Insan Perseroan karena melaporkan Praktik Gratifikasi, maka yang bersangkutan dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Insan Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Wajib Lapor Gratifikasi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Utama selaku penanggung jawab melalui Unit Sekretaris Perusahaan dengan tembusan KPK guna mendapatkan perlindungan hukum.

Penghargaan

Insan Perseroan yang mematuhi ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja dan pertimbangan kebijakan promosi pegawai atau pemberian insentif yang disesuaikan dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin pegawai yang berlaku di Perseroan.

Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan pedoman gratifikasi di PT Kereta Commuter Indonesia akan dikenakan sanksi yang berlaku di Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Law Protection

1. Gratification reporter has the right to obtain legal protection:
 - a. Protection from non-objective, counteracting, or adverse personnel's administrative actions or misconduct, but not limited to position decline, decline in employee performance assessment, proposed transfer of duties/mutations or other career barriers;
 - b. Transfer of duties/mutations to the reporter in the event of intimidation or physical threats;
 - c. Legal assistance in accordance with the provisions applicable in the Company's environment;
 - d. Identity confidentiality.
2. The President Director as the responsible for the control of gratification in the Company shall provide protection against the Company's employee that convey the gratification report as number 1.
3. Every employee of the Company is prohibited from giving discriminatory treatment or actions that harm the Company's other human beings due to reporting gratification practices.
4. In the event that there is a physical and/or psychic threat to the Company's human beings because it reports gratification practices, then it can ask for protection to the witness and Victims Protection Agency (LPSK) or other authorities based on the prevailing laws and regulations.
5. In the matter of physical and/or psychological threats to the Company's human beings as referred to in number 4, a free report is required to submit a written application to the President Director as a person in charge of the Corporate Secretary Unit with a copy of the KPK in order to obtain legal protection.

Award

Company's employee who adhere to the provision of gratification control can be considered to be a contributing factor in the performance assessment and consideration of employee promotion policy or providing incentives tailored to the regulations governing the performance assessment and discipline of the Company's prevailing officers.

Sanction

Violation of the provisions of the gratuity guidelines at PT Kereta Commuter Indonesia will be subject to prevailing sanctions in the Company and the prevailing laws and regulations.



Sosialisasi Gratifikasi

Beberapa langkah yang diambil Perseroan dalam rangka meningkatkan awareness Insan Perseroan atas pengendalian Gratifikasi:

- Perseroan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas mengenai pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi di Perseroan dan Pentingnya Penerapan GCG di Perseroan.
- Diseminasi pada Website Perseroan, C-News (Majalah Internal Perseroan), Sosialisasi melalui E-mail Perseroan, dan menempatkan Banner Anti Gratifikasi pada setiap stasiun, kantor dan dipo.

Pelaporan Gratifikasi 2020

Selama tahun 2020, terdapat 3 laporan gratifikasi yang telah dilaporkan oleh pegawai, gratifikasi yang dilaporkan ke unit pengendali gratifikasi telah ditindaklanjuti dengan melakukan pelaporan tersebut hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gratification Dissemination

Some measures taken by the Company in order to increase the Company's awareness for the control of gratification:

- The Company in cooperation with the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Finance and Development Supervisory Board (BPKP) conducts the Focus Group Discussion (FGD) to discuss the control of gratification and Anti-corruption in the Company and the importance of GCG implementation in the Company.
- Dissemination on the Company's Website, C-News (Company's Internal magazine), socialization through the Company's E-mail, and put the Banner Anti Gratification on each station, office and dipo.

Gratification Report in 2020

During 2020, there have been 3 (three) reports of gratification that have been reported by employees, gratification reported to the gratification control unit has been followed up by reporting the report to the Corruption Eradication Commission (KPK).

Laporan Penerimaan Gratifikasi Gratification Acceptance Report	2020	2019	Status
Jumlah Laporan Gratifikasi Total Gratification Reports	3	10	Closed

Atas kesadaran tinggi Perseroan terhadap pelaporan gratifikasi, Perseroan menerima Apresiasi Atas Pelaporan Gratifikasi Tahun 2020 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penerimaan penghargaan ini diharapkan menjadi teladan bagi pegawai lainnya.

For the Company's high awareness on gratification reporting, the Company received the Appreciation for Gratification Reporting in 2020 from the Corruption Eradication Commission (KPK). Receiving this award is expected to be a role model for other employees.



LHKPN

LHKPN

KEBIJAKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Reports on Assets of State Officials (LHKPN) Policy

Kebijakan dasar Perseroan mengenai kewajiban pejabat Perseroan dalam melaporkan harta kekayaannya merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
4. Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: KEP.U/KP.402/II/1/KA-2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor: KEP.U/KP.402/V/1/KA-2016 tentang Tata Cara Pelaporan, Pengumuman dan Pengelolaan LHKPN.

Berdasarkan hal tersebut Perseroan memiliki kebijakan atas kepatuhan Wajib Lapor melaporkan harta kekayaannya dengan penetapan Surat Keputusan nomor SK.035/CU/KCI/VIII/2020 tentang Tata Cara Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia yang ditetapkan pada 3 Agustus 2020, di dalamnya telah mengatur mengenai wajib lapor dan ketentuan penyampaian, waktu penyampaian, tata cara penyampaian, pengumuman dan pengelolaan LHKPN, serta pemberian sanksi bagi penyelenggara yang tidak menyampaikan LHKPN.

Pemegang jabatan yang berkewajiban menyampaikan LHKPN di lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (selanjutnya disebut Wajib Lapor) meliputi:

- a. Dewan Komisaris
- b. Direksi;
- c. Executive Management (M1);
- d. Middle Management (M2);
- e. Expert (S1);
- f. Senior Specialist (S2); dan
- g. Senior Administrator (A2).

Dalam pelaksanaannya, terdapat Koordinator Pengelolaan LHKPN dan Pengelola data Wajib Lapor yang dilaksanakan oleh:

- a. Vice President Corporate Secretary sebagai Koordinator Pengelolaan LHKPN;
- b. Manager Policy Good Corporate Governance sebagai Owner dan pengelola Aplikasi Wajib LHKPN; dan
- c. Manager Administrasi SDM sebagai Pengelola data daftar pejabat Wajib Lapor LHKPN.

The Company's basic policy on the obligation of the Company's office in reporting its assets refers to the following laws and regulations:

1. *Law number 28 year 1999 about Clean State Administration Organizer from Corruption, Collusion, and Nepotism;*
2. *Law Number 30 year 2002 concerning the Anti Corruption Eradication Commission;*
3. *Regulation of the Corruption Eradication Commission No. 07 year 2016 on Procedures of Registration, Announcement and Inspection of the State's Intellectual Property; and*
4. *Decree of Directors of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Number: KEP. U/KP. 402/II/1/KA-2017 on amendments to the decision of the Board of Directors number: KEP.U/ KP. 402/V/1/KA-2016 on procedures for reporting, announcement and management of LHKPN.*

Based on this, the Company has a policy of compliance must report to report its wealth with the determination of decree number SK. 036.1/CU/KCI/IX/2017 on the Procedures for Reporting, Announcement, and Management of State Organizer's Wealth Report in the PT Kereta Commuter Indonesia Environment, which was set on September 25, 2017, therein has set up the mandatory reporting and conditions of delivery, delivery time, procedure of delivery, announcement and management of LHKPN, and the sanction for the disobedient administrator.

State organizer in the environment of PT Kereta Commuter Indonesia is obliged to report its assets, the state organizer who is obliged to report includes:

- a. *Board of Commissioners*
- b. *Board of Directors;*
- c. *Executive Management (M1);*
- d. *Middle Management (M2);*
- e. *Expert (S1);*
- f. *Senior Specialist (S2); and*
- g. *Senior Administrator (A2).*

In its implementation, there is the LHKPN management coordinator and mandatory report data Manager:

- a. *Vice President Corporate Secretary as Coordinator of LHKPN Management;*
- b. *Good Corporate Governance Policy Manager as Owner and manager of the LHKPN Mandatory Application; and*
- c. *HR Administration Manager as Data Manager for List of Officials Required to Report LHKPN.*



Koordinator Pengelolaan LHKPN

Koordinator pengelolaan LHKPN mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dengan KPK terkait pendistribusian, pemantauan, pengisian, dan penyampaian formulir LHKPN;
- Menyampaikan data mengenai perubahan jabatan di Perseroan kepada KPK;
- Melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN di lingkungan Perseroan.
- Mengkoordinir bukti pelaporan LHKPN Penyelenggara Negara (para pejabat) Perseroan;
- Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Laporkan kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun; dan
- Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam aplikasi E-LHKPN.

Aplikasi E-LHKPN

Pengelola Data Wajib Laporkan mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyusun daftar nama Penyelenggara Negara yang merupakan Wajib Laporkan;
- Melakukan update data Penyelenggara Negara dan melaporkan kepada Koordinator pengelolaan LHKPN paling lambat tanggal 30 November setiap tahun; dan
- Melakukan koordinasi dengan koordinator pengelolaan LHKPN.

Owner dan Pengelola Aplikasi Wajib Laporkan LHKPN memiliki tugas sebagai berikut:

- Melakukan pemutakhiran data Wajib LHKPN pada aplikasi E-LHKPN;
- Menyampaikan data mengenai perubahan jabatan di Perseroan kepada Koordinator pengelolaan LHKPN;
- Melakukan rekapitulasi hasil pelaporan LHKPN dan Wajib Laporkan; dan
- Melakukan koordinasi pelaporan LHKPN dengan Induk Perusahaan.

Pada pelaksanaan tahun 2020 Perseroan telah bekerja sama dengan KPK dalam memberikan sosialisasi serta bimbingan teknis pengisian E-LHKPN.

Dari tahun 2018 hingga 2020 Wajib Laporkan di PT KCI seluruhnya atau 100% dari Wajib Laporkan telah melaporkan LHKPN secara tepat waktu. Berikut rincian pelaporannya:

LHKPN Management Coordinator

The management coordinator of LHKPN has the following tasks:

- Coordinating with KPK regarding the distribution, monitoring, filling and delivery of LHKPN forms.
- Convey data about the change of position in the Company to the KPK.
- Implementing the socialization of LHKPN reporting obligations in the Company environment.
- Coordinating with KPK regarding the management and administration of LHKPN must report applications.
- Coordinating the reporting evidence of the state Organizer (LHKPN) of the Company. Submitting personnel data and change of department data must report to KPK no later than December 15, annually.
- Performing data updates as intended in E-LHKPN application.

E-LHKPN Application

The E-LHKPN application Manager has the following tasks:

- Compiling the name of the state organizer which is mandatory report.
- Updating the state Organizer data and report to the management coordinator of LHKPN by November 30 each year.
- Coordinating with the management coordinator of LHKPN.

Owners and Managers of Applications Required to Report LHKPN have the following duties:

- Update the mandatory LHKPN data on the E-LHKPN application;
- Submitting data regarding changes in positions in the Company to the LHKPN management Coordinator;
- Recapitulating the results of LHKPN reporting and Reporting Obligations; and
- Coordinate LHKPN reporting with the Parent Company.

In the 2020 LHKPN implementation, the Company has collaborated with KPK to provide dissemination and technical guidance of E-LHKPN.

From 2018 to 2020 PT KCI has reporter wholly or 100% from mandatory report has reported the LHKPN in timely manner. Here are the reports:

Tahun Pelaporan Reporting Year	2020	2019	2018
Jumlah Wajib Lapo Mandatory Applicant	75	80	72
Total Pelaporan Total Reports	75	80	72
Persentase Percentage	100%	100%	100%

Tata Cara Pengelolaan LHKPN

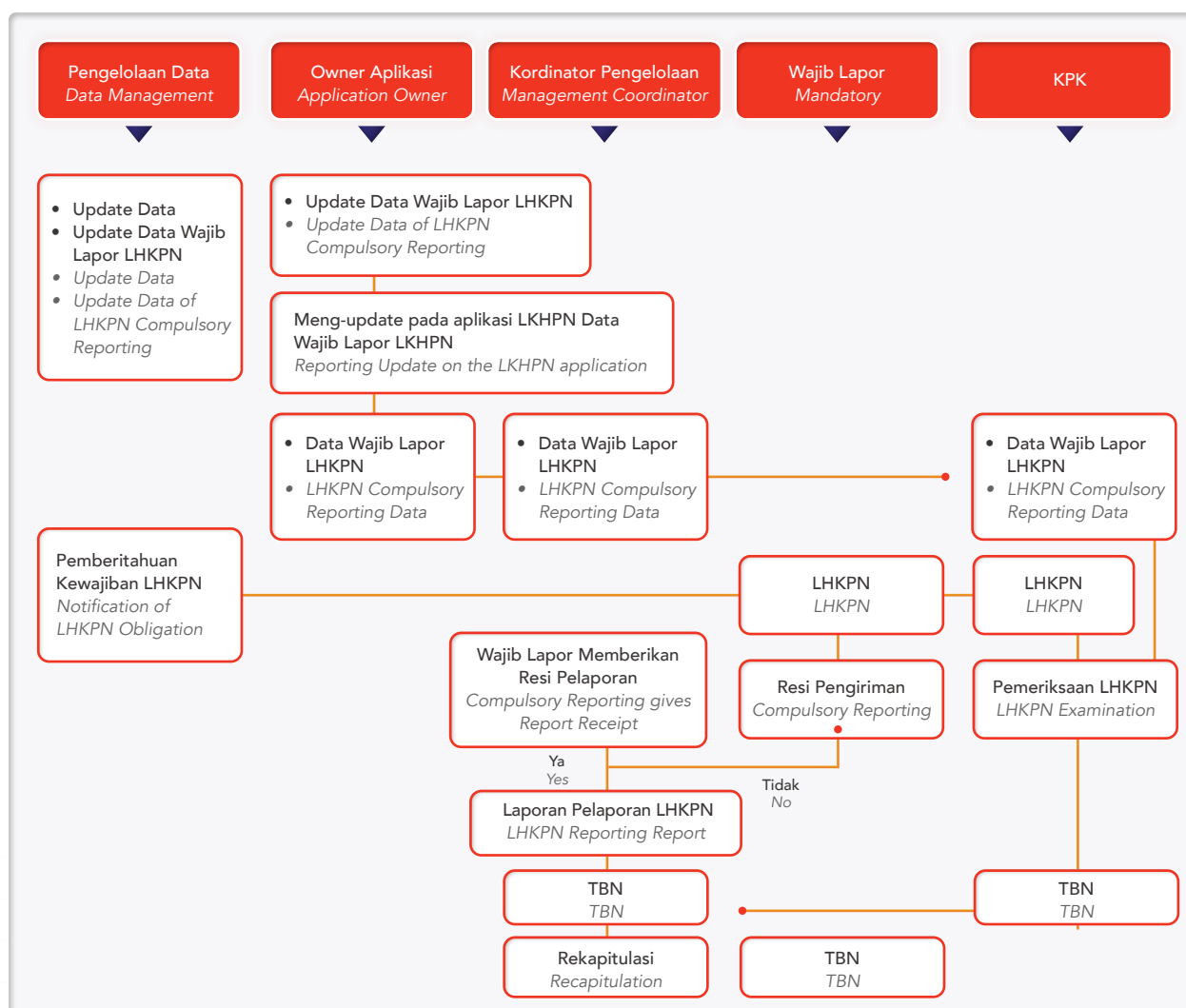
Berikut ini merupakan bagan tata cara alur pengelolaan LHKPN di PT Kereta Commuter Indonesia.

LHKPN Management Procedures

The following is a chart of the procedure for LHKPN management procedure at PT Kereta Commuter Indonesia.

Bagan Alur Tata Cara Pengelolaan LHKPN

Flow Chart for LHKPN Management Procedures





AKSES INFORMASI DAN DATA PERSEROAN

Access to Company Information and Data



Perseroan menyediakan sejumlah media dan saluran yang terbuka bagi seluruh stakeholders, di antaranya adalah website, penerbitan media internal secara berkala, penyediaan aplikasi KRL Access bagi penumpang serta akun media sosial. Berikut media dan/atau situs yang dapat diakses untuk mendapatkan akses informasi PT Kereta Commuter Indonesia:

The Company provides numbers of media and channels that are open to all stakeholders, including websites, regular internal media publishing, providing KRL Access applications for passengers and social media accounts. Here are the media and/or accessible sites to access PT Kereta Commuter Indonesia Information:

MEDIA INFORMASI PERSEROAN

The Company's Information Media



kip@krl.co.id



www.krl.co.id



C-News magazine



Stasiun Juanda Jl. Ir. Haji Juanda 1
Jakarta Pusat, Jakarta-Indonesia
10120



Informasi Commuterline



@CommuterLine



@CommuterLine



+62 21-345-3535



Informasi & Keluhan
Information & Complain

121

No.	Nama Media Informasi <i>Media Name</i>	Jenis Informasi <i>Information Type</i>
1.	Website PT KCI	Website
2.	Contact Center	Layanan Pelanggan <i>Customer Service</i>
3.	KRL Access	Aplikasi Smart Phone <i>Smartphone App</i>
4.	Press Release	Informasi Resmi Perseroan <i>Official Company Information</i>
5.	Broadcast Rilis	Informasi Resmi Perseroan <i>Official Company Information</i>



No.	Nama Media Informasi Media Name	Jenis Informasi Information Type
6.	Twitter	Media Sosial Social Media
7.	Instagram	Media Sosial Social Media
8.	Facebook	Media Sosial Social Media
9.	Youtube Channel	Media Sosial Social Media
10.	E-mail Corporate	E-mail resmi Perusahaan Official Company e-mail
11.	Majalah Internal	Informasi Internal Perseroan Internal Company Information
12.	Commuter Document System(CDS)	Informasi Internal Perseroan Internal Company Information
13.	Milis Broadcast	Informasi Internal Perseroan Internal Company Information
14.	Media Informasi Real Time di Dalam KRL dan Stasiun	Digital Informasi kepada penumpang Digital Information to Passengers

AKSES INFORMASI EKSTERNAL

External Information Access

Selain itu, disediakan pula layanan digital bagi pelanggan untuk memberikan kritikan dan masukan terhadap kinerja Perseroan atau sekadar mencari informasi tentang PT Kereta Commuter Indonesia. Layanan tersebut dapat dilakukan melalui Navigasi C-Care yang terdapat dalam website yang berisi:

Call Center 021-121

Melalui Call Center PT Kereta Commuter Indonesia via telepon di nomor 021-121, Pelanggan dapat mengetahui informasi secara langsung dan lengkap tentang produk dan layanan Perseroan mulai dari jadwal perjalanan KRL, harga tiket, regulasi, dan lain sebagainya. Melalui Call Center, pelanggan juga dapat menyampaikan kritik serta sarannya mengenai produk dan pelayanan KRL Commuter.

In addition, digital services are also provided for customers to provide criticism and input to the Company's performance or simply seek information about PT Kereta Commuter Indonesia. The services are able to be reached through C-Care navigation on the website containing:

Call Center 021-121

Through Call Center of PT Kereta Commuter Indonesia via phone number 021-121, customer can know the information directly and complete about the Company's products and services from the schedule of KRL trip, ticket price, regulation, and so forth. Through Call Center, customer can also convey criticism and advice regarding KRL Commuter products and services.

E-mail: kip@krl.co.id

Tidak hanya via telepon, pelanggan juga dapat mendapatkan informasi umum serta menyampaikan permohonan keterbukaan informasi publik melalui e-mail ke alamat: kip@krl.co.id

P.O. BOX (9559)

Meskipun telah disediakan platform dalam bentuk elektronik dan digital, PT Kereta Commuter Indonesia juga menerima berbagai keluhan, kritik, saran, dan lainnya melalui surat (pos) yang dapat dikirim melalui P.O. BOX 9559. Perseroan sebisa mungkin memberikan respon bagi pelanggan yang telah mengirim keluhan, kritik dan saran mereka tersebut sebagai bentuk komitmen keterbukaan Perseroan demi kenyamanan dan kesetiaan pelanggan pada Perseroan.

E-mail: kip@krl.co.id

Not only via the phone, customers can also get general information and public information request by e-mail to the address: kip@krl.co.id

P.O. BOX (9559)

Although the platform has been provided in electronic and digital form, PT Kereta Commuter Indonesia also received various complaints, criticism, suggestions, and others by mail (postal) that can be sent through P.O. BOX 9559. The Company may respond to customers who have sent their complaints, criticism and advice as a form of commitment to the disclosure of the Company for the convenience and loyalty of customers in the Company.

KEBIJAKAN ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA

Policy for Procurement of Goods and Services

Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, Perseroan telah memiliki petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan.

Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, kompetitif, transparan, wajar dan akuntabel, dalam rangka memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa, di mana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran operasional Perseroan.

In carrying out the procurement of goods and services, the Company has manual to implement the procurement of goods/services that are updated as needed.

The procurement of goods/services is carried out with the principles of *Good Corporate Governance*, namely by applying the basic principles of procurement of goods/services that are efficient, effective, competitive, transparent, fair and accountable, in order to meet the needs of the procurement of goods/services, where the results can be accounted for both from in terms of physical, financial and benefits for the smooth operation of the Company.



SPINNING THE LIMIT
TO WIN FROM PANDEMIC



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

-
- 444 **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**
Corporate Social Responsibilities
 - 447 **Landasan Penerapan dan Lingkup CSR**
Basis of Implementation and Scope of CSR
 - 448 **Struktur Pengelola**
Management Structure
 - 451 **Metode dan Lingkup Due Diligent Terhadap Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan**
Due Diligence Towards Social, Economic, and Environmental Impacts
 - 453 **Strategi Penerapan CSR**
CSR Implementation Strategies
 - 454 **Isu-Isu Penting Sosial, Ekonomi dan Lingkungan**
Important Issues concerning Social, Economy and Environment
 - 457 **Kegiatan CSR dalam Bidang Lingkungan Hidup**
CSR Activities Related to the Environment
 - 459 **Kegiatan CSR Dalam Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan**
CSR Activities Related to the Social and Community Development
 - 461 **Kegiatan CSR Dalam Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja**
CSR Activities Related to Occupational, Health, and Safety Employment
 - 464 **Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia**
The Company Responsibility Related to Human Rights
 - 468 **Kegiatan CSR Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Kepada Konsumen**
Corporate Social Responsibility Towards Customers
 - 473 **Tanggung Jawab Sosial Terkait Core Subject Operasi yang Adil**
Social Responsibility Towards Equitable Operational Core Subject

06





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibilities



Program CSR bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas di sekitar wilayah Perseroan.

CSR programs are intended to building harmonious relationships with communities around the Company's area.

KCI memiliki misi untuk menjadi penyelenggara jasa angkutan kereta komuter yang mengutamakan keselamatan, pelayanan, kenyamanan dan ketepatan waktu serta berwawasan lingkungan. Untuk itu, KCI senantiasa memastikan bahwa kegiatan usahanya senantiasa berpegang teguh kepada prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan. Berangkat dari pemahaman tersebut, Perseroan memandang tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan hidup, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kewajiban untuk menyediakan tempat yang nyaman dan hubungan kerja yang baik dengan karyawan, mengutamakan terjaminnya kesehatan dan keselamatan kerja, dan ikut serta mengembangkan ekonomi dan komunitas lokal.

KCI melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) di beberapa bidang, seperti pendidikan, sosial, dan keagamaan. Penerapan CSR di Perseroan dilakukan berdasarkan RKAP tahun berjalan yang sejalan dengan RJPP dan program-program pada Induk Perseroan yaitu PT KAI. Secara umum lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan mencakup Program Bina Lingkungan dan Program Community Development. Hal ini dikarenakan program kemitraan sudah dilakukan oleh PT KAI.

KCI aspires to become a commuter train service provider that prioritizes safety, service, comfort and punctuality and is environmentally friendly. Hence, KCI always ensures its business activities to always adhere to sustainable business principles. Based on this understanding, the Company carries out social responsibility (Corporate Social Responsibility/CSR) in the form of environmental preservation, respect for human rights, the obligation to provide a comfortable place and conducive work relations with employees, prioritizing occupational health and safety, and contribute to develop local economies and communities.

KCI carries out Corporate Social Responsibility activities in several fields, such as education, social and religious matters. The Company carries out its CSR activities based on the current year's RKAP that is in line with the RJPP and the programs of PT KAI as its Holding Company. In general, the scope of corporate social responsibility includes the Community Development programs, complementing the partnership program carried out by PT KAI.



Dana Kegiatan CSR

Corporate Social Responsibilities

Perseroan selalu berupaya untuk memastikan kelancaran realisasi program CSR serta pencapaian targetnya, yakni dengan mengatur alokasi dana atau anggaran khusus untuk kegiatan CSR.

Sebagaimana telah kita lalui bersama, sepanjang tahun 2020 merupakan masa pandemi yang harus dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali PT Kereta Commuter Indonesia. Pada masa ini, KCI dituntut untuk mengarahkan segala upaya dalam memastikan kesehatan serta keamanan pelanggan dalam menggunakan jasa Perseroan di tengah wabah COVID-19 yang memiliki transmisi tinggi.

Sebagai wujud kepedulian Perseroan terhadap pemangku kepentingan yang terdampak pandemi, Perseroan mengalihkan seluruh dana CSR yang sudah diprogramkan menjadi dana penanggulangan COVID-19.

The Company always strives to ensure the realization of CSR programs and the achievement of its targets by arranging the funds allocation or special budgets for CSR activities.

We have been struggling to survive through the pandemic throughout 2020. Within this challenging times, KCI is required to exert all efforts to ensure the health and safety of customers in using the Company's services amidst the COVID-19 outbreak, which we know, has a high transmission rate.

As a form of the Company's concern for stakeholders affected by the pandemic, the Company has allocated all CSR funds budget to handle the COVID-19 outbreak.



Secara umum, dana penanggulangan COVID-19 ini ditujukan kepada para pelanggan KCI sebagaimana disalurkan melalui penambahan layanan dan fasilitas terkait Protokol Kesehatan. Selain itu, sebagian dana juga ditujukan kepada seluruh karyawan Perseroan yang terpapar COVID-19.

In general, this fund is allocated for KCI's customers as distributed through additional services and facilities related to the Health Protocol. In addition, the funds were also allocated for all the Company's employees who were exposed to COVID-19.

Secara lebih terperinci, total dana yang digunakan Perseroan untuk kegiatan CSR selama tahun 2020 adalah sebesar Rp5,26 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Specifically, the total funds used by the Company for CSR activities during 2020 were amounted to Rp5.26 billion with the following details:

Bidang Sector	Biaya 2020 2020 Budget	Biaya 2019 2019 Budget
Pendidikan dan Budaya Education and Culture	-	1.645.563.338
Sosial dan Lingkungan Social and Environmental	-	683.562.600
Keagamaan Religious	-	342.900.000
Penanganan COVID-19 COVID-19 Handling	5.254.688.507	-
Jumlah Total	5.254.688.507	2.672.025.938



LANDASAN PENERAPAN DAN LINGKUP CSR

Basis of Implementation and Scope of CSR

Landasan Penerapan

Perseroan selalu berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis yang tidak hanya mengejar *profit* namun selalu memperhatikan lingkungan dan masyarakat dengan semangat kemandirian. Pelaksanaan CSR Perseroan pada dasarnya melibatkan interaksi antara pemangku kepentingan dengan setiap aspek operasional Perseroan. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, baik internal maupun eksternal, mulai dari pegawai, komunitas pengguna kereta *commuter*, hingga masyarakat umum. Perseroan melibatkan para pemangku kepentingan sebagai wujud keinginan Perseroan untuk terus tumbuh bersama seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut juga sebagaimana ditetapkan dalam RKAP 2020 dan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Secara umum, program-program tanggung jawab sosial di Perseroan ditujukan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas di sekitar wilayah Perseroan. Penyusunan berbagai strategi, pendekatan, desain program, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan CSR KCI mengacu pada standar internasional pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR SNI ISO 26000, yang terdiri dari tujuh aspek antara lain:

1. Tata Kelola Organisasi
2. Hak Asasi Manusia
3. Praktik-praktik Ketenagakerjaan
4. Lingkungan
5. Prosedur Operasi yang Wajar
6. Isu Konsumen
7. Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Penerapan CSR di Perseroan dilakukan berdasarkan RKAP tahun berjalan yang sejalan dengan RJPP Perseroan dan program-program pada Induk Perseroan yaitu PT KAI. Secara umum lingkup tanggung jawab sosial perusahaan pada Program Bina Lingkungan dan Program Community Development hal ini dikarenakan program kemitraan sudah dilakukan oleh PT KAI.

- a. Program Bina Lingkungan merupakan suatu kegiatan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat yang berada atau terdampak dari kegiatan operasional Perseroan. Dalam pelaksanaannya kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan antara lain: Peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan korban bencana alam, bantuan sosial untuk pelestarian alam dan kemasyarakatan.

Basis of Implementation

The Company is always committed to carrying out business practices that are not only pursuing profit but also paying attention to the environment and society with a spirit of empowerment. The implementation of the Company's CSR involves stakeholders' interaction and Company's operations. It engages various stakeholders, both internal and external, ranging from employees, the commuter train user community, to the general public. The Company involves stakeholders as a manifestation of the commitment to grow with all stakeholders. It conforms with the 2020 RKAP and in accordance with the Company Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which states that the Company has the responsibility to create a harmonious, balanced and appropriate relationship with the environment, values, norms and culture of the surrounding community.

In general, the Company's social responsibility programs aim to build harmonious relationships with communities around the Company's areas. The preparation of various strategies, approaches, program designs, as well as monitoring and evaluation of KCI's CSR implementation refers to the international standards for the implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL) or CSR SNI ISO 26000, which consists of seven aspects, including:

1. Organizational Governance
2. Human Rights
3. Employment Practices
4. Environment
5. Reasonable Operating Procedure
6. Customers' Issues
7. Community Engagement and Development

Scope of Corporate Social Responsibility

The Company carries out CSR programs based on the current RKAP which is in conformity with the RJPP and PT KAI's programs. In general, the scope of corporate social responsibility in the Community Development Program is due to the partnership program carried out by PT KAI.

- a. *The Community Development Program is an activity with the aim of empowering communities that are affected by the Company's operational activities. In its implementation, the Company carries out the following activities: Improving the quality of education, improving health services, developing public facilities and infrastructure, assistance for natural disasters victims, social assistance for environmental preservation and for the community.*



b. Program Community Development merupakan program sosial yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perseroan dengan masyarakat guna mengatasi masalah-masalah sosial dan lingkungan yang timbul dari kegiatan operasional Perusahaan. Kegiatan Community Development ini juga dapat meningkatkan citra Perseroan di kalangan Stakeholders.

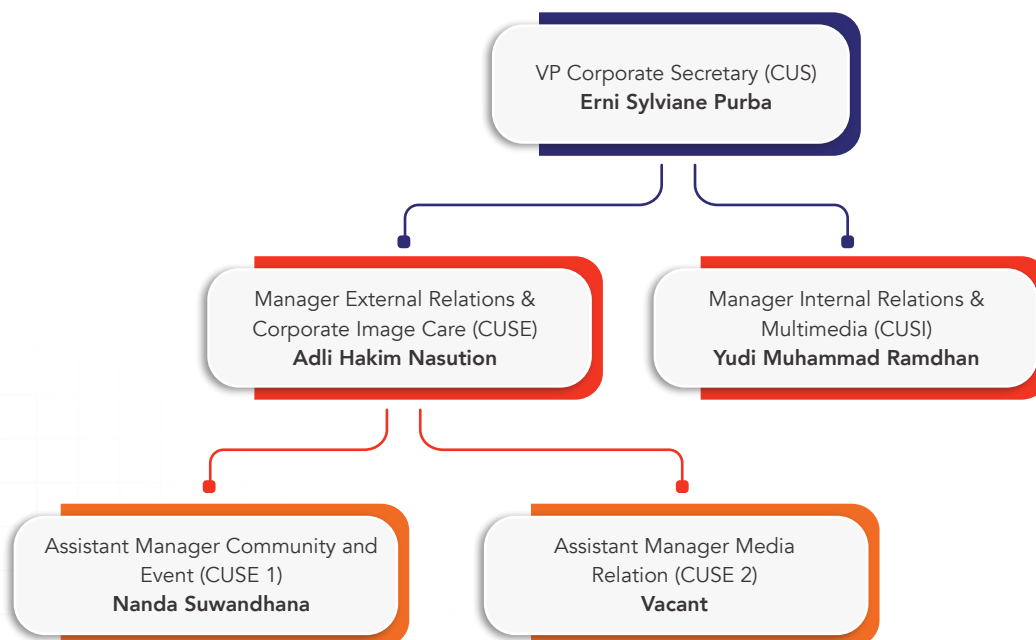
b. *The Community Development Program is a social program that aims to build and improve harmonious relationships between the Company and the community in overcoming social and environmental problems arising from the Company's operational activities. This Community Development activity can also enhance the Company's image to stakeholders.*

STRUKTUR PENGELOLA

Management Structure

Struktur pengelola CSR di lingkungan Perseroan dipimpin oleh VP Corporate Secretary dengan berada pada pengawasan Direktur Utama.

CSR management structure in the Company's environment is led by VP Corporate Secretary under the supervision of President Director.



Sehubungan dengan tugasnya, VP Corporate Secretary, bertanggung jawab:

1. Merumuskan dan menyusun strategi program membangun identitas Perseroan.
2. Merumuskan dan menyusun strategi program komunikasi Perseroan baik internal dan eksternal yang mendukung citra Perseroan.
3. Merumuskan dan menyusun strategi program komunikasi pemasaran Perseroan.
4. Merumuskan dan menyusun strategi pengelolaan hubungan internal dan eksternal Perseroan.
5. Merumuskan dan menyusun strategi program hubungan dengan stakeholder.
6. Mengintegrasikan unit-unit organisasi di bawahnya.

Manager Eksternal Relation and Corporate Image mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Mengelola hubungan kehumasan eksternal Perusahaan dengan media.
2. Merumuskan dan menyusun program sosialisasi dan edukasi Perseroan.
3. Merumuskan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang pelayanan umum, pengembangan kemasyarakatan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan.
4. Mengembangkan hubungan baik dengan kalangan pemerintahan, segenap pihak luar dan stakeholders lainnya serta memastikan terselenggaranya pelayanan umum dan kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan secara efektif dan tepat guna.
5. Mengelola kegiatan Perseroan yang berkaitan dengan brand Perseroan.
6. Membantu menyusun desain strategi branding untuk produk yang dimiliki Perseroan dengan optimal.
7. Menentukan strategi promosi di saluran distribusi dan area geografis yang efektif untuk setiap brand Perseroan.
8. Merencanakan strategi aktivitas promosi above the line (on-line) dan below the line (off-line).
9. Menyusun strategi dan teknik bekerjasama dengan pihak ketiga (EO and Agency) untuk kegiatan sosialisasi dan promosi.

Assistant Manager Community and Event, mempunyai tanggung jawab:

1. Menyusun kebijakan komunikasi yang berhubungan dengan komunitas yang berkaitan dengan operasional Perseroan.
2. Membuat rencana/program kegiatan untuk meningkatkan hubungan dengan stakeholder.

In connection with its duties, VP Corporate Secretary, is responsible to:

1. *Formulate and develop a program strategy to build Company identity.*
2. *Formulate and develop strategies for Corporate Secretary programs both internally and externally in which supporting the Company's impression.*
3. *Formulate and develop strategies for the Company's marketing communication programs.*
4. *Formulate and develop strategies for managing internal and external relationships of the Company.*
5. *Formulate and develop a relationship program strategy with the stakeholders.*
6. *Integrate the organizational units underneath.*

External Relation and Corporate Image Manager is responsible to:

1. *Manage public relations of Corporate PR with media.*
2. *Formulate and organize the Company's socialization and education program.*
3. *Formulate, coordinate, control and evaluate the implementation of operational tasks of public service, community development, partnership and Community Stewardship Program (PKBL) and social responsibility activities of the Company.*
4. *Develop good relations with the government, all outside parties and other stakeholders and ensure the implementation of public services and social responsibility activities of the Company effectively and appropriately.*
5. *Manage the Company's activities related to the Company's brand.*
6. *Help to develop the design of branding strategy for the Company's products optimally.*
7. *Determine the promotion strategy for effective distribution and geographic area for each Company brand.*
8. *Plan strategies above the line promotion activities (on-line) and below the line (off-line).*
9. *Develop strategies and techniques in cooperation with third parties (EO and Agency) for socialization and promotion activities.*

Community and Event Assistant Managers is responsible to:

1. *Develop communication policies related to the community related to the operation of the Company.*
2. *Create plan/program activities to improve relations with stakeholders.*



3. Memastikan pelaksanaan program Community Relation berjalan sesuai yang ditetapkan Perseroan. 4. Mengelola kegiatan sosialisasi dan edukasi 5. Mengelola program tanggungjawab social dan lingkungan/ <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>. 6. Mengelola program <i>sponsorship</i> Perseroan. 7. Koordinasi dengan unit terkait program <i>Community Relation</i>. 8. Melaksanakan administrasi yang terkait dengan kegiatan <i>Community Relations</i>.	3. <i>Ensure the implementation of the Community Relation program runs as defined by the Company.</i> 4. <i>Manage socialization and education activities.</i> 5. <i>Manage the social responsibility program and the environment/Corporate Social Responsibility (CSR).</i> 6. <i>Manage Corporate sponsorship programs.</i> 7. <i>Coordinate Community Relation program with the related units.</i> 8. <i>Implement administration related to the activities of Community Relation.</i>

PROFIL VP CORPORATE SECRETARY

VP Corporate Secretary Profile



Erni Sylviane Purba
Vice President Corporate Secretary

Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir <i>Age/Place & DOB</i>	37/Simalungun, 25 April 1984 37/Simalungun, 25 April 1984
Riwayat Pendidikan <i>Education History</i>	S1 Teknik Informatika, Universitas Kristen Duta Wacana-2007 <i>Bachelor of Informatics Engineering, Duta Wacana Christian University-2007</i>
Riwayat Jabatan <i>Position History</i>	- VP Corporate Secretary, Oktober 2020-sekarang - VP Corporate Secretary, October 2020-present - VP Corporate Communication, Maret 2019-sekarang - VP Corporate Communication, March 2019-present
Dasar Hukum Penunjukan <i>Legal Appointment</i>	Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor: SK-103/KCI/DIR-HRD/34/XI/2020 Tanggal 18 November 2020 <i>Decision Letter of the Board of Directors of PT Kereta Commuter Indonesia Number: SK-103/KCI/DIR-HRD/34/XI/2020 Dated November 18, 2020</i>
Pengalaman Kerja <i>Work Experience</i>	- Vice President Corporate Secretary (Oktober 2020-sekarang) - Vice President Corporate Communication (Maret 2019-Oktober 2020) - Manager Customer Relation and Digital Community (Februari 2017-Maret 2019) - Vice President Corporate Secretary (October 2020-present) - Vice President Corporate Communication (March 2019-October 2020) - Manager of Customer Relation and Digital Community (February 2017-March 2019)
Jabatan Rangkap <i>Concurrent</i>	Tidak ada <i>None</i>
Afiliasi <i>Affiliation</i>	Tidak memiliki afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham <i>Not affiliated with the Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta, Indonesia

METODE DAN LINGKUP DUE DILIGENT TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN

Due Diligence Towards Social, Economic, and Environmental Impacts

Perseroan melaksanakan *due diligent* atas dampak sosial dari kegiatan usahanya pada setiap tahunnya. Proses diawali dengan pemetaan potensi kejadian ataupun melalui usulan masyarakat yang diajukan kepada Perseroan baik melalui Divisi Sekretaris Perusahaan maupun Divisi Komunikasi Perusahaan Perseroan juga melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan harapan bisa lebih detail dalam memenuhi kebutuhan dan harapan dari masyarakat.

The Company carries out due diligence on the social impact of its annual business activities. The process begins with mapping potential incidents or through community proposals submitted to the Company, both through the Corporate Secretary Division and the Corporate Secretaries Division. The Company also cooperates with third parties to meet the needs and expectations of the community.

Setelah dilakukan pemetaan maka tahap selanjutnya adalah menentukan prioritas dari pelaksanaan kegiatan CSR yang akan dilakukan yang kemudian dilakukan sosialisasi serta pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak-pihak terkait mulai dari Pegawai Perseroan, mitra kerja, PT KAI, lembaga masyarakat sekitar dan aparat keamanan serta aparat pemerintahan setempat. Program CSR ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu hal yang positif bagi Perseroan dan kelangsungan bisnis operasional Perseroan.

After mapping, the next step is to determine the priorities of CSR activities implementation. Afterwards, the Company will carry out a socialization and implementation of the activities which involves the related parties including Employees, associates, PT KAI, the surrounding community institutions, security services and local government executives. This CSR program is expected to create positive impacts for the Company and ensure the Company's sustainable business as the results.

TABEL KEBUTUHAN DAN HARAPAN STAKEHOLDERS YANG TERDAMPAK KEGIATAN PERSEROAN

Table of Needs and Expectations of Stakeholders Affected by Company Activities

Stakeholders	Kebutuhan Needs	Harapan Expectations
Kereta Api Indonesia	Sebagai tulang punggung transportasi perkotaan <i>As a primary of urban transportation</i>	Menghasilkan dividen yang tinggi <i>Produce high dividends</i>
Pelanggan Customers	Transportasi yang nyaman, aman, murah dan lancar <i>Convenient, safe, inexpensive and smooth transportation</i>	Transportasi yang andal, tepat waktu, online based <i>Reliable, well-timed, online based transportation</i>
Tenaga Kerja Labours	Pemenuhan Hak Tenaga Kerja dan Perikatan Kontrak <i>Fulfillment of Labor Rights and Contract Engagement</i>	Peningkatan kesejahteraan, Fasilitas dan Remunerasi <i>Increased welfare, facilities and remuneration</i>



Stakeholders	Kebutuhan Needs	Harapan Expectations
Pihak Ketiga (Vendor) Third Parties (Vendor)	Menjadi mitra kerja yang terpercaya bagi KCI dalam mendukung operasional Perseroan <i>Become a trusted partner for KCI in supporting the Company's operations</i>	- Perseroan yang sustainability terjamin - Pembayaran pengadaan barang dan jasa dilakukan tepat waktu <i>Sustainability companies are guaranteed</i> <i>Payment for the procurement of goods and services is carried out punctually</i>
Lingkungan Environment	Transportasi yang ramah lingkungan <i>Environmentally friendly transportation</i>	Ikut serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar tempat kerja dan wilayah usaha <i>Participate in preserving the environment around the workplace and business area</i>
Pemerintah Government	Menyediakan alat transportasi yang memadai bagi masyarakat <i>Providing adequate transportation for the community</i>	- Terintegrasi dengan transportasi nasional - Mengurangi tingkat kemacetan di dalam kota <i>Integrated with national transportation</i> <i>Reducing congestion in the city</i>
Masyarakat Society	Mendukung tanggung jawab sosial yang tertuang dalam kebijakan yang dapat memberikan nilai dari manfaat sosial <i>Supporting social responsibility contained in policies that can provide value from social benefits</i>	Terciptanya hubungan yang harmonis yang mengedepankan prinsip normal dan etika <i>The creation of a harmonious relationship that promotes normal and ethical principles</i>
Media Massa Mass Media	Pemberian informasi yang akurat, relevan dan berimbang <i>Providing accurate, relevant and balanced information</i>	Hubungan harmonis yang dapat mendukung terciptanya image Perseroan yang baik <i>Harmonious relationship that can support the creation of a good corporate image</i>



STRATEGI PENERAPAN CSR

CSR Implementation Strategies

Tanggung jawab sosial perusahaan ditetapkan dengan mempertimbangkan dua hal:

- a. Analisis atas sejumlah gangguan operasional/eksternalitas yang terjadi dalam bisnis Perseroan. Hasilnya, terdapat gangguan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Gangguan dari faktor eksternal inilah yang berusaha ditanggulangi melalui program-program berdimensi sosial, karena gangguan yang ada sifatnya lebih kepada masalah sosial bukan teknis. Namun pada masa pandemi di tahun 2020 tantangan terbesar yang dihadapi Perseroan maupun masyarakat secara umum adalah pandemi COVID-19.
- b. Nilai Perseroan untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada penggunaannya. Dengan nilai ini, Perseroan senantiasa memperbaiki layanannya, meskipun telah ada aturan dalam Standar Pelayanan Minimum. Dari layanan yang lebih baik dan disukai pelanggan, maka keberlanjutan bisnis Perseroan akan semakin terjamin.

Dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, kebijakan tanggung jawab sosial Perusahaan oleh manajemen kemudian ditetapkan untuk dijalankan Divisi Corporate Secretaries dengan bekerja sama dengan Divisi Sekretaris Perusahaan, Divisi Pelayanan dan Divisi Keamanan dan Keselamatan.

Corporate social responsibility are determined by considering two matters:

- a. Analysis on various operational disruptions/externalities that occur in the Company's business. As a result, there are disturbances originating from internal and external factors. From these such disruptions of the external factors, we try to overcome through social dimension programs, because the existing disturbances are arising from social issues and not technical. However, the COVID-19 pandemic in 2020 was the biggest challenge for the company and society.
- b. Increasing the Company's Value to improve services for customers. With this value, the Company continues to improve its services, even though there are rules in the Minimum Service Standards. Through better services to customers, the Company's will guarantee its business sustainability.

By considering these two matters, the corporate social responsibility policies by management are set to be carried out by the Corporate Secretaries Division in collaboration with the Corporate Secretary Division, Service Division and Security and Safety Division.



ISU-ISU PENTING SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Important Issues concerning Social, Economy and Environment

Perseroan selalu melakukan pengamatan terhadap isu-isu yang beredar yang akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap bisnis Perseroan. Isu-isu yang terkait pengembangan CSR sebagai berikut:

1. Isu Sosial dan Ekonomi
 - a. Masih banyaknya penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan.
 - b. Masih tingginya angka pengangguran di Indonesia.
 - c. Harga-harga bahan pokok yang terus meningkat ditambah dengan rendahnya daya beli masyarakat.
 - d. Menurunnya jiwa sosial, rasa kebersamaan dan kegotongroyongan masyarakat Indonesia.
2. Isu Lingkungan
 - a. Kondisi lingkungan di sekitar wilayah usaha Perseroan yang masih memprihatinkan.
 - b. Tindakan vandalisme terhadap Sarana dan Prasarana Perkeretaapian.
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan dan keindahan lingkungan.
 - d. Pembuangan limbah rumah tangga dan sampah secara sembarangan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan banjir.
 - e. Banyaknya pemanfaatan dan perubahan lahan di sekitar rel yang dapat menyebabkan longsor.
3. Isu Konsumen
 - a. Banyaknya konsumen yang semakin kritis dengan kualitas produk dan layanan.
 - b. Mudah lunturnya kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap sebuah produk.

The Company continuously observes significant issues that will directly or indirectly affect the Company's business. Issues related to the development of CSR are as follows:

1. *Social and Economic Issues*
 - a. *There are still numerous Indonesians living in poverty.*
 - b. *The unemployment rate in Indonesia is still high*
 - c. *Prices of basic commodities that continue to increase as well as the low purchasing power of the people.*
 - d. *Decreasing social inner self, sense of togetherness and mutual cooperation in the community.*
2. *Environmental Issues*
 - a. *The environmental conditions around the Company's business area are still apprehensive.*
 - b. *Vandalism acts to trains facilities*
 - c. *Lack of public awareness on environment cleanliness and beauty.*
 - d. *Careless disposal of household waste and garbage that can cause pollution and flood.*
 - e. *Number of uses and changes in land around the railroad that can cause landslides.*
3. *Consumer Issues*
 - a. *The number of consumers who are increasingly critical of the quality of products and services.*
 - b. *An ease to fade the consumer trust and loyalty towards a product.*



TABEL STRATEGI DAN PROGRAM KERJA PERUSAHAAN DALAM MENANGANI ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Table of Corporate Strategy and Work Program In Addressing Social, Economic and Environmental Issues

Sosial Social	Ekonomi Economy	Lingkungan Environment
Melaksanakan kegiatan CSR sesuai dengan program yang ditetapkan dalam RKAP 2019 <i>Carry out CSR activities in accordance with the programs specified in the 2020 RKAP</i>	Tertib dalam pembayaran kewajiban <i>Orderly in payment of obligations</i>	- Melakukan penghematan dalam bidang energi - Pengaturan pembuangan limbah dari kegiatan operasional <i>Execute an energy saving</i> <i>Regulation of waste disposal from operational activities</i>
Pemenuhan regulasi <i>Compliance with regulations</i>	Melakukan kegiatan operasional sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia <i>Conduct operational activities in accordance with the service standards set by the Ministry of Transportation and PT Kereta Api Indonesia</i>	Melakukan pemenuhan regulasi pada bidang lingkungan <i>Comply regulations in the field of environment</i>
Melakukan penerapan K3 sesuai dengan aturan SMK3 dan ISO 45001 <i>Implement OHS in accordance with the rules of SMK3 and ISO 45001</i>	Melakukan kegiatan pengembangan usaha Perseroan sesuai dengan RKAP tahun berjalan, RJPP Perseroan yang sejalan dengan RKAP dan RJPP KAI serta peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah <i>Conducting business development activities of the Company in accordance with the current RKAP, the Company's RJPP in conformity with the RKAP and RJPP of KAI as well as regulations stipulated by the Government</i>	Melakukan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan <i>Implement the Environmental Management System</i>



STAKEHOLDER PENTING YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH PADA DAMPAK DARI KEGIATAN PERUSAHAAN

Important Stakeholders Affected or Potentially Affect the Company's Activities

Implementasi CSR di Perseroan senantiasa melibatkan beberapa pemangku kepentingan karena aspirasi mereka turut mempengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak signifikan pada kelangsungan usaha Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan membuat daftar identifikasi keterlibatan dan kebutuhan pemangku kepentingan beserta metode pendekatan yang sekaligus menjadi momen untuk melakukan *due diligence* atas penerapan program CSR yang dilakukan. Sesuai dengan standar ISO 26000 terdapat 7 (tujuh) subjek inti yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Tata Kelola
2. Hak Asasi Manusia
3. Ketenagakerjaan
4. Lingkungan
5. Praktik Operasi yang Adil
6. Konsumen
7. Pelibatan Pengembangan Masyarakat

Perseroan berupaya menjawab isu utama masing-masing pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan Perseroan diidentifikasi berdasarkan tingkat kepentingan hubungan yang mempengaruhi kinerja Perseroan, demikian juga sebaliknya. Berdasarkan hasil dari proses identifikasi yang telah dilakukan, pemangku kepentingan utama Perseroan di tahun 2020 terdiri atas:

1. Pemegang Saham
2. Pegawai
3. Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA)
4. Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota)
5. Kementerian terkait
6. Mitra Kerja (Industri Pelaku Usaha)
7. Pengguna Jasa/Pelanggan
8. Masyarakat lingkungan kerja
9. Media Masa
10. Asosiasi Perkeretaapian
11. Lembaga Swadaya

The implementation of CSR in the Company always involves several stakeholders because their aspirations also influence decision making which has a significant impact on the continuity of the Company's business. Therefore, the Company has made a list of identification of stakeholder involvement and needs along with the approach method which is also a moment to conduct due diligence on the implementation of the CSR program. In accordance with the ISO 26000 standard there are 7 (seven) core subjects which include the following:

1. Governance
2. Human Rights
3. Employment
4. Environment
5. Fair Operating Practices
6. Consumer
7. Community Development Involvement

The Company seeks to answer each main issue of stakeholder. The Company's stakeholders are identified based on the level of relationship interest that affects the Company's performance, and vice versa. Based on the identification process, the Company's main stakeholders in 2020 consist of:

1. Shareholders
2. Employee
3. Railway Workers Union (SPKA)
4. Government (Central, Province, Regency/City)
5. Relevant ministries
6. Partners (Business Industry)
7. Service User/Customer
8. Community work environment
9. Mass Media
10. Railway Association
11. Non-Governmental Organizations

KEGIATAN CSR DALAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

CSR Activities Related to the Environment

Kebijakan Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan

Industri transportasi dituntut untuk memiliki strategi yang efektif agar dapat mengurangi dampak aktivitas operasional terhadap lingkungan. Sebagai pemangku kepentingan di industri transportasi nasional, Perseroan telah berpartisipasi secara aktif menjalankan program-program untuk melestarikan lingkungan melalui pengoperasian sarana kereta commuter bertenaga listrik. Melalui realisasi penyediaan kereta bertenaga listrik tersebut, maka Perseroan telah turut andil dalam penggunaan energi baru-terbarukan (*renewable energy*) serta berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.

Policy of Environmental Management and Preservation

The transportation industry is required to have an effective strategy in order to reduce the impact of operational activities on the environment. As a stakeholder in the national transportation industry, the Company has actively participated in implementing programs to preserve the environment through the operation of electric-powered commuter train facilities. Through the realization of the electricity-powered train, the Company has been involved in the use of new renewable energy and contributed to the reduction of carbon emissions.



Perseroan memiliki komitmen tinggi untuk terus menjalankan kewajiban lingkungannya mencegah atau meminimalkan dampak yang ditimbulkan kegiatan bisnisnya terhadap lingkungan sesuai ketentuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, KCI terus berupaya untuk meminimalisir dampak limbah yang ada di wilayah-wilayah operasional Perseroan, baik di Stasiun, Dipo Kereta, maupun Kantor Pusat. Selain itu, Perseroan juga melakukan upaya inisiatif dalam penghematan energi dalam seluruh aktivitas operasional dan bisnis, baik efisiensi energi listrik, air, dan sumber daya lainnya.

The Company has a high commitment to carry out its environmental obligations to prevent or minimize the impact of its business activities on the environment in accordance with predetermined provisions. Therefore, KCI strives to minimize the waste from the Company's operational areas, such as the Station, Train Depot, and Head Office. In addition, the Company also takes initiatives to save energy in all operational and business activities, both in terms of energy efficiency in electricity, water, and other resources.

Konsep Green Economy yang menjadikan aspek *People*, *Planet*, dan *Profit* sebagai tiga fokus utama menjadi landasan Perseroan dalam menyusun Green Strategy. Upaya tersebut dilakukan oleh Perseroan untuk mencapai target perusahaan melalui

The Green Economy concept, which makes *People*, *Planet*, and *Profit* aspects as the three main focuses, becomes the Company's foundation in preparing Green Strategy. These efforts are carried out to achieve the company's targets through



kegiatan operasional berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat emisi dan limbah serta menghemat penggunaan energi serta sumber daya alam lainnya.

Salah satunya Perseroan berkomitmen dengan melaksanakan kegiatan KCI Go Green, yaitu pengurangan sampah plastik yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari, serta menetapkan 3 Stasiun KRL sebagai Stasiun Ramah Lingkungan yaitu Stasiun Sudirman, Stasiun Jurangmangu dan Stasiun Klender. Di tiga Stasiun ini terdapat pengelolaan sampah terpadu dan pemilahan sampah yang dibagi menjadi jenis sampahnya, *charging corner* yang dayanya berasal dari panel sel surya, serta taman stasiun untuk membuat stasiun lebih sejuk dan asri. Selain itu, dalam memberi layanan di Stasiun KCI juga memilih fasilitas-fasilitas yang lebih ramah lingkungan antara lain menyediakan pengering tangan sebagai pengganti tisu di tempat cuci tangan; pemilihan tipe keran yang lebih hemat air; pembuatan biopori; mengganti sejumlah kipas angin dinding dengan satu unit kipas angin HVLS (*High Volume Low Speed*), hingga *timer* otomatis pengatur nyala dan padamnya lampu di stasiun.

Konservasi Energi Perkantoran

Dalam rangka mencapai penghematan sumber daya, Perseroan melakukan berbagai upaya terutama pengaturan penggunaan peralatan:

- Mengurangi penggunaan cahaya lampu
- Mematikan pendingin ruangan, lampu, komputer dan peralatan listrik lainya bila sudah tidak digunakan
- Penggunaan lampu LED untuk perkantoran
- Mendorong penghematan air

Adapun jumlah penggunaan listrik di area perkantoran Perseroan pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

environmentally friendly operational activities that aim to reduce emission and waste levels as well as save the use of energy and other natural resources.

*One of which is the Company's commitment to carry out Go Green activities, namely reducing plastic waste generated from daily activities, as well as establishing 3 KRL Stations as Environmentally Friendly Stations, namely Sudirman Station, Jurangmangu Station and Klender Station. In these three stations, there is an integrated waste management and waste sorting which is divided into types of waste, a charging corner whose power comes from solar cell panels, and a station garden to make the station cooler and more beautiful. In addition, in providing services at the KCI Station, they also choose facilities that are more environmentally friendly, including providing hand dryers as a substitute for tissue in the hand washing facilities; choosing the type of faucet that is more water efficient; manufacture of biopores; replacing a number of wall fans with a single HVLS (*High Volume Low Speed*) fan, up to an automatic timer controlling the lights on and off at the station.*

Office Energy Conservation

To conserve energy resources, the Company makes various efforts, particularly regulating the use of equipment:

- Reduce the use of light
- Turn off air conditioning, lights, computers and other electrical equipment when not in use
- Use LED lights for offices
- Promotes water saving

Total electricity usage in the Company's office areas in 2019 and 2020 is as follows:



KEGIATAN CSR DALAM BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CSR Activities Related to the Social and Community Development



Perseroan mewujudkan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang dapat mendukung perkembangan masyarakat dan pembangunan. Program-program yang dijalankan disinergikan dengan program Induk Perusahaan dan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional Perseroan.

The Company realizes its commitment to carry out social responsibility that can support community development and development. Such programs are synergized with the Holding Company's program and the needs of the surrounding community.

Perseroan menempatkan masyarakat sebagai salah satu stakeholders utama dalam perkembangan Perseroan. Seiring dengan peningkatan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat, Perseroan terus menyelenggarakan berbagai aktivitas untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat, khususnya di sekitar wilayah operasional Perseroan.

The Company places the community as one of the main stakeholders in the Company's development. Along with improving the quality of transportation services to the community, the Company continues to organize various activities to contribute directly to the community, especially around the Company's operational areas.





Kegiatan CSR dalam bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang dilakukan selama tahun 2020 terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan COVID-19 bagi masyarakat dan pelanggan. Ini sejalan dengan imbauan Pemerintah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak) terutama pada layanan dan fasilitas publik seperti kereta api.

Sejak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, KCI telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan terawasi. Upaya yang dilakukan yakni saat memasuki area stasiun masyarakat diwajibkan dalam kondisi sehat (tidak menderita flu, pilek, batuk, hilang daya penciuman, diare, dan demam), memakai masker kain tiga lapis atau masker medis yang menutupi hidung dan mulut, bersuhu tubuh tidak lebih dari 37,3 derajat celsius, dan diimbau menggunakan pakaian lengan panjang.

KCI juga telah mengatur pelaksanaan jaga jarak baik di stasiun maupun di atas kereta api. Pengaturan jarak di stasiun telah diatur termasuk pada ruang tunggu dan antrian pelanggan. Petugas selalu siap untuk mengingatkan setiap pelanggan akan protokol kesehatan yang ada.

Untuk menjamin kebersihan selama perjalanan, petugas rutin membersihkan objek-objek yang sering terpegang tangan setiap 30 menit sekali secara bergantian. Adapun objek-objek sensitif seperti pegangan pintu, pengunci pintu, keran air, tombol flush toilet, sandaran tangan, meja lipat, dan lainnya juga dilakukan pembersihan secara berkala dengan penyemprotan disinfektan.

KCI juga menyediakan fasilitas higienitas berupa wastafel portabel dan *hand sanitizer* di titik-titik yang mudah dijangkau oleh pelanggan. Adapun guna memastikan kesehatan pelanggan, petugas juga akan mengukur suhu badan pelanggan di atas kereta tiap 3 jam sekali. Adapun dalam menghadapi situasi new normal saat ini, petugas frontliner yang berpotensi kontak jarak dekat dengan pelanggan dibekali dengan APD berupa masker, sarung tangan, dan *face shield*. Petugas tersebut antara lain petugas loket, customer service, petugas boarding, kondektur, dan petugas kebersihan di atas kereta.

Selain mensosialisasikan protokol kesehatan di lingkungan KCI, Perseroan juga melakukan sosialisasi bagi masyarakat sekitar stasiun. Sosialisasi yang telah dilaksanakan diantaranya di kepada warga sekitar stasiun dan wilayah operasi KCI, seperti masjid, sekolah, panti asuhan, dan lain-lain.

CSR activities in the field of social and community development in 2020 were related to the efforts to handle and prevent COVID-19 for the community and customers. This conforms with the Government's appeal to always apply the 3M health protocol (washing hands, wearing masks and maintaining distance) especially on public services and facilities such as trains.

Since the COVID-19 pandemic in Indonesia, KCI has made various efforts to prevent the spread of the virus by implementing strict and tight health protocols. The efforts include to ensure people entering the station areas are in good health (not suffering from flu, colds, coughs, loss of smell, diarrhea, and fever), wearing three-layer cloth masks or medical masks that cover the nose and mouth, body temperature is lower than 37.3 degrees celsius, and wearing long sleeves.

KCI has also regulated the social distancing policy at stations and on trains. Physical distancing are arranged in the waiting room and customer queues. Officers are stand by to remind every customer to implement health protocols.

To ensure cleanliness during the trip, officers routinely clean objects that are often touched by hands. every 30 minutes. Sensitive objects such as door handles, door locks, water faucets, toilet flush buttons, armrests, folding tables, and others are also cleaned regularly by spraying disinfectant.

KCI has also provided hygiene facilities in the form of portable sinks and hand sanitizers at easily accessible points. As for ensuring the health of customers, officers will also measure body temperature on the train every 3 hours. Meanwhile, in dealing with the current new normal situation, frontliner officers who have the potential to have close contact with customers are equipped with PPE in the form of masks, gloves, and face shields. These officers include counter officers, customer service, boarding officers, conductors, and cleaners on the train.

In addition to socializing health protocols within the KCI environment, the Company also conducts socialization for the community around the station. The socializations have been carried out to community around the station and KCI's operational areas, such as mosques, schools, orphanages, and others.

KEGIATAN CSR DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

CSR Activities Related to Occupational, Health, and Safety Employment

Sebagai penyedia jasa transportasi publik, K3 dipandang memiliki dampak yang signifikan bagi Perseroan, sehingga menjadi aspek terpenting yang senantiasa diimplementasikan dengan perhatian tinggi. Pada praktiknya, Perusahaan mengimbuai agar seluruh insan KCI melaksanakan dan turut melaksanakan praktik K3 terbaik di seluruh lini pekerjaan, dengan target nihil kecelakaan, nihil penyakit akibat kerja, sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman di mana seluruh pegawai dapat bekerja secara optimal dan menghadirkan layanan jasa transportasi publik yang andal di wilayah pelayanan PT Kereta Commuter Indonesia.

Selama tahun 2020, pelaksanaan program K3 bertujuan untuk meningkatkan tingkat keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja melalui program dan kegiatan penanggulangan COVID-19 yang melibatkan seluruh pegawai secara langsung, antara lain:

- Pembagian multi vitamin kepada pegawai perseroan.
- Pembagian APD kepada pegawai frontliner berupa face shield, masker, sarung tangan.
- Penyediaan hand sanitizer dan disinfektan di area operasi dan kantor.
- Pembagian masker untuk pengguna KRL yang dibagikan oleh C-Ranger.

As a public transportation services company, K3 is seen as having a significant impact on the Company. Thus, it is always implemented with high attention. In practice, the Company urges all employees to implement and participate to implement best K3 practices in all lines of work, with a target of zero accidents, zero occupational diseases, so as to create a healthy, safe, and comfortable work environment where all employees can work optimally, and provide reliable public transportation services within the service area.

Throughout 2020, the implementation of K3 program aims to improve the level of safety and health in the work environment through COVID-19 prevention programs and activities that involve all employees directly, including:

- Distribution of multi vitamins to company employees.*
- Distribution of PPE to frontliner in the form of face shields, masks, gloves.*
- Provision of hand sanitizers and disinfectants in the operating and office area.*
- Distribution of masks for KRL users shared by C-Ranger.*





Kinerja K3 Tahun 2020

K3 Performance In 2020

Uraian Description	Jumlah Total
Data kecelakaan kerja Work accident	0
Frekuensi Lost Time Injury Rate Lost time injury frequency rate	0
Total Injury Rate Total recordable injury rate	0

KCI mendapatkan penghargaan gold SMK3 dari Kementerian Ketenagakerjaan atas praktik K3 dan pencapaian zero accident.

KCI received a gold SMK3 award from the Ministry of Manpower for its SHE practices and zero accident.

Di masa pandemi saat ini, faktor *human capital* menjadi elemen yang krusial dalam keberlanjutan operasional Perseroan. Bisnis harus menyesuaikan diri dengan cepat agar dapat tetap bertahan, termasuk mengelola perubahan ekstrem yang dihadapi oleh para tenaga kerja. Pandemi juga memberi para pemimpin kesempatan untuk merancang masa depan kerja, mengambil tindakan cepat untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja, mengadakan berbagai layanan yang mungkin sebelumnya belum ada, hingga menerapkan strategi untuk mendukung pekerja di masa-masa penuh tantangan ini.

During the current pandemic, the human capital factor is a crucial element in the sustainability of the Company's operations. Businesses must adapt quickly to stay afloat, including managing the extreme changes faced by the employees. The pandemic also gives leaders the opportunity to design the future of work, take rapid action to protect employees' health and safety, provide services that may not have existed before, and implement strategies to support employees in these challenging times.

Perseroan juga membentuk "C-Ranger" yaitu kelompok yang berisi pegawai Millenials sebagai *influencer* dalam menegakkan protokol kesehatan. C-Ranger bertugas untuk mengajak seluruh karyawan Perseroan dan para pengguna KRL untuk menerapkan adaptasi kebiasaan baru (AKB) di lingkungan stasiun maupun di KRL.

The Company also formed "C-Ranger", a group consisting of Millennials employees as influencers in enforcing health protocols. C-Ranger is tasked to invite all employees and KRL users to implement New Normal adaptations in the station and KRL environments.

Untuk merespon dan memitigasi pandemi COVID-19 serta memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan, Perseroan melakukan beberapa upaya, seperti penerapan kebijakan bekerja dari rumah (*work-from-home*) dan penambahan pembagian shift kerja untuk mengurangi jumlah karyawan yang berada di kantor maupun lapangan. Salah satu upayanya yaitu dengan menyebar/menambah karyawan bekerja di lapangan untuk memantau penerapan protokol kesehatan bagi pelanggan dan juga mencegah kerumunan pada saat menunggu naik KRL di area stasiun.

To respond and mitigate the COVID-19 pandemic and ensure the health and safety of employees, the Company made several efforts, such as implementing a work-from-home policy and adding work shifts to reduce the number of employees in the office and field. One of the efforts is to deploy/add employees to work in the field to monitor the implementation of the Health protocol for customers and prevent crowds while waiting to get on the KRL in the station area.

Pembagian masker serta vitamin secara rutin juga dilaksanakan untuk mendukung kesehatan karyawan. Bila karyawan terpapar COVID-19, Perseroan secara sigap menugaskan Satuan Tugas Tanggap Darurat COVID-19 untuk mengurus dan mengkoordinasikan lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait untuk penanganan kepada karyawan yang terpapar COVID-19.

Regular distribution of masks and vitamins is also carried out to support employees' health. If any employee is exposed to COVID-19, the company swiftly assigns a COVID-19 Emergency Response Task Force to manage and coordinate further with related parties to carry out its handling.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

The Company Responsibility Related to Human Rights

Secara spesifik, untuk menghargai hak asasi manusia secara mendasar serta sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja karyawan untuk menjadi lebih baik, termasuk dalam mempertahankan loyalitas karyawan, salah satu aspek yang harus diperhatikan untuk selalu menghormati dan menaati Hak Asasi Manusia (HAM). Perseroan tidak hanya fokus pada kesetaraan di lingkup Perseroan, namun juga senantiasa melakukan penghormatan kepada masyarakat dan pemasok. Perseroan berkomitmen untuk selalu menghormati dan menaati HAM yang diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Perseroan dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Keadilan di Tempat Kerja

Perseroan telah menetapkan kebijakan atau kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan keadilan di tempat kerja antara lain dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM, penerapan kode etik, melakukan pemberian kompensasi yang adil bagi seluruh pegawai, peningkatan tingkat kesehatan dan kesejahteraan pegawai dan berusaha untuk *zero accident* pada setiap kegiatan Perseroan.

2. Prinsip Kesetaraan untuk Semua

Perseroan memiliki kebijakan untuk melakukan penerimaan, penilaian kerja, remunerasi, pengembangan karir dan melaksanakan tugasnya secara *professional* tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik.

3. Kesetaraan Gender

Perseroan menjunjung tinggi aspek kesetaraan dan persamaan kesempatan kerja kepada seluruh pegawai dengan memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai baik laki-laki maupun perempuan untuk berkarya dan mengisi berbagai posisi di Perseroan, mulai dari tahap rekrutmen pegawai hingga pengembangan karir. Perseroan menjamin tidak adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender dan golongan dalam aspek remunerasi, kesempatan maupun jenjang karir. Penilaian kinerja sepenuhnya mempertimbangkan kinerja pegawai yang bersangkutan dan faktor-faktor yang relevan.

SDM KCI memiliki berbagai macam latar belakang yang oleh karena itu Perusahaan menerapkan prinsip kesetaraan untuk semua dalam pengelolaan SDM. KCI memiliki kebijakan yang diatur dalam Pedoman Perilaku dan Etika Kerja yang menjelaskan bahwa Perusahaan harus melakukan penerimaan, penilaian

Specifically, to respect basic human rights and as an effort to support the improvement of employee performance for the better, including maintaining employee loyalty, one aspect that must be considered is to always respect and obey Human Rights (HAM). The Company does not only focus on equality within the scope of the Company, but also always respects the community and suppliers. The Company is committed to always respecting and complying with human rights as embodied in the policies issued by the Company and in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the following activities:

1. Fairness in the Working Site

The Company has established policies or activities to create fairness in the workplace, such as by implementing the principles of human rights, implementing a code of conduct, performing fair compensation for all employees, improving the level of health and welfare of employees and attempting to zero accident on every activity of the Company.

2. Diversity Principles for All

The Company has the policy to conduct acceptance, assessment of work, remuneration, development of career and carry out its duties professionally without distinguishing ethnicity, religion, race, class, gender and physical condition.

3. Gender Equality

The Company uphold the equality aspect and equality of employment opportunities to all employees by giving the same opportunity for both male and female employees to work and fill various positions in the Company, ranging from employee recruitment stage to career development. The Company guarantees the absence of discrimination based on ethnic, religious, racial, gender and group aspects of remuneration, opportunity and career path. The performance assessment fully considers the performance of the employees concerned and the relevant factors.

KCI's human resources have various backgrounds, which is why the Company applies the principle of equality for all in HR management. KCI has a policy regulated in the Code of Conduct and Work Ethics which explains that the Company must conduct acceptance, performance appraisal, remuneration and

kinerja, remunerasi dan pengembangan karir tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik. KCI mendukung prinsip kemanusiaan serta menghormati hak asasi manusia dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kebijakan tersebut dijamin dan telah disahkan oleh Surat Keputusan Direksi yang mengatur tentang kode etik, pedoman GCG, dan Peraturan Perusahaan.

4. Kesetaraan Gender untuk Promosi

Jumlah pegawai yang dipromosikan tahun 2020 adalah 60 orang dengan komposisi 52 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

5. Pencegahan Eksploitasi Anak dan Kerja Paksa

Sesuai dengan peraturan Perseroan tentang kebijakan rekrutmen pegawai, Perseroan mempunyai syarat usia minimum calon pegawai yaitu 18 tahun, hal ini sejalan dengan peraturan yang sudah dibuat oleh PT KAI. Perseroan juga mengharuskan para mitra yang bekerja di lingkungan Perseroan mempunyai aturan yang sama. Perseroan juga telah mengatur kebijakan SDM dan waktu bekerja sesuai dengan konvensi Internasional Labour Organization (ILO).

6. Kebebasan Berserikat

Perseroan memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada Insan Perseroan untuk berserikat dan berkumpul dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Perseroan mempunyai Serikat Pekerja PT KCI untuk memberikan kritik dan saran terhadap manajemen Perseroan dan sebagai partner dalam mencapai target Perseroan.

7. Sosialisasi HAM

Perseroan memberikan sosialisasi HAM kepada para pegawainya melalui sosialisasi kode etik dan peraturan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Unit Policy GCG bekerja sama dengan Unit SDM Perseroan.

8. Penghormatan kepada Masyarakat

Perseroan selalu menghormati masyarakat sekitar agar operasional Perseroan dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali. Hal ini terwujud dengan baik di mana pada masa pelaporan tahunan ini, Perseroan

career development without discriminating against ethnicity, religion, race, class, gender and physical condition. KCI supports the principle of humanity and respects human rights in the management of human resources. This policy is guaranteed and has been approved by the Decree of the Board of Directors which regulates the code of ethics, GCG guidelines, and Company Regulations.

4. Gender Equality for Promotion

Total promoted employees in 2020 were 60 employees, with a composition of 52 men and 8 women.

5. Prevention of Child Exploitation and Forced Labor

In accordance with the Company's regulations regarding employee recruitment policies, the Company has a minimum age requirement for prospective employees, namely 18 years, this is in line with the regulations that have been made by PT KAI. The Company also requires partners who work within the Company to have the same rules. The Company has also set HR policies and working hours in accordance with the International Labor Organization (ILO) conventions.

6. Freedom of Association

The Company gives maximum freedom to the Company's Personnel to associate and assemble on conditions that are in accordance with the applicable laws and regulations and do not conflict with existing norms. The Company has a PT KCI Labor Union to provide criticism and suggestions to the Company's management and as a partner in achieving the Company's targets.

7. Socialization of Human Rights

The Company provides socialization of human rights to its employees through socialization of the code of ethics and company regulations implemented by the GCG Policy Unit in collaboration with the Company's HR Unit.

8. Respect for Society

The Company always respects the surrounding community so that the Company's operations can run safely, smoothly and under control. This has been well realized where during this annual reporting period,



berhasil mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat dan tidak ada kejadian yang signifikan berdampak pada operasional Perseroan.

9. Pemasok

Perseroan memberikan kebebasan kepada para pemasok untuk bisa melakukan kerja sama dengan Perseroan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Perseroan melakukan kerja sama dan pemilihan pemasok sesuai dengan prinsip GCG.

the Company managed to maintain good relations with the community and there were no significant events that impacted the Company's operations.

9. Supplier

The Company gives freedom to suppliers to be able to cooperate with the Company in accordance with the requirements that have been set. The Company cooperates and selects suppliers in accordance with GCG principles.

Komposisi Pegawai KCI berdasarkan gender sebagai berikut:

The composition of KCI employees based on gender is as follows:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender Employees Composition based on Gender

Jenis Kelamin Gender	Jumlah Pegawai Tahun 2020 Total Employees in 2020		Jumlah Pegawai Tahun 2019 Total Employees in 2019	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Pria Male	2.320	90,4%	2.549	3.166
Wanita Female	246	9,6%	302	455
Jumlah Total	2.566	100%	2.852	3.621

Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan Pegawai Employees Composition based on Placement

Penempatan Placement	2020			2019		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Direktorat Utama Main Directorate	123	42	165	147	101	248
Direktorat Keuangan dan Administrasi Finance and Administration Directorate	90	92	182	49	26	75
Direktorat Teknik Engineering Directorate	662	12	674	643	12	675
Direktorat Operasi dan Pemasaran Operational and Marketing Directorate	1.437	100	1.537	1.684	164	1.848
Non Direktorat Non-Directorate	8	0	8	6	0	6
Jumlah Total	2.320	246	2.566	2.549	303	2.852

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Employees Composition based on Position

Jabatan Position	2020			2019		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Direksi Board of Directors	3	1	4	3	1	4
Komisaris Board of Commissioners	4	0	4	3	0	3
Perangkat Komisaris Board of Commissioners' Subordinates	4	0	4	3	0	3
Vice President	13	3	16	15	3	18
Manager	44	8	52	46	8	54
Junior Manager-Assistant Manager	93	16	109	93	14	107
Junior Supervisor-Junior Supervisor	315	69	384	277	67	344
Junior Staff, Staff, MPP, Probation	1.826	126	1.952	1.850	125	1.975
PKWT Contract	18	23	41	259	85	344
Jumlah Total	2.320	246	2.566	2.549	303	2.852

Capaian dan Penghargaan Achievements and Awards

Sampai dengan 31 Desember 2020, secara spesifik capaian yang dilakukan di bidang HAM adalah bahwa Perseroan tidak mendapatkan tuntutan dan sanksi hukum terkait pelanggaran HAM. Pencapaian dalam bidang kegiatan Perseroan secara umum dapat dilihat pada daftar penghargaan Perseroan.

Until December 31, 2020, specifically the Company's achievement in the field of human rights is the absence of claims and legal sanctions related to human rights violations. Other achievements can be seen on the Company's awards list.



KEGIATAN CSR BERKAITAN DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Corporate Social Responsibility Towards Customers

Penumpang selaku salah satu pemangku kepentingan Perseroan memiliki peran paling vital dalam menjamin keberlangsungan usaha jangka panjang. Dengan perannya yang sentral dalam menjamin pertumbuhan usaha Perseroan, maka kepercayaan serta kepuasan penumpang merupakan elemen yang harus dikelola dengan baik. Untuk mengelola kepercayaan dan kepuasan penumpang tersebut, Perseroan telah menerapkan berbagai program, mencakup penyediaan ragam produk dan layanan jasa penerbangan yang sesuai dengan kebutuhan, berkualitas, layanan pendukung yang juga beragam, kemudahan akses melalui penyediaan jaringan layanan konvensional maupun elektronik, layanan *real time online* disertai penyediaan layanan penumpang.

Untuk mengimbangi jumlah penumpang yang terus bertambah setiap tahunnya, Perseroan terus termotivasi untuk melakukan perbaikan maupun peningkatan layanan kepada seluruh konsumen. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab Perseroan kepada seluruh pengguna jasa KRL. Selain komitmen dalam memberikan pelayanan yang maksimal, Perseroan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan guna membina hubungan yang baik dengan seluruh konsumen agar para pengguna jasa KRL terus menaruh kepercayaannya pada KCI dalam menyediakan moda transportasi yang senantiasa memenuhi kebutuhannya.

Beberapa kegiatan yang melibatkan para Konsumen Perseroan adalah sebagai berikut:

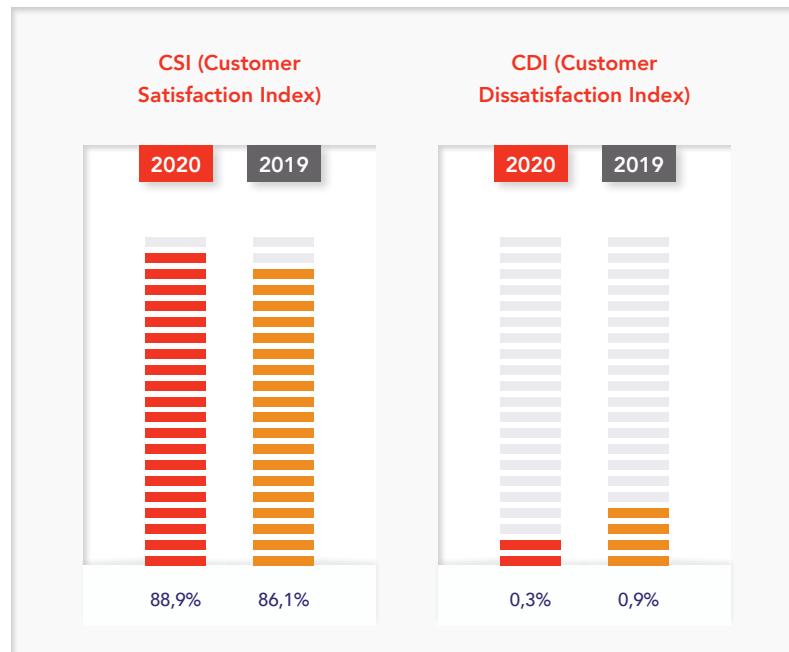
- FGD dilakukan setiap tahun dengan beberapa komunitas pelanggan, diskusi melibatkan Manajemen PT KCI, interaksi dan tanya jawab dilakukan ataupun penjelasan kebijakan dari manajemen PT KCI kepada pengguna KRL.
- Survey kepuasan pelanggan dilakukan setiap tahun dengan menggunakan beberapa metode antara lain pengukuran indeks CSI, CDI, HFI dll, dengan tujuan mengetahui ekspektasi dan persepsi pelanggan dan tentunya mengukur indeks kepuasan pelanggan. Hasil survey kemudian dilaporkan ke Manajemen untuk dievaluasi dan dilakukan perbaikan. Hasil survei kepuasan pelanggan di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Passengers as one of the Company's stakeholders have the most vital role in ensuring long-term business continuity. With its central role in ensuring the growth of the Company's business, the trust and satisfaction of passengers is an element that must be managed properly. To manage the trust and satisfaction of these passengers, the Company has implemented various programs, including the provision of a variety of aviation products and services that suit the needs, quality, various support services, easy access through the provision of conventional and electronic service networks, real time online services accompanied provision of passenger services.

To keep pace with the increasing number of passengers every year, the Company continues to be motivated to improve services to all consumers. This is a form of the Company's responsibility to all KRL service users. In addition to the commitment to provide optimal service, the Company also carries out activities to foster good relationships with all consumers so that KRL service users continue to put their trust in KCI in providing transportation modes that always meet their needs.

Some of the activities involving the Company's Customers are as follows:

- FGDs are held annually with several customer communities, discussions involving PT KCI Management, interactions, questions, and answers are carried out or policy explanations from PT KCI management to KRL users.*
- Customer satisfaction surveys are conducted annually using several methods including the measurement of the CSI index, CDI, HFI etc., with the aim to comprehend customer expectations and perceptions, and to measure the customer satisfaction index. The survey results are then reported to Management for evaluation and improvement. The results of the customer satisfaction survey in 2020 are as follows:*



Pemenuhan Aspek Kesehatan dan Keselamatan Bagi Pelanggan

Sebagai penyedia jasa transportasi publik, Perseroan menempatkan aspek keselamatan penumpang sebagai salah satu Prosedur Tetap yang harus dijalankan. Beberapa aspek mendasar yang dilakukan dalam hal pemenuhan aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan adalah:

- Kelengkapan peralatan P3K dan emergency kit di setiap stasiun dan kereta.
- Penanganan bila pelanggan sakit di kereta.
- Menyediakan 31 pos kesehatan dan 107 tenaga kesehatan.

Melayani di tengah Pandemi

Masa pandemi yang terus berlangsung di sepanjang tahun 2020 mendorong Perseroan untuk mengarahkan upaya terbaiknya dalam menjaga layanan optimal yang melindungi penumpang,

1. Menambah rangkaian.
2. Memberlakukan pembatasan jam operasional.
3. Menjalankan protokol ketat termasuk pengukuran suhu tubuh, wajib menggunakan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah naik KRL, serta menjaga jarak.
4. Konsisten mengingatkan para pengguna agar tetap mengikuti antrian penyekatan menuju ke peron yang ada di stasiun terutama pada jam-jam sibuk. Dalam mengantre, para pengguna harus senantiasa menjaga jarak dan tidak lalai dalam memakai masker.

Fulfillment of Health and Safety Aspects for Customers

As a public transportation services company, KCI places the aspect of passenger safety as one of the Permanent Procedures. Several basic aspects to fulfill customers' health and safety aspects are:

- Completeness of first aid kits and emergency kits at every station and train.
- Procedure for customer sick on the train.
- Providing 31 health posts 107 and health workers.

Serving in the midst of a Pandemic

The pandemic period that continued throughout 2020 has encouraged the Company to exert its best efforts in maintaining optimal services that protect passengers. The Company carries out the following efforts:

1. Additional fleet.
2. Implementing restrictions on operating hours.
3. Carry out strict protocols including measuring body temperature, mandatory wearing of masks, washing hands before and after boarding the KRL, and physical distancing.
4. Consistently remind users to keep following the blocking queue to the station, especially during peak hours. In queuing, users must always keep their distance and wear masks.



5. Memberlakukan aturan tambahan, yaitu bagi lansia hanya dapat naik kereta pada pukul 10.00 WIB-14.00 WIB atau di luar jam sibuk. Sementara bagi balita tidak diperkenankan naik KRL.
 6. Membuka jendela pada area ujung setiap kereta untuk menambah sirkulasi udara selama dalam perjalanan KRL.
 7. Mengimbau untuk berdiri dengan menghadap satu arah agar tidak saling berhadap-hadapan. Aturan untuk tidak berbicara baik secara langsung maupun melalui telepon selama perjalanan juga tetap berlaku.
 8. Tidak lelah menjaga kebersihan rangkaian kereta dan stasiun. Seluruh rangkaian kereta setiap harinya dicuci dan disemprot cairan disinfektan usai beroperasi. Selama beroperasi, petugas juga rutin membersihkan bagian-bagian KRL maupun stasiun dengan cairan disinfektan.
 9. Pengguna KRL juga dapat memanfaatkan aplikasi untuk merencanakan perjalanan serta terhindar dari potensi kepadatan di stasiun.
 10. Menyalurkan masker sebanyak 143.214 buah, menyediakan hand sanitizer sebanyak 31.516 liter, hand soap sebanyak 12.416 liter, dan disinfektan sebanyak 30.440 liter.
5. *Implement additional rules for the elderly to ride the train at 10.00 WIB-14.00 WIB or outside peak hours. Meanwhile, toddlers are not allowed to ride the KRL.*
 6. *Open windows at the end of each train to increase air circulation during the trip.*
 7. *Urge to stand facing one direction so as not to face each other. The rule not to speak either in person or over the phone during the trip also remains in effect.*
 8. *Maintain the cleanliness of the train and stations. The whole trains are washed and sprayed with disinfectant every day after the operation hours ended. During operation, officers also routinely clean parts of KRL and stations with disinfectant.*
 9. *KRL users can also use the application to plan trips and avoid potential overcrowding at stations.*
 10. *Distributed 143,214 masks, provided 31,516 liters of hand sanitizer, 12,416 liters of hand soap, and 30,440 liters of disinfectant.*





Penanganan Keluhan Pelanggan

Perseroan selalu melakukan perbaikan dari waktu ke waktu dengan berdasarkan data yang digunakan salah satunya adalah penanganan keluhan pelanggan. Penanganan keluhan pelanggan dilakukan melalui unit Pelayanan dengan *Commuter Control Room* (CCR). Keluhan pelanggan terdefinisi dengan baik sesuai dengan kategori dan subjeknya sehingga dapat dilaporkan setiap hari kepada unit-unit terkait. Setiap keluhan terdefinisi dengan baik. Sehingga laporan keluhan pelanggan dapat menjadi acuan perbaikan pelayanan.

Perseroan juga melakukan pendataan melalui media sosial baik Twitter, Facebook, Instagram, e-mail dan Form Keluhan pelanggan yang mana masukan, kebutuhan, dan keinginan pelanggan bisa terserap. Perseroan membuka berbagai saluran untuk para stakeholders menyampaikan tentang keluhannya pada saluran tersebut, antara lain *face to face* atau datang langsung ke stasiun dan menyampaikan kepada petugas Passenger Service, atau via telepon ke Call Center 121 (021-121), juga melalui surat elektronik, dan melalui media-media sosial resmi Perseroan. Perseroan melakukan kerja sama dengan PT KAI untuk pelayanan pelanggan dan terintegrasi dengan sistem CRM (*Customer Relationship Management*). Hal ini dilakukan agar dapat memudahkan dalam pemantauan dan penanganan keluhan tersebut.

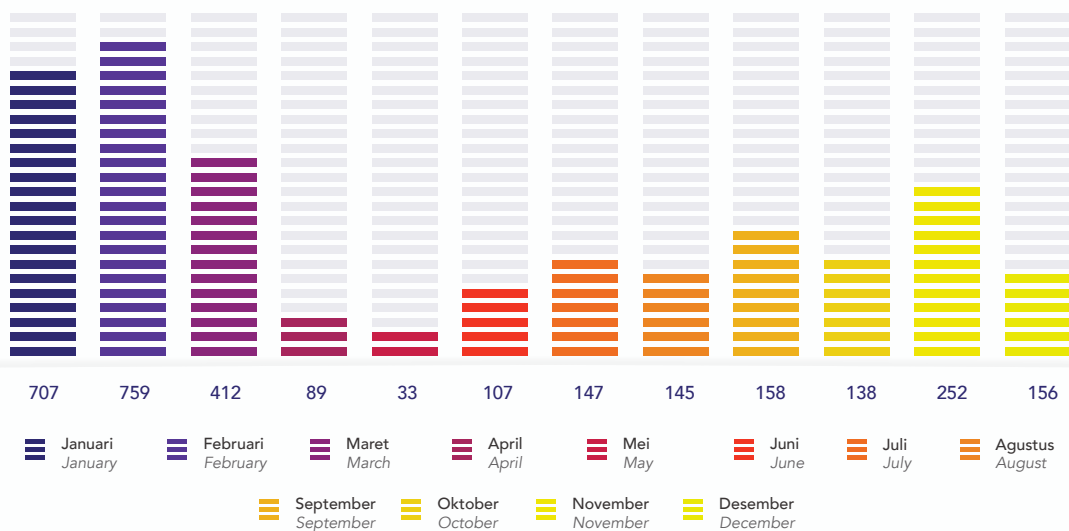
Customer Complaint Handling

The Company always makes improvements from time to time based on the data used, one of which is the handling of customer complaints. The handling of customer complaints is carried out through the Service unit with the Commuter Control Room (CCR). Customer complaints are well defined according to each category and subject so that they can be reported daily to the related units. Each complaint is well defined, so that customer complaints reports can be a reference for service improvement.

The Company also collects data through social media such as Twitter, Facebook, Instagram, e-mail and customer complaint forms where customer input, needs, and desires can be absorbed. The Company opens various channels for stakeholders to submit their complaints on these channels, including face to face or coming directly to the station and conveying to Passenger Service officers, or via telephone to Call Center 121 (021-121), also by electronic mail, and through the Company's official social media. The Company cooperates with PT KAI for customer service and is integrated with the CRM (Customer Relationship Management) system. This is done in order to facilitate the monitoring and handling of these complaints.



Keluhan Pelanggan Customer Complaint

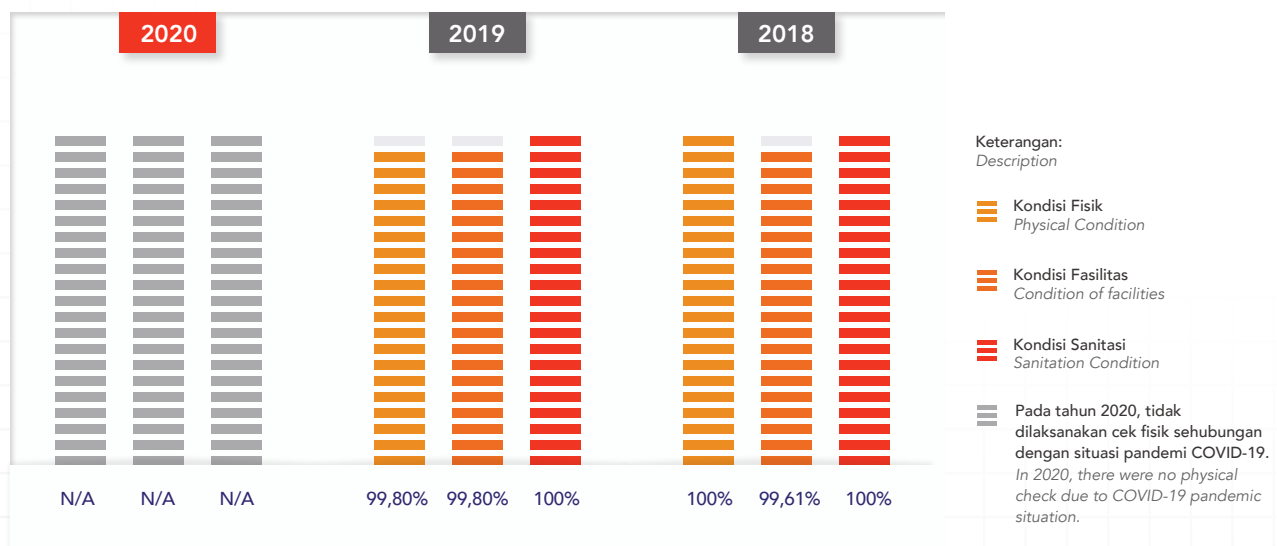


Standar Pelayanan

Pelaksanaan tanggung jawab kepada konsumen dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.48 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api dan berdasarkan peraturan Direksi PT KAI Nomor: 6/LL.006/KA-2015 Tanggal 7 Desember tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api. Berikut adalah hasil standar pelayanan yang dilakukan oleh Perseroan:

Service Standard

The implementation of responsibility to consumers is carried out based on the Regulation of the Minister of Transportation Number: PM.48 of 2015 concerning Minimum Service Standards for the Transportation of People by Train and based on the regulation of the Board of Directors of PT KAI Number: 6/LL.006/KA-2015 dated 7 December concerning Minimum Service Standards Transportation of People by Train. The following are the results of service standards carried out by the Company:



TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT CORE SUBJECT OPERASI YANG ADIL

Social Responsibility Towards Equitable Operational Core Subject

Operasi yang adil menegaskan pentingnya pengelolaan Perusahaan sesuai dengan etika bisnis dan etika usaha yang berlaku, yaitu melalui implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang mencakup *Fairness, Independence, Transparency, Responsibility, Accountability*. Kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan secara umum berdasarkan peraturan anti-fraud, anti penyuapan, anti korupsi, kebebasan politik yang bertanggung jawab, kompetisi yang adil serta bertanggung jawab sosial. Perseroan juga selalu terbuka terhadap aturan-aturan dan keterbukaan terhadap informasi publik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan

Perseroan berkomitmen untuk melakukan penerapan budaya anti-fraud, anti penyuapan dan anti korupsi sebagai bentuk aplikasi penerapan GCG di lingkungan Perseroan. Hal ini dilakukan sesuai dengan identitas Perseroan dalam bentuk budaya Perseroan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Hamonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) serta program kerja Perseroan tahun berjalan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Perseroan melakukan sosialisasi baik melalui media sosial, broadcast e-mail, diseminasi sosialisasi budaya yang disediakan pada lokasi-lokasi strategis Perusahaan.

Dalam rangka mewujudkan kegiatan Perseroan yang adil, Perseroan membuat kebijakan-kebijakan baru dan merevisi kebijakan yang ada untuk menciptakan keadilan dalam kegiatan Perseroan. Kebijakan-kebijakan tersebut juga dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang melanggar kode etik Perseroan. Perseroan juga telah membangun saluran pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) agar adanya kejelasan dan transparansi dalam melakukan penindakan pelanggaran di lingkungan Perseroan. Selama periode pelaporan, tidak ada insiden penyuapan dan korupsi yang terbukti dan terjadi di lingkungan Perseroan.

Fair operation emphasizes the importance of managing the Company in accordance with applicable business ethics and business ethics, namely through the implementation of Good Corporate Governance principles which include Fairness, Independence, Transparency, Responsibility, Accountability. The activities are generally based on anti-fraud, anti-bribery, anti-corruption regulations, responsible political freedom, fair competition and social responsibility. The Company is also always open to the rules and transparency to public information in accordance with the prevailing rules.

Planning and Implementation of Activities

The Company is committed to implement anti-fraud, anti-bribery and anti-corruption culture as part of GCG implementation in the Company's environment. This is done in accordance with the Company's identity in the form of the Company's culture, AKHLAK (Amanah, Kompeten, Hamonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) and the Company's work program in the current year. To support the activities, PT KCI conducts socialization through social media, broadcast e-mails, dissemination of cultural socialization provided at the strategic locations of the Company.

In order to realize fairness principle, the Company makes new policies and revises the existing policies to create justice in the Company's activities. These policies are also made to prevent violations on the Company's code of conduct. The Company has also built a Whistleblowing System for clarity and transparency in handling violations within the Company's environment. During the reporting period, there were no incidents of bribery and corruption in the Company's environment.



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS UNTUK LAPORAN TAHUNAN 2020

Statement of Responsibility from Board of Commissioners for the 2020 Annual Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Kereta Commuter Indonesia Tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in PT Kereta Commuter Indonesia Annual Report 2020 have been fully disclosed and being solely responsible upon accountability of the Annual Report contents. This statement is made truthfully.

Jakarta, Juli 2021
Jakarta, July 2021

MAQIN U. NORHADI

Komisaris Utama
President Commissioner

EDY WIDYAYA

Komisaris
Commissioner

JOHN ROBERTHO

Komisaris
Commissioner

DANTO RESTYAWAN

Komisaris
Commissioner

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI UNTUK LAPORAN TAHUNAN 2020

Statement of Responsibility from Board of Directors for the 2020 Annual Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Kereta Commuter Indonesia Tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information contained in PT Kereta Commuter Indonesia Annual Report 2020 have been fully disclosed and being solely responsible upon accountability of the Annual Report contents. This statement is made truthfully.

Jakarta, Juli 2021

Jakarta, July 2021



WIWIK WIDAYANTI

Direktur Utama
President Director



ROPPIQ LUTZFI AZHAR

Direktur Teknik
Director of Technic



M. WIDODO

Direktur Keuangan dan Administrasi
Director of Finance and Administration



WAWAN ARIYANTO

Direktur Operasi dan Pemasaran
Director of Operation and Marketing

Referensi Kriteria Penilaian Annual Report Award

Reference of Annual Report Award Criteria



REFERENSI KRITERIA PENILAIAN ANNUAL REPORT AWARD

Reference of Annual Report Award Criteria

No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
I.	UMUM		GENERAL
1.	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris.	√	Annual report is presented in good and correct Indonesian and it is also recommended to present the report in English.
2.	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.	√	Annual report is printed in good quality and and use readable font type and size.
3.	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas.	√	Annual report should state clearly the identity of the company.
4.	Nama perusahaan dan tahun laporan tahunan ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.		Name of the company and year of the annual report is placed on: 1. The front cover; 2. Sides; 3. Back cover; and 4. Each page.
5.	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan, mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir	√	Annual report is uploaded in the company's website, including the latest annual report and at least the last 4 years.
II.	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING		SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION
1.	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi); a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	12-17	Information of company's operating results in comparative form over a period of 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years. The information contained includes: 1. Operating sales/revenue; 2. Profit (loss); a. Attributable to parent entity; and b. Attributable to non-controlling interest 3. Total comprehensive profit (loss); a. Attributable to parent entity; and b. Attributable to non-controlling interest 4. Profit (loss) per share. Note: if there is no subsidiary, the company presents the total of profit (loss) and comprehensive income of the year.

No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
2.	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.	12-13	Information of company's financial position in comparative form over a period of 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years. The information contained includes: 1. Total investment in associates; 2. Total assets; 3. Total liabilities; 4. Total equity.
3.	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	13	Financial ratios in comparative form over a period of 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years.
4.	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik. 1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan 2. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.	17 √ √ √ √ √	Share price information in tables and charts. 1. Information in form of tables which contain: a. Market capitalization based on prices on the Stock Exchange where the share is listed; b. Highest, lowest, and closing price based on prices on the Stock Exchange where the share is listed; c. Share trading volume on the S 2. Information in form of charts which contain at least: a. Closing price based on prices on the Stock Exchange where the share is listed; b. Share trading volume based on the Stock Exchange where the share is listed, for every quarter in the last 2 (two) fiscal years. Note: it requires a disclosure if there is no market capitalization, share price information, and share trading volume.



No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.		Information on outstanding bonds, sukuk or convertible bonds in the latest 2 (two) fiscal years.
	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk	17	Information contains: 1. Total outstanding bonds/sukuk/convertible bonds; 2. Yield/interest rate; 3. Maturity date; and 4. Bonds/sukuk rating.
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.		Note: it requires a disclosure if the company does not own obligation/sukuk/conversion obligation.
III.	LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI		THE BOARD OF COMMISSIONERS' AND BOARD OF DIRECTORS' REPORT
1.	Laporan Dewan Komisaris.	32-41	The Board of Commissioners' report.
	Memuat hal-hal sebagai berikut:		Contains the following items:
	1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya;	34-35	1. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company and the basis of assessment;
	2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya;	38	2. View over the prospects of the company's business which set by the Board of Directors and its basis of consideration;
	3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan Whistleblowing System (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan	40	3. Consideration on implementation/management of whistleblowing system (WBS) in the company and the Board of Commissioners roles in the implementation/management; and
	4. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada).	40-41	4. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any).

No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
2.	Laporan Direksi. Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: a. kebijakan strategis b. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan c. kendala-kendala yang dihadapi perusahaan; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; 4. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada).	42-51 44-47 45 45-46 49 47 51	<i>The Board of Directors' Report.</i> <i>Contains the following items:</i> 1. <i>Analysis of company's performance, which includes, among others</i> a. <i>strategic policies</i> b. <i>comparison between achievement of results and targets, and</i> c. <i>challenges faced by the company;</i> 2. <i>Analysis of business prospects;</i> 3. <i>Development of the implementation of corporate governance;</i> 4. <i>Changes in the composition of the Board of Directors (if any).</i>
3.	Tanda tangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau: penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	474-475 ✓ ✓ ✓ N/A	<i>Signatures of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.</i> <i>Contains the following items:</i> 1. <i>Signatures are appended in separated sheet;</i> 2. <i>Statemen that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the authenticity of the annual report;</i> 3. <i>Signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners by stating name and position; and</i> 4. <i>Written statement in separate letter if there is member of the Board of Directors and the Board of Commissioners who do not sign the annual report, or: written statement in separate letter from other members if there is no written statement from the relevant member.</i>
IV.	PROFIL PERUSAHAAN		COMPANY PROFILE
1.	Nama dan alamat lengkap perusahaan yang memuat informasi antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, e-mail, dan website.	54-55	<i>Name and address of the company contains information such as name and address, zip code, telephone and/or facsimile, email, and website.</i>
2.	Riwayat singkat perusahaan. Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada) dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.	64-66	<i>Brief history of the company.</i> <i>Includes among others: date/year of establishment, name, changes in the company name (if any) and effective date of the company's name change.</i>



No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
3.	Bidang usaha.	67	Business lines.
	Uraian mengenai antara lain:		The description includes:
	1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir;	√	1. Business activities of the company according to recent articles of association;
	2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan	√	2. Conducted business activities; and
	3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	√	3. Products and/or services produced.
4.	Struktur Organisasi.	72-73	Organizational structure.
	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi.		In form of chart, which includes names and titles at least up to the one level below the Board of Directors.
5.	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan.	74-76	Company's Vision, Mission, and Corporate Culture.
	Mencakup:		Includes:
	1. Visi perusahaan;	74	1. Company's vision;
	2. Misi perusahaan; dan	74	2. Company's mission; and
	3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direview dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris; dan	75	3. Statement that the company's vision and mission have been approved by the Board of Directors/ Board of Commissioners; and
	4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan	76	4. Statement on Company's corporate culture.
6.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris.	81-85	Brief identity and curriculum vitae of the members of the Board of Commissioners.
	Informasi memuat antara lain:	√	The information should contain:
	1. Nama;	√	1. Name;
	2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);	√	2. Position and position period (including the position in other company or institution);
	3. Umur;	√	3. Age;
	4. Domisili;	√	4. Domicile;
	5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);	√	5. Education (Major and Institution);
	6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat)	√	6. Work experience;
	7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.		7. Date of first appointment as the member of the Board of Commissioners.

No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
7.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi. Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja; 7. Riwayat penunjukan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	86-90 √ √ √ √ √ √ √	<i>Brief identity and curriculum vitae of the members of the Board of Directors.</i> <i>The information should contain:</i> 1. Name; 2. Position (including the position in other company or institution); 3. Age 4. Domicile; 5. Education (Major and Institution); 6. Work experience; 7. Date of first appointment as the member of the Board of Directors.
8.	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan). Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	124-133 125 125 133 135-141 141	<i>Number of employees (2 years comparatively) and description of competence building (such as: aspect of education and training of employees).</i> <i>The information should contain:</i> 1. Total employees for each organization level; 2. Total employees for each level of education; 3. Total employees based on employment status; 4. Description and data of employee's competency development which has been done by reflecting the equality of opportunity to all employees; and 5. The cost of employee's competency development which has been incurred in the financial year.



No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
9.	Komposisi pemegang saham. Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. c. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	100-102	Shareholders composition. Among others includes: 1. Details of shareholders name which include 20 majority shareholders and their ownership percentage; 2. Details of shareholders and their ownership percentage which include: a. Name of shareholders who have 5% or more shares; b. Group of public shareholders who each own less than 5% of shares. c. Group of public shareholders who each own less than 5% of shares. Note: it requires disclosure if the Director and Commissioner does not own direct and indirect shares.
10.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi dalam bentuk tabel. Informasi memuat antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan tentang status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	105-112	List of subsidiaries and/or associates. The information should contain: 1. Name of subsidiaries and/or associates; 2. Share ownership percentage; 3. Description of subsidiaries and/or associates business line; and 4. Description of subsidiaries and/or associates operation status (has operated or has not operated).
11.	Struktur grup perusahaan. Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan Special Purpose Vehicle (SPV).	103	Corporate group structure. Corporate group structure in form of chart which describes subsidiaries, associates, joint venture, and Special Purpose Vehicle (SPV).

No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
12.	Kronologi penerbitan saham (termasuk <i>private placement</i>) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi; dan 3. Nama bursa di mana saham perusahaan dicatatan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	182 √ √ √	<i>Share issuance chronology (including private placement) and/or share listing from the initial issuance to the end of financial year.</i> <i>Among others, include:</i> 1. Year of share issuance, total share, value of share nominal and price of share for each corporate action; 2. Recorded share volume after each corporate action; and 3. Name of stock exchange where the company's share is listed (if any). <i>Note: it requires disclosure if the company has no share listing chronology.</i>
13.	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalance efek lainnya dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya 3. Nama bursa di mana efek lainnya dicatatan; dan 4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.	102 N/A √ √ √	<i>Issuance and/or listing chronology of other securities from the initial issuance to the end of financial year.</i> <i>Among others, include:</i> 1. Name of other securities, issuance year, interest/return level and maturity date; 2. Value of other securities 3. Name of stock exchange where the other securities is listed; and 4. Securities rating. <i>Note: it requires disclosure if the company has no other securities issuance and listing chronology.</i>
14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal. Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	168 √ √ √	<i>Name and address of capital market institutions and/or supporting professions.</i> <i>The information should contain:</i> 1. Name and address of Securities Administration Bureau/parties that administered the company's share; 2. Name and address of Public Accounting Firm; and 3. Name and address of securities rating agency.



No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
15.	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional.	60-62	Award received by the company in the latest fiscal year and/or valid certification in the latest fiscal year both on a national and international scale.
	Informasi memuat antara lain:		The information should contain:
	1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat;	√	1. Name of award and/or certificate;
	2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi ;	√	2. Year of acquisition;
	3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan	√	3. Name of agency that give the award and/or certification; and
	4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	√	4. Validity period (for certification).
16.	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada).	105-112	Name and address of subsidiary and/or branch offices or representative offices (if any).
	Memuat informasi antara lain:		The information should contain:
	1. Nama dan alamat entitas anak; dan	√	1. Name and address of subsidiaries; and
	2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.	√	2. Name and address of branch/representative offices.
	Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan agar diungkapkan.		Note: It requires a disclosure if the company has no subsidiaries/branch/representative.
17.	Informasi pada Website Perusahaan Meliputi paling kurang:	169-170	Information on Company Website Include at least:
	1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;	√	1. Information on shareholders information up to individual owners, either direct or indirect;
	2. Isi kode etik	√	2. Content of Code of Conduct
	3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan;	√	3. Information of General Meeting of Shareholders (GMS) at least including the discussion agenda, minutes of meeting, and information of important dates namely the date of GMS notice, date of GMS invitation, date of GMS, date of the minutes of meeting publication
	4. Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir); dan	√	4. Financial statements for 5 (five) years; and
	5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi;	√	5. Board of Commissioners and Board of Directors
	6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	√	6. Charter of the Board of Commissioners, the Board of Directors Committees and Internal Audit Unit.

No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
18.	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal. Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan	171	<i>Education and/or training of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit. Comprising at least information (relevant type and party in the participation of):</i> 1. <i>Education and/or training for the Board of Commissioners;</i> 2. <i>Education and/or training for the Board of Directors;</i> 3. <i>Education and/or training for Audit Committee;</i> 4. <i>Education and/or training for Nomination and Remuneration Committee;</i> 5. <i>Education and/or training for other committees;</i> 6. <i>Education and/or training for Corporate Secretary; and</i> 7. <i>Education and/or training for Internal Audit Unit</i> <i>Note: It requires a disclosure if there is no education and/or training in the financial year.</i>
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN		MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	
1.	Tinjauan operasi per segmen usaha. Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; b. Penjualan/pendapatan usaha; dan c. Profitabilitas.	209-213	<i>Operational review per business segment.</i> <i>Contains the description of:</i> 1. <i>Description of each business business segment.</i> 2. <i>Performance of Production/business activity;</i> a. <i>Increase/decrease of production capacity;</i> b. <i>Operating sales/revenue; and</i> c. <i>Profitability.</i>
2.	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan 5. Arus kas.	181-201	<i>Description of company's financial performance.</i> <i>Analysis of financial performance which includes a comparison between current fiscal year and the previous year and the cause of increase/decrease (in form of tables and charts), among others, concerning:</i> 1. <i>Current assets, non-current assets, and total assets;</i> 2. <i>Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities;</i> 3. <i>Equity;</i> 4. <i>Operating sales/revenue, expense and profit (loss), other comprehensive income, and total of comprehensive profit (loss); and</i> 5. <i>Cash flow.</i>



No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
3.	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan. Penjelasan tentang: 1. Kemampuan membayar utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.	198	<i>Discussion and analysis of capacity to pay debts and the collectibility of account receivables, by presenting relevant ratio calculation in accordance with the type of company's industry.</i> <i>Description of:</i> 1. Ability to pay debts, both in short and long term; and 2. Collectibility of account receivables.
4.	Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>), dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>). Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang bunga/sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	199	<i>Discussion of capital structure and management policy on capital structure policy.</i> <i>Description of:</i> 1. Capital structure detail; comprising of interest/sukuk and equity; and 2. Management policy on capital structure policies; 3. The basis of the policies.
5.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir, Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi, dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: Apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	200-201 N/A	<i>Discussion on significant ties for the investment of capital goods.</i> <i>Description of:</i> 1. The name of ties executor; 2. The purpose of the ties; 3. Source of funds expected to fulfill the said ties; 4. Currency of denomination; and 5. Steps taken by the company to protect the position of related foreign currency against risks. <i>Note: It requires a disclosure if the company has no significant ties for the investment of capital goods in the latest fiscal year.</i>

No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
6.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.	200-201	Discussion of capital goods investment that was realized in the latest fiscal year.
	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; and 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: Apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal agar diungkapkan.	N/A	Description of: 1. Type of capital goods investment; 2. The purpose of capital goods investment; and 3. The value of capital goods investment in the latest fiscal year. Note: It requires a disclosure if there is no realization capital goods investment.
7.	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan.	202	Comparative information of target in the beginning of fiscal year and its realization, and target or projection to be achieved for the next year which include income, profit, capital structure, or others that considered important for the company.
	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	√ √	Information, among others, includes: 1. Comparison between target in the beginning of fiscal year and its realization; and 2. Target or projection to be achieved in the next 1 (one) year.
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.	203	Significant information and fact subsequent to the accountant's report date.
	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: Apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.		Description of subsequent event including its impact to the business performance and risk in the future. Note: It requires a disclosure if there is no subsequent event.
9.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan.	204-207	Description of company's business prospects.
	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.		Description of the company's prospects in regards with the industry and economy in general accompanied with supporting quantitative data from reliable data source.
10.	Uraian tentang aspek pemasaran.	203	Description of marketing aspects.
	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.		Description of marketing aspect for the company's products and/or services, such as marketing strategy and market segment.



No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
11.	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun. Catatan: Apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	208	<i>Description of and total of cash dividend per share and total of dividend per year that announced or paid for the last 2 (two) fiscal years.</i> <i>Contains the description of :</i> 1. Dividend distribution policy; 2. Total of distributed dividends; 3. Total of cash dividend per share; 4. Payout ratio; and 5. Announcement date and cash dividend payment for each year. <i>Note: It requires a disclosure if there is no dividend distribution.</i>
12.	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP). Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. Catatan: Apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	209	<i>Employee Share Ownership Program and/or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP) which conducted by the company.</i> <i>Contains the description of:</i> 1. Total of ESOP/MSOP shares and its realization; 2. Term; 3. The requirements for the employee and/or management; and 4. Exercise price. <i>Note: It requires a disclosure if there is no referred program.</i>
13.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana). Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: Apabila tidak memiliki informasi realisasi dana penawaran umum, agar diungkapkan.	209	<i>Realization of the use of proceeds from the public offering (in terms of the company still has the obligation to submit the report of proceeds realization).</i> <i>Contains the description of:</i> 1. Total proceeds acquired; 2. Plan of proceeds utilization; 3. Detail of proceeds utilization; 4. Balance of proceeds; and 5. GMS approval date for the change of proceeds utilization (if any). <i>Note: It requires a disclosure if there is no information of realization of the use of proceeds from the public offering.</i>

No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
14.	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.	209-211	Information of significant transaction which contains conflict of interest and/or transaction with affiliated parties.
	Memuat uraian mengenai:	√	Contains the description of:
	1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi;	√	1. Name of parties which conduct transaction and the nature of affiliation;
	2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	√	2. Explanation about the fairness of the transaction;
	3. Alasan dilakukannya transaksi;	√	3. Reasons of transaction;
	4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir;	√	4. Realization of transaction in the latest fiscal year period;
	5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan	√	5. Relevant company's policy on the transaction review mechanism; and
	6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.		6. Compliance toward relevant rules and regulations.
	Catatan: Apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.		Note: It requires a disclosure if there is no referred transaction.
15.	Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal.	212	Significant information on investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, restructuring of debt/capital.
	Memuat uraian mengenai:		Contains the description of :
	1. Tujuan dilakukannya transaksi;	√	1. The purpose of transaction;
	2. Nilai transaksi atau jumlah yang direstrukturisasi; dan	√	2. The value of transaction or the restructured amount; and
	3. Sumber dana.	√	3. Source of fund.
	Catatan: Apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.		Note: It requires a disclosure if there is no referred transaction.
16.	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir.	213	Description of changes in regulation toward the company in the recent financial year.
	Uraian memuat antara lain:		The description, among others, includes:
	1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan	√	1. changes in regulation; and
	2. dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.	√	2. its impact (quantitative and/or qualitative) toward the company (if significant) or the statement if it is not significant.
	Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan.		Note: It requires a disclosure if there is no changes in regulation which have a significant impact.



No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
17.	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir. Uraian memuat antara lain: 1. perubahan kebijakan akuntansi 2. alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan.	214-215 √ √ √	<i>Description of changes in the accounting policy which implemented by the company in the latest fiscal year.</i> <i>The description, among others, includes:</i> 1. changes in accounting policy 2. reason of change in accounting policy; and 3. its quantitative impact on financial statements. <i>Note: It requires a disclosure if there is no changes in accounting policy.</i>
18.	Informasi kelangsungan usaha Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	216 √ √ √	<i>Business Continuity Information</i> <i>Disclosure of information regarding:</i> 1. Any material issues that would affect Company's business continuity in the current year; 2. Management's assessment on the matters on number 1; and 3. Assumptions used by the Management to conduct assessment. <i>Note: if there was any material issues that would affect company's business continuity in the current year, assumption that allowed the management to ensure that there was no material issues that would affect the Company's business continuity in the current year.</i>
VI.	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK		GOOD CORPORATE GOVERNANCE
1.	Uraian Dewan Komisaris. Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	269-283 275-277 283 270-271	<i>Description of the Board of Commissioners.</i> <i>The description, among others, includes:</i> 1. Description of the responsibility of the Board of Commissioners; 2. Assessment on each committee under the Board of Commissioners and evaluation basis; and 3. Disclosure of Board Charter (guidelines and work order of the Board of Commissioners).

No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
2.	Uraian mengenai Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris). Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	273-274	<i>Description of Independent Commissioner.</i> <i>Among others, includes:</i> 1. <i>Criteria for appointing Independent Commissioner; and</i> 2. <i>Statement about the independency of each Independent Commissioner</i>
3.	Uraian Direksi. Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada) 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi); dan	284 288-293 N/A 287	<i>Description of the Board of Directors.</i> <i>The description, among others, includes:</i> 1. <i>Scope of work and responsibility of each member of the Board of Directors.</i> 2. <i>Assessment on committee under the Board of Directors (if any)</i> 3. <i>Disclosure of Board Charter (guidelines and work order of the Board of Directors); and</i>
4.	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. 5. Prosedur pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; 6. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan 7. Pihak yang melakukan assessment. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku, agar diungkapkan.	297-305	<i>Assessment of GCG implementation for financial year at least comprising the aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors.</i> <i>Comprising of the following description:</i> 1. <i>Criteria of assessment;</i> 2. <i>Party that conducts the assessment;</i> 3. <i>Evaluation score of each criteria;</i> 4. <i>Recommendation of assessment result; and the reason if the recommendation is not/not yet implemented</i> 5. <i>Procedure of assessment implementation on the Board of Commissioners and the Board of Directors performance;</i> 6. <i>Criteria for the Board of Commissioners and the Board of Directors performance; and</i> 7. <i>Party that conducts the assessment.</i> <i>Note: If there is no assessment of GCG implementation for fiscal year, it should be disclosed</i>



No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
5.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; dan 4. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi. 5. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	355-357 √ √ √ √ √	Description of the remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors. Among others, includes: 1. Disclosure of the Board of Commissioners' remuneration proposal to stipulation procedure; 2. Disclosure of the Board of Directors' remuneration proposal to stipulation procedure; 3. Remuneration structure that indicates the remuneration component and each component nominal for each member of the Board of Commissioners; and 4. Disclosure of remuneration stipulation indicators for the Board of Directors. 5. Disclosure of performance bonus, non performance bonus, and/or share option for each Board of Commissioners and Board of Directors (if any). Note: It requires a disclosure if there is no performance bonus, and/or share option for each Board of Commissioners and Board of Directors.
6.	Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	306-324 √ √ √	Frequency of meeting and attendance of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and joint meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners. Information includes: 1. Meeting Date; 2. Meeting Participants; and 3. Meeting Agenda. for meeting of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and joint meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
7.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu. Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perusahaan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	327-328	Information of major and controlling shareholders, both direct or indirect, up to the individual owners. In form of scheme or chart that separates the majority shareholders with controlling shareholders. Note: the majority shareholders is the party which, either directly or indirectly, has at least 20% (twenty percent) of the voting rights of all shares with voting rights are issued by a company, but not the controlling shareholder.
8.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Catatan: Apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	324-325	Disclosure of affiliation relationship between the member of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Major and/or controlling Shareholders. Among others, includes: 1. Affiliation relationship between the member of the Board of Directors and other member of the Board of Directors; 2. Affiliation relationship between the member of the Board of Directors and the member of the Board of Commissioners; 3. Affiliation relationship between the member of the Board of Directors and Major and/or controlling Shareholders; 4. Affiliation relationship between the member of the Board of Commissioners and other member of the Board of Commissioners; and 5. Affiliation relationship between the member of the Board of Commissioners and Major and/or controlling Shareholders. Note: It requires a disclosure if there is no referred affiliation relationship.



No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
9.	Komite Audit.	330-335	Audit Committee.
	Mencakup antara lain:		Among others, includes:
	1. Nama, jabatan dan periode jabatan anggota komite audit;	331	1. Name, position and tenure of of the member of the audit committee;
	2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit;	331	2. Educational background (Major and Institution) and working experience (position, institution and tenure);
	3. Independensi anggota komite audit;	332	3. Independency of the member of the audit committee;
	4. Uraian tugas dan tanggung jawab;	333	4. Description of task and responsibility;
	5. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan	334-335	5. Brief report on the activities carried out by the audit committee; and
	6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	335	6. Frequency of meetings and attendance of the audit committee.
10.	Komite/Fungsi Nominasi dan Remunerasi.	335-338	Nomination and Remuneration Committee/Function.
	Mencakup antara lain:		Among others, includes:
	1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi;	335	1. Name, position, and brief curriculum vitae of the member of nomination and/or remuneration committee;
	2. Independensi anggota komite nominasi dan/atau remunerasi;	336	2. Independency of the member of nomination and/or remuneration committee;
	3. Uraian tugas dan tanggung jawab;	336	3. Description of task and responsibility;
	4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi; dan	336	4. Description of activities carried out by the nomination and/or remuneration committee; and
	5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi;	337	5. Frequency of meetings and attendance of the nomination and/or remuneration committee.
	6. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	-	6. Policy on the Board of Directors succession

No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan. Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, riwayat hidup singkat dan periode jabatan anggota 2. Riwayat hidup singkat anggota komite lain; 3. Independensi anggota komite lain; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	N/A	Other committees under the Board of Commissioners which owned by the company. Among others, includes: 1. Name, position, and brief curriculum vitae of the member of other committees; 2. Independence of the member of other committees; 3. Independence of the member of other committees; 4. Description of task and responsibility; 5. Description of activities carried out by other committees; and 6. Frequency of meetings and attendance of other committees.
12.	Uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan. Mencakup antara lain: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili 3. Uraian tugas dan tanggung jawab 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan	347-357 348 348 349-350 350-355	Description of task and function of corporate secretary. Among others, includes: 1. Name and brief curriculum vitae of corporate secretary; 2. Domicile 3. Description of duties and responsibilities 4. Description of task implementation of corporate secretary
13.	Uraian mengenai unit audit internal. Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal; dan 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal.	358-384 √ √ √ √ √ √	Description of internal audit unit. Among others, includes: 1. Name of the chairman of internal audit unit; 2. Number of employees (internal auditor) in internal audit unit; 3. Certification as internal auditor; 4. Position of the internal audit unit in company's structure; 5. Brief report of activities carried out by the internal audit unit; and 6. Party that appoints/dismisses the chairman of internal audit unit.



No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
14.	Akuntan publik. Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir; dan 3. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	384-388 √ √ √	Public accountant. Information should contain, among others: 1. The amount of period the Public Accounting Firm has audited the annual financial statements; 2. The amount of fee for each service provided by the public accountant; and 3. Other services provided by the accountant other than the audit of annual financial statements. Note: It requires disclosure if there is no referred services.
15	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan. Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	391-401 391-395 401 397-398 397	Description of company's risk management. Among others, includes: 1. Description of risk management system implemented by the company; 2. Description of the evaluation implemented on the effectiveness of the risk management system; 3. Description of risks faced by the company; and 4. Attempt to manage those risks
16.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern. Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan 3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	389-391 389 389 391	Description of internal control system. Among others, includes: 1. Brief description of internal control system, among others, includes financial and operational control; 2. Description of the compliance of internal control system toward the internationally acknowledged framework (COSO – internal control framework); and 3. Description of the review on the effectiveness of internal control system in the financial year.

No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
17.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait tata kelola tanggung jawab sosial	444	<i>Description of corporate social responsibility regarding the governance of social responsibility.</i>
	1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial	444,447-448	1. Information on commitment to social responsibility;
	2. Informasi mengenai methoda dan lingkup <i>due diligent</i> terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas perusahaan;	451	2. Information about methods and scope of due diligence on social, economic and environmental impacts of company activities;
	3. Informasi tentang <i>stakeholder</i> penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan;	451-452	3. Information about significant stakeholders affected or influences the impact of company activities;
	4. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan;	454,456	4. Information about important socio-economic and environmental issues related to the impact of company activities;
	5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban;	447-448	5. Information about the scope of corporate social responsibility, which is both an obligation and beyond obligation;
	6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya <i>stakeholders engagement</i> dan meningkatkan <i>value</i> untuk <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> ;	455	6. Information about the company's strategies and work programs in handling social, economic and environmental issues in the effort of stakeholder engagement and increasing value for stakeholders and shareholders;
	7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan;	-	7. Information about various programs that exceeds the company's minimum responsibilities that are relevant to the business;
	8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial.	445-446	8. Information about financing and social responsibility budgets.
18.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait <i>core subject</i> Hak Asasi Manusia	464-467	<i>Description of corporate social responsibility regarding the core subject of human rights.</i>
	1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Asasi Manusia	464	1. Information about social responsibility commitment and policies for the core subject of human rights;
	2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Asasi Manusia;	464-466	2. Information about the formulation of the company's scope of social responsibility for the core subject of human rights;
	3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang Hak Asasi Manusia;	464-467	3. Information about the planning of corporate social responsibility in the field of human rights;
	4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia;	466-467	4. Information on the implementation of CSR initiatives in the aspect of human rights;
	5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia;	467	5. Information on the achievement and award of CSR initiatives in the aspect of human rights.



No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
19.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait core subject operasi yang adil 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Operasi yang adil 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject operasi yang adil 3. Informasi tentang perencanaan <i>corporate social responsibility</i> bidang operasi yang adil; 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil; 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil.	473	Description of corporate social responsibility regarding the core subject of fair operating procedures. 1. Information about social responsibility commitment and policies for the core subject of fair operating procedures; 2. Information about the formulation of the company's scope of social responsibility for the core subject of fair operating procedures; 3. Information about the planning of corporate social responsibility in the field of fair operating procedures; 4. Information on the implementation of CSR initiatives in the aspect of fair operating procedures; 5. Information on the achievement and award of CSR initiatives in the aspect of fair operating procedures.
20.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup. Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan; 2. Informasi tentang dampak dan risiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan; 3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; 4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan; 5. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup; 6. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain; 7. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	457-458	Description of corporate social responsibility related to the environment. Information should contain, among others: 1. Information about environmental commitments and policies; 2. Information about important environmental impacts and risks that are directly or indirectly related to the company; 3. Information about the target/plan of activities in 2018 determined by management; 4. Information about activities carried out and related to environmental programs related to the company's operational activities; 5. Information about the implementation of CSR initiatives related to the environment; 6. Information about the quantitative impacts of these activities; and, such as the use of materials and energy that are environmentally friendly and can be recycled, the company's waste management system, complaints mechanism for environmental problems, consideration of environmental aspects in providing financing to customers, and others; 7. Environmental certifications.

No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
21.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject ketenagakerjaan; 2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan; 3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun buku yang ditetapkan manajemen; dan 4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; 5. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat <i>turnover</i> karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	461-462	<i>Description of corporate social responsibility related to the employment, occupational health and safety.</i> <i>Information should contain, among others:</i> 1. Policies and commitments in terms of corporate social responsibility related to employment; 2. Information about scope and formulation of corporate social responsibility related to employment; 3. Information about activities target/plan set by the management in fiscal year; and 4. Activities and its quantitative impact that are carried out in regards with the activities; 5. Information about the practice of employment, occupational health and safety, such as the equality of gender and work opportunity, occupational; facility and safety, employee turnover rate, accident rate, remuneration, complaints mechanism for environmental problems, etc.
22.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen. Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan pada tahun buku yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut 3. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	468-472	<i>Description of corporate social responsibility related to the product responsibility toward consumer.</i> <i>Among others, includes:</i> 1. Target/plan activities in fiscal year set by the management; and 2. Activities that are carried out and the impacts of such activities; 3. In regards with the product responsibility, such as customer health and safety, product information, facility, total and customer complaint control, etc.



No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
23.	Uraian mengenai <i>corporate social responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> pengembangan sosial dan kemasyarakatan; 2. Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan; 3. Informasi tentang risiko sosial yang dikelola perusahaan; 4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan; 5. Target/rencana kegiatan pada tahun buku yang ditetapkan manajemen; 6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 7. Biaya yang dikeluarkan; 8. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	459-460	<i>Description of corporate social responsibility related to the community and social development.</i> <i>Information should contain, among others:</i> 1. <i>Policies and commitments in terms of corporate social responsibility related to community and social development;</i> 2. <i>Information about social issues relevant to the company;</i> 3. <i>Information about social risks managed by the company;</i> 4. <i>Information about the scope and formulation of social responsibility in the field of social and community development;</i> 5. <i>Target/plan of activities in fiscal year determined by management;</i> 6. <i>Activities and its quantitative impact that are carried out in regards with the activities; and</i> 7. <i>Costs incurred;</i> 8. <i>In regards with the community and social development, such as local worker recruitment, community; empowerment around the company, social facilities repairment, other donations, etc.</i>

No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
24.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan. Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; dan 4. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 5. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada entitas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: Dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	401 √ √ √ √ √	<i>Legal disputes faced by the company, subsidiaries, member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners that served during the period of annual report.</i> <i>Among others, includes:</i> 1. <i>Subject of the case/lawsuit;</i> 2. <i>Settlement status of the case/lawsuit;</i> 3. <i>Potential impacts on the financial condition of the company; and</i> 4. <i>The risk faced by the Company and nominal value of case/lawsuit; and</i> 5. <i>Administrative sanctions imposed on the entity, member of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the relevant authority (the capital market, banking and others) in the last fiscal year (or statement of no administrative sanctions imposed on the company).</i> <i>Note: It requires a disclosure if the company, subsidiaries, member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners have no dispute.</i>
25.	Akses informasi dan data perusahaan. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui <i>website</i> (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, <i>mailing list</i>, <i>buletin</i>, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	438-441	<i>Access to information and corporate data.</i> <i>Description of the availability of access to information and corporate data to the public, for example through the website (in Indonesian and English), mass media, mailing lists, newsletters, analyst meetings, etc.</i>
26.	Bahasan mengenai kode etik. Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan. 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	403-425 404-420 421 423 423 423, 425	<i>Discussion of code of conduct.</i> <i>Contains description of:</i> 1. <i>Contents of the code of conduct;</i> 2. <i>Disclosure of the code of conduct applies to all organization level;</i> 3. <i>Dissemination of code of conduct;</i> 4. <i>Sanction for each violation stipulated in the code of conduct (normative); and</i> 5. <i>Total code of conduct violations including the sanctions in the recent financial year.</i> <i>Note: It requires disclosure if there is no code of conduct violations in the recent year.</i>



No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
27.	Pengungkapan mengenai Whistleblowing System. Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya; 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	426-434 427-428 428 427-428 429 429 N/A	Disclosure of Whistleblowing System. Contains a description of the mechanism of Whistleblowing System, among others: 1. Submission of violation reports; 2. Protection for the whistleblower; 3. Handling the complaint; 4. Party that manages the complaint; and 5. Amount of incoming complaints and processed in the last fiscal year as well as its follow-up; 6. Sanction/follow up on settled complaints in the financial year. Note: It requires disclosure if there is no complaint and settled, in the recent year.
28.	Kebijakan mengenai keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian kebijakan tertulis perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: Apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	328-329	Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors. Written description of Company's policy on diversity in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors in terms of education (field of study), work experience, age, and gender. Note: If there is no such policy, disclosure of the reason and consideration are required.
VII. INFORMASI KEUANGAN		FINANCIAL INFORMATION	
1.	Surat pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan keuangan. Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang tanggung jawab atas laporan keuangan.	√	Statement by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners concerning the responsibility toward financial statements. Compliance with relevant regulations on the responsibility toward financial statements.
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan.	√	Opinion of independent auditor on the financial statements.
3.	Deskripsi auditor independen di opini. Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal laporan audit; dan 3. Nomor izin KAP dan nomor izin akuntan publik.	√ √ √	Description of the independent auditor in the opinion. Description should contain: 1. Name and signature; 2. Date of audit report; and 3. License number of PAF and license number of public accountants.



No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi.		Disclosure on transactions with related parties.
	Hal-hal yang diungkapkan antara lain:		Among others, includes:
	1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;	√	1. Name of related party, as well as the nature and relationship with the related party;
	2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan	√	2. Value of transaction and its percentage toward the relevant total income and expenses; and
	3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.	√	3. Amount of balance and its percentage toward total assets or liabilities.
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan.		Disclosure related to the taxation.
	Hal-hal yang harus diungkapkan:		Issues that should be disclosed:
	1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;	√	1. Fiscal reconciliation of and calculation of current tax expenses;
	2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi;	√	2. Explanation on the relation between tax expenses (income) and accounting income;
	3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018;	√	3. Statement that Taxable Income from the result of reconciliation becomes the basis of filling the Annual Agency Income Tax Returns in 2018;
	4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan	√	4. Details of deferred tax assets and liabilities which acknowledged in the statement of financial position in every reporting period, and the amount of deferred tax expenses (income) acknowledged in the statement of income if the amount is not visible from the total deferred tax assets or liabilities which presented in the statement of financial position; and
	5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	√	5. Disclosure of whether or not there is a tax dispute.
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap.		Disclosure related to fixed assets.
	Hal-hal yang harus diungkapkan:		Issues that should be disclosed:
	1. Metode penyusutan yang digunakan;	√	1. Depreciation method used;
	2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya;	√	2. Description of the selected accounting policies between the revaluation model and cost model;
	3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan	√	3. The methods and significant assumptions used in estimating the fair value of fixed assets (revaluation model) or disclosure of the fair value of fixed assets (cost model); and
	4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	√	4. Reconciliation of the gross book value and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and end of the reporting period, showing any addition, reduction and reclassification.

No.	Materi & Penjelasan	Halaman page	Subject & Explanation
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi.		<i>Disclosure related to the operation segment.</i>
	Hal-hal yang harus diungkapkan:		<i>Issues that should be disclosed:</i>
	1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan;	√	1. General information that includes the factors that are used to identify the reported segment;
	2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan;	√	2. Information of income, assets, and liabilities of reported segment;
	3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan	√	3. Reconciliation from the total revenue, income, assets segment, liabilities, other significant elements of reported segment toward the relevant total in the entity; and
	4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	√	4. Disclosure on entity level, which includes information of products and/or services, geographic areas and major customers.
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan instrumen keuangan.		<i>Disclosures related to financial instruments.</i>
	Hal-hal yang harus diungkapkan:		<i>Issues that should be disclosed:</i>
	1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya;	√	1. Details of financial instruments based on its classification;
	2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan;	√	2. The fair value and its hierarchy for each class of financial instruments;
	3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;	√	3. Explanation of the risks associated with financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk;
	4. Kebijakan manajemen risiko;	√	4. Policies of risk management;
	5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	√	5. Quantitative risk analysis relevant to the financial instruments.
13.	Penerbitan laporan keuangan.		<i>Publication of financial statements.</i>
	Hal-hal yang diungkapkan antara lain:		<i>Issues that should be disclosed, among others:</i>
	1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan	√	1. The date that financial statements is authorized to be published; and
	2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	√	2. The party responsible to authorize the published financial statements.

LAPORAN KEUANGAN

Financial Report

PT KERETA COMMUTER INDONESIA

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019/**

***Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019***

Daftar Isi	Halaman/ <u>Pages</u>	<i>Table of Contents</i>
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019		<i>Financial Statements For the Years Ended December 31, 2020 and 2019</i>
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	6	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PT KERETA COMMUTER INDONESIA**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
PT KERETA COMMUTER INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We the undersigned:

1. Nama :	Widayanti (Wiwik)	:	Name
Alamat Kantor :	Stasiun Juanda Jl. Ir H Juanda 1 Jakarta Pusat	:	Office address
Alamat Rumah :	Jl. Pantaran C3, No. 6 Bojongloa Kidul Bandung	:	Residential address
Telepon :	(021) 3453535	:	Telephone
Jabatan :	Direktur Utama/President Director	:	Title
2. Nama :	Muhammad Widodo	:	Name
Alamat Kantor :	Stasiun Juanda Jl. Ir H Juanda 1 Jakarta Pusat	:	Office address
Alamat Rumah :	Jl. Kalpataru E-10 Gempolsari Bandung	:	Residential address
Telepon :	(021) 3453535	:	Telephone
Jabatan :	Direktur Keuangan/Finance Director	:	Title

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;	1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;	3. a. All information in the financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	b. The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.	4. We are responsible for the Company's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta, 9 Februari 2021/February 9, 2021



Widayanti (Wiwik)
Direktur Utama/
President Director

Muhammad Widodo
Direktur Keuangan/
Finance Director

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia

Plaza ASIA, Level 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340

F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/Number : 00047/2.1030/AU.1/06/0501-3/1/II/2021

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Stockholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Kereta Commuter Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Kereta Commuter Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying financial statements of PT Kereta Commuter Indonesia, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Kereta Commuter Indonesia tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan atas hal-hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 3, atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan bahwa efektif sejak 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71: Instrumen Keuangan dan PSAK 73: Sewa. Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan dilakukan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada tanggal penerapan awal sesuai dengan standar pengakuan pada tanggal awal 1 Januari 2020 sebagai penyesuaian saldo awal dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif. Penerapan PSAK 73: Sewa dilakukan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan standar diakui pada tanggal penerapan awal dengan mengukur aset hak guna pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, yang disesuaikan dengan jumlah pembayaran sewa dibayar dimuka atau terutang terkait sewa tersebut yang segera diakui dalam laporan posisi keuangan sebelum tanggal penerapan awal.

Kami juga membawa perhatian ke Catatan 41 atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan tentang dampak pandemi virus corona (dikenal juga sebagai COVID-19). Catatan 41 tersebut telah mengungkapkan dampak terhadap PT Kereta

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Kereta Commuter Indonesia as of December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matters

We draw attention to Note 3, to the accompanying financial statements which explains that effective January 1, 2020, the Company implemented Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) 71: Financial Instruments and PSAK 73: Lease. The adoption of PSAK 71: Financial Instruments was implemented retrospectively with the cumulative effect of initially applying the standard recognized at the date of initial application beginning January 1, 2020 as an adjustment to the opening balance and did not restate the comparative information. The adoption of PSAK 73: Lease was implemented retrospectively with the cumulative effect of initially applying the standard recognized at the date of initial application by measuring the right of use asset at an amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognized in the statement of financial position immediately before the date of initial application.

We also draw attention to Note 41 to the accompanying financial statements which explains the impact of the corona virus pandemic (also known as COVID-19). Note 41 has disclosed the impact on PT Kereta Commuter Indonesia.

Commuter Indonesia. Catatan tersebut juga mengungkapkan rencana yang disusun dan langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi kondisi ini.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Hal-hal lain

Kami melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan kesimpulan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal berdasarkan audit kami. Pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal tersebut kami laksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal disampaikan secara terpisah kepada manajemen, masing-masing dalam laporan kami No. R/011.AAT/rhp/2021 dan No. R/012.AAT/rhp/2021 tanggal 9 Februari 2021.

The Note also disclosed plans prepared and steps to be taken to overcome this condition.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Other matters

We have tested on the Company's compliance with certain laws and regulations and internal controls. The compliance with certain laws and regulations and internal controls are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express a conclusion on the Company's compliance with certain laws and regulations and internal controls based on our audit. Testing of the compliance with certain laws and regulations and internal controls that we performed were in accordance with State Financial Auditing Standards established by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia and Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

The reports of compliance to certain regulations and internal controls, are submitted to the management, separately in our reports No. R/011.AAT/rhp/2021 and No. R/012.AAT/rhp/2021 dated February 9, 2021, respectively.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Rudi Hartono Purba

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0501/
Public Accountant License Number: AP.0501

Jakarta, 9 Februari/February 9, 2021

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

	Catatan/ Notes	2020 Rp	2019 Rp	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current assets
Kas dan Setara Kas	5, 36	611,613,812,355	461,073,443,002	Cash and Cash Equivalents
Dana Dibatasi Penggunaannya	6, 36	124,272,213,100	112,584,186,192	Restricted Fund
Piutang Usaha - Neto				Accounts Receivable - Net
Pihak Berelasi	7, 36	61,684,684,020	65,048,211,614	Related Parties
Pihak Ketiga	7	8,395,023,690	42,064,625,955	Third Parties
Aset Keuangan Lancar Lainnya	8, 36	917,880,778	1,721,076,019	Other Current Financial Asset
Persediaan	9	115,798,641,945	149,499,267,338	Inventory
Uang Muka	10	200,842,377	226,158,550	Advances
Biaya Dibayar Dimuka	11	13,709,709,332	202,880,792	Prepaid Expenses
Pajak Dibayar Dimuka	21.a	--	99,432,101,349	Prepaid Taxes
Pendapatan Masih Akan Diterima	12	13,190,487	240,595,891	Accrued Income
Jumlah Aset Lancar		936,605,998,084	932,092,546,702	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non-Current Assets
Aset Pajak Tangguhan	21.e	70,336,508,376	92,921,770,432	Deferred Tax Assets
Aset Tetap - Neto	13	770,923,250,300	781,837,858,226	Fixed Assets - Net
Aset Takberwujud - Neto	14	2,595,701,450	3,893,552,125	Intangible Assets - Net
Aset Hak Guna	15	1,664,228,090	--	Right of Use Asset
Investasi Jangka Panjang	16	53,080,000,000	7,596,688,300	Long Term Investment
Aset Lain-lain	17	400	400	Other Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		898,599,688,616	886,249,869,483	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		1,835,205,686,700	1,818,342,416,185	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements as a whole

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
As of December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

	Catatan/ Notes	2020 Rp	2019 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek				Short Term Liabilities
Utang Usaha				Accounts Payable
Pihak Berelasi	18, 36	8,901,537,149	22,657,511,552	Related Parties
Pihak Ketiga	18	87,493,202,498	202,707,422,110	Third Parties
Liabilitas Keuangan				Other Short Term
Jangka Pendek Lainnya	19	7,091,470,534	7,499,173,162	Financial Liabilities
Beban Akrua	20	130,228,720,699	103,674,069,492	Accrued Expenses
Utang Pajak	21.b	12,609,694,120	17,685,338,090	Tax Payable
Pendapatan Diterima Dimuka	22	69,729,779,381	92,946,971,737	Unearned Revenue
Utang Bank Jangka Pendek	24, 36	100,000,000,000	--	Short Term Bank Loans
Liabilitas Jangka Panjang yang				Current Maturities
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun				of Long-Term Debt
Utang Bank	23, 36	44,581,852,392	70,439,061,584	Bank Loan
Liabilitas Sewa	26	728,774,407	--	Lease Liability
Liabilitas Imbalan Kerja				Short Term Employee
Jangka Pendek	25	21,737,074,343	122,687,162,891	Benefit Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		483,102,105,523	640,296,710,618	Total Short Term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Long Term Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Long Term Debt
Setelah dikurangi yang Jatuh Tempo				net of Current Maturity
dalam Waktu Satu Tahun				Bank Loan
Utang Bank	23, 36	304,264,335,715	180,675,778,419	Lease Liability
Liabilitas Sewa	26	796,125,012	--	Long Term Employee
Liabilitas Imbalan Kerja				Benefits Liabilities
Jangka Panjang	27.a	17,590,288,893	3,718,020,739	Total Long Term Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		322,650,749,620	184,393,799,158	TOTAL LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS		805,752,855,143	824,690,509,776	
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham - Nilai Nominal				Capital Stock - Par Value of
Rp1.000.000 per saham				Rp1,000,000 per share
Modal Dasar				Share Capital
Rp542.000.000.000				Rp542,000,000,000 Shares
Modal Ditempatkan dan				Issued and Fully Paid
Disetor Penuh 230.500 saham	28	230,500,000,000	230,500,000,000	230,500 shares
Saldo Laba				Retained Earnings
Ditentukan Penggunaannya		718,904,710,401	723,447,350,787	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya		77,685,981,998	37,879,375,038	Unappropriated
Penghasilan Komprehensif Lainnya		2,362,139,158	1,825,180,584	Other Comprehensive Income
JUMLAH EKUITAS		1,029,452,831,557	993,651,906,409	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1,835,205,686,700	1,818,342,416,185	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements as a whole

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

	Catatan/ Notes	2020 Rp	2019 Rp	
PENDAPATAN	30	1,883,277,008,779	2,741,595,108,079	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	31	(1,403,658,779,465)	(1,881,532,759,110)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO		479,618,229,314	860,062,348,969	GROSS PROFIT
Beban Usaha	32	(387,508,282,643)	(517,079,657,717)	Operating Expenses
Pendapatan (Beban) Lain-lain	34	36,153,832,549	(21,988,966,848)	Other Income (Expense)
		<u>(351,354,450,094)</u>	<u>(539,068,624,565)</u>	
LABA USAHA		128,263,779,220	320,993,724,404	OPERATING INCOME
Pendapatan Bunga	35	7,194,748,990	11,855,229,713	Interest Income
Pendapatan (Beban) Penggantian Subsidi PSO	33	3,347,477,241	32,778,906,670	(Expense)
Beban Keuangan	35	(24,011,396,587)	(22,565,652,777)	Interest Expenses
JUMLAH		(13,469,170,356)	22,068,483,606	TOTAL
LABA SEBELUM PAJAK		114,794,608,864	343,062,208,010	INCOME BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	21.d, 21.e	(37,108,626,866)	(91,132,681,496)	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN		77,685,981,998	251,929,526,514	PROFIT FOR THE YEARS
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				Item that Will Not be Reclassified to Profit or Loss
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	27	594,809,424	(147,767,107)	Remeasurement on Defined Benefit Plans
Pajak Penghasilan Terkait		<u>(57,850,850)</u>	<u>36,941,777</u>	Related Income Tax
		536,958,574	(110,825,330)	
Pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		--	--	Item that May be Reclassified to Profit or Loss
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak		536,958,574	(110,825,330)	Other Comprehensive Income Current Year After Tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		78,222,940,572	251,818,701,184	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements as a whole

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital Rp	Saldo Laba/ Retained Earnings		Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Other Comprehensive Income	Total Equity Rp	
		Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated Rp	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated Rp	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti/ Remeasurement on Defined Benefits Plans Rp		
Saldo tanggal 31 Desember 2018	230,500,000,000	723,447,350,787	(214,050,151,476)	1,936,005,914	741,833,205,225	Balance of December 31, 2018
Laba Tahun Berjalan	--	--	251,929,526,514	--	251,929,526,514	Profit for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	--	--	--	(110,825,330)	(110,825,330)	Other Comprehensive Income for the Year
Saldo tanggal 31 Desember 2019	230,500,000,000	723,447,350,787	37,879,375,038	1,825,180,584	993,651,906,409	Balance of December 31, 2019
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	3	--	(4,542,640,386)	--	(4,542,640,386)	Impact on Initial Implementation PSAK 71
Dividen	29	--	(37,879,375,038)	--	(37,879,375,038)	Dividend
Laba Tahun Berjalan	--	--	77,685,981,998	--	77,685,981,998	Profit for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	--	--	--	536,958,574	536,958,574	Other Comprehensive Income for the Year
Saldo tanggal 31 Desember 2020	230,500,000,000	718,904,710,401	77,685,981,998	2,362,139,158	1,029,452,831,557	Balance of December 31, 2020

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements as a whole

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

	2020 Rp	2019 Rp	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan kas dari pelanggan	701,594,949,891	1,405,493,529,750	Cash receipt from customers
Penerimaan dari pemerintah	1,195,072,529,581	1,225,864,662,699	Cash receipts from government
Penerimaan bunga	7,422,154,394	12,646,859,849	Cash receipts from interest income
Pembayaran kepada pemasok	(1,358,308,097,339)	(1,925,514,373,943)	Payment to suppliers
Pembayaran kepada karyawan	(436,002,265,089)	(296,781,860,791)	Payments to employees
Pembayaran pajak	(5,075,643,970)	(48,385,287,872)	Payment of tax
Penerimaan dari restitusi pajak	98,507,753,979	--	Cash receipts from Tax Refund
Pembayaran kepada pemerintah	(86,264,500,365)	(75,448,591,913)	Payment to government
Pembayaran bunga dan beban keuangan	(24,011,396,587)	(22,565,652,777)	Payment of interest and finance expenses
Kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasi	92,935,484,495	275,309,285,002	Net cash flows provided by operating activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			Cash Flows from Investing Activities
Penempatan dana dibatasi penggunaannya	(30,126,411,974)	(51,715,400,492)	Placement in restricted fund
Pencairan dana dibatasi penggunaannya	18,418,633,634	5,000,000,000	Withdrawal in restricted fund
Perolehan aset tetap	(89,703,293,944)	(201,111,135,286)	Acquisitions of fixed assets
Penambahan Investasi saham	--	(37,000,000,000)	Additional of Share investment
Kas netto digunakan untuk aktivitas investasi	(101,411,072,284)	(284,826,535,778)	Net cash used in investing activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			Cash Flows from Financing Activities
Pembayaran utang bank jangka panjang	(17,609,765,397)	(50,622,724,592)	Payments of long term bank loan
Penerimaan utang bank jangka pendek	100,000,000,000	--	Receipt of short-term bank loan
Pembayaran dividen	(37,879,375,038)	--	Payments of dividends
Pembayaran liabilitas sewa	(834,900,000)	--	Payments of lease liability
Penerimaan utang bank jangka panjang	115,341,113,499	101,093,743,230	Receipt of long term bank loan
Kas netto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	159,017,073,064	50,471,018,638	Net cash flows provided by investment activities
Kenaikan netto kas dan setara kas	150,541,485,275	40,953,767,862	Increase cash and cash equivalents
Efek perubahan kurs pada kas dan setara kas	(43,799)	1,829,012	The effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	461,073,443,002	420,117,846,128	Cash and cash equivalents at the beginning of year
Kas dan setara kas - akhir tahun	611,614,884,478	461,073,443,002	Cash and cash equivalents at the end of year

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements as a whole

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

1. Umum

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Kereta Commuter Indonesia (Perusahaan), awalnya bernama PT KAI Commuter Jabodetabek didirikan berdasarkan akta Notaris Ilmiawan Dekrit S., SH, pada tanggal 15 September 2008 No. 457 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU74707.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 16 Oktober 2008. Berdasarkan Akta No. 85 tanggal 19 September 2017 dari Notaris Hannywati Gunawan, SH, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU0019228.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 19 September 2017 bahwa nama Perusahaan dari PT KAI Commuter Jabodetabek diubah menjadi PT Kereta Commuter Indonesia. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 1 tanggal 7 Januari 2019 dari Notaris Tri Mulyahati, SH, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0002753.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha angkutan di bidang transportasi perkeretaapian meliputi penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian dan kegiatan usaha di bidang teknologi informasi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 2009.

Pada tahun 2009, Perusahaan telah mendapat Ijin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.51 Tahun 2009 pada tanggal 6 Februari 2009, dan Izin Operasi Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.53 Tahun 2009, pada tanggal 11 Februari 2009.

1. General

1.a. Establishment and General Information

PT Kereta Commuter Indonesia (the Company), formerly known as PT KAI Commuter Jabodetabek was established based on Notarial Deed No. 457 dated September 15, 2008 of Ilmiawan Dekrit S., SH, which is approved by the Minister of Justice of Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU- 74707.AH.01.01 Year 2008, dated October 16, 2008. Base on Notarial Deeds No. 85 on September 19, 2017 of Notary Hannywati Gunawan, SH, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through his Decision Letter No. AHU-0019228.AH.01.02. Year 2017 dated September 19, 2017 stated that the name of the Company is changed from PT KAI Commuter Jabodetabek into PT Kereta Commuter Indonesia. The Company's Article of Association has been amended several time, the latest by Notarial Deeds No. 1 dated January 7, 2019 of Notary Mulyahati, SH, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia through his Decision Letter No. AHU-0002753.AH.01.02 Year 2019 dated January 18, 2019.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the purpose and objective of the Company is to engage in the transportation sector in general, particularly in the field of railways by includes the operation of facilities and infrastructure of railways and business activities in the field of information technology to produce goods and/or services of high quality and strong competitiveness to obtain/pursue profits in order to increase the value of the company by applying the principles of limited liability company. The Company started its commercial operations in 2009.

In 2009, the Company has obtained business license for Implementation of Public Railway Facilities in accordance with the Decree of the Minister of Transportation No. KP.51 2009 on February 6, 2009, and Operation of Facility Operating Permit General Railway in accordance to the Decree of the Minister of Transportations No. KP.53 2009, on February 11, 2009.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Pada tahun 2018, Perusahaan telah mendapat Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.407 Tahun 2018 pada tanggal 2 Maret 2018 dan berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya.

In 2018, the Company has obtained an business license for Implementation of Public Railway Facilities in accordance with the Decree of the Minister of Transportation No. KP. 407 2018 on March 2, 2018 and valid as long as the Company is still running its business.

Pada tahun 2019, Perusahaan telah mendapat perpanjangan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.124 Tahun 2019, pada tanggal 25 Juni 2019 dan berlaku selama 5 tahun.

In 2019, the Company has obtained an extension of Operating Permit of Public Railway Facilities in accordance with the Decree of the Minister of Transportation No. KM.124 2019, dated on June 25, 2019 and valid for 5 years.

Perusahaan menyelenggarakan Sarana Perkeretaapian Jabodetabek kelas komersial terhitung mulai 1 Januari 2011.

The Company organizes commercial class of Jabodetabek Railways facilities since January 1, 2011.

Perusahaan berkantor pusat di Stasiun Juanda, Jalan Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 10120.

The Company's head office is located at Stasiun Juanda, Jalan Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 10120.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero).

The Company is incorporated in group PT Kereta Api Indonesia (Persero).

1.b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Kereta Commuter Indonesia di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan Nomor PT KAI (Persero) KP.303/XII/14/KA-2020 tanggal 28 Desember 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

1.b. Board of Commissioners, Directors and Employees

Based on Circular Decree of the Shareholders of PT Kereta Commuter Indonesia Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company with Number PT KAI (Persero) KP.303 / XII / 14 / KA-2020 dated December 28, 2020, the composition of the Commissioners and Board Directors on December 31, 2020 are as follows:

2020		
Dewan Komisaris		Board of Commissioners
Komisaris Utama	Maqin Uddin Norhadi	President Commissioner
Komisaris	Edy Widyaya	Commissioner
Komisaris	John Robertho	Commissioner
Komisaris	Danto Restyawan	Commissioner
2020		
Dewan Direksi		Board of Directors
Direktur Utama	Widayanti (Wiwik)	President Director
Direktur	Wawan Ariyanto	Director
Direktur	Muhammad Widodo	Director
Direktur	Roppiq Lutzfi Azhar	Director

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham

The composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2019 is based on on Deed of Decision of

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

No. 19 tanggal 14 Oktober 2019, dari Notaris Tri Mulyahati, SH, Mkn, Notaris di Bekasi, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0352258 tanggal 29 Oktober 2019.

Shareholders' Decrees No. 19 dated October 14, 2019, of Notary Tri Mulyahati, SH, MKN, Notary in Bekasi, for which notification has been received by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0352258, dated October 29, 2019.

2019

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Pelaksana Tugas Komisaris

Edi Sukmoro
Edy Widyaya
Dariyadi

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Acting Commissioner

2019

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur
Pelaksana Tugas Direktur
Pelaksana Tugas Direktur

Widayanti (Wiwik)
Subakir
Januar Parlindungan
Saridal

Board of Directors

President Director
Director
Acting Director
Acting Director

Perusahaan memiliki karyawan 2.566 dan 2.852 orang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (tidak diaudit).

The Company has a total of 2,566 and 2,852 permanent employees in December 31, 2020 and 2019, respectively (unaudited).

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

2. Significant Accounting Policies

2.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

2.a. Statement of Compliance

The financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI).

2.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Pengukurannya disusun berdasarkan konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun didasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

2.b. Basis of Measurement and Preparation of Financial Statements

The financial statements, except for the statements of cash flows are prepared under the accrual basis of accounting. The measurement basis used is the historical costs, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies of each account.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The statements of cash flows is prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, which is also the Company's functional currency.

2.c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada jangka transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah ke dalam kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

2.c. Foreign Currency Transactions and Balance

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by currency applying to the currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, ie middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2020 and 2019 as follows:

	2020	2019	
Euro	17,330.13	15,588.60	Euro
Dolar Amerika Serikat	14,105.01	13,901.01	US Dollar
Yen Jepang	136.47	127.97	Japanese Yen

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items and on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

2.d. Transaction with Related Parties

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

- b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

- i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
- ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
- viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 36.

2.e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

- iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a); or
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity);
- viii. The entity or any members of a group of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOEs Ministry as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Notes 36.

2.e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and time deposits with original maturities within 3 (three) months or less and not pledged as collateral or restricted in use.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

Dalam komponen setara kas tidak termasuk deposito berjangka yang dijadikan jaminan pada bank walaupun jatuh temponya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan. Deposito yang bersangkutan disajikan dalam kelompok aset lancar sepanjang penjaminan tersebut meliputi periode tidak lebih dari satu tahun dari tanggal laporan posisi keuangan.

2.f. Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Persediaan terdiri dari suku cadang kereta, kartu tiket, bahan pelumas dan bahan bakar.

Dalam biaya perolehan suku cadang dan perlengkapan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mengirimkan suku cadang dan pada lokasi dan kondisi siap digunakan.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan.

2.g. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

2.h. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima di muka atas pemakaian ruang iklan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus dan pendapatan diterima dimuka atas Kartu Multi Trip (KMT) berkurang apabila penumpang menggunakan untuk perjalanan. Bagian tidak lancar atas pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi keuangan.

2.i. Penyertaan Saham

Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan non-publik yang bergerak di bidang penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk tujuan jangka panjang.

Investasi dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

The components of cash equivalents include time deposits are not pledged as collateral for bank although maturities of not more than 3 (three) months. Deposit is presented in the current assets of the guarantee covers a period not exceeding one year from the balance sheet date.

2.f. Inventories

Inventory is recorded using the weighted average method. Inventories consist of train spareparts, ticket, lubricants and fuels.

The cost of spare parts and equipment include cost to purchase and deliver spare parts to the location and cost to make the inventories ready for use.

Allowance for inventory obsolescence is defined based on analysis of inventory condition on the date of reporting of financial position.

2.g. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods by using the straight-line method.

2.h. Unearned Revenues

Unearned revenues from usage of advertising space is amortized over the usage term using the straight-line method and unearned revenue from Multi Trip Card (KMT) is deducted when passenger use for the fare. The non-current portion of unearned revenues is shown as part of "long term liabilities" in the statement of financial position.

2.i. Investment in Shares

Investments in shares represent investments in the form of shares of stock, in non-public companies engaged in payment system service providers held for long-term purposes.

Investments with an ownership interest below 20% and have no significant influence at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

2.j. Aset Tetap

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap, kecuali tanah tidak disusutkan, dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Masa Manfaat (Tahun)/ Useful Lives (Year)	Tarif Penyusutan per tahun/ Depreciation Rate per Year (%)	
Sarana gerak	15	6.7	Train
Prasarana	5 - 40	2.5 - 20	Infrastructure
Bangunan	20	5	Building
Fasilitas	4 - 40	2.5 - 25	Facilities

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai aset tetap dalam penyelesaian dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

2.j. Fixed Assets

All fixed assets are initially recognized at cost which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for the assets to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation of fixed assets, unless land is not depreciated, and start when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful live of the assets as follows:

Self-constructed of fixed assets are presented as part of the fixed assets under asset in progress and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutan dan amortisasi dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan disesuaikan secara prospektif jika terjadi perubahan.

2.k. Aset Takberwujud

Lisensi dan perangkat lunak yang diperoleh dikapitalisasi berdasarkan biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh dan mempersiapkannya hingga siap digunakan. Biaya-biaya ini diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi manfaat 4 tahun.

Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

2.l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Perusahaan menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

The cost of repairs and maintenance are charged to the statement of profit or loss as incurred and betterments are capitalized. Fixed assets are retired or sold, the cost and accumulated depreciation and amortization are removed from the fixed asset accounts and gain or loss is reflected in the income statement for the year.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of assets are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of reporting period.

2.k. Intangible Assets

Licenses and software are capitalized on the basis of the cost incurred to acquire and to prepare the assets for intended use. These costs are amortized using the straight-line method over the estimated useful life of 4 years.

The cost of maintaining an extension or renewal of legal title to land is recognized as an intangible asset and amortized over the life of the legal entitlement.

2.l. Impairment of Non-Financial Assets

At the end of each reporting period, the Company assess whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if its is not possible, the Company determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

2.m. Sewa

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Pada awal masa sewa, Perusahaan mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit. Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

An impairment loss recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

2.m. Lease

Accounting treatment before January 1, 2020

Determining whether an arrangement contains a lease

The determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.

A lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

At the commencement of the lease term, the Company recognize finance leases as assets and liabilities in the statement of financial position at amounts equal to the fair value of leased asset or the present value of the minimum lease payments, if the present value is lower than fair value. Assessment is

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.

Dalam sewa operasi, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Pada tanggal insepasi suatu kontrak, Perusahaan menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Perusahaan menilai apakah:

- a. Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substantial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- b. Perusahaan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- c. Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
 - Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

determined at the inception of the lease. The discount rate to be used in calculating the present value of the minimum lease payments is the interest rate implicit in the lease, if this is practicable to determine, if not, the lessee's incremental borrowing is used. Any initial direct costs of the lessee are added to the amount recognized as an asset. The depreciation policy for depreciable leased assets is consistent with the fixed assets that are owned.

Under an operating lease, the Company recognize the lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Accounting treatment since January 1, 2020

At inception of a contract, the Company assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether:

- a. The contract involves the use of an identified asset – this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;
- b. The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits of the use of assets during the period of use; and
- c. The Company has the right to direct the use of the identified asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Company has the right to direct the use of the asset if either:
 - The Company has the right to operate the asset; or

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

- Perusahaan mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal insepasi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks utang sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalti penghentian jika Perusahaan cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, Perusahaan mengukur aset hak-guna dengan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar, yang mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset hak-guna disusutkan dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

- *The Company designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

At inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following: fixed payments, variable lease payments that depend on an index, amounts expected to be payable under a residual value guarantee and the exercise price under a purchase option, optional renewal period or penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.

The Company recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

After the commencement date, the Company measures the right-of-use assets under the cost model, which is cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, and adjusted for remeasurement of lease liabilities. Right-of-use asset depreciated using straight line method.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the lessee will exercise a purchase option, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset, which refers to the terms of the useful life of the fixed asset. Otherwise, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

awal antara akhir umur manfaat aset
hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini
atas pembayaran sewa yang belum dibayar
pada tanggal permulaan, didiskontokan
menggunakan suku bunga implisit dalam
sewa atau, jika suku bunga tersebut
tidak dapat ditentukan, digunakan suku
bunga pinjaman inkremental Perusahaan.
Umumnya, Perusahaan menggunakan suku
bunga pinjaman inkremental sebagai suku
bunga diskonto.

Setelah tanggal permulaan, Perusahaan
mengukur liabilitas sewa dengan:

- Meningkatkan jumlah tercatat untuk
merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
- Mengurangi jumlah tercatat untuk
merefleksikan sewa yang telah dibayar;
- Mengukur kembali jumlah tercatat untuk
merefleksikan penilaian kembali atau
modifikasi sewa atau untuk
merefleksikan pembayaran sewa tetap
secara substansi revision.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada
perubahan pembayaran sewa masa depan
yang timbul dari perubahan indeks atau suku
bunga, jika ada perubahan estimasi
Perusahaan atas jumlah yang diperkirakan
akan dibayar dalam jaminan nilai residual,
atau jika Perusahaan mengubah
penilaiannya apakah akan mengeksekusi
opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan
cara ini, penyesuaian terkait dilakukan
terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau
dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat
aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang
termasuk ke dalam pengecualian, yakni
pembayaran atas sewa jangka pendek dan
sewa aset bernilai rendah diakui pada
metode garis lurus dan dibebankan pada
laba rugi. Pembayaran sewa terkait dengan
sewa yang dikecualikan tersebut diakui
sebagai beban dengan menggunakan
metode garis lurus selama masa sewa.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

date to the earlier of the end of the useful life
of the right-of-use asset or the end of the
lease term.

*The lease liability is initially measured at the
present value of the lease payments that are
not yet paid at the commencement date,
discounted using the interest rate implicit in
the lease or, if that rate cannot be readily
determined, The Company incremental
borrowing rate. Generally, The Company
uses its incremental borrowing rate as the
discount rate.*

*After the commencement date, the Group
shall measure the lease liability by:*

- Increasing the carrying amount to reflect
interest on the lease liability;*
- Reducing the carrying amount to reflect
the lease payments made; and*
- Remeasuring the carrying amount to
reflect any reassessment or lease
modifications, or to reflect revised in-
substance fixed lease payments.*

*It is remeasured when there is a change in
future lease payments arising from a change
in an index or rate, if there is a change in The
Company estimate of the amount expected
to be payable under a residual value
guarantee, or if the Company changes its
assessment of whether it will exercise a
purchase, extension or termination option.*

*When the lease liability is remeasured in this
way, a corresponding adjustment is made to
the carrying amount of the right-of-use
assets, or is recorded in profit or loss if the
carrying amount of the right-of-use asset has
been reduced to zero.*

*Furthermore, payments associated with
contracts included in the exception, which
are payments associated with all short-term
leases and certain leases of all low-value
assets are recognized on a straight-line basis
as an expense in profit or loss. The lease
payments associated with those leases will
be recognized as an expense on a straight-
line basis over the lease term.*

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

2.n. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti netto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Perusahaan mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga netto atas liabilitas (aset) imbalan pasti netto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti netto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- a) Ketika Perusahaan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- b) Ketika Perusahaan mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

2.n. Employee Benefit Liabilities

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The Company recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the *Projected Unit Credit* method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

The Company accounts not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Company recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- a) When the Company can no longer withdraw the offer of those benefits; and
- b) When the Company recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

Perusahaan mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

Jaminan pesangon bagi pegawai dikelola melalui PT Asuransi Jiwasraya.

2.o. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran.

Berikut merupakan kriteria pengakuan pendapatan yang harus dipenuhi sehingga pengakuan dapat diakui:

- Pendapatan dari jasa pengangkutan penumpang diakui pada saat jasa telah dilakukan.
- Pendapatan sewa, bunga dan lainnya diakui dengan metode akrual sesuai dengan periode sewa.

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
 - Perusahaan bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
 - Kontrak memiliki substansi komersial;
 - Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

The Company measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

Granted severance pay in to the employees managed by PT Asuransi Jiwasraya.

2.o. Revenue and Expense Recognition
Accounting treatment before January 1, 2020

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivables.

The criteria of revenue recognition are as follows:

- *Revenue from passenger transportation services is recognized when the services has been performed.*
- *Interest and rental income are recognized on an accrual basis over the lease term.*

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

Accounting treatment since January 1, 2020

In determining revenue recognition, the Company perform analysis transaction through the following five steps of assessment:

1. *The contract has been agreed by the parties involved in the contract*
 - *The Company can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred;*
 - *The contract has commercial substance;*
 - *It is probable that the Group will receive benefits for the goods or services transferred.*
2. *Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.*

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang dapat diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Suatu kewajiban kinerja dipenuhi pada suatu titik waktu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi dari waktu ke waktu:

- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh kinerja Perusahaan sebagaimana yang dilakukan Perusahaan;
- Kinerja Perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Kinerja Perusahaan tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Perusahaan dan Perusahaan memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk kinerja yang diselesaikan hingga saat ini.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual), kecuali merupakan aset yang terkait dengan aktivitas kontrak masa depan.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that can be recognized as the performance obligation is satisfied.

A performance obligation is satisfied at a point in time unless it meets one of the following criteria, in which case it is satisfied over time:

- The Company simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Company's performance as the Company performs;
- The Company's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; and
- The Company's performance does not create an asset with an alternative use to the Company and the Company has an enforceable right to payment for performance completed to date.

Expense Recognition

Expenses are recognized as incurred (accrual basis), unless they create an asset related to future contract activity.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan dicatat sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

2.p. Pengakuan pendapatan kompensasi dan beban sewa penggunaan prasarana pemerintah

- 1) Pendapatan kompensasi *Public Service Obligation* (PSO) yang diperoleh dari Pemerintah disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan Kompensasi Pemerintah (PSO).
- 2) Pendapatan kompensasi PSO diakui secara akrual yang dibatasi oleh penyediaan anggaran yang tertuang di anggaran Pemerintah (berdasarkan DIPA).
- 3) Beban penggunaan prasarana milik Pemerintah (TAC) yang dibayarkan kepada Pemerintah menjadi penambah beban operasi langsung tetap dan diakui saat terjadinya.

2.q. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") or is incremental on obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. These costs are therefore eligible for capitalization under PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers and recognized as other current assets. Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

2.p. The recognition of subsidy income and rent expenses of government's infrastructure

- 1) Compensation income of Public Service Obligation (PSO) received from the Government presented in the statement of profit or loss as Government Compensation.
- 2) The PSO compensation income obtained from the Government is recognized in accrual method that limited by budget stipulated in the Government budget (based on DIPA).
- 3) The rental expenses of railroad infrastructure (TAC) which is paid to the Government is recorded as the additional of fixed direct operation expense and recognized at the time incurred.

2.q. Income Taxes

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) the initial recognition of goodwill; or*
- b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Perusahaan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Perusahaan melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Perusahaan:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.r. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Perusahaan mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Company shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Company offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) *the Company has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b) *the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. *the same taxable entity; or*
 - ii. *different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

The Company offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Company:

- a) *has legally enforceable right to set off the recognized amounts, and*
- b) *intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

2.r. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Company recognizes a financial asset or a financial liability in the statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Company measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

- (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

- (ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent measurement of financial assets

Accounting treatment before January 1, 2020

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Company classifies financial assets in one of the following four categories:

- (i) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

- (ii) Loans and Receivables
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:
- (a) those that are intended to be sold immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

- (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan *non derivatif* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan *non derivatif* yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

- (b) *those that upon initial recognition are designated as available for sale; or*
- (c) *those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.*

After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iii) *Held-to-Maturity (HTM) Investments*

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Company has the positive intention and ability to hold to maturity.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) *Available-for-Sale (AFS) Financial Assets*

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivables, (b) held-to-maturity investments, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognized. At that time, the cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan menggunakan dua dasar yaitu: model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and the fair value of which cannot be reliably measured are measured at cost.

Accounting treatment since January 1, 2020

The Company financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss. on the basis of both: the Company's business model for managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial asset.

(i) Financial Assets Measured at Amortized Costs

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:

- (1) The objective of the Company's business model to hold the financial assets is only to collect contractual cash flows; and
- (2) The contractual cash flows of the financial asset give rise to payments on specified dates that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

(ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

(iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Perusahaan dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

(ii) Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:

- (1) The objective of the Company's business model to hold the financial assets is only to collect contractual cash flows; and
- (2) The contractual cash flows of the financial asset give rise to payments on specified dates that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

(iii) Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Company may irrevocably designate an investment in an equity instrument which

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

- (i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

- (ii) Liabilitas Keuangan Lainnya
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Accounting treatment before January 1, 2020

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Company classifies financial liabilities into one of the following categories:

- (i) Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss. A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

- (ii) Other Financial Liabilities
Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are Companyed in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Perusahaan mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- (a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- (b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- (c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - (i) Jumlah penyisihan kerugian dan
 - (ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- (d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal Perusahaan dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- (a) Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau
- (b) Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Accounting treatment since January 1, 2020

The Company shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

- (a) Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.*
- (b) Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.*
- (c) Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:*
 - (i) the amount of the loss allowance*
 - (ii) the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 72.*
- (d) Contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.*

An entity may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- (a) It eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as 'an accounting mismatch') that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or*
- (b) A Company of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and*

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Perusahaan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Perusahaan mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.

Jika Perusahaan secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Perusahaan mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi,

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

information about the Company is provided internally on that basis to the Company's key management personnel.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Company derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Company transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement.

If the Company transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Company derecognizes the financial asset and recognizes separately as asset or liabilities any rights and obligations created or retained in the transfer. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Company continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Company continues to recognize the financial asset.

The Company removes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

Impairment of Financial Assets
Accounting treatment before January 1, 2020

At the end of each reporting period, the Company assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or Company of financial assets is impaired. A financial asset or Company of financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and only if, there is objective

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or Company of financial assets that can be reliably estimated.

The following are objective evidence that a financial asset or Company of financial assets is impaired:

- (a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- (b) A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- (c) It becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- (d) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a Company of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan dinilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya apabila terdapat bukti obyektif sebagai akibat adanya satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut dan dilakukan estimasi terhadap arus kas masa depan dari investasi tersebut yang akan berdampak.

Perusahaan mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Perusahaan menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Perusahaan secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Perusahaan terekspos terhadap risiko kredit.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized.

The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortization) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

Accounting treatment since January 1, 2020

Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.

The Company recognizes expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI.

At the end of each reporting date, the Company calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then a 12 month expected credit loss is recognized.

The Company applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Company considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Company in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Company is exposed to credit risk.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. Nilai waktu uang; dan
- iii. Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Perusahaan dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Perusahaan menggunakan metode *roll rate* untuk mengukur penurunan nilai piutang usaha.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

- i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;*
- ii. Time value of money; and*
- iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.*

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Company may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with 'investment grade' according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

The Company is using the roll rate method to measure the provision for impairment of account receivable.

**PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Perusahaan tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

**PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reclassification

Accounting treatment before January 1, 2020

The Company shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Company as at fair value through profit or loss. The Company may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Company shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan ketika Perusahaan mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Jika Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan, maka diperlukan untuk menerapkan reklasifikasi secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi. Keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai) atau bunga yang sebelumnya diakui tidak disajikan kembali

Ketika Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTPL, maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perbedaan antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajarnya diakui dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, jika Perusahaan mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTPL menjadi biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi menjadi nilai tercatat bruto baru.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

If, as a result of a change in Company's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Accounting treatment since January 1, 2020

The Company reclassifies a financial asset if and only if the Company's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

If the Company reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

When the Company reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Company reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

Ketika Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain. Tingkat suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit yang diharapkan tidak disesuaikan sebagai hasil dari reklasifikasi. Sebaliknya, ketika Perusahaan mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTOCI menjadi biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan tersebut direklasifikasi ke nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Namun, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihilangkan dari ekuitas dan disesuaikan dengan nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur dengan cara yang sama seperti biaya perolehan diamortisasi.

Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

When the Company reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Company reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost.

This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

When the Company reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Company reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Company currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1)
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2)
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3)

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1)*
- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2)*
- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3)*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Company uses valuation techniques appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Company at the end of the reporting period during which the change occurred.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

3. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru dan Revisi serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yaitu:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa;
- PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 71 (Amandemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;
- PSAK 1 (Amendemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 25 (Amendemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah;
- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan;
- ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah;
- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa;
- PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi

3. Adoption of New and Revised Statement of Financial Standards (PSAK) and Interpretation of PSAK (ISAK)

The following are revision, amendments and adjustments of standards and interpretation of standard issued by DSAK - IAI and effectively applied for the year starting on or after January 1, 2020, are as follows:

- *PSAK 71: Financial Instrument;*
- *PSAK 72: Revenue from Contract with Customer;*
- *PSAK 73: Lease;*
- *PSAK 62 (Amendment 2017): Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract;*
- *PSAK 15 (Amendment 2017): Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures;*
- *PSAK 71 (Amendment 2018): Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation;*
- *ISAK 35: Presentation of Non-profit oriented entity Financial Statements;*
- *PSAK 1 (Amendment and Improvement 2019): Presentation of Financial Statements regarding Title of Financial Statements;*
- *PSAK 25 (Amendment 2019): Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors;*
- *PSAK 102 (Revised 2019): Accounting for Murabahah;*
- *ISAK 101: Revenue Recognition on Deferred Murabahah without Significant Risk related to Inventories Ownership;*
- *ISAK 102: Impairment on Murabahah Receivable;*
- *ISAK 36: Interpretation of the Interaction between the Provisions Regarding Land Rights in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases*
- *PPSAK 13: Revocation of PSAK 45: Non-profit Entity Financial Reporting; and*
- *Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60 regarding Interest Rate Benchmark Reform.*

Except for the changes described below, the implementation of these standards did not result in a substantial change in the Company's accounting policies and had no

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Perusahaan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Berdasarkan hasil kajian Perusahaan terhadap dua kriteria dalam menentukan klasifikasi aset keuangan, terdapat perubahan klasifikasi dan pengukuran investasi jangka panjang yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diukur dengan metode biaya menurut PSAK 55 berubah menjadi klasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai PSAK 71.

Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan juga berdampak pada nilai tercatat aset keuangan Perusahaan pada awal penerapan PSAK 71.

Berikut adalah tabel nilai tercatat aset keuangan berdasarkan ketentuan PSAK 55 dan PSAK 71, serta penyesuaian saldo laba pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020:

	1 Jan 2020/ Jan 1, 2020		
	Berdasarkan PSAK 55/ Based on PSAK 55 Rp	Penyesuaian Saldo Laba/ Adjustment Retained Earning Rp	Berdasarkan PSAK 71/ Based on PSAK 71/ Rp
Kas dan			
Kas dan Setara Kas	461,073,443,002	(270,011)	461,073,172,991
Dana Dibatasi Penggunaannya	112,584,186,192	(15,612,140)	112,568,574,052
Piutang Usaha	107,112,837,569	(4,485,138,538)	102,627,699,031
Piutang Lain-lain	1,721,076,019	(41,619,697)	1,679,456,322
Jumlah	682,491,542,782	(4,542,640,386)	677,948,902,396
Dampak penerapan awal PSAK 71		(4,542,640,386)	

material impact on the financial statements of the current year or previous year.

PSAK 71: Financial Instruments

PSAK 71 replaces PSAK 55 (Revised 2014) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new arrangements for the classification and measurement of financial instruments based on the assessment of business models and contractual cash flows, recognizing and measuring allowance for impairment losses on financial instruments using an expected credit loss model, which replaces incurred credit loss model and provides a simpler approach for hedge accounting.

In accordance with the transitional requirements on PSAK 71, the Company chose to applies retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information.

Based on the results of the Company's review of the two criteria in determining the classification of financial assets, there is a change in classification and measurement of long-term investments classified as available for sale and measured using the cost method under PSAK 55 are changed to the classification of financial assets at fair value through other comprehensive income in accordance with PSAK 71.

Changes in the approach to calculating impairment of financial assets have an impact on the carrying value of the Company's financial assets at the beginning of the implementation of PSAK 71.

The following is a table of the carrying values of financial assets based on the provisions of PSAK 55 and PSAK 71, as well as adjustments to retained earnings on the initial application date of January 1, 2020:

Cash and Equivalents
Restricted Fund
Account Receivable
Other Receivable
Total

Impact on initial implementation of PSAK 71

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PSAK 72: “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”

PSAK 72 menggantikan PSAK 23: “Pendapatan” dan memperkenalkan model pengakuan pendapatan 5 (lima) langkah dan menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

Perusahaan menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Perusahaan terhadap kontrak pendapatan dengan pelanggan dengan mengacu 5 (lima) tahapan yang ada di dalam PSAK 72, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

PSAK 73: Sewa

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: “Sewa” yang mensyaratkan Perusahaan sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan transaksi sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah.

Perusahaan telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi tanpa penyajian kembali periode komparatif. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal penerapan awal, Perusahaan juga menggunakan beberapa kebijakan praktis sebagai berikut:

- Menggunakan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

PSAK 72: “Revenue from Contracts with Customers”

PSAK 72 replaces PSAK 23: “Revenue” and introduces 5 (five)-step model of revenue recognition and determines that the revenue is recognized when control of goods has been transferred or when (or during) the rendering of services (performance obligation is satisfied).

The Company applies PSAK 72 retrospectively with the cumulative impact on the initial application recognized on January 1, 2020 and did not restate the comparative information.

Based on the review that the Company has conducted on revenue contracts with customers with reference to the 5 (five) stages in PSAK 72, there is no significant impact on the financial statements so it does not require adjustments in the opening balance on January 1, 2020

PSAK 73: Leases

PSAK 73 replace PSAK 30: “Leases”, which requires the Company as the lessee to recognize right-of-use assets and lease liabilities related to leases transaction that were previously classified as operating leases under PSAK 30, except for short-term leases or leases with low-value assets.

The Company has implemented PSAK 73 using a modified retrospective approach without restating the comparative period. Lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, which are discounted using the Company's incremental loan interest rate as of January 1, 2020. Right-of-use assets are measured at the same amount as the lease liabilities adjusted for the amount of prepayments or lease payments accrued in connection with a lease recognized in the statement of financial position as of December 31, 2019

At the initial implementation date, the Company also adopted the following practical policies:

- Using a single discount rate on lease portfolios with fairly similar characteristics.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

- Mengandalkan penilaian sebelumnya tentang apakah sewa memberatkan sebagai alternatif untuk melakukan peninjauan penurunan nilai, bahwa tidak ada kontrak yang memberatkan pada 1 Januari 2020;
- Memilih tidak menerapkan persyaratan untuk sewa yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari tanggal penerapan awal. Mencatat sewa tersebut dengan cara yang sama dengan sewa jangka pendek dan memasukkan biaya yang terkait dengan sewa tersebut dalam pengungkapan beban sewa jangka pendek dalam periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal.

Dampak penerapan awal PSAK 73 terhadap saldo awal 1 Januari 2020 untuk aset hak-guna sebesar Rp424.205.291.

- Rely on previous assessments of whether leases are onerous as an alternative to undertaking an impairment review, that there are no aggravating contracts as of 1 January 2020;
- Opting out of the requirement for leases whose leases expire within 12 months from the date of initial application. Record these leases in the same manner as short-term leases and include the costs associated with those leases in the disclosure of short-term lease expenses in the annual reporting period covering the date of initial application.

The impact of the initial implementation of PSAK 73 on the beginning balance on January 1, 2020 for use rights assets amounting to Rp424,205,291.

4. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

4. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgment

Judgements

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

Cadangan kerugian penurunan nilai
Sebelum 1 Januari 2020

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan situasi tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang pada jumlah yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai atas piutang. Jika tidak ada bukti objektif yang timbul dari evaluasi secara individual, Perusahaan menyertakannya dalam kelompok aset keuangan dengan karakteristik kredit yang serupa dan mengevaluasi secara kolektif untuk mengetahui perlunya penurunan nilai berdasarkan pengalaman kerugian historis untuk kelompok aset tersebut. Nilai tercatat dari piutang usaha Perusahaan sebelum cadangan untuk penurunan nilai pada tanggal-tanggal laporan diungkapkan dalam Catatan 7.

Sejak 1 Januari 2020

Perusahaan menilai penurunan nilai pada aset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan *roll rate* dan *discounted cash flow* untuk menilai kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain. Nilai tercatat aset keuangan telah diungkapkan dalam Catatan 5, 6, 7 dan 8.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Allowance for impairment loss
Before January 1, 2020

The Company evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company uses judgment, based on the best available facts and circumstance, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount of the allowance for impairment of receivables. If no objective evidence exists from the individual assessment, the Company includes the individual balance in a group of financial assets with similar credit characteristics and collectively assesses the Company for any impairment base on historical loss experience for the group of assets. The carrying amounts of the Company's receivables before allowance for impairment at reporting dates are disclosed in Note 7.

Since January 1, 2020

The Company assess their financial assets measured at amortized cost for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions. The Company applies simplified approach using roll rate dan discounted cash flow to measuring cash and equivalents, restricted fund, account receivables and other receivable. The carrying amounts of financial assets are disclosed in Notes 5, 6, 7 and 8.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

Pensiun dan imbalan kerja

Penentuan kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun, dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan diperlakukan sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan pada Catatan 3. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto (Catatan 27).

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 40 tahun.

Masa manfaat adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan dan amortisasi masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 13.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati, dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Pension and employee benefits

The determination of the Company's cost for pension and employee benefits liabilities is depended on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Company's assumptions are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 3. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's assumption may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense (Note 27).

Depreciation of fixed assets

The costs of fixed asset, except from land, are depreciated on the straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 40 years.

The useful life represent the age generally expected in the industry in which the Company does business. Changes in the level of usage and technological development can affect the economic useful life and the residual value of assets, and therefore future depreciation and amortization costs may be revised. The carrying amount of fixed assets is disclosed in Note 13.

Impairment of non-financial assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or a cash generating unit exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from bidding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Proyeksi arus kas tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari unit penghasil kas yang diuji. Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan pencatatan kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Pajak penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya pendapatan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas pendapatan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atau kelebihan bayar atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui aset atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi bahwa nilai tambahan pajak penghasilan badan yang akan jatuh tempo lebih rendah dari kelebihan bayar pajak.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh beda temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The future cash flow projection does not include restructuring activities that the Company is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the cash gain unit being tested. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes. The management believes that no impairment loss is required as of December 31, 2020 and 2019.

Income tax

Uncertainties over the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, that could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Significant judgment is undertaken to determine the provision or overpayment of corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain in the ordinary course of business. The Company recognized the assets on corporate income tax based on an estimate that any additional corporate income tax which will be due still lower than the amount of tax overpayment.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant estimation by management are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profit together with future tax planning strategies.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

5. Kas dan Setara Kas

5. Cash and Cash Equivalents

	2020 Rp	2019 Rp
Kas/Cash on Hand	9,012,530,900	15,401,411,200
Bank/Cash in Banks		
Pihak Berelasi/Related Parties (Catatan/Note 36)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	404,930,293,087	66,662,853,982
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	137,783,728,550	146,189,404,190
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	39,279,281,923	166,867,364,537
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	817,000	1,280,000
	<u>581,994,120,560</u>	<u>379,720,902,709</u>
Pihak Ketiga/Third Parties		
PT Bank Central Asia Tbk	15,518,929,046	950,180,093
PT Bank DKI	45,061,146	949,000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.	44,242,826	--
	<u>15,608,233,018</u>	<u>951,129,093</u>
Sub jumlah/Sub Total	<u>597,602,353,578</u>	<u>380,672,031,802</u>
Deposito on Call/Time Deposits on Call		
Pihak Berelasi/ Related Parties (Catatan/Note 36)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	30,000,000,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	30,000,000,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	5,000,000,000
Sub jumlah/Sub Total	<u>--</u>	<u>65,000,000,000</u>
Pihak Ketiga/Third Party		
Bank Perkreditan Rakyat Syariah Baituridha Pusaka	5,000,000,000	--
Jumlah/Total	<u>611,614,884,478</u>	<u>461,073,443,002</u>
Dikurangi/Less:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses		
Dampak Penerapan awal PSAK 71/Impact on Initial Implementation of PSAK 71	(270,011)	--
Penambahan Kerugian Penurunan Nilai/ Additional Impairment Losses	(802,112)	--
Sub jumlah/Sub Total	<u>(1,072,123)</u>	<u>--</u>
Jumlah - Bersih/Total - Net	<u>611,613,812,355</u>	<u>461,073,443,002</u>

Berdasarkan mata uang:

By currency:

	2020 Rp	2019 Rp
Kas/Cash on Hand		
Rupiah/Rupiah	9,012,530,900	15,401,411,200
Bank/Cash in Banks		
Rupiah/Rupiah	596,968,138,800	380,364,393,504
Yen Jepang/Japanese Yen	551,322,093	209,013,364
Dolar Amerika Serikat/United States Dollar	82,892,685	98,624,934

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

	2020 Rp	2019 Rp
Deposito Berjangka/Time Deposits		
Rupiah/Rupiah	5,000,000,000	65,000,000,000
Jumlah/Total	611,614,884,478	461,073,443,002
Dikurangi/Less:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/Impairment of Losses	(1,072,123)	--
Jumlah - Bersih/Total - Net	611,613,812,355	461,073,443,002

Tingkat suku bunga dan jangka waktu deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Interest rates and maturity period of time deposit are as follows:

	2020 %	2019 %
Tingkat Bunga Deposito/Interest Rate of Deposits	5,07% - 6,50%	6,10% - 7,69%
Jangka Waktu/Maturity Period	1 Bulan/ Month (ARO)	1 Bulan/ Month (ARO)

6. Dana Dibatasi Penggunaannya

Dana dibatasi penggunaannya merupakan Deposito dan Giro yang dijaminkan untuk keperluan: pembukaan L/C impor, pembelian kereta rel listrik, suku cadang dan peralatan pemeliharaan sistem *brake* EMU 6000, EMU 8500/800, dana *floating* KMT (Catatan 22) dan jaminan pinjaman bank (Catatan 23) dengan rincian sebagai berikut:

6. Restricted Fund

Restricted funds are a time deposits and current account that are pledged for the purpose of: opening the L/C import, electric train purchase, spare parts and maintenance equipment brake systems EMU 6000, EMU 8500/800, and floating money of KMT (Note 22), and bank loan guarantees (Note 23) with the following details:

	2020 Rp	2019 Rp	
Deposito			Time Deposits
Pihak Berelasi (Catatan 36)			Related Parties (Note 36)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Pembelian EMU	--	10,000,000,000	Purchase of EMU
Sub jumlah	--	10,000,000,000	Sub Total
Rekening Giro			Current Account
Pihak Berelasi (Catatan 36)			Related Parties (Note 36)
PT Bank Negara Indonesia (Persero)			PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Floating KMT (Catatan 22)	69,729,779,381	57,941,540,798	Floating Money of KMT (Note 22)
Pembelian EMU	49,557,054,907	19,430,642,933	Purchase of EMU
Jaminan Pinjaman Bank (Catatan 23)	1,251,079,514	5,946,100,533	Bank Loan Guarantees (Note 23)
Pembelian Suku Cadang	--	1,441,065,780	Purchase of Sparepart
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jaminan Pinjaman Bank	1,251,921,702	5,960,077,533	Bank Loan Guarantees
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jaminan Pinjaman Bank	1,251,049,514	5,918,658,082	Bank Loan Guarantees
	123,040,885,018	96,638,085,659	
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Bank Central Asia Tbk			PT Bank Central Asia Tbk
Jaminan Pinjaman Bank	1,251,079,514	5,946,100,533	Bank Loan Guarantees
	1,251,079,514	5,946,100,533	
Sub jumlah	124,291,964,532	102,584,186,192	Sub Total
Jumlah	124,291,964,532	112,584,186,192	Total Restricted Fund

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

	2020 Rp	2019 Rp	
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan nilai			Less: Allowance for Impairment Losses
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	(15,612,140)	--	Impact on Initial Implementation of PSAK 71
Penambahan Kerugian Penurunan Nilai	(4,139,292)		Additional Impairment Losses
Sub jumlah	(19,751,432)	--	Sub Total
Jumlah Bersih	124,272,213,100	112,584,186,192	Total - Net

Seluruh saldo dana yang dibatasi penggunaannya didenominasi dalam mata uang Rupiah.

The entire balance of restricted fund denominated in Rupiah.

7. Piutang Usaha

7. Accounts Receivable

Berdasarkan Debitur:

By Debtor:

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi/Related Parties (Catatan/Note 36)	215,294,902,549	213,478,327,292
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Less: Allowance for Impairment	(153,610,218,529)	(148,430,115,678)
Sub Jumlah/Sub Total	61,684,684,020	65,048,211,614
Pihak Ketiga/Third Parties		
PT Pulau Pulau Media	13,567,985,190	--
PT Solusi Pasti Indonesia	2,612,000,000	2,612,000,000
PT Alternative Digital Media Grup	--	42,837,575,000
Lain-lain/Others (dibawah/under Rp500.000.000)	585,793,514	139,745,083
	16,765,778,704	45,589,320,083
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Less: Allowance for Impairment	(8,370,755,014)	(3,524,694,128)
Sub Jumlah/Sub Total	8,395,023,690	42,064,625,955
Jumlah/Total	70,079,707,710	107,112,837,569

Seluruh saldo piutang usaha Perusahaan dalam mata uang Rupiah.

The entire balance of the Company's trade receivables denominated in Rupiah.

Berdasarkan Umur:

By Age Category:

	2020 Rp	2019 Rp
Jatuh Tempo/Past Due :		
1 - 30 hari/days	49,565,932,734	61,611,917,854
31 - 60 hari/days	14,899,759,398	33,946,083,471
61 - 90 hari/days	1,512,705,000	1,537,793,893
91 - 120 hari/days	819,000	72,305,467
121 - 365 hari/days	12,176,134,694	10,719,430,785
> 365 hari/days	153,905,330,427	151,180,115,905
Jumlah/Total	232,060,681,253	259,067,647,375
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Less: Allowance for Impairment	(161,980,973,543)	(151,954,809,806)
Jumlah/Total	70,079,707,710	107,112,837,569

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha:

Movements of allowance for impairment on third parties of trade receivables:

	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo Awal	151,954,809,806	151,230,115,905	<i>Beginning Balance</i>
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	4,485,138,538	--	<i>Impact on Initial Implementation of PSAK 71</i>
Penambahan Kerugian Penurunan Nilai Piutang (Catatan 34)	5,541,025,199	774,693,901	<i>Addition of Impairment on Account Receivables (Note 34)</i>
Pemulihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang (Catatan 34)	--	(50,000,000)	<i>Recovery of Impairment on Account Receivables (Note 34)</i>
Saldo Akhir	161,980,973,543	151,954,809,806	<i>Ending Balance</i>

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup.

Management believes that the allowance for impairment on accounts receivables is adequate.

8. Aset Keuangan Lancar Lainnya

8. Other Current Financial Assets

	2020 Rp	2019 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 36)	749,935,251	1,589,071,042	<i>Related Party (Note 36)</i>
Pihak Ketiga			<i>Third Parties</i>
Piutang Karyawan	209,565,204	132,004,977	<i>Other receivable from Employee</i>
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Dampak Penerapan Awal PSAK 71	(41,619,677)	--	<i>Less: Allowance for Impairment Losses Impact on Initial Implementation of PSAK 71</i>
Jumlah	917,880,778	1,721,076,019	<i>Total</i>

9. Persediaan

9. Persediaan

	2020 Rp	2019 Rp	
Suku Cadang, <i>Common Goods</i>			
Lain-lain	113,490,845,488	145,374,145,426	<i>Sparepart, Common Goods, Others</i>
Tiket	2,307,796,457	4,125,121,912	<i>Ticket</i>
Jumlah	115,798,641,945	149,499,267,338	<i>Total</i>

Persediaan suku cadang merupakan persediaan atas suku cadang *Electric Multiple Unit* (EMU). Persediaan tiket merupakan persediaan yang terdiri dari tiket Kartu *Multi Trip* (KMT) dan Tiket Harian Berjaminan (THB).

Inventory of sparepart are inventory for Electric Multiple Unit (EMU) spareparts. Ticket inventory represents KMT (Multi Trip Card) and THB (Guaranteed Daily Ticket).

Perusahaan tidak mengasuransikan persediaan terhadap risiko kecelakaan, kebakaran dan jenis risiko kerugian lainnya.

The Company does not insure inventories against any risk of accidents, fire and other types of risk of losses.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

10. Uang Muka

Akun ini merupakan uang muka dinas untuk keperluan operasional pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp200.842.377 dan Rp226.158.550.

11. Biaya Dibayar Dimuka

Akun ini merupakan biaya dibayar dimuka atas sewa Dipo Depok pada Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) ditahun 2020 dan sewa lahan stasiun PT Kereta Api Indonesia (Persero) ditahun 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp13.709.709.332 dan Rp202.880.792.

12. Pendapatan Masih Akan Diterima

Akun ini merupakan pendapatan bunga deposito pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar Rp13.190.487 dan Rp240.595.891.

13. Aset Tetap

10. Advances

This account represents operating advances for operational purposes as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp200,842,377 and Rp226,158,550.

11. Prepaid Expenses

This account represents prepaid expenses for the lease of Dipo Depok of Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) in 2020 and the land lease of PT Kereta Api Indonesia (Persero) station in 2020.

As of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp13,709,709,332 and Rp202,880,792.

12. Accrued Income

This account represents interest income from time deposits as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp13,190,487 and Rp240,595,891.

13. Fixed Assets

	2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan:						Cost of Acquisition:
Sarana gerak	623,970,526,660	--	--	94,660,585,376	718,631,112,036	Train
Prasarana	318,792,449,742			22,859,861,393	341,652,311,135	Infrastructure
Tanah	2,785,909,269	--	--	--	2,785,909,269	Land
Bangunan	18,651,690,049	--	--	--	18,651,690,049	Building
Fasilitas	146,940,972,336	--	--	1,077,333,000	148,018,305,336	Facilities
Aset tetap dalam penyelesaian	63,860,096,115	89,703,293,944	--	(118,597,779,769)	34,965,610,290	Construction in progress
Jumlah	1,175,001,644,171	89,703,293,944	--	--	1,264,704,938,115	Total
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated Depreciation:
Sarana gerak	192,224,731,764	46,244,016,024	--	--	238,468,747,788	Train
Prasarana	156,323,291,758	38,384,745,670	--	--	194,708,037,428	Infrastructure
Bangunan	3,720,185,918	874,039,266	--	--	4,594,225,184	Building
Fasilitas	40,895,576,505	15,115,100,910	--	--	56,010,677,415	Facilities
Jumlah	393,163,785,945	100,617,901,870	--	--	493,781,687,815	Total
Nilai Buku	781,837,858,226				770,923,250,300	Book Value

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

	2019					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan:						Cost of Acquisition:
Sarana gerak	525,053,171,857	--	--	98,917,354,803	623,970,526,660	Train
Prasarana	274,286,535,522	--	(9,359,827,400)	53,865,741,620	318,792,449,742	Infrastructure
Tanah	58,242,230	--	--	2,727,667,039	2,785,909,269	Land
Bangunan	18,651,690,049	--	--	--	18,651,690,049	Building
Fasilitas	114,686,110,918	--	--	32,254,861,418	146,940,972,336	Facilities
Aset tetap dalam penyelesaian	51,055,446,031	200,570,274,964	--	(187,765,624,880)	63,860,096,115	Construction in progress
Jumlah	983,791,196,607	200,570,274,964	(9,359,827,400)	--	1,175,001,644,171	Total
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated Depreciation:
Sarana gerak	153,370,966,160	38,853,765,604	--	--	192,224,731,764	Train
Prasarana	127,647,775,174	36,955,835,023	(8,280,318,439)	--	156,323,291,758	Infrastructure
Bangunan	2,846,146,652	874,039,266	--	--	3,720,185,918	Building
Fasilitas	25,255,451,835	15,640,124,670	--	--	40,895,576,505	Facilities
Jumlah	309,120,339,821	92,323,764,563	(8,280,318,439)	--	393,163,785,945	Total
Nilai Buku	674,670,856,786				781,837,858,226	Book Value

Alokasi beban penyusutan dapat dirinci sebagai berikut:

Allocation of depreciation expenses is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Beban Pokok			
Pendapatan (Catatan 31)	98,431,098,968	88,522,588,542	Cost of Revenues (Note 31)
Beban Umum & Administrasi (Catatan 32)	2,186,802,902	3,801,176,021	Administrative & General Expense (Note 32)
Jumlah	100,617,901,870	92,323,764,563	Total

Pengurangan prasarana pada tahun 2019 merupakan aset radio komunikasi yang akan dialihkan ke PT KAI dan direklasifikasi ke aset lain-lain (Catatan 17).

Deduction of infrastructure in 2019 is a radio communication assets that will be transferred to PT KAI and reclassified to other assets (Note 17).

Aset tetap Perusahaan berupa sarana gerak dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman sindikasi (Catatan 23).

The Company's fixed assets, the trains were pledged as collateral for syndicated loans (Note 23).

Perusahaan tidak mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kecelakaan, kebakaran dan jenis risiko kerugian lainnya.

The Company does not insure fixed assets against any risk of accidents, fire and other types of risk of losses.

14. Aset Takberwujud

14. Intangible Assets

	2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan:						Cost of acquisition:
Perangkat lunak	12,021,899,968	--	--	--	12,021,899,968	Software
Jumlah	12,021,899,968	--	--	--	12,021,899,968	Total
Akumulasi Penyusutan:						Accumulated Depreciation:
Perangkat lunak	8,128,347,843	1,297,850,675	--	--	9,426,198,518	Software
Jumlah	8,128,347,843	1,297,850,675	--	--	9,426,198,518	Total
Nilai Buku	3,893,552,125				2,595,701,450	Book Value

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

	2019					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan:						Cost of acquisition:
Perangkat Lunak	6,830,497,268	--	--	5,191,402,700	12,021,899,968	Software
Aset dalam Penyelesaian	5,191,402,700	--	--	(5,191,402,700)	--	Assets in Progress
Jumlah	12,021,899,968	--	--	--	12,021,899,968	Total
Akumulasi						Accumulated
Penyusutan:						Depreciation:
Perangkat Lunak	5,122,872,951	3,005,474,892	--	--	8,128,347,843	Software
Jumlah	5,122,872,951	3,005,474,892	--	--	8,128,347,843	Total
Nilai Buku	6,899,027,017				3,893,552,125	Book Value

Beban amortisasi aset tak berwujud pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.297.850.675 dan Rp3.005.474.892 dialokasikan dalam beban umum dan administrasi (Catatan 32).

Amortisation expense of intangible asset amounting Rp1,297,850,675 and Rp3,005,474,892 on December 31, 2020 and 2019 respectively is allocated in general and administrative expense (Note 32).

15. Aset Hak Guna

15. Right of Use Asset

	2020						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dampak Penerapan Awal PSAK 73/ Impact on initial implementation of PSAK 73	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan:							Cost of Acquisition:
Kendaraan Mobil	--	--	2,192,020,948	--	--	2,192,020,948	Vehicles
Lahan	--	424,205,291	--	--	--	424,205,291	Land
Jumlah	--	424,205,291	2,192,020,948	--	--	2,616,226,239	Total
Akumulasi							Accumulated
Penyusutan:							Depreciation:
Kendaraan Mobil	--	--	730,673,649	--	--	730,673,649	Vehicles
Lahan	--	--	221,324,500	--	--	221,324,500	Land
Jumlah	--	--	951,998,149	--	--	951,998,149	Total
Nilai Buku	--					1,664,228,090	Book Value

Berdasarkan kontrak No. 332/HK-PG/KCI/XI/2019 dengan PT Bara Bentala Indonesia tanggal 20 November 2019 Perusahaan menyewa 5 unit mobil Mitsubishi Pajero dengan masa sewa 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.

Based on contract No. 332 / HK-PG / KCI / XI / 2019 with PT Bara Bentala Indonesia on 20 November 2019 the company leased 5 units of Pajero Mitsubishi cars with a lease period of January 1, 2020 until December 31, 2022.

Alokasi beban penyusutan untuk aset hak guna untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp951.998.149 (Catatan 32).

Allocation of depreciation expense for right of use assets for the year ended December 31, 2020 amounting to Rp951,998,149 (Note 32).

Beban terkait sewa jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 terdiri dari sewa Dipo Depok sebesar Rp6.854.854.668 dan sewa sarana sebesar Rp362.890.784 (Catatan 31).

Expenses related to short-term leases for the year ended December 31, 2020 consist of rental of Dipo Depok amounting to Rp6,854,854,668 and facilities rent amounting to Rp362,890,784 (Note 31).

Beban terkait sewa aset rendah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp600.929.095, yang terdiri dari sewa perlengkapan kantor (Catatan 32).

Expenses related to lease of low value assets for the year ended December 31, 2020 is amounted to Rp600,929,095, which consists of rent office equipment (Note 32).

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

16. Investasi Jangka Panjang

Keterangan	Jenis Usaha/ Type of Business	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		2020 Rp	2019 Rp
		2020 %	2019 %		
PT Fintek Karya Nusantara	Penyelenggara jasa sistem pembayaran/ Payment system service providers	1.89	2.03	37,000,000,000	37,000,000,000
				37,000,000,000	37,000,000,000
Dikurangi/Ditambah: Kenaikan (penurunan) nilai investasi/ Less/Add: Increase (decrease) of investment value				16,080,000,000	(29,403,311,700)
Jumlah - Bersih/Total - Net				53,080,000,000	7,596,688,300

Berdasarkan Risalah Sirkuler Keputusan Pemegang Saham No. PT KAI Persero KP.303/X/3/KA-2019 dan No. Yayasan Pusaka 09/RIS-KCI/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 menyatakan persetujuan penyertaan modal kepada PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) berupa penyeteroran saham sebesar 2,03% dari modal disetor dan ditempatkan PT Fintek Karya Nusantara atau ekuivalen dengan nilai setoran modal sebesar Rp37.000.000.000 yang terbagi atas 3.700 lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp10.000.000.

Berdasarkan Akta Finarya No. 17 tanggal 23 Oktober 2020 persentase kepemilikan Perusahaan pada Finarya menjadi sebesar 1,89% dari modal disetor dan ditempatkan Finarya.

Berdasarkan valuasi kembali dari Laporan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dasa'at Yudistira dan Rekan, pada 31 Desember 2020 perusahaan memiliki nilai wajar investasi sejumlah Rp53.080.000.000 pada Finarya.

Perusahaan membentuk cadangan penurunan nilai penyertaan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp29.403.311.700 (Catatan 34).

16. Long Term Investment

Based on Circular Minutes of Shareholder Decree No. PT KAI Persero KP.303/X/3/KA-2019 and No. Pusaka Foundation 09/RIS-KCI/X/2019 dated 24 October 2019 stated agreement for the capital investment to PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) in the form of a 2.03% share of paid-in capital and placed by PT Fintek Karya Nusantara or equivalent to a capital deposit of Rp37,000,000,000 which is divided into 3,700 shares, each with a par value of Rp 10,000,000.

Based on the deed of Finarya No. 17 dated October 23, 2020 the percentage of the Company's ownership in Finarya is 1.89% of the paid up and issued capital of Finarya.

Based on the revaluation of the Public Appraisal Service Office Report (KJPP), Dasa'at Yudistira and Partners, as of December 31, 2020 the Company had a fair value of investment of Rp53,080,000,000 in Finarya.

The Company reserves the allowance for impairment losses on investment as of December 31, 2019 amounting to Rp29,403,311,700 (Note 34).

17. Aset Lain-lain

Akun ini terdiri atas:

	2020 Rp	2019 Rp	
Aset yang Direklasifikasi dari			Assets reclassified from
Aset Tetap :			Fixed Assets :
Harga Perolehan			Acquisition Cost
Aset Tetap Dihentikan dari Operasi	723,839,930	10,083,667,330	Asset discontinued from operation
Akumulasi Penyusutan			Accumulated Depreciation
Aset Tetap Dihentikan dari Operasi	(500,274,611)	(8,780,593,050)	Asset Discontinued from Operation
Cadangan Penurunan Nilai	(223,564,919)	(1,303,073,880)	Allowance of Impairment
Nilai Buku	400	400	Book Value
Jumlah	400	400	Total

17. Other Assets

This account consists of:

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Pada tahun 2020, aset lain-lain sebesar Rp1.079.508.961 berupa aset radio komunikasi yang telah dipindahtangankan kepada PT KAI.

In 2020, other assets amounting to Rp1,079,508,961 in the form of radio communication transferred to PT KAI.

Pada tahun 2019, aset lain-lain terdiri atas aset radio komunikasi yang akan dipindahtangankan kepada PT KAI dan gate yang terbakar sebesar Rp400.

In 2019, other assets consist of radio communications which will be transferred to PT KAI and the burnt gate amounting to Rp400.

18. Utang Usaha

Berdasarkan pemasok:

18. Accounts Payables

Based on suppliers:

	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi/Related Parties (Catatan/Note 36)	8,901,537,149	22,657,511,552
Pihak Ketiga		
Tokyu Construction, Co., Ltd.	15,637,168,805	--
Jagro Trans, Co. Ltd.	14,284,465,003	17,632,983,164
Sumitomo Corporation	11,605,945,977	32,092,774,543
PT Sigap Prima Astrea	4,473,320,520	--
PT Kartika Cipta Indonesia	4,349,244,287	4,269,227,716
PT Jakadara Air Craft Services	4,140,569,333	1,336,101,330
PT Bhawata Nusa Surya Perdana	3,008,795,374	--
PT Usaha Mandiri Niaga	2,615,604,103	--
PT GJ International	2,316,342,000	--
PT Citra Selaras Mandiri	2,270,400,000	3,178,560,000
PT Trans Dana Profitri	2,037,542,527	4,192,350,265
PT Pura Barutama	1,758,790,000	3,519,020,000
PT Technology & Engineering	1,665,224,456	1,665,224,456
PT Pusaka Nusantara	1,515,472,778	--
PT Permata Busana Mas	1,072,856,290	--
JR East Railcar Tech & Maintenance	--	68,737,590,373
Nabtesco Service Co.Ltd	--	8,926,261,643
PT Caturpilar Perkasa Tangguh	--	6,218,030,280
PT Asaba Computer Centre	--	3,545,190,000
PT Inti Bumi Perkasa	--	3,470,015,344
PT Tesblock Industry Indonesia	--	2,989,093,800
PT Tisa Diamanta Kusuma	--	2,802,217,330
PT Panglima Siaga Bangsa	--	2,678,060,818
PT Chandra Jaya Lestari	--	2,538,400,000
PT Prima Teknologi Intermedi	--	2,220,951,262
PT Mercantura Indonesia	--	1,991,084,568
PT Global Multi Solusindo	--	1,939,445,892
PT Mulia Jaya Rejeki	--	1,805,161,248
PT Karunia Putra Sekawan	--	1,630,107,191
PT Krisbow Indonesia	--	1,423,890,051
Yashima Co., Ltd.	--	1,230,559,879
East Japan Railway Company	--	1,176,588,289
PT Uprindo Jaya	--	1,050,000,000
Lain-lain/Others (Jumlah dibawah/below Rp1 milyar/billion)	14,741,461,045	18,448,532,668
Sub Jumlah/Sub Total	87,493,202,498	202,707,422,110
Jumlah/ Total	96,394,739,647	225,364,933,662

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Berdasarkan mata uang:

Based on currencies:

	2020	2019
	Rp	Rp
Yen Jepang/Japanese Yen	42,034,012,388	129,803,228,771
Rupiah/Rupiah	54,360,727,259	95,561,704,891
Jumlah/ Total	96,394,739,647	225,364,933,662

19. Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya

19. Other Short Term Financial Liabilities

Akun ini terdiri atas:

This account consists of:

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Hutang Gaji	4,602,539,316	4,111,785,880	Wages Payable
Jaminan Bongkar	954,534,264	772,084,264	Dismantling Deposit
Jaminan THB	342,650,000	1,972,160,000	THB Deposit
Bea Ukur	100,427,084	100,427,084	Measuring Cost
Lain-lain	1,091,319,870	542,715,934	Others
Jumlah	7,091,470,534	7,499,173,162	Total

Hutang gaji merupakan potongan gaji pegawai yang belum disetorkan kepada pengelola dana kesehatan dan pengelola jaminan ketenagakerjaan.

Wages payables represent deductions from employee salaries that have not been deposited to Health fund management and employment guarantee managers.

Jaminan bongkar merupakan utang kepada customer atas pemasangan ruang iklan di kereta, yang akan dikembalikan apabila kontrak pemasangan iklan telah berakhir.

Dismantling deposit is a debt to the customer for the installation of advertising space on trains, that will be settled when the advertising contract has expired.

Jaminan THB (Tiket Harian Berjaminan) merupakan utang kepada pelanggan pemakai kereta api yang belum mengembalikan tiket dan belum mengambil uang jaminan atas tiket yang dibeli.

THB (Guaranteed Daily Ticket) deposit is a debt to train end-users who did not return the tickets and not take the deposit on tickets purchased.

20. Beban Akrua

20. Accrued Expenses

Akun ini terdiri atas:

This account consists of:

	2020	2019	
	Rp	Rp	
Beban Pokok Pendapatan	124,553,721,141	99,415,948,054	Cost of Revenues
Beban Usaha	5,409,503,558	3,992,625,438	Operating Expenses
Aset Tetap	265,496,000	265,496,000	Fixed Assets
Jumlah	130,228,720,699	103,674,069,492	Total

Beban akrual merupakan beban-beban yang terkait dengan kegiatan usaha utama Perusahaan yang terdiri dari jasa pemeliharaan sarana gerak,

Accrued expenses are costs that related to Company's main business i.e. maintenance services of train, maintenance services purchased

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

jasa pemeliharaan barang yang dibeli dan jasa pemeliharaan barang yang dibeli lainnya yang belum diterima *invoice*-nya namun pekerjaannya telah dilakukan.

goods and services other maintenance items purchased which is the invoice has not been received but the service has been provided.

21. Perpajakan

a. Pajak Dibayar Dimuka

	2020	2019
	Rp	Rp
Pajak Penghasilan		
Pasal 28 A - Tahun 2018	--	99,432,101,349
Jumlah	--	99,432,101,349

Income Tax:
Article 28 A - Year 2018
Total

Pada tahun 2019 Perusahaan mengajukan surat restitusi kelebihan pajak penghasilan pasal 28A tahun 2018.

In 2019 the Company submitted a letter of restitution for the excess tax of income tax article 28A year 2018.

Pada tanggal 26 Juni 2020, Perusahaan telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan tahun pajak 2018 dengan No.00040/406/18/093/20 tanggal 25 Juni 2020 sebesar Rp99.432.101.350.

On June 26, 2020, the Company has received the Overpayment Tax Assessment Letter for the Income tax year 2018 No. 00040/406/18/093/20 dated on June 25, 2020 amounting to Rp99,432,101,350.

Perusahaan menerima pengembalian kelebihan sebesar Rp98.507.753.979 melalui Rekening Bank BNI tanggal 29 Juli 2020 dan sisa lebih bayar dikompensasi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp924.347.371 dengan detail sebagai berikut:

The Company received an excess refund of Rp98,507,753,979, through the BNI Bank Account dated July 29, 2020 and the remaining overpayment was compensated with a Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) of Rp924,347,371 with the following details:

Tahun Pajak/ Fiscal Year	Objek Pajak/ Tax Object	No Surat/ Letter No.	Tanggal Terbit/ Issuance Date	Total Pembayaran/ Total Tax Payment Rp
Jan-Dec 2018	SKPKB PPh 21/ Tax Underpayment Assesment Letter Income Tax Article 21	00028/201/18/093/20	25 Juni 2020/ June 25, 2020	398,038,422
Januari 2018/ January 2018	SKPKB PPh 21/ Tax Underpayment Assesment Letter Income Tax Article 21	00028/101/18/093/20	25 Juni 2020/ June 25, 2020	197,308,365
Mei 2018/ May 2018	SKPKB PPh 21/ Tax Underpayment Assesment Letter Income Tax Article 21	00029/101/18/093/20	25 Juni 2020/ June 25, 2020	69,469,305
Oktober 2018/ October 2018	SKPKB PPh 21/ Tax Underpayment Assesment Letter Income Tax Article 21	00030/101/18/093/20	25 Juni 2020/ June 25, 2020	42,247,926
Januari 2018/ January 2018	SKPKB PPh 23/ Tax Underpayment Assesment Letter Income Tax Article 23	00038/203/18/093/20	25 Juni 2020/ June 25, 2020	1,240,240
Mei 2018/ May 2018	SKPKB PPh 23/ Tax Underpayment Assesment Letter Income Tax Article 23	00039/203/18/093/20	25 Juni 2020/ June 25, 2020	7,814,400

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Tahun Pajak/ Fiscal Year	Objek Pajak/ Tax Object	No Surat/ Letter No.	Tanggal Terbit/ Issuance Date	Total Pembayaran/ Total Tax Payment Rp
November 2018/ November 2018	SKPKB PPh 23/ Tax Underpayment Assesment Letter Income Tax Article 23	00040/203/18/093/20	25 Juni 2020/ June 25, 2020	200,419,940
Desember 2018/ December 2018	SKPKB PPh 23/ Tax Underpayment Assesment Letter Income Tax Article 23	00041/203/18/093/20	25 Juni 2020/ June 25, 2020	7,808,774
				924,347,372

Dari keseluruhan nilai SKPKB tersebut, Perusahaan telah membebaskan sebesar Rp924.347.371 pada laporan laba rugi (Catatan 34)

From the total of SKPKB values, the Company has charged Rp924,347,371 to the income statement (Note 34)

b. Utang Pajak

b. Tax Payable

	2020 Rp	2019 Rp	
Pajak Pertambahan Nilai: PPN Keluaran	489,910,705	1,631,568,615	Value Added Tax: VAT Out
Kurang Setor	489,910,705	1,631,568,615	Under Payment
Pajak Penghasilan:			Income Tax:
Pasal 21	9,475,107,884	15,396,277,099	Article 21
Pasal 23	1,017,187,525	532,741,763	Article 23
Pasal 4 ayat 2	46,567,665	97,931,927	Article 4 paragraph 2
Pasal 29	1,580,920,341	26,818,686	Article 29
Subjumlah	12,119,783,415	16,053,769,475	Subtotal
Jumlah	12,609,694,120	17,685,338,090	Total

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak menurut laporan laba rugi dengan taksiran beban pajak yang dihitung oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

c. Current Tax

A reconciliation between income before provision for income (expense) tax in the statement of profit and loss according to the estimated income tax expense is calculated by the Company is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Laba Sebelum Taksiran			Income Before Provision for Income
Beban Pajak	114,794,608,864	343,062,208,010	Tax Expenses
Beda Tetap:			Permanent Differences:
Pendapatan bunga	(7,194,748,990)	(11,855,229,713)	Interest Income
Rapat Kerja dan Koordinasi	1,227,947,902	4,832,092,911	Meeting and Coordination
Jamuan dan Representasi	1,627,866,959	4,271,166,322	Meals and Representation
Akomodasi	799,936,915	1,039,422,658	Accommodation
Pakaian Seragam dan			
Perlengkapan	1,420,324,290	10,059,477,645	Uniforms and Equipment

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

	2020 Rp	2019 Rp	
Sanksi Perpajakan	3,064,574,461	--	Tax Sanctions
Aset Hak Guna	37,326,954	--	Right of Use Asset
Biaya yang tidak diakui secara fiskal	9,940,323,548	13,121,588,162	Nondeductable Expense
	<u>10,923,552,039</u>	<u>21,468,517,985</u>	
Beda Waktu:			Time Differences
Beban Bonus	(105,021,195,113)	62,601,092,942	Bonus Expenses
Beban Jasa dan			Employee Benefits and
Bunga Imbalan Kerja	14,467,077,578	(1,560,075,674)	Interest Expenses
Penyusutan Aset Tetap	10,534,696,526	6,117,823,635	Depreciation of Fixed Assets
Beban Pemeliharaan			Maintenance Expenditure which is
yang Dikapitalisasi			Capitalized According
Menurut Perpajakan	11,570,415,685	17,797,605,642	to Tax Regulation
Cadangan penurunan			Allowance of Impairment
radio kabin	(1,079,508,960)	1,079,508,961	of other assets
Pencadangan Kerugian			
Penurunan Nilai	10,088,606,970	882,931,510	Allowance for Impairment
Jumlah	<u>(59,439,907,314)</u>	<u>86,918,887,016</u>	Total
Taksiran Laba Fiskal Tahun Berjalan	66,278,253,589	451,449,613,011	Estimated Current Year
Dibulatkan	<u>66,278,253,000</u>	<u>451,449,613,000</u>	Taxable Profit
			Roundings
Rincian Rugi Fiskal:			Details of Fiscal Loss:
Tahun 2018	--	(257,801,186,767)	Year 2018
Lab a Fiskal:	66,278,253,000	193,648,426,233	Fiscal Income
Taksiran Beban Pajak Kini	<u>14,581,215,660</u>	<u>48,412,106,558</u>	Estimated Income Tax Expense
Pajak Dibayar Dimuka			Prepaid Taxes
Pajak Penghasilan Pasal 22	1,956,776,000	2,096,879,000	Income Tax Article 22
Pajak Penghasilan Pasal 23	1,338,264,546	1,916,769,312	Income Tax Article 23
Pajak Penghasilan Pasal 25	9,705,254,773	44,371,639,560	Income Tax Article 25
Jumlah	<u>13,000,295,319</u>	<u>48,385,287,872</u>	Total
Kurang Setor Pajak Penghasilan			Tax Under Payment
(Taksiran Tagihan)	<u>1,580,920,341</u>	<u>26,818,686</u>	(Estimated)

d. Rincian Beban Pajak

d. Details of Tax Expenses

	2020 Rp	2019 Rp	
Pajak Kini	(14,581,215,660)	(48,412,106,558)	Current Tax
Pajak Tangguhan	(11,062,020,429)	(42,720,574,938)	Deferred Tax
Efek Perubahan Tarif Pajak	(11,465,390,777)	--	Tax Rate Change Effect
Beban Pajak Penghasilan	<u>(37,108,626,866)</u>	<u>(91,132,681,496)</u>	Income Tax Expenses

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

e. Pajak Tangguhan

Rincian aset pajak tangguhan sebagai berikut:

e. Deferred Taxes

Details of deferred tax assets are as follows:

	Efek Perubahan Tarif Pajak 22%/ 22% Tax Rate Change Effect						2020 Rp	
	2019 Rp	Koreksi Saldo Awal atas Efek PSAK pada SPT Pembetulan/ Beginning Balance Correction due to PSAK Effect on Revised CTR Rp	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit Loss Statements Rp	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/Charged to Other Comprehensive Income Rp	Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit Loss Statements Rp	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/Charged to Other Comprehensive Income Rp		
Beban Bonus	31,689,567,364	--	(23,104,662,925)	--	(3,802,748,084)	--	4,782,156,355	Bonus Expense
Imbalan Kerja	929,505,185	--	3,182,757,067	(130,858,073)	(184,547,845)	73,007,223	3,869,863,557	Employee Benefits
Penyusutan	5,406,882,229	2,014,759,180	1,551,181,607	--	(890,596,969)	--	8,082,226,047	Depreciation
Aset Tetap								of Fixed Assets
Perbedaan Perlakuan								Treatment Differences
Beban Pemeliharaan	16,581,344,732	--	3,311,943,080	--	(1,989,761,368)	--	17,903,526,444	Maintenance Expenses
Cadangan								Allowance on Asset
Penurunan Aset	55,891,230	--	--	--	(6,706,948)	--	49,184,282	Impairment
Pencadangan Penurunan								Allowance for Impairment
Nilai Piutang	37,988,702,452	--	2,219,493,533	--	(4,558,644,294)	--	35,649,551,691	on Receivables
Cadangan								Allowance on Cabin Radio
Penurunan Radio Kabin	269,877,240	--	(237,491,971)	--	(32,385,269)	--	--	Impairment
Jumlah	<u>92,921,770,432</u>	<u>2,014,759,180</u>	<u>(13,076,779,609)</u>	<u>(130,858,073)</u>	<u>(11,465,390,777)</u>	<u>73,007,223</u>	<u>70,336,508,376</u>	Total

		Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit Loss Statements Rp	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/Charged to Other Comprehensive Income Rp	2019 Rp	
Beban Bonus	16,039,294,128	15,650,273,236	--	31,689,567,364	Bonus Expense
Imbalan Kerja	1,282,582,327	(390,018,919)	36,941,777	929,505,185	Employee Benefits
Penyusutan					Depreciation
Aset Tetap	3,877,426,320	1,529,455,909	--	5,406,882,229	of Fixed Assets
Perbedaan Perlakuan					Treatment Differences
Beban Pemeliharaan	12,131,943,322	4,449,401,410	--	16,581,344,732	Maintenance Expenses
Cadangan					Allowance on Asset
Penurunan Aset	55,891,230	--	--	55,891,230	Impairment
Pencadangan Penurunan					Allowance for Impairment
Nilai Piutang	37,767,969,574	220,732,878	--	37,988,702,452	on Receivables
Cadangan					Allowance on Cabin Radio
Penurunan Radio Kabin	--	269,877,240	--	269,877,240	Impairment
Kompensasi Rugi Fiskal	64,450,296,692	(64,450,296,692)	--	--	Fiscall Loss Compensation
Jumlah	135,605,403,593	(42,720,574,938)	36,941,777	92,921,770,432	Total

22. Pendapatan Diterima Dimuka

22. Unearned Revenues

Akun ini terdiri atas:

This account consists of:

	2020 Rp	2019 Rp	
Deposit Kartu Multi			Multi Trip Card Deposit
Trip (KMT) (Catatan 6)	69,729,779,381	57,941,540,798	(KMT) (Note 6)
Sewa	--	34,473,015,138	Rent
Lainya	--	532,415,801	Others
Jumlah	<u>69,729,779,381</u>	<u>92,946,971,737</u>	Total

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

23. Pinjaman Jangka Panjang

	2020 Rp	2019 Rp
Pinjaman Jangka Panjang - Pinjaman Sindikasi		
Pihak berelasi (Catatan 36)	261,634,641,080	188,336,130,003
Pihak ketiga		
PT Bank Central Asia Tbk	87,211,547,027	62,778,710,000
	348,846,188,107	251,114,840,003
Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Jangka Panjang	(44,581,852,392)	(70,439,061,584)
Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek	304,264,335,715	180,675,778,419

Pinjaman Sindikasi

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 16, tanggal 10 November 2014 dari Notaris Julius Purnawan, SH, Msi, Perusahaan memperoleh kredit sindikasi dengan *plafond* sebesar Rp660.344.798.677. Bank yang bergabung dalam pemberian kredit sindikasi tersebut diantaranya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk. Kredit tersebut dipergunakan untuk pembelian Kereta Rel Listrik (KRL).

Berdasarkan Perubahan II Perjanjian Kredit Sindikasi No. (2) 16 tanggal 2 April 2019 mengenai masa tenggang atau *Grace period* dan batas waktu penarikan kredit, masa tenggang atau *Grace Period* berarti periode terhitung sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan:

- Tanggal 30 Juni 2016 untuk Fasilitas Kredit tahap I; dan
- Tanggal 30 Juni 2019 untuk Fasilitas Kredit tahap II

Dimana selama periode waktu tersebut Debitur tidak wajib membayar angsuran pokok Pinjaman kepada Kredit Sindikasi namun tetap wajib membayar bunga atas Pinjaman. Batas waktu penarikan Fasilitas Kredit Tahap II yaitu sejak tanggal efektif fasilitas kredit tahap II sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 atau sampai dengan fasilitas kredit tahap II tersebut telah ditarik seluruhnya, mana yang terlebih dahulu tercapai ("Batas waktu penarikan kredit tahap II").

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset yang dibiayai melalui fasilitas ini dan *corporate guarantee* PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Perusahaan (Catatan 13).

23. Long Term Loans

Long Term Loans -
Syndicated Loan
Related parties (Note 36)
Third Party
PT Bank Central Asia Tbk
Current Portion of Long-term Loan
**Long Term Loan, Net of Current
Portion**

Syndicate Loan

Under the Syndicated Loan Agreement No. 16, dated November 10, 2014 from Notary Julius Purnawan, SH, Msi, the Company obtained a syndicated loan with plafond amounting to Rp660,344,798,677. The syndicated bank is PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Central Asia Tbk. The credit is used for purchasing electric train Electric Multiple Unit (EMU).

Based on Amendment II of the Syndicated Credit Agreement No. (2) 16 April 2, 2019 concerning the grace period or Grace period and the credit withdrawal deadline, Grace Period means a period from November 10, 2014 to:

- June 30, 2016 for the Phase I Credit Facility; and*
- June 30, 2019 for the Phase II Credit Facility*

During which time the Debtor is not required to pay the loan principal installments to the Syndicated Credit but is still required to pay interest on the Loan. The deadline for withdrawing Phase II Credit Facilities, which is from the effective date of the Phase II credit facilities until December 31, 2020 or until the Phase II credit facilities have been withdrawn in full, whichever is first reached ("Deadline for Phase II withdrawal of credit").

The loan facility is secured with assets financed by this facility and corporate guarantee of PT Kereta Api Indonesia (Persero) and the Company (Note 13).

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Ketentuan dan syarat-syarat perjanjian pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

The terms and conditions of loan agreement are as follows:

Suku bunga	:	Jibor + 3%	:	Interest rate
Jangka waktu				Credit matures
Tahap 1	:	12 Tahun/Years	:	Phase 1
Tahap 2	:	12 Tahun/Years	:	Phase 2

Dalam perjanjian kredit Perusahaan diwajibkan:

In the credit agreement, the Company is required to:

- Memenuhi ketentuan rasio keuangan antara lain:
 - Current Ratio* minimal 1 (satu kali);
 - Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimal 1,5 (satu koma lima) kali;
 - Debt to Equity Ratio (DER)* maksimal 3 kali.
- Memenuhi PSAK yang berlaku dalam hal penyisihan piutang ragu-ragu.
- Melakukan penilaian jaminan minimal 2 (dua) tahun sekali dengan menunjuk independent appraiser yang disetujui oleh sindikasi.

- Meet the financial ratio provisions, among other:*
 - Current Ratio* at least 1 (one) time;
 - Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* of 1.5 (one point five) times;
 - Debt to Equity Ratio (DER)* maximizes 3 times.
- Comply with the applicable PSAK concerning the allowance for doubtful accounts.*
- Asses collateral value at least once every two years by appointing an independent appraiser approved by the syndication.*

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Kreditor Sindikasi yang diatur dalam perjanjian kredit antara lain:

Under the agreement the Company is not allowed to do certain actions without the prior written consent by the syndication creditor such as:

- Memperoleh pinjaman, utang atau fasilitas kredit baru dan/atau fasilitas sewa guna usaha (*leasing*) maupun pembiayaan lainnya dari pihak lain.
- Mengikatkan diri sebagai penanggung/ penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun.
- Meminjamkan uang kepada pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya dan pemegang saham.
- Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada atau dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari Debitur.
- Menyewakan aset yang dijamin; menjaminkan sebagian atau semua harta kekayaan.
- Mengurangi modal yang disetor dan ditempatkan Debitur. Mengubah bentuk hukum, status kelembagaan, anggaran dasar serta pemegang saham pengendali atau mengubah kegiatan usahanya.
- Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran.

- Obtaining a loan, debt or new credit facility and/or leasing facilities or other financing from other parties.*
- Binding themselves as guarantor/ guarantor in any form and by name.*
- Lending money to other parties, including but not limited to affiliated companies and shareholders.*
- Investing, participating or opening a new business other than an existing business or in the context of carrying out the Debtor's daily business activities.*
- Renting, guaranting assets; part or all of the Company's assets.*
- Reducing paid-up capital and placing debtors. Change the legal form, institutional status, articles of association and controlling shareholders or change their business activities.*
- Conducting fusion, merger, acquisition, spin off, and liquidation.*

Jaminan kredit:

Credit collateral:

- Jaminan fidusia atas aset bergerak (Catatan 13);
- Jaminan fidusia atas tagihan;

- Fiduciary guarantee of movable assets (Note 13);*
- Fiduciary guarantees for bills;*

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

3. Jaminan fidusia atas rekening bank (Catatan 6);
4. Jaminan Perusahaan PT KAI;
5. Jaminan pernyataan tanggung jawab PT KAI.

Perusahaan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 24 Juni 2020, berdasarkan surat No. SDK/2.1/1640 perihal "Persetujuan Kreditur Sindikasi atas Permohonan PT KCI" sehubungan dengan fasilitas kredit, Perusahaan telah menerima syarat dan ketentuan baru mengenai sindikasi sebagai berikut:

1. Menyetujui penundaan pembayaran kewajiban angsuran pokok periode 25 Juni 2020 sampai dengan 25 Desember 2020. Selanjutnya, angsuran pokok yang ditunda tersebut dibayarkan secara prorata sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan jatuh tempo jangka waktu kredit sesuai dengan jadwal angsuran semula.
2. Menyetujui penurunan suku bunga menjadi sebesar JIBOR (3 bulan) ditambah margin sebesar 2,50% p.a (JIBOR + 2,50%) dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Suku bunga minimum sebesar 7.0% dan *renewable* setiap saat, dengan ketentuan apabila pendapatan Perusahaan per bulan di tahun 2020 sama dengan rata-rata minimal pendapatan bulanan di tahun 2019 maka suku bunga berlaku seperti semula yaitu JIBOR (3 bulanan) ditambah margin sebesar 3,00% (JIBOR + 3,00%).
 - b. Periode pemberlakuan suku bunga terhitung sejak pembayaran periode Juni 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan suku bunga menjadi JIBOR 3 bulan yang berlaku berlaku pada surat persetujuan.
 - c. Setelah periode relaksasi berakhir, penetapan suku bunga sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit yaitu sebesar JIBOR 3 bulan ditambah dengan margin 3,00% (JIBOR + 3,00%)
3. Menyetujui pengesampingan ketentuan dalam Perjanjian Kredit sebagai berikut:
 - a. Syarat *Debt Service Coverage Ratio* sebesar $\geq 150\%$;
 - b. Syarat pemenuhan *Debt Service Reserve Account* sebesar 1 kali angsuran dan 1 kali pembayaran bunga;
 - c. Pengesampingan ketentuan tersebut di atas berlaku hanya untuk tahun 2020.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

3. *Fiduciary guarantee on bank accounts (Note 6);*
4. *PT KAI's corporate guarantee;*
5. *Guarantee of PT KAI's statement of responsibility.*

The Company has fulfilled the debt covenant requirements outlined in loan agreements.

On June 24, 2020, based on letter No. SDK/2.1/1640 regarding "Approval of Syndicated Creditor for PT KCI Request" in connection with credit facilities, the Company has received new terms and conditions regarding the syndication as follows:

1. *Approved the postponement of the payment of principal installments for the period June 25, 2020 until December 25, 2020. Furthermore, the principal installments postponed were paid on a prorata basis from March 25, 2021 until the maturity of the credit period in accordance with the original installment schedule.*
2. *Approved the reduction in interest rates to JIBOR (3 months) plus a margin of 2.50% p.a (JIBOR + 2.50%) with the following conditions:*
 - a. *The minimum interest rate is 7.0% and renewable at any time, provided that the Company's monthly income in 2020 is the same as the average minimum monthly income in 2019, the interest rate applies as before, namely JIBOR (3 months) plus a margin of 3.00 % (JIBOR + 3.00%).*
 - b. *The interest rate period is calculated from the payment period June 2020 to December 2020 with the interest rate being the 3-month JIBOR that applies to the approval letter.*
 - c. *After the relaxation period ends, the interest rate is determined in accordance with the terms of the Credit Agreement, which is 3-month JIBOR plus a 3.00% margin (JIBOR + 3.00%)*
3. *Agree to waive the provisions in the Credit Agreement as follows:*
 - a. *Debt Service Coverage Ratio requirement of $\geq 150\%$;*
 - b. *Conditions for fulfilling the Debt Service Reserve Account for 1 installment and 1 interest payment;*
 - c. *The exclusion of the above provisions applies only to 2020.*

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

24. Utang Bank Jangka Pendek

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.KP/134/KMK/2020 tanggal 30 Juni 2020, dari Notaris Julius Purnawan, SH, MSi., Notaris di Jakarta Selatan, bahwa PT Bank Mandiri (Persero), Tbk telah memberikan fasilitas kredit modal kerja ("Fasilitas Kredit") maksimal sebesar Rp200.000.000.000 terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020 hingga 29 Juni 2021.

Fasilitas Kredit yang diberikan bersifat *revolving*. Suku bunga ditetapkan sebesar 8,25% p.a. Atas pemberian fasilitas kredit, Perusahaan berkewajiban untuk membayar *servicing fee* dan provisi sebesar 0,5% dari fasilitas kredit dengan perincian pembayaran sebagai berikut:

- 0,2% p.a. dari limit Fasilitas Kredit yang dibayar selambatnya satu hari kerja setelah penandatanganan perjanjian.
- 0,3% p.a. dari jumlah Fasilitas Kredit yang ditarik yang dibayar setiap penarikan.

Agunan atas fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- Piutang termasuk tagihan PSO baik yang ada maupun yang akan ada, diikat fidusia;
- Persediaan, diikat fidusia;
- Rekening pendapatan PSO, diikat gadai.

Besar nilai pengikatan/nilai penjaminan untuk masing-masing agunan fidusia adalah minimal sebesar 150% dari limit Fasilitas Kredit.

Fasilitas kredit terutang adalah sebesar Rp100.000.000.000 pada 31 Desember 2020.

25. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 merupakan pencadangan bonus masing-masing sebesar Rp21.737.074.343 dan Rp122.687.162.891.

24. Short Term Bank Loans

Based on the Working Capital Credit Agreement Deed No. WCO.KP/134/KMK/2020 dated June 30, 2020, from Notary Julius Purnawan, SH, MSi., Notary in South Jakarta, that PT Bank Mandiri (Persero), Tbk provided a working capital credit facility ("Credit Facility") with a maximum of Rp200,000,000,000 starting from June 30, 2020 to June 29, 2021.

The credit facilities provided are revolving in nature. The interest rate is set at 8.25% p.a. For the provision of the credit facility, the Company is obliged to pay a servicing fee and provision of 0.5% of the credit facility with the following details:

- 0.2% p.a. of the Credit Facility limit that is paid no later than one working day after signing the agreement.*
- 0.3% p.a. of the amount of credit facilities drawn, which is paid for each drawdown.*

Collateral for this credit facilities are as follows:

- Accounts receivable including PSO claims, both existing and future, are bound by fiduciary;*
- Supplies, bound by fiduciary;*
- PSO income accounts, tied with pawning.*

The binding value/guarantee value for each fiduciary collateral is a minimum of 150% of the credit facility limit.

The outstanding this credit facility is amounting to Rp100,000,000,000 as of December 31, 2020.

25. Short Term Employee Benefits Liabilities

Short-term employee benefits obligations as of December 31, 2020 and December 31, 2019 represents accrued bonus amounting to Rp21,737,074,343 and Rp122,687,162,891, respectively.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

26. Liabilitas Sewa

	2020 Rp	2019 Rp	
Liabilitas Sewa			Short Term Lease
Jangka Pendek	728,774,407	--	Liability
Liabilitas Sewa			Long Term Lease
Jangka Panjang	796,125,012	--	Liability
Jumlah	1,524,899,419	--	Total

Liabilitas sewa merupakan liabilitas sewa aset kendaraan dan lahan (Catatan 15).

26. Lease Liabilities

lease liabilities represents lease of vehicle and land (Note 15).

27. Liabilitas Imbalan Kerja

Perusahaan mencatat liabilitas kerja untuk seluruh karyawan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Tenaga Kerja No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan Perjanjian Kerja Bersama.

Perusahaan mengikuti Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Non Bank PT Asuransi Jiwasraya, Perjanjian No.020/HK-UM/KCJ/III/2017.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja tersebut masing-masing adalah 1.325 dan 1.315 orang pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan laporan valuasi aktuarial dari KKA Azwir Arifin dan Rekan No.21057/LA-AAR/XII/2020, tanggal 31 Desember 2020 dan PT Pointera Aktuarial Strategis No. 011/PAS-KCI/LAP/I/20, tanggal 31 Desember 2019.

Asumsi utama perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Usia Pensiun	56 Tahun/Years	56 Tahun/Years	Pension Age
Tingkat Mortalitas	TMI IV/2019	TMI 2011 (TMI III)	Mortality Rate
Tingkat Kenaikan Gaji	9% per tahun/per annum	9% per tahun/per annum	Rate of Salary Increases
Tingkat Diskonto	7.69% per tahun/per annum	8.25% per tahun/per annum	Discount Rate
Tingkat Cacat	1% per tahun/per annum	1% per tahun/per annum	Disability Rate
Tingkat Pengunduran Diri	5% per tahun sampai usia 29 kemudian turun linear menjadi 1% di usia 54 5% until 29 years and then declining linearly to 0% at 54 years and thereafter	5% per tahun sampai usia 29 kemudian turun linear menjadi 0% di usia 54 5% until 29 years and then declining linearly to 0% at 54 years and thereafter	Resignation Rate
Metode	100% per tahun/per annum Projected Unit Credit	100% per tahun/per annum Projected Unit Credit	Method

27. Employee Benefits Liabilities

The Company provides benefits to its qualified employees based on Labor Law No.13/2003 dated March 25, 2003 and Collective Labor Agreement.

The Company participated in the PT Asuransi Jiwasraya Non Bank Financial Institution Pension Fund Program, Agreement No.020/HK-UM/KCJ/III/2017.

The number of employees entitled to the benefits are 1,325 and 1,315 people as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

The Company recorded employee benefits liabilities based on the actuarial valuation report from KKA Azwir Arifin dan Rekan No.21057/LA-AAR/XII/2020, dated December 31, 2020 and PT Pointera Aktuarial Strategis No. 011/PAS-KCI/LAP/I/20, dated December 31, 2019.

The main actuarial assumption calculations are as follows:

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

- a. Jumlah liabilitas berdasarkan perhitungan aktuaria independen pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp	
Nilai kini liabilitas	38,275,716,204	17,366,278,012	The present value of the obligation
Nilai wajar aset program	(20,685,427,311)	(13,648,257,273)	The fair value of plan assets
Defisit	17,590,288,893	3,718,020,739	Deficit
Dampak atas pembatasan aset	--	--	The impact on the asset limitation
Liabilitas yang diakui dalam Neraca	17,590,288,893	3,718,020,739	Liabilities recognized in the Financial Position

- b. Beban Imbalan Kerja Neto

- b. Net Benefit Expense

	2020 Rp	2019 Rp	
Biaya jasa kini	8,925,143,132	5,340,229,942	Current service cost
Bunga neto	1,225,296,764	830,467,250	Net interest
Hasil Bersih Investasi yang Diharapkan	--	(173,986,369)	Expectations on investment returns
Biaya Jasa Lalu yang diakui	10,409,218,321	29,499,127	Past Service Costs are recognized
Beban yang diakui dalam Laporan Laba Rugi	20,559,658,217	6,026,209,950	Expenses recognized in the Profit (Loss)

- c. Perubahan liabilitas berdasarkan perhitungan aktuaria independen adalah sebagai berikut:

- c. Changes liability based on independent actuarial calculation are as follows:

	2020 Rp	2019 Rp	
Liabilitas pada awal periode	3,718,020,739	5,130,329,307	Liabilities at the beginning of the period
Beban yang Diakui pada Tahun Berjalan	20,559,658,217	6,026,209,950	Expenses Recognized on the Current Year
Penghasilan Komprehensif Lain	(594,809,424)	147,767,107	Other Comprehensive Income
Realisasi Pembayaran Manfaat Iuran Perusahaan	--	(190,531,544)	Realization of Payment of Benefits
	(6,092,580,639)	(7,395,754,081)	Company Contribution
Liabilitas pada Akhir Tahun	17,590,288,893	3,718,020,739	Liabilities at End of Year

Imbalan pascakerja imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

The defined post-employment benefits typically expose the Company to actuarial risks such as investment risk, interest rate risk and salary risk.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program.

Investment risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto yang mengacu pada suku bunga obligasi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Interest risk

The present value of defined benefit liability is calculated using a discount rate which refers to the bond interest rate. A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by referring to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Perubahan tingkat kenaikan gaji dan tingkat diskonto yang diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 akan memberikan dampak terhadap saldo nilai kini kewajiban imbalan pasti sebagai berikut:

Changes in the assumed discount rate and salary increase rate as of December 31, 2020 and 2019 would have the following effects on balances of present value of defined benefit obligation:

	2020 Rp	2019 Rp	
Analisa Sensivitas Tingkat Diskonto:			Sensitivity Analysis of Discount Rate
Jika Tingkat + 1%	32,612,641,881	14,746,160,148	If Rate + 1%
Jika Tingkat - 1%	45,364,697,508	20,662,923,596	If Rate - 1%
Analisa Sensivitas Kenaikan Gaji:			Sensitivity Analysis of Salary Increase
Jika Tingkat + 1%	45,159,460,518	20,665,441,388	If Rate + 1%
Jika Tingkat - 1%	32,663,386,118	14,697,311,283	If Rate - 1%

28. Modal Saham

28. Capital Stock

Komposisi kepemilikan saham per
31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

The composition of shareowners as of December
31, 2019 and 2018 are as follows:

	2020 and 2019		
	Lembar saham/Shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownerships	Nilai saham ditempatkan dan disetor penuh/ Shares value issued and fully paid
Pemegang Saham/Shareholders			
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	230,000	99.78	230,000,000,000
Yayasan Pusaka	500	0.22	500,000,000
Jumlah/Total	230,500	100.00	230,500,000,000

29. Dividen dan Cadangan Tujuan

29. Dividend and Appropriated Reserve

Berdasarkan Risalah RUPS No. KAI
KP.303/VI/4/KA-2020 tanggal 29 Juni 2020,
pemegang saham menyetujui untuk memberikan
dividen sebesar Rp37.879.375.038 atas laba tahun
buku 2019.

Based on the Minutes of the GMS
No. KP.303/VI/4/KA-2020 dated June 29, 2020,
the shareholders agreed to provide a dividend of
Rp37,879,375,038 for the profit of the fiscal year
2019.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

30. Pendapatan	30. Revenues		
	2020 Rp	2019 Rp	
Kompensasi Pemerintah (PSO)	1,187,288,407,911	1,283,802,281,899	Government Compensation
Pendapatan Angkutan Penumpang	614,010,128,963	1,288,557,878,161	Passenger Revenue
Pendapatan Non Angkutan	81,799,513,905	168,728,047,019	Non Transportation Revenue
Pendapatan Pendukung Angkutan	178,958,000	506,901,000	Transportation Supporting Revenue
Jumlah Pendapatan	1,883,277,008,779	2,741,595,108,079	Total Revenues

31. Beban Pokok Pendapatan	31. Cost of Revenues		
	2020 Rp	2019 Rp	
Perawatan Sarana Perkeretaapian	323,273,304,460	377,792,232,102	Railway Facilities Maintenance
Pemakaian Bahan Bakar	180,624,691,901	177,212,774,843	Fuel Used
Pemeliharaan Prasarana			Maintenance of Supporting
Pendukung	121,573,811,507	137,959,224,683	Infrastructure
Pegawai Operasional	97,120,385,266	120,575,738,621	Operational Officer
Track Access Charge	65,902,817,135	75,448,591,913	Track Access Charge
Penyusutan Prasarana Pendukung			Infrastructure Support Depreciation
(Catatan 13)	52,187,082,944	49,668,822,938	(Note 13)
Penyusutan Sarana Gerak			
(Catatan 13)	46,244,016,024	38,853,765,604	Vehicles Depreciation (Note 13)
Cuci Sarana	33,660,513,218	29,512,268,456	Railway Wash
Sewa Sarana (Catatan 15)	362,890,784	2,835,618,683	Facilities Rent (Note 15)
Sewa Dipo Depok (Catatan 15)	6,854,854,668	--	Dipo Depok Rent (Note 15)
Beban Umum Stasiun :			General Expenses Stations:
Beban K3	469,030,932,366	412,052,351,448	K3 Expenses
Pemeliharaan	4,952,856,192	4,840,490,502	Maintenance
Pakaian Seragam	994,077,465	4,679,911,291	Uniform
Sewa Stasiun	--	449,076,841,146	Station Rent
Lain-lain	876,545,535	1,024,126,880	Others
Jumlah	1,403,658,779,465	1,881,532,759,110	Total

32. Beban Usaha	32. Operating Expenses		
	2020 Rp	2019 Rp	
Beban Pemasaran/Penjualan			Marketing/Selling Expenses
Gaji Pegawai	115,925,691,554	214,543,331,787	Salaries
Jasa Pelayanan Penumpang	46,823,831,662	5,491,221,759	Passenger Services
Percetakan	13,533,271,902	17,767,124,475	Printing
Publikasi dan Promosi	3,291,518,223	8,384,860,255	Promotion and Publication
Asuransi Kecelakaan Penumpang	2,687,020,021	7,553,191,091	Passenger Accident Insurance
Pengobatan	2,322,536,624	1,648,780,869	Medical
Perlengkapan Kantor	1,363,371,533	3,538,791,080	Offices Equipment

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

	2020 Rp	2019 Rp	
Inventaris	437,032,580	3,882,162,929	Supplies
Rapat Kerja & Koordinasi	782,612,444	447,225,339	Business Meetings and Coordination
Alat Tulis Kantor	129,513,688	762,328,385	Stationery
Lain-lain	4,224,670,030	2,679,847,737	Others
Sub jumlah	191,521,070,261	266,698,865,706	Sub total
Beban Umum dan Administrasi			General and Administrative Expenses
Beban Pegawai	120,506,666,932	170,179,912,220	Employee Expenses
Asuransi	22,091,289,302	18,219,531,694	Insurance
Imbalan Pascakerja	20,559,658,217	6,026,209,950	Post Employment Benefit
Kerumahaan	5,912,246,460	11,055,562,212	Housekeeping
Pemeliharaan	5,609,497,449	3,982,559,564	Maintenance
Pelatihan dan Rekrutmen	2,875,479,881	12,014,955,449	Training and Recruitment
Penyusutan (Catatan 13)	2,186,802,902	3,801,176,021	Depreciation (Note 13)
Pakaian Seragam	2,121,978,825	5,122,990,504	Uniform
Perlengkapan dan Peralatan	1,723,614,062	3,832,950,911	Tools and Equipment
Penggerak dan Penerangan	1,587,405,474	1,720,389,868	Generator and Lighting
Perjalanan Dinas	1,499,432,789	4,970,189,186	Business Travel
Amortisasi (Catatan 14)	1,297,850,675	3,005,474,892	Amortization (Note 14)
Konsultan	1,077,108,400	71,735,557	Consultant
Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 15)	951,998,149	--	Depreciation for Right of Use Asset (Note 15)
Air dan Telepon	639,429,078	481,128,420	Water and Telephone
Sewa	600,929,095	1,568,542,350	Rent
Alat Tulis Kantor	574,875,980	1,260,536,057	Stationery
Lain-lain	4,170,948,712	3,066,947,156	Others
Sub jumlah	195,987,212,382	250,380,792,011	Sub total
Jumlah	387,508,282,643	517,079,657,717	Total

33. Pendapatan Penggantian Subsidi PSO

33. PSO Subsidy Replacement Income

	2020 Rp	2019 Rp	
Selisih lebih perhitungan PSO Tahun 2019	3,347,477,241	--	Difference above PSO calculation on the Year 2019
Selisih lebih perhitungan PSO Tahun 2018	--	32,778,906,670	Difference above PSO calculation on the Year 2018
Jumlah	3,347,477,241	32,778,906,670	Total

Pendapatan (beban) penggantian PSO adalah selisih perhitungan pendapatan PSO menurut Perusahaan dibandingkan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selisih yang timbul antara jumlah PSO tercatat dengan pendapatan PSO menurut BPK dicatat pada periode laporan hasil audit diterima.

PSO subsidy replacement income (expense) is a difference of PSO income according to the Company's and according to the Supreme Audit Agency (SAA). The difference between the amount of PSO recorded and PSO revenue according to the SAA is recorded in the period of the audit report received.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Pendapatan PSO tahun 2019 menurut Perusahaan adalah Rp1.283.802.281.899, sedangkan pendapatan PSO menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rp1.287.149.759.140, sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.347.477.241.

According to the Company, PSO revenue in 2019 was IDR 1,283,802,281,899, while PSO income according to the Supreme Audit Agency (BPK) was Rp1,287,149,759,140, so there was a difference of Rp3,347,477,241.

Pendapatan PSO tahun 2018 menurut Perusahaan Rp1.133.718.540.658, sedangkan pendapatan PSO menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rp1.166.497.447.328, sehingga terdapat selisih sebesar Rp32.778.906.670.

According to the Company's PSO revenue on the year 2018 is Rp1,133,718,540,658, while PSO revenue according to the Supreme Audit Agency (SAA) is Rp1,166,497,447,328, therefore there is a difference of Rp32,778,906,670.

34. Pendapatan (Beban) Lain-lain

34. Others Income (Expenses)

	2020 Rp	2019 Rp	
Penghasilan Lain-lain			Other Income
Denda atas Kontrak	6,162,872,528	6,759,337,809	Penalty for Contract
Laba Selisih Kurs	--	2,652,269,590	Profit on foreign exchange
Pemulihan Cadangan Penurunan Nilai Piutang Usaha (Catatan 7)	--	50,000,000	Recovery of Impairment on Accounts Receivables (Note 7)
Kenaikan Nilai Investasi	45,483,311,700	--	Increase in Investment Value
Pemulihan Cadangan Penurunan Nilai Radio Kabin	1,079,508,961	--	Recovery of Retired Asset Cabine Radio
Lain-lain	1,253,362,763	683,004,108	Others
Sub Total	53,979,055,952	10,144,611,507	Sub Total
Beban Lain-lain			Other Expenses
Beban Pajak Lainnya (Catatan 21.a)	(924,347,371)	--	Other Tax Expenses (Notes 21.a)
Beban administrasi bank	(1,073,130,349)	(289,045,003)	Bank charges
Rugi Penghapusan Aset tetap	(1,079,508,961)	--	Loss in Asset Disposal
Cadangan Penurunan Nilai Piutang Usaha (Catatan 7)	(5,541,025,199)	(774,693,901)	Impairment on Accounts Receivables (Note 7)
Rugi selisih kurs	(6,786,506,100)	--	Loss on foreign exchange
Cadangan penurunan nilai investasi (Catatan 16)	--	(29,403,311,700)	Provision on impairment of investment expense (Note 16)
Cadangan penurunan nilai aset (Catatan 17)	--	(1,079,508,961)	Provision on impairment of assets expense (Note 17)
Lain-lain	(2,420,705,423)	(587,018,790)	Others
Sub Total	(17,825,223,403)	(32,133,578,355)	Sub Total
Jumlah	36,153,832,549	(21,988,966,848)	Total

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

35. Pendapatan (Beban) Keuangan		35. Finance Income (Expenses)	
	2020 Rp	2019 Rp	
Bunga Deposito	1.487.631.714	6.445.244.497	Deposit Interest Income
Jasa Giro	5.707.117.276	5.409.985.216	Current Account
Jumlah	7.194.748.990	11.855.229.713	Total
Bunga Pinjaman Sindikasi untuk Pembelian Sarana	(21.574.868.115)	(22.565.652.777)	Interest of Syndicated Loan for Purchasing EMU
Bunga Pinjaman Bank Jangka Pendek	(2.268.750.001)	--	Interest of Short Term Bank Loan
Bunga Liabilitas Sewa	(167.778.471)	--	Interest for Lease Liabilities
Jumlah	(24.011.396.587)	(22.565.652.777)	Total
36. Transaksi Signifikan dengan Pihak Berelasi		36. Significant Transactions with Related Parties	
Perusahaan merupakan bagian dari suatu kelompok usaha sebagaimana dijelaskan di bawah, dalam menjalankan operasinya berhubungan dan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Mengenai hubungan tersebut, terdapat kemungkinan adanya transaksi yang dilakukan dengan kondisi dan syarat yang tidak sama apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak ketiga. Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi sebagai berikut: a) Pemerintahan Republik Indonesia diwakili oleh Menteri BUMN merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN lain memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia. b) Perusahaan menempatkan dan meminjam dana pada bank-bank yang dimiliki Pemerintah dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga. c) Perusahaan yang mengadakan perjanjian dalam rangka usaha, dengan BUMN-BUMN lain merupakan entitas anak BUMN serta badan-badan lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang. d) Mempunyai anggota pengurus yang sama dengan entitas anak, yaitu Direksi Perusahaan menjadi Komisaris pada entitas anak.		The Company is a part of a business group as described below in performing its operations and transactions with related parties. With respect to relationship, there is possibilities of a transaction made with the conditions and terms which are not the same if the transaction is carried out with third parties. Nature of relationship with a related parties are as follows: a) The Government of Republic of Indonesia represented by the Minister of State-Owned Enterprises is the Company's shareholder and other state affiliates through a capital investment of the Government of Republic of Indonesia. b) The Government of Republic of Indonesia represented by the Minister of State-Owned Enterprises is the Company's shareholder and other state affiliates through a capital investment of the Government of Republic of Indonesia. c) The Company enters into business agreement with other state-owned enterprises or its subsidiaries or other authorized government's agencies. d) The Company enters into business agreement with other state-owned enterprises or its subsidiaries or other authorized government's agencies.	

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Berikut adalah transaksi dengan pihak berelasi yang material:

Below are the material transactions with related parties:

	2020 Rp	2019 Rp
<u>Bank (Catatan 5)/Banks (Note 5)</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	404,930,293,087	66,662,853,982
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	137,783,728,550	146,189,404,190
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	39,279,281,923	166,867,364,537
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	817,000	1,280,000
Jumlah/Total	581,994,120,560	379,720,902,709
% terhadap Jumlah Aset/ % to Total Assets	31.71%	20.88%
<u>Deposito on Call (Catatan 5)/Deposits on Call (Note 5)</u>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	30,000,000,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	30,000,000,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	5,000,000,000
Jumlah/Total	--	65,000,000,000
% terhadap Jumlah Aset/ % to Total Assets	--	3.57%
<u>Dana Dibatasi Penggunaannya (Catatan 6)/</u> <u>Restricted Fund (Note 6)</u>		
Rekening Giro dan Deposito/Bank Accounts and Time Deposits		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	120,537,913,802	94,759,350,044
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,251,921,702	5,960,077,533
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,251,049,514	5,918,658,082
Jumlah/Total	123,040,885,018	106,638,085,659
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/Allowance for Impairment Losses	(19,751,432)	--
Jumlah Bersih/Net Total	123,021,133,586	106,638,085,659
% terhadap Jumlah Aset/ % to Total Assets	6.70%	5.86%
<u>Piutang Usaha (Catatan 7)/Accounts Receivable (Note 7)</u>		
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	209,041,682,863	206,395,318,878
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Less: Allowance for Impairment Losses	(148,453,034,761)	(148,430,115,678)
Jumlah/Total	60,588,648,102	57,965,203,200
PT Railink	5,003,219,686	3,013,008,414
PT Reska Multi Usaha	1,250,000,000	3,750,000,000
PT Fintek Karya Nusantara	--	320,000,000
Jumlah/Total	6,253,219,686	7,083,008,414
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/Allowance for Impairment Losses	(5,157,183,768)	--
Jumlah - Neto/Total - Net	1,096,035,918	7,083,008,414
% terhadap Jumlah Aset/ % to Total Assets	11.73%	11.74%

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

	2020 Rp	2019 Rp
<u>Aset Keuangan Lancar Lainnya (Catatan 8)/</u>		
<u>Other Current Financial Assets (Note 8)</u>		
PT Railink	749,935,251	1,589,071,042
Jumlah - Neto/Total - Net	749,935,251	1,589,071,042
% terhadap Jumlah Aset/% to Total Assets	0.04%	0.09%
<u>Utang Usaha (Catatan 18)/Accounts Payable (Note 18)</u>		
PT Reska Multi Usaha	2,139,695,699	497,475,000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2,076,826,125	10,345,325,378
PT Kereta Api Pariwisata	1,291,898,489	2,423,511,894
PT Kereta Api Properti Manajemen	1,036,542,460	4,390,531,571
PT Nutech Integrasi	729,399,726	397,430,000
PT Sigma Cipta Caraka	479,600,000	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	250,000,000	250,000,000
PT Sigma Metrasys Solution	248,047,250	54,771,616
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	177,965,589	628,925,199
PT Asuransi Jiwa Inhealth	238,408,396	21,404,794
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	139,380,615	--
PT Telekomunikasi Selular (Persero) Tbk	93,772,800	--
PT Sucofindo (Persero)	--	501,832,100
Jumlah/Total	8,901,537,149	22,657,511,552
% terhadap Jumlah Liabilitas/% to Total Liabilities	1.10%	2.75%
<u>Pinjaman Jangka Panjang (Catatan 23)</u>		
<u>Long-Term Loans (Note 23)</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	87,211,547,027	62,778,710,001
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	87,211,547,027	62,778,710,001
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	87,211,547,027	62,778,710,001
Jumlah/Total	261,634,641,080	188,336,130,003
% terhadap Jumlah Liabilitas/% to Total Liabilities	32.47%	22.84%
<u>Utang Bank Jangka Pendek (Catatan 24)</u>		
<u>Short-Term Bank Loans (Note 24)</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	100,000,000,000	--
Jumlah/Total	100,000,000,000	--
% terhadap Jumlah Liabilitas/% to Total Liabilities	12.41%	--

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Rincian transaksi signifikan pendapatan, beban operasi dari pihak berelasi terhadap beban pokok pendapatan dan beban usaha pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Details of of significant revenues, operating expenses from related parties to cost of revenue and operating expenses as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

	2020 Rp	2019 Rp
<u>Beban Pokok Pendapatan/</u>		
<u>Cost of Revenue</u>		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	184.082.837.657	181.471.245.334
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	53.745.535.366	--
PT Kereta Api Pariwisata	46.665.245.896	--
PT Reska Multi Usaha	32.021.501.929	--
PT Kereta Api Properti Manajemen	4.783.347.432	--
PT Sigma Cipta Caraka	1.838.650.000	--
PT Sigma Metrasys Solution	1.314.156.250	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.030.200.000	1.887.606.897
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	784.950.243	462.671.398.923
PT Nutech Integrasi	171.878.476	--
Perum Percetakan Republik Indonesia	139.380.615	--
PT Telekomunikasi Selular	93.772.800	--
PT GMF Aero Asia	--	3.146.304.000
Jumlah/Total	326.671.456.664	649.176.555.154
% terhadap Jumlah Beban Pendapatan/ Cost of Revenue	23,27%	34,50%
<u>Beban Usaha/ Operating Expense</u>		
PT Kereta Api Pariwisata	48.351.156.419	37.477.413.590
PT Asuransi Jiwa Inhealth	22.091.289.302	18.219.531.694
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	7.087.517.804	7.395.754.081
PT Reska Multi Usaha	6.000.456.560	19.542.726.271
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1.378.752.298	--
PT Kereta Api Properti Manajemen	--	8.769.656.605
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	--	62.196.314.435
Jumlah/Total	84.909.172.383	153.601.396.676
% terhadap Jumlah Beban Usaha/ Operating Expense	21,91%	29,71%

Sifat transaksi hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Details of nature of related parties and types of transactions with related parties are as follow:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relationship	Sifat transaksi/ Nature of transaction
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pemegang Saham Perusahaan/ Stockholders of the Company	Piutang usaha, Pendapatan PSO, Utang usaha, Jasa sewa/ Account receivables, Account payables, Rent expense
PT Kereta Api Pariwisata	Entitas Sepengendali/Under Common Control Entity	Utang Usaha, Beban akomodasi hotel dan tiket perjalanan, Outsourcing/ Account payables and Travel expense, outsourcing
PT Kereta Api Properti Manajemen	Entitas Sepengendali/Under Common Control Entity	Utang usaha dan Transaksi jasa konstruksi/ Account payables and Construction services transaction
PT KA Logistik	Entitas Sepengendali/Under Common Control Entity	Biaya Pengangkutan/ Freight charges,

**PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

**PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Pihak-pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Sifat transaksi/ <i>Nature of transaction</i>
PT Railink	Entitas Sepengendali/ <i>Under Common Control Entity</i>	Aset keuangan lancar lainnya, Biaya listrik aliran atas/ <i>Other current financial assets, Electricity expense</i>
PT Reska Multi Usaha	Entitas Sepengendali/ <i>Under Common Control Entity</i>	Utang Usaha, Biaya kebersihan, <i>Outsourcing/ Account payables, Cleaning service fee, Outsourcing</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Related Entity with the Government</i>	Penempatan kas dan setara kas, Pemberian pinjaman jangka panjang, Pinjaman jangka pendek/ <i>Placement of cash and cash equivalents, Issuance of long-term loan, short term loan</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Related Entity with the Government</i>	Penempatan kas dan setara kas, Pemberian pinjaman jangka panjang Dana dibatasi penggunaannya/ <i>Placement of cash and cash equivalents Restricted cash, Issuance of long-term loan</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Related Entity with the Government</i>	Penempatan kas dan setara kas, dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya, Pemberian pinjaman jangka panjang/ <i>Placement of cash and cash equivalents, time deposits restricted funds, Issuance of long-term loan</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Related Entity with the Government</i>	Penempatan kas di bank/ <i>Placement of cash in bank</i>
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Related Entity with the Government</i>	Perawatan perangkat E-ticketing, Perawatan perangkat C-Vim, <i>Sharing revenue E-ticketing/ E-Ticketing maintenance, Vending Machines maintenance, E-Ticketing Cooperation</i>
PT Sygma Metrasys Solution	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Related Entity with the Government</i>	External IT support aplikasi SAP 2020/ <i>External IT support for SAP 2020 applications</i>
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Related Entity with the Government</i>	Pengadaan asuransi program pesangon/ <i>Payment of contribution for defined benefit plan</i>
PT Asuransi Jiwa Inhealth	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Related Entity with the Government</i>	Pengadaan program asuransi kesehatan/ <i>Payment of health insurance program</i>
PT Sigma Cipta Caraka	Entitas Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Related Entity with the Government</i>	Utang usaha, sewa data center/ <i>Account payables, rent data centre</i>
PT Fintek Karya Nusantara	Penyertaan saham/ <i>Investment in shares</i>	Piutang usaha, Pendapatan space iklan, <i>sharing infrastruktur/ Account receivables, Advertising space revenue, sharing infrastructure</i>

37. Perjanjian-perjanjian Penting

Pengelolaan Space Iklan di KRL

Pada tanggal 1 Februari 2019, berdasarkan perjanjian No. 005/HK-UM/KCI/II/2019 yang diamandemen dengan perjanjian No. 032/HK-UM/KCI/IV/2019 tanggal 29 April 2019, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Alternative Digital Media Group terkait dengan pengelolaan space iklan di KRL. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dari tanggal 1 Maret 2019 hingga 29 Februari 2024.

Pengadaan suku cadang KRL

Pada bulan Mei dan September 2018, PT KCI menandatangani perjanjian pengadaan *spare part heavy maintenance* for EMU JR 205, JR 203, EMU 6000, Metro 05 dan 5000 series dengan JR East Rail Car Technology and Maintenance Co Ltd. Sampai dengan 31 Desember 2020, belum semua *spare part* diterima oleh Perusahaan.

Pengadaan KRL

Pada bulan Januari 2018, PT KCI menandatangani perjanjian penyediaan dan penyerahan KRL bukan baru seri JR 205 dengan Jagro Trans Co Ltd KSO PT Citra Selaras Mandiri Logistik. Sampai dengan 31 Desember 2020, belum semua KRL diterima oleh Perusahaan.

37. Significant Agreements

Advertising Space Management in KRL

On February 1, 2019, based on agreement No. 005/ HK-UM/KCI/II/2019 which amended by agreement No. 032/HK-UM/KCI/IV/2019 dated April 29, 2019, The Company entered into an agreement with PT Alternative Digital Media Group related to the management of advertising space on KRL. This agreement is valid for 5 (five) years from March 1, 2019 to February 29, 2024.

Procurement of spare parts EMU

In May and September 2018, PT KCI entered into an agreement on supply of heavy maintenance spare part for EMU JR 205, JR 203, EMU 6000, Metro 05, and 5000 series with JR East Rail Car Technology and Maintenance Co Ltd. As of December 31, 2020, not all spare parts have been received by the Company.

Procurement of EMU

In January 2018, PT KCI entered into an agreement on supply and delivery of Used Electric Multiple Unit JR 205 with Jagro Trans Co Ltd KSO PT Citra Selaras Mandiri Logistik. As of December 31, 2020, not all spare parts have been received by the Company.

**PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

**Branding Kartu KCI dan Top Up KMT serta
Update Relasi THB melalui Layanan Pay Pro**

Pada tanggal 22 Februari 2017 berdasarkan perjanjian No. 013/HK-BA/KCJ/II/2017 dan No. 084/AM0-AME/LGL/17 yang diamandemen dengan perjanjian No. 016/AM0-AMEK/LGL/17 Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Indosat Tbk terkait dengan penyediaan layanan paypro, *Top Up* dan *Loading KMT* pada EDC Indosat. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

**Branding Kartu KCI dan Top Up KMT melalui
Layanan Pay Pro**

Pada tanggal 20 Desember 2017 berdasarkan perjanjian No. 170/HK-UM/KCI/XII/2017 dan No. 21050/LGL-SPI/PKS/XI/2017 Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Solusi Pasti Indonesia terkait dengan penyediaan *Top Up KMT* dengan layanan paypro dan *branding* merek paypro dan *Loading KMT* pada EDC PT Solusi Pasti Indonesia. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

**Penyelenggaraan Kereta Api Bandara
Soekarno-Hatta**

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Perusahaan dengan PT Kereta Commuter Indonesia No. RL/DIR/MOU/075/IX/2019 tanggal 30 September 2019, bersepakat untuk bekerja sama dalam pemanfaatan 4 Train Set Kereta Api Bandara Soekarno Hatta. Jangka waktu pelaksanaan berlaku sampai dengan 30 September 2020.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Perusahaan dengan PT Kereta Commuter Indonesia No. RL/DIR/MOU/001/I/2021 tanggal 11 Januari 2021, bersepakat untuk bekerja sama terkait dalam Kerjasama Pemanfaatan Train Set Kereta Api Bandara Soekarno Hatta. Jangka waktu pelaksanaan berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun atau sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama yang mengatur lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, mana yang lebih dahulu.

**PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

**Branding KCI Card and Top Up KMT as well as
THB Relay Updates through Pay Pro**

On February 22, 2017 based on agreement No. 013/HK-BA/KCJ/II/2017 and No. 084/AM0-AME/LGL/17 which amended by agreement No. 016/AM0-AMEK/LGL/17, the Company entered into an agreement with PT Indosat Tbk regarding the provision of paypro service, *Top Up* and *Loading KMT* on Indosat EDC. This agreement is valid for 5 (five) years from the date of signing the agreement.

**Branding KCI Card and Top Up KMT through
Pay Pro**

On December 20, 2017 based on agreement No. 170/HK-UM/KCI/XII/2017 and No. 21050/LGL-SPI/PKS/XI/2017, the Company entered into an agreement with PT Solusi Pasti Indonesia related to the provision of *Top Up KMT* with paypro brand and branding paypro brand and *KMT Loading* at EDC PT Solusi Pasti Indonesia. This agreement is valid for 5 (five) years from the date of signing the agreement.

Operational of Soekarno-Hatta Airport Railway

Based on the Memorandum of Understanding between the Company and PT Kereta Commuter Indonesia No. RL/DIR/MOU/075/IX/2019 dated September 30, 2019, agreed to cooperate in assisting 4 Soekarno Hatta Airport Railway Train Sets. The period of implementation is valid until September 30, 2020.

Based on the Memorandum of Understanding between the Company and PT Kereta Commuter Indonesia No. RL/DIR/MOU/001/I/2021 dated January 11, 2021, agreed to cooperate in relation to the Cooperation of the Soekarno Hatta Bandara Train Set Train. The implementation period is valid for a period of 1 (one) year or until the signing of the Cooperation Agreement which further regulates technical implementation, whichever is earlier.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

**38. Instrumen Keuangan dan Manajemen
Risiko Keuangan**

**a. Faktor dan kebijakan manajemen risiko
keuangan**

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar. Perusahaan mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.
- Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi jika posisi arus kas menunjukkan penghasilan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek.
- Risiko pasar terdiri atas:
 - Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.
 - Risiko suku bunga terdiri dari risiko suku bunga atas nilai wajar, yaitu risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar dan risiko suku arus kas di masa datang akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Manajemen telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan secara keseluruhan. Program manajemen risiko keuangan berfokus untuk meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak buruk pada kinerja keuangan Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

Berikut merupakan tabel aset keuangan dan liabilitas keuangan:

**38. Financial Instruments and Financial Risk
Management**

**a. Financial risk management factors and
policies**

In its operating, investing and financing activities, the Company is exposed to the following financial risks: credit risk, liquidity risk and market risk. The Company defines those risks as follows:

- *Credit risk represents risk due to the possibility that a customer will not repay all or a portion of a receivable or will not repay in a timely manner and therefore will cause a loss to the Company.*
- *Liquidity risk is the risk that occurs when the cash flows position indicates that short term revenue is insufficient to cover short term expenditures.*
- *Market risk consist of:*
 - *Currency risk represents the fluctuation risk in the value of financial instruments that caused the changes foreign exchange currency notes.*
 - *Interest rate risk consist of interest rate risk at fair value, which is the fluctuation risk of the financial instruments value that caused of the interest market rates and interest rate risk on cash flows, the cash flows risk in the future that will fluctuated because of interest market rate changes.*

In order to effectively manage those risks, Management has approved some strategies for the financial risks management, which are in line with Company's objectives. Financial risk management program focuses to minimize potential loss which adversely impact on the Company's financial performance. These guidelines set up objectives and action to be taken in order to manage the financial risks that the Company faced.

The major guidelines of this policy are all financial risk management activities carried out on a prudent, consistent basis, and following the best market practices.

Below is a table of financial assets and financial liabilities:

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

	2020 Rp	2019 Rp	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan Setara Kas	611,613,812,355	461,073,443,002	Cash and Cash Equivalents
Dana Dibatasi Penggunaannya	124,272,213,100	112,584,186,192	Restricted Fund
Piutang Usaha	70,079,707,710	107,112,837,569	Accounts Receivable
Aset Keuangan Lancar Lainnya	917,880,758	1,721,076,019	Current Financial Assets
Pendapatan Masih Harus Diterima	13,190,487	240,595,891	Accrued Income
Investasi Jangka Panjang	53,080,000,000	7,596,688,300	Long Term Investment
Jumlah	859,976,804,410	690,328,826,973	Total
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang Usaha	96,394,739,647	225,364,933,662	Accounts Payable
Beban Akrua	130,228,720,699	103,674,069,492	Accrued Expenses
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	7,091,470,534	7,499,173,162	Other Short Term Financial Liabilities
Bagian Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Utang Bank	44,581,852,392	70,439,061,584	Current Maturity of Long Term Debt Bank Loan
Bagian Liabilitas Jangka Panjang Setelah dikurangi yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Utang Bank	304,264,335,715	180,675,778,419	Long Term Debt net of Current Maturity Bank Loan
Jumlah	582,561,118,987	587,653,016,319	Total

Risiko kredit

Risiko kredit Perusahaan terutama melekat pada rekening bank, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Perusahaan tidak memiliki konsentrasi risiko kredit yang signifikan. Perusahaan memiliki kebijakan untuk memastikan bahwa penyerahan jasa hanya dilakukan kepada konsumen yang memiliki sejarah kredit yang baik. Selain itu, posisi piutang pelanggan dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan.

Perusahaan mengelola risiko kredit yang terkait dengan rekening bank dan piutang dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Untuk bank, hanya pihak-pihak independen dengan predikat bank yang diterima.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

Credit risk

Credit risk of the Company primarily inherent at bank accounts, trade receivable and other receivables.

The Company does not have significant concentration of credit risk. The Company has a policy to ensure that services are only done with consumers who have good credit history. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce exposure to bad debts.

At the reporting date, the Company's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the statements of financial position.

The Company manages credit risk exposed from its deposits with banks and receivables by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty. For banks, only independent parties with a good rating are accepted.

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about counterparty defaults rates:

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Tabel di bawah ini merangkum analisis umur aset keuangan:

The tables below summarized the aging analysis of financial assets:

2020						
1 - 30 hari/ days	31 - 60 hari/ days	61 - 90 hari/ days	> 90 hari/ days	Jumlah/ Total		
Aset Keuangan						Financial Assets
Kas dan Setara Kas	611,613,812,355	--	--	--	611,613,812,355	Cash and Cash Equivalents
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	124,272,213,100	--	--	--	124,272,213,100	Other Current Financial Assets
Piutang Usaha	49,565,932,734	14,899,759,398	1,512,705,000	4,101,310,578	70,079,707,710	Accounts Receivables
Aset Keuangan Lancar Lainnya	--	--	--	917,880,758	917,880,758	Current Financial Assets
Pendapatan Masih Harus Diterima	13,190,487	--	--	--	13,190,487	Accrued Income
Total Aset Keuangan	785,465,148,676	14,899,759,398	1,512,705,000	5,019,191,336	806,896,804,410	Total Financial Assets

2019						
1 - 30 hari/ days	31 - 60 hari/ days	61 - 90 hari/ days	> 90 hari/ days	Jumlah/ Total		
Aset Keuangan						Financial Assets
Kas dan Setara Kas	461,073,443,002	--	--	--	461,073,443,002	Cash and Cash Equivalents
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	112,584,186,192	--	--	--	112,584,186,192	Other Current Financial Assets
Piutang Usaha	61,611,917,854	33,946,083,471	1,537,793,893	10,017,042,351	107,112,837,569	Accounts Receivables
Aset Keuangan Lancar Lainnya	--	--	--	1,721,076,019	1,721,076,019	Current Financial Assets
Pendapatan Masih Harus Diterima	240,595,891	--	--	--	240,595,891	Accrued Income
Total Aset Keuangan	635,510,142,939	33,946,083,471	1,537,793,893	11,738,118,370	682,732,138,673	Total Financial Assets

Risiko likuiditas

Perusahaan mempunyai pinjaman yang sebagian besar merupakan pinjaman jangka panjang. Perusahaan mengantisipasi risiko likuiditas ini dengan mensyaratkan tersedianya kas dan setara kas dalam jumlah yang memadai untuk melunasi pinjaman yang jatuh tempo, juga mencadangkan dana untuk pembayaran bunga atas pinjaman.

Liquidity risk

The Company has borrowings which are mainly long term. To anticipate this liquidity risk, the Company requires that sufficient cash and cash equivalents are available to meet payment of loans and its interests.

Pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Mapping of financial assets and liabilities within certain period (*maturity buckets*) based on the remaining term to maturity (*remaining maturity*) on December 31, 2020 and 2019, is as follows:

2020					
Tidak Ditentukan/ Undetermined	0 - 1 Tahun/ 0 - 1 Year	> 1 Tahun/ > 1 Years	Jumlah/ Total		
Utang Usaha	--	96,394,739,647	--	96,394,739,647	Accounts Payables
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	7,091,470,534	--	7,091,470,534	Other Short Term Financial Liabilities
Beban Akrua	--	130,228,720,699	--	130,228,720,699	Accrued Expenses
Bagian Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	--	44,581,852,392	--	44,581,852,392	Current Maturity of Long Term Debt
Utang Bank	--	--	--	--	Bank Loan
Bagian Liabilitas Jangka Panjang Setelah dikurangi yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	--	304,264,335,715	--	304,264,335,715	Long Term Debt net of Current Maturity
Utang Bank	--	--	--	--	Bank Loan
Jumlah	--	278,296,783,272	304,264,335,715	582,561,118,987	Total

2019					
Tidak Ditentukan/ Undetermined	0 - 1 Tahun/ 0 - 1 Year	> 1 Tahun/ > 1 Years	Jumlah/ Total		
Utang Usaha	--	225,364,933,662	--	225,364,933,662	Accounts Payables
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	7,499,173,162	--	7,499,173,162	Other Short Term Financial Liabilities
Beban Akrua	--	103,674,069,492	--	103,674,069,492	Accrued Expenses
Bagian Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	--	70,439,061,584	--	70,439,061,584	Current Maturity of Long Term Debt
Utang Bank	--	--	--	--	Bank Loan
Bagian Liabilitas Jangka Panjang Setelah dikurangi yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun	--	180,675,778,419	--	180,675,778,419	Long Term Debt net of Current Maturity
Utang Bank	--	--	--	--	Bank Loan
Jumlah	--	406,977,237,900	180,675,778,419	587,653,016,319	Total

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Risiko Suku Bunga Pasar

Tabel di bawah ini merupakan tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk posisi aset dan liabilitas keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019.

Interest Rate Risk

The table below represents the average of interest rate per year for the financial assets and financial liabilities as of December 31, 2020 and 2019.

2020							
Tingkat Bunga Mengambang/ Floating Rate		Tingkat Bunga Tetap/ Fixed Rate		Tanpa Bunga/ Non Interest Bearing	Total		
Kurang Dari Satu Tahun/ Less than One Year	Lebih Dari Satu Tahun/ More than One Year	Kurang Dari Satu Tahun/ Less than One Year	Lebih Dari Satu Tahun/ More than One Year				
Aset Keuangan							Financial Assets
Kas dan Setara Kas	602,601,281,455	--	--	--	9,012,530,900	611,613,812,355	Cash on Hand and in Banks
Dana Dibatasi Penggunaannya	--	--	--	--	124,272,213,100	124,272,213,100	Restricted Fund
Piutang Usaha	--	--	--	--	70,079,707,710	70,079,707,710	Trade Receivables
Aset Keuangan Lancar Lainnya	--	--	--	--	917,880,758	917,880,758	Current Financial Asset
Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	--	--	--	--	13,190,487	13,190,487	Accrued Income
Investasi Jangka Panjang	--	--	--	--	53,080,000,000	53,080,000,000	Long Term Investment
Total Aset Keuangan	602,601,281,455	--	--	--	257,375,522,955	859,976,804,410	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan							Financial Liability
Utang Usaha	--	--	--	--	96,394,739,647	96,394,739,647	Trade Payables
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	--	--	7,091,470,534	7,091,470,534	Other Short Term Financial Liabilities
Beban Akrua	--	--	--	--	130,228,720,699	130,228,720,699	Accrued Expenses
Bagian Liabilitas Jangka Panjang							Current Maturity
Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun							of Long Term Debt
Utang Bank	44,581,852,392	--	--	--	--	44,581,852,392	Bank Loan
Liabilitas Sewa	--	--	--	--	728,774,407	728,774,407	Lease Liabilities
Bagian Liabilitas Jangka Panjang							Long Term Debt
Setelah dikurangi yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun							net of Current Maturity
Utang Bank	--	304,264,335,715	--	--	--	304,264,335,715	Bank Loan
Liabilitas Sewa	--	--	--	--	796,125,012	796,125,012	Lease Liabilities
Total Liabilitas Keuangan	44,581,852,392	304,264,335,715	--	--	235,239,830,299	584,086,018,406	Total Financial Liability
Neto	558,019,429,063	(304,264,335,715)	--	--	22,135,692,656	275,890,786,004	Net

2019							
Tingkat Bunga Mengambang/ Floating Rate		Tingkat Bunga Tetap/ Fixed Rate		Tanpa Bunga/ Non Interest Bearing	Total		
Kurang Dari Satu Tahun/ Less than One Year	Lebih Dari Satu Tahun/ More than One Year	Kurang Dari Satu Tahun/ Less than One Year	Lebih Dari Satu Tahun/ More than One Year				
Aset Keuangan							Financial Assets
Kas dan Setara Kas	445,672,031,802	--	--	--	15,401,411,200	461,073,443,002	Cash on Hand and in Banks
Dana Dibatasi Penggunaannya	--	--	--	--	112,584,186,192	112,584,186,192	Restricted Fund
Piutang Usaha	--	--	--	--	107,112,837,569	107,112,837,569	Trade Receivables
Aset Keuangan Lancar Lainnya	--	--	--	--	1,721,076,019	1,721,076,019	Current Financial Asset
Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	--	--	--	--	240,595,891	240,595,891	Accrued Income
Investasi Jangka Panjang	--	--	--	--	7,596,688,300	7,596,688,300	Long Term Investment
Total Aset Keuangan	445,672,031,802	--	--	--	244,656,795,171	690,328,826,973	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan							Financial Liability
Utang Usaha	--	--	--	--	225,364,933,662	225,364,933,662	Trade Payables
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	--	--	--	--	7,499,173,162	7,499,173,162	Other Short Term Financial Liabilities
Beban Akrua	--	--	--	--	103,674,069,492	103,674,069,492	Accrued Expenses
Bagian Liabilitas Jangka Panjang							Current Maturity
Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun							of Long Term Debt
Utang Bank	70,439,061,584	--	--	--	--	70,439,061,584	Bank Loan
Bagian Liabilitas Jangka Panjang							Long Term Debt
Setelah dikurangi yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun							net of Current Maturity
Utang Bank	--	180,675,778,419	--	--	--	180,675,778,419	Bank Loan
Total Liabilitas Keuangan	70,439,061,584	180,675,778,419	--	--	336,538,176,316	587,653,016,319	Total Financial Liability
Neto	375,232,970,218	(180,675,778,419)	--	--	(91,881,381,145)	102,675,810,654	Net

Perusahaan menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga, dimana semua variabel lainnya dianggap tetap, terhadap laba Perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (melalui dampak atas suku bunga suku bunga JIBOR untuk pinjaman dalam Rupiah).

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk nonderivatif pada akhir tahun pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir tahun pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan sebesar 0,5% digunakan ketika melaporkan risiko

The Company demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates, with all other variables held constant, of the Company's profit for the period ended December 31, 2020 and 2019 (through the impact on the floating rate borrowings which is based on on JIBOR for Rupiah borrowings)

The sensitivity analysis below has been determined based on the exposure to interest rates for non-derivative instruments at the end of the reporting year. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding for the whole year. A 0.5 % increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

suku bunga secara internal kepada manajemen kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

personnel and represents management's assessment of the reasonable possible change in interest rates.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jika tingkat suku bunga atas utang bank 0,5% lebih tinggi/lebih rendah dengan asumsi semua variabel konstan, laba setelah pajak dalam tahun berjalan akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar Rp1.744.230.941 (31 Desember 2019: Rp1.255.574.200).

As of December 31, 2020 and 2019, if interest rates on bank loans had been 0.5% lower/higher with all other variables held constant, the post-tax profit for the year would have been Rp1,744,230,941 (December 31, 2019 Rp1,255,574,200).

b. Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

b. Fair Value Estimation

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

The fair value of financial assets and liabilities and their carrying amounts are as follows:

	2020		2019		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan					Financial Assets
Pinjaman dan Piutang					Loan and Receivables
Kas dan Setara Kas	611,613,812,355	611,613,812,355	461,073,443,002	461,073,443,002	Cash and Cash Equivalent
Dana Dibatasi Penggunaannya	124,272,213,100	124,272,213,100	112,584,186,192	112,584,186,192	Restricted Fund
Piutang Usaha	70,079,707,710	70,079,707,710	107,112,837,569	107,112,837,569	Accounts Receivables
Aset Keuangan Lancar Lainnya	917,880,758	917,880,758	1,721,076,019	1,721,076,019	Current Financial Asset
Pendapatan Masih Harus Diterima	13,190,487	13,190,487	240,595,891	240,595,891	Accrued Income
Investasi Jangka Panjang	53,080,000,000	53,080,000,000	7,596,688,300	7,596,688,300	Long Term Investment
Jumlah	859,976,804,410	859,976,804,410	690,328,826,973	690,328,826,973	Total
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan					Financial Liabilities Measured at Amortized
Diamortisasi					Measured
Utang Usaha	96,394,739,647	96,394,739,647	225,364,933,662	225,364,933,662	Accounts Payables
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	7,091,470,534	7,091,470,534	7,499,173,162	7,499,173,162	Other Short Term Financial Liabilities
Beban Akrua	130,228,720,699	130,228,720,699	103,674,069,492	103,674,069,492	Accrued Expenses
Bagian Liabilitas Jangka Panjang					Current Maturity
Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun					of Long Term Debt
Utang Bank	44,581,852,392	44,581,852,392	70,439,061,584	70,439,061,584	Bank Loan
Bagian Liabilitas Jangka Panjang Setelah dikurangi yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun					Long Term Debt net of Current Maturity
Utang Bank	304,264,335,715	304,264,335,715	180,675,778,419	180,675,778,419	Bank Loan
Jumlah	582,561,118,987	582,561,118,987	587,653,016,319	587,653,016,319	Total

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan

Tabel berikut ini memberikan analisis dari instrumen keuangan yang diukur setelah pengakuan awal sebesar nilai wajar, dikelompokkan ke Tingkat 1 sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar diamati.

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasi (tak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik

Fair value measurements recognised in the statement of financial position

The following table provides an analysis of financial instruments that are measured subsequent to initial recognition at fair value, grouped into Levels 1 to 3 based on the degree to which the fair value is observable.

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability,

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga).

- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang tidak dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).

- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the assets or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

2020				
Tingkat 1/ Level 1 Rp	Tingkat 2/ Level 2 Rp	Tingkat 3/ Level 3 Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	
Aset keuangan				Financial assets
Nilai wajar melalui laba-rugi				Fair value through profit or loss
Investasi jangka panjang				Long Term Investment
--	--	53,080,000,000	53,080,000,000	
Jumlah	--	53,080,000,000	53,080,000,000	Total
2019				
Tingkat 1/ Level 1 Rp	Tingkat 2/ Level 2 Rp	Tingkat 3/ Level 3 Rp	Nilai Wajar/ Fair Value Rp	
Aset keuangan				Financial assets
Nilai wajar melalui laba-rugi				Fair value through profit or loss
Investasi jangka panjang				Long Term Investment
--	--	7,596,688,300	7,596,688,300	
Jumlah	--	7,596,688,300	7,596,688,300	Total

c. Manajemen Permodalan

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham. Dalam rangka mengelola struktur modal, Perusahaan mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/mengurangi jumlah pinjaman.

Perusahaan mengelola risiko ini dengan memonitor rasio utang terhadap ekuitas, yaitu per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 0,78 dan 0,83 dari maksimum yang dipersyaratkan sebesar 3 kali.

c. Capital management

The objective of the Company's capital management is to cover the Company's capability in maintaining its going concern for consistently delivering value to the shareholders. In order to manage its capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or increase/decrease loan.

The Company manages the risk through monitoring Debt to Equity as of December 31, 2020 and 2019 amounting to 0.78 and 0.83 of the maximum required 3 times, respectively.

39. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu: PSAK 73 (Amandemen 2020): Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19.

39. New Accounting Standard and Interpretation of Standard which Has Issued but Not Yet Effective

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2020.

Amendments to standard effective for periods beginning on or after June 1, 2020, with early adoption is permitted is: PSAK 73 (Amendment 2020): Leases regarding Rent Concessions related to Covid-19.

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2.

Amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual; dan
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak.

Standar baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 112: Accounting for Endowments;
- PSAK 22 (Amendment 2019): Business Combinations regarding Definition of Business;
- PSAK 110 (Improvement 2020): Accounting for Sukuk;
- PSAK 111 (Improvement 2020): Accounting for Wa'd; and
- Amendment PSAK 71, Amendment PSAK 55, Amendment PSAK 60, Amendment PSAK 62, and Amendment PSAK 73 regarding Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2.

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks; and
- Amendments PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs.

New standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 74: Insurance Contract.

As of the issuance date of these financial statement is authorized, the Company is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

40. Informasi Tambahan Terkait Arus Kas

40. Additional Information Related to Cash Flows

Tabel dibawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

The table below showed a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2020 and 2019 as follows:

2020					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Arus Kas/ Cash Flow	Non Kas/ Non-cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Utang Bank Jangka Pendek	--	100,000,000,000	--	100,000,000,000	Short Term Bank Loans
Utang Bank Jangka Panjang	251,114,840,003	97,731,348,102	--	348,846,188,105	Long Term Bank Loans
Liabilitas Sewa	--	(834,900,000)	2,359,799,419	1,524,899,419	Lease Liabilities
2019					
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Arus Kas/ Cash Flow Rp	Non Kas/ Non-cash Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Utang Bank Jangka Panjang	200,643,821,365	50,471,018,638	--	251,114,840,003	Long Term Bank Loans

**PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

**PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

41. Peristiwa Penting Lainnya

Dampak Darurat Bencana Wabah Virus Corona

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona" setelah ditemukannya beberapa orang yang teridentifikasi terpapar virus corona. Kondisi darurat ini, kemudian diikuti dengan kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan dan mobilitas masyarakat untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Di sisi lain, pemerintah menugaskan operator transportasi agar tetap beroperasi untuk mendukung mobilitas masyarakat pada sektor-sektor yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Berdasarkan kondisi di atas, manajemen melakukan kajian dampak yang ditimbulkan atas kondisi ini, sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan dan mobilitas masyarakat mulai tanggal 16 Maret 2020 memberikan dampak terhadap pendapatan Perusahaan karena volume penumpang KRL mengalami penurunan yang signifikan.
2. Dengan tetap beroperasinya KRL, Perusahaan perlu melakukan upaya tambahan untuk mendukung program pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 melalui penerapan *physical distancing* di kereta maupun di stasiun, penyediaan fasilitas pengecekan suhu badan, melakukan disinfeksi di kereta maupun di stasiun, dan hal-hal lainnya.

Penurunan volume penumpang KRL dan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 telah berdampak buruk terhadap kinerja keuangan Perusahaan mulai awal tahun 2020.

Dalam menghadapi kondisi tersebut di atas, Manajemen telah membuat rencana dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan efisiensi biaya yang tidak berkaitan dengan keselamatan perjalanan KRL.
2. Melaksanakan perubahan/addendum kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) agar dampak buruk penurunan volume penumpang sebagian dapat ditanggung oleh pemerintah.
3. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan kebijakan pemerintah.

41. Other Important Event

Effect of Emergency Conditions Due to Corona Virus

On early 2020, National Agency for Disaster Management of the Republic of Indonesia announced the enactment of "The Specific Emergency Disasters Corona Virus Outbreak Status" after the discovery of several people who were identified as being affected by the Corona Virus (Covid-19). This emergency condition leads to the issuance of government's policy to limit public activities and mobility to prevent the spread of Covid-19 virus. On the other hand, the government has assigned transportation operator to remains operating to support mobility of people from sectors which has been determined by the government.

Based on the above condition, management has assess the impact arising due to this condition, which are:

- 1. Government's policy to limit public activities and mobility starting March 16, 2020 has affected the Company's revenue due to the significant decrease of KRL's passenger volume.*
- 2. With the KRL remains operating, the Company needs to perform an additional efforts to support the government's program in preventing the spread of Covid-19 through the implementation of physical distancing on trains and stations, providing body temperature checking facilities, disinfect trains and stations, etc.*

The decrease of KRL's passenger volume and the effort in preventing the spread of Covid-19 has negatively impacts the Company's financial performance on early 2020.

On dealing with the above condition, the Company has compiled the following plans and steps, which are:

- 1. Perform efficiency of cost which unrelated to the KRL's travel safety.*
- 2. Implement changes/amendments to the Public Service Obligation (PSO) contract so the negative impact on the decrease of passenger's volume can be partly borne by the government.*
- 3. Perform business activities with strict health protocols in accordance to the government's policy.*

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)

for the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(In Full Rupiah)

Manajemen berkeyakinan bahwa rencana yang disusun dan langkah-langkah yang dilaksanakan tersebut di atas dapat berjalan secara efektif.

The management believes that plans and steps compiled above can be effectively executed.

Manajemen menyatakan bahwa Dampak dari wabah virus corona (Covid-19) pada awal tahun 2020 sampai tanggal laporan terbit terhadap Perusahaan adalah material.

Management states that the impact of the Corona Virus Outbreak (Covid-19) on early 2020 until the date of report publication towards the Company is material.

42. Tanggung Jawab dan Otorisasi
Penerbitan Laporan Keuangan

42. Responsibilities and Authorization For
Issuance of The Financial Statements

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit 9 Februari 2021.

The management of the Company is responsible for the presentation and content of the financial statements which authorized for issuance on February 9, 2021.

2020

Laporan Tahunan
Annual Report



Stasiun Juanda, Jl. Ir. H. Juanda I
Jakarta Pusat 10120 Indonesia
Telepon: 021-3453535
Call Center: 121/021-121
kci@krl.co.id

www.krl.id

